

**PERATURAN DAERAH
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2024**



GUBERNUR LAMPUNG

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 17 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 – 2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 65 ayat (1) huruf c, Pasal 263 ayat (2), Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamankan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2045;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 – 2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Ruang lingkup RPJPD meliputi :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis;
- d. visi dan misi daerah;
- e. arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
- f. penutup.

(2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a. arah kebijakan periode 2025-2029;
- b. arah kebijakan periode 2030-2034;
- c. arah kebijakan periode 2035-2039; dan

- d. arah kebijakan periode 2040-2045.
- (3) Arah kebijakan pada RPJPD periode sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan sebagai dasar penyelarasan tujuan RPJMD.
- (4) Uraian RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD berfungsi sebagai :

- a. pedoman dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra perangkat daerah, Renja perangkat daerah, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. pedoman dalam perumusan visi, misi dan program calon Gubernur.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 - 11 - 2024
Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

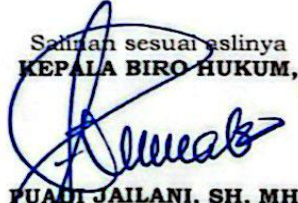
SAMSUDIN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 - 11 - 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

FREDY SM

Sahutan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUATI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 17
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (17-286/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 – 2045

I. UMUM

Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan demi terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia secara terus menerus melakukan pembangunan di segala aspek, baik sektor ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, maupun pertahanan keamanannya. Dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Untuk mencapai sasaran di Tahun 2045, diperlukan kontribusi pembangunan tingkat lokal dan nasional secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat serta semua pihak terkait sesuai peran dan kewenangan masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah.

Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045 dimaksud sejalan dengan tujuan Pembangunan daerah yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah. RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJPD Provinsi Lampung dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Lampung untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Lampung. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Lampung menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 Provinsi Lampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 559

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2024

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun; yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Menjelang berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025, baik ditingkat nasional maupun daerah; maka sejak tahun 2023 yang lalu seluruh jenjang pemerintahan, yang dimulai pada ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota telah menjalani tahapan dan proses penyusunan RPJP Tahun 2025-2045. Dengan memperhatikan arahan pemerintah pusat, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045; maka penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi ditargetkan akan selesai pada bulan Agustus tahun 2024. Hal yang juga penting, bahwa pada bulan November 2024 mendatang kita akan melaksanakan hajatan demokrasi, yaitu Pilkada Serentak. Pada sisi perencanaan, maka pemerintah provinsi/kabupaten/kota harus menyelesaikan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 dengan segera, yang tentunya akan digunakan oleh para Calon Kepala Daerah sebagai acuan dalam menyusun visi dan misi pembangunan ke depan.

Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa Provinsi Lampung sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengisi kemerdekaan dengan berbagai aspek pembangunan secara menyeluruh sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan rakyat Lampung tidak menyurutkan semangat untuk terus bekerja untuk mewujudkan tujuan bernegara. Beragam dinamika selama mengisi kemerdekaan tersebut telah menjadi pelajaran berharga untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Pemerintah Provinsi Lampung Cq. Bappeda Provinsi Lampung telah melaksanakan tahapan dan proses penyusunan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 dengan melibatkan perwakilan elemen utama pemangku kepentingan (*stake holders*) pembangunan guna memperoleh masukan untuk penyempurnaannya. Secara substansi RPJPD ini memuat : Pokok-pokok Gambaran Umum Kondisi Daerah dan Capaian Pembangunan pada periode dua dekade terakhir, Isu Strategis dan Permasalahan; Visi dan Misi; Arah Kebijakan, Tahapan dan Sasaran Pokok, Indikator beserta Target pembangunan untuk 20 (dua puluh tahun) ke depan.

Dengan mengusung **Visi Lampung 2045 “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan”**, pembangunan Lampung ke depan juga dikonstruksikan untuk mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” dan cita-cita luhur perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 menjadi negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Selanjutnya, membangun masa depan juga perlu menggunakan paradigma baru. Reformasi saja tidak cukup. Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, Lampung juga harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen masyarakat Lampung untuk mendorong kemajuan. Visi Lampung 2025-2045 dituangkan dalam **8 Misi Pembangunan**, yaitu : 1)Transformasi Sosial; 2)Transformasi Ekonomi; 3)Transformasi Tata Kelola; 4)Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substantial dan Stabilitas EkonomiMakro Daerah; 5)Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; 6)Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan; 7)Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan 8)Kesinambungan Pembangunan.

Bandar Lampung, 28 November 2024.
Pj. Gubernur Lampung,

Dr. Drs. SAMSUDIN, S.H., M.H., M.Pd

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2 DASAR HUKUM.....	I-6
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA.....	I-9
1.4 RUANG LINGKUP.....	I-11
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-11
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN.....	I-12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	II-1
2.1.1 Geografi.....	II-1
2.1.1.1 Letak Geografis dan Wilayah Administrasi.....	II-1
2.1.1.2 Tinjauan Terhadap KLHS RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045.....	II-3
2.1.1.3 Daya Dukung Lingkungan Hidup.....	II-3
2.1.1.4 Jasa Lingkungan Hidup.....	II-9
2.1.1.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.....	II-21
2.1.1.6 Potensi Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA).....	II-24
2.1.1.7 Kerentanan dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim.....	II-36
2.1.1.8 Resiko Bencana.....	II-43
2.1.1.9 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-50
2.1.2 Demografi.....	II-71
2.1.2.1 Kependudukan.....	II-71
2.1.2.2 Modal Manusia.....	II-76
2.1.2.3 Keragaman Sosial dan Budaya menjadi Kekuatan Pembangunan.....	II-88
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	II-91
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	II-91
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya.....	II-109
2.3 ASPEK DAYA SAING.....	II-113
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	II-113
2.3.2 Daya Saing SDM.....	II-129
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah.....	II-131
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi.....	II-166
2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM.....	II-173
2.4.1 Birokrasi Pemerintahan (Indeks Reformasi Birokrasi).....	II-173
2.4.2 Inovasi Daerah (Indeks Inovasi Daerah).....	II-174
2.4.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	II-175
2.4.4 Indeks Pelayanan Publik (IPP).....	II-177
2.5 EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025.....	II-180
2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK.....	II-186
2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan Per Lima Tahun.....	II-186
2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana per Lima Tahun.....	II-189
2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH.....	II-203

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	III-1
3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	III-1
3.1.1 Permasalahan Pembangunan pada Aspek Sosial.....	III-1
3.1.2 Permasalahan Pembangunan pada Aspek Ekonomi.....	III-12
3.1.3 Permasalahan Pembangunan pada Aspek Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur.....	III-15
3.1.4 Permasalahan Pembangunan pada Aspek Lingkungan.....	III-23
3.2 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH.....	III-26
3.2.1 Megatrend Global.....	III-26
3.2.2 Isu Strategis Nasional.....	III-34
3.2.3 Isu Strategis Provinsi.....	III-53
BAB IV VISI DAN MISI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 - 2045.....	IV-1
4.1 TINJAUAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2025-2045.....	IV-1
4.1.1 Visi Pembangunan Nasional 2025-2045.....	IV-1
4.1.2 Misi dan Arah Pembangunan Nasional 2025-2045.....	IV-2
4.1.3 Upaya Transformatif Super Prioritas Nasional.....	IV-4
4.2 VISI PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG 2045.....	IV-6
4.3 MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2045.....	IV-33
4.3.1 Misi ke-1 : Transformasi Sosial.....	IV-36
4.3.2 Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi.....	IV-37
4.3.3 Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola.....	IV-40
4.3.4 Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.....	IV-41
4.3.5 Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.....	IV-41
4.3.6 Misi ke-6 : Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	IV-43
4.3.7 Misi ke-7 : Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.....	IV-43
4.3.8 Misi ke-8 : Kestinambungan Pembangunan.....	IV-44
4.4 UPAYA SUPER PRIORITAS (GAME CHANGER) PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2045.....	IV-44
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....	V-1
5.1 ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAN LANDASAN TRANSFORMASI.....	V-3
5.1.1 Misi ke- 1 : Transformasi Sosial.....	V-3
5.1.2 Misi ke- 2 : Transformasi Ekonomi.....	V-14
5.1.3 Misi ke- 3 : Transformasi Tata Kelola.....	V-40
5.1.4 Misi ke- 4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.....	V-44
5.1.5 Misi ke- 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.....	V-50
5.2 ARAH KEBIJAKAN DALAM KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI DAERAH.....	V-62
5.3 ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH BERDASARKAN KLASER WILAYAH DENGAN ARAHAN PENGEMBANGAN PER KORIDOR EKONOMI WILAYAH.....	V-79
5.4 MISI KE- 8 : KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN.....	V-94
BAB VI PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Pulau di Provinsi Lampung	II-2
Tabel 2. 2 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan di Provinsi Lampung.....	II-5
Tabel 2. 3 Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Provinsi Lampung.....	II-7
Tabel 2. 4 Luas Daya Dukung Lahan di Provinsi Lampung.....	II-8
Tabel 2. 5 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan	II-10
Tabel 2. 6 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air di Provinsi Lampung	II-11
Tabel 2. 7 Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama di Provinsi Lampung.....	II-13
Tabel 2. 8 JLH Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah di Provinsi Lampung.....	II-16
Tabel 2. 9 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Mitigasi Bencana Alam di Provinsi Lampung..	II-17
Tabel 2. 10Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiversitas di Provinsi Lampung	II-18
Tabel 2. 11 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim di Provinsi Lampung	II-20
Tabel 2. 12 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Th 2021-2023	II-22
Tabel 2. 13 Kawasan Hutan Di Provinsi Lampung.....	II-25
Tabel 2. 14 Wilayah Sungai di Provinsi Lampung.....	II-27
Tabel 2. 15 Sebaran Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung	II-28
Tabel 2. 16 Sebaran Luas Potensi Keanekaragaman Hayati Darat di Provinsi Lampung	II-28
Tabel 2. 17 Luasan Kawasan Keanekaragaman Hayati Laut di Provinsi Lampung	II-29
Tabel 2. 18 Jumlah Izin Sumber Daya Mineral dan Batubara Per Komoditas	II-32
Tabel 2. 19 Sumber Daya dan Cadangan Bijih/Logam Provinsi Lampung	II-33
Tabel 2. 20 Sumber Daya dan Cadangan Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	II-33
Tabel 2. 21 Kualitas Sumber Daya dan Cadangan Batubara Lampung	II-34
Tabel 2. 22 Sumber Daya dan Cadangan Batubara Provinsi Lampung.....	II-34
Tabel 2. 23 Potensi Panas Bumi Provinsi Lampung.....	II-34
Tabel 2. 24 Tingkat Kerentanan berdasarkan SIDIK Provinsi Lampung	II-36
Tabel 2. 25 Kerentanan Bencana Banjir di Provinsi Lampung.....	II-37
Tabel 2. 26 Kerentanan Terhadap Cuaca Ekstrem di Provinsi Lampung.....	II-39
Tabel 2. 27 Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung	II-40
Tabel 2. 28 Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi Lampung.....	II-42
Tabel 2. 29 Rawan Bencana Longsor di Provinsi Lampung.....	II-45
Tabel 2. 30 Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Lampung.....	II-46
Tabel 2. 31 Luasan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Lampung.....	II-48
Tabel 2. 32 Kondisi Rawan Bencana Letusan Gunung Api di Provinsi Lampung	II-49
Tabel 2. 33 Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Lampung.....	II-60
Tabel 2. 34 Luas dan Dasar Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	II-63
Tabel 2. 35 Luas Baku Sawah Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota	II-64
Tabel 2. 36 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di.....	II-76
Tabel 2. 37 Jumlah Penduduk dan Indikator Pembangunan di Sepuluh	II-77
Tabel 2. 38 Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Lampung Tahun 2015-2020	II-96
Tabel 2. 39 Celah (Gap) dan pertumbuhan IPM Prov. Lampung dan Nasional Th 2014-2023II-	104
Tabel 2. 40 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Berdasarkan	II-111
Tabel 2. 41 Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas di Provinsi Lampung Tahun 2023	II-112
Tabel 2. 42 Produksi dan Sentra Produksi Komoditi Unggulan Strategis.....	II-114
Tabel 2. 43 Pariwisata di Provinsi Lampung.....	II-116
Tabel 2. 44 Wilayah Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung.....	II-118

Tabel 2. 45 Rasio PMTB terhadap PDRB dan ICOR Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022 ..	II-120
Tabel 2. 46 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah	II-124
Tabel 2. 47 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kab/Kota se-Prov. Lampung Th 2018-2023	II-125
Tabel 2. 48 Indeks ketahanan pangan berdasarkan aspek ketersediaan,	II-126
Tabel 2. 49 Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi 2022	II-126
Tabel 2. 50 Perkembangan POU Provinsi Lampung Tahun 2019- 2023	II-127
Tabel 2. 51 PoU Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023	II-128
Tabel 2. 52 Kondisi Makro Ketenagakerjaan Provinsi Lampung 2015-2022	II-129
Tabel 2. 53 Kondisi Ruas Jalan kewenangan Pemerintah	II-131
Tabel 2. 54 Panjang Infrastruktur Jalan di Provinsi Lampung Tahun 2023	II-132
Tabel 2. 55 Kondisi jalan Mantap di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023	II-133
Tabel 2. 56 Perkembangan realisasi angkutan penumpang dan barang dari stasiun Tanjung karang – stasiun Kertapati dan angkutan batu bara dari Tanjung Enim – Tarahan	II-134
Tabel 2. 57 Spesifikasi dari Dermaga I	II-139
Tabel 2. 58 Spesifikasi dari Dermaga II	II-139
Tabel 2. 59 Spesifikasi dari Dermaga III.	II-140
Tabel 2. 60 Spesifikasi dari Dermaga IV	II-141
Tabel 2. 61 Spesifikasi dari Dermaga V.	II-141
Tabel 2. 62 Kapasitas Pembangkit di Provinsi Lampung	II-147
Tabel 2. 63 Capaian Cakupan Pelayanan & Kualitas Infrastruktur Energi	II-148
Tabel 2. 64 Sebaran Desa Yang Belum Teraliri Listrik	II-148
Tabel 2. 65 Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Di Provinsi Lampung	II-150
Tabel 2. 66 Persentase Status Kewenangan Daerah Irigasi di Provinsi Lampung	II-150
Tabel 2. 67 Sebaran Lokasi Waduk/Embung di Provinsi Lampung	II-157
Tabel 2. 68 Persentase RT Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2020-2022	II-159
Tabel 2. 69 Persentase Capaian Penduduk yang Memiliki Akses	II-161
Tabel 2. 70 Persentase Capaian Penduduk yang Memiliki Akses	II-161
Tabel 2. 71 Luasan Permukiman Kumuh di Provinsi Lampung	II-163
Tabel 2. 72 Jumlah RTLH Tahun 2023 di Provinsi Lampung	II-164
Tabel 2. 73 Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama	II-168
Tabel 2. 74 Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota	II-170
Tabel 2. 75 Nilai Reformasi Birokrasi, Sakip dan Pengelolaan Keuangan	II-174
Tabel 2. 76 Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Lampung	II-176
Tabel 2. 77 Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Lampung	II-178
Tabel 2. 78 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Lampung Tahun 2020-2050	II-186
Tabel 2. 79 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Lampung 2025 - 2045	II-188
Tabel 2. 80 Kebutuhan Daya Listrik Provinsi Lampung Tahun 2025-2045	II-188
Tabel 2. 81 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Provinsi Lampung	II-190
Tabel 2. 82 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung	II-191
Tabel 2. 83 Proyeksi Timbulan Sampah Provinsi Lampung	II-194
Tabel 2. 84 Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung	II-195
Tabel 2. 85 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Provinsi Lampung 2025 - 2045	II-197
Tabel 2. 86 Proyeksi Akses Sanitasi Layak 2025 - 2045	II-199
Tabel 2. 87 Jumlah Kebutuhan Rumah Tahun 2025-2045	II-201
Tabel 2. 88 Luasan Lahan Permukiman 2025-2045	II-202
Tabel 2. 89 Kebutuhan Infrastruktur Wilayah	II-211

Tabel 3. 1 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Lampung Tahun 2020-2050.....	III-54
Tabel 3. 2 Kinerja Produktivitas Tanaman Pangan dan Komoditi Perkebunan Rakyat.....	III-69
Tabel 3. 3 Gambaran Umum TFP Industri Pengolahan.....	III-74
Tabel 3. 4 Data Volume Sampah yang dikelola oleh Bank Sampah tahun 2022.....	III-82
Tabel 3. 5 Nilai Baseline dan Perkiraan Penurunan Emisi Tahun 2030	III-89
Tabel 4. 1 Sasaran Visi RPJPD Provinsi Lampung.....	IV-11
Tabel 4. 2 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung	IV-13
Tabel 4. 3 Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changer)	IV-44
Tabel 5. 1 Sasaran Visi RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.....	V-2
Tabel 5. 2 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-1	V-6
Tabel 5. 3 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-1.....	V-12
Tabel 5. 4 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-2	V-19
Tabel 5. 5 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-2.....	V-38
Tabel 5. 6 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-3	V-42
Tabel 5. 7 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-3.....	V-43
Tabel 5. 8 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-4	V-45
Tabel 5. 9 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-4.....	V-48
Tabel 5. 10 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-5	V-60
Tabel 5. 11 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-6.....	V-70
Tabel 5. 12 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-7.....	V-76
Tabel 5. 13 Pembagian wilayah Pengembangan berdasarkan Hirarki Wilayah	V-81
Tabel 5. 14 Tinjauan Klaster I,II dan III berdasarkan Potensi Infrastruktur & Potensi Alam ...	V-82
Tabel 5. 15 Arah Kebijakan Misi ke-8.....	V-108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Ringkasan Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJPD Provinsi Lampung.....	I-3
Gambar 1. 2 Keterhubungan antara RPJPD dokumen Perencanaan Lainnya	I-9
Gambar 1. 3 Keterhubungan antara RPJPD dan RPJMD	I-10
Gambar 1. 4 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	I-10
Gambar 1. 5 Sistematika dokumen RPJPD	I-13
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Provinsi Lampung.....	II-2
Gambar 2. 2 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung (Pangan) di Provinsi Lampung.....	II-4
Gambar 2. 3 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Provinsi Lampung	II-6
Gambar 2. 4 Peta Daya Dukung Lahan di Provinsi Lampung	II-9
Gambar 2. 5 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Prov. Lampung	II-10
Gambar 2. 6 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan di Prov. Lampung.....	II-11
Gambar 2. 7 Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air di Provinsi Lampung.....	II-12
Gambar 2. 8 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air di Prov. Lampung.....	II-12
Gambar 2. 9 JLH Pengendali Hama Kab/Kota Provinsi Lampung.....	II-13
Gambar 2. 10 Peta IJLH Pengendali Hama	II-14
Gambar 2. 11 Peta IJLH Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah	II-15
Gambar 2. 12 JLH Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah	II-15
Gambar 2. 13 Peta JLH Pengaturan Mitigasi Bencana Alam	II-17
Gambar 2. 14 Jasa Mitigasi Bencana Alam di Prov. Lampung.....	II-18
Gambar 2. 15 JLH Biodiversitas.....	II-19
Gambar 2. 16 Peta JLH Pendukung Biodiversitas	II-19
Gambar 2. 17 Peta IJLH Pengaturan Iklim di Provinsi Lampung.....	II-21
Gambar 2. 18 Luasan Kawasan Hutan di Provinsi Lampung.....	II-24
Gambar 2. 19 Peta Kawasan Hutan Di Provinsi Lampung.....	II-24
Gambar 2. 20 Peta Wilayah Sungai di Provinsi Lampung.....	II-26
Gambar 2. 21 Peta Keanekaragaman Hayati Darat	II-30
Gambar 2. 22 Peta Kawasan Keanekaragaman Hayati Laut.....	II-30
Gambar 2. 23 Peta Geologi Wilayah Lampung	II-31
Gambar 2. 24 Peta Wilayah Kerja Migas Provinsi Lampung	II-35
Gambar 2. 25 Peta Tingkat Kerentanan Berdasarkan SIDIK di Provinsi Lampung	II-37
Gambar 2. 26 Peta Bahaya Bencana Banjir di Provinsi Lampung.....	II-38
Gambar 2. 27 Peta Bahaya Cuaca Ektrim di Provinsi Lampung.....	II-40
Gambar 2. 28 Kebakaran Hutan dan Lahan.....	II-41
Gambar 2. 29 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan.....	II-41
Gambar 2. 30 Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Lampung	II-42
Gambar 2. 31 Peta Indeks Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi	II-43
Gambar 2. 32 Kecenderungan Kejadian Bencana	II-44
Gambar 2. 33 Nilai Indeks Resiko Provinsi Lampung Tahun 2015-2022	II-44
Gambar 2. 34 Peta Rawan Bencana Longsor di Provinsi Lampung.....	II-46
Gambar 2. 35 Peta Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Lampung.....	II-47
Gambar 2. 36 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Lampung	II-48
Gambar 2. 37 Struktur Ruang Provinsi Lampung.....	II-51
Gambar 2. 38 Peta Rencana Jalan Tol Provinsi Lampung.....	II-53
Gambar 2. 39 Peta Struktur Ruang Provinsi Lampung.....	II-60

Gambar 2. 40 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Lampung.....	II-61
Gambar 2. 41 Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Prov. Lampung Th. 2022.....	II-62
Gambar 2. 42 Peta Baku Sawah Provinsi Lampung.....	II-63
Gambar 2. 43 Peta Kawasan Strategis Provinsi Lampung.....	II-66
Gambar 2. 44 Rencana Aglomerasi Kota Bandar Lampung Raya.....	II-70
Gambar 2. 45 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk.....	II-71
Gambar 2. 46 Sepuluh Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak dan.....	II-72
Gambar 2. 47 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2023.....	II-73
Gambar 2. 48 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	II-74
Gambar 2. 49 Rasio Jenis Kelamin dan Piramida Penduduk Lampung Tahun 2020.....	II-74
Gambar 2. 50 Persentase Penduduk Lampung Menurut Generasi, Tahun 2020.....	II-75
Gambar 2. 51 Komposisi Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2020.....	II-78
Gambar 2. 52 Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Lampung, Februari 2021-Februari 2023	II-78
Gambar 2. 53 Proporsi Angkatan Kerja Berdasarkan Kelompok Umur 2013-2020	II-79
Gambar 2. 54 TPT Provinsi Lampung menurut Tingkat Pendidikan, 2020	II-80
Gambar 2. 55 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).....	II-81
Gambar 2. 56 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Lampung Th. 2020-2023..	II-82
Gambar 2. 57 Trend kasus kematian Ibu tahun 2019-2023.....	II-83
Gambar 2. 58 Trend kasus kematian bayi tahun 2019-2023.....	II-83
Gambar 2. 59 Persentase Balita 0-59 bulan yang Mendapatkan.....	II-84
Gambar 2. 60 Persentase Balita Pendek se-Sumatera, 2018.....	II-85
Gambar 2. 61 Persentase Stunting Provinsi Lampung Tahun 2023.....	II-85
Gambar 2. 62 Persentase Penduduk Lansia, 1971-2020	II-86
Gambar 2. 63 Cakupan Penemuan Kasus TBC (CDR) Di Provinsi Lampung Tahun 2023.....	II-87
Gambar 2. 64 Angka Keberhasilan Pengobatan TB paru Provinsi Lampung 2019-2023	II-88
Gambar 2. 65 Keragaman Pemeluk Agama Tahun 2022 dan.....	II-90
Gambar 2. 66 Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Indonesia.....	II-91
Gambar 2. 67 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	II-92
Gambar 2. 68 Distribusi PDRB (ADHB) Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	II-93
Gambar 2. 69 Rasio Gini Lampung dan Nasional Tahun 2005-2023.....	II-94
Gambar 2. 70 Indeks Gini Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2023	II-94
Gambar 2. 71 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional	II-95
Gambar 2. 72 Persentase Kemiskinan Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	II-96
Gambar 2. 73 Tingkat Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan Maret Tahun 2005-2023.....	II-97
Gambar 2. 74 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2023 (Ribu Orang)	II-97
Gambar 2. 75 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2023.....	II-98
Gambar 2. 76 Indeks Keparahan Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2023	II-99
Gambar 2. 77 Tingkat pengangguran Terbuka Wilayah Perkotaan dan	II-100
Gambar 2. 78 TPT Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2006-2023 (persen)	II-100
Gambar 2. 79 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota Tahun 2023	II-101
Gambar 2. 80 Jumlah Pengangguran Kab/Kota Tahun 2023	II-102
Gambar 2. 81 Indek Pembangunan Manusia Tahun 2005-2022.....	II-102
Gambar 2. 82 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2023 (SP 2020)	II-104
Gambar 2. 83 Komponen IPM Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2014-2023.....	II-105
Gambar 2. 84 IPM Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2023 (SP2020)	II-106

Gambar 2. 85 Komponen IPM Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2022 (SP2020).....	II-107
Gambar 2. 86 Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2006-2022.....	II-108
Gambar 2. 87 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2015-2022	II-109
Gambar 2. 88 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2015-2022	II-110
Gambar 2. 89 Struktur Ekonomi Lampung 2010-2022	II-113
Gambar 2. 90 Nilai Produktivitas Tenaga Kerja Lapangan Usaha Industri dan	II-119
Gambar 2. 91 Distribusi PMTB dalam PDRB (ADHB) Lampung	II-119
Gambar 2. 92 NTP Provinsi di Sumatera Tahun 2022	II-121
Gambar 2. 93 Perkembangan NTP Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016-2023	II-121
Gambar 2. 94 Perkembangan PDRB per Kapita (ADHB, Juta Rupiah).....	II-122
Gambar 2. 95 PDRB per Kapita (ADHB, Juta Rupiah) Kabupaten/Kota Tahun 2023	II-123
Gambar 2. 96 Peta Sebaran Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Lampung Th. 2023	II-125
Gambar 2. 97 Peringkat Angka PoU Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023.....	II-128
Gambar 2. 98 Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Lampung,	II-130
Gambar 2. 99 Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Lampung Tahun 2020-2035	II-131
Gambar 2. 100 Komposisi jalan di Provinsi Lampung Tahun 2023	II-132
Gambar 2. 101 Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Lampung.....	II-145
Gambar 2. 102 Sebaran Pembangkit Listrik di Lampung.....	II-146
Gambar 2. 103 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik	II-149
Gambar 2. 104 Peta Pengairan Daerah Irigasi, Rawa (1000-3000 Ha) Dan	II-151
Gambar 2. 105 Foto Infrastruktur Bendungan di Provinsi Lampung.....	II-153
Gambar 2. 106 Peta Sebaran Lokasi Waduk/Embung di Provinsi Lampung	II-158
Gambar 2. 107 Jumlah Menara BTS di Provinsi Lampung Th. 2011-2021	II-165
Gambar 2. 108 Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2017-2022.....	II-166
Gambar 2. 109 Peta Sebaran Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).....	II-169
Gambar 2. 110 Trend Jaminan Kesehatan PBI Dan Non PBI.....	II-171
Gambar 2. 111 Trend Persentase Penduduk	II-172
Gambar 2. 112 Trend Capaian Tenaga Kerja yang Mendapatkan Perlindungan	II-173
Gambar 2. 113 Nilai Indeks SPBE, Domain, Aspek	II-176
Gambar 2. 114 Proyeksi Piramida Penduduk Lampung, Tahun 2020-2050.....	II-187
Gambar 2. 115 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi	II-190
Gambar 2. 116 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi.....	II-189
Gambar 2. 117 Peta Rencana Struktur Ruang	II-206
Gambar 2. 118 Peta Rencana Pola Ruang.....	II-207
Gambar 3. 1 Tingkat Pertumbuhan 3 (Tiga) Lapangan Usaha Sektoral	III-14
Gambar 3. 2 Peta Lahan Kritis pada Wilayah Kerja BPDAS Way Seputih Way Sekampung.....	III-25
Gambar 3. 3 Megatren Global	III-26
Gambar 3. 4 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak ahun 2025 dan 2045.....	III-27
Gambar 3. 5 Lima Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk terbanyak	III-30
Gambar 3. 6 Perkembangan Distribusi penduduk di 5 kabupaten/kota	III-30
Gambar 3. 7 Rata-Rata Total Factor Productivity Index	III-35
Gambar 3. 8 Total Factor Productivity Index 2010 -2019 (2010 = 1,0)	III-35
Gambar 3. 9 Kontribusi Manufaktur terhadap PDB (%PDB)	III-37
Gambar 3. 10 Produktivitas Pertanian (Juta Rupiah/Pekerja).....	III-38
Gambar 3. 11 Nilai PISA Indonesia dan Rata-Rata OECD.....	III-43
Gambar 3. 12 Kondisi Hiper Regulasi	III-45

Gambar 3. 13 Proyeksi Piramida Penduduk Lampung, Tahun 2020-2050.....	III-55
Gambar 3. 14 Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Lampung,	III-56
Gambar 3. 15 Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Lampung Tahun 2020-2035	III-56
Gambar 3. 16 Peta Kawasan Keanekaragaman Hayati Laut.....	III-62
Gambar 3. 17 Peta Sebaran Potensi Panas Bumi (GeoThermal).....	III-63
Gambar 3. 18 Peta GeoTeknik Indonesia Tempat.....	III-65
Gambar 3. 19 Tataan Tektonik wilayah Pulau Sumatera - Samudera Hindia.....	III-66
Gambar 3. 20 Komoditas Unggulan Provinsi Lampung.....	III-68
Gambar 3. 21 Porsi Lapangan Usaha Industri Pengolahan.....	III-70
Gambar 3. 22 Rata-rata TFP, 2011-2019.....	III-74
Gambar 3. 23 Rata-rata Lama Tamu Menginap	III-78
Gambar 3. 24 Statistik Masyarakat yang mendaftarkan ISSN di BRIN Tahun 2022.....	III-84
Gambar 4. 1 Visi Indonesia Emas 2045	IV-1
Gambar 4. 2 Lima Sasaran dari tujuan pada Visi “INDONESIA EMAS 2045”	IV-2
Gambar 4. 3 Transformasi dan Agenda Pembangunan Indonesia Emas 2045	IV-3
Gambar 4. 4 Tujuh Belas Arah Pembangunan Indonesia Emas 2045.....	IV-3
Gambar 4. 5 Kerangka Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers).....	IV-4
Gambar 4. 6 Kerangka Berfikir Visi dan Misi Lampung 2045.....	IV-6
Gambar 5. 1 Tahapan Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD.....	V-1
Gambar 5. 2 Tahapan Transformasi Sosial	V-3
Gambar 5. 3 Tahapan Transformasi Ekonomi.....	V-14
Gambar 5. 4 Tahapan Transformasi Tata Kelola	V-40
Gambar 5. 5 Tahapan Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh,.....	V-44
Gambar 5. 6 Tahapan Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.....	V-50
Gambar 5. 7 Peta Koridor Pertumbuhan Ekonomi Kewilayahan	V-86
Gambar 5. 8 Peta : Arah pembangunan Koridor Ekonomi Wilayah I.....	V-90
Gambar 5. 9 Peta : Arah pembangunan Koridor Ekonomi Wilayah II.....	V-91
Gambar 5. 10 Peta : Arah pembangunan Koridor Ekonomi Wilayah III.....	V-93
Gambar 5. 11 Kesenambungan Pembangunan	V-94
Gambar 5. 12 Kerangka Pengendalian RPJPD Tahun 2025-2045	V-99



**RANCANGAN AKHIR RPJPD
TAHUN 2025-2045**

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita berkehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tugas penerus bangsa selanjutnya adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan; dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Tingkat estafet untuk kesinambungan pembangunan nasional terus berlanjut. Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 telah ditetapkan. Semangat Pembangunan Nasional 20 tahun ke depan disusun dengan paradigma baru, bahwa reformasi saja tidak cukup, Indonesia harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mendorong kemajuan. Menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia yang bertajuk **“Indonesia Emas 2045”** Pembangunan Indonesia 2025-2045 mengusung Visi **“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”**.

Sejarah telah membuktikan bahwa Provinsi Lampung sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengisi kemerdekaan dengan berbagai aspek pembangunan secara menyeluruh sejak kemerdekaan Republik

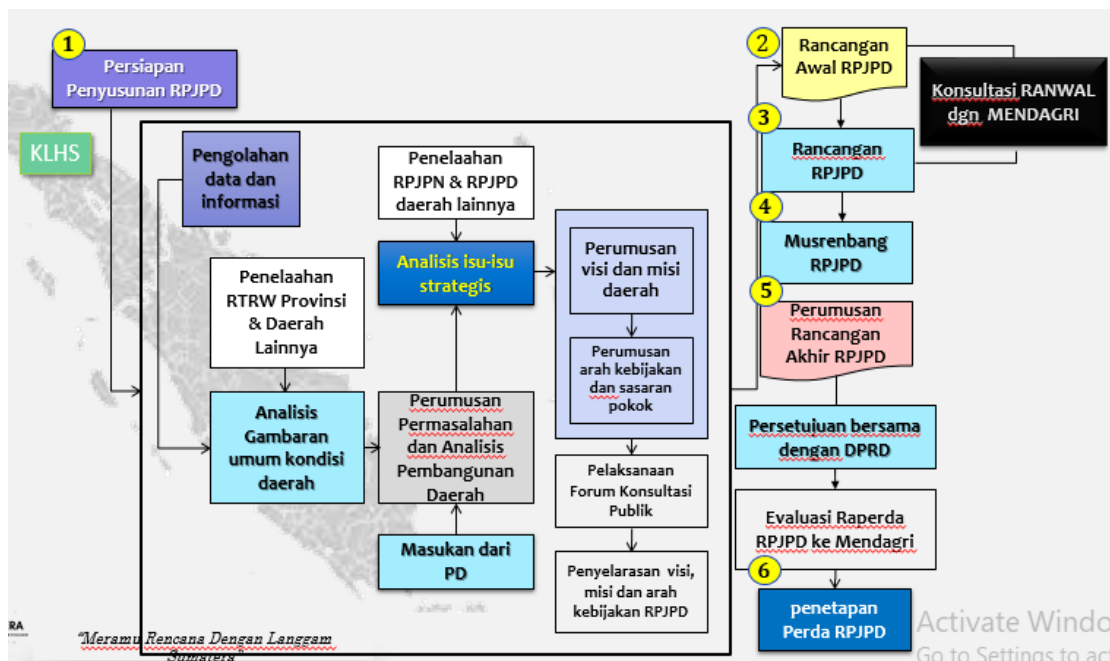
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan rakyat Lampung tidak menyurutkan semangat untuk terus bekerja untuk mewujudkan tujuan bernegara. Beragam dinamika selama mengisi kemerdekaan tersebut telah menjadi pelajaran berharga untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara tegas juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 merupakan awal dari rangkaian siklus dalam proses pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip : 1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; 2) Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah; 3) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; 4) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; 5) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional; 6) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan; serta 7) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik, terukur, dapat dilaksanakan, memperhatikan ketersediaan sumber daya, dan memperhatikan durasi perencanaan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dijelaskan bahwa tahapan penyusunan dokumen RPJPD meliputi: 1) Persiapan penyusunan RPJPD, 2) Penyusunan Rancangan Awal RPJPD, 3) Penyusunan Rancangan RPJPD, 4) Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, 5) Perumusan Rancangan Akhir RPJPD, dan 6) Penetapan RPJPD.

Gambar 1. 1 Ringkasan Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJPD Provinsi Lampung



Pemerintah Provinsi Lampung Cq. Bappeda Provinsi Lampung telah melaksanakan seluruh tahapan penyusunan RPJPD Provinsi Lampung, dengan uraian per tahapan sebagai berikut :

1) Persiapan

Telah dibentuk Tim Penyusun RPJPD Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/381/VI.01/HK/2023 tanggal 7 Juli 2023.

2) Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD dilakukan melalui beberapa rangkaian kegiatan, antara lain:

- Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Tim Penyusun dokumen RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/381/VI.01/HK/2023 tanggal 7 Juli 2023.
- Pelaksanaan kegiatan FGD tematik lingkup Ekonomi, Sosial, Kepemudaan, Pemerintahan, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; serta Temu Diskusi dengan Kelompok Penggiat dan Pemerhati Pembangunan; dengan jumlah 14 Agenda kegiatan yang melibatkan beragam unsur keterwakilan pemangku kepentingan pembangunan secara lintas generasi. Secara keseluruhan, jumlah peserta FGD dan Diskusi tersebut telah diikuti oleh 594 orang.
- Selanjutnya, dalam rangka mendorong keterlibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan, penjangkaran aspirasi masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik berupa Kuesioner Elektronik Ranwal RPJPD Provinsi Lampung. Kegiatan berlangsung selama 3 minggu dan mencatat 507 orang terlibat sebagai partisipan.
- Guna mensosialisasikan substansi Rancangan Awal RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 kepada pemangku kepentingan pembangunan, dan membangun *ownership* dan rasa kebersamaan dalam tahapan dan proses penyusunan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, serta menerima masukan dan aspirasi terhadap Rancangan Awal RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045; pada tanggal 31 Oktober 2023 telah dilaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD yang melibatkan beragam unsur keterwakilan pemangku kepentingan pembangunan secara lintas generasi, baik dari perguruan tinggi dan akademisi, organisasi profesi, organisasi masyarakat dan organisasi pemuda, dunia usaha dan pelaku bisnis, pihak perbankan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Penyampaian surat Gubernur Lampung Nomor 000.7.2.1/0408/VI.01/2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Provinsi Lampung kepada DPRD Provinsi Lampung.
- Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Provinsi Lampung bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 7 Februari 2024.

3) Penyusunan Rancangan RPJPD

Penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD menjadi Rancangan RPJPD berdasarkan saran/masukan dari pemangku kepentingan dan arahan dari pemerintah pusat dalam kegiatan konsultasi sebagaimana diuraikan dalam poin 2).

4) Musrenbang RPJPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum lintas pemangku kepentingan pembangunan di daerah, yang dimaksudkan sebagai sarana komunikasi untuk mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan pembangunan secara partisipatif dan transparan. Adapun, tujuan Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045 adalah memberikan ruang kepada segenap elemen utama pembangunan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok yang disusun dalam Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045.

Pelaksanaan Musrenbang tersebut diawali Diskusi Publik bertema “Memperkuat Transformasi Ekonomi dan kualitas SDM menuju Lampung Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan 2045”, dengan narasumber diskusi berasal dari BRIN, KADIN, Bank Indonesia Perwakilan Lampung. Adapun, pokok-pokok arahan dalam forum ini disampaikan oleh Narasumber Musrenbang berasal dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri serta DPRD Provinsi Lampung.

5) Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD

Penyempurnaan Rancangan RPJPD menjadi Rancangan Akhir RPJPD berdasarkan saran/masukan dari pemangku kepentingan dan arahan pemerintah pusat pada kegiatan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada poin 4); serta pelaksanaan Review dokumen Rancangan Akhir RPJPD oleh APIP Provinsi Lampung.

6) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD

- Perencanaan penyusunan Perda tentang RPJPD Provinsi Lampung telah menjadi agenda dalam Program Pembentukan Perda Tahun 2024 yang dihimpun sejak Tahun 2023 oleh Pemerintah Provinsi Lampung (Cq. Biro Hukum Setdaprov. Lampung) bersama dengan DPRD.
- Penyampaian surat Gubernur Lampung Nomor 100.3.3/2582/03/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal Penyampaian Rancangan Perda tentang RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 kepada DPRD Provinsi Lampung.

Selaras dengan RPJPN Tahun 2025-2045, penyusunan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 diarahkan pada peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, dengan senantiasa memperhatikan aspek keseimbangan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan ruang dan lingkungan. Dengan mengusung Visi Lampung 2045 “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan” yang ditransmisikan melalui 8 (delapan) Misi pembangunan, yaitu : (1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah; (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; (6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; (8) Kestinambungan Pembangunan; keseluruhan substansi yang ditetapkan dalam Visi dan Misi pembangunan Provinsi Lampung 20 (dua puluh) tahun ke depan tersebut akan mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJPN Tahun 2025-2045.

1.2 DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagai mana telah diiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

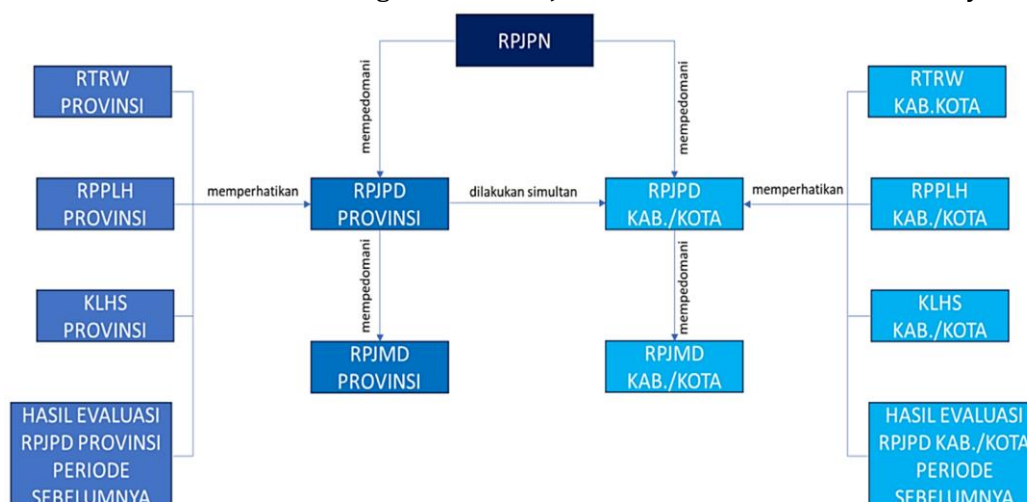
- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 - Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 - Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043.
 - Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
 - Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
 - Surat Edaran Bersama Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam RPJPD Tahun 2025-2045

1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; secara paralel mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW Pemerintah Provinsi, dengan memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD (KLHS-RPJPD) Provinsi Lampung, serta Hasil Evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025.

RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Gambar 1. 2 Keterhubungan antara RPJPD dokumen Perencanaan Lainnya



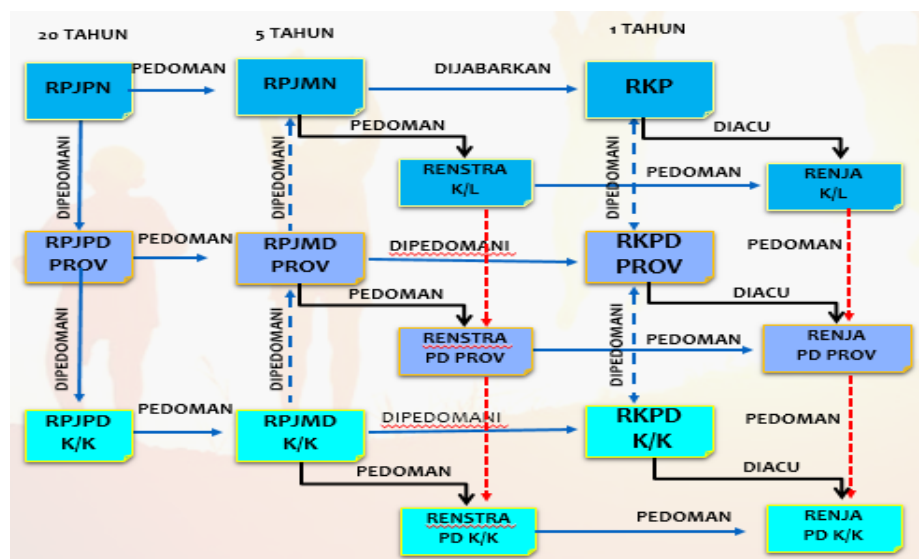
Selanjutnya, pelaksanaan dari RPJPD Provinsi akan dijabarkan melalui 4 (empat) tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 (lima) tahunan Pemerintah Provinsi serta Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Provinsi.

Gambar 1. 3 Keterhubungan antara RPJPD dan RPJMD



Lebih lanjut, mekanisme dalam penyusunan RPJPD Pemerintah Kabupaten/Kota juga dilaksanakan secara berjenjang; dimana substansi dalam RPJPD Pemerintah Kabupaten/Kota akan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Pemerintah Provinsi, serta RTRW Pemerintah Kabupaten/Kota.

Gambar 1. 4 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Dalam Satu Kesatuan Sistem perencanaan Pembangunan Nasional



1.4 RUANG LINGKUP

Lebih lanjut, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD sampai dengan tahap penganggaran. Perencanaan Pembangunan Daerah juga mengintegrasikan pelaksanaan layanan dasar kepada masyarakat dan rencana pemanfaatan ruang/wilayah dengan rencana pembangunan daerah.

- Periode waktu dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
- Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang diajukan akan menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
- Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung.
- Pelaksanaan RPJPD akan dijabarkan dalam 4 (empat) tahap Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu : Tahap I (Tahun 2025-2029), Tahap II (Tahun 2030-2034), Tahap III (Tahun 2035-2039) dan Tahap IV (Tahun 2040-2045).

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 akan segera berakhir. Guna kesinambungan perencanaan pembangunan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 saat ini Pemerintah Provinsi Lampung mulai melaksanakan penyusunan Rancangan Awal RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.

Substansi dalam dokumen RPJPD ini memuat visi, misi, arah kebijakan, pentahapan dan sasaran pokok pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung. Seluruh uraian dalam RPJPD tersebut **dimaksudkan** untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah dan cita-cita nasional, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

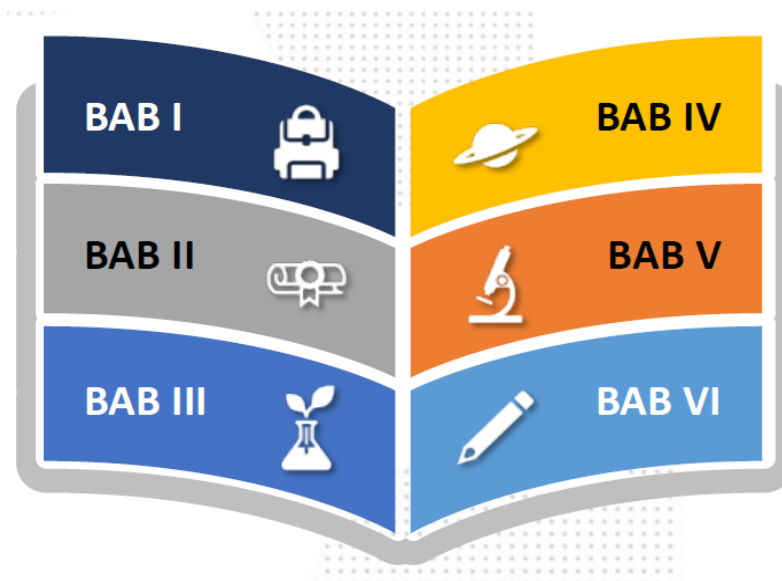
Adapun, **tujuan** penyusunan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, adalah :

- Mengoptimalkan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.
- Memberikan arah dan pedoman kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan, yang dijabarkan melalui tahapan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun maupun tahunan.
- Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar jenjang pemerintahan.
- Mewujudkan keterkaitan, konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Menyediakan bahan tolok ukur untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika yang terdiri dari :

Gambar 1. 5 Sistematika dokumen RPJPD



- **Bab I : Pendahuluan**
Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Maksud Dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
- **Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah**
Memuat Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, Aspek Pelayanan Umum, Evaluasi Hasil RPJPD 2005-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.
- **Bab III : Isu Strategis Dan Permasalahan**
Memuat Isu Strategis dan Permasalahan Daerah
- **Bab IV : Visi dan Misi Daerah**
Memuat Visi daerah tahun 2025-2045 dan Misi daerah tahun 2025-2045
- **Bab V : Arah Kebijakan Dan Sasaran Pokok**
Memuat Arah kebijakan per-lima tahunan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 (Arah Kebijakan, 17 sasaran Pokok dan 45 Indikator Utama Pembangunan)
- **Bab VI : Penutup**
Penutup



RANCANGAN AKHIR RPJPD
TAHUN 2025-2045

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Geografi

2.1.1.1 Letak Geografis dan Wilayah Administrasi

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964.

Secara Astronomis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan:

- Timur - Barat berada antara : 103°40' - 105°50' Bujur Timur.
- Utara - Selatan berada antara : 6°45' - 3°45' Lintang Selatan.

Batas administrasi wilayah Provinsi Lampung adalah:

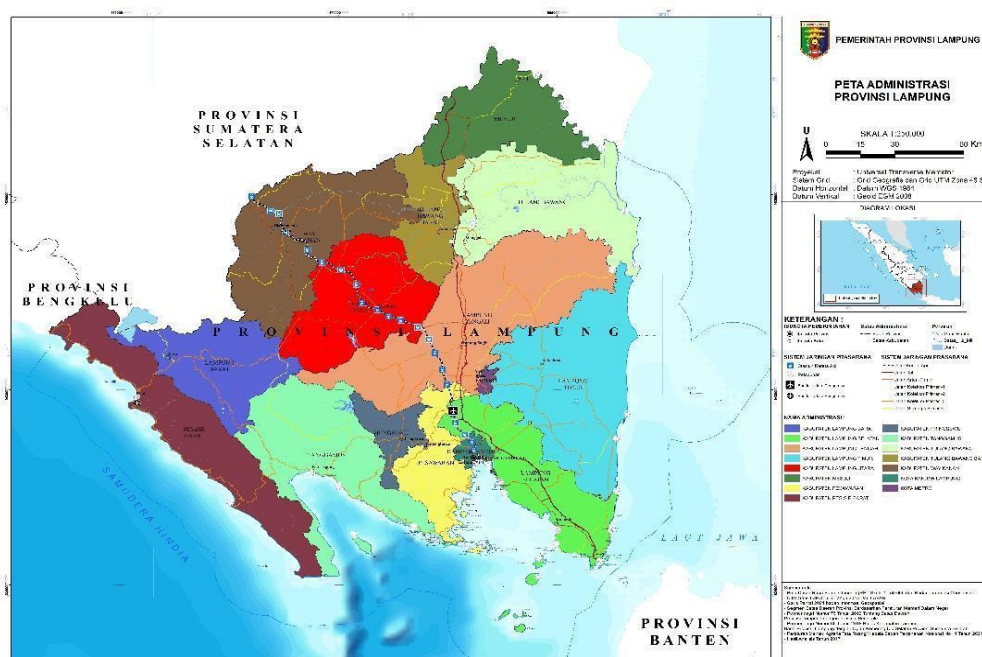
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Sunda.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Pada tahun 2006 Provinsi Lampung memiliki 10 Kabupaten/Kota dengan 18 (delapan belas) segmen batas, dan tahun 2007 terjadi pemekaran Kabupaten Pesawaran sehingga Provinsi Lampung memiliki 11 (sebelas) Kabupaten/Kota dengan 21 (dua puluh satu) segmen batas. Selanjutnya, pada Tahun 2009 terjadi pemekaran Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga Provinsi Lampung memiliki 14 (empat belas) Kabupaten/Kota dengan 28 (dua puluh delapan) segmen batas, dan pada Tahun 2013 terjadi pemekaran Kabupaten Pesisir Barat sehingga Provinsi Lampung memiliki 15 (lima belas) Kabupaten/Kota dengan 30 (tiga puluh) segmen batas. Dari 15 Kabupaten/Kota, Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kabupaten dengan wilayah terluas yaitu sebesar 13,54 persen dari luas Provinsi Lampung, sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Metro dengan proporsi luasan 0,21 persen dari luas wilayah Lampung (*sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024*).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043, cakupan wilayah

Lampung meliputi 13 Kabupaten dan 2 Kota, dengan 172 pulau dan panjang garis pantai mencapai 1.345,20 Km, luas keseluruhan mencapai 4.997.290 Ha, terdiri dari luas daratan 3.357.026,40 Ha dan wilayah perairan pesisir mencakup wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut Provinsi yang berdekatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Provinsi Lampung



Keterangan : Data Termutakhir

Berikut Provinsi Lampung yang dibagi dalam 15 Kabupaten/Kota, yaitu:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Pulau di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Ibukota	Jumlah Pulau
1	Lampung Tengah	4.559,57	Gunung Sugih	-
2	Lampung Timur	3.860,92	Sukadana	5
3	Way Kanan	3.522,11	Blambangan Umpu	-
4	Tulang Bawang	3.116,06	Menggala	-
5	Tanggamus	2.947,59	Kota Agung	76
6	Pesisir Barat	2.939,60	Krui	3
7	Lampung Utara	2.669,30	Kotabumi	-
8	Lampung Selatan	2.227,38	Kalianda	50
9	Mesuji	2.200,41	Wiralaga Mulya	-
10	Lampung Barat	2.107,99	Liwa	-
11	Pesawaran	1.288,08	Gedong Tataan	36
12	Tulang Bawang Barat	1.257,09	Panaragan	-

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Ibukota	Jumlah Pulau
13	Pringsewu	617,19	Pringsewu	-
14	Kota Bandar Lampung	183,75	Bandar Lampung	2
15	Kota Metro	73,21	Metro	-
Provinsi Lampung		33.570,26		172

Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau

2.1.1.2 Tinjauan Terhadap KLHS RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya.

KLHS RPJPD Provinsi Lampung telah mendapatkan validasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berdasarkan Surat Nomor: 5.224/MenLHK-PKTL/Pdlkws/Pla.3/2024 dan telah sesuai dengan PP 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

2.1.1.3 Daya Dukung Lingkungan Hidup

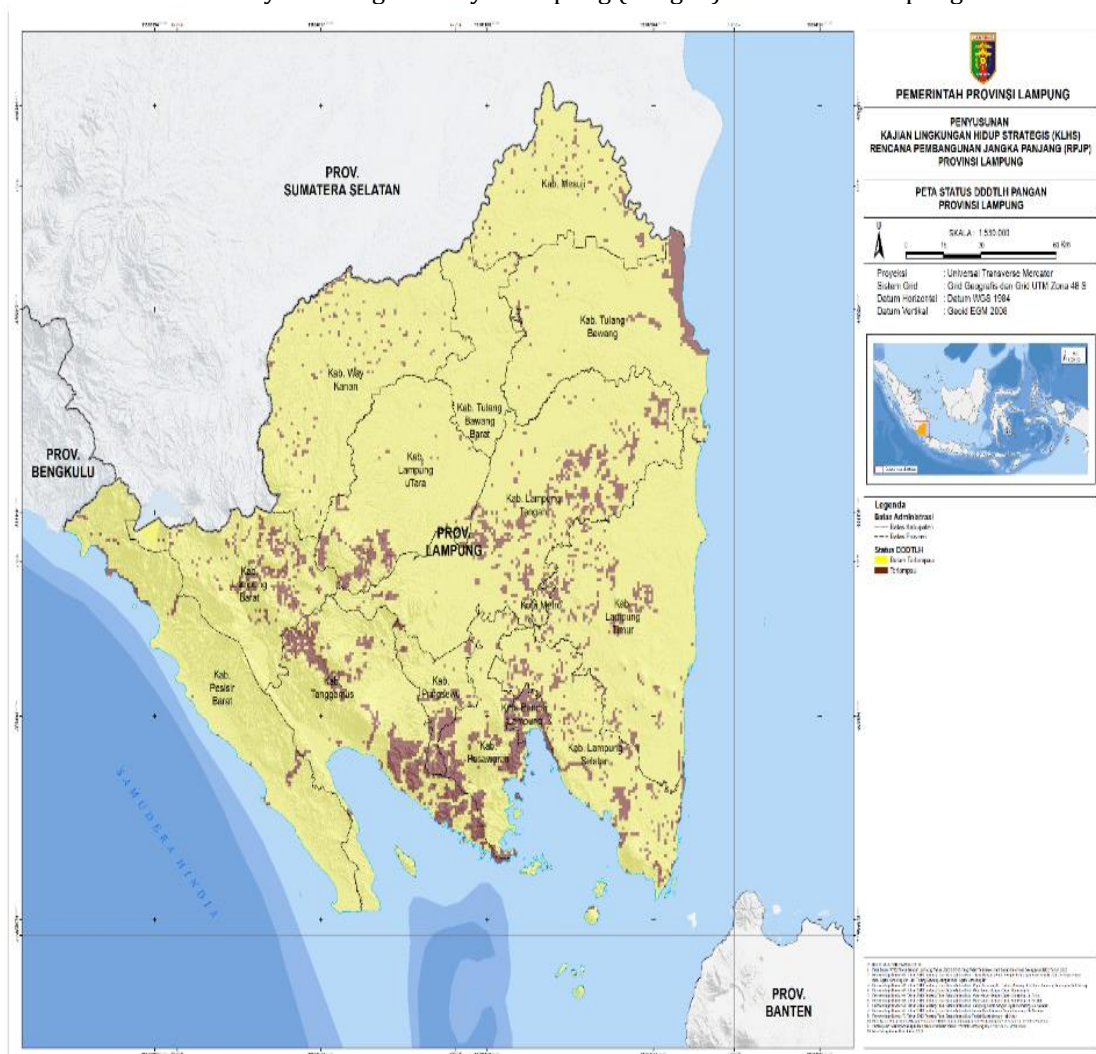
Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup harus memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup dan keselamatan, mutu hidup serta kesejahteraan masyarakat.

1. Daya Dukung Pangan

Daya Dukung Pangan di Provinsi Lampung berada pada status **Belum terlampaui**. Ambang batas penduduk untuk pangan yang tersedia dapat memenuhi 25.728.639 jiwa sementara itu jumlah penduduk tahun 2022 berjumlah 9.176.546 jiwa. Sehingga ketersediaan pangan Provinsi Lampung sudah dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk (sesuai Tabel 2.4). Sedangkan Daya Dukung Pangan yang berada pada status **Terlampaui** hanya di Kota Bandar Lampung karena nilai kebutuhannya lebih besar daripada

ketersediaan, sehingga terdapat selisih sebesar - 836.359.818.671 kkal/thn. Berdasarkan luasan, Daya Dukung Pangan Provinsi Lampung yang berada pada kategori Belum Terlampaui adalah seluas 3.016.741 Ha dan kategori Terlampaui seluas 340.723 Ha.

Gambar 2. 2 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung (Pangan) di Provinsi Lampung



Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Tabel 2. 2 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	kkal/tahun		Ambang Batas (jiwa)	Sesliah (kkal/tahun)	Status (ha)		Jumlah (ha)
	Ketersediaan	Kebutuhan			Belum Terlampaui	Terlampaui	
Kabupaten Lampung Barat	592.073.081.943,3	238.090.795.750,0	754.473,5	353.982.286.193,0	190.077,5	26.527,4	216.605,0
Kabupaten Lampung Selatan	1.505.806.707.045,9	848.404.996.249,6	1.918.836,2	657.401.710.797,5	197.702,2	33.389,9	231.092,1
Kabupaten Lampung Tengah	3.440.883.774.482,0	1.177.142.264.500,9	4.384.687,8	2.263.741.509.979,6	390.339,0	53.298,0	443.637,0
Kabupaten Lampung Timur	3.213.863.366.975,1	885.155.623.500,1	4.095.397,7	2.328.707.743.474,8	358.258,0	26.131,4	384.389,4
Kabupaten Lampung Utara	1.923.146.483.087,5	498.417.482.750,1	2.450.648,6	1.424.729.000.338,7	258.957,0	20.898,0	279.855,0
Kabupaten Mesuji	1.258.417.564.830,5	182.599.553.750,2	1.603.590,4	1.075.818.011.080,8	204.319,8	9.621,9	213.941,7
Kabupaten Pesawaran	500.481.992.055,3	382.293.316.750,1	637.759,8	118.188.675.305,4	95.834,6	29.601,1	125.435,6
Kabupaten Pesisir Barat	776.839.545.016,5	129.339.356.000,0	989.919,8	647.500.189.016,8	275.340,4	7.302,5	282.642,9
Kabupaten Pringsewu	379.361.990.517,3	320.503.671.250,2	483.417,6	58.858.319.267,0	53.622,0	18.387,0	72.009,0
Kabupaten Tanggamus	689.418.949.173,5	512.361.705.501,3	878.520,5	177.057.243.672,4	240.531,5	58.746,2	299.277,7
Kabupaten Tulang Bawang	2.181.527.280.857,4	338.390.477.999,5	2.779.901,0	1.843.136.802.856,7	278.399,3	23.891,2	302.290,5
Kabupaten Tulang Bawang Barat	996.035.860.764,9	227.279.295.000,1	1.269.239,7	768.756.565.764,6	122.448,3	2.364,2	124.812,5
Kabupaten Way Kanan	2.533.321.000.172,5	377.493.001.000,2	3.228.188,6	2.155.827.999.171,8	336.324,1	12.186,5	348.510,6
Kota Bandarlampung	113.138.242.079,8	949.498.060.750,8	144.171,1	- 836.359.818.671,1	6.406,2	15.785,4	22.191,7
Kota Metro	86.233.280.997,6	134.324.872.749,9	109.886,3	- 48.091.591.752,2	8.181,0	2.592,0	10.773,0
Jumlah	20.190.549.119.999,0	7.201.294.473.502,9	25.728.638,6	12.989.254.646.495,9	3.016.740,8	340.722,7	3.357.463,5

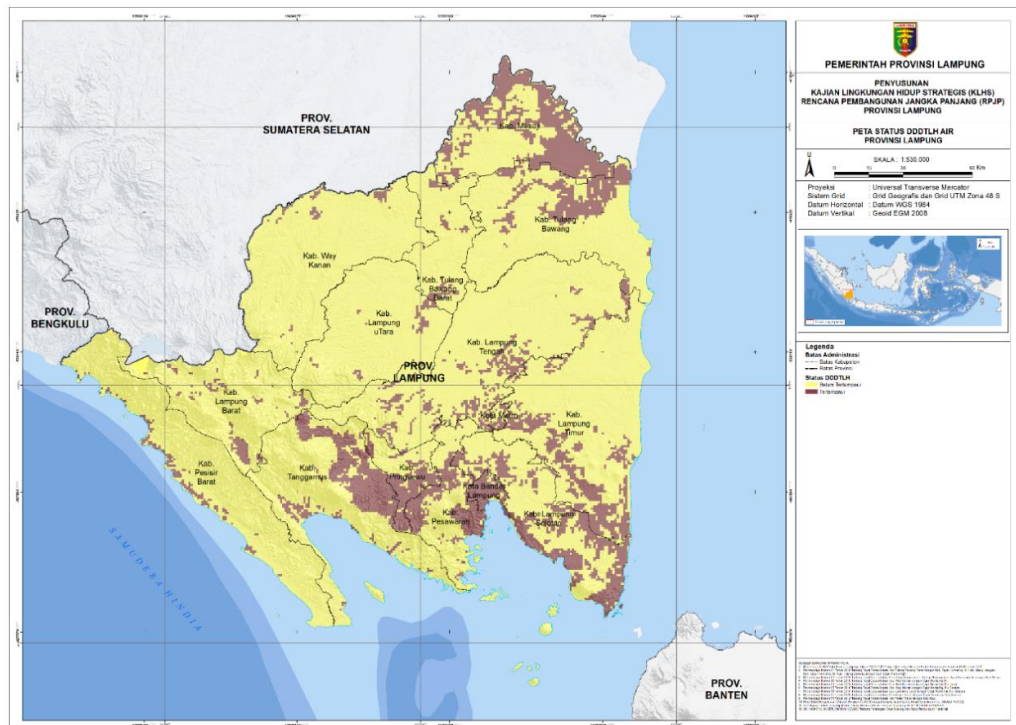
Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung,

2. Daya Dukung Air

Provinsi Lampung memiliki ketersediaan air mencapai 31.835.052.182 meter kubik per tahun, sedangkan kebutuhan total air sebesar 19.477.667.197,5 meter kubik per tahun, menghasilkan surplus sebesar 12.357.384.984,4 meter kubik per tahun yang menunjukkan bahwa ketersediaan air lebih besar dibandingkan kebutuhan. Sebagian besar wilayah memiliki ketersediaan air yang jauh melebihi kebutuhan. Misalnya, Lampung Tengah memiliki ketersediaan 5.240.695.972,0 meter kubik per tahun dan kebutuhan 2.896.205.474,9 meter kubik per tahun, dengan selisih 2.344.490.497,9 meter kubik per tahun. Namun, beberapa wilayah seperti Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pringsewu berada dalam kategori "Terlampau" dalam status daya dukung daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) air. Secara keseluruhan, Provinsi Lampung masih dalam kondisi baik terkait ketersediaan air, dengan lebih dari 2,7 juta hektar wilayah belum terlampau ambang batas populasi, menunjukkan bahwa potensi pengelolaan air di Provinsi Lampung masih bisa mendukung pembangunan berkelanjutan (Tabel 2.5).

Gambar 2. 3 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Provinsi Lampung



Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Tabel 2. 3 Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Ketersediaan	Kebutuhan Air Penggunaan Lahan	Kebutuhan Air Domestik	Kebutuhan Total	Selisih	Ambang Batas Populasi	Status DDDTLH (ha)		Jumlah (ha)
	m³/tahun						Belum Terlampaui	Terlampaui	
Kota Bandar Lampung	102.803.980,7	45.918.784,4	100.750.608,0	146.669.392,4	- 43.865.411,7	102.803.980,7	1.945,7	16.418,4	18.364,1
Kota Metro	86.502.933,8	71.638.715,1	14.573.520,0	86.212.235,1	290.698,7	108.128,7	3.831,7	3.405,9	7.237,6
Lampung Barat	1.804.273.400,8	1.101.907.937,7	26.139.024,0	1.128.046.961,7	676.226.439,2	2.255.341,8	196.370,9	15.581,8	211.952,7
Lampung Selatan	1.657.747.426,6	1.398.648.426,2	91.934.438,4	1.490.582.864,6	167.164.562,0	2.072.184,3	136.476,2	85.761,1	222.237,3
Lampung Tengah	5.240.695.972,0	2.770.025.963,7	126.179.510,4	2.896.205.474,1	2.344.490.497,9	6.550.870,0	406.915,6	47.863,0	454.778,6
Lampung Timur	4.049.215.216,2	1.739.864.240,3	95.970.182,4	1.835.834.422,7	2.213.380.793,5	5.061.519,0	318.012,1	68.776,0	386.788,1
Lampung Utara	2.609.602.388,7	1.375.055.679,1	54.751.420,8	1.429.807.099,9	1.179.795.288,8	3.262.003,0	258.374,6	7.156,0	265.530,6
Mesuji	1.657.079.110,7	1.593.104.004,0	19.651.852,8	1.612.755.856,8	44.323.253,9	2.071.348,9	110.769,8	108.555,8	219.325,6
Pesawaran	960.279.706,4	776.473.942,9	41.247.360,0	817.721.302,9	142.558.403,5	1.200.349,6	82.870,3	45.141,4	128.011,7
Pesisir Barat	2.760.643.022,1	785.947.396,4	14.058.403,2	800.005.799,6	1.960.637.222,5	3.450.803,8	285.721,7	13.480,9	299.202,6
Pringsewu	484.604.943,1	515.392.401,2	35.035.027,2	550.427.428,4	- 65.822.485,2	605.756,2	32.177,6	29.363,4	61.541,0
Tanggamus	2.155.321.986,6	1.543.916.472,8	55.387.238,4	1.599.303.711,2	556.018.275,4	2.694.152,5	214.294,2	75.899,2	290.193,4
Tulang Bawang	3.355.710.830,7	2.196.144.327,0	37.168.156,8	2.233.312.483,8	1.122.398.346,9	4.194.638,5	251.420,7	58.699,1	310.119,8
Tulang Bawang Barat	1.322.846.444,4	733.352.930,7	24.731.481,6	758.084.412,3	564.762.032,0	1.653.558,1	118.641,8	9.545,6	128.187,4
Way Kanan	3.587.724.818,9	2.051.735.684,7	40.962.067,2	2.092.697.751,9	1.495.027.067,0	4.484.656,0	344.444,4	7.934,0	352.378,4
Jumlah	31.835.052.182,0	18.699.126.906,3	778.540.291,2	19.477.667.197,5	12.357.384.984,4	39.793.815,2	2.762.267,3	593.581,6	3.355.848,9

Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

3. Daya Dukung Lahan

Provinsi Lampung berada pada daya dukung lahan potensial, Kendala dan limit dimana berada pada lahan potensial dengan luas 2.101.957,0 Ha, sedangkan daya dukung lahan limit sebesar 739.623,2 Ha, lahan limitasi (lindung) merupakan lahan yang memiliki keterbatasan atau pembatasan dalam penggunaannya atau kawasan yang mutlak tidak diperkenankan adanya kegiatan permukiman. Lahan potensial terbesar berada di Lampung Tengah seluas 396.644,7 Ha. Daya dukung lahan dengan kategori kendala hanya tersebar di beberapa wilayah dengan luas 515.883,3 Ha, lahan kendala merupakan area yang memiliki pembatasan dalam penggunaannya untuk kegiatan tertentu atau memiliki kemampuan lahan sedang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

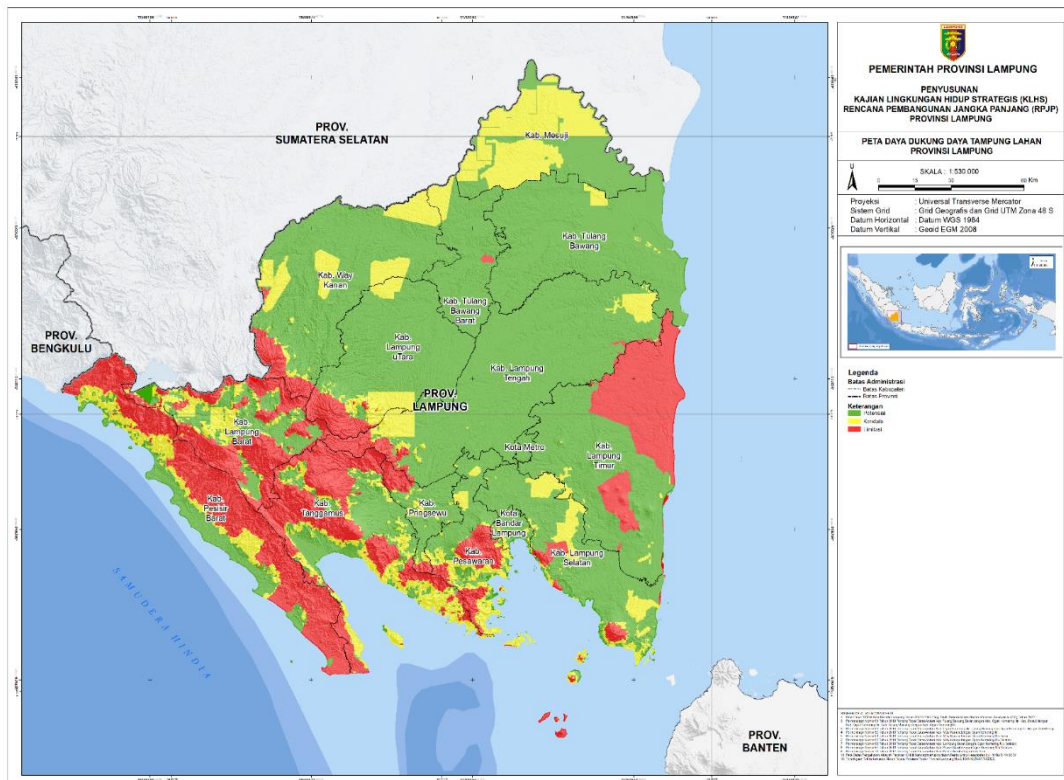
Tabel 2. 4 Luas Daya Dukung Lahan di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Daya Dukung Lahan (Ha)			Total
		Limit	Kendala	Potensial	
1	Kabupaten Lampung Barat	106.927,20	36.644,00	67.228,10	210.799,30
2	Kabupaten Lampung Selatan	16.891,30	45.895,90	159.945,80	222.733,00
3	Kabupaten Lampung Tengah	26.088,60	33.223,70	396.644,70	455.957,00
4	Kabupaten Lampung Timur	152.324,10	5.475,30	228.577,50	386.376,90
5	Kabupaten Lampung Utara	28.008,70	30.496,00	208.425,70	266.930,40
6	Kabupaten Mesuji		130.440,10	89.601,30	220.041,40
7	Kabupaten Pesawaran	34.341,60	35.032,20	59.437,80	128.811,70
8	Kabupaten Pesisir Barat	192.064,50	44.655,20	57.304,20	294.023,90
9	Kabupaten Pringsewu	13.039,30	5.301,80	43.378,20	61.719,20
10	Kabupaten Tanggamus	142.295,40	65.295,40	87.253,70	294.844,60
11	Kabupaten Tulang Bawang		5.754,70	305.855,00	311.609,60
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1.374,60	10.431,40	113.902,80	125.708,80
13	Kabupaten Way Kanan	25.779,30	64.264,60	262.167,40	352.211,40
14	Kota Bandarlampung	488,5	2.973,00	14.913,40	18.374,90
15	Kota Metro			7.321,40	7.321,40
	Provinsi Lampung	739.623,20	515.883,30	2.101.957,00	3.357.463,50

Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Gambar 2. 4 Peta Daya Dukung Lahan di Provinsi Lampung



Keterangan : Data Termutakhir

Sumber : Hasil analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Provinsi Lampung, 2025-2045

2.1.1.4. Jasa Lingkungan Hidup

Secara operasional, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dengan pendekatan konsep Jasa Lingkungan Hidup, memiliki asumsi dasar sebagai berikut:

- Semakin tinggi Jasa Lingkungan Hidup suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- Semakin tinggi Jasa Lingkungan Hidup suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

1. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan terdiri dari klasifikasi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Provinsi Lampung didominasi oleh Jasa Penyedia Pangan **sangat tinggi** dengan luas lahan 1.165.227,7 Ha. Hal ini sesuai dengan kondisi wilayah di Provinsi Lampung yang memiliki luas tutupan lahan Pertanian Lahan Kering

Campur seluas 1.265.828,1 Ha. Jasa Penyedia Pangan terluas berada di Kabupaten Lampung Tengah yaitu seluas 208.064,7 Ha, dan terkecil berada di Kota Bandar Lampung dengan luasan sebesar 657,8 Ha.

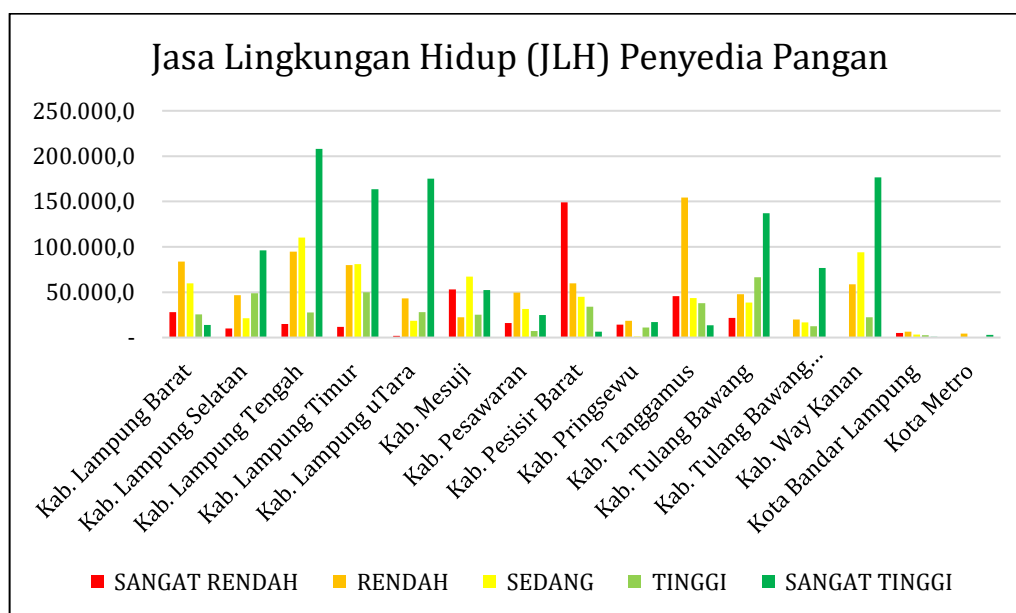
Tabel 2. 5 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

No.	Kabupaten/Kota	Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan (Ha)					Jumlah
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	27.938,4	83.639,7	59.864,8	25.529,9	13.826,5	210.799,4
2	Kab. Lampung Selatan	9.855,7	46.572,0	21.390,2	48.689,1	96.226,1	222.733,0
3	Kab. Lampung Tengah	15.011,6	94.826,4	110.393,0	27.661,2	208.064,7	455.957,0
4	Kab. Lampung Timur	11.728,8	80.047,1	80.943,1	49.991,1	163.666,8	386.376,9
5	Kab. Lampung Utara	1.848,3	43.251,4	18.566,5	28.017,6	175.246,6	266.930,4
6	Kab. Mesuji	53.026,7	22.432,3	67.205,1	25.154,5	52.222,8	220.041,4
7	Kab. Pesawaran	15.994,0	49.371,8	31.399,6	7.061,5	24.984,7	128.811,7
8	Kab. Pesisir Barat	148.996,0	59.708,6	44.792,7	34.014,8	6.511,8	294.023,9
9	Kab. Pringsewu	14.192,3	18.520,3	1.183,1	10.893,3	16.930,1	61.719,2
10	Kab. Tanggamus	45.541,0	154.298,1	43.597,9	37.840,5	13.567,0	294.844,6
11	Kab. Tulang Bawang	21.602,3	47.754,7	38.614,5	66.504,9	137.133,2	311.609,6
12	Kab. Tulang Bawang Barat	0,0	19.991,8	16.665,7	12.414,7	76.636,4	125.708,8
13	Kab. Way Kanan	244,6	58.700,4	94.115,6	22.474,7	176.676,0	352.211,4
14	Kota Bandar Lampung	5.099,8	6.509,8	3.365,2	2.742,3	657,8	18.374,9
15	Kota Metro		4.444,3			2.877,1	7.321,4
Jumlah		371.079,6	790.068,7	632.097,1	398.990,3	1.165.227,7	3.357.463,5

Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Gambar 2. 5 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Prov. Lampung



Keterangan : Data Termutakhir

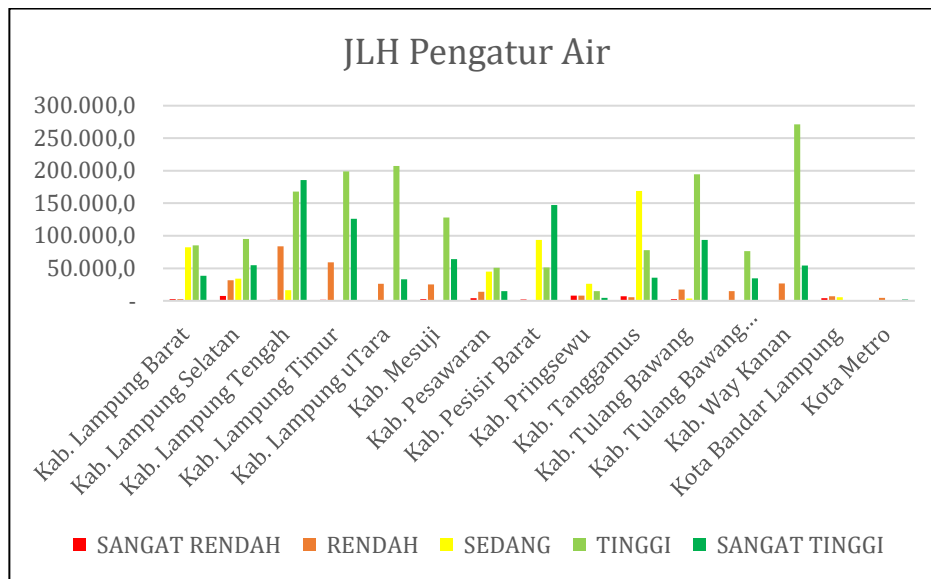
Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045

2. Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air

Tabel 2. 6 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air (Ha)					Jumlah
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	2.428,2	2.380,1	82.382,3	85.339,1	38.269,6	210.799,4
2	Kab. Lampung Selatan	7.282,9	31.628,0	33.915,6	95.327,5	54.579,0	222.733,0
3	Kab. Lampung Tengah	1.663,1	83.847,2	16.498,6	168.093,9	185.854,1	455.957,0
4	Kab. Lampung Timur	1.784,2	58.972,6	880,7	198.860,4	125.878,9	386.376,9
5	Kab. Lampung uTara		26.329,0		207.442,4	33.159,1	266.930,4
6	Kab. Mesuji	2.736,9	25.352,3	13,1	127.883,5	64.055,6	220.041,4
7	Kab. Pesawaran	4.005,6	13.714,1	45.059,9	51.010,8	15.021,3	128.811,7
8	Kab. Pesisir Barat	2.250,2	2,4	93.395,3	51.254,8	147.121,3	294.023,9
9	Kab. Pringsewu	7.990,1	7.851,5	26.413,8	14.899,7	4.564,0	61.719,2
10	Kab. Tanggamus	6.927,4	5.514,6	169.041,1	77.780,0	35.581,5	294.844,6
11	Kab. Tulang Bawang	2.786,3	17.533,7	3.519,1	194.369,7	93.400,8	311.609,6
12	Kab. Tulang Bawang Barat	0,0	14.792,0		76.461,7	34.455,1	125.708,8
13	Kab. Way Kanan		26.808,3		271.315,3	54.087,8	352.211,4
14	Kota Bandar Lampung	3.908,5	7.122,2	5.725,6	1.352,0	266,6	18.374,9
15	Kota Metro		4.444,3		710,8	2.166,3	7.321,4
Jumlah		43.763,5	326.292,3	476.845,1	1.622.101,5	888.461,0	3.357.463,5

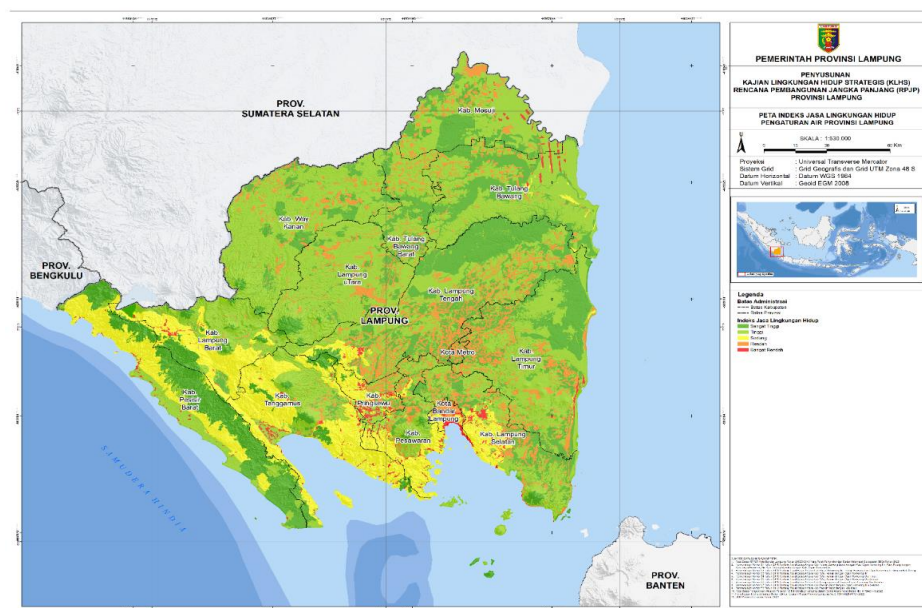
Gambar 2. 7 Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air di Provinsi Lampung



Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Gambar 2. 8 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air di Prov. Lampung



Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045

3. Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama

Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama terdiri dari klasifikasi Sangat Rendah, Rendah, Sedang dan Tinggi namun Provinsi Lampung didominasi dengan klasifikasi Tinggi seluas 1.803.258,6 Ha, sedangkan klasifikasi Rendah seluas 588.896,6 Ha yang lokasinya juga tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Lampung.

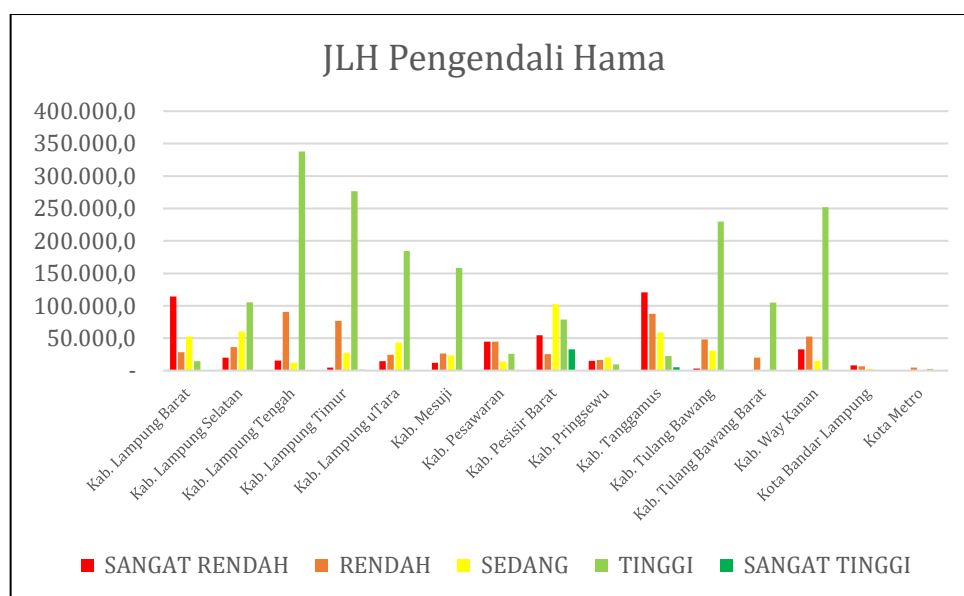
Tabel 2. 7 Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama dan Penyakit (Ha)					Jumlah
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	114.411,5	28.528,3	52.749,2	14.436,5	673,9	210.799,4
2	Kab. Lampung Selatan	20.043,3	36.158,6	60.657,6	105.300,0	573,4	222.733,0
3	Kab. Lampung Tengah	15.361,6	90.533,5	12.300,4	337.760,0	1,5	455.957,0
4	Kab. Lampung Timur	4.416,0	76.872,0	27.216,6	276.597,3	1.275,0	386.376,9
5	Kab. Lampung Utara	14.453,1	24.593,7	43.345,8	184.537,8		266.930,4
6	Kab. Mesuji	12.116,7	26.243,6	23.366,6	157.957,9	356,5	220.041,4
7	Kab. Pesawaran	44.481,8	44.547,2	14.082,4	25.700,3		128.811,7
8	Kab. Pesisir Barat	54.332,4	25.609,9	102.305,4	78.843,8	32.932,4	294.023,9
9	Kab. Pringsewu	15.074,2	16.506,3	20.381,4	9.757,4		61.719,2
10	Kab. Tanggamus	120.484,5	87.757,5	59.116,7	22.543,1	4.942,8	294.844,6
11	Kab. Tulang Bawang	3.239,9	47.867,2	30.744,8	229.663,3	94,4	311.609,6
12	Kab. Tulang Bawang Barat	0,0	20.207,5	780,4	104.720,9		125.708,8
13	Kab. Way Kanan	32.869,0	52.374,3	14.977,4	251.990,7		352.211,4
14	Kota Bandar Lampung	8.263,2	6.652,5	2.886,5	572,7		18.374,9
15	Kota Metro		4.444,3		2.877,1		7.321,4
Jumlah		459.547,2	588.896,6	464.911,3	1.803.258,6	40.849,7	3.357.463,5

Keterangan : Data Termutakhir

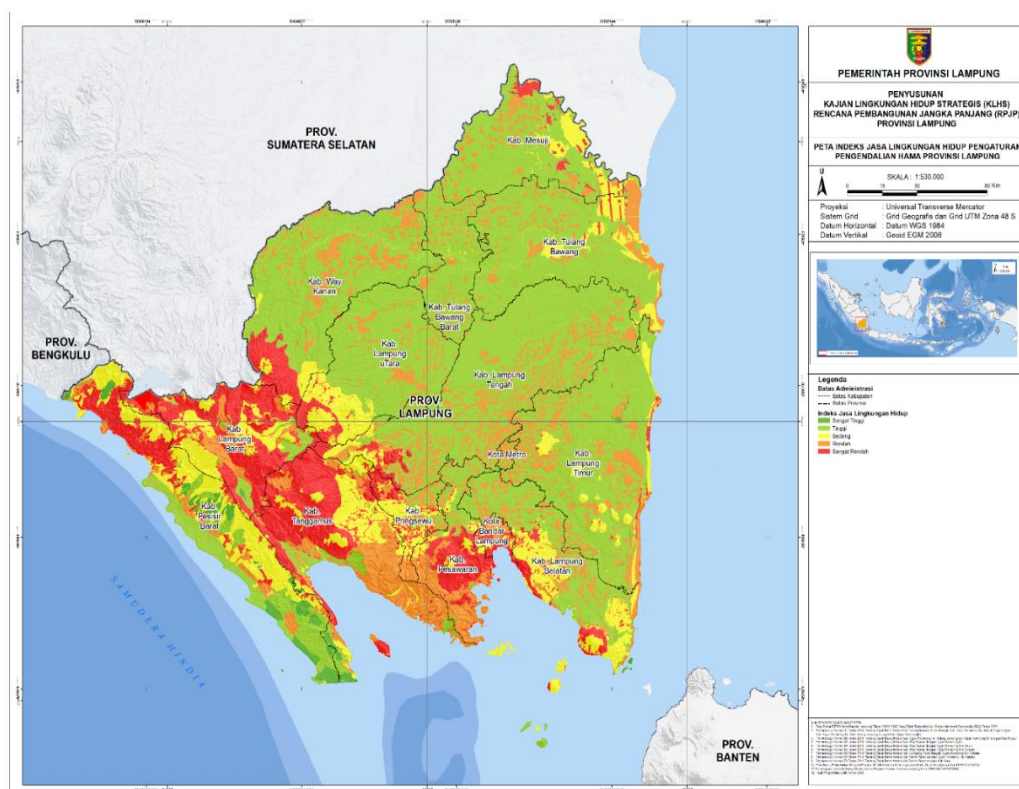
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Gambar 2. 9 JLH Pengendali Hama Kab/Kota Provinsi Lampung



Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Gambar 2. 10 Peta IJLH Pengendali Hama



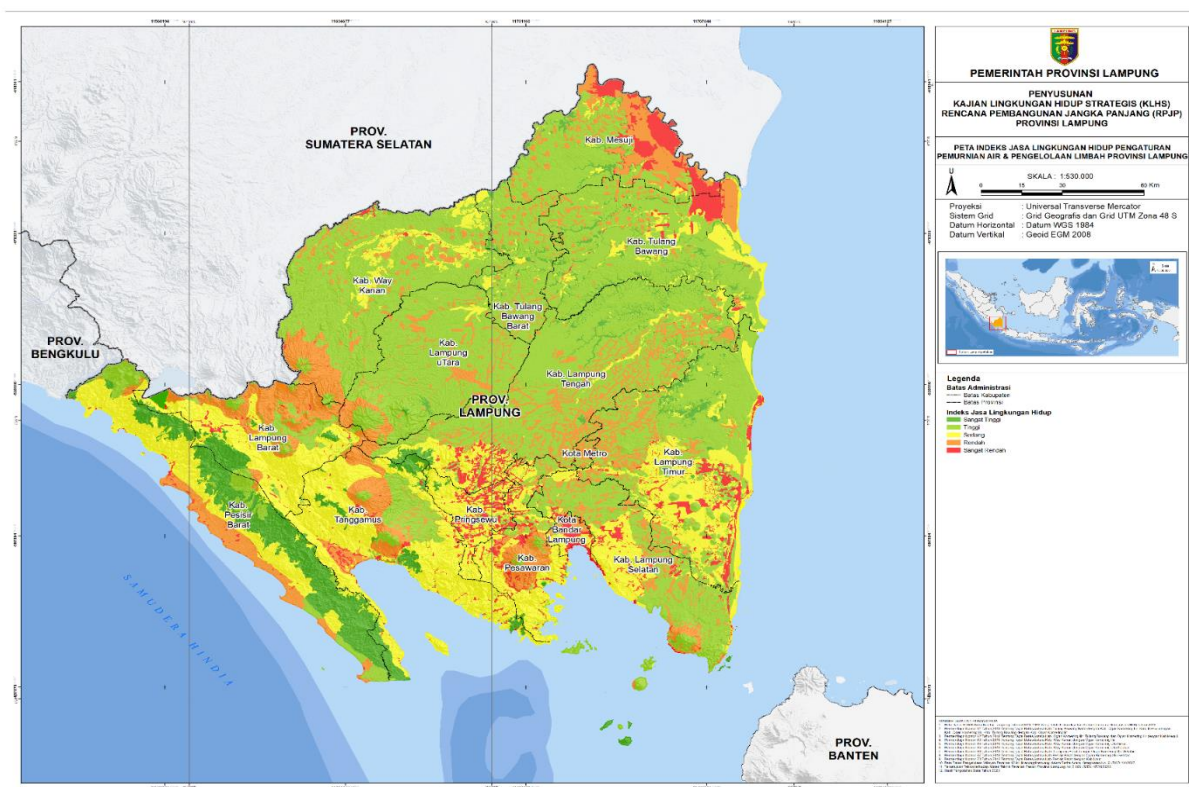
Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045

4. Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah

Jasa Lingkungan Hidup Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah berada pada klasifikasi Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi dan Sangat Tinggi. Luasan Jasa Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah di Provinsi Lampung yang berada dalam klasifikasi Rendah sebesar 528.499,7 Ha, Sedang seluas 768.101,6 Ha, serta klasifikasi Tinggi seluas 1.661.262,6 Ha.

Jasa pemurnian air dan pengolahan limbah tinggi sebesar 1.661.262,6 Ha yang merupakan luasan paling besar di Provinsi Lampung dan tersebar di seluruh Kabupaten, sedangkan jasa pemurnian air dan pengolahan limbah sangat tinggi memiliki luas sebesar 241.259,4 Ha.

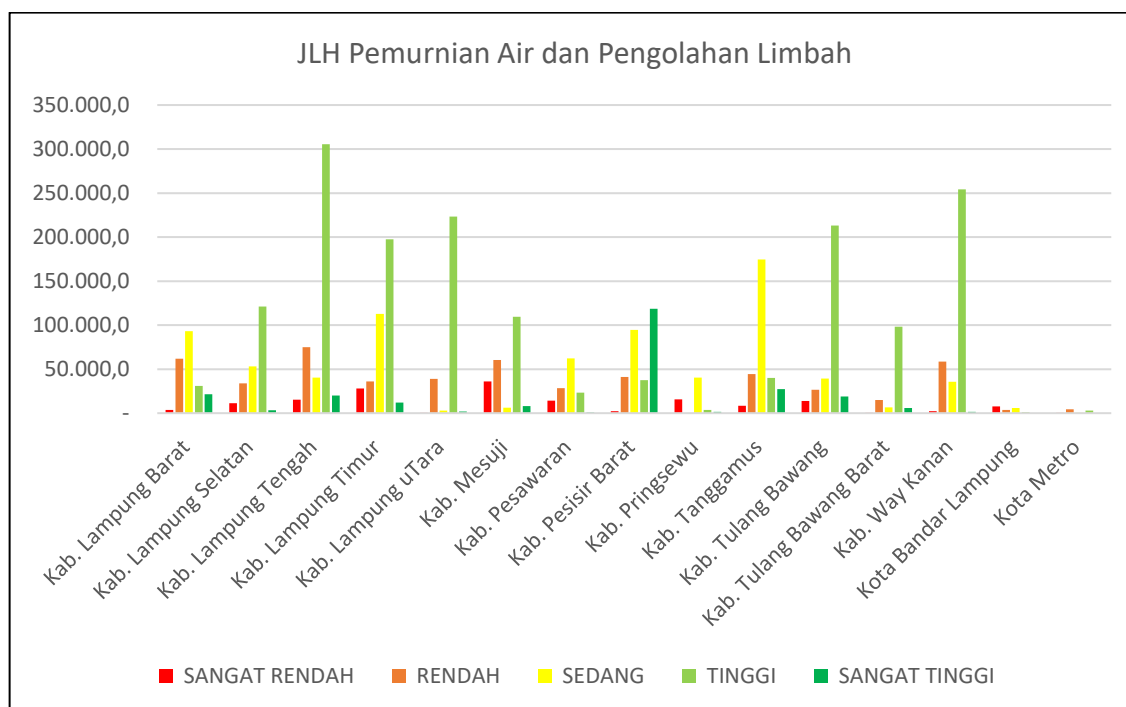
Gambar 2. 11 Peta IJLH Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah



Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045

Gambar 2. 12 JLH Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah



Keterangan : Data Termutakhir

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045

Tabel 2. 8 JLH Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Jasa Lingkungan Hidup Pemurnian Air dan pengolahan limbah (Ha)					Jumlah
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	3.612,2	61.740,5	93.184,9	30.755,2	21.506,4	210.799,4
2	Kab. Lampung Selatan	11.256,4	33.994,8	53.003,4	121.236,0	3.242,5	222.733,0
3	Kab. Lampung Tengah	15.126,9	75.038,8	40.231,1	305.416,5	20.143,6	455.957,0
4	Kab. Lampung Timur	27.867,9	36.059,2	112.892,1	197.384,2	12.173,5	386.376,9
5	Kab. Lampung Utara	125,4	38.829,6	2.875,9	223.322,4	1.777,1	266.930,4
6	Kab. Mesuji	35.902,4	60.542,9	6.287,3	109.390,0	7.918,8	220.041,4
7	Kab. Pesawaran	14.234,2	28.476,9	62.208,5	23.186,4	705,7	128.811,7
8	Kab. Pesisir Barat	2.222,4	41.058,1	94.696,6	37.433,5	118.613,4	294.023,9
9	Kab. Pringsewu	15.841,6		40.557,0	3.802,6	1.517,9	61.719,2
10	Kab. Tanggamus	8.429,9	44.536,0	174.542,6	40.023,1	27.312,9	294.844,6
11	Kab. Tulang Bawang	13.667,9	26.680,7	39.237,1	212.988,6	19.035,3	311.609,6
12	Kab. Tulang Bawang Barat	158,0	14.849,7	6.561,3	98.235,4	5.904,5	125.708,8
13	Kab. Way Kanan	2.209,7	58.582,5	35.711,8	254.299,5	1.407,9	352.211,4
14	Kota Bandar Lampung	7.626,4	3.724,3	5.991,6	1.032,6		18.374,9
15	Kota Metro	58,8	4.385,5	120,4	2.756,7		7.321,4
Jumlah		158.340,0	528.499,7	768.101,6	1.661.262,6	241.259,4	3.357.463,5

Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Hasil Pengolahan GIS, 2023

5. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Mitigasi Bencana Alam

Jasa lingkungan hidup pengaturan Mitigasi Bencana Alam di Provinsi Lampung terdiri dari klasifikasi jasa ekosistem sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Luasan untuk jasa ekosistem pengaturan Mitigasi Bencana Alam rendah sebesar 592.392,1 ha, jasa ekosistem Mitigasi Bencana Alam sedang sebesar 1.874.068,9 Ha, jasa ekosistem Mitigasi Bencana Alam tinggi sebesar 462.830,1 Ha dan jasa ekosistem Mitigasi Bencana Alam sangat tinggi sebesar 76.018,4 ha. Dimana jasa ekosistem yang mendominasi di Provinsi Lampung adalah jasa lingkungan hidup mitigasi bencana sedang.

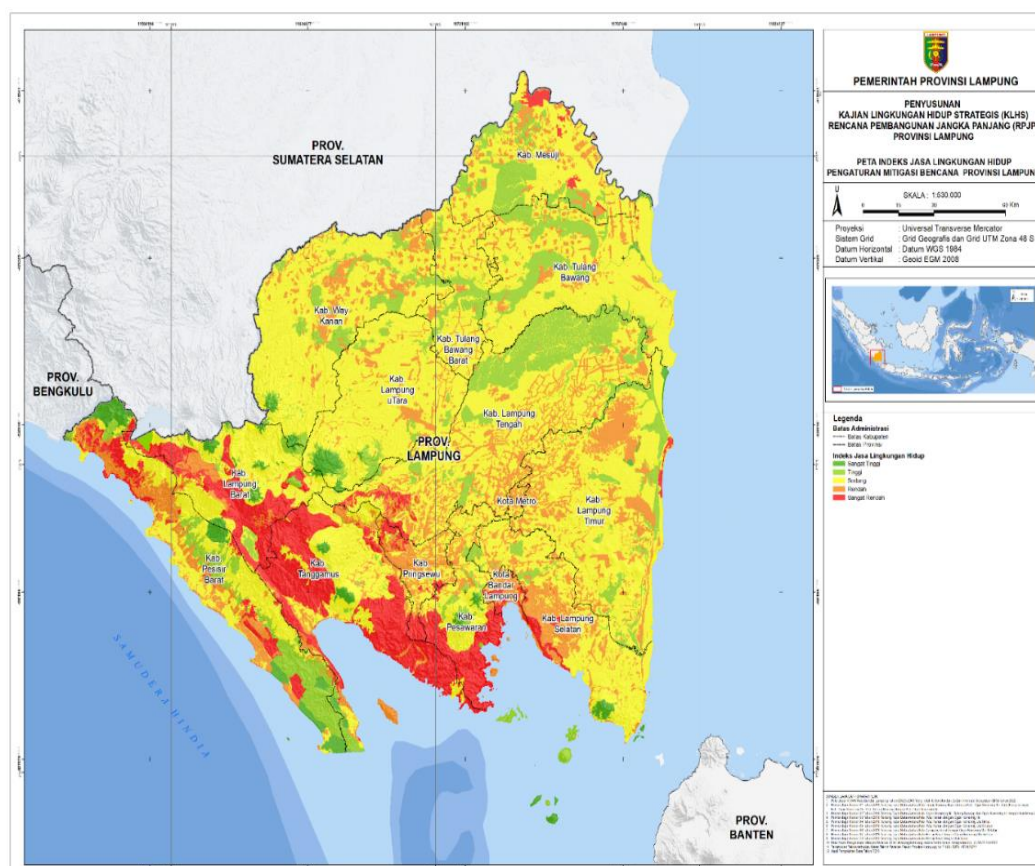
Tabel 2. 9 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Mitigasi Bencana Alam di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Bencana Alam (Ha)					Jumlah
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	71.367,9	16.329,8	97.383,4	15.352,5	10.365,8	210.799,4
2	Kab. Lampung Selatan	8.701,2	64.672,3	127.238,7	15.039,6	7.081,1	222.733,0
3	Kab. Lampung Tengah	10.532,7	93.458,0	244.167,2	107.701,6	97,6	455.957,0
4	Kab. Lampung Timur	2.511,5	95.656,0	248.614,9	36.982,9	2.611,6	386.376,9
5	Kab. Lampung Utara		26.338,4	211.588,5	19.336,0	9.667,4	266.930,4
6	Kab. Mesuji	9.379,8	35.043,4	120.711,0	54.819,9	87,3	220.041,4
7	Kab. Pesawaran	45.220,0	15.594,6	52.565,1	11.949,3	3.482,6	128.811,7
8	Kab. Pesisir Barat	34.751,1	65.193,4	99.540,8	64.814,7	29.723,9	294.023,9
9	Kab. Pringsewu	11.537,9	30.492,3	19.335,0	354,0		61.719,2
10	Kab. Tanggamus	152.015,0	30.262,8	96.378,6	9.163,0	7.025,1	294.844,6
11	Kab. Tulang Bawang	398,0	31.809,4	216.611,9	61.082,1	1.708,2	311.609,6
12	Kab. Tulang Bawang Barat	0,0	20.207,5	84.655,4	20.845,9		125.708,8
13	Kab. Way Kanan		51.905,8	250.779,0	45.358,8	4.167,8	352.211,4
14	Kota Bandar Lampung	5.738,9	10.983,9	1.622,3	29,8		18.374,9
15	Kota Metro		4.444,3	2.877,1			7.321,4
Jumlah		352.154,0	592.392,1	1.874.068,9	462.830,1	76.018,4	3.357.463,5

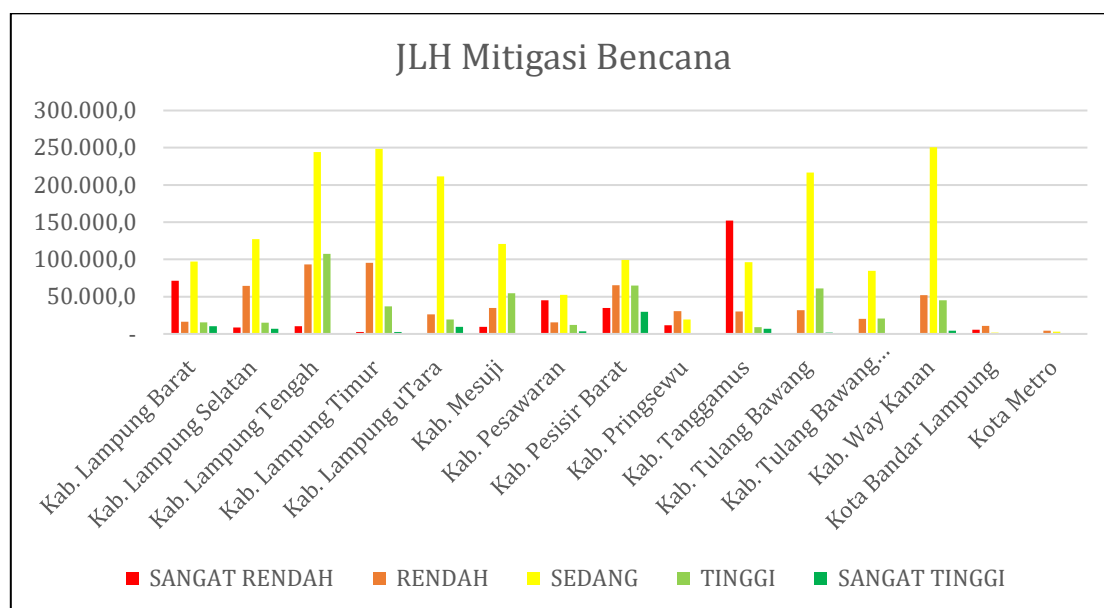
Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Gambar 2. 13 Peta JLH Pengaturan Mitigasi Bencana Alam



Gambar 2. 14 Jasa Mitigasi Bencana Alam di Prov. Lampung



Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

6. Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiversitas

Tingkat keanekaragaman hayati di Provinsi Lampung diasumsikan dengan menggunakan jasa lingkungan hidup pendukung biodiversitas. Sebagian besar Provinsi Lampung berada pada kelas jasa lingkungan hidup pendukung biodiversitas sedang dengan luasan sebesar 1.895.294,3 Ha. Untuk kelas tinggi memiliki luas sebesar 368.494,1 Ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten hanya Kota Metro tidak termasuk pada jasa pendukung biodiversitas tinggi.

Tabel 2. 10Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiversitas di Provinsi Lampung

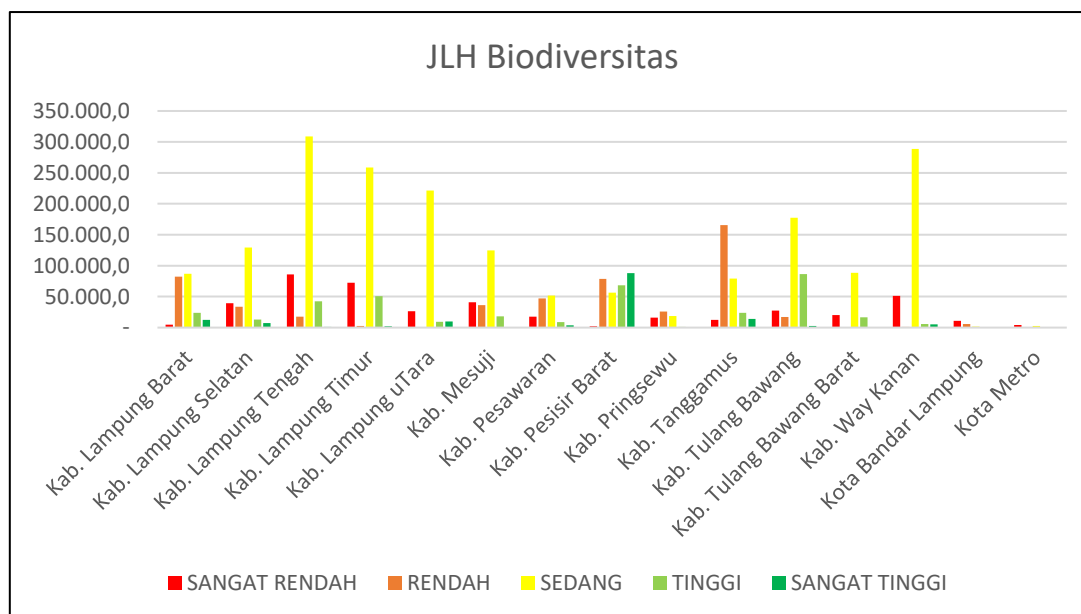
No.	Kabupaten	Jasa Lingkungan Hidup Biodiversitas (Ha)					Jumlah
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	4.830,5	82.354,9	86.972,7	24.033,6	12.607,5	210.799,4
2	Kab. Lampung Selatan	39.221,1	33.817,9	129.485,3	13.127,5	7.081,1	222.733,0
3	Kab. Lampung Tengah	86.026,8	17.789,9	308.850,1	42.375,7	914,5	455.957,0
4	Kab. Lampung Timur	72.678,8	2.619,6	258.543,9	50.630,1	1.904,5	386.376,9
5	Kab. Lampung Utara	26.409,9	21,2	221.531,3	9.300,6	9.667,4	266.930,4
6	Kab. Mesuji	40.892,9	36.380,7	124.650,7	18.117,0		220.041,4
7	Kab. Pesawaran	17.719,7	47.333,7	51.536,2	8.739,5	3.482,6	128.811,7
8	Kab. Pesisir Barat	2.261,0	78.924,6	56.592,2	68.176,7	88.069,3	294.023,9
9	Kab. Pringsewu	15.841,6	26.125,3	18.581,0	1.103,0	68,2	61.719,2
10	Kab. Tanggamus	12.506,5	165.371,9	79.060,9	23.669,6	14.235,6	294.844,6

No.	Kabupaten	Jasa Lingkungan Hidup Biodiversitas (Ha)					Jumlah
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
11	Kab. Tulang Bawang	27.503,4	17.180,5	177.609,5	86.625,2	2.691,0	311.609,6
12	Kab. Tulang Bawang Barat	19.991,8	215,7	88.524,7	16.616,4	360,1	125.708,8
13	Kab. Way Kanan	51.259,3	1.118,6	288.739,0	5.962,3	5.132,2	352.211,4
14	Kota Bandar Lampung	11.030,7	5.587,9	1.739,6	16,6		18.374,9
15	Kota Metro	4.444,3		2.877,1			7.321,4
Jumlah		432.618,5	514.842,5	1.895.294,3	368.494,1	146.214,1	3.357.463,5

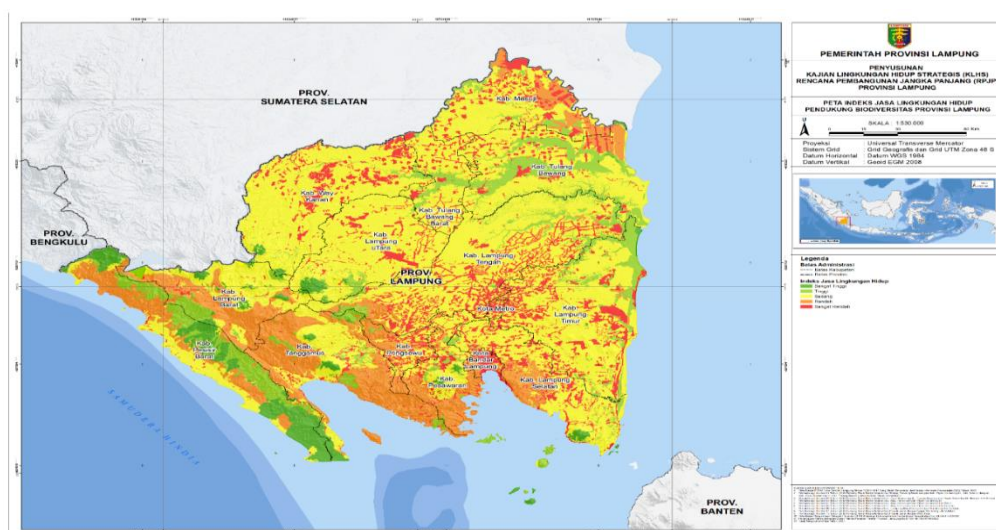
Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Gambar 2. 15 JLH Biodiversitas



Gambar 2. 16 Peta JLH Pendukung Biodiversitas



Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045

7. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim

Jasa ekosistem pengaturan iklim di Provinsi Lampung terdiri dari klasifikasi jasa ekosistem sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Luasan untuk jasa ekosistem pengaturan iklim sangat rendah adalah sebesar 503.713,6 Ha, jasa ekosistem pengaturan iklim rendah sebesar 1.254.500,5 Ha, jasa ekosistem pengaturan iklim sedang sebesar 890.746,2 Ha, jasa ekosistem pengaturan iklim tinggi sebesar 547.346,9 Ha dan jasa ekosistem pengaturan iklim sangat tinggi sebesar 161.156,3 Ha. Dimana jasa ekosistem yang mendominasi di Provinsi Lampung adalah jasa ekosistem pengaturan iklim rendah seluas 1.254.500,5 Ha

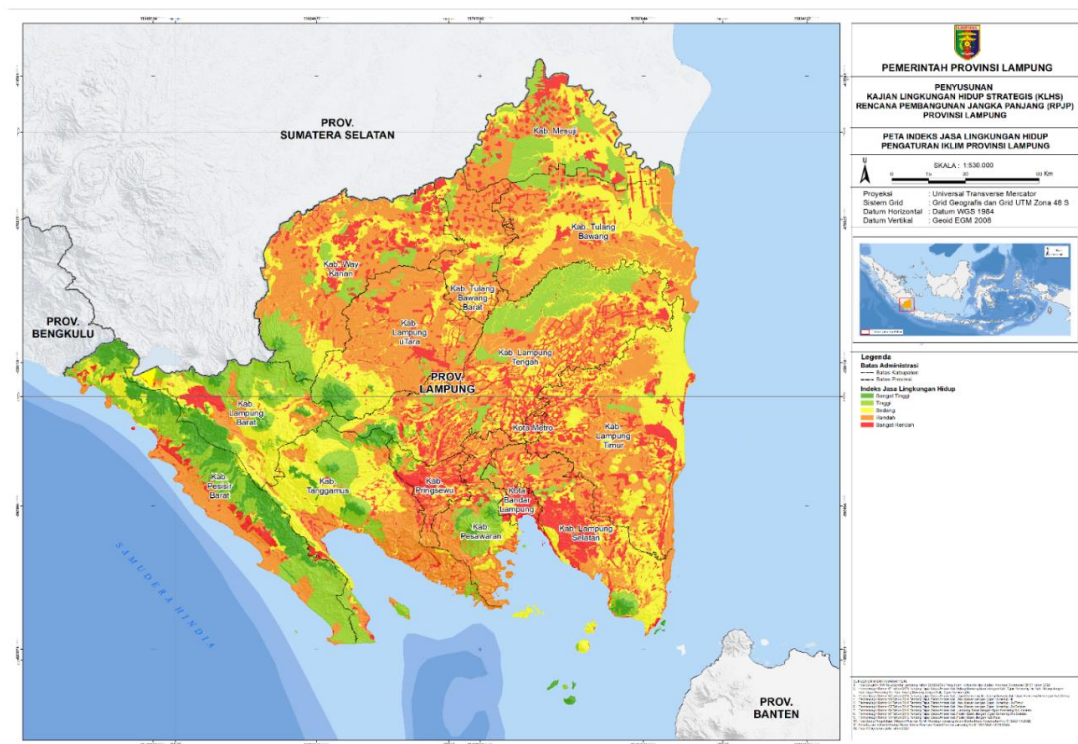
Tabel 2. 11 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten	Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim (Ha)					Jumlah
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	13.196,8	33.257,5	70.234,2	66.163,9	27.947,0	210.799,4
2	Kab. Lampung Selatan	65.113,4	70.137,0	64.831,5	15.570,0	7.081,1	222.733,0
3	Kab. Lampung Tengah	88.957,3	150.706,7	117.302,5	94.413,4	4.577,0	455.957,0
4	Kab. Lampung Timur	75.298,4	150.869,9	154.489,0	5.719,6		386.376,9
5	Kab. Lampung Utara	26.317,3	159.483,9	52.147,7	19.314,1	9.667,4	266.930,4
6	Kab. Mesuji	36.607,1	58.902,3	59.585,8	64.859,0	87,3	220.041,4
7	Kab. Pesawaran	16.706,2	57.033,4	20.750,4	28.429,9	5.891,8	128.811,7
8	Kab. Pesisir Barat	18.514,3	60.377,3	24.134,9	106.994,4	84.003,1	294.023,9
9	Kab. Pringsewu	26.577,0	22.171,7	8.471,7	3.398,1	1.100,8	61.719,2
10	Kab. Tanggamus	19.168,6	96.207,1	105.728,4	58.758,8	14.981,6	294.844,6
11	Kab. Tulang Bawang	27.320,2	165.601,7	103.180,2	13.856,0	1.651,5	311.609,6
12	Kab. Tulang Bawang Barat	20.207,5	66.854,5	30.596,0	8.050,8		125.708,8
13	Kab. Way Kanan	52.143,3	161.328,2	73.225,3	61.346,8	4.167,8	352.211,4
14	Kota Bandar Lampung	13.141,9	858,4	3.902,4	472,1		18.374,9
15	Kota Metro	4.444,3	710,8	2.166,3			7.321,4
Jumlah		503.713,6	1.254.500,5	890.746,2	547.346,9	161.156,3	3.357.463,5

Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Gambar 2. 17 Peta IJLH Pengaturan Iklim di Provinsi Lampung



Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

2.1.1.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

IKLH Provinsi Lampung tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 Tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan dan berada pada status “sedang” yaitu 69,91. Namun, masih perlu upaya kerja keras pada semua pemangku kepentingan karena pada dasarnya komponen IKLH pada indikator IKA dan IKL masih di bawah target.

Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Lampung mencapai angka 55,36 (kategori sedang) dan tidak mencapai target SE Menteri LHK yaitu 58,54. Capaian indeks kualitas air berada dibawah target diduga karena banyak limbah domestik (rumah tangga & UMKM) dan industri, limbah pertanian yang masuk dalam badan sungai serta terdapat lahan terbuka (kritis) yang berpotensi erosi dimana partikel padatan yang masuk ke dalam badan sungai berdampak pada jumlah padatan terlarut di air. Selain itu,

kabupaten/kota tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dan mengalami pengembangan/pembangunan perekonomian yang berdampak terhadap penurunan kualitas air.

Berdasarkan data trend perubahan **indeks kualitas udara** Provinsi Lampung selama periode 2021-2023 mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 mencapai 88,04 (baik), yang melampaui target SE Men LHK yaitu 84,44. Selain itu, **Indeks Kualitas Air Laut** Provinsi Lampung yaitu 83,78 dan masuk kategori baik.

Indeks Kualitas Lahan Provinsi Lampung masih sangat rendah yaitu hanya 38,42 dan masuk kategori **kurang**. Berdasarkan data trend perubahan indeks kualitas lahan Provinsi Lampung selama periode 2021-2023 mengalami peningkatan namun masih berada dibawah target SE Men LHK yaitu 43,03. Capaian indeks kualitas lahan berada dibawah target diduga karena pembukaan hutan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, industri yang berakibat pada pengurangan tutupan hutan yang berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan.

Tabel 2. 12 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Capaian IKA			Capaian IKU			Capaian IKL			Capaian IKAL			Capaian IKLH			Target IKLH (SE No.4 RPJMD)			Kriteria/ Status IKLH 2023
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Kabupaten Lampung Barat	60,00	63,08	66,06	84,73	88,03	90,52	41,63	40,81	41,33	-	-	-	65,99	68,31	70,55	64,27	64,92	65,99	Baik
Kabupaten Lampung Selatan	60,00	55,00	50,51	87,37	87,89	84,7	26,13	26,10	33,12	-	-	-	63,67	61,99	60,55	60,94	61,39	61,93	Sedang
Kabupaten Lampung Tengah	56,67	50,00	53,33	83,46	82,55	84,09	24,48	24,64	26,75	-	-	-	60,47	57,63	59,97	62,97	63,38	63,00	Sedang
Kabupaten Lampung Timur	53,53	49,46	50,54	86,15	87,73	87,74	45,75	45,79	48,80	-	-	-	65,04	64,16	65,22	63,19	63,88	63,79	Sedang
Kabupaten Lampung Utara	57,50	55,93	-	86,75	88,2	86,98	25,7	25,7	29,72	-	-	-	62,38	62,38	41,73	60,45	60,65	64,58	Kurang
Kabupaten Mesuji	58,57	61,43	59,00	87,05	88,46	89,5	28,13	28,14	28,54	-	-	-	63,44	65,09	64,68	61,83	62,48	62,24	Sedang
Kabupaten Pesawaran	60,00	57,78	63,33	91,83	91,00	89,37	25,73	25,71	38,59	-	-	-	65,39	64,21	68,46	62,16	62,71	63,13	Sedang
Kabupaten Pesisir Barat	52,86	50,00	50,00	87,63	89,06	89,9	73,93	73,93	78,67	-	-	-	71,56	71,06	72,44	61,20	61,72	73,87	Baik
Kabupaten Pringsewu	63,33	50,65	52,22	86,03	86,76	88,98	23,63	23,5	35,00	-	-	-	63,83	59,33	63,34	61,83	62,41	63,26	Sedang
Kabupaten Tanggamus	57,92	51,54	53,75	84,22	86,78	86,97	34,42	34,42	42,57	-	-	-	63,42	62,06	64,75	64,74	65,36	65,57	Sedang
Kabupaten Tulang Bawang	56,67	50,00	50,00	90,15	92,74	92,03	24,09	24,11	24,79	-	-	-	63,09	61,64	61,5	60,89	61,41	61,12	Sedang
Kabupaten Tulang Bawang Barat	60,00	52,22	50,00	85,18	88,49	88,15	23,61	23,61	26,51	-	-	-	62,23	60,64	60,31	62,01	62,64	64,48	Sedang
Kabupaten Way Kanan	50,00	67,33	63,33	80,39	84,75	91,94	23,47	39,19	28,10	-	-	-	56,5	68,22	67,2	63,27	63,87	68,43	Sedang
Kota Bandar Lampung	63,75	50,95	50,00	82,31	83,73	82,54	25,89	26,43	28,08	-	-	-	62,98	58,86	58,38	73,21	73,54	61,84	Sedang
Kota Metro	50,00	50,69	50,00	78,69	83,62	87,2	22,59	22,59	36,71	-	-	-	55,62	57,87	62,15	67,22	67,83	60,84	Sedang
Provinsi Lampung	57,77	54,72	55,36	85,46	87,32	88,04	33,54	34,29	38,42	79,56	86,48	83,87	68,56	69,1	69,91	68,23	68,66	69,09	Sedang
Nasional	55,20	55,30	54,55	87,36	88,05	88,65	62,5	63,5	61,75	59,00	59,50	78,58	71,45	72,42	72,48	68,96	69,22	69,48	Baik

Sumber : KLHK, 2023 (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>)

Dari Indeks Kualitas Air (IKA) terlihat bahwa dari 8 (delapan) parameter kualitas air yang dianalisa parameter COD, DO, BOD, dan Total Phospat sebagian besar memiliki indeks pencemar lebih dari batas ambang. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air yang dianalisa sudah tercemar limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat atau masyarakat menjadikan sungai sebagai MCK dan kualitas air mengalami penurunan yang disebabkan oleh limbah domestik maupun limbah industri. Untuk kualitas udara yang mengalami penurunan (Lampung Selatan) dan belum mencapai target (Lampung Tengah) hal ini disebabkan karena adanya penurunan kualitas udara disebabkan peningkatan polutan SO₂ dan NO₂ sehingga terjadi penurunan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU). Selain itu, pada parameter IKU data yang ada belum dapat mencerminkan kualitas udara yang sebenarnya karena tidak sesuai dengan pola kecenderungan kualitas udara seharusnya. Lokasi perkotaan kualitas udaranya kurang bila dibandingkan dengan kabupaten yang kepadatannya masih rendah, begitu juga untuk kawasan transportasi dan industri seharusnya kualitas udaranya lebih rendah bila dibandingkan dengan kawasan pemukiman dan perkantoran. Indeks kualitas lahan Provinsi Lampung masih dibawah target. Hal ini menunjukkan bahwa ada alih fungsi lahan dari hutan menjadi penggunaan lain. Perubahan penutupan lahan masih terjadi, dan belum sebanding dengan upaya pemulihan tutupan lahan melalui berbagai program kegiatan baik yang dilakukan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, Dunia Usaha maupun swadaya masyarakat. Berbagai program kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (agroforestri) yang dilakukan tersebut belum dapat terdeteksi sebagai tutupan hutan oleh citra satelit karena untuk dapat terdeteksi sebagai tutupan hutan dibutuhkan waktu beberapa tahun dan tanaman yang ditanam harus dalam perawatan dan dalam kondisi yang baik. Karena keterbatasan data tutupan lahan yang ada dalam perhitungan ini menggunakan data tutupan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui metode inteprestasi citra sehingga data tutupan hutan dengan luasan yang kecil tidak terhitung serta tanaman yang masih muda hasil dari rehabilitasi tutupan lahan tidak terdeteksi sebagai tutupan

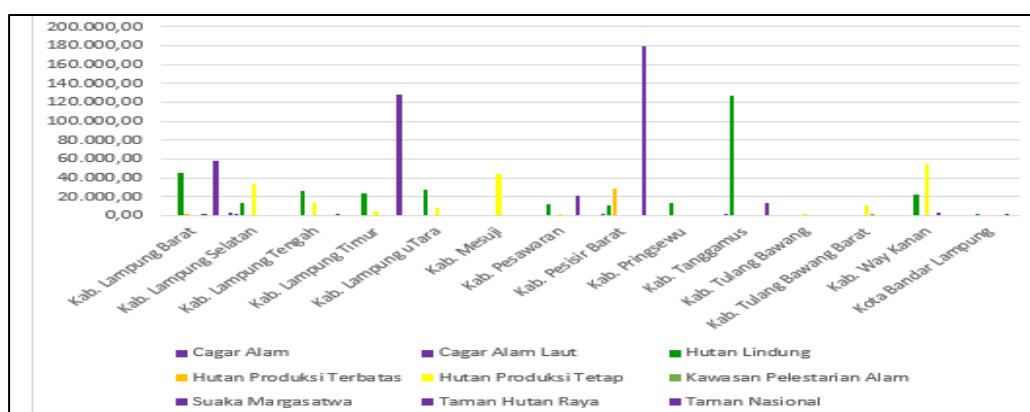
hutan sehingga kurang dapat menggambarkan kondisi tutupan hutan di Provinsi Lampung yang sebenarnya.

2.1.1.6 Potensi Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA)

1. Kawasan Hutan

Kawasan hutan di Provinsi Lampung terdiri dari Cagar Alam, Cagar Alam Laut, Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Nasional namun didominasi oleh Taman Nasional seluas 378.623,2 Ha, sedangkan Hutan Produksi Terbatas hanya seluas 28.938,1 Ha yang tersebar di Pesawaran dan Lampung Barat. Adapun Cagar Alam hanya berada di Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 2.533,3 Ha.

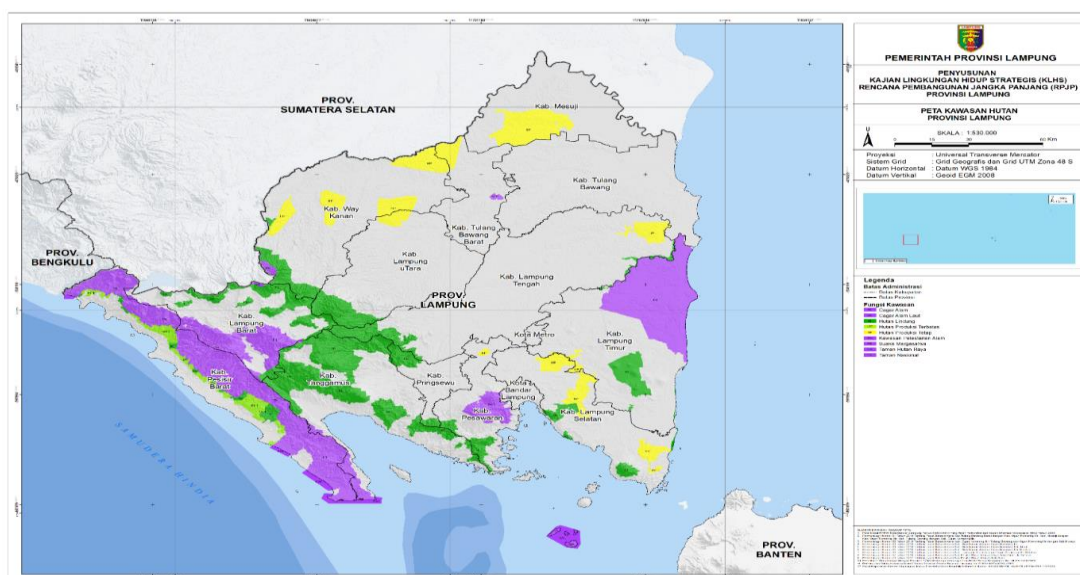
Gambar 2. 18 Luasan Kawasan Hutan di Provinsi Lampung



Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Gambar 2. 19 Peta Kawasan Hutan Di Provinsi Lampung



Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Surat Keputusan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK.3554/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2023

Tabel 2. 13 Kawasan Hutan Di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Cagar Alam	Cagar Alam Laut	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Kawasan Pelestarian Alam	Suaka Margasatwa	Taman Hutan Raya	Taman Nasional	Jumlah
Kab. Lampung Barat	-	-	44.850,10	86,9	-	-	882,2	-	57.530,00	103.349,10
Kab. Lampung Selatan	2.533,30	46,3	13.383,00	-	34.160,70	-	-	-	-	50.123,30
Kab. Lampung Tengah	-	-	26.079,40	-	13.783,20	-	-	-	9,7	39.872,30
Kab. Lampung Timur	-	-	23.184,80	-	3.852,90	-	-	-	128.312,50	155.350,20
Kab. Lampung Utara	-	-	27.178,80	-	7.628,70	-	-	-	-	34.807,40
Kab. Mesuji	-	-	-	-	43.990,50	-	-	-	-	43.990,50
Kab. Pesawaran	-	-	12.300,30	-	1.351,20	-	-	21.419,90	-	35.071,30
Kab. Pesisir Barat	-	63,1	10.070,50	28.851,20	-	-	-	-	179.729,80	218.714,60
Kab. Pringsewu	-	-	13.039,30	-	-	-	-	-	-	13.039,30
Kab. Tanggamus	-	85,5	126.648,90	-	-	-	-	-	13.041,10	139.775,50
Kab. Tulang Bawang	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	2,5
Kab. Tulang Bawang Barat	-	-	-	-	10.404,60	1.374,60	-	-	-	11.779,30
Kab. Way Kanan	-	-	22.502,20	-	53.523,50	-	3.260,90	-	-	79.286,60
Kota Bandar Lampung	-	-	149,6	-	-	-	-	296,7	-	446,3
Jumlah	2.533,30	194,9	319.386,70	28.938,10	168.697,70	1.374,60	4.143,10	21.716,60	378.623,20	925.608,10

Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Surat Keputusan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK.3554/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2023

2. Wilayah Sungai (WS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Lampung memiliki 3 (tiga) Wilayah Sungai (WS) lintas provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yaitu WS Nasal-Padang-Guci, WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau, dan WS Mesuji-Tulang Bawang. Provinsi Lampung juga memiliki Wilayah Sungai Strategis Nasional dan terletak di lintas kabupaten/kota di Provinsi Lampung yaitu WS Seputih-Sekampung. Selain itu, Provinsi Lampung juga memiliki 1 (satu) wilayah sungai lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu WS Semangka. Berikut merupakan peta wilayah sungai Provinsi Lampung dan tabel luas wilayah Provinsi Lampung yang termasuk ke dalam masing-masing Wilayah Sungai.

Gambar 2. 20 Peta Wilayah Sungai di Provinsi Lampung



Sumber : Peraturan Menteri PUPR Nomor : 04/PRT/M/2015

Tabel 2. 14 Wilayah Sungai di Provinsi Lampung

Nama Wilayah Sungai	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Persentase Kabupaten/Kota terhadap WS
Nasal - Padang Guci	Pesisir Barat	59,281	1,22%
Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau	Lampung Barat	219,09	0,25%
Mesuji - Tulang Bawang	Mesuji	2.898,28	17,43%
	Tulang Bawang Barat	522,72	3,14%
	Tulang Bawang	2.340,80	14,08%
	Way Kanan	3.797,83	22,84%
	Lampung Barat	637,88	3,84%
	Lampung Utara	1.911,04	11,50%
	Lampung Tengah	18,83	0,11%
Seputih Sekampung	Bandar Lampung	183,6	100%
	Lampung Barat	12,54	0,59%
	Lampung Selatan	2,159,55	97,03%
	Lampung Tengah	4,519,14	99,19%
	Lampung Timur	3,858,12	100%
	Lampung Utara	518,24	19,43%
	Metro	73,16	100%
	Pesawaran	855,77	66,53%
	Pringsewu	616,44	99,96%
	Tanggamus	1,079,59	36,66%
	Tulang Bawang	701,95	22,53%
	Tulang Bawang Barat	74,12	5,90%
Semangka	Tanggamus	1.848,68	70,01%
	Pesisir Barat	2.944,12	98,55%
	Lampung Barat	1.107,11	69,47%
	Pesawaran	414,96	57,58%

Sumber : Peraturan Menteri PUPR Nomor : 04/PRT/M/2015

3. Daerah Aliran Sungai

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan DAS berperan penting dalam menjaga lingkungan termasuk menjaga kualitas air, mencegah banjir dan kekeringan saat musim hujan maupun musim kemarau. Daerah Aliran Sungai di Provinsi Lampung yang terbesar yaitu DAS Mesuji dengan luas 277.559,33 Ha, DAS Sekampung seluas 589.094,99 Ha, DAS Semangka seluas 162.421,94 Ha, DAS Seputih seluas 752.081,30 Ha dan DAS Tulang Bawang seluas 934.004,06 Ha. Untuk lebih

jelasan dapat dilihat pada tabel berikut: dan DAS Way Tulang Bawang yang memiliki luas $\pm 978.505,805$ Ha.

Tabel 2. 15 Sebaran Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung

No.	DAS	Luas (Ha)	Luas (Km2)
1	DAS Mesuji	277.559,33	2775,59
2	DAS Sekampung	589.094,99	5890,94
3	Das Semangka	162.421,94	1624,21
4	DAS Seputih	752.081,30	7520,81
5	DAS Tulang Bawang	934.004,06	9340,04
	Jumlah	2.715.161,62	27.151,59

Sumber : KLHK 2022

4. Potensi Keanekaragaman Hayati Darat

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung diketahui bahwa setidaknya terdapat ratusan jenis tumbuhan, mulai dari pohon, liana, vegetasi bawah, dan lain-lain. Terdapat juga tanaman khas Provinsi Lampung yaitu, Bunga Bangkai, Rafflesia Arnoldi, Kopi Robusta, dan Bunga Ashar. Keanekaragaman hayati tidak hanya flora saja, fauna/satwa liar termasuk kedalamnya. Provinsi Lampung juga memiliki keanekaragaman fauna yang tersebar di wilayah : Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Hutan Lindung (HL) di Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Selatan dan Tanggamus, Hutan Pantai, dan Hutan Rawa di perairan laut. Taman Nasional di Provinsi Lampung memiliki luas 378.623,2 Ha, kemudian Taman hutan raya seluas 21.716,6 Ha. Ini dapat menjadi potensi keanekaragaman hayati di Provinsi Lampung. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 16 Sebaran Luas Potensi Keanekaragaman Hayati Darat di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Cagar Alam	Kawasan Pelestarian Alam	Suaka Margasatwa	Taman Hutan Raya	Taman Nasional	Luas (Ha)
1	Kabupaten Lampung Barat	-	-	882,2	-	57.530,0	58.412,1
2	Kabupaten Lampung Selatan	2.533,3	-	-	-	-	2.533,3
3	Kabupaten Lampung Tengah	-	-	-	-	9,7	9,7
4	Kabupaten Lampung Timur	-	-	-	-	128.312,5	128.312,5
5	Kabupaten Pesawaran	-	-	-	21.419,9	-	21.419,9
6	Kabupaten Pesisir Barat	-	-	-	-	179.729,8	179.729,8
7	Kabupaten Tanggamus	-	-	-	-	13.041,1	13.041,1
8	Kabupaten Tulang Bawang Barat	-	1.374,6	-	-	-	1.374,6

No.	Kabupaten/Kota	Cagar Alam	Kawasan Pelestarian Alam	Suaka Margasatwa	Taman Hutan Raya	Taman Nasional	Luas (Ha)
9	Kabupaten Way Kanan	-	-	3.260,9	-	-	3.260,9
10	Kota Bandarlampung	-	-	-	296,7	-	296,7
Jumlah		2.533,3	1.374,6	4.143,1	21.716,6	378.623,2	408.390,8

Sumber: BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung, Tahun 2023

5. Potensi Keanekaragaman Hayati Laut

Keanekaragaman hayati tidak hanya ada di darat saja tetapi di wilayah laut juga terdapat keanekaragaman hayati. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki ekosistem khas di laut dangkal yang didominasi oleh tumbuhan lamun, ekosistem ini bernama Padang Lamun. Padang Lamun berfungsi sebagai habitat penting untuk berbagai jenis hewan laut, seperti ikan-ikan kecil, Moluska, Krustasea, Ekinodermata, dan Penyu. Padang lamun dapat juga sebagai perangkap sedimen sehingga terhindar dari erosi. Padang lamun yang terdapat di kawasan Pesisir Lampung banyak terdapat di Pesisir Teluk Lampung terutama menyebar di pulau-pulau, Teluk Lampung, Pesisir Teluk Semaka dan sedikit di Pesisir Barat Lampung. Padang lamun di Teluk Lampung tersebar hampir di sepanjang pantai dan di seluruh pulau-pulau di dalamnya antara lain terdapat di Pulau Tangkil, Pulau Puhawang, Pulau Tegal, Pulau Mahitam, Pulau Sebuk, Pulau Sebesi, Pulau Tegal, dan Pulau Legundi.

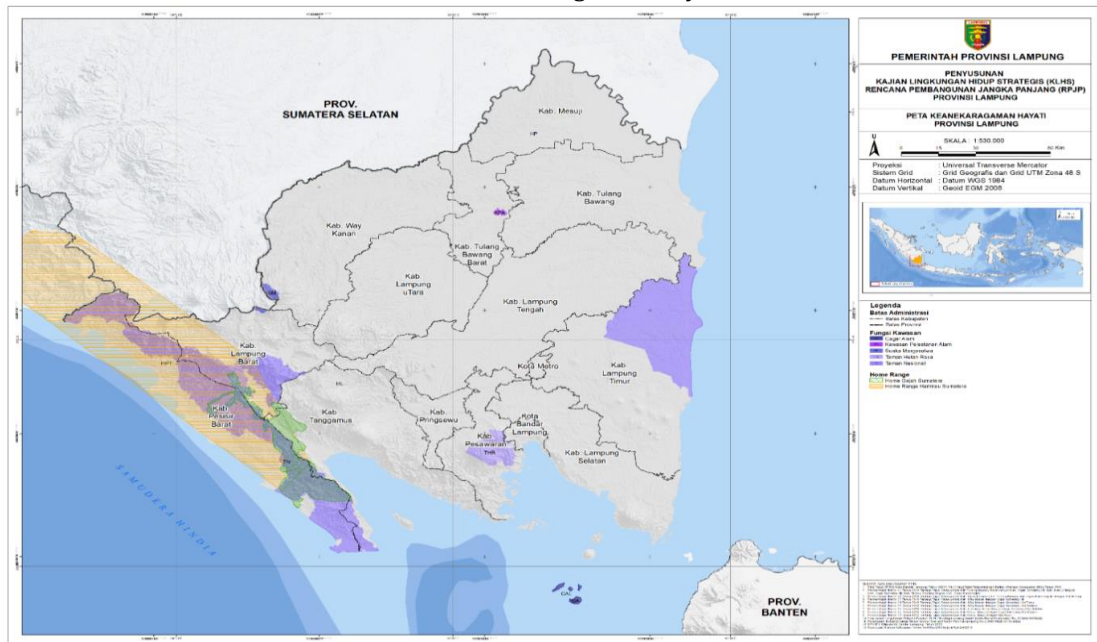
Tabel 2. 17 Luasan Kawasan Keanekaragaman Hayati Laut di Provinsi Lampung

No.	Keanekaragaman Hayati Laut	Luas (Ha)
1	Kawasan Ekosistem Mangrove	6.652,68
2	Cagar Alam Laut	20.023,11
3	Kawasan Konservasi	136.677,19
4	Alur Biota Laut	70.535,97
Jumlah		233.888,95

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Lampung, 2022

Provinsi Lampung memiliki luasan kawasan keanekaragaman hayati laut yaitu Kawasan Ekosistem Mangrove seluas 6.652,68 Ha, Cagar Alam Laut seluas 20.023,11 Ha serta kawasan konservasi dengan luas terbesar yaitu 136.677,19 Ha.

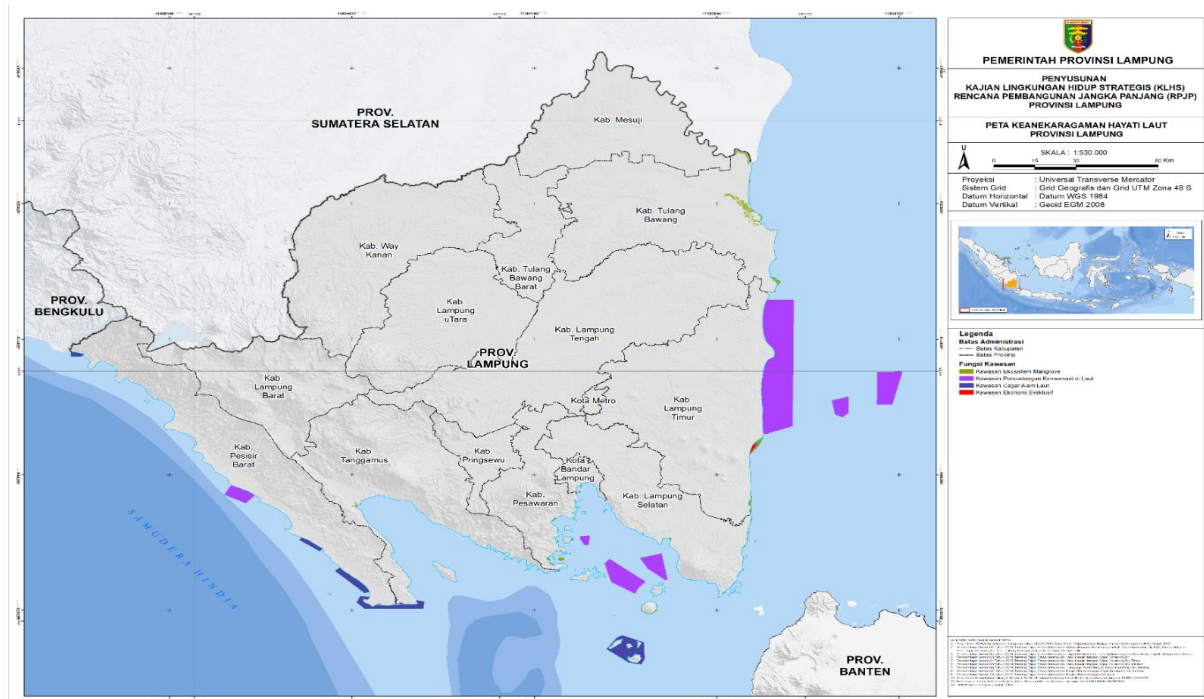
Gambar 2. 21 Peta Keanekaragaman Hayati Darat



Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Gambar 2. 22 Peta Kawasan Keanekaragaman Hayati Laut



Keterangan : Data Termutakhir

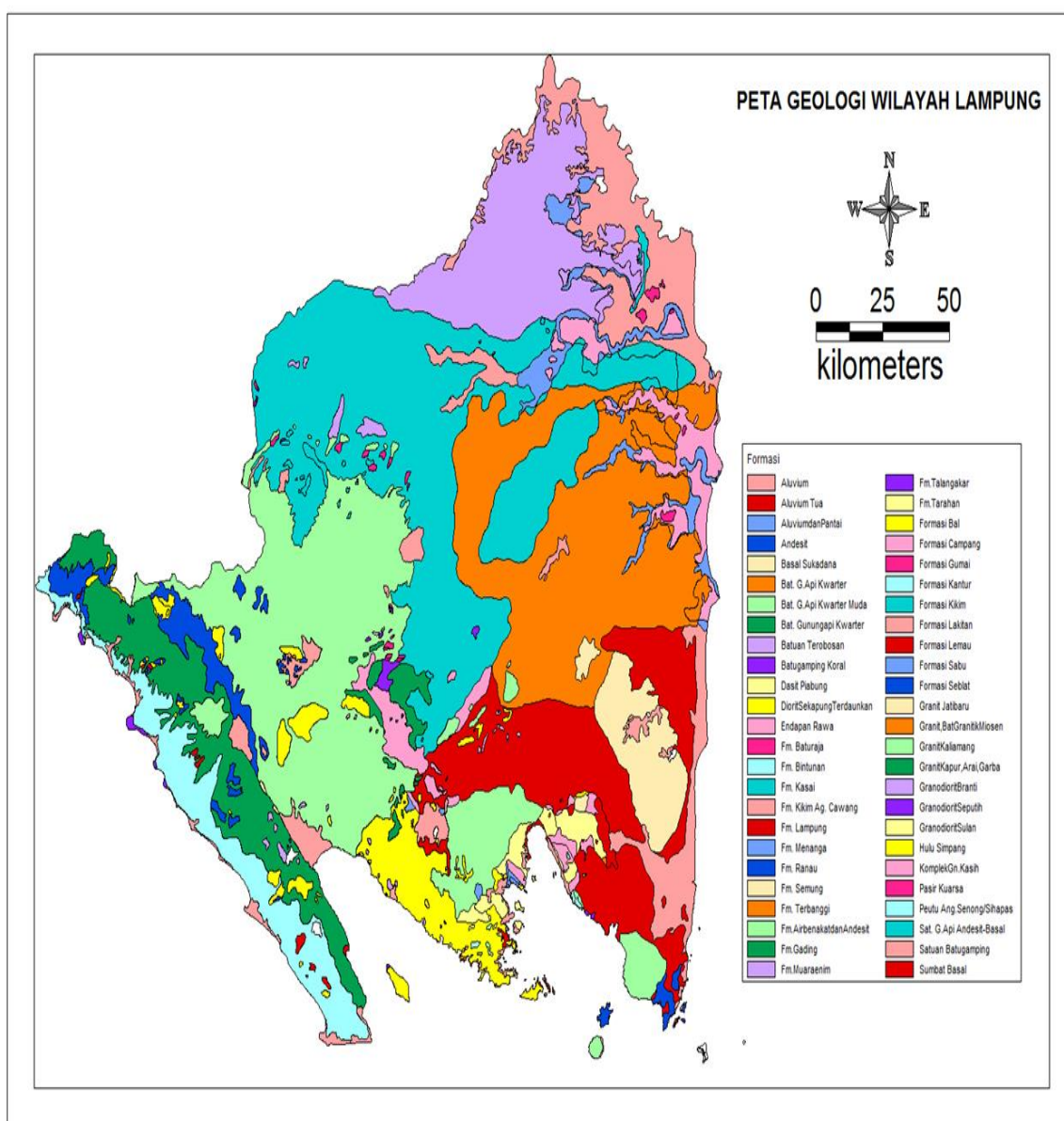
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

6. Potensi Sumber Daya Mineral dan Batubara

Karakteristik geologis Lampung membawa dampak terhadap potensi sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Wilayah Provinsi Lampung sebagai tatanan geologi Indonesia terletak di lingkungan tektonik dimana

terjadi pertemuan antara lempeng samudera Indo-Australia dan lempeng benua Euro-Asia yang berpotensi membentuk kondisi geologi dengan beragam potensi sumberdaya alam yang bernilai ekonomis, seperti sumberdaya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara. Potensi sumberdaya alam mineral dan batubara tersebut tersebar hampir diseluruh wilayah Lampung, baik yang masih berbentuk sumberdaya maupun yang telah dikatagorikan sebagai cadangan dengan berbagai kualitas.

Gambar 2. 23 Peta Geologi Wilayah Lampung



Berikut gambaran jumlah izin pertambangan yang dikeluarkan di Provinsi Lampung, berdasarkan komoditas :

Tabel 2. 18 Jumlah Izin Sumber Daya Mineral dan Batubara Per Komoditas

NO	KABUPATEN	KOMODITAS	JUMLAH	TOTAL
			IZIN	IZIN
1	2	3	4	5
1	BANDAR LAMPUNG	BATUAN	3	3
2	BANDAR LAMPUNG/LAMPUNG SELATAN	ANDESIT	1	1
3	LAMPUNG SELATAN	ANDESIT BASALT BATU KAPUR BATUAN MARMER BIJIH BESI ZEOLIT	49 1 1 1 2 3	57
4	LAMPUNG TENGAH	ANDESIT BIJIH BESI FELDSPAR GRANODIORIT PASIR KUARSA KUARSIT	3 1 4 1 2 2	13
5	LAMPUNG TIMUR	ANDESIT	5	5
6	LAMPUNG TIMUR-TULANG BAWANG	PASIR	1	1
7	LAMPUNG UTARA	ANDESIT	8	8
8	MESUJI	BATUBARA PASIR	2 1	3
9	PESAWARAN	ANDESIT BIJIH BESI EMAS GAMPING MARMER & KAPUR PASIR	7 1 3 3 1 1	16
10	PESISIR BARAT	ANDESIT	4	4
11	PRINGSEWU	ANDESIT BATUAN MANGAN PASIR SILIKA KUARSIT	9 1 1 1 1 2	15
12	TANGGAMUS	ANDESIT BATU GAMPING BIJIH BESI EMAS GAMPING PASIR KUARSA PASIR PASANG ZEOLIT	6 1 1 1 2 2 1 1	15
13	TANGGAMUS-PRINGSEWU	ANDESIT	1	1
14	TULANG BAWANG	BATUBARA PASIR PASIR KUARSA PASIR LAUT PASIR PASANG	1 6 4 1 1	13
15	WAY KANAN	ANDESIT EMAS MANGAN ANDESIT	2 1 2 1	6
Total			159	159

Sumber : Dinas ESDM 2024

- **Potensi Sumber Daya Mineral Logam**

Sumber daya mineral logam merupakan komponen penting dalam industri pertambangan yang mencakup berbagai jenis mineral berharga. Berikut ini data sumber daya mineral logam di Provinsi Lampung berdasarkan tahapan eksplorasi dan evaluasi, yang meliputi sumber daya hipotetik, sumber daya teridentifikasi, dan cadangan.

Tabel 2. 19 Sumber Daya dan Cadangan Bijih/Logam Provinsi Lampung

	Bijih/logam	HIPOTETIK		SUMBER DAYA (TON)								CADANGAN (TON)					
				TEREKA		TERTUNJUK		TERUKUR		TOTAL		TERKIRA		TERBUKTI		TOTAL	
		BIJIH	LOGAM	BIJIH	LOGAM	BIJIH	LOGAM	BIJIH	LOGAM	BIJIH	LOGAM	BIJIH	LOGAM	BIJIH	LOGAM	BIJIH	LOGAM
1	Emas	-	-	8,220,309	8	8,909,218	10	1,508,222	8	18,637,749	27	6,256,589	16	163,571	1	6,420,160	16
2	Besi Laterit	2,413,437	295,023	8,000	5,819	-	-	-	-	8,000	5,819	-	-	-	-	-	-
3	Besi Primer	10,019,250	5,731,706	891,185	468,942	788,612	477,922	1,261,509	638,753	2,941,306	1,585,617	1,142,548	583,956	-	-	1,142,548	583,956
4	Mangan	-	-	-	-	800	380	-	-	800	380	-	-	-	-	-	-

- Potensi Sumber Daya Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Potensi Sumber Daya Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah komponen penting dalam pengembangan industri pertambangan di Provinsi Lampung. Sumber daya ini mencakup berbagai jenis mineral non-logam dan batuan berharga yang memiliki banyak kegunaan dalam berbagai sektor industri, seperti konstruksi, keramik, kaca, dan lainnya. Berikut gambaran potensinya :

Tabel 2. 20 Sumber Daya dan Cadangan Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan

No.	Jenis	Jumlah Lokasi	Hipotetik (ton)	SUMBER DAYA (TON)			CADANGAN (TON)	
				TEREKA	TERTUNJUK	TERUKUR	TERKIRA	TERBUKTI
1	Zeolit	10	1,580,000	100,000,000	124,325,389	30,202,005	3,030,283	9,754
2	Batu Gamping	9	15,141,000	231,014,761	8,835,323	6,299,742	5,021,965	2,478,296
3	Pasir Kuarsa	15	98,950,000	-	-	-	-	-
4	Andesit	40	1,789,532,000	83,589,391	154,939,447	102,897,69	115,692,47	87,234,091
5	Sirtu	3	1,120,000	-	12,134,243	6,067,121	-	-

sumber : Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral batu bara dan Panas Bumi Indonesia Kemen ESDM, 2022

- Potensi Batu Bara**

Provinsi Lampung, dengan kondisi geologinya, tidak memiliki deposit batu bara *antrasit* dan *bituminus* yang tinggi, yang biasanya ditemukan di daerah dengan sejarah geologi yang lebih kompleks dan proses *metamorfisme* yang lebih intens. Oleh karena itu, sumber daya batu bara di Lampung lebih banyak dikategorikan sebagai *sub-bituminus* dan *lignit*, dengan kandungan karbon yang terendah, sekitar 25% hingga 35%, dan nilai kalori yang rendah. Teksturnya lebih lunak dan berwarna coklat Biasanya berada pada kedalaman yang lebih dangkal dibandingkan dengan batu bara *bituminus* dan *antrasit*. Rincian data sumber daya dan cadangan yang telah terverifikasi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. 21 Kualitas Sumber Daya dan Cadangan Batubara Lampung

PROVINSI	Target Eksplorasi	Total Inventori	SUMBER DAYA					CADANGAN			
			Tereka	Tertunjuk	Terukur	TOTAL	Terverifikasi	Terkira	Terbukti	Total	Terverifikasi
LAMPUNG	-	106,95	149,60	134,20	29,60	313,40	313,40	109,80	-	109,80	109,80
Kalori Rendah	-	-	149,60	134,20	29,60	313,40	313,40	109,80	-	109,80	109,80
Kalori sedang	-	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral batu bara dan Panas Bumi Indonesia Kemen ESDM, 2022

Tabel 2. 22 Sumber Daya dan Cadangan Batubara Provinsi Lampung

NO	PROVINSI	TARGET EKSPLORASI	TOTAL INVENTORI	SUMBER DAYA (JUTA TON)					CADANGAN (JUTA TON)			
				TEREKA	TERTUNJUK	TERUKUR	TOTAL	TOTAL (TERVERIFIKASI)	TERKIRA	TERBUKT	TOTAL	TOTAL (TERVERIFIKASI)
1	Lampung	-	106,95	149,60	134,20	29,60	313,40	313,400	109,800	-	109,800-	109,800

Sumber : Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral batu bara dan Panas Bumi Indonesia Kemen ESDM, 2022

● Potensi Panas Bumi

Potensi panas bumi Provinsi Lampung diperkirakan mencapai 898 MWe (cadangan mungkin) yang terdapat di 13 lokasi diantaranya di daerah Way Umpu, Danau Ranau, Purunan, G. Sekincau, Bacingot, Suoh Antatai, Fajar Bulan, Natar, Lempasing, Way Ratai, Kalianda dan Pematang Belirang, sedangkan lokasi di Ulubelu telah dimanfaatkan dengan kapasitas terpasang 220 MWe, sebagaimana rincian berikut :

Tabel 2. 23 Potensi Panas Bumi Provinsi Lampung

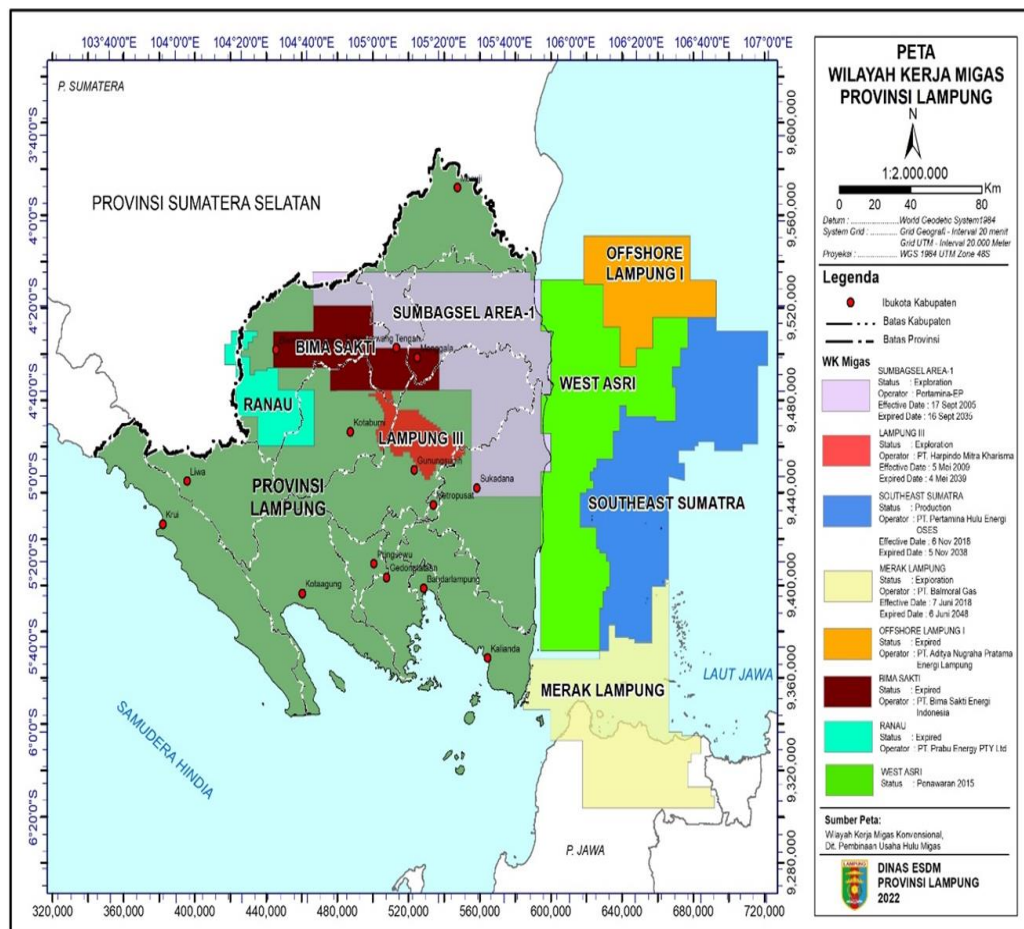
No	Nama	Sumber Daya Spekulatif	Sumber Daya Hipotetik	Cadangan Mungkin	Cadangan Terduga	Cadangan Terbukti	Cadangan Terpasang	Status Penyelidikan	Klasifikasi Temperatur	Temperatur Reservoir	Tahun Data
1	Wai Umpu	0	40	14	0	0	0	Survei Rinci	Sedang	135	2013
2	Danau Ranau	0	0	210	0	0	0	Survei Rinci	Sedang	158	2007
3	Purunan	25	0	0	0	0	0	Survei Pendahuluan Awal	Tinggi	240	2013
4	Sekincau Barat - Gunung Sekincau	0	0	52	0	0	0	Survei Rinci	Tinggi	250	2013
5	Sekincau Timur - Becingut	0	0	244	0	0	0	Survei Rinci	Tinggi	260	2013
6	Suoh Kalibata - Suoh Antatai	0	0	82	0	0	0	Survei Rinci	Tinggi	250	2013
7	Pajar Bulan	100	0	0	0	0	0	Survei Pendahuluan Awal	Tinggi	225	1972
8	Natar	25	0	0	0	0	0	Survei Pendahuluan	Tinggi	225	2002
9	Ulubelu	0	0	133	0	220	220	Terpasang	Tinggi	280	2018
10	Lempasing	225	0	0	0	0	0	Survei Pendahuluan Awal	Sedang	216	1990
11	Way Ratai	0	0	105	0	0	0	Survei Rinci	Sedang	180	2009
12	Kalianda	0	0	58	0	0	0	Survei Rinci	Tinggi	250	2017
13	Pematang Belirang	0	0	0	225	0	0	Survei Rinci	Tinggi	260	2016
Total		375	40	898	225	220	220				

Sumber : Dinas ESDM 2023

7. Potensi Minyak dan Gas Bumi

Provinsi Lampung juga memiliki potensi hidrokarbon berupa minyak dan gas bumi yang didukung secara geologi dengan keberadaan Cekungan Sumatera Selatan dan Cekungan Sunda-Asri yang merupakan dua cekungan produktif penghasil hidrokarbon di Indonesia. Terdapat 4 (empat) Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi aktif yang berada di Provinsi Lampung, yaitu Sumbagsel Area-1, Lampung III Block, Southeast Sumatra, dan Merak Lampung. Selain itu secara historis terdapat 4 (empat) wilayah kerja lain yang pernah dicoba untuk dikembangkan di Provinsi Lampung, yaitu Bima Sakti, Ranau, West Asri, dan Offshore Lampung I. Jatuhnya harga minyak dan gas bumi tahun 2013 - 2014 menjadi salah satu alasan tidak aktifnya wilayah-wilayah kerja tersebut. Membaiknya harga minyak dan gas bumi pada saat ini membuka peluang untuk menghitung ulang keekonomian wilayah kerja historis tersebut sehingga dapat dikembangkan.

Gambar 2. 24 Peta Wilayah Kerja Migas Provinsi Lampung



2.1.1.7 Kerentanan dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Kerentanan Iklim. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap iklim Provinsi Lampung dapat dijelaskan berdasarkan jasa ekosistem pengaturan iklim, kondisi kerentanan dan resiko serta kondisi kebencanaan. Berdasarkan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, teridentifikasi bahwa Provinsi Lampung memiliki nilai tingkat kerentanan 3 hampir di seluruh Kabupaten, yang artinya Provinsi Lampung **cukup rentan** terhadap perubahan iklim, terhadap risiko banjir dan kekeringan, kemudian tingkat kerentanan dengan tingkat sangat rentan atau dengan nilai 5 hanya berada di Kabupaten Pesawaran. Nilai Indeks Kapasitas Adaptasi (IKA) tertinggi berada di Kota Metro senilai 0,68 dan nilai Indeks Keterpaparan, Sensitivitas (IKS) tertinggi berada di Kabupaten Pesawaran senilai 0,68.

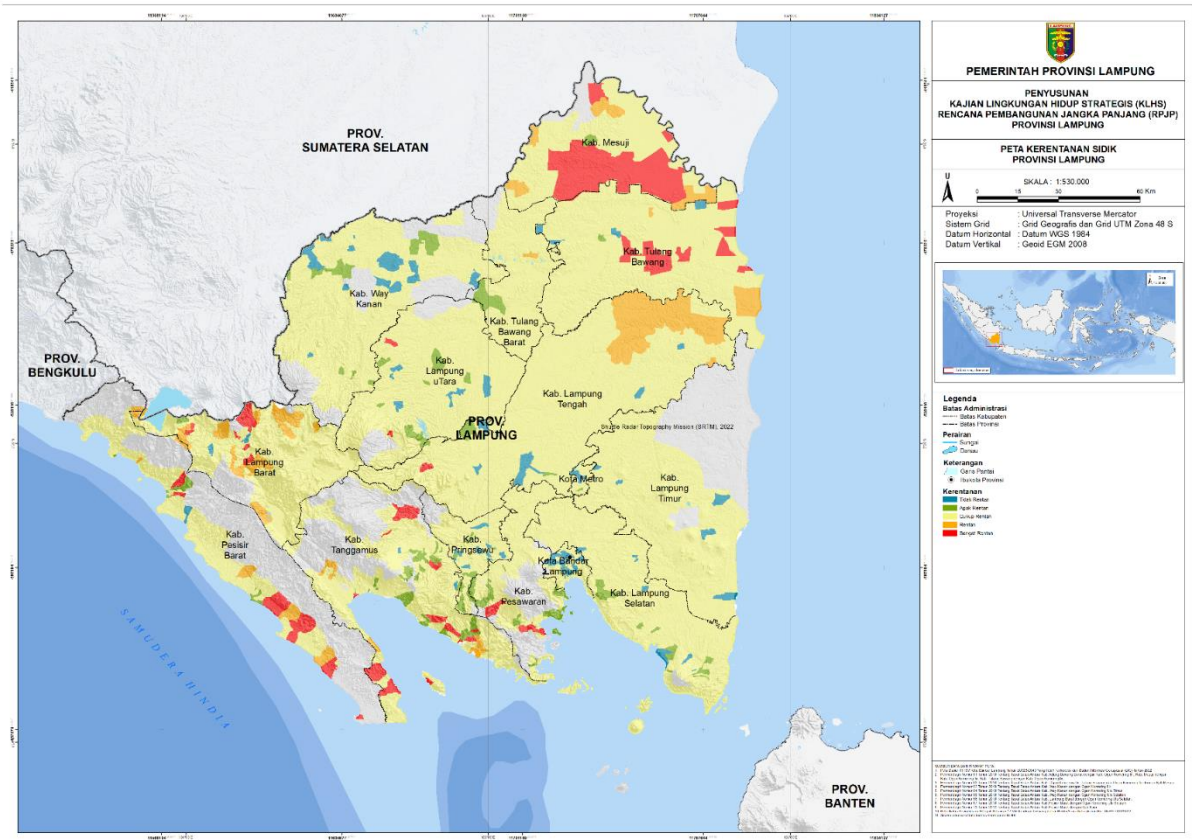
Tabel 2. 24 Tingkat Kerentanan berdasarkan SIDIK Provinsi Lampung

No.	Kabupaten	Tingkat Kerentanan				
		IKA	IKS	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kering
1	Lampung Barat	0,50	0,50	3	3	3
2	Tanggamus	0,53	0,63	3	3	3
3	Lampung Selatan	0,46	0,63	3	3	3
4	Lampung Timur	0,56	0,59	3	3	3
5	Lampung Tengah	0,51	0,46	3	3	3
6	Lampung Utara	0,57	0,63	3	3	3
7	Way Kanan	0,55	0,51	3	3	3
8	Tulangbawang	0,45	0,43	3	3	3
9	Pesawaran	0,41	0,68	5	5	5
10	Pringsewu	0,51	0,58	3	3	3
11	Mesuji	0,40	0,48	3	3	3
12	Tulang Bawang Barat	0,55	0,45	3	3	3
13	Pesisir Barat	0,48	0,53	3	3	3
14	Kota Bandar Lampung	0,60	0,56	3	3	3
15	Kota Metro	0,68	0,51	3	3	3

Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: SIDIK Tahun 2020

Gambar 2. 25 Peta Tingkat Kerentanan Berdasarkan SIDIK di Provinsi Lampung



Keterangan : Data Termutakhir
Sumber: SIDIK, Tahun 2020

Kerentanan terhadap Bencana. Kerentanan terhadap perubahan iklim pun dapat dilihat dari kerentanan terhadap bencana banjir, kebakaran hutan dan laha, gelombang ekstrim dan abrasi dan cuaca ekstrim. Provinsi Lampung berada pada rawan bencana banjir rendah, sedang dan tinggi namun dilihat dari luasan kategori tersebut, rata-rata Provinsi Lampung berada pada Rawan bencana banjir rendah dengan luas 249.896,6 Ha, luasan tertinggi berada di Kabupaten Tulang Bawang dengan luas 75.154,3 Ha. Sedangkan bencana banjir tinggi memiliki luas sebesar 129.811,5 Ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten.

Tabel 2. 25 Kerentanan Bencana Banjir di Provinsi Lampung

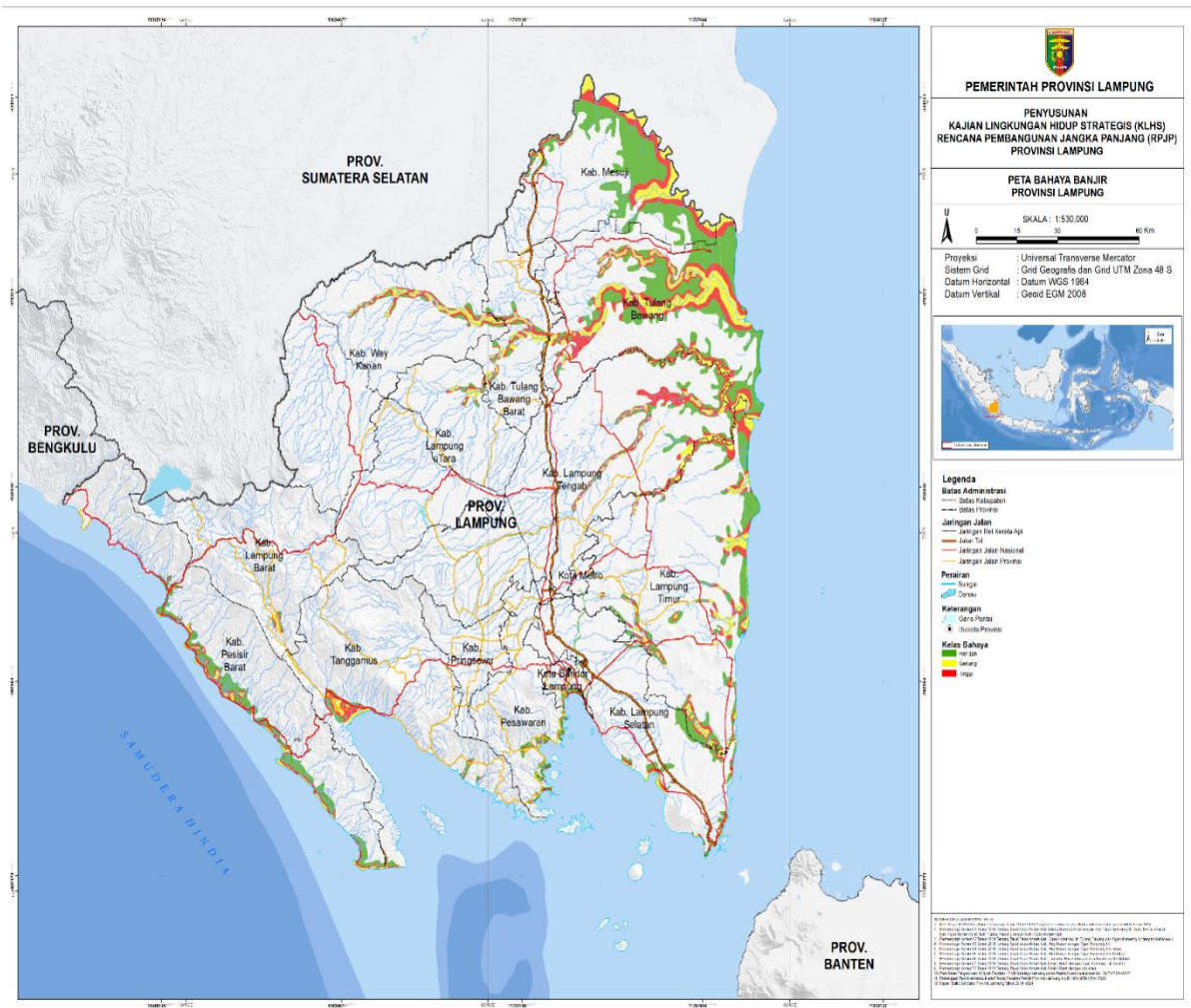
No.	Kabupaten/Kota	Bencana Banjir (Ha)			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	3.367,3	859,3	696,4	4.922,9
2	Kab. Lampung Selatan	9.465,9	2.638,9	3.291,7	15.396,5
3	Kab. Lampung Tengah	26.019,8	10.802,3	18.103,3	54.925,4
4	Kab. Lampung Timur	37.650,7	18.667,0	20.148,3	76.465,9
5	Kab. Lampung uTara	2.040,2	1.805,0	1.335,1	5.180,3

No.	Kabupaten/Kota	Bencana Banjir (Ha)			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
6	Kab. Mesuji	55.755,6	15.603,2	18.091,2	89.449,9
7	Kab. Pesawaran	4.504,8	1.291,7	1.622,1	7.418,6
8	Kab. Pesisir Barat	23.422,1	6.914,9	9.468,6	39.805,6
9	Kab. Pringsewu	469,3			469,3
10	Kab. Tanggamus	3.400,9	3.294,1	4.957,3	11.652,3
11	Kab. Tulang Bawang	75.154,3	33.877,1	40.723,5	149.754,9
12	Kab. Tulang Bawang Barat	3.291,2	5.358,0	4.760,9	13.410,1
13	Kab. Way Kanan	3.390,8	7.236,5	6.172,7	16.800,0
14	Kota Bandar Lampung	1.873,7	128,1	440,5	2.442,2
15	Kota Metro	90,1			90,1
Jumlah		249.896,6	108.476,1	129.811,5	488.184,2

Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Inarisk BNPB

Gambar 2. 26 Peta Bahaya Bencana Banjir di Provinsi Lampung



Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Kemudian dilihat dari **cuaca ekstrim** di Provinsi Lampung rata-rata berada pada rawan cuaca ekstrim tinggi dengan luas 2.718.567,4 Ha dimana luasan tertinggi berada pada Kabupaten Lampung Tengah seluas 350.863,0 Ha. Untuk cuaca ekstrim rendah memiliki luas 526.208,2 Ha tersebar di seluruh wilayah Kabupaten, kecuali Kota Metro tidak berada pada cuaca ekstrim rendah. Sedangkan cuaca ekstrim dengan kategori sedang memiliki luas 787.547,3 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

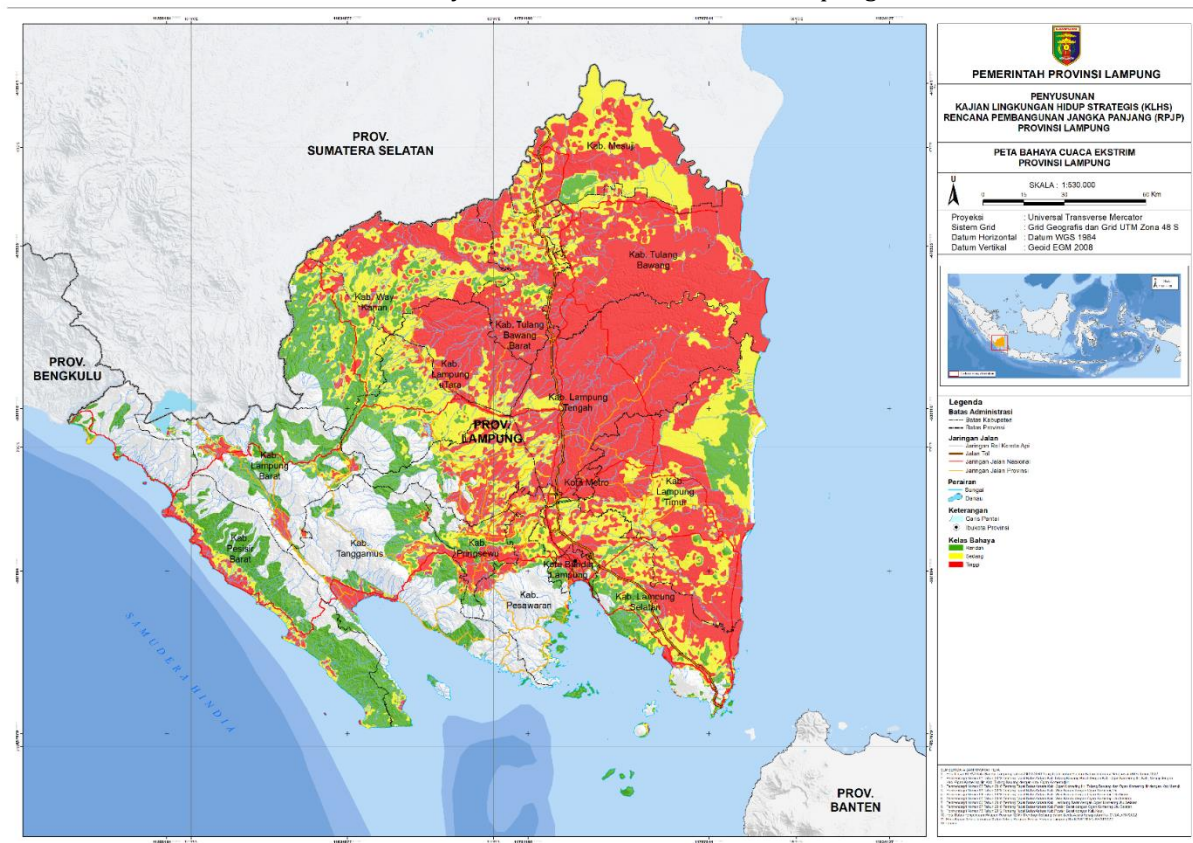
Tabel 2. 26 Kerentanan Terhadap Cuaca Ekstrim di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Cuaca Ekstrim (ha)			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	56.963,1	10.188,2	16.621,1	83.772,4
2	Kab. Lampung Selatan	36.581,3	88.063,2	75.290,4	199.934,9
3	Kab. Lampung Tengah	13.436,9	70.470,4	350.863,0	434.770,3
4	Kab. Lampung Timur	43.184,4	137.393,4	199.365,6	379.943,4
5	Kab. Lampung Utara	40.351,3	89.830,6	107.905,1	238.087,0
6	Kab. Mesuji	8.912,9	104.459,1	106.499,5	219.871,6
7	Kab. Pesawaran	15.222,9	20.463,8	20.066,7	55.753,4
8	Kab. Pesisir Barat	115.972,9	20.500,1	19.501,1	155.974,1
9	Kab. Pringsewu	13.135,2	13.703,7	23.477,5	50.316,4
10	Kab. Tanggamus	67.224,1	16.381,7	24.140,8	107.746,6
11	Kab. Tulang Bawang	1.011,2	46.939,6	263.558,3	311.509,1
12	Kab. Tulang Bawang Barat	3.504,0	39.297,9	82.875,8	125.677,7
13	Kab. Way Kanan	106.536,5	128.530,7	96.628,8	331.696,0
14	Kota Bandar Lampung	4.171,5	1.130,4	10.891,3	16.193,1
15	Kota Metro		194,4	7.127,0	7.321,4
Jumlah		526.208,2	787.547,3	1.404.812,0	2.718.567,4

Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: BPBD Prov. Lampung

Gambar 2. 27 Peta Bahaya Cuaca Ektrim di Provinsi Lampung



Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Selanjutnya dilihat dari kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung yang rata-rata berada pada kebakaran hutan dan lahan rendah dan sedang dengan luas 1.144.756,1 Ha, sedangkan bencana kebakaran hutan dan lahan tinggi tersebar di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Way Kanan dengan luas 385.868,0 Ha.

Tabel 2. 27 Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung

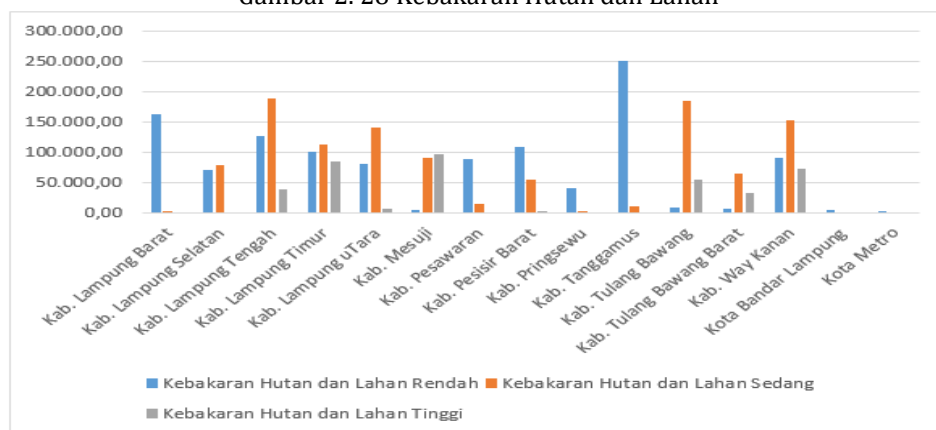
No.	Kabupaten/Kota	Kebakaran Hutan dan Lahan			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	162.327,1	1.050,5		163.377,5
2	Kab. Lampung Selatan	70.498,6	77.645,3		148.144,0
3	Kab. Lampung Tengah	125.786,3	188.032,2	37.739,8	351.558,3
4	Kab. Lampung Timur	101.365,0	112.399,9	84.205,4	297.970,3
5	Kab. Lampung Utara	79.762,0	140.023,5	6.916,1	226.701,6
6	Kab. Mesuji	4.202,7	90.241,2	97.254,8	191.698,7
7	Kab. Pesawaran	88.139,6	15.048,4		103.188,0
8	Kab. Pesisir Barat	108.693,4	53.744,8	90,6	162.528,7
9	Kab. Pringsewu	40.915,9	1.259,9		42.175,8

No.	Kabupaten/Kota	Kebakaran Hutan dan Lahan			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
10	Kab. Tanggamus	249.434,5	10.292,5		259.727,0
11	Kab. Tulang Bawang	9.459,1	184.900,4	55.187,2	249.546,7
12	Kab. Tulang Bawang Barat	7.423,6	65.006,6	32.337,9	104.768,1
13	Kab. Way Kanan	90.635,4	152.324,8	72.136,2	315.096,5
14	Kota Bandar Lampung	4.151,7			4.151,7
15	Kota Metro	1.961,3			1.961,3
Jumlah		1.144.756,1	1.091.969,9	385.868,0	2.622.594,0

Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Inarisk BNPB

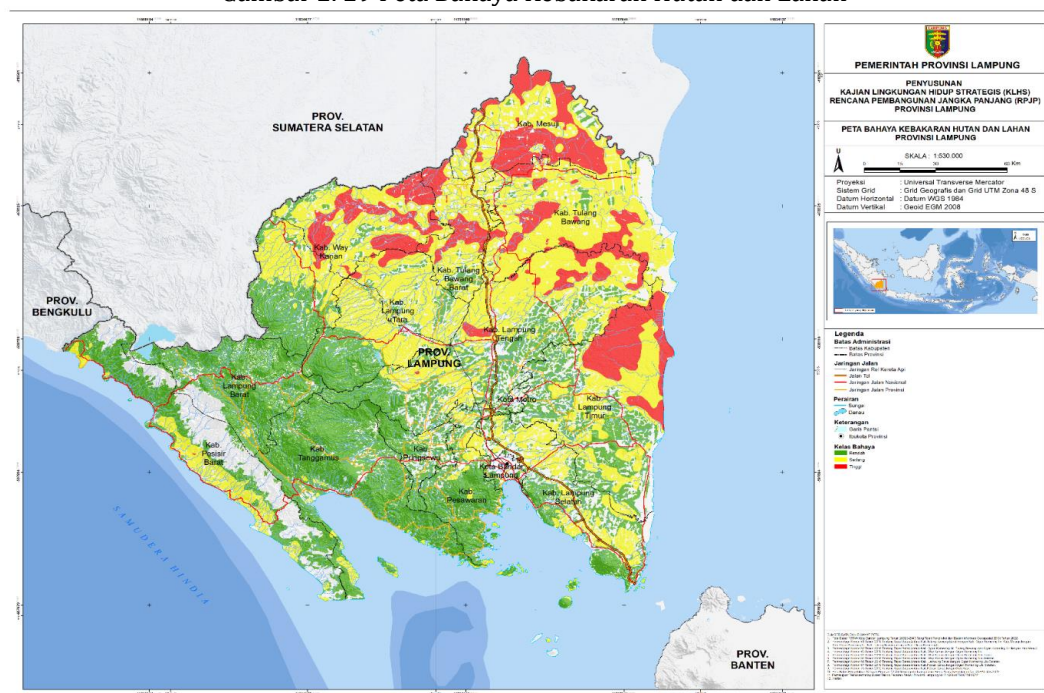
Gambar 2. 28 Kebakaran Hutan dan Lahan



Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Gambar 2. 29 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan



Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Dilihat dari bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Lampung berada pada gelombang ekstrim dan abrasi rendah, sedang dan tinggi namun luasan terbesar berada pada kategori bencana rendah dan tinggi seluas 6.172,7 Ha dan 5.286,6 Ha hanya tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus, Tulang Bawang dan Kota Bandar Lampung.

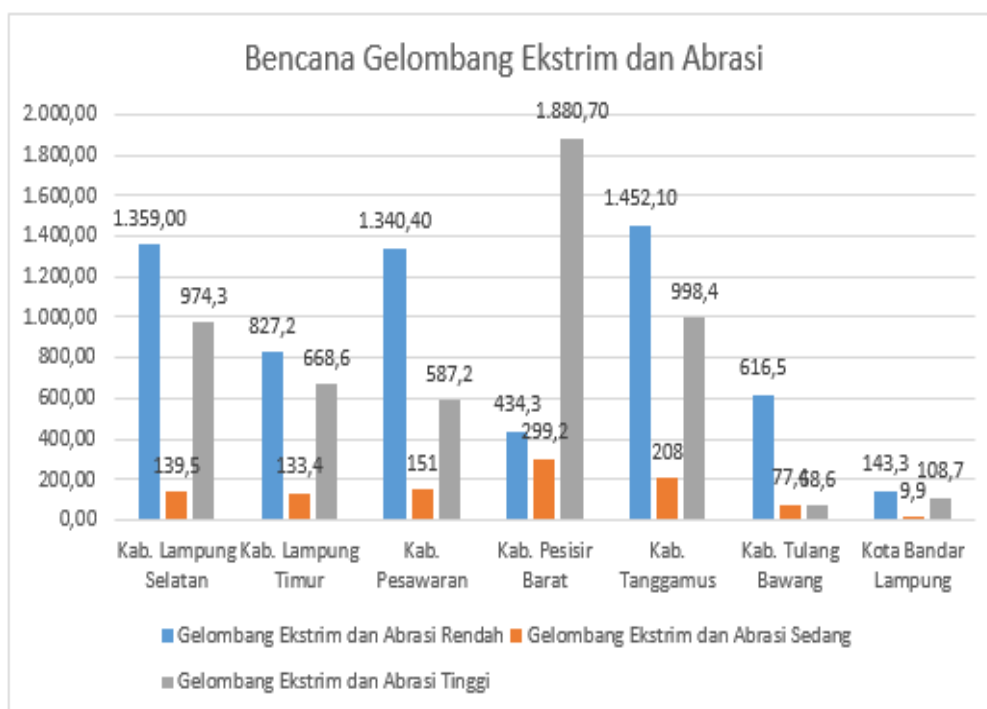
Tabel 2. 28 Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi (Ha)			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Kab. Lampung Selatan	1.359,0	139,5	974,3	2.472,8
2	Kab. Lampung Timur	827,2	133,4	668,6	1.629,2
3	Kab. Pesawaran	1.340,4	151,0	587,2	2.078,7
4	Kab. Pesisir Barat	434,3	299,2	1.880,7	2.614,2
5	Kab. Tanggamus	1.452,1	208,0	998,4	2.658,4
6	Kab. Tulang Bawang	616,5	77,4	68,6	762,5
7	Kota Bandar Lampung	143,3	9,9	108,7	261,9
Jumlah		6.172,7	1.018,3	5.286,6	12.477,6

Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Inarisk BNPB

Gambar 2. 30 Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Lampung



Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Gambar 2. 31 Peta Indeks Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi



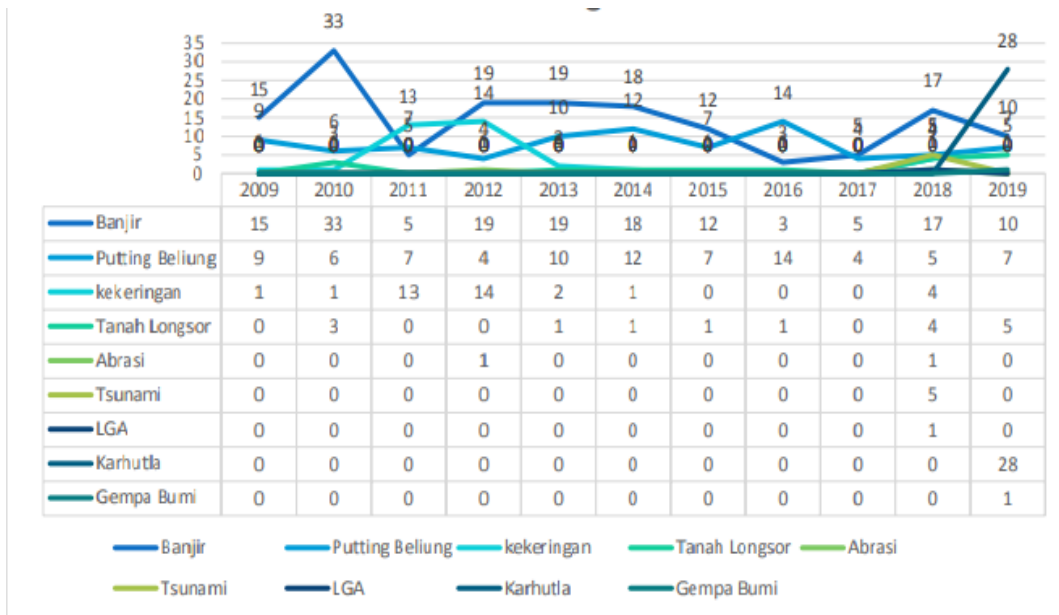
Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

2.1.1.8 Risiko Bencana

Wilayah Provinsi Lampung berpotensi mengalami bencana geologi akibat aktivitas tektonik pengaruh Sesar Mayor yaitu Sesar Semangko, Sesar Mentawai, dan Sesar Minor, serta aktivitas vulkanik. Topografi Lampung dikelompokkan menjadi 5 kondisi yaitu berbukit sampai bergunung, berombak sampai bergelombang, dataran aluvial, dataran rawa dan daerah river basin. Secara hidrogeologis, wilayah Provinsi Lampung memiliki 7 (tujuh) Cekungan Air Tanah (CAT) dalam wilayah provinsi, yaitu CAT Bandar Lampung, CAT Talang Padang, CAT Kalianda, CAT Baturaja, CAT Metro-Kotabumi, CAT Kota Agung dan CAT Danau Ranau. Keberadaan CAT ini selain sebagai sumber air, tetapi juga memiliki potensi bahaya likuefaksi. Terjadinya likuefaksi tergantung pada kedalaman air tanah dan porositas litologinya. Kejadian gempa dengan intensitas tertentu akan memicu terjadinya likuefaksi pada daerah cekungan air tanah yang memiliki kedalaman yang dangkal dengan litologi berupa material lepas (*porous*).

Gambar 2. 32 Kecenderungan Kejadian Bencana di Provinsi Lampung Tahun 2009-2019

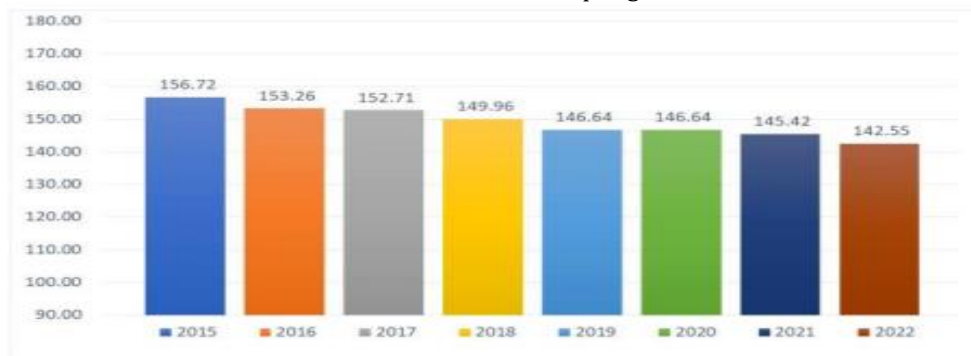


Keterangan : Data Awal

(Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Lampung Tahun 2022-2026)

Di tahun 2022 Data Bencana Indonesia mencatat 3 jenis bencana yang dominan terjadi di Provinsi Lampung yaitu banjir, puting beliung dan tanah longsor. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Provinsi Lampung memiliki indeks risiko 142.55 (sedang).

Gambar 2. 33 Nilai Indeks Resiko Provinsi Lampung Tahun 2015-2022



Berdasarkan hasil kajian dan analisis dalam dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Lampung Tahun 2022-2026, maka hasil pengkajian risiko total terdapat 16 jenis bencana yaitu: Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Gempa bumi, Likuefaksi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan, Tanah Longsor, Tsunami, Pandemi dan Wabah Penyakit, Kegagalan Teknologi, Covid – 19, dan Letusan Gunungapi (terdiri

dari letusan gunungapi Anak Krakatau, Letusan Gunungapi Rajabasa, Letusan Gunungapi Sekincau Belirang).

Berdasarkan penilaian kapasitas secara keseluruhan ketahanan daerah Provinsi Lampung dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks ketahanan daerah **0,48** dan nilai ini menunjukkan **Tingkat Kapasitas Daerah Sedang**.

Kondisi Kebencanaan

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk dari bahaya tertentu. Kawasan rawan bencana yang ada di Provinsi Lampung terdiri dari longsor, gempa bumi dan letusan gunung api.

a. Longsor

Rawan bencana longsor di Provinsi Lampung terdiri dari kawasan rawan longsor rendah, sedang dan tinggi, namun dilihat dari luasan Kawasan rawan longsor yang ada di Provinsi Lampung rata-rata berada pada rawan longsor rendah dengan luas 2.650.713,2 Ha, sedangkan luasan rawan longsor tinggi adalah sebesar 195.535,5 Ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten hanya Kota Metro tidak termasuk pada bencana longsor tinggi.

Tabel 2. 29 Rawan Bencana Longsor di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Bencana Longsor (Ha)			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	46.100,6	101.414,8	63.279,2	210.794,6
2	Kab. Lampung Selatan	208.417,1	10.974,1	3.080,9	222.472,1
3	Kab. Lampung Tengah	436.499,4	16.218,7	3.238,9	455.957,0
4	Kab. Lampung Timur	382.193,2	3.506,1	12,4	385.711,7
5	Kab. Lampung uTara	202.272,6	53.460,6	11.197,2	266.930,4
6	Kab. Mesuji	215.293,5	4.666,6	21,9	219.982,0
7	Kab. Pesawaran	94.405,7	25.852,5	8.428,6	128.686,7
8	Kab. Pesisir Barat	154.573,8	97.837,7	41.446,9	293.858,4
9	Kab. Pringsewu	56.075,0	4.752,7	891,5	61.719,2
10	Kab. Tanggamus	126.731,3	114.713,0	53.264,9	294.709,2
11	Kab. Tulang Bawang	301.573,9	9.865,7	118,1	311.557,6
12	Kab. Tulang Bawang Barat	119.803,9	5.843,2	59,5	125.706,7
13	Kab. Way Kanan	283.992,4	57.646,7	9.952,6	351.591,7
14	Kota Bandar Lampung	15.475,7	2.310,8	542,9	18.329,4
15	Kota Metro	7.305,3	16,1		7.321,4
Jumlah		2.650.713,2	509.079,6	195.535,5	3.355.328,2

Keterangan : Data Termutakhir

Sumber : BPBD Prov. Lampung

Gambar 2. 34 Peta Rawan Bencana Longsor di Provinsi Lampung



Keterangan : Data Termutakhir
Sumber: KLHS

b. Tsunami

Rawan bencana tsunami di Provinsi Lampung terdiri dari kawasan rawan tsunami rendah, sedang dan tinggi, namun dilihat dari luasan Kawasan rawan tsunami yang ada di Provinsi Lampung rata-rata berada pada rawan tsunami tinggi dengan luas 23.868,2 Ha yang tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus dan Kota Bandar Lampung dengan luasan rawan tsunami tinggi berada di Kabupaten Pesisir Barat seluas 15.046,9 Ha. Sedangkan rawan tsunami sedang berada di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus dan Kota Bandar Lampung dengan luas 3.073,6 Ha.

Tabel 2. 30 Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Bencana Tsunami (Ha)			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Kab. Lampung Selatan	2.214,8	837,5	1.779,5	4.831,8
2	Kab. Lampung Timur	3.317,2	474,2		3.791,4
3	Kab. Pesawaran	116,7	131,4	2.704,2	2.952,4
4	Kab. Pesisir Barat	1.238,5	1.019,0	15.046,9	17.304,4
5	Kab. Tanggamus	469,6	550,5	3.977,5	4.997,6
6	Kab. Tulang Bawang	465,0			465,0
7	Kota Bandar Lampung	61,6	60,9	360,1	482,6
Jumlah		7.883,4	3.073,6	23.868,2	34.825,2

Keterangan : Data Termutakhir

Sumber : Inarisk BNPB

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045

Rawan gempa bumi di Provinsi Lampung terdiri dari kawasan rawan gempa bumi rendah, gempa bumi menengah dan tinggi, namun dilihat dari luasan kawasan rawan gempa bumi yang ada di Provinsi Lampung rata-rata berada pada rawan gempa bumi rendah dengan luas 1.804.548,2 Ha, sedangkan luasan rawan gempa bumi tinggi adalah sebesar 442.617,1 Ha yang tersebar hanya di Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus dan Kabupaten Way Kanan.

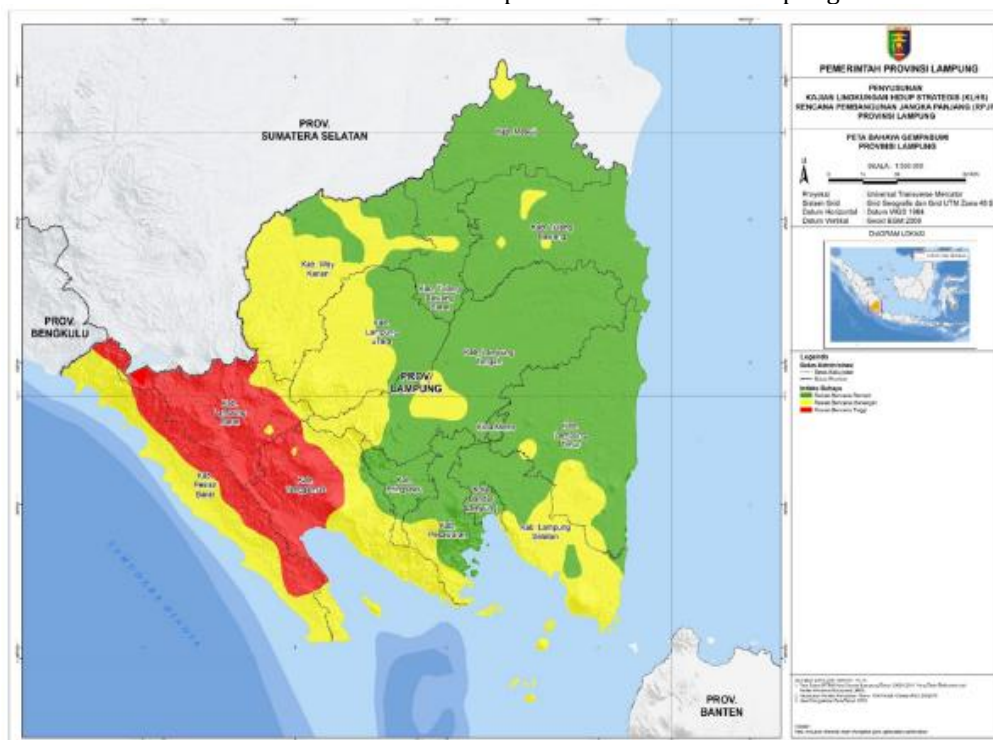
Tabel 2. 31 Luasan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Rendah	Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Menengah	Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Tinggi	Jumlah
1	Kab. Lampung Barat		24.243,2	186.556,1	210.799,4
2	Kab. Lampung Selatan	90.010,3	132.722,7		222.733,0
3	Kab. Lampung Tengah	382.472,0	73.484,9		455.957,0
4	Kab. Lampung Timur	327.935,0	58.441,9		386.376,9
5	Kab. Lampung uTara	103.420,9	163.509,5		266.930,4
6	Kab. Mesuji	209.552,7	10.488,7		220.041,4
7	Kab. Pesawaran	92.132,6	36.679,1		128.811,7
8	Kab. Pesisir Barat		174.945,4	119.078,5	294.023,9
9	Kab. Pringsewu	53.628,4	8.090,8		61.719,2
10	Kab. Tanggamus	12.970,6	145.811,3	136.062,6	294.844,6
11	Kab. Tulang Bawang	301.061,7	10.547,9		311.609,6
12	Kab. Tulang Bawang Barat	118.836,2	6.872,6		125.708,8
13	Kab. Way Kanan	88.075,7	263.215,8	919,8	352.211,4
14	Kota Bandar Lampung	17.130,6	1.244,3		18.374,9
15	Kota Metro	7.321,4			7.321,4
Jumlah		1.804.548,2	1.110.298,2	442.617,1	3.357.463,5

Keterangan : Data Termutakhir

Sumber : RTRW Prov. Lampung

Gambar 2. 36 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Lampung



Keterangan : Data Termutakhir

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045

d. Letusan Gunung Api

Rawan bencana letusan gunung api di Provinsi Lampung terdiri dari letusan gunung api berpotensi terlanda aliran awan panas dan aliran lava. Kabupaten Lampung Barat rata-rata berada pada rawan bencana letusan gunung api yang berpotensi terlanda hujan abu dan kemungkinan tertimpa lontaran batu pijar berdiameter kurang dari 2 cm dengan luas 5.025,7 Ha, sedangkan untuk Kabupaten Lampung Selatan berada pada rawan letusan gunung api berpotensi terhadap hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar seluas 9.600,2 Ha. Untuk luasan rawan letusan gunung api dengan kategori sangat berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, guguran lava, dan gas beracun memiliki luas 860,7 Ha.

Tabel 2. 32 Kondisi Rawan Bencana Letusan Gunung Api di Provinsi Lampung

Kabupaten	Rawan Bencana Letusan Gunung Api	Luasan (Ha)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT	berpotensi terlanda aliran awan panas dan aliran lava	868,9
	berpotensi terlanda aliran lahar	501,7
	berpotensi terlanda hujan abu dan kemungkinan tertimpa lontaran batu pijar berdiameter kurang dari 2 cm	5.025,7
	berpotensi tertimpa lontaran batu pijar berdiameter 2 - 6 cm dan hujan abu lebat	2.119,9
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	sangat berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, dan gas vulkanik beracun	1.273,6
	sangat berpotensi tertimpa lontaran batu pijar berdiameter lebih dari 64 mm, dan hujan abu lebat	706,2
	berpotensi terhadap aliran lahar hujan	1.263,5
	berpotensi terhadap hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar	9.600,2
	berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, dan aliran lahar hujan	2.002,6
	berpotensi terlanda aliran lava dan kemungkinan awan panas	22,2
	berpotensi terlanda hujan abu lebat dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar ukuran kerikil	798,6
	berpotensi terlanda hujan abu lebat dan lontaran batu pijar	2.119,9
	sangat berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, guguran lava, dan gas beracun	860,7
	sangat berpotensi tertimpa lontaran batu pijar berdiameter lebih dari 64 mm, dan hujan abu lebat	706,2
	sering terlanda aliran lava dan kemungkinan awan panas	254,5
	sering terlanda hujan abu lebat dan lontaran batu pijar atau bom vulkanik	276,7
	Jumlah	28.401,4

Keterangan : Data Termutakhir

Sumber : BPBD Prov. Lampung

2.1.1.9 Potensi Pengembangan Wilayah

Kondisi potensi pengembangan wilayah dapat ditinjau dari rencana tata ruang. Berdasarkan Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 dengan Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis sebagai berikut :

1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur wilayah provinsi Lampung adalah rencana sistem susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala provinsi dan mengintegrasikan wilayah provinsi. Sistem pusat permukiman di Provinsi Lampung didasarkan pada penetapan sistem perkotaan di dalam RTRWN Tahun 2018-2038. Untuk mendorong pertumbuhan pengembangan wilayah, maka arahan sistem pusat perkotaan Provinsi Lampung meliputi:

a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan

- 1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah provinsi; PKN merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Arahan sistem perkotaan di Kota Bandar Lampung,
- 2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah provinsi; PKW merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Arahan sistem perkotaan di Kota Metro, Kawasan Perkotaan Kotabumi (Lampung Utara), Kawasan Perkotaan Liwa (Lampung Barat), Kawasan Perkotaan Kalianda (Lampung Selatan), Kawasan Perkotaan Kotaagung (Tanggamus), Kawasan Perkotaan Menggala (Tulang Bawang).
- 3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi. PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Arahan sistem pusat permukiman di kawasan perkotaan Bakauheni (Lampung Selatan), kawasan perkotaan Tanjung Bintang (Lampung Selatan), kawasan perkotaan Sidomulyo (Lampung Selatan), kawasan

perkotaan Unit II Banjar Agung (Tulang Bawang), kawasan perkotaan Seputih Banyak dan Kalirejo (Lampung Tengah), kawasan perkotaan Way Jepara (Lampung Timur), kawasan perkotaan Fajar Bulan (Lampung Barat), kawasan perkotaan Labuhan Maringgai (Lampung Timur), kawasan perkotaan Bukit Kemuning (Lampung Utara), kawasan perkotaan Wiralaga (Mesuji), kawasan perkotaan Wonosobo (Tanggamus), kawasan perkotaan Natar-Jati Agung (Lampung Selatan), Kawasan Perkotaan Sukadana (Lampung Timur), Kawasan Perkotaan Pringsewu (Pringsewu), Kawasan Perkotaan Gedong Tataan (Pesawaran), Kawasan Perkotaan Krui (Pesisir Barat), Kawasan Perkotaan Simpang Pematang (Mesuji), Kawasan Perkotaan Panaragan (Tulang Bawang Barat), Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu (Way Kanan), Kawasan Perkotaan Terbanggi Besar - Bandar Jaya - Gunung Sugih (Terbagus) (Lampung Tengah), Kawasan Perkotaan Lumbok Seminung (Lampung Barat); dan Kawasan Perkotaan Pura Jaya (Lampung Barat).

Gambar 2. 37 Struktur Ruang Provinsi Lampung



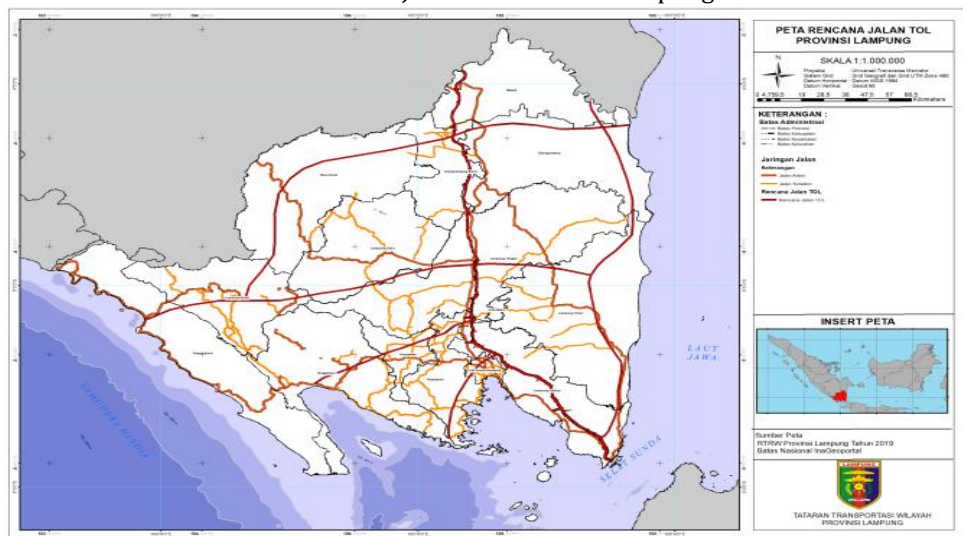
b. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Jaringan jalan, merupakan satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan antar wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, pada Pasal 9 dijelaskan bahwa Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan sesuai dengan pengelompokan berdasarkan fungsinya dan melakukan evaluasi secara berkala. Berdasarkan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, disebutkan bahwa persyaratan teknis untuk jalan diantaranya:

- 1) Jalan Arteri, Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 367/KPTS/M/2022, jalan arteri primer sejumlah 44 ruas jalan;
- 2) Jalan Kolektor, Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 430/KPTS/M/2022, jalan arteri primer sejumlah 21 ruas jalan; Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung No G/297/V.03/HK/2023 Tentang Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor Primer-2, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer dan Semua Ruas Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder Serta Jalan Strategis Provinsi sejumlah 98 ruas jalan menurut fungsinya berupa Jalan Strategis Provinsi, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor Primer-2, dengan panjang 1.695,379 Km
- 3) Jalan Tol , Pengembangan jalan tol di Provinsi Lampung, meliputi 8 ruas jalan.
- 4) Terminal Penumpang, Terminal Tipe A, meliputi : Terminal Rajabasa di (Bandar Lampung), dan Terminal Betan Subing (Lampung Tengah). Saat ini terdapat Terminal Tipe B yaitu Terminal 16C Mulyojati dan Terminal Propau dan direncanakan akan dikembangkan 15 terminal Tipe B yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Lampung

- 5) Terminal Barang, Rencana pengembangan Terminal Agribisnis di kawasan industri Way Pisang, dan Terminal Barang Gayam
- 6) Jembatan Timbang, Rencana pengembangan Jembatan Timbang Way Urang, Jembatan Timbang Simpang Pematang dan Jembatan Timbang Blambangan Umpu.

Gambar 2. 38 Peta Rencana Jalan Tol Provinsi Lampung



Sistem Jaringan Kereta Api, Provinsi Lampung mempunyai jalur kereta api antara Bandar Lampung – Palembang, yang merupakan bagian dari jaringan jalur kereta api di Sumatera Bagian Selatan yang dioperasikan oleh PT Kereta Api (Persero) Divre IV Tanjung Karang, selain bersifat merakyat (SAUM/sarana angkutan umum massal) dan ekonomis juga dapat mengurangi beban jalan. Oleh karena itu, rencana pengembangan sistem jaringan kereta api di Provinsi Lampung meliputi, Jaringan dan Layanan Kereta Api antar Kota, Jaringan dan Layanan Kereta Api Perkotaan dan Stasiun Kereta Api. Jaringan jalur kereta api yang terdapat di Provinsi Lampung diantaranya : Prabumulih (Sumatera Selatan) – Tegineneng - Tarahan; Reaktivasi jalur menuju Pelabuhan Panjang; dan beberapa rencana pengembangan antara lain : 1) Rencana jalur kereta api ganda (double track) Tanjung Karang – Kertapati; 2) Rencana jalur kereta api ganda (double track) Tanjung Karang – Pringsewu; 3) Rencana Shortcut Tegineneng – ITERA - Tarahan; 4) Rencana jalur Bandar Lampung – Bakauheni; 5) Terbanggi Besar – Unit II; dan Unit II – Simpang Pematang.

Sistem Jaringan (SDP) Sungai, Danau dan Penyeberangan, dimanfaatkan sebagai alternatif angkutan penumpang dan barang di wilayah Provinsi Lampung melalui jalur sungai dan danau. Selain dimanfaatkan sebagai sarana transportasi juga dimanfaatkan sebagai sarana wisata air menuju objek-objek wisata yang ada di kabupaten/kota. Pengembangan jaringan sungai, danau dan penyeberangan didukung dengan pengelolaan dan peningkatan sarana dan prasarana jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagai pendukung angkutan penumpang dan sumberdaya alam serta transportasi logistik.

Pelabuhan sungai dan danau Berdasarkan Kepmenhub No. KP 432 Tahun 2017, pelabuhan sungai dan danau di Provinsi Lampung meliputi: 1) Pelabuhan Pagar Dewa; 2) Pelabuhan Dermaga Lumbok; 3) Pelabuhan Sukau; 4) Pelabuhan Dermaga Danau Ranau Lampung; 5) Pelabuhan Wiralaga; 6) Pelabuhan Mesuji Timur; 7) Pelabuhan Sungai Sidang; 8) Pelabuhan Dermaga Sungai Cabang Way Seputih; 9) Pelabuhan Dermaga Sungai Kota Terpadu Mandiri SP.VIII; 10) Pelabuhan Dermaga Kuala Teladas; 11) Pelabuhan Dermaga Panaragan; 12) Pelabuhan Dermaga Karta; dan 13) Pelabuhan Dermaga Gunung Terang.

Pelabuhan penyeberangan di Provinsi Lampung meliputi: 1) Pelabuhan Bakauheni; 2) Pelabuhan Ketapang; 3) Pelabuhan Tabuan; 4) Pelabuhan Madang; 5) Pelabuhan Pulau Sebesi; 6) Pelabuhan Canti; 7) Pelabuhan Teluk Betung dan Rencana Pelabuhan di Tanah Merah di Kabupaten Mesuji. Pelabuhan Lintas penyeberangan antarnegara di Provinsi Lampung meliputi: Kota Agung di Perairan Teluk Semangka; dan Panjang di Perairan Teluk Lampung. Sedangkan Pelabuhan Lintas penyeberangan antarprovinsi berada di Lempasing di Kota Bandar Lampung.

Sistem Jaringan Transportasi Laut, meliputi pelabuhan laut dan pelayaran di laut. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. Adapun rencana

pengembangan Pelabuhan laut yang terdapat di Provinsi Lampung berdasarkan KepMen Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, meliputi: Pelabuhan utama adalah Pelabuhan Panjang di Kota Bandar Lampung. Pelabuhan Pengumpul meliputi Pelabuhan Kota Agung/Tanjung Balai di Kabupaten Tanggamus. Pelabuhan pengumpan regional, meliputi: 1) Pelabuhan Sebalang di Kabupaten Lampung Selatan; 2) Pelabuhan Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur; 3) Pelabuhan Menggala di Kabupaten Tulang Bawang; 4) Pelabuhan Mesuji di Kabupaten Mesuji; dan 5) Pelabuhan Teluk Betung di Kota Bandar Lampung.

Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai dan danau. Adapun alur pelayaran berdasarkan RZWP3K Provinsi Lampung meliputi alur pelayaran internasional/nasional. Alur Pelayaran terbagi menjadi alur pelayaran umum dan perlintasan, alur-pelayaran masuk pelabuhan; dan alur-pelayaran khusus.

- a) Alur pelayanan umum dan perlintasan meliputi Alur Laut Kepulauan Indonesia/ALKI Perairan Selat Sunda; dan Perairan Timur Lampung.
- b) Alur Pelayaran masuk pelabuhan meliputi: Pelabuhan Kuala penet; Pelabuhan Labuhan Maringgai; Pelabuhan Ketapang; Pelabuhan Muara piluk; Pelabuhan Kalianda; Pelabuhan Sebesi; Pelabuhan Pahawang; Pelabuhan Siuncal; Pelabuhan Legundi; Pelabuhan Penyandingan; Pelabuhan Tegineneng; Pelabuhan P. Tabuan; Pelabuhan Kota Agung; Pelabuhan Pematang Sawa; Pelabuhan Way Haru; Pelabuhan P. Betuah; Pelabuhan Siging; dan Pelabuhan Tanjung Setia.
- c) Alur pelayaran khusus meliputi: Bakauheni – Merak di Kabupaten Lampung Selatan; dan Merak - Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan.
- d) Alur-pelayaran di laut ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

Sistem Jaringan Transportasi Udara, Sistem jaringan transportasi udara di Provinsi Lampung terdiri atas: 1) Bandar udara pengumpul berada di Bandar Udara Radin Inten II di Kabupaten Lampung Selatan. 2) Bandar udara pengumpan meliputi: Bandar Udara Muhammad Taufik Kiemas di Kabupaten Pesisir Barat; dan Bandar Udara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan (sebagai bandar udara pengumpan dan bandara khusus TNI).

c. Rencana Sistem Jaringan Energi

Rencana sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Pentingnya energi listrik untuk menunjang kebutuhan sehari-hari tiap penduduk membuat pentingnya untuk memproyeksikan kebutuhan listrik tiap individu agar dapat tercukupi dalam masa mendatang.

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan :

- 1) Infrastruktur Ketenagalistrikan meliputi: Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meliputi : PLTA Besai , PLTA Batu Tegi, dan PLTA Semangka.
- 2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi : PLTU Tarahan, PLTU Sebalang, PLTU Gunung Sugih, PLTU Gunung Sugih, dan PLTU Pelabuhan Tarahan.
- 3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) meliputi: PLTP Ulu Belu, dan Rencana PLTP Rajabasa, Rencana PLTP Suoh Sekincau dan Rencana PLTP Way Ratai.
- 4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) meliputi: PLTD Tarahan, PLTD Teluk Betung, PLTD Tegineneng; PLTD Pulau Sebesi; PLTD Pulau Tabuan; PLTD Pulau Legundi; PLTD Pulau Pahawang; PLTD Pulau Pisang; dan PLTD Natar.
- 5) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya

yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang meliputi: PLTG MPP Tarahan; dan PLTG Sebalang.

- 6) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang ditetapkan di PLTMG Sutami di Kabupaten Lampung Selatan.
- 7) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) yang ditetapkan di PLTBg Gunung Sugih di Kabupaten Lampung Tengah.
- 8) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) meliputi: PLTMH Batu Brak; PLTMH Melesom 2 (masih progres); PLTMH Besai Kemu; PLTMH Sumber Jaya; PLTMH Sukarame; PLTMH Kukusan; PLTMH Pahiton; dan PLTMH Tiga Orehon Putra.
- 9) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang direncanakan di: PLTS Way Tias; PLTS Way Haru; PLTS Margomulyo; PLTS Suka Maju; Rencana PLTS Pulau Legundi; Rencana PLTS Pulau Tabuhan; dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) meliputi PLTBm Bumiwaras dan PLTBm Bumi Acid Jaya.

Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:

- 1) Jaringan transmisi tenaga listrik bersumber dari energi non terbarukan yang bertujuan untuk menghubungkan provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, meliputi: Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) dengan tegangan 500 KV; Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kekuatan 275 KV; Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) dengan kekuatan 150 KV; Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kekuatan 150 KV;
- 2) Jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik meliputi: Koridor Labuhan Maringgai-Tanjung Pakis; Koridor Lampung Barat-Pulau Pisang; Koridor Zona Ekonomi Eksklusif-Laut Jawa; Legundi, Punduh Pidada; Pahawang; Kabel Laut Pulau Pisang; dan Potensi

Kabel Laut Tegal Mas.

- 3) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa pengembangan pusat-pusat distribusi tegangan secara bertahap di seluruh kabupaten dan kota di Wilayah Provinsi,

d. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Provinsi Lampung terdiri atas:

- 1) Jaringan Tetap meliputi; Koridor Kalianda – Anyer; Koridor Lampung Barat - Pulau Pisang; dan Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi Koridor ZEE - Laut Jawa.
- 2) Jaringan Bergerak berupa jaringan 2G, 3G dan 4G tersebar di Kabupaten dan Kota.

e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pembangunan waduk diarahkan untuk fungsi ekologis, ekosistem, konservasi sumber daya air, pengendalian banjir serta untuk menyuplai ke kawasan-kawasan strategis dan Pemanfaatan sumberdaya air guna menunjang program pemanfaatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Pengembangan Sistem jaringan sumber daya air meliputi:

- 1) Jaringan irigasi berupa Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di lintas provinsi, yaitu: D.I Komering Selatan/Way Komering; Jaringan irigasi berupa Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di lintas Kabupaten/Kota, Jaringan irigasi berupa Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada di lintas Kabupaten/Kota,
- 2) Sistem Pengendalian Banjir berupa bangunan pengendalian banjir meliputi: Bendungan Batu Tegi di Kabupaten Tanggamus; Bendungan Margatiga di Kabupaten Lampung Timur; Banjir Bendungan Way Jepara di Kabupaten Lampung Timur; Banjir

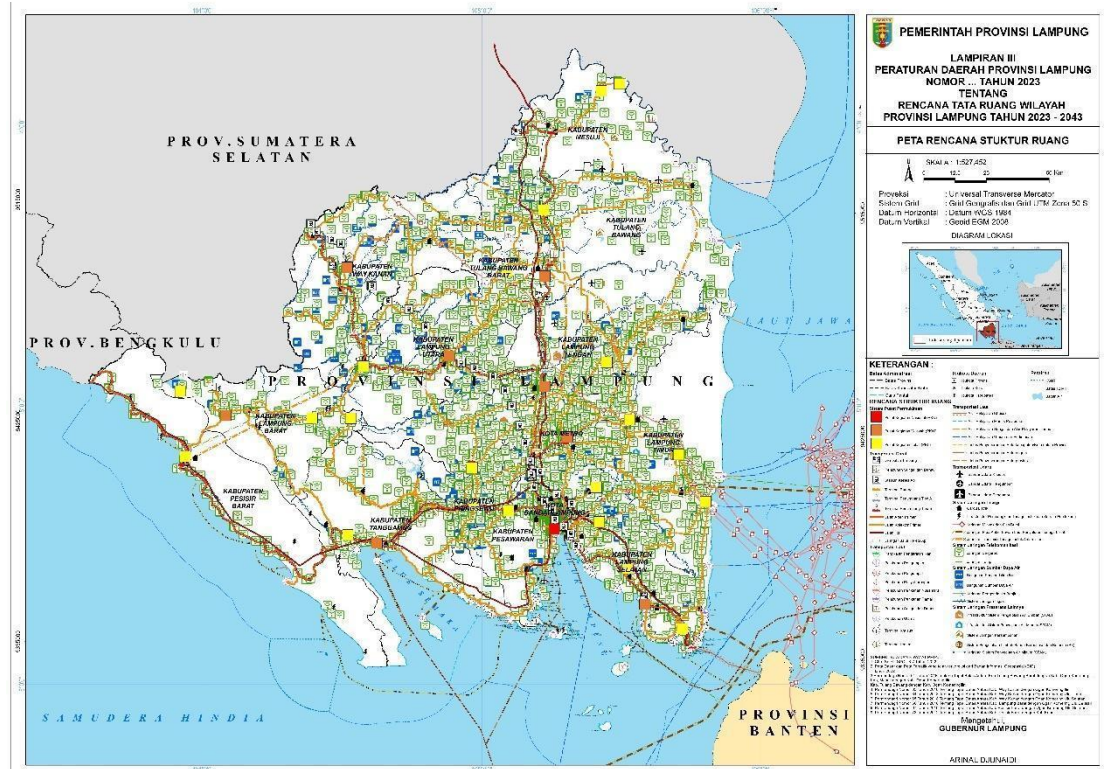
Bendungan Way Rarem di Kabupaten Lampung Utara; dan Banjir Bendungan Way Sabu di Kabupaten Pesawaran.

- 3) Bangunan Sumber Daya Air meliputi bangunan prasarana air baku berupa Bendung irigasi sebanyak 49 Bendung dan Bendungan sebanyak 8 Bendungan
- 4) Bangunan prasarana air baku berupa Embung berada di seluruh Kabupaten dan Kota.
- 5) Sumber air baku meliputi Danau Ranau dan Danau Suoh di Kabupaten Lampung Barat.

f. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

- 1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Dalam pembangunan dan pengembangan air minum Provinsi Lampung, cakupan pelayanan masih merupakan tujuan utama. Oleh karena itu, pembangunan konstruksi prasarana dan sarana air minum menjadi kegiatan utama sedangkan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi masih cenderung terabaikan. Kebijakan pengembangan air minum harus mampu menjangkau semua daerah kawasan permukiman perkotaan, khususnya daerah rawan air serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun rencana sistem penyediaan air minum (SPAM) di Provinsi Lampung meliputi: SPAM Regional Bandar Lampung; dan SPAM Regional Way Sabu/Way Sabu Atas/Pesawaran;
- 2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAL). Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah Provinsi Lampung bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup

Gambar 2. 39 Peta Struktur Ruang Provinsi Lampung



2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah provinsi adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Provinsi Lampung yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya Provinsi Lampung. Rencana pola ruang wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023- 2043 yang meliputi Kawasan Peruntukan Lindung dan Kawasan Peruntukan Budidaya seluas kurang lebih 4.990.415 Ha dapat dilihat pada tabel berikut.

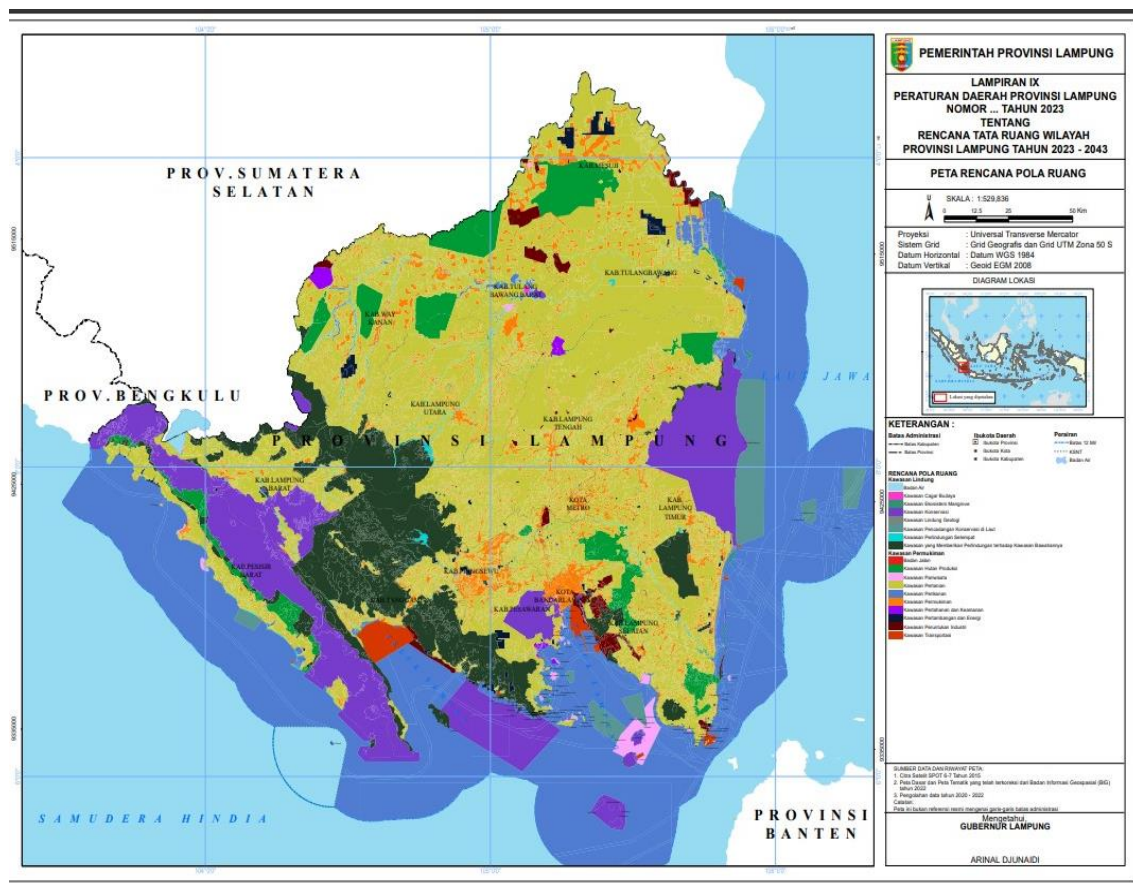
Tabel 2. 33 Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Lampung

RENCANA POLA RUANG	LUAS (HA)	PROSENTASE (%)
Kawasan Peruntukan Lindung	920.839	18,45
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	321.753	34,94
Kawasan Konservasi	501.114	54,42
Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	97.632	10,60
Kawasan Ekosistem Mangrove	340	0,04
Kawasan Peruntukan Budi Daya	4.047.342	81,55
Kawasan Hutan Produksi	197.881	4,86
Kawasan Pertanian	2.118.565	52,06
Kawasan Perikanan	1.430.824	35,16
Kawasan Pertambangan dan Energi	26.513	0,65
Kawasan Peruntukan Industri	22.417	0,55
Kawasan Pariwisata	28.235	0,69

RENCANA POLA RUANG	LUAS (HA)	PROSENTASE (%)
Kawasan Permukiman	213.205	5,24
Kawasan Transportasi	29.827	0,73
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	2.109	0,05
TOTAL	4.990.415	100,00

Sumber: Materi Teknis RTRW 2023-2043 Provinsi Lampung

Gambar 2. 40 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Lampung



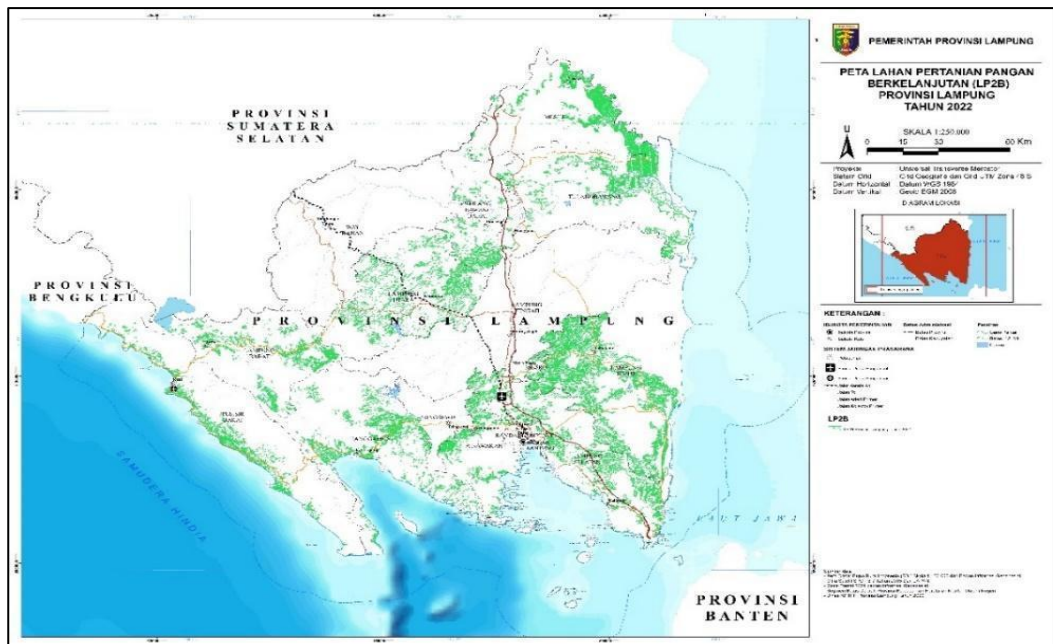
Kawasan pertanian juga meliputi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Baku Sawah (LBS).

Pengembangan pertanian pangan diarahkan untuk tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan kebijakan pengembangan Lahan Sawah Lestari/Abadi (Lahan Pertanian Berkelanjutan) disetiap kabupaten dan kota. Karakteristik wilayah di Provinsi Lampung didominasi dari kawasan pertanian dengan luas kurang lebih 2.118.565 Ha (52,06%) dari luas Provinsi Lampung tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Tengah, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Kota Metro,

Kota Bandar Lampung. Arahan pengembangan kawasan pertanian meliputi:

- Perwujudan kawasan tanaman pangan
- Pengembangan kawasan perkebunan
- Pemantapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B)

Gambar 2. 41 Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Lampung Tahun 2022



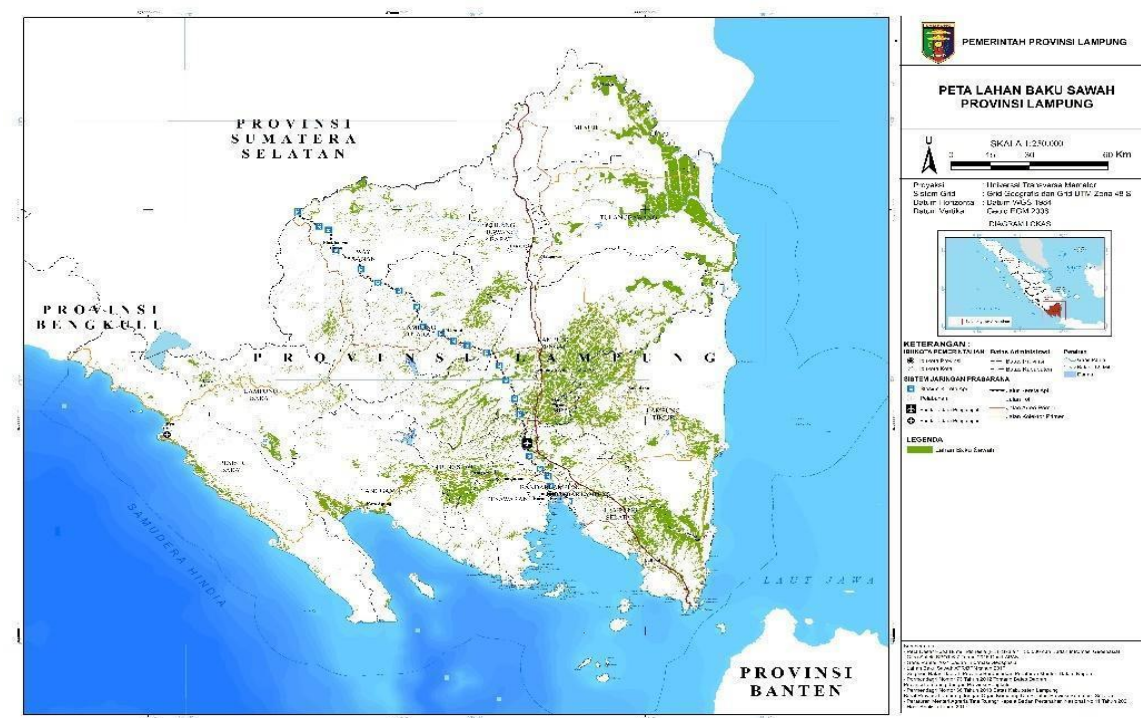
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk 1. melindungi dan menjamin ketersediaan kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, 2. Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, 3. Melindungi kepemilikan lahan, perlindungan dan pemberdayaan petani dan 4. Revitalisasi pertanian. Guna menjamin pelaksanaan peraturan ini maka ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung melalui peraturan daerah maupun surat keputusan bupati/walikota masing-masing sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 34 Luas dan Dasar Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Perda/Pekada LP2B Kabupaten/Kota			
		Dasar Hukum	Luas LP2B (Ha)	Luas LCP2B (Ha)	Data Spasial
1	Lampung Barat	Perda No. 3 Tahun 2021	8,167.20	2,014.33	Ada
2	Tanggamas	Perda No. 01 Tahun 2023	16,331.65	1,436.12	Ada
3	Lampung Selatan	Perda No. 1 Tahun 2023	34,604.00	1,448.00	Ada
4	Lampung Timur	SK Bupati No. B.413/18-SK/2022	59,173.24	-	Ada
5	Lampung Tengah	Perda No. 03 Tahun 2014	53,206.00	18,585.00	-
6	Lampung Utara	SK Bupati No. B/392/34-LU/HK/2022	14,282.55	-	Ada
7	Way Kanan	Perda No. 01 Tahun 2017	18,784.00	7,500.00	-
8	Tulang Bawang	SK Bupati No. B/2727/IV.21/HK/TB/202	46,417.83	2,617.57	Ada
9	Pesawaran	Perda No. 10 Tahun 2021	8,452.00	-	Ada
10	Pringsewu	Perda No. 06 Tahun 2015	8,145.00	-	Ada
11	Mesuji	SK Bupati No. B/402/I.02/HK/MSJ/202	25,056.72	4,110.36	Ada
12	Tulang Bawang Barat	Perda No. 11 Tahun 2021	9,935.00	4,971.96	Ada
13	Pesisir Barat	Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2022	8,341.27	1,161.94	Ada
14	Kota Bandar Lampung	Perwali No. 20 Tahun 2015	409.00	-	-
15	Kota Metro	Perda No. 21 Tahun 2016	1,567.50	-	Ada
PROVINSI LAMPUNG			312,872.96	43,845.28	

Luas lahan baku sawah di Provinsi Lampung seluas 337.283 Ha. Lahan baku sawah terluas di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Tengah seluas 69.061 Ha.

Gambar 2. 42 Peta Baku Sawah Provinsi Lampung



Perkembangan Luas baku sawah Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 446.1/SK-PG.03.03/V/2024 tentang Penetapan Luas lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024 seluas 337.283,93 Ha sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 35 Luas Baku Sawah Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota

OBJECTID	WADMKK	Luas_ha
1	Kota Bandar Lampung	466,80
2	Kota Metro	2.588,89
3	Lampung Barat	9.811,47
4	Lampung Selatan	38.654,74
5	Lampung Tengah	69.061,93
6	Lampung Timur	55.960,24
7	Lampung Utara	13.209,63
8	Mesuji	28.671,50
9	Pesawaran	12.926,02
10	Pesisir Barat	7.966,07
11	Pringsewu	13.719,64
12	Tanggamus	15.943,61
13	Tulang Bawang	46.832,23
14	Tulang Bawang Barat	6.936,63
15	Way Kanan	14.534,56
TOTAL		337.283,93

Rencana Kawasan Strategis

a. Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi Lampung termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang meliputi: Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung) dan Kawasan Selat Sunda (Provinsi Lampung dan Banten)

b. Kawasan Strategis Provinsi Lampung

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Deliniasi kawasan strategis provinsi berbentuk poligon dan bersifat indikatif. Kawasan Strategis Provinsi Lampung, ditetapkan berdasarkan dua sudut kepentingan diantaranya kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung meliputi:

KSP	Deliniasi	Tujuan Pengembangan	Arah Pengembangan
Kawasan Metropolitan Lampung dan sekitarnya	Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Pringsewu, dan Pesawaran, Lampung Timur dan Lampung Tengah	Mewujudkan Kawasan Metropolitan Lampung dan sekitarnya sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Industri, dan pendidikan yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan	a. Pusat kegiatan yang mempunyai fasilitas yang memadai untuk aktivitas sosial dan ekonomi b. Mengurangi berbagai persoalan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur secara lebih terpadu dan pengelolaan yang lebih berwawasan lingkungan melalui pengembangan ruang-ruang terbuka hijau c. Menyediakan peluang investasi dan lapangan pekerjaan d. Ketersediaan fasilitas pelayanan dan jasa yang efisien, seperti sistem informasi, perbankan, jaringan pemasaran dan prasarana ekonomi.
Kawasan Pariwisata Pesisir Barat	Kabupaten Pesisir Barat (kawasan pantai Labuan Jukung dan tanjung setia yang terintegrasi dengan pulau-pulau kecil, dan Kabupaten Lampung Barat (Danau Ranau)	Mewujudkan Pariwisata Pesisir Barat sebagai pusat pariwisata internasional	a. Pengembangan wisata bahari dan ekowisata berbasis kelestarian alam b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata c. peningkatan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan pariwisata
Kawasan Teluk Lampung	Kabupaten Lampung Selatan, Bandar Lampung, Tanggamus, Pesawaran	Mewujudkan kawasan Teluk Lampung sebagai pusat pengembangan pariwisata, Perikanan, industri didukung oleh infrastruktur terpadu	a. Pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Wisata Teluk Lampung sebagai Eco Tourism Centre terintegrasi dengan pulau-pulau kecil di Teluk Lampung b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri, dan perikanan c. peningkatan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan pariwisata, industri dan perikanan

Adapun deliniasi kawasan strategis dari sudut kepentingan Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup meliputi:

3. Tinjauan Aglomerasi Metropolitan Bandar Lampung Raya

Berdasarkan kajian awal rencana pengembangan aglomerasi kawasan metropolitan bandar lampung raya tahun 2022 lingkup deliniasi kawasan metropolitan meliputi Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah Dan Kabupaten Pringsewu. Deliniasi tersebut diperoleh berdasarkan serangkaian analisa ekologi, sosial dan ekonomi wilayah.

1) Potensi dan Masalah

Adapun potensi dan masalah yang ditemukan dari kajian tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Daya Dukung Lahan pada wilayah aglomerasi sebagian besar memiliki klasifikasi kemampuan lahan pada kategori Tinggi, sehingga pada aspek lingkungan/ekologi dapat mendukung pengembangan kawasan Metropolitan
- b. Pada aspek kependudukan (tenaga kerja) beberapa Wilayah Kecamatan sudah menunjukkan kriteria dari kawasan metropolitan yaitu proporsi tenaga kerja pada bidang pertanian < 25 %
- c. Berdasarkan analisis Tutupan Lahan Permukiman pada tahun 2010-2020, beberapa wilayah yang termasuk dalam delineasi kawasan metropolitan mengalami perkembangan secara signifikan diantaranya :
 - Bandar Lampung (Kecamatan Rajabasa, Sukabumi, Tanjung Senang);
 - Metro (Kecamatan Metro Utara, Metro Pusat);
 - Lampung Selatan (Kecamatan Natar, Tanjung Bintang, Jatiagung)
 - Lampung Tengah (Kecamatan Gunung sugih, Terbanggi Besar)
 - Lampung Timur (Kecamatan Sekampung, Sekampung Udik, Pekalongan)
 - Pringsewu (Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu)
 - Pesawaran (Kecamatan Gedong Tataan, Negerikaton, Tegineneng)
- d. Berdasarkan kondisi fiskal daerah, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah termasuk dalam klasifikasi sedang-sangat tinggi. Selain itu, berdasarkan analisis tipologi klassen, kedua wilayah tersebut masuk

dalam kuadran 1 yang berarti bahwa memiliki potensi besar bagi sumber pendapatan daerah, dan berpotensi memiliki tingkat kemakmuran rakyat yang tinggi

- e. Daya Dukung Lahan pada wilayah Kecamatan Kedondong, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Ratai, dan Way Lima memiliki klasifikasi kemampuan lahan pada kategori Rendah-Sedang, sehingga pada aspek lingkungan/ekologi akan sangat terbatas dalam mendukung pengembangan kawasan Metropolitan
- f. Pada aspek Kependudukan, di Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro sebagian besar masih bekerja pada sektor pertanian. Sehingga terdapat batasan-batasan dalam pengembangan kawasan metropolitan
- g. Berdasarkan kondisi fiskal daerah pada Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Kota Metro, Pesawaran, dan Pringsewu termasuk dalam klasifikasi sangat rendah-sedang sehingga perlu perhatian dan penanganan khusus dalam meningkatkan kondisi fiskal daerah masing-masing agar dapat mendukung pengembangan kawasan metropolitan
- h. Berdasarkan rasio kemandirian daerah, seluruh wilayah kabupaten/kota yang termasuk dalam kawasan metropolitan masih tergolong dalam klasifikasi rendah. Artinya bahwa masing-masing wilayah masih bergantung pada dana yang berasal dari pusat karena Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota masih tergolong rendah. Perlunya untuk memperkuat perekonomian dari seluruh Kab/Kota dalam upaya pengembangan kawasan metropolitan.
- i. Berdasarkan kondisi ekonomi wilayah (analisis tipologi klassen), kabupaten Pesawaran termasuk dalam posisi kuadran 4 (daerah relatif tertinggal). Artinya bahwa Kabupaten tersebut memiliki tingkat pembangunan yang rendah, dan belum sepenuhnya didukung oleh SDM maupun SDA. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas SDM dimasa datang agar dapat mendukung pengembangan kawasan metropolitan.

2) Potensi dan Masalah

Tujuan Pengembangan Aglomerasi Kawasan Metropolitan Bandar Lampung Raya Kota yaitu Bandar Lampung sebagai kota inti yang memiliki peran

sebagai PKN dikelilingi oleh kota dan kawasan perkotaan yang memiliki hirarki lebih kecil (PKW dan PKL) dengan fungsi dan peran sesuai dengan karakteristiknya. Secara umum arahan pengembangannya cenderung pada pengembangan pertanian, industri pengolahan dan pariwisata. Berdasarkan hasil analisis isi (Content Analysis) dan tujuan pengembangan masing-masing kabupaten/kota, maka tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan Sekitarnya adalah sebagai berikut: “Mewujudkan Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan Sekitarnya sebagai Kota Perdagangan dan jasa, Industri, dan Pendidikan yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan”

3) Perwujudan Rencana Pembangunan

Prioritas pemanfaatan ruang yang diperoleh adalah program-program yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahap I di 5 (lima) tahun pertama tahun perencanaan. Prioritas pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Bandar Lampung adalah:

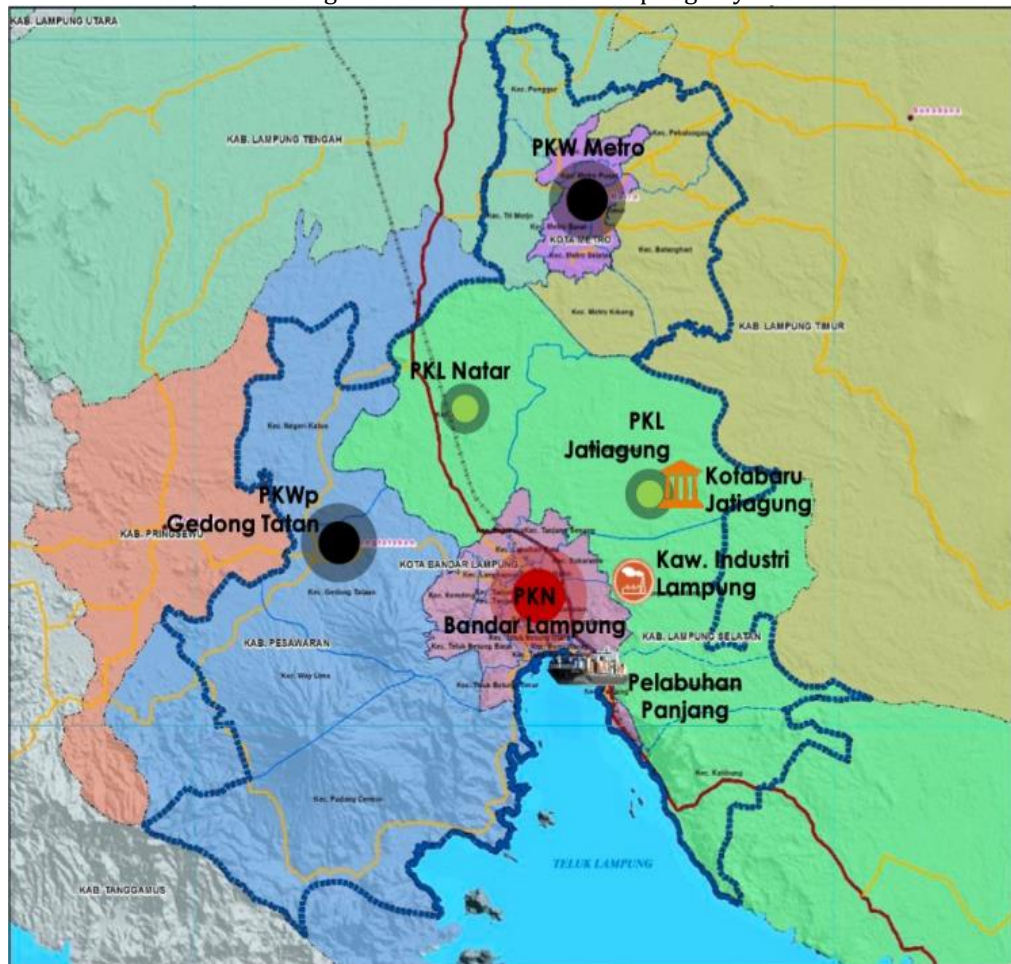
a. Perwujudan Struktur Ruang

- Penyediaan sarana dan prasarana perkotaan secara terpadu
- Revitalisasi permukiman kumuh kota
- Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan umum secara merata
- Peningkatan status jalan antar kota satelit menjadi jalan provinsi
- Meningkatkan kapasitas jalan dengan melakukan pelebaran jalan dan desain geometrik jalan
- Menyediakan lahan parkir sesuai dengan analisis dampak lalu lintas bagi gedung untuk fasilitas umum
- Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana air bersih
- Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana listrik
- Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana telekomunikasi
- Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana drainase
- Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana sampah

b. Perwujudan Pola Ruang

- Pengadaan ruang terbuka hijau diutamakan pada daerah-daerah yang secara alami peka dan dapat berdampak luas
- Penataan dan pengendalian ruang kota sesuai dengan peruntukannya
- Penataan bangunan di Teluk Lampung
- Pengawasan dan pengendalian daerah konservasi
- Mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan
- Pembinaan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan di sekitar wilayah reklamasi pantai (TelukLampung)
- Penyusunan Road Map industri-industri potensial di Kawasan Perkotaan Bandar Lampung.

Gambar 2. 44 Rencana Aglomerasi Kota Bandar Lampung Raya



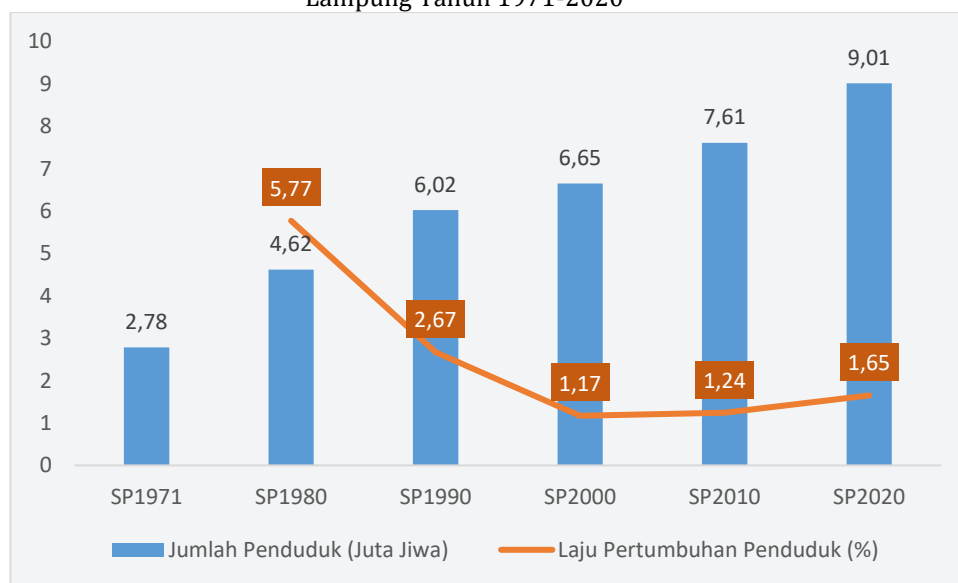
Sumber: Paparan Semiar Nasional Undip dan IAP Lampung oleh Ketua umum IAP 2023

2.1.2 Demografi

2.1.2.1 Kependudukan

Penduduk Provinsi Lampung tahun 2020 mencapai 9,01 juta jiwa atau tepatnya 9.007.848 jiwa. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, jumlah penduduk Provinsi Lampung adalah ke-8 terbanyak di Indonesia atau ke-2 terbanyak di Pulau Sumatra. *Share* penduduk Provinsi Lampung terhadap nasional mencapai 3,33 persen sedangkan di Sumatra mencapai 15,38 persen.

Gambar 2. 45 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Lampung Tahun 1971-2020

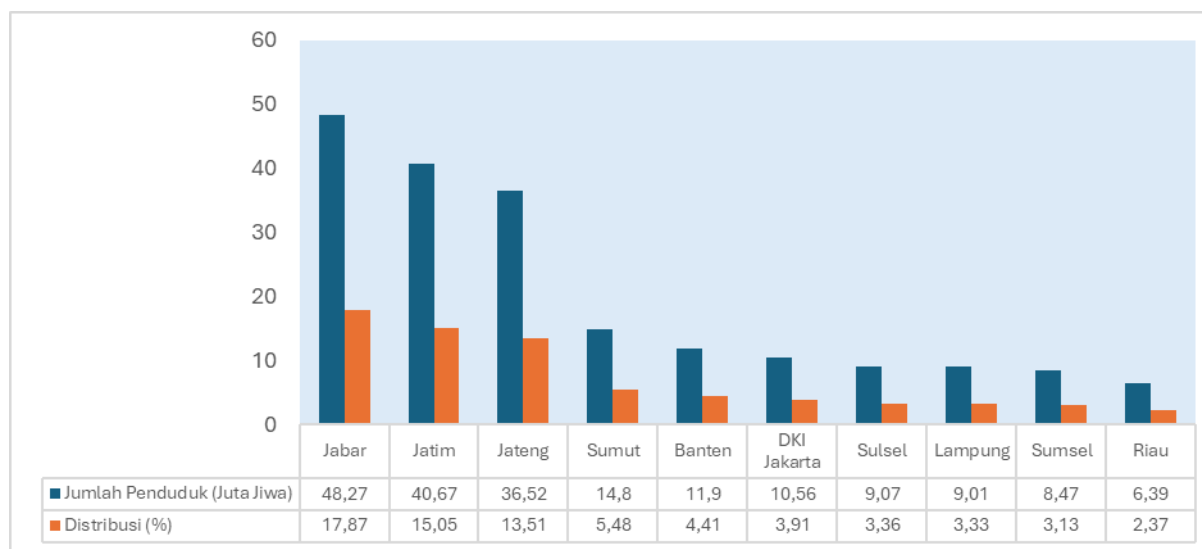


Keterangan : Data Awal

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Berdasarkan publikasi BPS Lampung, sepanjang sensus penduduk (sepuluh tahun sekali) dilaksanakan di Provinsi Lampung, laju pertumbuhan penduduk tertinggi Provinsi Lampung terjadi di antara tahun 1971 dengan tahun 1980 yang mencapai 5,77 persen. Laju Pertumbuhan penduduk pada periode tersebut jauh lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 2,31 persen. Sementara pada periode selanjutnya 1980–2020, laju pertumbuhan penduduk terendah terjadi di antara tahun 1990–2000 yang mencapai 1,17 persen (angka nasional mencapai 1,44 persen). Pada periode terakhir, tahun 2010–2020, laju pertumbuhan mencapai 1,65 persen sedangkan angka nasional sebesar 1,25 persen.

Gambar 2. 46 Sepuluh Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak dan Distribusinya di Indonesia, Tahun 2020

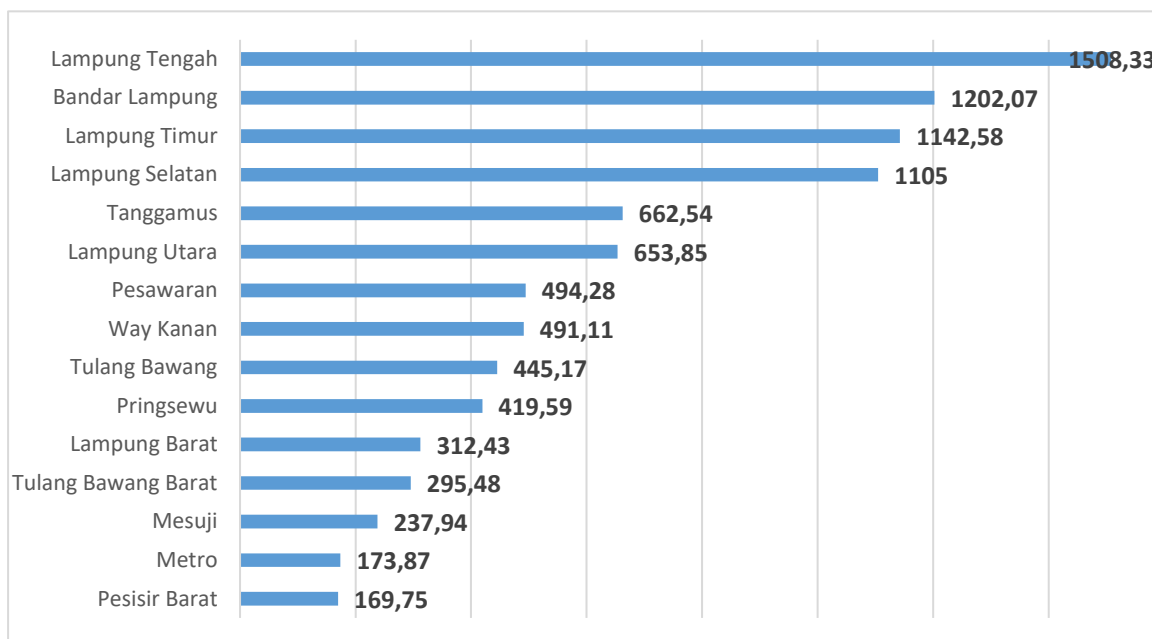


Keterangan : Data Termutakhir

Dinamika penduduk di 3 (tiga) provinsi terbanyak di Indonesia sepanjang 2010–2020 mengalami tren penurunan kontribusi. Hal ini berbeda dengan kontribusi penduduk di Provinsi Lampung. Distribusi penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 mencapai 18,12 persen menurun pada tahun 2020 menjadi 17,87 persen. Distribusi penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 mencapai 15,77 persen menurun pada tahun 2020 menjadi 15,05 persen. Distribusi penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 mencapai 13,63 persen menurun pada tahun 2020 menjadi 13,51 persen. Sementara itu, distribusi penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2010 mencapai 3,20 persen meningkat pada tahun 2020 menjadi 3,33 persen. Terjadinya pergeseran persentase penduduk di provinsi-provinsi besar (seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah) dan Provinsi Lampung menunjukkan bahwa penduduk di Indonesia mengalami dinamika.

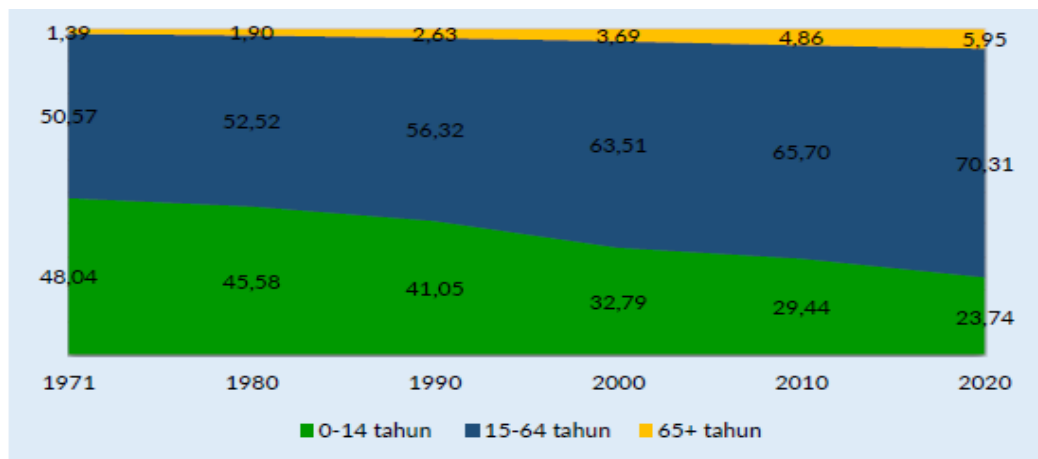
Pada Tahun 2023, Kabupaten Lampung Tengah memiliki sumbangan terbesar terhadap total jumlah penduduk Provinsi Lampung yaitu sebesar 1.508,33 Ribu Jiwa yang diikuti oleh Kota Bandar Lampung sebesar 1.202,07 Ribu Jiwa, Kabupaten Lampung Timur sebesar 1.142,58 Ribu Jiwa, dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 1.105 Ribu Jiwa.

Gambar 2. 47 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2023



Perubahan Struktur Penduduk Lampung. Seiring dengan peristiwa menurunnya tingkat kelahiran sejak tahun 70-an, persentase penduduk usia anak (0–14 tahun) di Provinsi Lampung terus menurun. Pada tahun 1971, persentase penduduk usia anak (0–14 tahun) mencapai 48,04 persen. Periode selanjutnya terus mengalami penurunan. Pada tahun 1980 persentasenya mencapai 45,58 persen, tahun 1990 mencapai 41,05 persen, tahun 2000 mencapai 32,79 persen, tahun 2010 mencapai 29,44 persen, dan tahun 2020 mencapai 23,74 persen. Sementara itu, persentase penduduk usia produktif (15–64 tahun) terus meningkat sejak tahun 1971. Pada tahun 1971 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 50,57 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 70,31 persen di tahun 2020. Perbedaan yang tajam antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam di tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa Provinsi Lampung masih berada dalam masa bonus demografi karena sebesar 70,31 persen penduduknya masih berada di usia produktif.

Gambar 2. 48 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 1971-2020



Keterangan : Data Awal

Rasio Jenis Kelamin. Laki-laki masih lebih banyak dari pada perempuan, hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Lampung sebanyak 4,62 juta orang, atau 51,25 persen dari penduduk Provinsi Lampung. Sementara, jumlah penduduk perempuan di Provinsi Lampung sebanyak 4,39 juta orang, atau 48,75 persen dari penduduk Provinsi Lampung. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Lampung sebesar 105, yang artinya terdapat 105 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Provinsi Lampung pada tahun 2020.

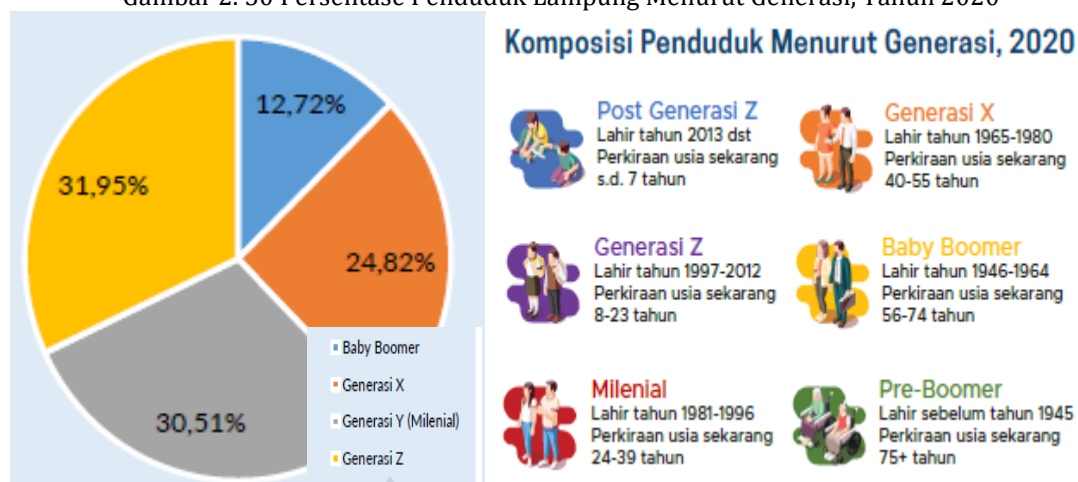
Gambar 2. 49 Rasio Jenis Kelamin dan Piramida Penduduk Lampung Tahun 2020



Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 2024

Penduduk menurut Generasi. Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Provinsi Lampung didominasi oleh generasi Z dan milenial. Proporsi generasi Z sebanyak 27,80 persen dari total populasi (2,48 Juta orang) dan generasi milenial sebanyak 26,54 persen dari total populasi Provinsi Lampung. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2. 50 Persentase Penduduk Lampung Menurut Generasi, Tahun 2020



Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 2024

Dari sisi demografi, seluruh Generasi X dan Generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Sedangkan Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif. Beberapa tahun ke depan, seluruh Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia, baik di masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan Indonesia. Kelompok Penduduk usia produktif terdiri dari kelompok generasi Z, Y, X (milenial) dan *baby boomer*. Generasi Z memiliki persentase paling besar dibandingkan generasi lainnya. Persentase generasi Z mencapai 31,95 persen dari total penduduk usia produktif. Selanjutnya generasi Y yang mencapai 30,51 persen, generasi X mencapai 24,82 persen, dan generasi *baby boomer* mencapai 12,72 persen.

Tabel 2. 36 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020, 2023, dan 2024 (km²)

Kabupaten/Kota	2020	2023	2024
Lampung Barat	142,60	147,65	149,30
Tanggamus	220,76	228,31	231,00
Lampung Selatan	479,53	498,01	504,46
Lampung Timur	287,30	295,44	298,33
Lampung Tengah	321,31	331,58	335,26
Lampung Utara	250,28	246,14	248,42
Way Kanan	129,48	139,08	140,82
Tulang Bawang	139,12	143,26	144,92
Pesawaran	373,54	386,28	390,98
Pringsewu	659,85	682,29	690,57
Mesuji	103,17	108,13	109,79
Tulang Bawang Barat	222,57	230,58	233,10
Pesisir Barat	54,45	56,70	57,56
Bandar Lampung	6361,17	6542,95	6609,68
Metro	2305,89	2374,95	2400,08
Lampung	268,46	277,41	280,55

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Kepadatan penduduk di Provinsi Lampung tahun 2024 mencapai 280,55 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 15 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Bandar Lampung dengan kepadatan sebesar 6.609,68 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 57,56 jiwa/km²

2.1.2.2 Modal Manusia

Sumber daya manusia (SDM) suatu wilayah dapat dilihat dari dua aspek utama, yakni kuantitas dan kualitas. Kuantitas memandang bagaimana ukuran atau jumlah penduduk (struktur, komposisi, kepadatan, sex ratio). Sementara kualitas memandang lebih dalam, bagaimana kemampuan penduduk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraannya. Beberapa referensi secara eksplisit juga menyebutkan bahwa akselerasi pembangunan hanya akan terjadi jika terjadi peningkatan kualitas SDM. Dalam konsep ekonomi makro, di antara beberapa faktor produksi, kualitas SDM merupakan satu-satunya faktor yang

dapat diharapkan karena SDM erat hubungannya dengan ide, pikiran, inovasi, dan adaptasi.

Dalam konteks kependudukan, setiap pertumbuhan penduduk harus disertai dengan peningkatan produktivitasnya. Peningkatan produktivitas salah satunya dipicu oleh kualitas SDM. Keseimbangan antara laju pertumbuhan kuantitas dan pertumbuhan kualitas penduduk adalah modal utama dalam mewujudkan pembangunan yang optimal. Banyak faktor yang memengaruhi kualitas pembangunan di suatu wilayah. Tabel di bawah ini mendeskripsikan bahwa jumlah penduduk yang banyak tidak selalu selaras dengan kualitas yang tinggi penduduknya.

Tabel 2. 37 Jumlah Penduduk dan Indikator Pembangunan di Sepuluh Provinsi Terbanyak di Indonesia, 2020

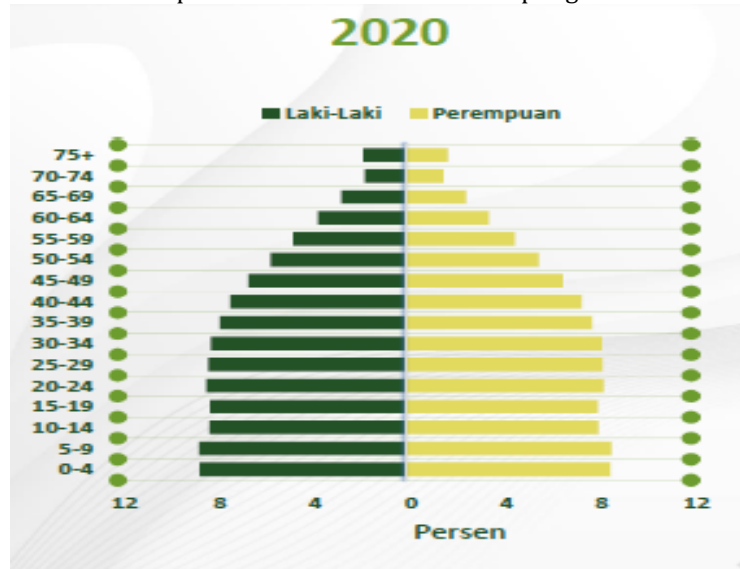
Provinsi	Jumlah (Juta) ¹	Kepadatan (Orang/km ²) ¹	Sex Ratio (Laki-laki Per 100 Perempuan) ¹	Rasio Ketergantungan ¹	Tingkat Pengangguran (%) ²	PDRB Per Kapita (Juta/Tahun) ²	Peringkat IPM ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jawa Barat	48.27	1.365	103.13	42.94	10.46	41.81	10
Jawa Timur	40.67	851	99.60	42.33	5.84	57.65	16
Jawa Tengah	36.52	1.113	101.15	43.16	6.48	38.60	14
Sumatera Utara	14.80	203	100.61	48.32	6.91	55.18	15
Banten	11.90	1.232	104.04	42.89	10.64	47.60	8
DKI Jakarta	10.56	15.907	102.06	39.73	10.95	260.44	1
Sulawesi Selatan	9.07	194	98.59	45.84	6.31	56.51	13
Lampung	9.01	260	105.14	45.87	4.67	41.62	25
Sumatera Selatan	8.47	92	104.16	47.09	5.51	53.51	24
Riau	6.39	73	105.11	46.24	6.32	102.29	7

Sumber Tabel : ¹Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), ²BPS, Diolah

Penduduk Usia Produktif. Berdasarkan komposisi penduduknya, penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2020 berbentuk konstruktif, yang berarti sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur produktif yang ditandai dengan bentuk piramida penduduk yang cembung di bagian tengah. Dalam kondisi ini, penduduk usia kerja akan mengalami peningkatan sehingga menurunkan rasio ketergantungan umur. Menurut hasil Sensus Penduduk 2020, rasio ketergantungan umur penduduk usia tidak produktif dengan penduduk usia produktif adalah sebesar 45,87, yang berarti dari setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) terdapat sekitar 45 penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Angka ini mengalami penurunan dibandingkan hasil Sensus Penduduk 2010

sebesar 52,20. Kondisi peningkatan penduduk usia kerja dan penurunan rasio ketergantungan penduduk disebut sebagai bonus demografi atau *windows of opportunity*.

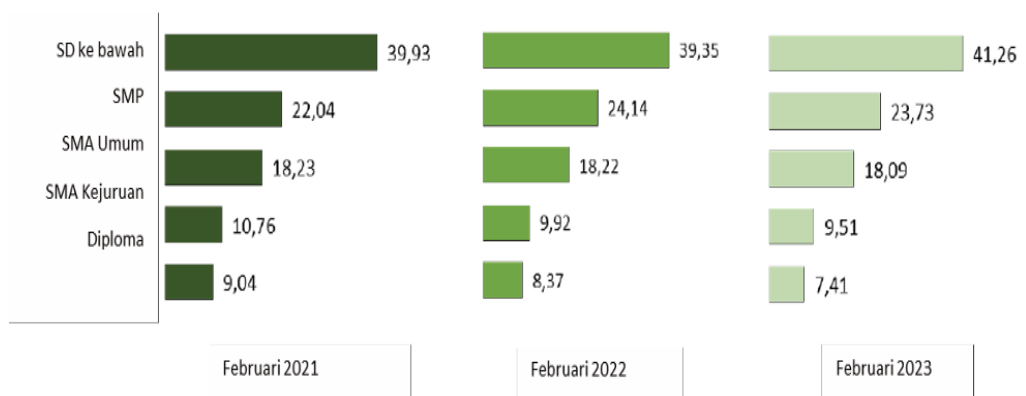
Gambar 2. 51 Komposisi Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2020



Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 2024

Tingkat Pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan data Sakernas Februari 2024, Tingkat pendidikan tenaga kerja di Provinsi Lampung masih didominasi penduduk yang tamat SD dan SMP, yaitu mencapai 63,41 persen. Sekitar 8,67 persen pekerja yang pernah menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.

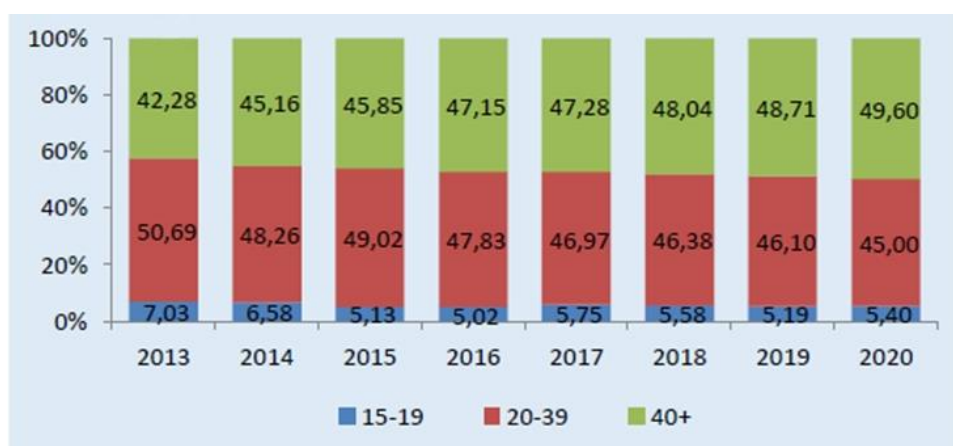
Gambar 2. 52 Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Lampung, Februari 2021-Februari 2023



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Lampung, 2024

Setelah melalui masa bonus demografi, suatu negara akan memasuki era *aging population*, dimana terjadi peningkatan proporsi penduduk usia tua dari total penduduk suatu negara. Di Indonesia era bonus demografi diperkirakan hanya mencapai tahun 2035, hanya kurang dari 15 tahun lagi. Dimulainya penuaan populasi tercermin dari meningkatnya proporsi angkatan kerja dengan usia diatas 40 tahun. Data tahun 2013-2020 menunjukkan bahwa penduduk Lampung sudah mulai memasuki *aging population*. Proporsi angkatan kerja usia 40 tahun keatas di Provinsi Lampung terjadi peningkatan selama kurun waktu 2013-2020. Pada tahun 2013, proporsi angkatan kerja usia 40 tahun keatas mencapai 42,28 persen. Setelah 7 tahun berjalan, proporsi angkatan kerja tersebut meningkat menjadi 49,60 persen. Sedangkan proporsi angkatan kerja usia 20-39 tahun terjadi penurunan dari 50,69 persen menjadi 45,00 persen.

Gambar 2. 53 Proporsi Angkatan Kerja Berdasarkan Kelompok Umur 2013-2020

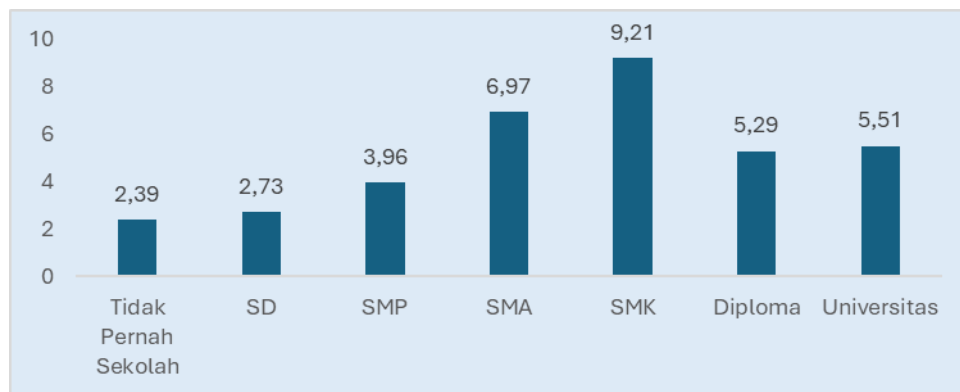


Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Lampung, 2024

Tingkat Pengangguran berdasarkan tingkat Pendidikan. Tidak sedikit lulusan perguruan tinggi menganggur akibat tidak kompeten dalam dunia kerja yang di bidangnya. Tidak hanya teori yang dibutuhkan dalam dunia kerja, akan tetapi skill dan kemampuan teknologi sangat dibutuhkan dalam mengembangkan karir. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2020, tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Lampung menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan terdapat pada jenjang pendidikan SMK, yaitu mencapai 9,21 persen. Diikuti lulusan SMA dengan TPT sebesar 6,97 persen. Pengangguran yang cukup tinggi juga dialami oleh lulusan diploma dan

perguruan tinggi, yaitu berkisar 5 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, semakin besar persaingan dalam dunia kerja.

Gambar 2. 54 TPT Provinsi Lampung menurut Tingkat Pendidikan, 2020

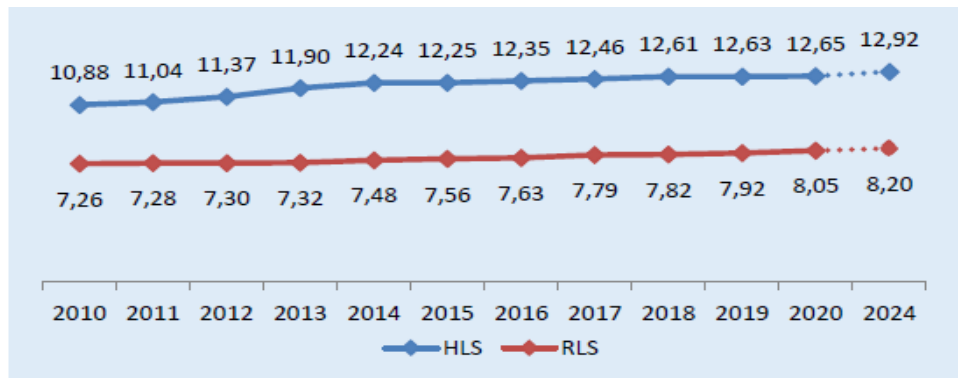


Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Lampung, 2024

Pendidikan Anak. Pendidikan menjadi satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tepatnya Tujuan ke-4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Komitmen Indonesia untuk memenuhi hak-hak anak atas pendidikan terlihat dengan menetapkan wajib belajar hingga 12 tahun dan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Hal tersebut diperkuat dengan adanya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa anak yang telah berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah, dapat digunakan indikator seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu sedangkan RLS dapat didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Gambar 2. 55 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Provinsi Lampung, 2010-2024



Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka, 2024

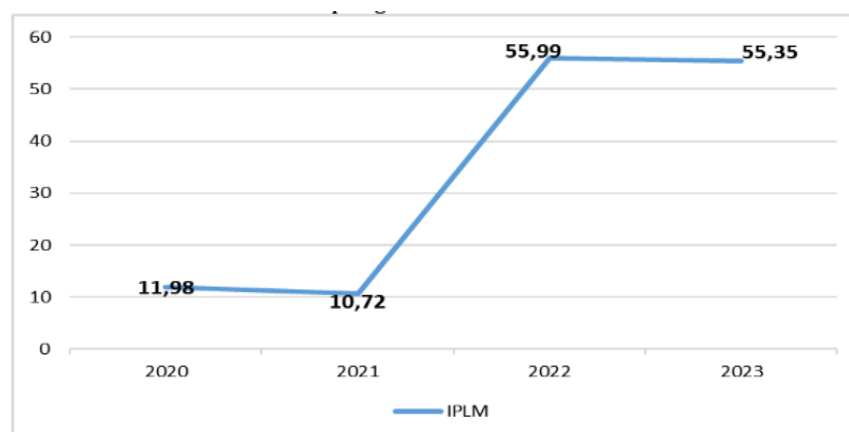
Perkembangan HLS dan RLS Provinsi Lampung meningkat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan HLS pada periode 2010-2020 mencapai 1,53 per tahun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan RLS mencapai 1,05 per tahun. Pada tahun 2020, HLS Provinsi Lampung mencapai 12,65 atau bisa dikatakan rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,65 tahun atau setara dengan Diploma I. Sedangkan RLS Lampung pada tahun 2020 telah mencapai 8,05 atau secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,05 tahun atau telah menamatkan kelas VIII/kelas 2 SMP.

Literasi Membaca. Dalam pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat digunakan indikator indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Provinsi Lampung selama empat tahun terakhir sangat berfluktuatif, dengan capaian di tahun 2023 sebesar 55,35 persen dengan katagori sedang dan angka ini menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 55,99 persen.

Provinsi Lampung terus mengupayakan strategi peningkatan literasi dilaksanakan melalui pembudayaan literasi keluarga, satuan pendidikan, dan pembudayaan literasi masyarakat. Sinergi lintas pemangku kepentingan

sangat diperlukan dalam peningkatan budaya literasi. Hal ini sesuai dengan tujuan jangka panjang daerah dengan melaksanakan transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk menciptakan masyarakat yang berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan produktif.

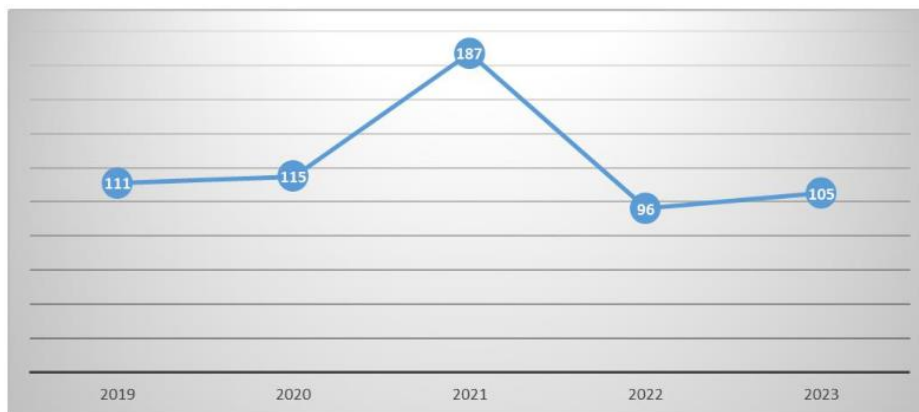
Gambar 2. 56 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2020-2023



Sumber : Satudata.Perpusnas.id, 2024

Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lainnya. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, jumlah kasus kematian ibu terus menunjukkan penurunan, hingga mencapai 105 kasus pada tahun 2023, akan tetapi pada tahun 2022 terjadi penurunan kasus kematian ibu yang cukup signifikan. Penurunan kasus ini juga disebabkan karena kasus Covid-19 sudah mereda sehingga ibu hamil dapat memeriksakan dirinya secara rutin di fasilitas pelayanan kesehatan. Penyebab kematian ibu di Provinsi Lampung pada tahun 2023 sebagian besar disebabkan oleh perdarahan obstetrik 36 persen, komplikasi non obstetrik sebesar 21 persen, hipertensi dalam kehamilan 19 persen, lainnya 17 persen infeksi terkait kehamilan 5 persen dan komplikasi obstetrik lain 2 persen. Dalam upaya menurunkan kematian ibu, diperlukan peningkatan layanan kesehatan khususnya untuk ibu hamil, nifas dan menyusui dengan meningkatkan akses ibu hamil untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan sesuai standar, meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan, Perbiakan sisten rujukan maternal neonatal dan peningkatan pembiayaan kesehatan.

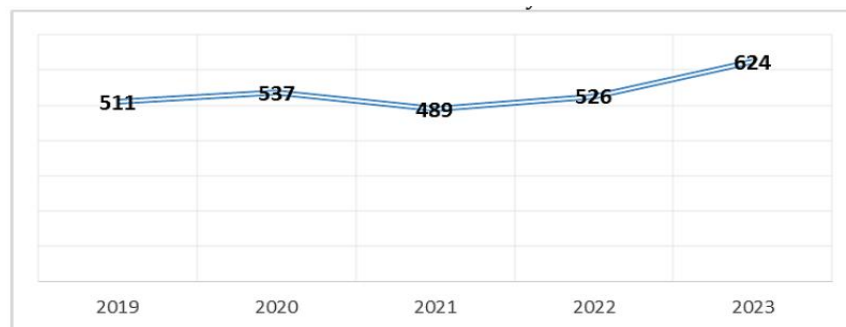
Gambar 2. 57 Trend kasus kematian Ibu tahun 2019-2023



Sumber Laporan Tahun Bidang Kesmas, Dinkes 2023

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia kurang 1 tahun per 100.000 kelahiran hidup pada waktu yang sama. Kematian bayi terjadi pada masa bayi perinatal (0-6 hari), diikuti kematian pada masa bayi neonatal (7 – 28 hari) dan masa bayi (>28 hari - < 1 tahun). Jumlah kasus kematian bayi di Provinsi Lampung Tahun 2023 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 98 kasus, dimana 2022 sebanyak 526 kasus dan tahun 2023 sebanyak 624 kasus. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, trendnya kasus kematian bayi tahun 2019- 2023 terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 58 Trend kasus kematian bayi tahun 2019-2023



Sumber Laporan Tahun Bidang Kesmas, Dinkes 2023

Kesehatan Anak. Imunisasi merupakan salah satu upaya perlindungan kesehatan yang paling efektif untuk anak-anak terhadap beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti: TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, pertusis, campak, rubella, polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Vaksin dan penggunaan vaksin dapat memengaruhi perkembangan anatomi dan fisiologis progresif normal anak-anak dari bayi hingga dewasa. Program imunisasi dasar lengkap menurut Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 wajib diberikan pada bayi sebelum berusia satu tahun, yang terdiri dari *Bacillus Calmette Guerin* (BCG), *Diphtheria Pertussis Tetanus-Hepatitis Bhaemophilus Influenzae* tipe B (DPT-HB-HiB), hepatitis B pada bayi baru lahir, polio dan vaksin.

Berdasarkan publikasi Profil Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2022, cakupan imunisasi BCG 97 persen, DPTI 99,5 persen, Polio 98,3 persen dan Campak 101,5 persen.

Gambar 2. 59 Persentase Balita 0-59 bulan yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap, 2020

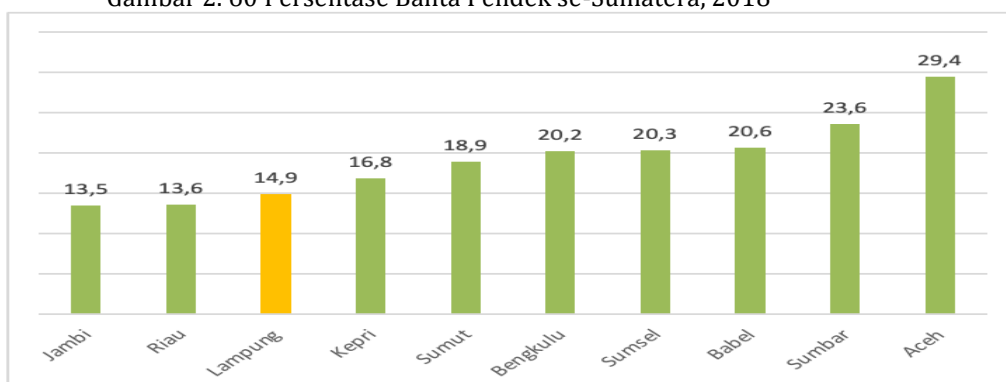


Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka, 2024

SDGs menargetkan untuk mengurangi angka stunting hingga 40 persen pada tahun 2030 dari persentase awal pada tahun 2012. Target untuk Indonesia sendiri adalah menurunkan angka stunting hingga mencapai 14 persen pada tahun 2024. Upaya-upaya penurunan angka stunting terus dilakukan oleh pemerintah dengan menjadikan stunting sebagai fokus utama bidang kesehatan dan gizi. Kerja sama berbagai sektor juga dilakukan untuk

mengatasi penyebab mendasar stunting yaitu kemiskinan, pendidikan, serta sarana prasarana kesehatan dan sanitasi. Dengan adanya kerjasama dari berbagai sektor diharapkan pencapaian target SDGs dapat segera terpenuhi sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia terutama anak-anak.

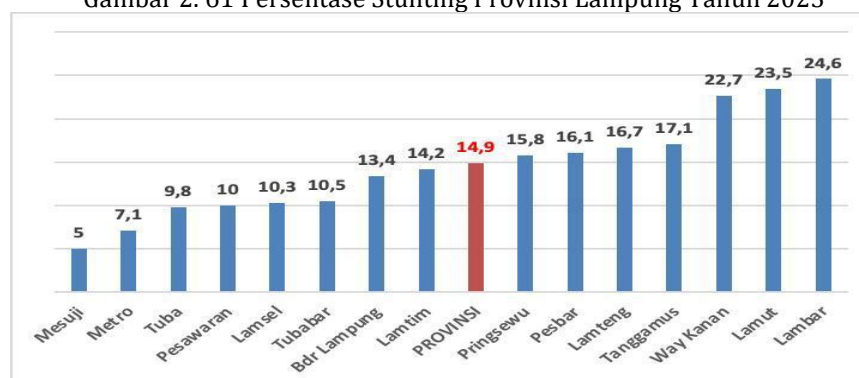
Gambar 2. 60 Persentase Balita Pendek se-Sumatera, 2018



Sumber : Survei Kesehatan Indonesia, 2024

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023, Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan prevalensi stunting terendah ke-3 di Pulau Sumatera yaitu dengan capaian 14,9 persen. Persentase stunting tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Aceh dengan prevalensi 29,4 persen, lalu Provinsi Sumatera Barat 23,6 persen dan Provinsi Bangka Belitung sebesar 20,6 persen.

Gambar 2. 61 Persentase Stunting Provinsi Lampung Tahun 2023



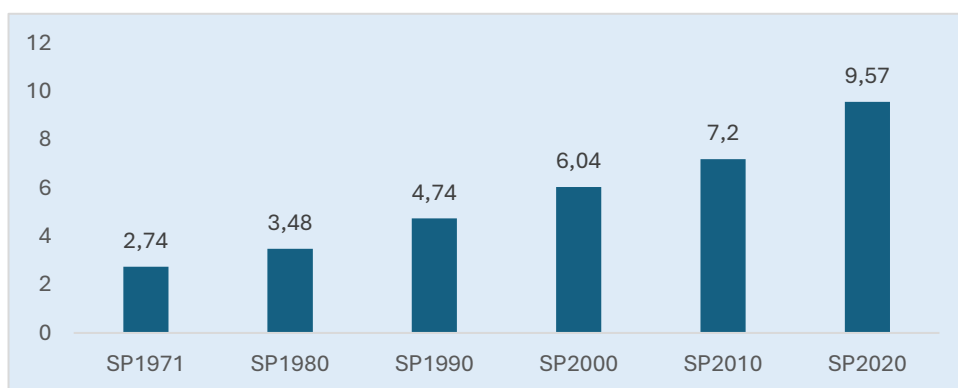
Sumber : Survei Kesehatan Indonesia, 2024

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang

merupakan kondisi tumbuh kembang pada anak balita yang gagal akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dalam upaya percepatan penurunan stunting dan pencapaian target Prevalensi Stunting Nasional sebesar 3,8% untuk Provinsi Lampung di tahun 2045, Provinsi Lampung terus membuat strategi dalam mendukung pelaksanaan 8 aksi konvergensi di Kabupaten/Kota dan menjalin Koordinasi, sinergi dan konvergensi antara multisektor terkait, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Capaian Stunting Provinsi Lampung Tahun 2023 sebesar 14,9. Angka prevalensi stunting kabupaten tertinggi berdasarkan SKI berada di Kabupaten Lampung Barat yaitu sebesar 24,6% Sedangkan angka prevalensi terendah berada di Kabupaten Mesuji sebesar 5%.

Persentase Penduduk Lanjut Usia. Pembangunan yang telah dicapai oleh Indonesia selama ini memberikan dampak yang positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, salah satunya tercermin dari peningkatan usia harapan hidup penduduk Indonesia. Konsekuensi dari meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia adalah terjadinya peningkatan persentase penduduk lanjut usia atau lansia (60 tahun ke atas). Persentase penduduk lansia Provinsi Lampung meningkat menjadi 9,57 persen di tahun 2020 dari 7,20 persen pada 2010 berdasarkan hasil SP2010. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 Lampung akan berada dalam “masa transisi” menuju era *ageing population* yaitu ketika persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai 10 persen ke atas.

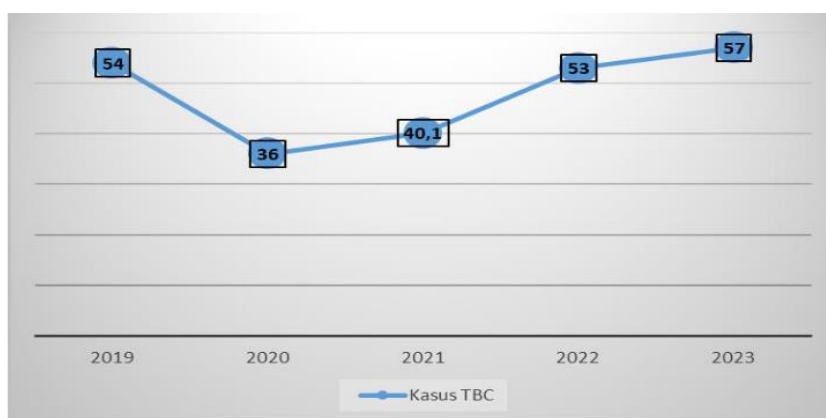
Gambar 2. 62 Persentase Penduduk Lansia, 1971-2020



Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka , 2024

Tuberkulosis merupakan penyebab kematian ke-9 di dunia dan penyebab utama agen infeksius tunggal dengan peringkat di atas HIV/AIDS. Menurut WHO dalam Global TB Report tahun 2020, saat ini Indonesia berada di urutan 2 negara terbesar di dunia sebagai penyumbang penderita TBC setelah India, dengan estimasi insiden sebesar 845.000 kasus atau 312 per 100.000 penduduk dan mortalitas 92.000 atau 34 per 100.000 penduduk (selain TB HIV). Berdasarkan data angka penemuan kasus TBC (CDR) semua kasus TB di Provinsi Lampung terlihat bahwa penemuan kasus dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terus meningkat, namun angka ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 90%. Semakin tinggi CDR mengartikan semakin banyak kasus TBC yang ditemukan secara dini dan diobati, sehingga menurunkan angka penularan di masyarakat. CDR yang rendah mengartikan kasus TBC masih banyak yang belum ditemukan sehingga mengindikasikan penularan TBC yang tinggi di Kabupaten/Kota tersebut.

Gambar 2. 63 Cakupan Penemuan Kasus TBC (CDR) Di Provinsi Lampung Tahun 2023

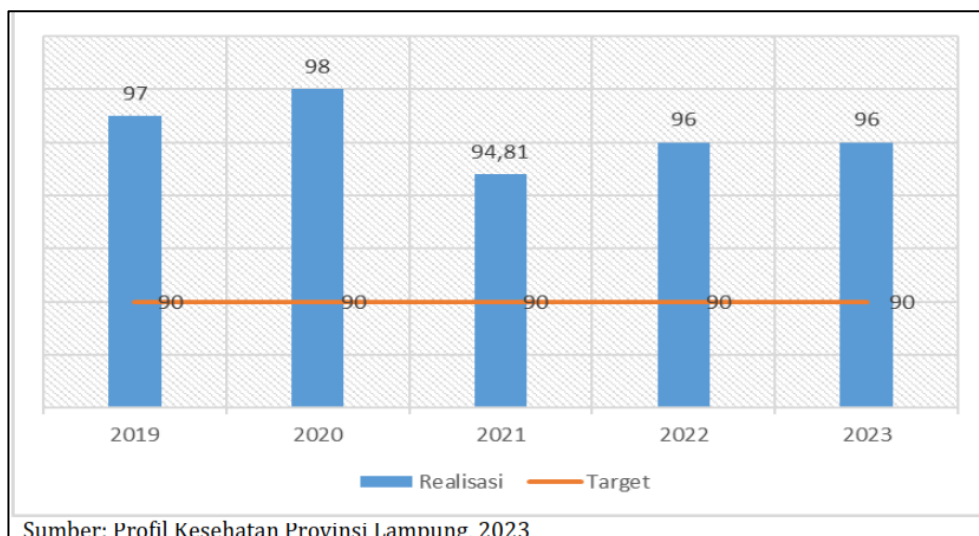


Sumber : Evaluasi Bidang P2PM Dinkes Prov. Lampung, 2023

Angka Keberhasilan Pengobatan TB paru (success rate). Dari tahun 2019 hingga 2020, angka keberhasilan pengobatan TB paru di Lampung berada di atas target yang ditetapkan. Namun, mulai tahun 2021, angka keberhasilan mulai menurun dan berada di bawah target. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketersediaan obat, kepatuhan pasien terhadap pengobatan, dan dukungan dari tenaga kesehatan. Untuk meningkatkan angka keberhasilan pengobatan, perlu

ada peningkatan dalam edukasi pasien, peningkatan akses terhadap obat-obatan, dan dukungan berkelanjutan dari tenaga kesehatan.

Gambar 2. 64 Angka Keberhasilan Pengobatan TB paru (success rate) Provinsi Lampung 2019-2023



2.1.2.3 Keragaman Sosial dan Budaya menjadi Kekuatan Pembangunan

Secara historis, masyarakat asli Lampung yang terdiri dari dua suku adat besar yang mendiami wilayah dengan topografis yang berbeda. Lampung Pesisir (Ulun Peminggir) yaitu mereka suku Lampung asli yang mendiami wilayah Lampung bagian pesisir dan Lampung Pepadun (Ulun Pepadun) adalah suku asli Lampung yang mendiami wilayah dataran rendah dan tinggi yaitu di daerah Abung, Tulangbawang, Waykanan/Sungkai, Pubian dan daerah lainnya yang ada di Provinsi Lampung. Masyarakat Lampung sendiri sebagai entitas yang berbudaya mempunyai kearifan lokal. Sifat dan watak orang Lampung mencakup: (1) *Piil pesenggiri*, rasa malu untuk melakukan sikap yang terhina menurut agama dan lingkungan sosial-budaya, (2) *Bejuluk-beadok* yakni kepribadian yang sesuai dengan gelar adat yang disandangnya, (3) *Nemui Nyimah* adalah sikap saling beramah tamah dengan tamu, (4) *Nengah Nyappur* ialah perilaku aktif dalam bermasyarakat serta tidak individualis, dan terakhir (5) *Sakai Sambayan* yaitu gotong royong dan saling membantu. Acuan keseluruhan sifat ideal tersebut merupakan sikap dan watak yang diharapkan dimiliki orang Lampung. Keseluruhan prinsip ini

membangun konsepsi *piilulun* Lampung, memiliki keterikatan yang kuat antara masing-masing prinsip dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri.

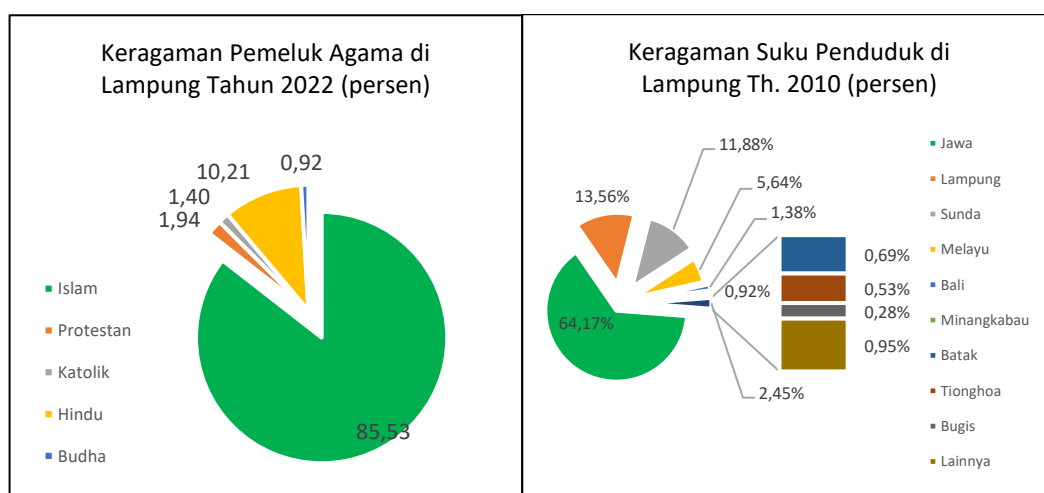
Keseluruhan sikap individu tersebutlah yang akhirnya membentuk karakter masyarakat Lampung yang menjunjung nilai-nilai luhur, menjaga sikap yang baik, saling menghormati antar sesama. Karakter masyarakat Lampung tersebut menjadi landasan bagi sikap individu maupun masyarakat Lampung sehingga menjadi slogan provinsi yang bermakna dalam kesatuan daerah Lampung, yang memiliki dua golongan yaitu adat pepadun dan saibatin sekaligus orang asli dan orang pendatang di Lampung. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Lampung memiliki toleransi yang cukup baik terhadap keragaman budaya dan pengaruh dari luar termasuk pendatang dari daerah lain. *Piil Pesenggiri* adalah salah satu cara masyarakat Lampung dalam menerima keberadaan masyarakat pendatang agar bersama-sama dapat saling menjaga keharmonisan dan saling bekerjasama.

Dari perspektif perdamaian, nilai-nilai yang terkandung dalam *piil pesenggiri* secara jelas membimbing masyarakat untuk saling menghargai, tolong-menolong, bermasyarakat, berjiwa besar dan bergaul dengan baik. Tindakan ideal bagi masyarakat Lampung adalah mengacu kepada nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal tersebut. Dalam konteks masyarakat yang masih berpegang pada adat, institusi lokal berperan sebagai rujukan dalam tata kelola birokrasi dan pola interaksi masyarakat. Semua didasarkan kepada kearifan lokal dan dilembagakan demi kepentingan bersama. Dalam kehidupan masyarakat Lampung, terdapat sebuah institusi lokal yang mempunyai peran penting, yaitu kekerabatan (Djausal, 2018). Ikatan kekerabatan yang kuat terdorong oleh prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *piil pesenggiri*. *Bejuluk-beadok* menciptakan kedekatan emosional antara yang memberi *juluk* dan *adok* kepada pemberinya. *Nemuy nyimah* dan *nengah nyappur* menjaga kedekatan tersebut dan peluang untuk membangun relasi baru. Dan *sakai sambayan* mengikat kuat kekerabatan tersebut menjadi sebuah komunitas yang saling menghargai, membutuhkan dan tolong menolong. Memperkuat ikatan kekerabatan yang terus diperluas

dalam interaksi sosial, merupakan *wujud keterbukaan masyarakat Lampung* selama berabad-abad.

Dalam perkembangannya, Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat majemuk. Beragam suku, ras, etnik, agama, budaya, bahasa dan adat istiadat hidup berdampingan di dalamnya. Kehidupan sosial kemasyarakatan yang plural tersebut menjadikan Lampung berjuduk sebagai “Miniatur Indonesia”. Bersatunya keberagaman masyarakat di Provinsi Lampung selaras dengan semboyan *Sang Bumi Ruwa Jurai* yang juga menggambarkan bahwa penduduk Lampung terdiri dari *Jurai* /golongan penduduk asli dan pendatang sebagai wujud keharmonisan kehidupan bermasyarakat yang tentunya sangat sejalan dengan amanah dasar negara Pancasila dan semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*” yang tercermin dalam tata pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dengan beragam suku, budaya, ras dan agama maupun status sosial. Modal sosial tersebut akan saling melengkapi dan menjadi kekuatan besar untuk mencapai cita-cita pembangunan yang diharapkan, dan menjadi landasan dari proses pembangunan yang telah dan akan dijalankan.

Gambar 2. 65 Keragaman Pemeluk Agama Tahun 2022 dan Keragaman Suku Penduduk Tahun 2010 di Lampung

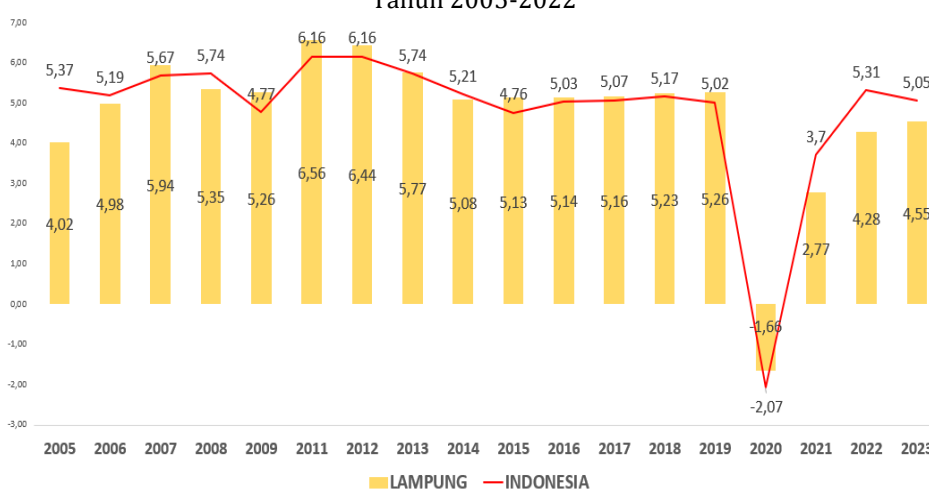


2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi. Fundamental ekonomi yang tetap tumbuh di tengah guncangan global. Laju perekonomian Lampung tumbuh dari 4,02 persen di tahun 2005 menjadi 5,88 persen di tahun 2010. Pada kurun waktu tahun 2005-2010 tersebut, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Lampung di tahun 2007 mencapai 5,94 persen dan merupakan LPE tertinggi sepanjang tahun 2005-2010.

Gambar 2. 66 Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Indonesia Tahun 2005-2022



Keterangan : Data Awal

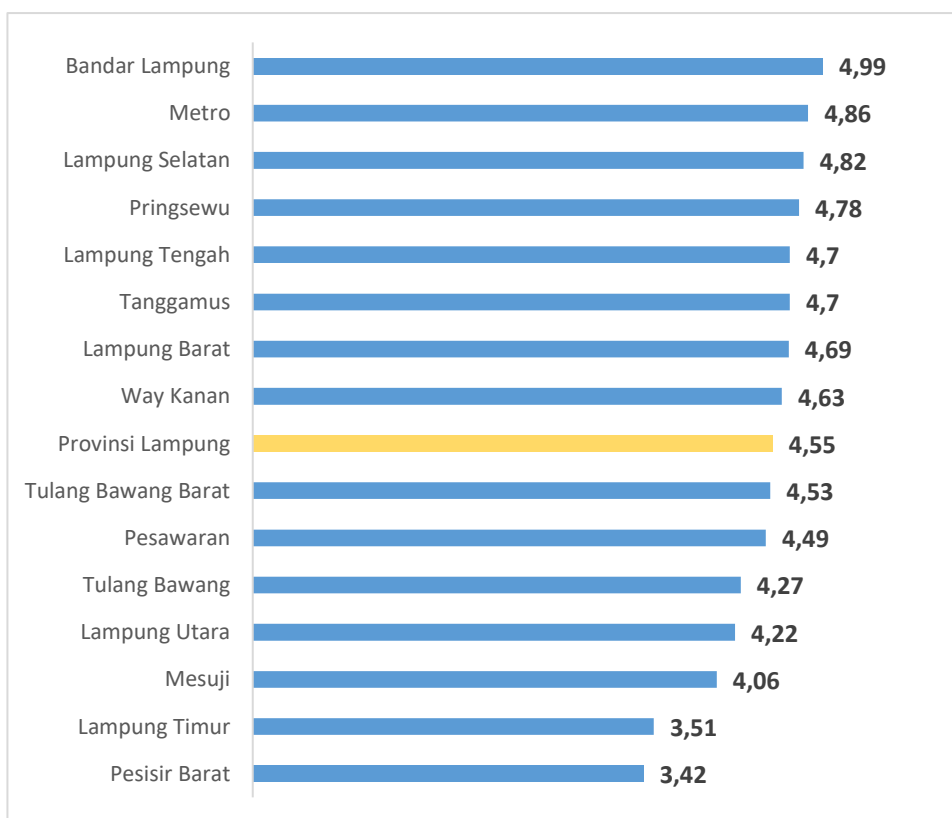
Perkembangan LPE Lampung pada periode 2011 s.d. 2021 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 LPE Lampung tumbuh sebesar 6,56 persen. Pertumbuhan tersebut terdegradasi di tahun 2012 hingga tahun 2014; dimana LPE Lampung tercatat sebesar 6,44 persen (tahun 2012) turun menjadi 5,08 persen (tahun 2014). Dibanding dengan tahun 2014, LPE Lampung kembali menguat menjadi 5,13 persen di tahun 2015; dan terus merambat naik pada level 5,26 persen di tahun 2019. Secara umum, data statistic sepanjang periode tahun 2005 s.d. 2019 menunjukkan bahwa rata-rata LPE Lampung berada pada kisaran 5-6 persen dan lebih baik dibanding dengan LPE secara nasional.

Memasuki tahun 2020 perekonomian ditingkat global dan nasional mengalami guncangan akibat bencana Covid-19. Demikian pula dengan perekonomian Lampung juga mengalami *shock*, dan menyusut hingga

bernilai minus 1,67 persen. Selanjutnya, seiring dengan upaya pengendalian Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi yang dilaksanakan secara masif oleh pemerintah daerah disepanjang tahun 2020-2021; perekonomian Lampung di kembali tumbuh positif dan terus mengalami peningkatan menjadi 2,79 persen (2021), 4,28 persen (2022) dan 4,55 persen (2023).

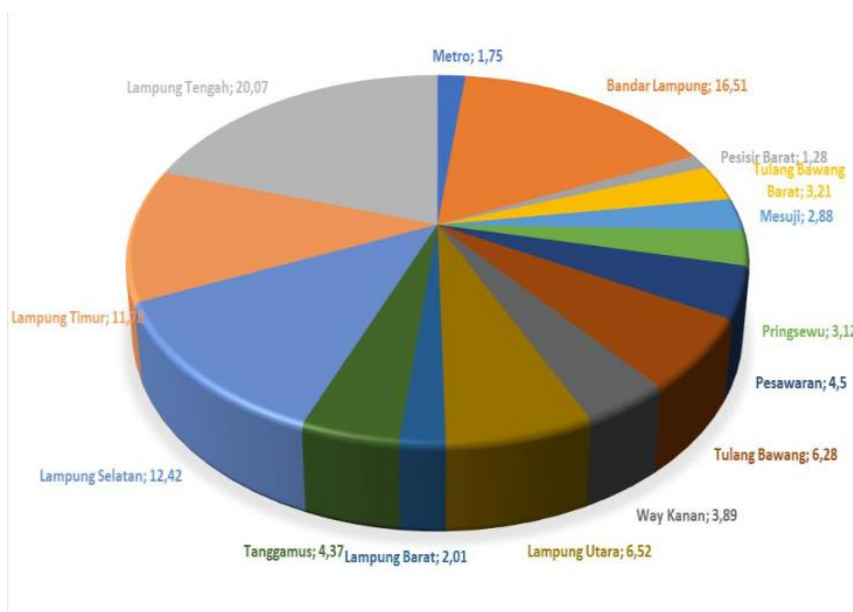
Pada Tahun 2023 Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menunjukkan bahwa sebanyak 8 Kabupaten/Kota memiliki angka Pertumbuhan Ekonomi melampaui angka Provinsi yaitu: Kota Bandar Lampung (4,99), Kota Metro (4,86), Kabupaten Lampung Selatan (4,82), Kabupaten Pringsewu (4,78), Kabupaten Lampung Tengah (4,7), Kabupaten Tanggamus (4,7), Kabupaten Lampung Barat (4,69), dan Kabupaten Way Kanan (4,63). Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi tertinggi diraih oleh Kota Bandar Lampung dengan pertumbuhan sebesar 4,99% dan pertumbuhan ekonomi terendah diraih oleh Kabupaten Pesisir Barat dengan pertumbuhan sebesar 3,42 %.

Gambar 2. 67 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2023



Pada Tahun 2023, Kabupaten Lampung Tengah memiliki sumbangan terbesar terhadap total PDRB (ADHB) Provinsi Lampung yaitu sebesar 20,07% yang diikuti oleh Kota Bandar Lampung (16,51%), Kabupaten Lampung Selatan (12,42%), dan Kabupaten Lampung Timur (11,78%).

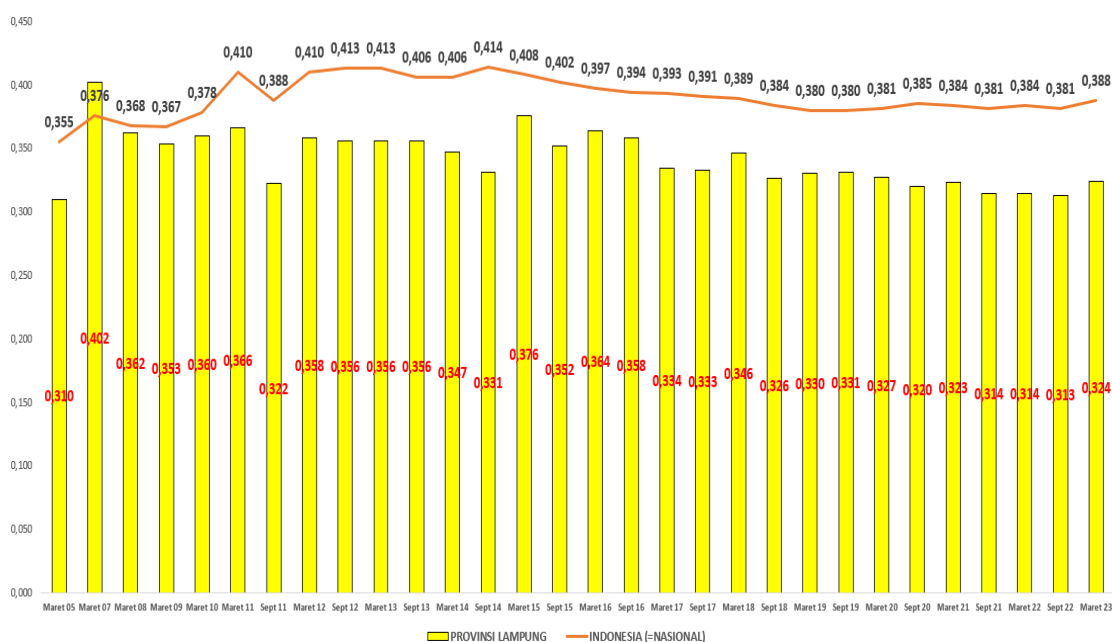
Gambar 2. 68 Distribusi PDRB (ADHB) Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024

Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk. Pada awal tahun 2005 Indeks Gini^{*)} di Provinsi Lampung berada pada angka 0,310 dan masih lebih baik dibanding angka Indeks Gini nasional yang sebesar 0,355. Selanjutnya, angka tersebut meningkat di tahun 2007 dimana Indeks Gini Lampung tercatat sebesar 0,402 yang berarti lebih tinggi dibanding dengan Indeks Gini pada level nasional yang berada pada angka 0,376. Pada tahun-tahun selanjutnya, data Indeks Gini Provinsi Lampung pada periode tahun 2008 s.d 2023 memberi gambaran bahwa perkembangan angka Indeks Gini terendah berada pada angka 0,313 (Sept 2022) dan tertinggi pada angka 0,376 (Maret 2015). Berdasarkan kondisi tersebut, kategori tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Lampung masih berada pada kategori rendah dan lebih baik dibanding dengan rata-rata ketimpangan pada skala nasional.

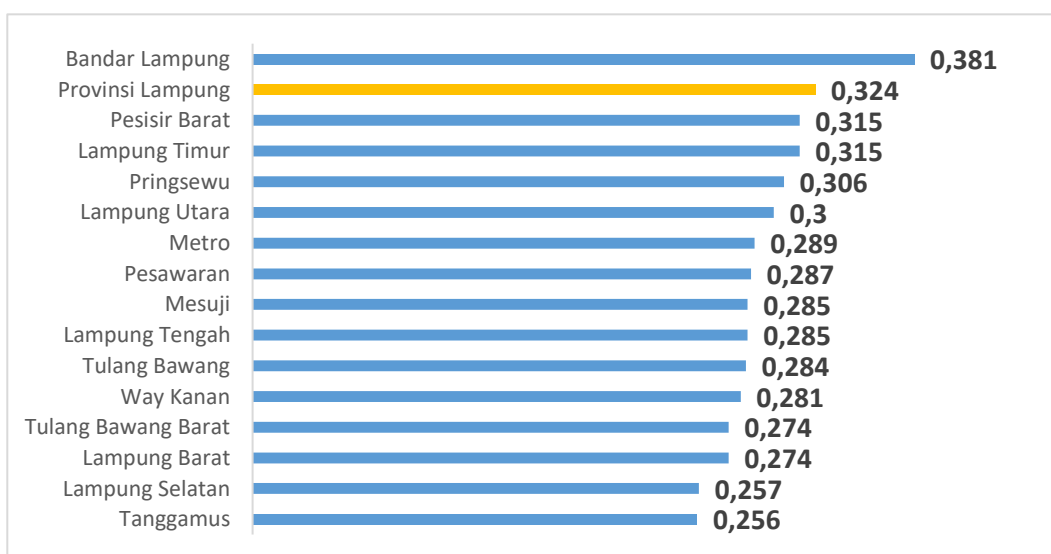
Gambar 2. 69 Rasio Gini Lampung dan Nasional Tahun 2005-2023



Keterangan : Data Awal

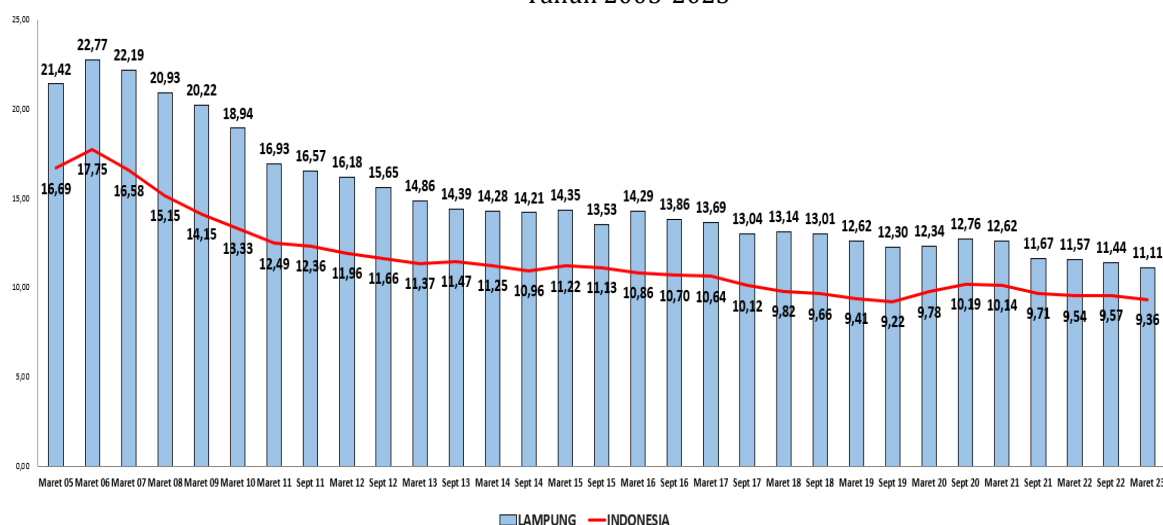
Pada tahun 2023, Indeks Gini di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung menunjukkan bahwa dari total 15 kabupaten/kota, sebanyak 14 di antaranya memiliki rasio ketimpangan pendapatan di bawah capaian Provinsi. Selanjutnya, tercatat bahwa ketimpangan pendapatan tertinggi terjadi di Kota Bandar Lampung dengan rasio Gini mencapai 0,381, sementara ketimpangan terendah terjadi di Kabupaten Tanggamus dengan rasio Gini sebesar 0,256.

Gambar 2. 70 Indeks Gini Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2023



Tingkat kemiskinan. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum menunjukkan bahwa pada tahun 2005 persentase penduduk miskin sebesar 21,42 persen, dan semakin menurun menjadi 11,11 persen di tahun 2023. Demikian pula dari sisi jumlah penduduk miskin, pada Maret tahun 2005 jumlah penduduk miskin sebesar 1,572 juta jiwa dan terus mengalami penurunan hingga Maret tahun 2023 mencapai 970,67 ribu jiwa; atau telah berkurang sekitar 601 ribu jiwa pada kurun waktu 2005 hingga 2023.

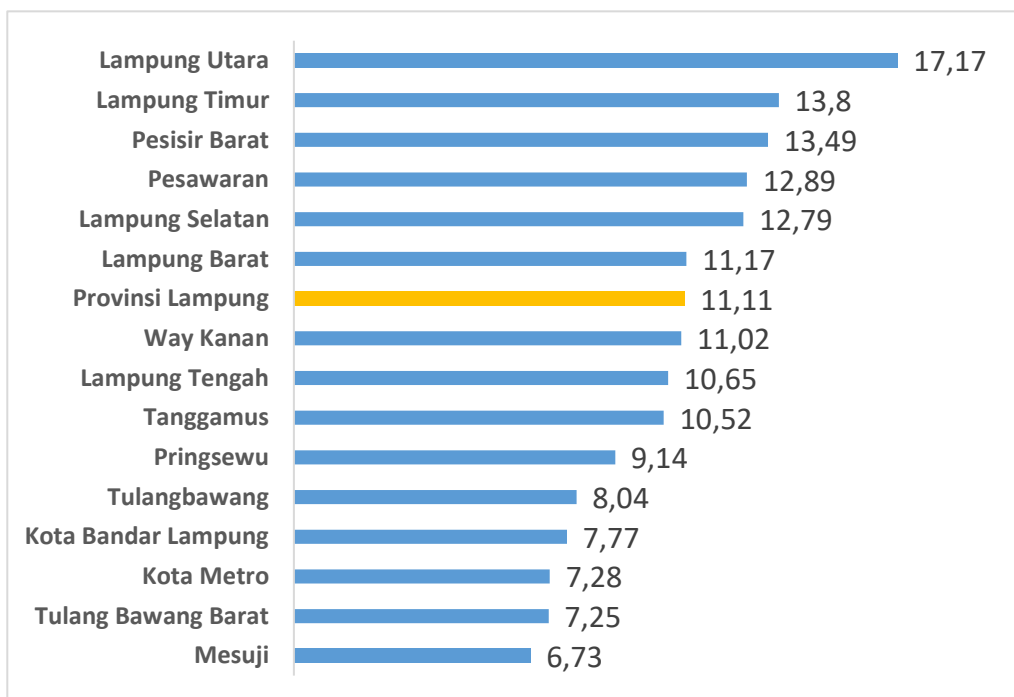
Gambar 2. 71 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2005-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung

Selanjutnya merujuk pada Grafik 2.67 pada tahun 2023 masih terdapat kondisi kemiskinan di 6 (enam) Kabupaten/Kota dengan angka kemiskinan di atas rata-rata tingkat Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Barat. Berkenaan dengan uraian tersebut, maka program-program penanggulangan kemiskinan akan diarahkan pada kegiatan di wilayah perdesaan dan wilayah tertinggal, pada sektor-sektor produksi yang dekat dengan pelaku dan kultur perdesaan maupun aktifitas ekonomi tradisional; yang didorong dengan ketersediaan layanan dasar berupa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, disertai dengan peningkatan sarana fisik lingkungan dan perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Gambar 2. 72 Persentase Kemiskinan Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung

Pembangunan Desa dan Kemiskinan Perkotaan-Perdesaan. Provinsi Lampung memiliki 2.435 desa yang tersebar di 13 (tiga belas) kabupaten. Berdasarkan ukuran Indeks Desa Membangun (IDM), tercatat bahwa di tahun 2015 jumlah desa berstatus “Tertinggal” dan “Sangat tertinggal” sebanyak 1.457 desa (1.306 desa tertinggal dan 151 desa sangat tertinggal). Jumlah tersebut semakin berkurang dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2020 tersisa 226 desa tertinggal dan 6 desa sangat tertinggal. Sejalan dengan keadaan tersebut, jumlah desa yang berstatus desa Maju, Berkembang dan Mandiri juga semakin bertambah.

Tabel 2. 38 Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Lampung Tahun 2015-2020

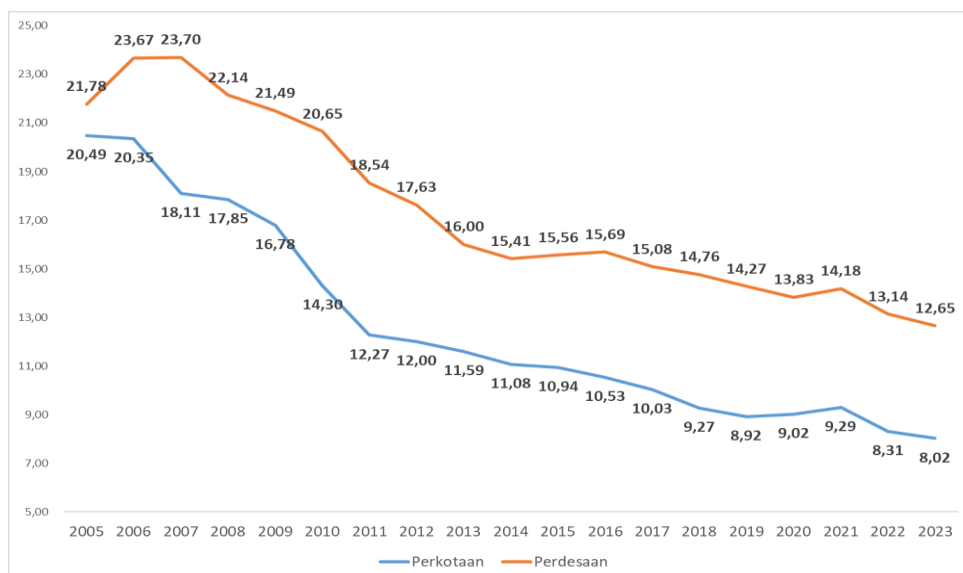
Status IDM Lampung	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah Desa
2015	1	58	919	1.306	151	2.435
2017	6	89	1.138	1.110	92	2.435
2019	6	232	1.675	503	19	2.435
2020	21	370	1.812	226	6	2.435

Keterangan : Data Termutakhir

Sumber : Dok. RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024

Demikian pula halnya dengan tingkat Kemiskinan di desa, catatan statistik tahun 2005-2023 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di perdesaan juga semakin menurun dari kisaran 21-23 persen menjadi 12,65 persen.

Gambar 2. 73 Tingkat Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan Maret Tahun 2005-2023

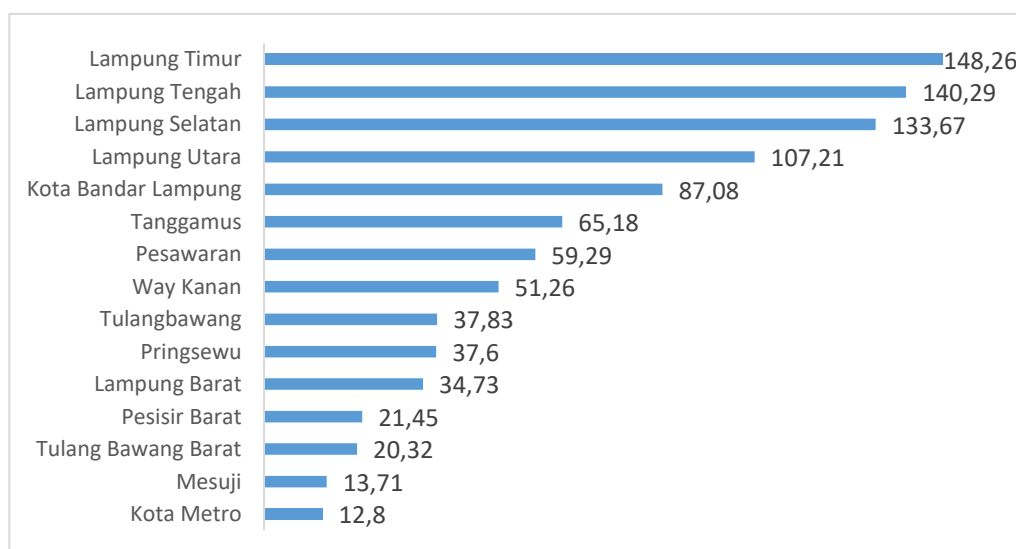


Keterangan : Data Awal

Sumber: BPS Lampung, 2023

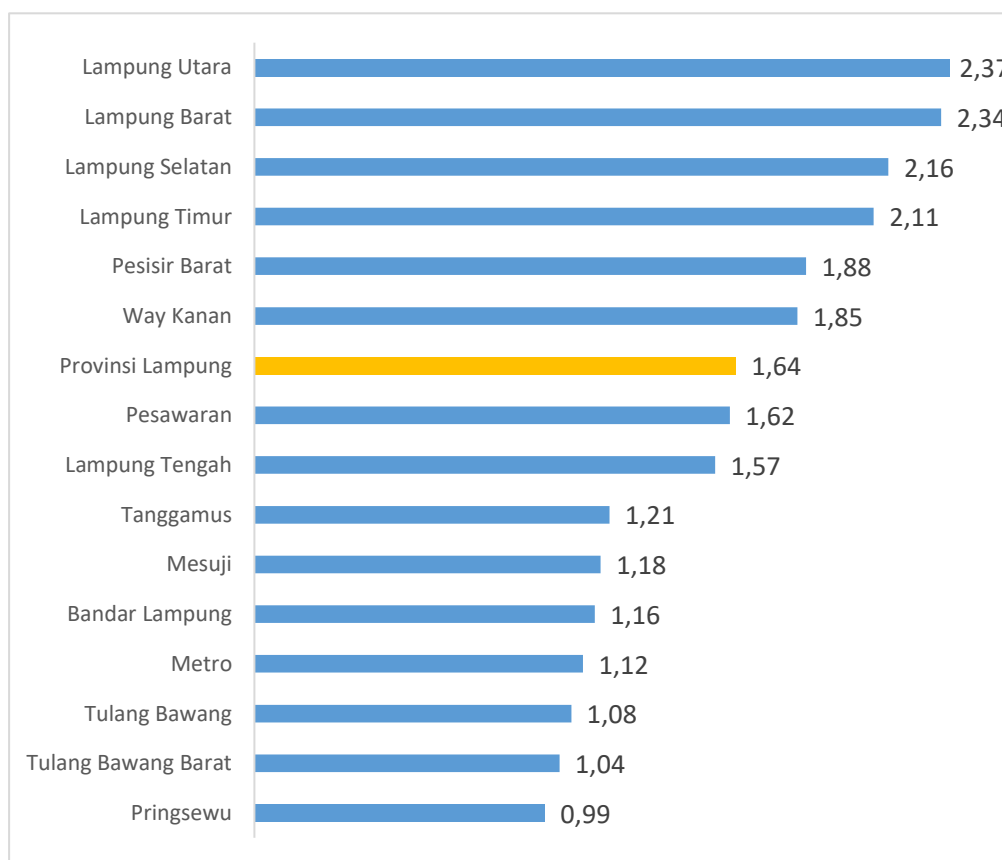
Berdasarkan grafik 2.69 Pada tahun 2023, Kabupaten Lampung Timur menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbesar yaitu mencapai 148,26 ribu jiwa, dan diikuti oleh Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah 140,29 ribu jiwa, Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 133,67 ribu jiwa, dan Kabupaten Lampung Utara dengan jumlah 107,21 ribu jiwa. Di sisi lain, Kota Metro menunjukkan jumlah penduduk miskin terendah yaitu hanya sebesar 12,8 ribu jiwa.

Gambar 2. 74 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2023 (Ribu Orang)



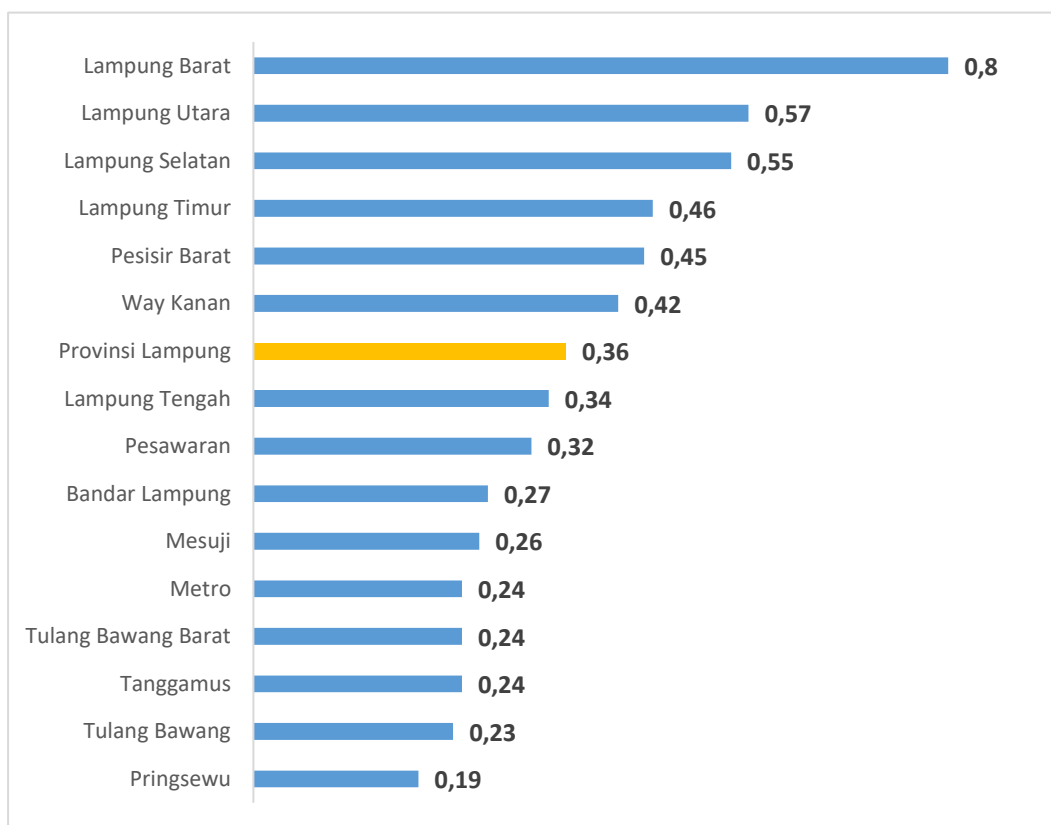
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berdasarkan Grafik 2. 70 Pada tahun 2023, Kabupaten Lampung Utara mencatatkan angka tertinggi pada indeks kedalaman kemiskinan yaitu mencapai 2,37%, yang diikuti oleh Kabupaten Lampung Barat (2,34%), Kabupaten Lampung Selatan (2,16%), Kabupaten Lampung Timur (2,11%), dan Kabupaten Pesisir Barat (1,88%). Di sisi lain, Kabupaten Pringsewu mencatatkan angka terendah pada kedalaman kemiskinan yaitu hanya sebesar 0,99%.

Gambar 2. 75 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2023



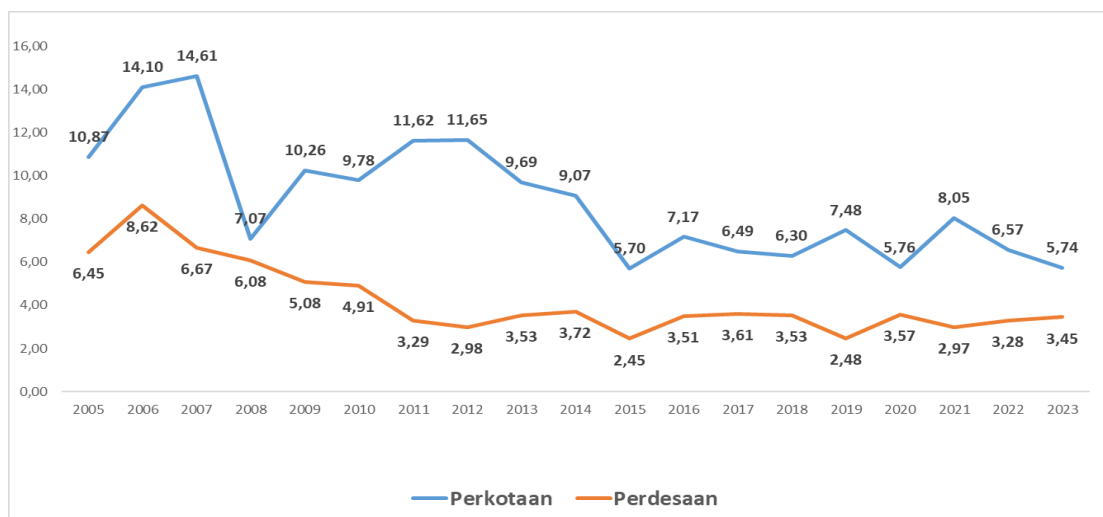
Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) berguna untuk memberi gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Berdasarkan grafik 2.71 Pada tahun 2023, Kabupaten Lampung Utara menunjukkan angka tertinggi pada indeks keparahan kemiskinan yaitu mencapai 0,8 dan diikuti oleh Kabupaten Lampung Utara (0,57), Kabupaten Lampung Selatan (0,55), Kabupaten Lampung Timur (0,46), Kabupaten Pesisir Barat (0,45), dan Kabupaten Way Kanan (0,42). Sementara itu, Kabupaten Pringsewu mencatatkan angka terendah pada indeks keparahan kemiskinan yaitu hanya sebesar 0,19.

Gambar 2. 76 Indeks Keparahen Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2023



Data tahun 2005-2022, persentase pengangguran di kawasan perdesaan juga menunjukkan kondisi yang menurun dari 6-8 persen di tahun 2005-2006 menjadi kisaran 3 persen di tahun 2023.

Gambar 2. 77 Tingkat pengangguran Terbuka Wilayah Perkotaan dan Perdesaan (Februari) Tahun 2005-2023

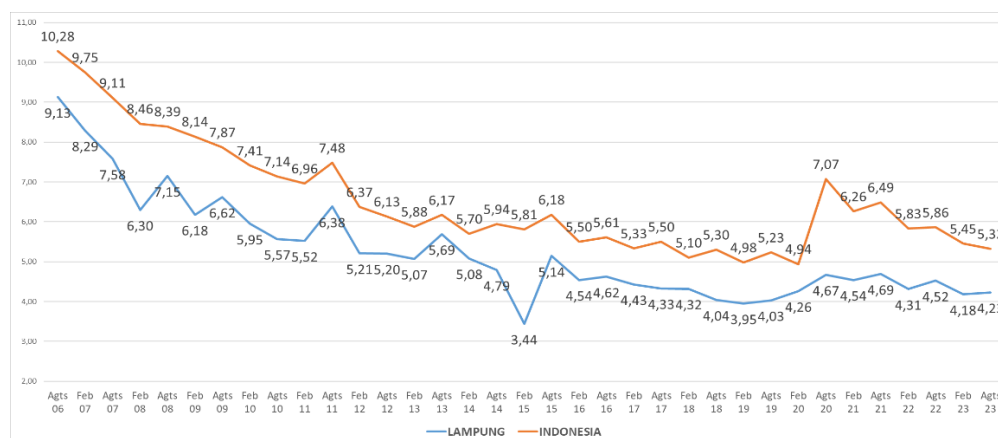


Keterangan : Data Awal

Sumber : BPS Lampung, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka. Seiring dengan adanya kemajuan ekonomi dan perbaikan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung sepanjang periode 2006 s.d. 2022 secara umum menunjukkan adanya perbaikan dengan trend yang semakin menurun dari sekitar 9 persen menjadi 4,23 persen. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa kesempatan kerja penduduk juga semakin membaik.

Gambar 2. 78 TPT Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2006-2023 (persen)

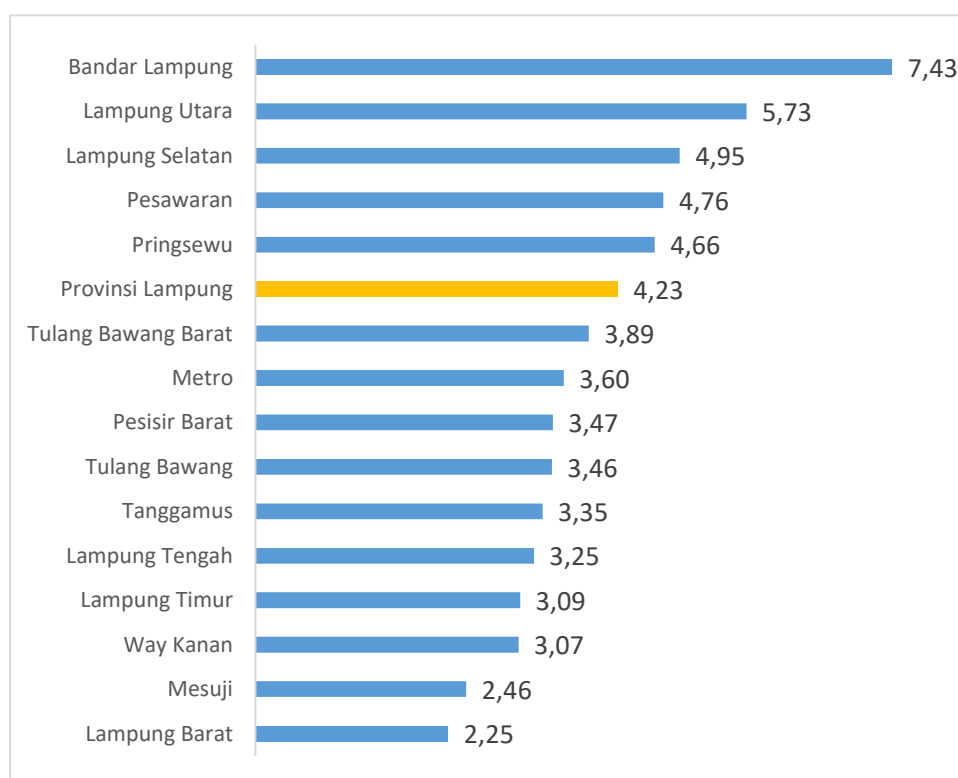


Keterangan : Data Awal

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Pada Tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung menunjukkan bahwa dari total 15 kabupaten/kota, sebanyak 5 di antaranya memiliki persentase TPT lebih tinggi dari capaian Provinsi. Kota Bandar Lampung menjadi wilayah dengan persentase TPT tertinggi yaitu sebesar 7,43% diikuti oleh Kabupaten Lampung Utara (5,73%), Kabupaten Lampung Selatan (4,95%), Kabupaten Pesawaran (4,76%), dan Kabupaten Pringsewu (4,66%). Disisi lain, Kabupaten Lampung Barat menjadi wilayah dengan persentase TPT terendah yakni sebesar 2,25%

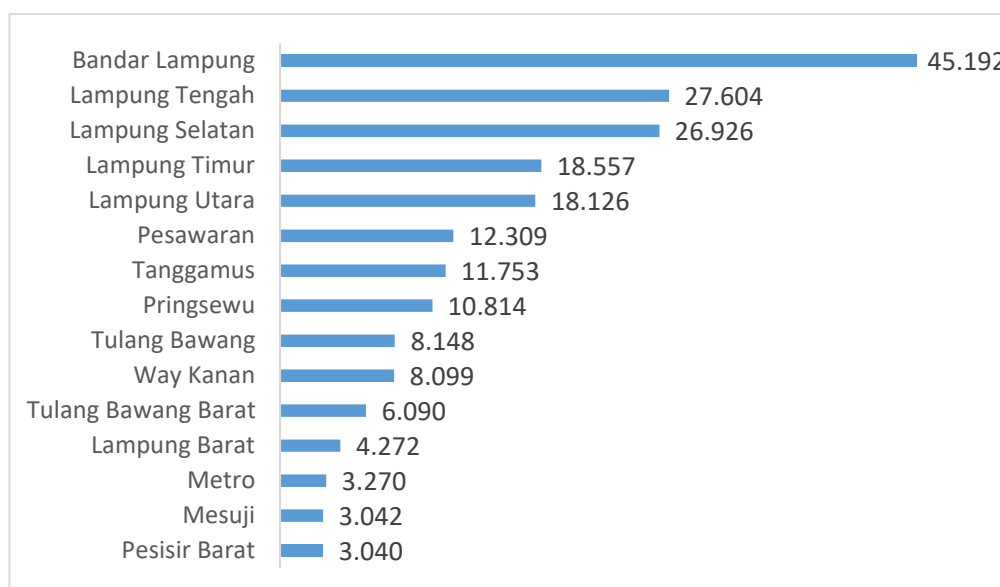
Gambar 2. 79 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota Tahun 2023



Berdasarkan grafik 2. 75 Adanya perbedaan yang signifikan dalam jumlah pengangguran antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada Tahun 2023. Kota Bandar Lampung menonjol sebagai wilayah dengan jumlah pengangguran terbesar yaitu mencapai 45.192 jiwa, yang artinya mengindikasikan tingkat pengangguran yang signifikan dalam konteks perkotaan. Diikuti oleh Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan dengan jumlah pengangguran masing-masing 27.604 jiwa dan 26.926 jiwa.

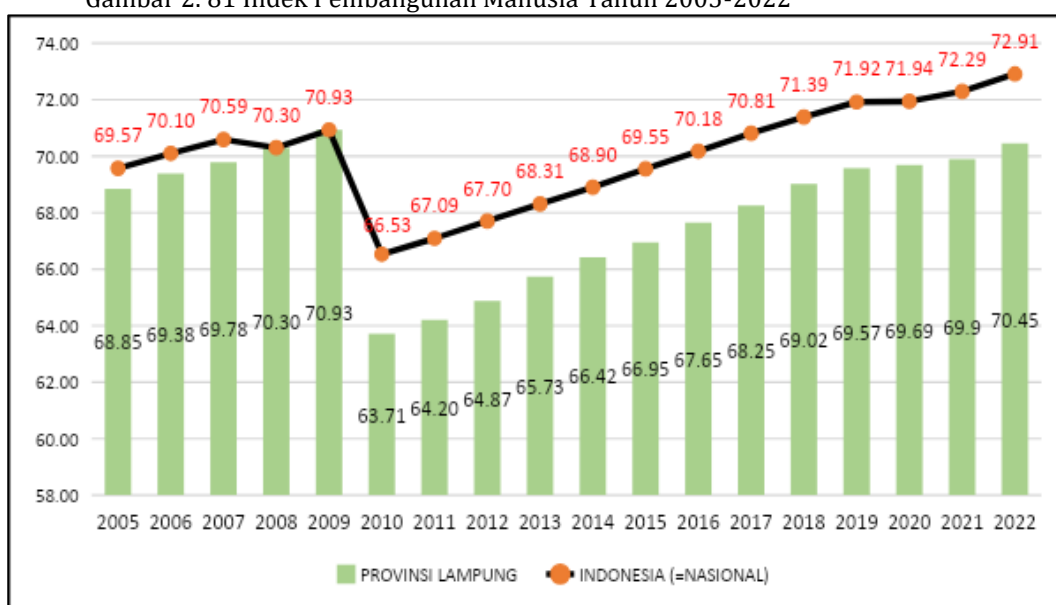
Di sisi lain, Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan jumlah pengangguran terendah yaitu hanya sebesar 3.040 jiwa.

Gambar 2. 80 Jumlah Pengangguran Kab/Kota Tahun 2023



Kualitas Sumber Daya Manusia (=IPM beserta komponen). Sepanjang tahun 2005 s.d. 2022, kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung yang digambarkan melalui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan bahwa capaian IPM Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan. Predikat IPM Lampung tahun 2005 s.d. 2021 yang semula dalam kategori SEDANG, meningkat menjadi kategori IPM yang TINGGI di tahun 2022.

Gambar 2. 81 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2005-2022



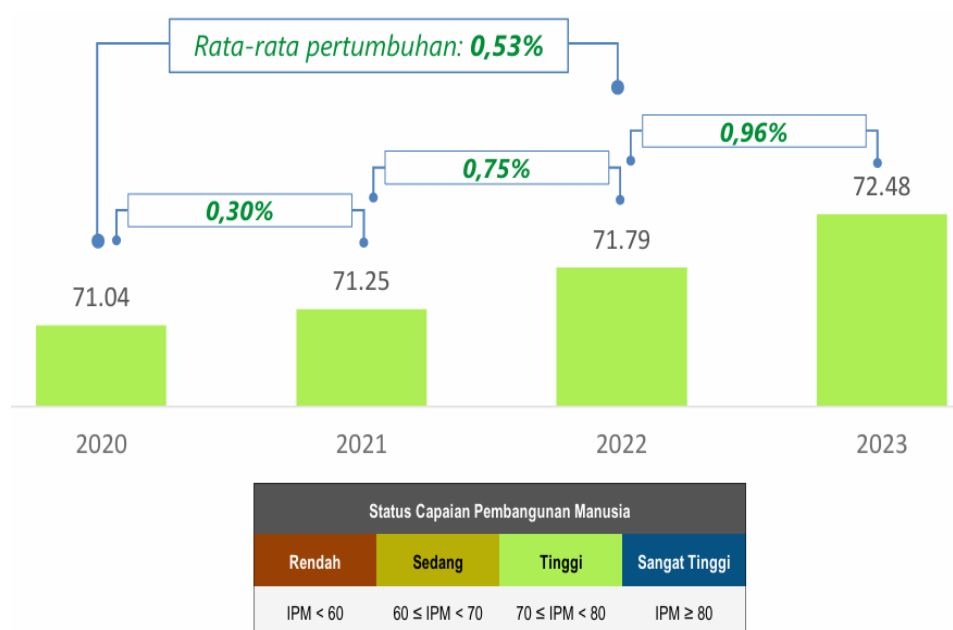
Keterangan : Data Awal
Sumber : BPS Lampung, 2023

Hal tersebut diperkuat dengan perkembangan komponen pembentuk IPM sepanjang tahun 2010 s.d. tahun 2022 juga telah menunjukkan perbaikan. Dari sisi kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2010 yang berada pada level 68,91 tahun meningkat menjadi 70,99 di tahun 2022. Disisi pendidikan, angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 7,26 tahun (di tahun 2010) menjadi 8,18 tahun pada 2022. Selanjutnya, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) juga semakin membaik dari 10,88 tahun (di tahun 2010) menjadi 12,74 tahun pada 2022. Demikian juga pada sisi kemampuan ekonomi, rata-rata Pengeluaran Penduduk meningkat dari Rp. 7,964 juta/org/tahun (di tahun 2010) menjadi Rp. 10,336 juta/org/tahun di tahun 2022.

Selanjutnya, pengukuran IPM dengan Metode Baru dimulai pada tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, nilai IPM Provinsi Lampung Tahun 2010 s.d. 2022 juga menunjukkan peningkatan dari 63,71 di tahun 2010 menjadi 69,90 di tahun 2021 dan terus membaik menjadi 70,45 di tahun 2022. Berdasarkan capaian IPM tersebut, predikat IPM Lampung tahun 2005 s.d. 2021 yang semula dalam kategori SEDANG, meningkat menjadi kategori IPM yang TINGGI di tahun 2022.

Sebagai catatan, berdasarkan keterangan BPS bahwa publikasi nilai IPM di tahun 2023 telah menggunakan metode penghitungan baru yang didasarkan pada data Sensus Penduduk Tahun 2020. Berdasarkan metode penghitungan IPM tersebut Tren capaian IPM Tahun 2020-2023 semakin meningkat dari tahun ke tahun. Predikat kategori SEDANG di tahun 2021 telah meningkat menjadi kategori TINGGI di tahun 2022. Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat besaran IPM Provinsi Lampung mencapai 69,69 persen. Kondisi ini terus membaik hingga pada tahun 2023 skor Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung mencapai 72,48. Artinya dalam kurun waktu tiga tahun pengamatan telah mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,53 poin.

Gambar 2. 82 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2023 (SP 2020)



Celah (gap) antara IPM Lampung dengan IPM nasional secara umum menunjukkan trend yang semakin menurun; dari 2,48 poin di tahun 2014 menjadi 1,91 poin di tahun 2023.

Tabel 2. 39 Celah (Gap) dan pertumbuhan IPM Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2014-2023

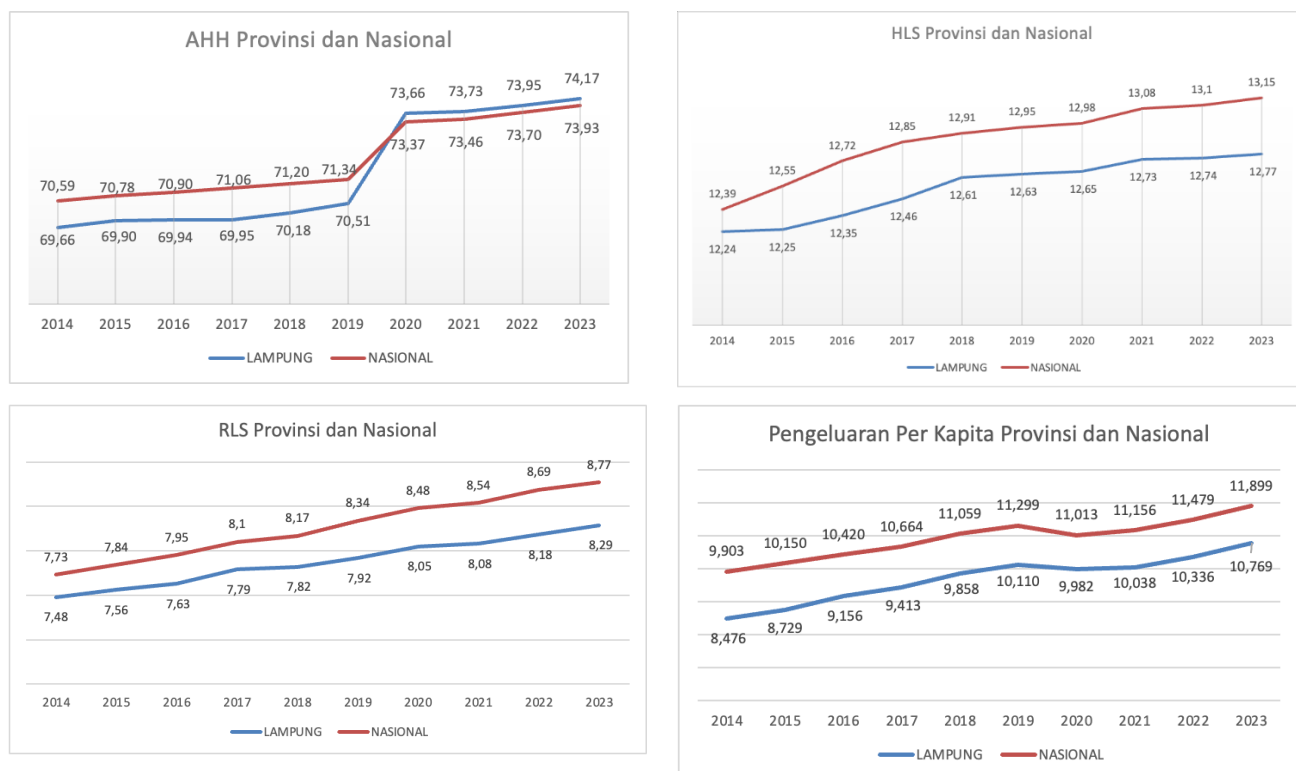
Uraian / Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penambahan IPM Lampung (%)	1,05	0,80	1,05	0,89	1,13	0,80	0,17	0,30	0,79	0,62
Gap IPM Lampung dan Nasional	2,48	2,60	2,53	2,56	2,37	2,35	2,25	2,39	2,46	1,91

Sumber : BPS Lampung, 2023

Selanjutnya, tinjauan terhadap komponen pembentuk IPM sepanjang tahun 2014 s.d. tahun 2023 juga telah menunjukkan perbaikan. Dari sisi kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2014 yang berada pada level 68,66 tahun meningkat menjadi 74,17 di tahun 2023. Disisi pendidikan, angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 7,48 tahun (di tahun 2014) menjadi 8,29 tahun pada 2023. Selanjutnya, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) juga semakin membaik dari 12,24 tahun (di tahun 2014) menjadi 12,77 tahun pada 2023. Demikian juga pada sisi kemampuan ekonomi, rata-rata

Pengeluaran Penduduk meningkat dari Rp. 8,476 juta/org/tahun (di tahun 2014) menjadi Rp. 10,769 juta/org/tahun di tahun 2023. Meski demikian, capaian seluruh komponen penyusun IPM Lampung pada periode tahun 2014 s.d 2023 masih di bawah rata-rata secara nasional.

Gambar 2. 83 Komponen IPM Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2014-2023

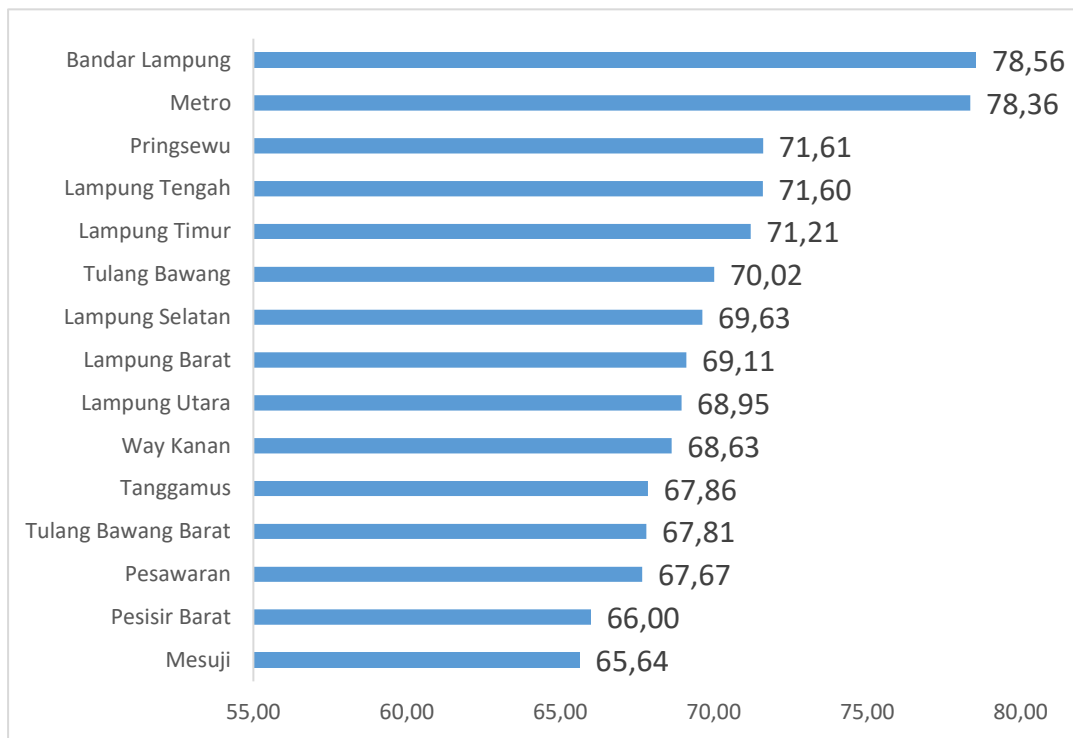


Keterangan : Data Awal (Metode 2010)

Sumber : BPS Lampung, 2023

Pada Tahun 2023, Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Mesuji (65,64), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Bandar Lampung (78,56). Bersamaan dengan Provinsi Lampung, terdapat 2 kabupaten yang berubah status capaian IPM menjadi kategori “tinggi”, yaitu Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Tulang Bawang. Dengan demikian, jumlah kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) pada tahun 2023 adalah sebanyak 6, yaitu Kota Bandar Lampung (78,56), Kota Metro (78,36), Kabupaten Pringsewu (71,61), Kabupaten Lampung Tengah (71,60), Kabupaten Lampung Timur (71,21) dan Kabupaten Tulang Bawang (70,02).

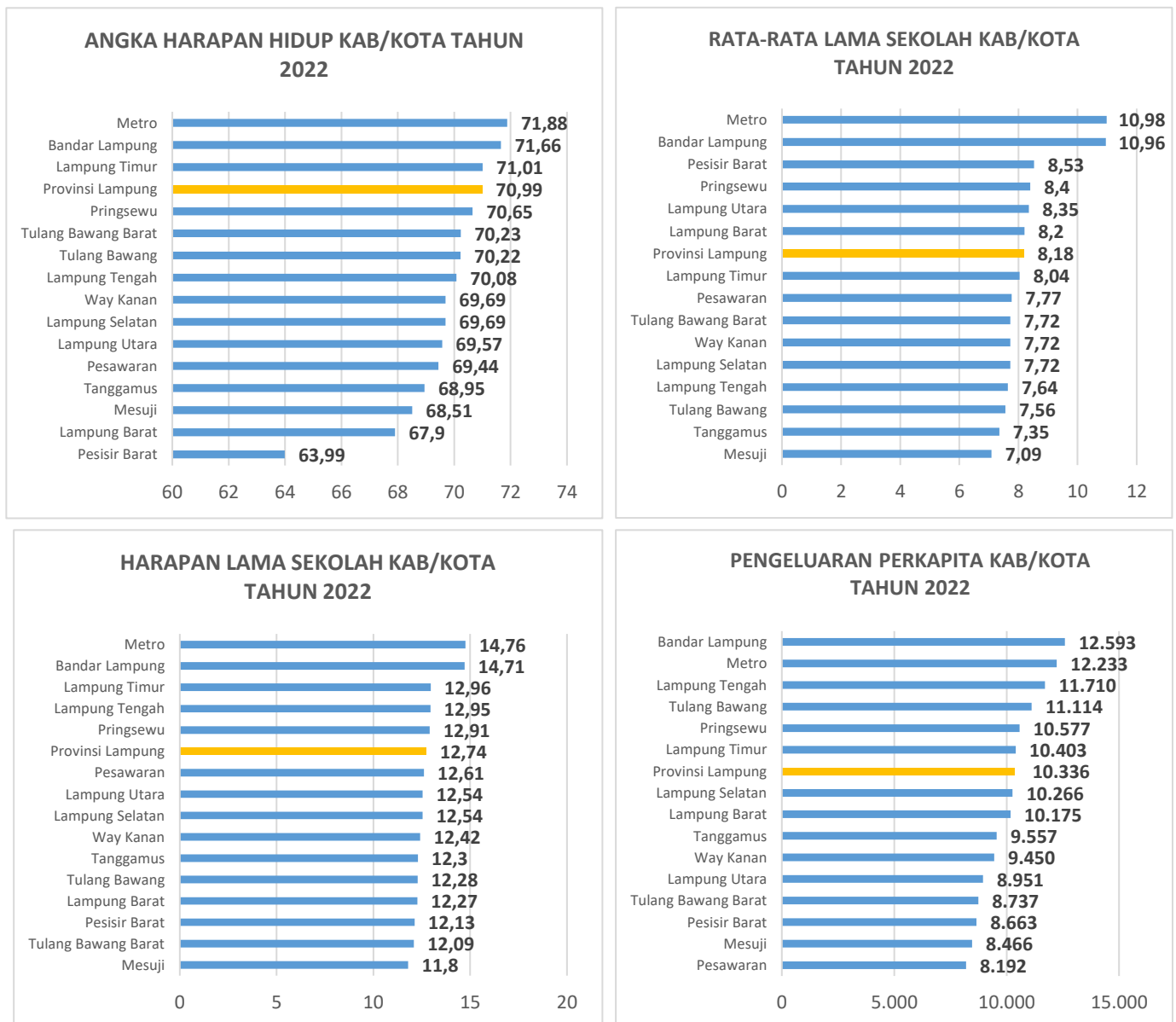
Gambar 2. 84 IPM Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2023 (SP2020)



Sumber : BPS Lampung, 2023

Berdasarkan data wilayah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2022, Angka Harapan Hidup (AHH) mencatatkan capaian tertinggi di Kota Metro yang mencapai 71,88, sementara capaian terendah tercatat di Kabupaten Pesisir Barat dengan angka 63,99. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Metro juga memperoleh prestasi tertinggi yang mencapai 10,98, sedangkan capaian RLS terendah terdapat di Kabupaten Mesuji dengan angka 7,09. Demikian pula, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Metro mencapai angka tertinggi, yaitu 14,76, sementara capaian terendah ditemukan di Kabupaten Mesuji dengan angka 11,8. Dari segi pengeluaran perkapita, Bandar Lampung mencatatkan capaian tertinggi, yakni 12.593, sedangkan pengeluaran perkapita terendah terdapat di Kabupaten Pesawaran yang mencapai 8.192.

Gambar 2. 85 Komponen IPM Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2022 (SP2020)



Pengendalian Inflasi. Data statistik Lampung menunjukkan bahwa lebih 60 persen porsi perekonomian Lampung ditopang oleh konsumsi masyarakat, dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang juga dominan pada sisi permintaan (*demand*). Pengendalian inflasi dilaksanakan untuk mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat, diantaranya dengan memperkuat program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, melalui strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif). Menguatnya daya beli masyarakat akan mendorong bergeraknya perekonomian pada sisi

penawaran (*supply*). Pengendalian inflasi dalam tingkat yang wajar, akan menjadi insentif bagi pelaku ekonomi untuk terus memproduksi. Inflasi yang berlebihan akan menurunkan daya beli masyarakat yang akhirnya menggerus kualitas pertumbuhan ekonomi.

Tingkat inflasi Lampung pada periode tahun 2005-2010 sangat fluktuatif dan sempat berada pada level dua digit. Sejalan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang diarahkan oleh pemerintah pusat, sinergitas pengendalian inflasi di daerah dan antardaerah semakin diperkuat untuk menghadapi berbagai tekanan inflasi yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal dalam perekonomian. Sejak tahun 2011 tingkat inflasi terus dijaga pada rentang sasaran yang mendukung kondisi perekonomian. Pengendalian inflasi berfokus untuk menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan maupun barang strategis, yang didukung dengan upaya untuk memperbaiki kualitas infrastruktur dan antisipasi terhadap ancaman cuaca ekstrim yang dapat mengganggu rantai pasok bahan pangan masyarakat. Catatan pada lima tahun terakhir telah menunjukkan bahwa tingkat inflasi Lampung berada pada level 2-5 persen dan menjadi momentum untuk terus mendukung upaya pembangunan ekonomi yang diharapkan.

Gambar 2. 86 Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2006-2022

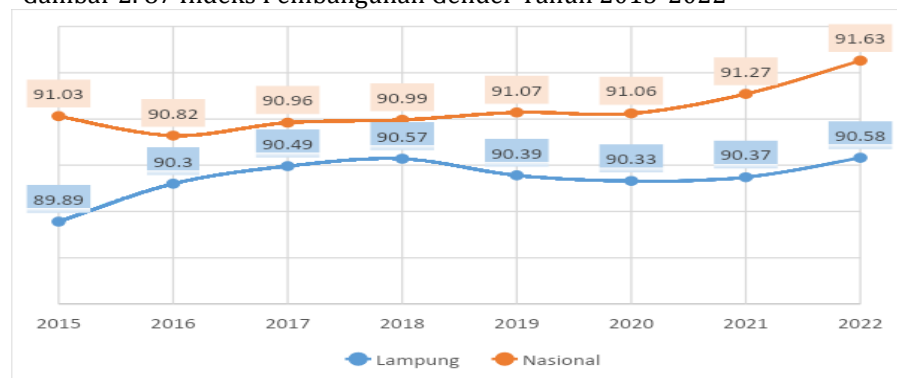


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kesetaraan Gender. Indikator yang dapat menggambarkan pemberdayaan perempuan adalah **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**. IPG menganalisis ketimpangan gender dengan menggunakan rasio IPM menurut jenis kelamin sehingga hasil IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2017 IPG Provinsi Lampung sebesar 90,49 persen dan turun menjadi 90,37 persen di tahun 2021. Capaian ini lebih rendah dari IPG nasional tahun 2021 yang sebesar 91,27 persen. Indikator yang dapat menggambarkan perlindungan anak adalah **Indeks Perlindungan Anak (IPA)**. Capaian IPA Provinsi Lampung tahun 2022 adalah 61,61 persen. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 65,07 persen, maka terjadi penurunan sebesar 3,46 poin. IPA Provinsi Lampung tahun 2018 s.d. 2020 masih berada di bawah capaian nasional. Kualitas SDM juga terukur melalui perbandingan capaian IPM laki-laki dan perempuan yaitu melalui indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender). Peningkatan ini membawa IPG mendekati angka 100, yang artinya semakin baik karena ketimpangan IPM perempuan dan IPM laki-laki semakin hilang. Capaian IPG Provinsi Lampung pada periode tahun 2015-2022 mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 89,89 menjadi sebesar 90,58 di tahun 2022, akan tetapi capaian tersebut masih berada di bawah capaian nasional sebesar 91,63. Tren pertumbuhan IPG di Provinsi Lampung pada periode ini dapat dilihat pada :

Gambar 2. 87 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2015-2022

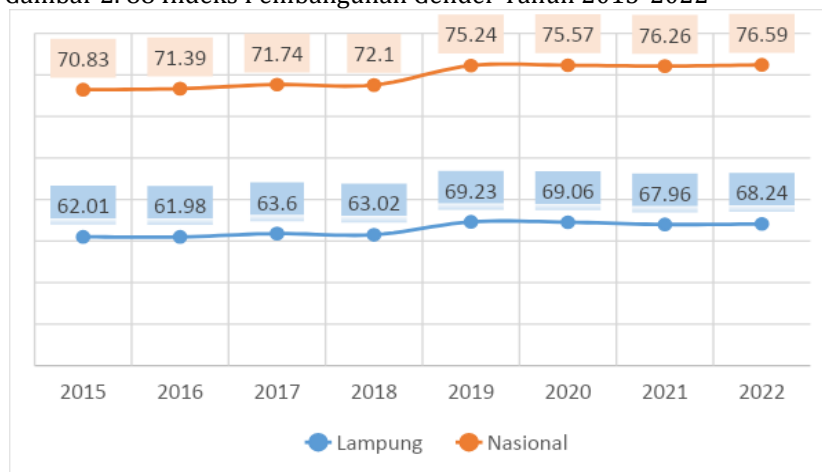


Keterangan : Data Awal

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Indikator lainnya yang menggambarkan peran serta perempuan dalam pembangunan adalah indikator **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**. Indeks Pemberdayaan Gender IDG merupakan indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan ekonomi. Capaian IDG Provinsi Lampung pada periode tahun 2015-2022 mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 62,01 menjadi sebesar 68,24 di tahun 2022, akan tetapi capaian tersebut masih berada dibawah capaian nasional sebesar 76,59 di tahun 2022. Tren pertumbuhan IDG di Provinsi Lampung pada periode ini dapat dilihat pada :

Gambar 2. 88 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2015-2022



Keterangan : Data Awal

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Kepemudaan. Masalah krisis moral yang dialami pemuda telah meluas dan dapat mengancam masa depan bangsa (dekadensi moral) seperti pengangguran, tindak kekerasan, penyalahgunaan narkoba, pornografi, perilaku seks bebas, prostitusi, HIV/AIDS, perilaku LGBT dan faham radikalisme. Hal-hal tersebut menyebabkan belum optimalnya potensi pemuda dalam mengaktualisasikan dirinya. Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan di Provinsi Lampung belum optimal. **Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)** Provinsi Lampung tahun 2020 sebesar 49,53 persen, masih dibawah rata-rata nasional yang sebesar 51 persen. Merujuk data Statistik Pemuda Tahun 2022, persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang ada di Provinsi Lampung sebanyak 23,39 persen dari jumlah penduduk. Dari jumlah tersebut 39,50 persen pemuda di Lampung telah tamat

pendidikan SMP, 37,30 persen tamat SMA dan 8,23 persen tamat perguruan tinggi. Sehingga dapat diketahui bahwa potensi pemuda di Provinsi Lampung belum maksimal, yang pada akhirnya menimbulkan fenomena tawuran, *bullying*, balapan liar, dan sebagainya.

Kebudayaan. Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai-nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Capaian pembangunan kebudayaan dapat diukur dengan **Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**. Pada tahun 2020 IPK Provinsi Lampung sebesar 55,38 persen, kemudian menurun menjadi 53,19 persen di tahun 2021. Turunnya IPK ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala pada registrasi terhadap warisan budaya benda meliputi : bangunan, struktur, dan situs cagar budaya, serta warisan budaya tak benda. Permasalahan lainnya adalah kurangnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya serta masuknya ideologi radikalisme seperti gerakan yang berusaha mengubah total tatanan sosial yang ada di masyarakat.

Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 penyandang disabilitas fisik dan mental adalah seseorang yang menderita kelainan fisik dan mental sekaligus, atau cacat ganda, seperti gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran atau kemampuan berbicara serta mempunyai kelainan mental dan tingkah laku, sehingga yang bersangkutan tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara layak dan wajar.

Tabel 2. 40 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Berdasarkan Ragam Disabilitas dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Ragam Disabilitas	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Disabilitas Fisik	216	135	351
Disabilitas Ganda	9	2	11
Disabilitas Mental	5	16	21
Disabilitas Sensorik	166	120	286
Tidak Terdefinisi*	22	11	33
Total	418	284	702

Sumber : Ditjen Binapenta dan PPK, diolah oleh Kementerian Tenaga Kerja, 2024
Keterangan : *Informasi Tidak Terisi Lengkap

Di tahun 2022 Provinsi Lampung memiliki 1 unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dari total 33 unit pelayanan disabilitas nasional. Di tahun 2022 telah ditempatkan tenaga kerja penyandang disabilitas sebanyak 1 orang perempuan penyandang disabilitas fisik. Jumlah tenaga kerja disabilitas di tahun 2023 sebesar 100 orang yang tersebar di sejumlah perusahaan di Provinsi Lampung, dengan jumlah terbesar terdapat di kota Bandar Lampung. Tenaga kerja disabilitas yang telah tersebar di seluruh perusahaan di Provinsi Lampung sebagian besar tenaga kerja disabilitas laki-laki dengan jumlah sebesar 62 orang dan tenaga kerja disabilitas perempuan sebesar 38 orang.

Tabel 2. 41 Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas di Provinsi Lampung Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja Disabilitas		Total Tenaga Kerja Disabilitas
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Bandar Lampung	9.004	15	15	30
2	Lampung Selatan	2.940	-	-	-
3	Tanggamus	1.056	1	-	1
4	Metro	1.598	4	2	6
5	Lampung Tengah	2.865	4	1	5
6	Lampung Timur	2.558	-	-	-
7	Lampung Utara	1.550	17	5	22
8	Lampung Barat	635	-	-	-
9	Tulang Bawang	1.178	11	14	25
10	Way Kanan	1.163	-	-	-
11	Pesawaran	905	4	1	5
12	Tulang Bawang Barat	477	-	-	-
13	Mesuji	737	6	-	6
14	Pringsewu	1.562	-	-	-
15	Pesisir Barat	336	-	-	-
	Jumlah	28.564	62	38	100

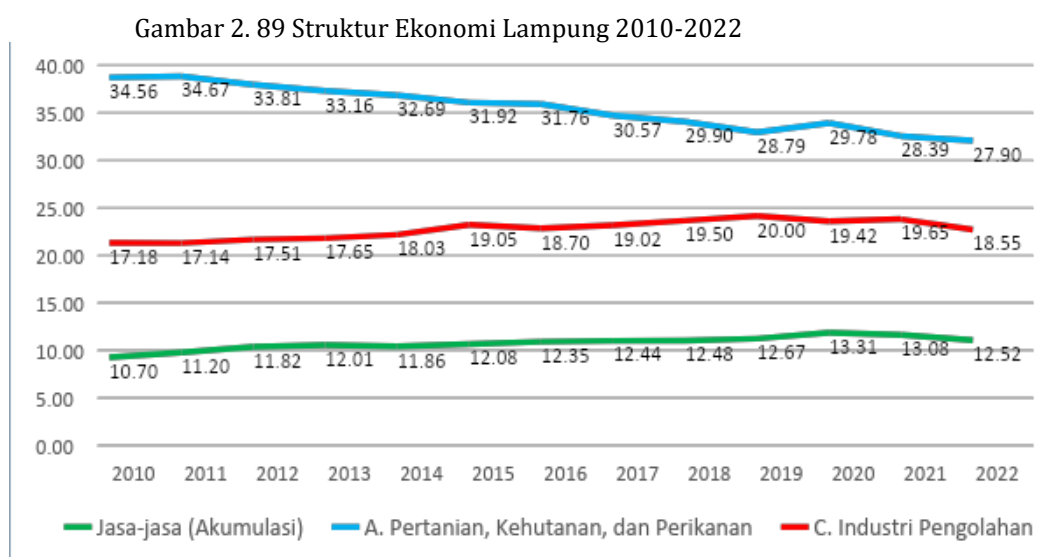
Sumber : Disnaker Provinsi Lampung, 2023

2.3 ASPEK DAYA SAING

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Struktur Ekonomi dan Produktivitas Tenaga Kerja. Data statistik periode tahun 2010-2022 menunjukkan bahwa terdapat pergeseran struktur ekonomi Provinsi Lampung : kontribusi sektor pertanian (dalam arti luas) bergeser dari 34,56 % di tahun 2010 menjadi 27,90% di tahun 2022. Kontribusi sektor industri pengolahan meningkat dari 17,18% di tahun 2010 menjadi 19-20%, peningkatan tersebut sejak tahun 2017 s.d. 2019, namun kontribusi industri pengolahan sempat menurun akibat pandemi Covid-19. Pergeseran sektor ekonomi juga diikuti dengan peran sektor jasa yang semakin meningkat, dari 10,70% di tahun 2010 menjadi 12-13% pada 7 (tujuh) tahun terakhir periode pengamatan.

Perkembangan terhadap 3 (tiga) kelompok aktivitas ekonomi selama sepuluh tahun terakhir tersebut menunjukkan bahwa terdapat pergeseran struktur ekonomi Lampung, dimana porsi sektor pertanian (basis) semakin berkurang, sementara sektor industri dan jasa semakin berkembang. Kondisi tersebut memberi sinyal bahwa struktur perekonomian daerah semakin diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas.



Keterangan : Data Awal

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Sektor pertanian merupakan salah satu bagian dari ekonomi yang terkait dengan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sektor ini menjadi salah satu sektor ekonomi yang vital karena memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan serta penyedia bahan baku untuk industri. Di Provinsi Lampung, kontribusi lapangan usaha pertanian yaitu sebesar 27,29%, kontribusi sektor pertanian dapat memberikan dampak positif dan memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan penduduk di Provinsi Lampung. Potensi sektor pertanian di Provinsi Lampung didukung oleh beberapa faktor yaitu lahan pertanian yang cukup luas dan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian.

Potensi komoditi pertanian unggulan strategis di Provinsi Lampung tersebar pada beberapa lokasi di kabupaten/kota. Produksi sektor pertanian ini harus ditingkatkan baik dari produktivitas dan kualitasnya, sehingga selain dapat meningkatkan daya saing dan memenuhi kebutuhan pangan serta dapat menjamin ketersediaan bahan baku bagi pengembangan industri pertanian. Salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian adalah sentra produksi pertanian yang ada harus dijaga dari alih fungsi tanaman dan diharapkan ada pengembangan komoditi dan lokasi potensial lainnya sehingga akan menjaga ketersediaan dan keberlanjutan komoditi pertanian tersebut. Berikut disajikan beberapa data produksi dan lokasi terbesar penghasil komoditi pertanian tersebut pada tabel ... dibawah ini

Tabel 2. 42 Produksi dan Sentra Produksi Komoditi Unggulan Strategis Provinsi Lampung Tahun 2022

NO	KOMODITI UNGGULAN STRATEGIS	PERINGKAT NASIONAL	PRODUKSI TAHUN 2022 (ton)	SENTRA PRODUKSI
1	Tanaman Pangan			
	- Padi	5	3.332.235	Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Mesuji, dan Tulang Bawang
	- Jagung	3	3.184.443	Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan
	- Ubi Kayu	1	7.372.786	Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara,

NO	KOMODITI UNGGULAN STRATEGIS		PERINGKAT NASIONAL	PRODUKSI TAHUN 2022 (ton)	SENTRA PRODUKSI
					Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang
	-	Kedelai	8	2.110	Way Kanan, Tanggamus, Pesisir Barat, Pesawaran, Lampung Tengah.
2	Hortikultura				
	-	Pisang	3	1.223.009	Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara
	-	Manggis	5	3.483	Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Tengah, Pesisir Barat dan Lampung Selatan
	-	Nanas	1	861.706	Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran dan Mesuji.
	-	Pepaya	3	87.378	Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan
	-	Cabai Besar	9	29.635	Pringsewu, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Pesawaran
3	Perkebunan				
	-	Kopi	2	118.139	Lampung Barat, Tanggamus Lampung Utara, Way Kanan, Pesisir Barat
	-	Lada	2	15.983	Tanggamus, Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Timur, Pesisir Barat
	-	Kakao	5	53.991	Pesawaran, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Timur
	-	Tebu	2	801.820	Way Kanan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat
	-	Kelapa Sawit	14	202.216	Tulang Bawang, Lampung Tengah, Mesuji, Way Kanan, Pesisir Barat
	-	Karet	8	143.906	Way Kanan, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara
	-	Kelapa	11	78.319	Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Timur, Pesawaran, Pesisir Barat
4	Peternakan				
	-	Sapi	7	906.568 ekor	Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Way Kanan, Lampung Utara

NO	KOMODITI UNGGULAN STRATEGIS	PERINGKAT NASIONAL	PRODUKSI TAHUN 2022 (ton)	SENTRA PRODUKSI
	- Kambing	3	1.671.086 ekor	Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Timur, Tulang Bawang
	- Ayam Ras Pedaging	7	103.657.519 ekor	Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Utara
	- Ayam Ras Petelur	8	14.501.073 ekor	Lampung Selatan, Lampung Timur dan Lampung Tengah, Pringsewu, Pesawaran
	- Ayam Buras	5	13,637 juta ekor	Lampung Selatan, Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Timur dan Lampung Tengah
	- Telur	10	213.209	Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Pringsewu dan Way Kanan
5	Perikanan			
	- Udang	6	62.487	Tulang Bawang, Lampung Selatan, Pesisir Barat, Pesawaran, Lampung Timur

Sumber : Badan Pusat Statistik Lampung 2023 dan Perangkat Daerah lingkup pertanian

Dari sisi pariwisata, Provinsi Lampung memiliki potensi pengembangan pariwisata baik alam maupun buatan sebagai sektor pendukung perekonomian. Potensi sektor pariwisata yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung memiliki dampak yang besar bagi pembangunan daerah apabila didukung dengan pengelolaan yang tepat, diantaranya :

Tabel 2. 43 Pariwisata di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Pariwisata
Kota Bandar Lampung	Taman wisata terdiri dari Taman Wisata Bumi Kedaton (Taman Satwa dan Wisata, Resort, Waterpark), Taman Wisata Wira Garden, Taman Wisata Lembah Hijau, Taman Kupu Kupu Gita Persada, Taman Wisata Alam Batu Putu dan Taman Dipangga. Objek wisata pantai terdiri dari Pantai Duta Wisata dan Pantai Puri Gading. Objek peninggalan sejarah yaitu Monumen Gunung Krakatau, Vihara Thay Hin Bio, dan Museum Negeri Lampung Ruwa Jurai.
Kabupaten Lampung Selatan	Objek wisata pantai yaitu Pantai Marina, Pantai Laguna, Pantai Pasir Putih, Pantai Bagus, Pantai Gucci Batu Kapal, Pantai Kresna, Pantai Merak Belantung, Pantai Sapenan, Pantai Tanjung Beo, Pantai Way Urang, Tanjung Selaki, Pantai Tarahan, Pantai Mandiri, Pantai Belebuk, Teluk Mengkudu, Pantai Pancur Permai, Pantai Canti, Pantai Kahai, Pantai Kunjir, Pantai Wartawan, Pantai Way Muli, Pantai Suak, Teluk Nipah, dan Pulau Sebesi dan Sebeku. Objek wisata alam tirta yaitu Air Terjun Kembar, Air Terjun Curuk Layang, Air Terjun Way Kalam, Air Panas Ciperes, Sumber Air Panas Way Belerang, Way Panas Bumi Natar, Air Terjun Way Peros, dan Air Terjun Sarmun. Wisata gunung diantaranya Gunung Rajabasa, Gunung Batu, dan Gunung Anak Krakatau.
Kabupaten Pesawaran	Pantai Mutun dan Pulau Tangkil, Pantai Sari Ringgung dan Pulau Tegal, Pantai Klara, Pantai Klaura, Pulau Tembikil, Pulau Kelagian, Pulau Pahawang, Pulau Tanjung Putus, dan <i>Marines Eco Park</i> .
Kabupaten Tanggamus	Objek wisata bahari terdiri dari Pantai Mulang Sayang, Pantai Bahari, Pantai Mutiara, Pantai Batu Malang, Pantai Batu Kebo, Pantai Cukuh Pandan, Pantai Harapan, Pantai <i>Saw Mill</i> , Pantai Harapan, Pantai Digul, Pantai Karang Teritos, Pantai Terbaya, Pantai Teba, Pantai Pihabung, Pantai Kerta, Pantai Pasir Putih, Pantai Teluk Yengokh, Pantai Cumuk, Pantai Badak Indah, Pantai Karang Indah, Pantai Karang Bolong, Pantai Harapan Jaya, Pantai Batu Naga, Pantai

Kabupaten/Kota	Pariwisata
	Selancar, Pantai Pegadungan, Pantai Karang Mulya, Pantai Batu Suluh, dan Pantai Karang Bebay. Objek wisata alam terdiri dari K. Tampang Belimbing, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Lembah Sanggi, Bukit Batu Keramat, Gua Walet Putih, Karang Bebay, Pulau Kelapa, Pulau Tabuan, Pulau Kiluan, dan Eko Wisata Cikal Negri. Objek wisata alam tirta diantaranya Air Terjun Jeram Semaka, Air Terjun Curup Way Kerap, Air Terjun Curup Karang Agung, Air Terjun Way Nyapuk, Air Terjun Way Tapisan, Air Terjun Talang Ogan, Air Terjun Curup, Air Terjun Cihandak, Air Terjun Tirta Rima, Air Terjun Curup, Air Terjun Kelahang, Air Terjun Way Lalaan, dan Way Bekhak. Objek wisata buatan diantaranya Waduk Batu Tegi, Bendungan Pajajaran, dan Bendungan Way Payung.
Kabupaten Lampung Barat	Situs Megalitik Kebon Tebu Sumber Jaya, Kawasan Batu Brak, Kawasan Perkebunan Kopi Hanakau, Desa Tradisional Kenali Danau Ranau, Gunung Seminung, Gunung Pesagi, Desa Wisata Hujung, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Danau Ranau, Wisata Gunung Pesagi, dan Wisata Alam Kubu Perahu.
Kabupaten Pesisir Barat	Rhino Camp Sukaraja Atas, Way Pemerihan (Pos Patroli Gajah), Way Heni, Penangkaran Penyau Muara Tembulih, Surfing Spots (Way Jambu, Karang Nyimbor, Mandiri, Pantai Labuhan Jukung, Way Redak, Pugung Tampak), Pantai Tanjung Setia, Pantai Way Redak, Kawasan Wisata Alam dan Sejarah Way Manula, Pekon Pahlungan, dan Pulau Pisang.
Kabupaten Lampung Timur	Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Pusat Konservasi Gajah, Desa Tradisional Wana, Taman Purbakala Pugung Raharjo, Sentra Penjualan Bibit Buah-Buahan & Balai Benih Induk Hortikultura Pekalongan, Pantai Karang Mas, Pantai Mutiara, Pantai Baru, Pantai Cemara, Pantai Keruju dan Pesanggrahan Way Curup.
Kota Metro	Objek wisata Kota Metro yaitu Taman Merdeka, Lapangan Samber, Perpustakaan Daerah, Masjid Taqwa, Stadion Tejosari, dan Taman Palembang Indah.
Kabupaten Lampung Tengah	Objek wisata alam yaitu Air Terjun Curup Tujuh, Danau Tirta Gangga, Air Terjun Bilik, Danau Telogo Rejo, dan Danau Bekri. Objek wisata religius yaitu Gua Maria. Objek wisata agro yaitu Perkebunan dan Pengalengan Nanas, Perkebunan Buah-buahan dan Pembibitan, serta Taman Pusat Tanaman Obat/Herbal.
Kabupaten Pringsewu	Beberapa Objek wisata yang ada di Kabupaten Pringsewu di antaranya tempat wisata ziarah berupa Makam KH Ghalib dan wisata religi umat Katolik Goa Maria La Verna, bangunan bersejarah peninggalan Belanda berupa Talang, kawasan Bukit Bintang, Telaga Gupit, Pure Giri Sutra Mandala, Kampung Air Balong Kuring, Bukit Sarinongko, Bukit Silitonga, Bukit Pangonan, Kolam Renang Grojogan Sewu, Kolam Renang Tirta Asri, Cekdam Way Ngison, dan Air Karawang.
Kabupaten Lampung Utara	Objek wisata yang ada di kabupaten ini merupakan objek wisata alam dan objek wisata agro, serta objek wisata budaya yaitu Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Tebabeng, Bendungan Tirta Sinta, Curup Klawas, Curup Selampung, Danau Buatan Way Abung, Danau Way Tulung Mas, Air Terjun (Curup) Fajar, Air Terjun (Curup) Gadung, Air Terjun (Curup) Mera, Air Terjun (Curup) Sukemi, Paya Udang, Paya Burung, Arung Sungai Way Rarem, Perkebunan Lada, Perkebunan Tebu, Perkebunan Salak.
Kabupaten Tulang Bawang	Kota Tua Menggala, Rest Area & Water Boom, Desa Cakat Nyenyek, dan Rumah Terapung.
Kabupaten Tulang Bawang Barat	Kampung Tradisional, Makam Pahlawan, Bawang Lambu, <i>Water Boom</i> , Pemancingan dan Lesehan
Kabupaten Way Kanan	Danau Rending, Air Terjun Curup Kembar Bukit Duduk, Sialang Badas, Wisata Bendungan Irigasi Way Umpu, Putri Malu, Air Terjun Bukit Duduk, Air Terjun Curup Putri Kembar, Panorama Indah Bukit Duduk, Potensi Wisata Sungai Way Umpu, Curup Binatan, Goa Macan, Curup Batu Api, Air Terjun Pinang Indah, Air Terjun Maria, Air Terjun Curup Susukan, Air Terjun Curup Ranggau, Air Terjun Curup Penyandingan, Air Terjun Way Kawat, Bendungan Way Mencar
Kabupaten Mesuji	Bendungan Simpang Pematang, Puncak Wiralaga, Wisata Bahari Wiralaga, Bendungan Embung Blibis, Bendungan Benil, Bendungan Tanjung Sari, Bendungan Tri Karya Mulya, Bendungan Embung Buko Poso, Bendungan Embungan Bumi Harapan, Taman Kehati dan Bendungan Embung Hadi Mulyo.

Berdasarkan potensi-potensi yang ada, terdapat beberapa wilayah pengembangan pariwisata Provinsi Lampung berdasarkan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), Kawasan Strategik Pariwisata Daerah (KSPD), dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD).

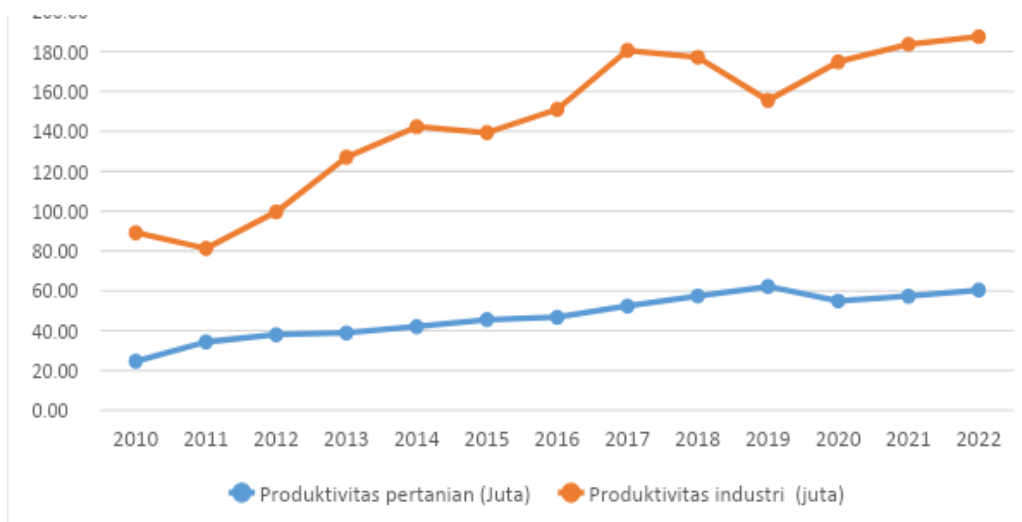
Tabel 2. 44 Wilayah Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung

No.	DPD	KSPD	KPPD
1	DPD I Teluk Lampung, Selat Sunda dan Sekitarnya	1. KSPD Gunung Anak Krakatau-Sebesi & Gunung Rajabasa dan sekitarnya 2. KSPD kota BandarLampung 3. KSPD Pesisir Pantai Teluk Betung Pesawaran dan 4. KSPD Kiluan dan Kelumbayan	1. KPPD di Kabupaten Lampung Selatan 2. KPPD di Kota Bandar Lampung 3. KPPD di Kabupaten Pesawaran
2.	DPD II Pesisir, Pabtai Barat, TNBBS dan Sekitarnya	1. KSPD pesisir pantai barat Lampung di Barat 2. KSPD Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) 3. KSPD Danau Ranau dan sekitar di Kab.Lampung Barat	1. KPPD Suoh dan sekitar di kabupaten Lampung Barat 2. KPPD pesisir pantai Kota Agung sekitarnya di Kab. Tanggamus
3.	DPD III Way Kambas dan Sekitarnya	1. KSPD Taman Nasional Way Kambas dan Sekitarnya	1. KPPD di Kota Metro 2. KPPD di Kabupaten Lampung Timur 3. KPPD di Kabupaten Lampung Tengah 4. KPPD di Kabupaten Way Kanan 5. KPPD di Kabupaten Tulang Bawang 6. KPPD di Kabupaten Mesuji 7. KPPD di Kabupaten Tulang Bawang Barat 8. KPPD di Kabupaten Lampung Utara

Sumber : RIPPAP Provinsi Lampung 2010 – 2025

Pergeseran struktur ekonomi (dari pertanian menuju industri) sepanjang tahun 2010-2022 juga diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor industri. Pada tahun 2010, jumlah tenaga kerja di sektor industri tercatat sebanyak 289.987 orang dan meningkat menjadi 409.629 di tahun 2022. Kondisi tersebut juga didukung semakin membaiknya nilai produktivitas tenaga kerja yang bekerja di sektor industri. Selanjutnya, catatan penting yang juga menggembirakan adalah bahwa produktivitas sektor pertanian periode tahun 2005-2022 juga semakin meningkat di tengah semakin berkurangnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian.

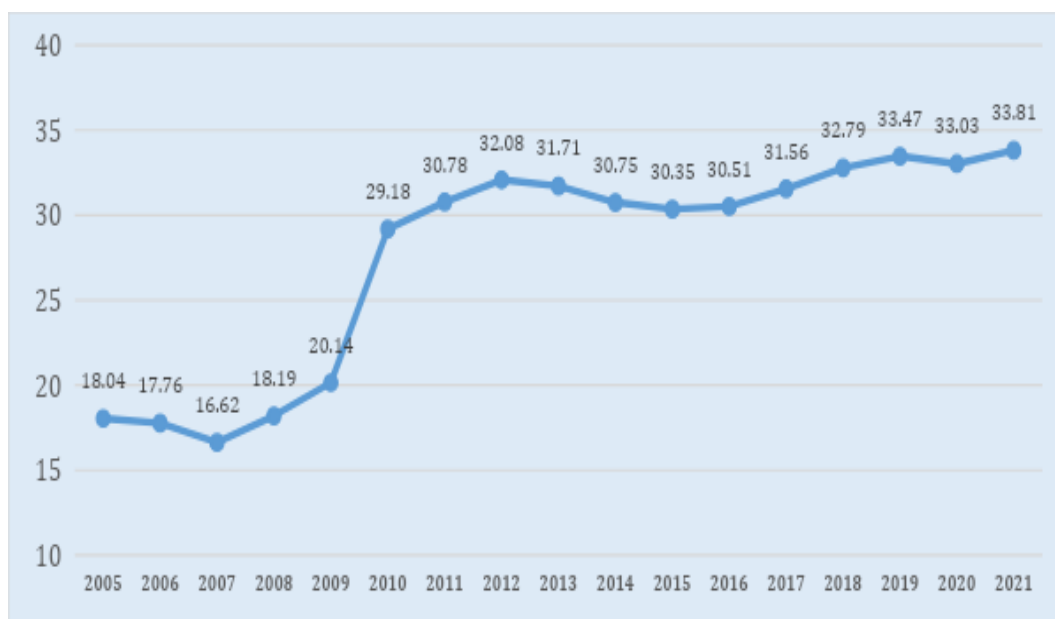
Gambar 2. 90 Nilai Produktivitas Tenaga Kerja Lapangan Usaha Industri dan Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2010-2022 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Di sisi investasi, data statistik PDRB (ADHB) Provinsi Lampung tahun 2005-2021 secara umum menggambarkan bahwa komposisi nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam perekonomian daerah menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Pada periode tahun 2005-2010 kontribusi PMTB berada pada kisaran 18-29 persen; meningkat menjadi 30-33 persen di tahun 2011-2021.

Gambar 2. 91 Distribusi PMTB dalam PDRB (ADHB) Lampung Tahun 2005-2021 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Efisiensi Modal dalam Perekonomian (ICOR). Berkenaan dengan hal itu, nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Provinsi Lampung di tahun 2022 tercatat sebesar 7,94 yang berarti lebih kecil dibanding ICOR tahun 2021 yang sebesar 12,32. Nilai ICOR tersebut memberi sinyal bahwa untuk menghasilkan 1 (satu) unit output maka kebutuhan input juga semakin sedikit; yang berarti efisien secara ekonomi. Meski demikian, nilai ICOR tahun 2022 belum seirit ICOR pada rentang tahun 2017-2019 yang berada pada kisaran 6,73-6,86. Secara umum, nilai ICOR Lampung pada periode tahun 2017-2022 belum banyak berubah signifikan, kecuali di tahun 2020 dimana perekonomian menghadapi tekanan Covid-19.

Tabel 2. 45 Rasio PMTB terhadap PDRB dan ICOR Provinsi Lampung
Tahun 2017 – 2022

Komponen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio PMTB terhadap PDRB	31,46	32,79	33,48	33,03	33,81	32,45
ICOR	6,73	6,86	6,78	-19,32	12,32	7,94

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

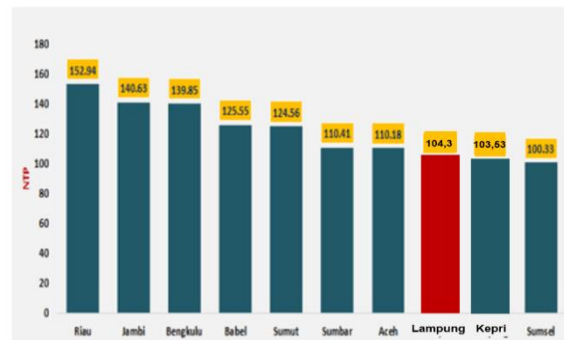
Nilai NTP kurang bersaing secara nasional. Data statistik ekonomi Lampung beberapa tahun terakhir masih menunjukkan bahwa perekonomian Lampung masih didominasi pada Lapangan Usaha **lingkup pertanian** (dengan *share* sekitar 27-30 persen) yang menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan perekonomian daerah secara signifikan. Statistik tahun 2022 menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap sekitar 43 persen penduduk yang bekerja. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka keberhasilan pembangunan pada sektor ini juga merupakan tumpuan untuk menjaga stabilitas stok pangan daerah, memelihara tingkat stabilitas harga pangan masyarakat, dan menjadi *bumper* untuk menahan peningkatan laju kemiskinan serta mempersempit celah ketimpangan antar penduduk. Capaian pertumbuhan 2 persen di tahun 2022 merupakan capaian terbaik sepanjang periode pengamatan tahun 2017-2022 perlu terus dijaga kesinambungannya.

Gambar 2. 92 NTP Provinsi di Sumatera Tahun 2022

NTP Provinsi di Sumatera Tahun 2021

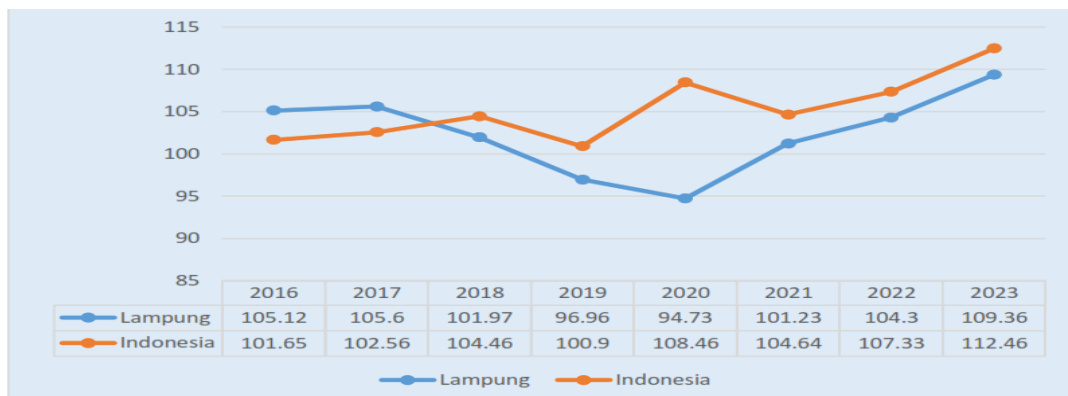


NTP Provinsi di Sumatera Tahun 2022



Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam melihat daya beli petani di pedesaan. NTP juga menjadi indikator dari kesejahteraan pekerja yang bekerja di sektor pertanian. Kesejahteraan pekerja yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian relatif melambat. Di lingkup regional Sumatera, Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung sampai pada tahun 2022 berada di peringkat ke-2 (dua) terendah. Nilai Tukar petani (NTP) Provinsi Lampung pada tahun 2022 berada pada posisi ke 8 sebesar 104,3, NTP tertinggi ada di Provinsi Riau sebesar 152,94, Jambi 140,63 dan Bengkulu 139,85. NTP terendah berada di Provinsi Sumatera Selatan yakni sebesar 100,33. Nilai Tukar petani (NTP) Provinsi Lampung pada tahun 2021 berada pada posisi ke 10 sebesar 96,75, NTP tertinggi ada di Provinsi Riau sebesar 130,34, Bengkulu 122,12 dan Jambi 117,83. NTP nasional tahun 2022 sebesar 108,34, angka ini lebih besar dari NTP Provinsi Lampung. NTP nasional tahun 2021 sebesar 103,25, angka ini lebih besar dari NTP Provinsi Lampung yang sebesar 96,75.

Gambar 2. 93 Perkembangan NTP Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

(Penghitungan NTP sejak tahun 2019 dst menggunakan tahun dasar 2018=100, dimana terjadi peningkatan cakupan jumlah komoditas baik pada paket komoditas It maupun Ib dibandingkan dengan tahun dasar 2012=100).

Bila dibandingkan secara nasional, NTP Provinsi Lampung dari tahun 2016 sampai tahun 2018 selalu berada diatas NTP nasional, bahkan pada tahun 2017 NTP Provinsi Lampung mencapai 105,60. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan dan berada dibawah nasional sampai dengan tahun 2023, namun dengan trend yang semakin meningkat.

Pendapatan per Kapita. Seiring dengan peningkatan dan pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung dan dinamika jumlah penduduk, nilai PDRB per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku) penduduk Lampung dari kurun waktu 2005 s.d 2023 mengalami peningkatan. Secara keseluruhan dapat digambarkan bahwa selama kurun waktu 2005 s.d. 2023 tingkat kemakmuran masyarakat Lampung secara umum telah meningkat dari sekitar Rp. 5 juta di tahun 2005 menjadi sekitar 40 juta di tahun 2021 dan terus membaik menjadi 48 juta di tahun 2023, atau meningkat sekitar 8 kali lipat dibanding kondisi awal pengamatan di tahun 2005.

Gambar 2. 94 Perkembangan PDRB per Kapita (ADHB, Juta Rupiah) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2005-2025

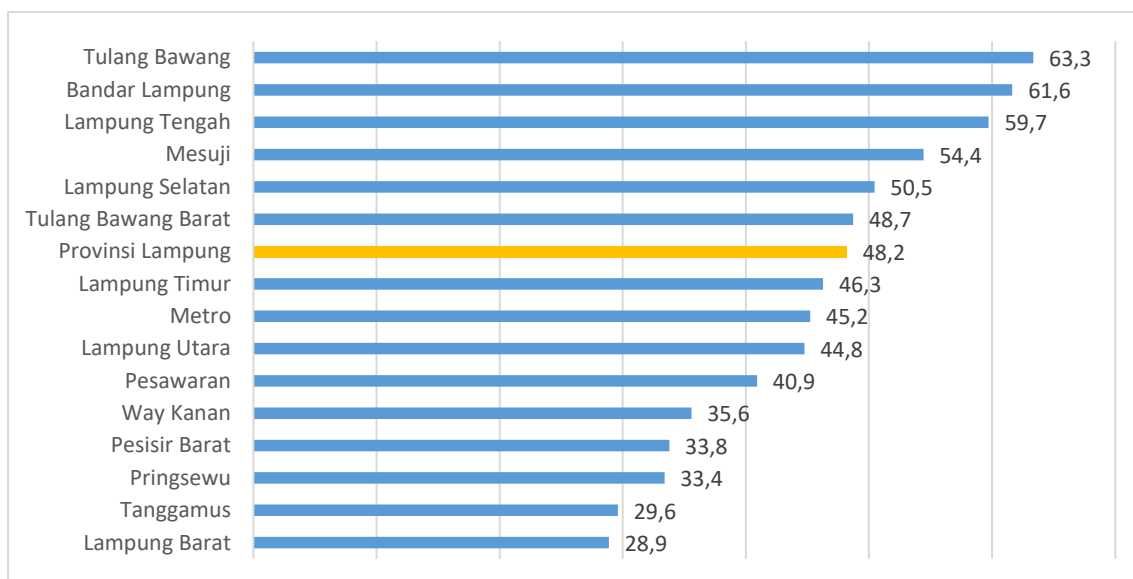


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Pada Tahun 2023, Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebagai penerima PDRB per kapita terbesar (Rp. 63,3 juta), lebih tinggi dibandingkan dari PDRB per kapita Provinsi Lampung (Rp. 48,2 juta). Disisi lain, Kabupaten

Lampung Barat menjadi penerima PDRB Per Kapita terendah yaitu hanya sebesar Rp. 28,9 juta.

Gambar 2. 95 PDRB per Kapita (ADHB, Juta Rupiah) Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Kapasitas Fiskal Daerah (Indeks Kemandirian Fiskal). Kemandirian Fiskal Daerah & Indeks Pengelolaan Keuangan daerah (IPKD). Salah satu konsekuensi dari otonomi daerah adalah Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat dan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah adalah perluasan desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkuat dan diperluas. Kewenangan Pemerintah Daerah melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperkuat dengan disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak.

Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan

atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Nilai IKF berkisar antara 0 (semua belanja dibiayai dengan dana transfer dan tidak terdapat peranan PAD) hingga 1 (semua belanja dapat dibiayai dengan PAD dan tidak terdapat dana transfer). Dengan demikian, semakin rendah nilai IKF, maka semakin Belum Mandiri. Sebaliknya, semakin tinggi nilai IKF, maka semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah.

Tabel 2. 46 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah

No	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
1	$0,00 \leq \text{IKF} < 0,25$	Belum Mandiri
2	$0,25 \leq \text{IKF} < 0,50$	Menuju kemandirian
3	$0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$	Mandiri
4	$0,75 \leq \text{IKF} \leq 1,00$	Sangat mandiri

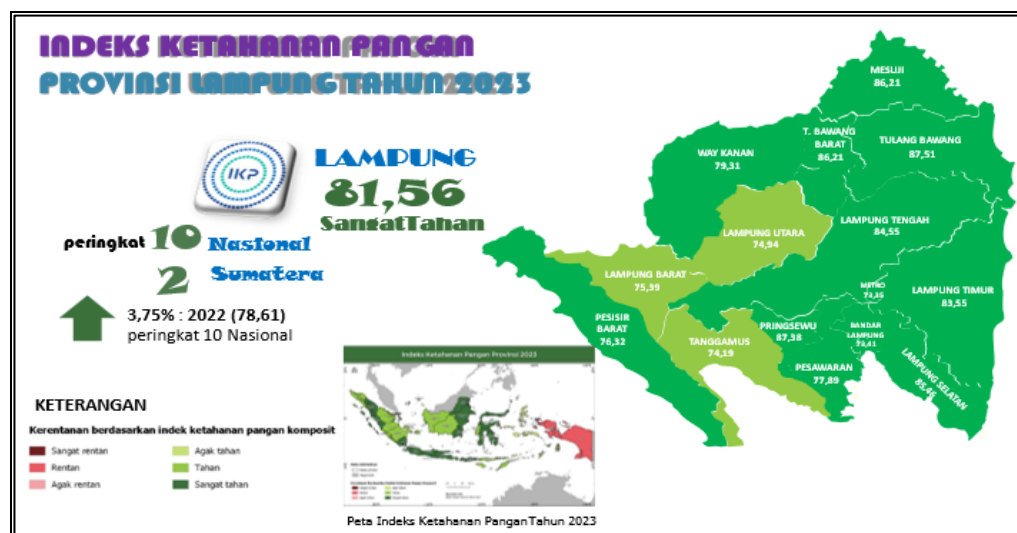
Data publikasi BPK R.I. secara umum menunjukkan bahwa pada periode tahun 2013 s.d. 2019 kondisi kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Lampung termasuk dalam kategori “Menuju Mandiri”. Sejalan dengan penerapan e-government ini dalam lingkungan pemerintahan, yang mana dalam proses kerja pemerintahan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi guna mengembangkan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik.

Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan transparan serta pengelolaan keuangan yang berkualitas, sejak tahun 2017 Pemerintah Provinsi Lampung juga telah mengimplementasikan pemanfaatan IT dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang diintegrasikan dengan tahapan dan proses dari Perencanaan Pembangunan Daerah; sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketahanan Pangan Daerah Lampung Kuat dan Mantap yang dapat dilihat dari capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Lampung yang sangat baik dan masuk dalam kategori “sangat tahan” sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Ketahanan pangan Provinsi Lampung tidak terpengaruh dengan adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan peta sebaran IKP provinsi se-Indonesia hampir seluruh provinsi masuk dalam kategori “tahan” dan “sangat tahan”, serta mayoritas provinsi dengan kategori “sangat tahan”

berada di Pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi. Sementara di Pulau Sumatera hanya Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki IKP kategori "sangat tahan".

Gambar 2. 96 Peta Sebaran Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Lampung Tahun 2023



Keterangan : Data Termutakhir

Sumber : Buku Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2022 oleh Badan Pangan Nasional

Berdasarkan data IKP Tahun 2023, terdapat empat belas kabupaten di Provinsi Lampung yang masuk dalam kategori "sangat tahan" dengan IKP lebih dari 74,40. Sementara itu hanya terdapat satu kabupaten yang masih masuk dalam kategori "tahan".

Tabel 2. 47 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2018-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETAHANAN PANGAN MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018-2023												PERUBAHAN 2022-2023	
		2018		2019		2020		2021		2022		2023			
		PERINGKAT	IKP	PERINGKAT	IKP	PERINGKAT	IKP	PERINGKAT	IKP	PERINGKAT	IKP	PERINGKAT	IKP	PERINGKAT	IKP
1	LAMPUNG BARAT	256	70.76	225	74.62	240	74.02	288	70.80	236	74.34	240	75.39	-4	1.05
2	TANGGAMUS	236	71.96	188	76.55	227	74.67	225	75.34	246	73.60	250	74.19	-4	0.59
3	LAMPUNG SELATAN	132	76.48	130	78.99	153	79.23	142	79.66	94	81.81	49	85.46	45	3.65
4	LAMPUNG TIMUR	110	77.43	166	77.38	148	79.50	104	81.20	79	82.78	88	83.55	-9	0.77
5	LAMPUNG TENGAH	158	75.43	137	78.88	140	79.83	129	80.16	108	81.07	66	84.55	42	3.48
6	LAMPUNG UTARA	232	72.18	265	71.35	274	71.51	258	73.00	223	75.00	242	74.94	-19	-0.06
7	WAY KANAN	199	73.63	250	72.37	252	73.34	229	74.96	103	78.34	171	79.31	-68	0.97
8	TULANG BAWANG	90	78.24	62	82.29	77	82.83	44	84.58	18	86.25	21	87.51	-3	1.26
9	PESAWARAN	225	72.54	182	76.74	128	80.15	158	78.96	181	77.86	192	77.89	-11	0.03
10	PRINGSEWU	84	78.48	45	83.13	53	83.79	50	84.05	48	84.14	23	87.38	25	3.24
11	MESUJI	44	80.82	70	81.78	57	83.66	23	85.60	28	85.62	38	86.21	-10	0.59
12	TULANG BAWANG BARAT	45	80.7	122	79.28	190	77.58	167	78.58	138	79.84	85	83.59	53	3.75
13	PESISIR BARAT	285	67.99	256	71.98	258	72.93	279	71.60	265	71.71	40	76.32	225	4.61
14	BANDAR LAMPUNG	59	68.93	58	73.49	63	71.62	60	74.17	62	73.41	50	83.37	12	9.96
15	METRO	65	65.98	49	78	75.85	76.75	54	76.74	64	73.35	49	83.66	15	10.31
PROVINSI LAMPUNG		Dalam publikasi IKP tahun 2018 tidak mencantumkan		71.36		77.43		77.96		78.61		81.56		2.95	
PERINGKAT NASIONAL		IKP provinsi secara nasional		15		12		11		9		10			
PERINGKAT SUMATERA				2		2		2		2		2			

Sumber : Buku Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2022 oleh Badan Pangan Nasional

Nilai skor IKP Tahun 2023 yang tinggi ini didukung dengan dukungan Provinsi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia dengan

indeks ketersediaan secara rata-rata sangat tinggi yaitu 95,04, indeks keterjangkauan sebesar 82,32 dan indeks pemanfaatan sebesar 71,99.

Tabel 2. 48 Indeks ketahanan pangan berdasarkan aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan dan aspek pemanfaatan

NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETAHANAN PANGAN BERDASARKAN ASPEK KETERSEDIAAN, KETERJANGKUAN DAN PEMANFAATAN												KOMPONEN INDIKATOR
		INDEKS KETERSEDIAAN				INDEKS KETERJANGKUAN				INDEKS PEMANFAATAN				
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	LAMPUNG BARAT	83.92	84.45	85.11	85.16	80.00	77.08	80.51	81.31	62.12	55.85	61.64	63.64	Aspek Ketersediaan : Rasio konsumsi normatif produksi tanaman pangan beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, sagu dan cpp daerah
2	TANGGAMUS	84.27	87.76	83.22	83.52	77.82	79.21	81.52	79.87	65.05	63.13	60.46	62.93	
3	LAMPUNG SELATAN	95.33	96.67	95.70	95.66	76.30	76.48	77.92	82.16	69.74	69.29	74.30	80.28	
4	LAMPUNG TIMUR	98.57	99.05	98.68	99.25	79.37	77.78	77.03	77.79	66.04	70.37	75.16	76.11	
5	LAMPUNG TENGAH	98.11	99.19	98.66	99.63	79.78	80.90	80.99	81.79	66.16	65.34	67.93	75.32	Aspek Keterjangkauan % penduduk dibawah garis kemiskinan % RT dgn proporsi pengeluaran pangan > 65% % RT tanpa akses listrik
6	LAMPUNG UTARA	98.12	98.70	98.63	98.48	67.21	69.78	67.78	70.32	54.79	56.13	62.69	60.74	
7	WAY KANAN	94.20	96.87	97.10	97.17	77.46	76.49	78.23	78.95	54.62	57.37	64.35	66.18	
8	TULANG BAWANG	97.78	98.94	99.32	99.36	85.87	85.59	85.60	86.62	69.33	73.06	76.93	79.28	
9	PESAWARAN	95.37	96.00	93.36	93.18	76.96	74.27	74.78	76.59	71.12	67.71	68.54	67.40	Aspek Pemanfaatan : Rata2 lama sekolah perempuan >15 th % Rt tanpa akses air bersih Rasio jml penduduk per nakes % balita stunting AHH saat lahir
10	PRINGSWU	91.24	92.96	92.01	92.08	82.75	81.80	83.58	84.31	78.99	79.00	78.65	86.16	
11	MESUJI	98.40	99.48	99.59	99.37	88.66	89.67	89.39	90.76	68.85	72.14	72.32	72.93	
12	TULANG BAWANG BARAT	98.17	98.84	99.00	99.69	87.28	86.39	87.89	89.66	54.87	57.53	59.42	66.97	
13	PESISIR BARAT	93.07	93.98	93.79	92.94	72.22	71.73	74.96	79.75	58.38	54.72	52.71	61.29	
14	BANDAR LAMPUNG	0.00	0.00	0.00		76.29	77.10	76.48	87.11	67.79	71.77	70.90	80.31	
15	METRO	96.97	0.00	0.00		81.08	78.75	77.68	87.79	73.23	75.09	69.80	80.28	
	PROVINSI LAMPUNG	94.35	95.61	94.94	95.04	79.20	78.87	79.62	82.32	65.50	66.04	67.72	71.99	

Tabel 2. 49 Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi 2022

Peringkat	Provinsi	IKP	Peringkat	Provinsi	IKP
1	Bali	85,19	18	Banten	73,78
2	Jawa Tengah	82,95	19	Kep. Bangka Belitung	71,71
3	Sulawesi Selatan	81,38	20	Sumatera Utara	71,22
4	Kalimantan Selatan	81,05	21	Kalimantan Utara	71,04
5	DI Yogyakarta	80,88	22	Kalimantan Barat	70,81
6	Gorontalo	80,35	23	Aceh	70,16
7	Jawa Timur	79,85	24	Kalimantan Tengah	69,96
8	Sumatera Barat	79,45	25	Sumatera Selatan	69,64
9	Lampung	78,61	26	Jambi	69,50

Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) merupakan proporsi populasi penduduk yang

mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Penghitungan PoU telah memperhatikan kebutuhan energi minimum individu berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan dan aktivitas fisik yang dilakukan.

Angka kemiskinan dan angka PoU memiliki pola yang sama, yaitu meningkat dari tahun 2019– 2021. Pada tahun 2022 angka kemiskinan menurun karena adanya kenaikan pengeluaran per kapita, sedangkan angka PoU meningkat karena adanya penurunan konsumsi kalori per kapita. Pada tahun 2023 angka PoU kembali menurun mengikuti trend angka kemiskinannya, menjadi 8,53% dengan penurunan sebesar 1,68%. Hal ini bersamaan dengan trend angka kemiskinannya.

Situasi PoU Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2019 -2023 berfluktuatif mengikuti trend PoU Nasional. Tahun 2019 ke tahun 2020 cenderung meningkat dari 10,51 % menjadi 12,19 %. Pada tahun 2021 PoU Lampung menurun menjadi 10,25 %. Melonjak naik kembali pada tahun 2022 menjadi 14,63 % sebagai akibat masih adanya pengaruh pandemi dan kenaikan beberapa bahan pangan pokok seperti minyak goreng. Namun pada tahun 2023, PoU Propinsi Lampung mengalami kontraksi cukup jauh menjadi 8,81 %. Hal ini disebabkan semakin membaiknya kondisi pasca pandemi dan mulai terdapat perkembangan usaha ekonomi dan pendapatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi pangan masyarakat secara umum. Secara lengkap dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2. 50 Perkembangan POU Provinsi Lampung Tahun 2019- 2023

STATUS PoU	2019	2020	2021	2022	2023	% PERTUMBUHAN	Jumlah Penduduk Undernourished
NASIONAL	7,63	8,34	8,49	10,21	8,53	-	
PROVINSI LAMPUNG	10,51	12,19	10,25	14,63	8,81	0,74	769.810 (8,81%)

Provinsi Lampung dengan Nilai PoU 8,81% termasuk dalam kategori ketiga dengan range 5% - 9,9% dan berada pada posisi rangkinng ke 27 secara

nasional. Berdasarkan besaran PoU menurut kabupaten/kota tahun 2023, Kabupaten Pringsewu merupakan daerah dengan PoU terbesar, yaitu 10,82%. Sedangkan Kabupaten Way Kanan merupakan daerah dengan PoU terkecil, yaitu sebesar 7,11%

Gambar 2. 97 Peringkat Angka PoU Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Secara umum perkembangan PoU Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023 berfluatif namun pada tahun 2023 pada semua kabupaten/kota mengalami kontraksi cukup tajam dalam kisaran 1,8 sampai dengan 7,71.

Tabel 2. 51 PoU Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

KODE	KABUPATEN/KOTA	PoU (%)					% Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1871	BANDAR LAMPUNG	7,22	11,74	5,91	12,41	7,43	20,68
1801	LAMPUNG BARAT	8,95	10,98	8,63	12,82	8,50	4,04
1872	METRO	9,01	11,54	8,27	11,51	8,38	2,94
1810	PRINGSEWU	11,82	15,23	11,64	16,30	10,82	2,93
1811	MESUJI	9,07	12,27	9,76	11,88	8,75	2,55
1806	LAMPUNG UTARA	11,71	12,46	11,00	16,50	10,28	1,74
1805	LAMPUNG TENGAH	10,96	12,46	11,42	16,45	9,35	1,55
1809	PESAWARAN	10,14	11,90	12,68	16,18	8,43	0,89
1802	TANGGAMUS	11,79	13,22	11,76	16,81	9,19	-0,34
1813	PESISIR BARAT	7,88	7,23	6,89	9,03	7,23	-0,44
1804	LAMPUNG TIMUR	12,07	12,30	11,79	15,41	10,59	-0,70
1803	LAMPUNG SELATAN	10,43	12,33	8,79	13,06	7,61	-0,90
1808	TULANGBAWANG	10,55	11,17	11,22	14,79	8,44	-1,20
1807	WAY KANAN	10,62	10,19	10,33	12,65	7,11	-5,99
1812	TULANG BAWANG BARAT	13,90	14,32	12,66	15,78	8,07	-8,21

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2022 sebesar 70,06 persen, yaitu naik 0,71 persen poin dibanding Agustus 2021. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Agustus 2022, cenderung mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercermin dari kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,71% poin per Agustus 2022. Kenaikan ini terutama didukung oleh bertambahnya serapan penduduk yang bekerja mencapai 4,39 juta penduduk bekerja, mengindikasikan suplai lapangan kerja yang meningkat sejalan dengan adanya pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung (TW IV 2022) sebesar pada 5,05% (yoy) dibanding TW IV 2021.

Tabel 2. 52 Kondisi Makro Ketenagakerjaan Provinsi Lampung 2015-2022

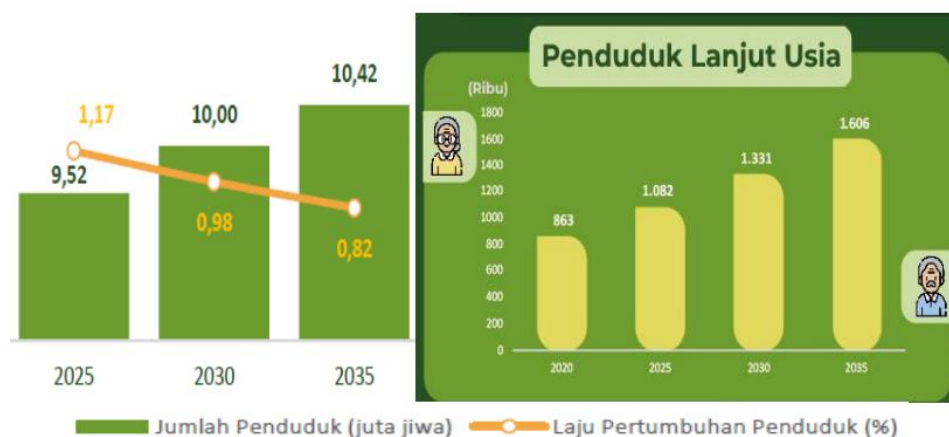
STATUS KETENAGA KERJAAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penganggur	176,3	171,7	171,5	209,6	210,6	208,0
Bukan angkatan Kerja	1.931,20	1.842,60	1.900,70	1.909,9	1.986,2	1.964,3
Persentase angkatan kerja yang bekerja	95,67	95,94	95,56	95,33	95,31	95,48
TPAK	67,83	69,67	69,09	70,16	69,35	70,06

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Angka Ketergantungan Demografi (*Demographic Dependency Ratio*) adalah ukuran yang digunakan dalam demografi untuk menilai rasio antara jumlah orang yang dianggap "tergantungan" pada populasi yang "produktif". Biasanya, angka ini melibatkan membandingkan jumlah anak-anak (usia di bawah 15 tahun) dan lansia (usia 65 tahun ke atas) dengan jumlah populasi usia kerja (antara 15 dan 64 tahun). Struktur penduduk Lampung di tahun 2035 diproyeksikan mengalami perubahan, dimana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak di tahun 2035. Pada saat yang sama, angka ketergantungan (dependency ratio)

mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua juga meningkat. Penduduk Lanjut Usia (Lansia) umur 60 tahun ke atas pada 2020 sebesar 9,60 persen (862,95 ribu penduduk). Proyeksi proporsi penduduk umur 60 tahun ke atas menjadi 15,42 persen (1,606 juta penduduk) pada tahun 2035. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Lampung sudah memasuki fase struktur umur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas di Lampung yang sudah melebihi 10 persen dari total penduduk Lampung. Kondisi ini harus diantisipasi mengingat perubahan struktur usia penduduk memiliki implikasi besar bagi perekonomian lokal, regional dan nasional. Pada fase ini, masalah kependudukan akan muncul apabila pemerintah tidak mempersiapkan strategi dari sekarang. Strategi menjelang ageing population antara lain penataan sistem pensiun, perbaikan layanan kesehatan dan fasilitas publik ketika penduduk memasuki usia lansia. Jika tidak ada sistem jaminan sosial yang persiapan maka akan banyak kemiskinan terjadi di usia tua dan akhirnya pemerintah harus terbebani dengan mengeluarkan anggaran belanja yang lebih besar.

Gambar 2. 98 Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Lampung, serta Jumlah Penduduk Lansia Tahun 2025-2035



berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) menanggung sekitar 49 penduduk usia nonproduktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas). Rasio ketergantungan sebesar 48,72 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 33,36 persen dan rasio ketergantungan penduduk lanjut usia sebesar 15,36 persen. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban

yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non-produktif.

Gambar 2. 99 Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Lampung Tahun 2020-2035



2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur Jalan. Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih terbatasnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Transportasi merupakan salah satu kunci utama pengembangan wilayah dan kemajuan ekonomi. Tujuan pembangunan transportasi di Provinsi Lampung adalah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan efisiensi antar daerah potensial sehingga mampu meningkatkan perekonomian wilayah.

Tabel 2. 53 Kondisi Ruas Jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023

TAHUN	Ruas Jalan Provinsi		Ruas jalan Nasional	
	Mantap (%)	Tidak Mantap (%)	Mantap (%)	Tidak Mantap (%)
2019	74,414	25,586	91,010	8,990
2020	76,045	23,955	92,070	7,930
2021	75,386	24,614	93,792	6,208
2022	76,850	23,150	94,817	5,183
2023	78,673	21,327	93,928	6,072

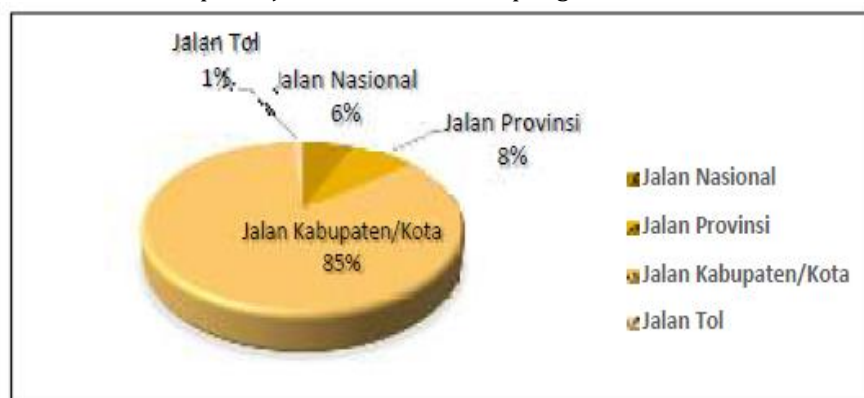
Sumber : data PIK-Bappeda, 2024

Data menunjukkan bahwa kondisi ruas jalan Provinsi Lampung Tahun 2019-2023 kondisi Mantap berada pada kisaran 74,41% hingga 78,67%. Sejalan dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur konektivitas, pada tahun 2024

kondisi tersebut akan terus ditingkatkan. Selanjutnya, jaringan jalan provinsi juga didukung dengan adanya jaringan jalan nasional yang relatif lebih mapan, dengan tingkat kemantapan jalan yang tinggi. Di tahun 2023, kondisi jaringan Jalan Nasional tercatat 93,93% dalam kondisi mantap.

Sarana Transportasi Darat, Laut dan Udara. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan sarana yang paling mendasar yang bertujuan untuk mendukung kelancaran, distribusi barang, maupun jaringan transportasi manusia serta fungsi sosial lainnya. Gambaran infrastruktur jalan yang merupakan penunjang transportasi darat di Provinsi Lampung sebagaimana gambar di bawah ini :

Gambar 2. 100 Komposisi jalan di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber : data PIK-Bappeda, 2024 (**)

Tabel 2. 54 Panjang Infrastruktur Jalan di Provinsi Lampung Tahun 2023

PANJANG INFRASTRUKTUR JALAN DI PROVINSI LAMPUNG	
Jalan Nasional	1.298,410 Km ⁽¹⁾
Jalan Provinsi	1695,479 Km ⁽²⁾
Jalan Kabupaten/Kota	17.774,160 Km ⁽³⁾
Jalan Tol	253,810 Km ⁽⁴⁾

Sumber: (1) 430/KPTS/M/2022 (2) G/434/V.03/HK/2023 (3) Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal Kemen PUPR Tahun 2019 (4) Bidang Operasi dan Pemeliharaan BPJT Tahun 2019

Sampai dengan tahun 2023, panjang jalan nasional di Provinsi Lampung tercatat 93,93 persen dalam kondisi mantap. Sementara, panjang jalan yang merupakan kewenangan provinsi dengan kondisi 76,850 persen dalam kondisi mantap.

Tabel 2. 55 Kondisi jalan Mantap di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023

Kondisi	TA.2020		TA.2021		TA.2022		TA.2023	
	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi
Baik	513,250	1.091,243	431,580	882,798	402,540	832,659	261,390	979,767
Sedang	723,630	196,398	784,440	393,697	826,770	468,629	958,180	354,123
Rusak	22,650	239,435	56,930	164,725	52,440	126,510	71,530	75,180
Kritis	37,080	166,197	23,560	252,053	14,760	265,475	7,310	286,409
Jumlah (km)	1.296,610	1.693,273	1.296,510	1.693,273	1.296,510	1.693,273	1.298,410	1.695,479
Mantap	92,070%	76,045%	93,792%	75,386%	94,817%	76,850%	93,928%	78,673%
Tdk Mantap	7,930%	23,955%	6,208%	24,614%	5,183%	23,150%	6,072%	21,327%

Sumber : Bappeda Prov. Lampung

1) Terminal

Terminal penumpang yang merupakan simpul pelayanan transportasi berfungsi sebagai prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang. Provinsi Lampung memiliki beberapa terminal penumpang di beberapa kabupaten / kota dengan rincian sebagai berikut :

- **Terminal Type A** : 2 (dua) buah, yaitu Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung dan Terminal Betan Subing Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang dikelola oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah VI Lampung-Bengkulu selaku perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI.
- **Terminal Type B** : 3 (tiga) buah, yaitu Terminal Mulyojati Kota Metro, Terminal Simpang Propau Kotabumi dan Terminal Bakauheni yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- **Terminal Type C** : 26 buah, yaitu Terminal Rajabasa, Kemiling, Panjang, Bakauheni, Kota Agung, Bunut Padang Cermin, Pasar Bawah Tanjung Karang, Sukaraja Telukbetung, Kalianda, Metro, Bandar Jaya, Gaya Baru, Sub Terminal Kota, Sub Pasar Sentral, Unit II, Way Tenong,

Mataram Baru, Daya Murni, Pringsewu, Gedong Tataan, Gadingrejo, Krui, Menggala, Liwa, Mesuji, Panaragan yang masing-masing dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten setempat.

2) Kereta Api

Perkembangan realisasi angkutan penumpang dan barang dari stasiun Tanjung karang – stasiun Kertapati dan angkutan batu bara dari Tanjung Enim – Tarahan dan pengapalan ke Surabaya Tahun 2018 – 2021, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. 56 Perkembangan realisasi angkutan penumpang dan barang dari stasiun Tanjung karang – stasiun Kertapati dan angkutan batu bara dari Tanjung Enim – Tarahan dan pengapalan ke Surabaya Tahun 2018 – 2021

NO.	URAIAN	TAHUN				KET.
		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
I	ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG					
A	JUMLAH KA	8	8	8	8	
B	PENUMPANG					
1	Penumpang Naik					
	- Kapasitas Tersedia	1.184.790	1.184.790	536.388	678.800	
	- Kapasitas Terpakai	1.086.416	1.183.721	420.567	284.202	
	- Load Factor (%)	92	100	78	42	
2	Penumpang Turun					
	- Kapasitas Tersedia	1.184.790	1.184.790	536.388	678.800	
	- Kapasitas Terpakai	1.060.253	1.182.000	281.364	240.545	
	- Load Factor (%)	89	100	52	35	
II	ANGK. BATUBARA					
A	TG. ENIM-TARAHAN					
	a. Target	20.052.807	20.460.000	16.320.000	20.337.000	Tonase
	b. Realisasi	19.670.164	20.783.148	18.226.112	20.053.105	Tonase

Keterangan : Data Termutakhir

Disamping itu adapun rincian pembangunan melalui skema pembiayaan KPBU dan APBN, diantaranya :

a. Rincian kegiatan skema KPBU

1. Pembangunan jalur ganda kereta api antara Kotabumi – Tegineneng;
2. Pembangunan jalur ganda kereta api antara Giham – Martapura;
3. Pembangunan jalur ganda kereta api antara Tiga Gajah – Tanjung Rambang.

b. Rincian kegiatan skema pembiayaan APBN

1. Reaktivitasi jalur kereta api menuju Pelabuhan Panjang;

2. Pembangunan shortcut Tegineneng – Tarahan.

Infrastruktur Perhubungan Laut dipergunakan untuk angkutan barang dan angkutan penumpang, khususnya antar pulau dalam provinsi. Provinsi Lampung memiliki 25 pelabuhan yang meliputi pelabuhan umum, baik yang dikelola secara komersial oleh PT. Pelindo II Persero maupun yang dikelola untuk kepentingan swasta atau BUMN. Pelabuhan terbesar adalah Pelabuhan Panjang yang bertaraf internasional, yang melayani trayek dalam negeri (inter island), meliputi : Bengkulu, Sumatera Selatan, Jakarta, Surabaya dan Palembang. Sementara trayek dan diluar negeri (ocean going), meliputi : Timur Tengah, Singapura, Vietnam dan Malaysia. Pelabuhan Panjang akan dikembangkan untuk memenuhi persyaratan ISIMPANGS code dan menjadikan pelabuhan internasional dalam skala yang lebih besar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 53 tahun 2002 tentang tatanan Kepelabuhanan Nasional Provinsi Lampung memiliki beberapa pelabuhan antara lain, Pelabuhan Panjang yang merupakan satu-satunya pelabuhan Internasional di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung juga mempunyai 5 (lima) pelabuhan regional antara lain, Pelabuhan Teluk Betung, Pelabuhan Labuhan Maringgai, Pelabuhan Mesuji, Pelabuhan Menggala dan Pelabuhan Kota Agung yang memiliki Peran dan fungsi sebagai Pelabuhan Nasional. Kelima pelabuhan tersebut dikelola oleh Unit Pelaksana Pelabuhan (UPP) dimasing-masing Pelabuhan. Untuk pelabuhan Lokal Provinsi Lampung memiliki 6 pelabuhan lokal yang tersebar di wilayah Provinsi Lampung antara lain, Pelabuhan Candi Kalianda, Pelabuhan Legundi, Pelabuhan Sebesi, Pelabuhan Way Seputih, Pelabuhan Kuala Penat dan Pelabuhan Way Penat. Selain dari beberapa Pelabuhan tersebut Provinsi Lampung juga memiliki Pelabuhan Penyeberangan yang merupakan urat nadi Perekonomian Nasional yaitu Pelabuhan Bakauheni yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan dan dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry.

1) Pelabuhan Yang Diusahakan

Satu-satunya Pelabuhan Laut yang diusahakan di Provinsi Lampung adalah Pelabuhan Panjang yang dikelola oleh BUMN, yaitu PT (Pesero) PELINDO II

Cabang Panjang. BUMN pengelola pelabuhan tersebut bertugas memberikan pelayanan jasa kepelabuhan antara lain:

- Menyediakan perairan dan kolam pelabuhan.
- Menyediakan pelayanan jasa pandu/tunda dan kepil dalam kegiatan sandar lepas kapal di dermaga.
- Menyediakan fasilitas pergudangan, tempat penumpukan barang dan alat bongkar muat.
- Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan *roll on/roll off* (ro-ro)
- Menyediakan fasilitas umum seperti listrik, air minum, telpon baik untuk kapal maupun untuk kepentingan umum di areal pelabuhan.
- Menyediakan alur meliputi kedalaman, pasang surut, sarana bantu navigasi pelayaran.
- Menyiapkan sarana transportasi darat.
- Menyiapkan keamanan dan ketertiban.
- Tugas pemerintah di Pelabuhan ditangani oleh Instansi Pemerintah pemegang fungsi keselamatan pelayaran serta Bea Cukai, Imigrasi serta Karantina (orang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan) dimana Adpel (Administrator Pelabuhan) Panjang bertindak selaku koordinator, dan pada saat ini berubah nama menjadi kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Panjang merupakan Pelabuhan Alam yang cukup terlindungi dari gelombang laut, dan sesuai hirarkinya merupakan Pelabuhan Internasional karena terbuka untuk lalu-lintas barang perdagangan dengan luar negeri. Dewasa ini Pelabuhan Panjang hanya digunakan untuk jasa angkutan barang (Kargo) karena tidak ada lagi kapal penumpang PT. PELNI yang singgah di pelabuhan ini.

Permasalahan yang masih dihadapi di Pelabuhan Panjang antara lain belum tersedianya sarana Bunker (Pengisian BBM) yang memadai untuk kapal-kapal besar sehingga bila kapal-kapal first call ke Panjang sekaligus untuk bunker terpaksa harus masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok lebih dulu sehingga mengakibatkan penambahan *cost*.

2) Pelabuhan Yang Tidak Diusahakan

Pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan ditangani langsung oleh Kementerian Perhubungan dalam hal ini **Unit Pelaksana Pelabuhan (UPP)**. Secara administrasi pemerintahan, pelabuhan-pelabuhan tersebut dikelompokkan menjadi 5 unit pelaksana, yaitu :

- **Unit Pelaksana Pelabuhan Kota Agung** di Kabupaten Tanggamus merupakan pelabuhan nasional yang membawahi 4 (empat) pelabuhan kecil lainnya. Kegiatannya melayani Kapal Tangker Pertamina dan Kapal-kapal Rakyat/lokal.
- **Unit Pelaksana Pelabuhan Teluk Betung** di Kota Bandar Lampung yang membawahi 9 (sembilan) pelabuhan kecil lainnya, terutama melayani kapal-kapal rakyat.
- **Unit Pelaksana Pelabuhan Labuhan Maringgai** di Kabupaten Lampung Timur yang membawahi 5 (lima) Pelabuhan kecil lainnya terutama melayani kapal-kapal rakyat/ Nelayan.
- **Unit Pelaksana Pelabuhan Menggala** di Kabupaten Tulang Bawang, yang membawahi 2 (dua) Pelabuhan kecil lainnya untuk melayani kapal-kapal rakyat/Nelayan.
- **Unit Pelaksana Pelabuhan Mesuji** di Kabupaten Mesuji untuk melayani kapal –kapal Rakyat/Nelayan.

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. 53 Tahun 2002 pelabuhan Kota Agung merupakan pelabuhan nasional sedangkan pelabuhan Teluk Betung, Labuhan Maringgai, Mesuji dan Menggala merupakan pelabuhan regional dan sesuai kewenangannya akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Lampung.

Infrastruktur Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Infrastruktur Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan Pelabuhan Bakauheni merupakan lintas penyeberangan antar provinsi yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan jaringan kereta api antar provinsi. Pelabuhan bakauheni masing dapat dikembangkan lebih lanjut karena saat ini fasilitas yang digunakan baru mencapai 25%. Operasi pelayanan angkutan penyeberangan Bakauheni – Merak berjalan 24 jam setiap hari dengan kemampuan rata – rata pelayaran kapal adalah 24 trip/hari. Jenis kapal yang melayani angkutan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni adalah kapal Roro dengan berat antara 3.000 – 5.000 GPT dan

mempunyai daya angkut penumpang 379 – 1900 orang dan kendaraan 45 – 200 unit.

Sarana penyeberangan di Provinsi Lampung selain terdapat pelabuhan penyeberangan, terdapat pula dermaga – dermaga sungai yang khusus melayani masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan di beberapa wilayah di Provinsi Lampung mempunyai sungai – sungai yang bisa dipergunakan sebagai alternatif dari moda transportasi darat. Angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Provinsi Lampung mempunyai potensi yang cukup bagus. Maka dari itu pembangunan fasilitas – fasilitas penunjang seperti sarana dan prasarana untuk moda angkutan sungai ini dapat membantu pergerakan atau mobilitas masyarakat yang berada di daerah aliran sungai.

Angkutan Penyeberangan (Pelabuhan Bakauheni). Penyeberangan dari Pulau Jawa (Merak) dilayani melalui Pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan), yang letaknya $\pm$ 97 Km dari Kota Bandar Lampung. Pelabuhan ini mulai dioperasikan pada 26 Mei 1985. Fasilitas Prasarana dan Sarana yang tersedia adalah sebagai berikut:

1) Prasarana Penyeberangan yang tersedia berupa dermaga sebanyak 7 (tujuh) unit yang dilengkapi dengan *moveable bridge* (MB). Dermaga I, II dan III memiliki gangway, khusus dermaga I dan III juga dilengkapi dengan *side ramp door*. Selain itu terdapat 2 (dua) dermaga eksekutif, untuk spesifikasi dermaga – dermaga yang ada di pelabuhan bakauheni adalah sebagai berikut:

a. Dermaga I

Dermaga I di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dibangun pada tahun 1981 dan mulai dioperasikan tahun 1987. Mempunyai panjang dermaga 172,8M dan kedalaman kolam sandar 10–12M. Dermaga I di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni merupakan dermaga dengan tipe *Quay Wall*. Dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 57 Spesifikasi dari Dermaga I.

No.	Uraian	Spesifikasi
1.	Panjang Dermaga	172,8 M
2.	Kolam	L=50 M
		d =10 -12 M
3.	Dolphin	12 buah
4.	GangWay	L=2 M
		P=14 M
		Kapasitas =1 T
5.	MoveableBridge	L=11,6 M
		P=16 M
		Kapasitas =50 T
6.	SideRamp	L=2,8 M
		P=16 M
		Kapasitas =20 T
7.	Kapasitas Dermaga	6000 GRT
8.	LuasAreal Parkir	11237 M ²

Sumber: Profil dan Kinerja Kantor OPP Merak

b. Dermaga II

Dermaga II di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni di bangun pada tahun 1981 dan mulai dioperasikan tahun 1991. Mempunyai panjang dermaga 134,66 M dan kedalaman kolam sandar 8 – 10 M Dermaga II di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni merupakan dermaga dengan tipe Quay Wall. Untuk lebih jelasnya dibawah ini adalah spesifikasi dari Dermaga II.

Tabel 2. 58 Spesifikasi dari Dermaga II.

No.	Uraian	Spesifikasi
1.	Panjang Dermaga	134,66 M
2.	Kolam	L=20 M
		d =8 -10 M
3.	Dolphin	12 buah
4.	GangWay	L=1,5 M
		P=14 M
		Kapasitas =1 T

No.	Uraian	Spesifikasi
5.	MoveableBridge	L=9 M
		P=16 M
		Kapasitas =50 T
6.	SideRamp	L=3 M
		P=17 M
		Kapasitas =20 T
7.	Kapasitas Dermaga	6000 GRT
8.	LuasAreal Parkir	9.594 M2

Sumber: Profil dan Kinerja Kantor OPP Merak

c. Dermaga III

Dermaga III ini di bangun pada tahun 2001 dan mulai dioperasikan tahun 2001. Mempunyai panjang dermaga 166,83 M dan kedalaman kolam sandar 10 – 12 M.

Tabel 2. 59 Spesifikasi dari Dermaga III.

No.	Uraian	Spesifikasi
1.	Panjang Dermaga	166,83 M
2.	Kolam	L=25 M
		d =10 -12 M
3.	Dolphin	12 buah
4.	GangWay	L=1,8 M
		P=16 M
		Kapasitas =1,5 T
5.	MoveableBridge	L=10 M
		P=16 M
		Kapasitas =45 T
6.	SideRamp	L=2.8 M
		P=21 M
		Kapasitas =2 T
7.	Kapasitas Dermaga	12000 GRT
8.	LuasAreal Parkir	13.965 M2

Sumber: Profil dan Kinerja Kantor OPP Merak

d. Dermaga IV

Dermaga IV di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dibangun tahun 1998 dan mulai dioperasikan tahun 2001. Mempunyai panjang dermaga 57,69 M dan kedalaman kolam sandar 10 – 12 M Dermaga IV di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni merupakan dermaga dengan tipe Dolphin. Dermaga ini adalah dermaga milik swasta yaitu milik KSO. PT. Infinity Indosakti. Untuk lebih jelasnya dibawah ini adalah spesifikasi dari Dermaga IV.

Tabel 2. 60 Spesifikasi dari Dermaga IV.

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1.	Panjang Dermaga	57,69 M
2.	Kolam	L=20 M
		d =10 -12 M
3.	Dolphin	3 buah
4.	Moveable Bridge	L=7,9 M
		P=17,82 M
		Kapasitas =60 T
5.	KapasitasDermaga	6000 GRT
6.	Luas Areal Parkir	10.519 M2
7.	Mooring Dolphin	2 buah

Sumber: Profil dan Kinerja Kantor OPP Merak

e. Dermaga V

Dermaga V di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni di bangun pada tahun 2009 dan mulai dioperasikan tahun 2012. Mempunyai panjang dermaga 138 M dan kedalaman kolam sandar 10 Dermaga V di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni merupakan dermaga dengan tipe Dolphin dan Jetty.

Tabel 2. 61 Spesifikasi dari Dermaga V.

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1.	Panjang Dermaga	138 M
2.	Kolam	L=20 M
		d =10 -12 M
3.	Dolphin	5 buah

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
4.	Moveable Bridge	L=7,8 M
		P=17,8 M
		Kapasitas =80 T
5.	Kapasitas Dermaga	12.000 GRT
6.	Luas Areal Parkir	13.464 M2
7.	Mooring Dolphin	4 buah

Sumber: Profil dan Kinerja Kantor OPP Merak

2) Sarana Penyeberangan

Untuk melayani permintaan jasa angkutan penyeberangan lintas Bakauheni – Merak PT ASDP Cabang Bakauheni menerapkan tiga pola pengoperasian yakni normal, padat dan sangat padat. Untuk pola normal PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni mengoperasikan 56 kapal dengan rata – rata kapasitas penumpang sebanyak 915 orang, kendaraan roda 2 sebanyak 200 unit dan kendaraan roda 4 sebanyak 103 unit. Untuk waktu berlayar atau Sailing Time selama 120 menit, sedangkan waktu berlabuh dan bongkar muat adalah selama 60 menit, apabila sangat padat dipercepat menjadi 40 menit. Sedangkan untuk produksi trip per hari adalah 60 trip, trip rata – rata penumpang per hari adalah 3.526 orang dan trip kendaraan per hari adalah 5.199 unit.

Bandara Radin Inten II dan Bandara Muhammad Taufiq Kiemas merupakan Bandara umum yang melayani Penerbangan komersial di Provinsi Lampung. Bandara Radin Inten II terletak di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang berjarak lebih kurang 28 Km dari Kota Bandar Lampung, sedangkan Bandara Muhammad Taufiq Kiemas terletak di wilayah Kabupaten Pesisir Barat serta Bandara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan yang melayani penerbangan komersil dan penerbangan Khusus Militer. Selain Bandara Umum di Provinsi Lampung juga terdapat 8 (delapan) lokasi Bandara Khusus yang dikelola oleh pihak swasta yaitu :

1. Bandara Khusus PT. Gula Putih Mataram (Lampung Tengah)
2. Bandara Khusus PT. Indo Lampung Perkasa (Tulang Bawang)
3. Bandara Khusus PT. Nusantara Tropical Fruit (TulangBawang)
4. Bandara Khusus Tambling (Suoh, Lampung Barat)

5. Bandara Khusus Sungai Buaya (Mesuji)
6. Bandara khusus Sumber Indah Perkasa (Lampung Tengah)
7. Bandara Khusus Way Kambas (Lampung Timur)
8. Bandara Khusus Sungai Merah (Mesuji)

Dalam rangka pengembangan Bandara sebagai salah satu pintu gerbang lalu lintas udara di Provinsi Lampung, saat ini target perpanjangan landasan sepanjang 2.500 M dan lebar 45 M telah tercapai. Dengan adanya wacana pengembangan Bandara Radin Inten II sebagai Bandara Internasional dan Embarkasi Haji maka akan kembali dilakukan perluasan landasan menjadi 3.500 M x 60 M.

Saat ini Fasilitas landasan Bandara Radin Inten II telah mampu untuk didarati oleh pesawat Boeing 737 kapasitas terbatas dengan fasilitas keselamatan penerbangan yang memadai untuk Bandara yang berfungsi sebagai bandar udara dengan klasifikasi kelas II dan tingkat pelayanan lalu lintas udara ADC. Saat ini Bandara Radin Inten II telah melayani penerbangan rute dari Lampung ke Jakarta selama tahun 2019 rata-rata 20 kali per hari, untuk penerbangan rute dari Lampung ke Batam rata-rata 2 kali penerbangan per-hari, penerbangan rute dari Lampung ke Jogjakarta rata-rata 1 kali per hari, untuk penerbangan rute dari Lampung ke Bandung rata-rata 4 kali per hari dan untuk penerbangan rute dari Lampung ke Palembang rata-rata 3 kali per hari, untuk penerbangan rute dari Lampung ke Surabaya rata-rata 2 kali penerbangan per-hari, untuk penerbangan rute dari Lampung ke Solo rata-rata 1 kali penerbangan per hari, untuk penerbangan rute dari Lampung ke Jambi rata-rata 1 kali penerbangan per hari.

Untuk letak Bandara Muhammad Taufiq Kiemas, posisi geografis Kabupaten Pesisir Barat yang mempunyai aksesibilitas transportasi terbatas, jangkauan dengan transportasi darat sering mendapat gangguan akibat tanah longsor dan jalan rusak, menjadikan Pesisir Barat kurang menarik untuk membangun investasi strategis. Maka salah satu upaya membuka keterisolasian, menggali potensi, meningkatkan iklim usaha sekaligus menarik minat para investor, sebagai sarana mitigasi bencana, mengingat Kabupaten Pesisir Barat rawan longsor dan gempa. Pembangunan bandara

Muhammad Taufiq Kiemas mulai dilaksanakan sejak tahun 2006. Pekerjaan yang dilaksanakan Tahun 2006 yaitu Pembuatan badan landasan (*fill and cut*) ukuran lebar 40 M x panjang 1.200 M dan pembuatan gorong-gorong 50 M, Pada Tahun 2007 dilanjutkan pekerjaan fisik *land clearing* 20.000 M³. Pada tahun 2008 dilanjutkan pekerjaan fisik *land clearing* dengan volume 43.000 M³ sehingga total *land clearing* sebesar 63.000 M³. Pada tahun 2009 dilanjutkan kembali dengan melakukan pekerjaan *land clearing* lanjutan serta pembuatan gorong-gorong. Pada tahun 2013 Bandara Muhammad Taufiq Kiemas tersebut telah diresmikan pengoperasiannya oleh Gubernur Lampung. Bandara Muhammad Taufiq Kiemas telah melayani penerbangan rute dari Tanjung Karang ke Krui selama tahun 2016 rata-rata 2 kali per minggu dan penerbangan rute Krui ke Bengkulu rata-rata 2 kali per minggu. Pada tahun 2017 subsidi operasional penerbangan tidak diperpanjang oleh Ditjen Perhubungan Udara hal ini menyebabkan Bandara Muhammad Taufiq Kiemas tidak ada pelayanan penerbangan sipil reguler.

Adapun, jenis pesawat dan kapasitas kursi yang melayani penerbangan wilayah Lampung adalah sebagai berikut :

- Garuda Ind. : B.737-800 (162 seat), ATR 72-600(70), dan CRJ-100 (96)
- Sriwijaya Air : B. 737-300~400~500~800 NG = 120~189 seat
- Lion Air : B. 737-800 NG (189), B. 737-900 ER (215)
- Express Air: DORNIER 328 (32)
- Wings Air : ATR 72-500 (70)
- Batik Air : AIR BUS
- Nam Air : B 737-500 (120)

Cakupan dan Pembangunan kelistrikan. Berdasarkan data PT. PLN (Persero) UID Lampung konsumsi energi listrik Provinsi Lampung pada bulan Juli Tahun 2021 mencapai sekitar konsumsi 4.213,68 GWh dengan kapasitas terpasang 1.418,55 MW. Pembangunan sektor energi Provinsi Lampung dapat dilihat dari meningkatnya rasio elektrifikasi tahun 2020 sebesar 96,50 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 96,32

persen, namun demikian Pertumbuhan kebutuhan energi listrik di Provinsi Lampung pun cukup besar dengan rata-rata sekitar 10,04% per tahun. Kebutuhan listrik Lampung dengan beban puncak mencapai 1.027,5 MW dan cadangan daya 391,55 MW, sedangkan kemampuan pembangkit listrik di Provinsi Lampung saat ini 968,55 MW sehingga defisit sebesar 350 – 450 MW. Untuk dapat memenuhi kebutuhan listrik ini, provinsi Lampung masih dibantu oleh jaringan trans-interkoneksi Sumatera Selatan yaitu melalui P3BS (Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera), yang merupakan unit bisnis operasional PLN yang bergerak di bidang Transmisi, yang bertugas menginterkoneksi energi Listrik dari pusat pembangkit menuju pusat beban dalam sistem interkoneksi Sumatera.

(sumber : Profil Infrastruktur Lampung- Bappeda Provinsi Lampung 2021)

Gambar 2. 101 Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Lampung



Defisit energi yang dialami oleh Provinsi Lampung ini salah satu penyebabnya yaitu karena pasokan yang dimiliki terus berkurang . Alternatif solusi terhadap permasalahan energi ini adalah dengan menyusun formulasi strategi dan kebijakan yang jelas dan terarah sebagaimana Peraturan

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) berpedoman pada upaya-upaya konservasi dan diversifikasi energi diturunkan dalam naskah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Rancangan Umum Energi Daerah (RUED) merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah daerah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor. Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Rancangan Umum Energi Daerah berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah yang dipublikasikan pada 25 September 2019. Dalam Perda tersebut hasil analisis pemodelan energi dengan 135 skenario RUED menunjukkan jika konsumsi energi Lampung diproyeksikan akan terus bertambah dari 2.082 ribu TOE pada Tahun 2015 menjadi 3.826 ribu TOE pada Tahun 2025 dan 12.106 pada tahun 2050 dengan tiga sektor energi final tertinggi dari 135 sektor industri, transportasi dan sektor rumah tangga.

Gambar 2. 102 Sebaran Pembangkit Listrik di Lampung



Kapasitas pembangkit di Provinsi Lampung terdiri atas 12 pembangkit yang tersebar dengan jenis PLTD sebanyak 6 pembangkit, PLTM 1 pembangkit, PLTP 1 pembangkit, PLTG 1 pembangkit, PLTA 2 Pembangkit dan PLTU 1

Pembangkit. Gambaran Kapasitas pembangkit di provinsi Lampung tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 62 Kapasitas Pembangkit di Provinsi Lampung

NO	NAMA PEMBANGKIT	JENIS	Jenis Bahan Bakar	pemilik	kapasitas terpasang (MW)
1	PLTD Tersebar Lampung	PLTD	HSD	PLN	0,0
2	PLTD Tersebar (SW)Lampung	PLTD	HSD	sewa	0,0
3	PLTM Tersebar Lampung	PLTM	Hydro	PLN	1,1
4	PLTP ULU BELU	PLTP	HSD	PLN	110,0
5	TARAHAN	PLTD	HSD	PLN	23,2
6	TARAHAN (G)	PLTG	HSD	PLN	16,2
7	WAY BESAI	PLTA	Hydro	PLN	90,0
8	BATUTEGI	PLTA	Hydro	PLN	28,6
9	TARAHAN (U)	PLTU	Batubara	PLN	300,0
10	TARAHAN (SW)	PLTD	HSD	sewa	23,2
11	PLTD Tersebar Lampung	PLTD	HSD	PLN	1,2
12	PLTD Tersebar (SW) Lampung	PLTD	HSD	sewa	0,0
Total					593,5

Sumber : RUPTL 2016 – 2025 PT.PLN

Pelayanan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung khususnya program listrik pedesaan yang merupakan program dari pemerintah maupun PT.PLN untuk melistriki masyarakat di pedesaan terus diupayakan dengan menjalankan strategi pengembangan jaringan distribusi eksisting. Namun demikian untuk daerah-daerah yang masih terisolasi dan tidak mungkin melakukan pengembangan jaringan secara grid, maka dikembangkan dengan pembangkit yang diutamakan dari energi baru terbarukan. Selain desa terisolasi, program listrik juga dikembangkan untuk menjangkau desa 3T yaitu Terdepan, Terluar dan Tertinggal, bagi daerah tersebut jika pemanfaatan EBT belum terwujud maka dimungkinkan adanya pengembangan pembangkit berbahan bakar fosil. Selain melistriki desa juga dilakukan program pra-elektifikasi dengan menggunakan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi daerah dan desa-desa yang sulit teraliri listrik.

Rasio Elektrifikasi

Realisasi rasio elektrifikasi rumah tangga di provinsi Lampung pada Tahun 2023 telah mencapai sebesar 99,99% dan capaian rasio desa berlistrik pada Tahun 2023 adalah sebesar 99,73%.

Tabel 2. 63 Capaian Cakupan Pelayanan & Kualitas Infrastruktur Energi dan ketenagalistrikan Di Provinsi Lampung

No	Indikator	2022	2023			Target Akhir RPJMD (2024)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1.	Rasio elektrifikasi rumah tangga	99,99	97,00	99,99	103,08	98.00

Jumlah desa berlistrik di Provinsi Lampung pada Tahun 2023 sebanyak 2.633 dari 2.640 desa di Provinsi Lampung, dimana masih terdapat 7 Desa yang belum teraliri Listrik berada pada 3 Kabupaten antara lain Tanggamus, Pesisir Barat dan Lampung Barat. Sebaran Desa yang belum teraliri listrik antara lain :

Tabel 2. 64 Sebaran Desa Yang Belum Teraliri Listrik

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kendala
1	Tanggamus	Bandar Negeri Semuong	▪ Atar Lebar	Berada pada Kawasan Hutan Lindung Reg. 39 Kota Agung
2	Pesisir Barat	Bengkunat	▪ Way Haru ▪ Bandar Dalam ▪ Siring Gading ▪ Way Tias	Berada pada Kawasan Hutan Lindung Reg. 39 Kota Agung
3	Lampung Barat	Suoh	▪ Sidorejo ▪ Roworejo	Berada pada Kawasan Hutan Lindung Reg. 39 Kota Agung

Sumber : Dinas ESDM, 2023

Lampung terus berupaya melakukan pemerataan pelayanan ketenagalistrikan pada daerah-daerah terpencil khususnya di pulau-pulau terpencil antara lain :

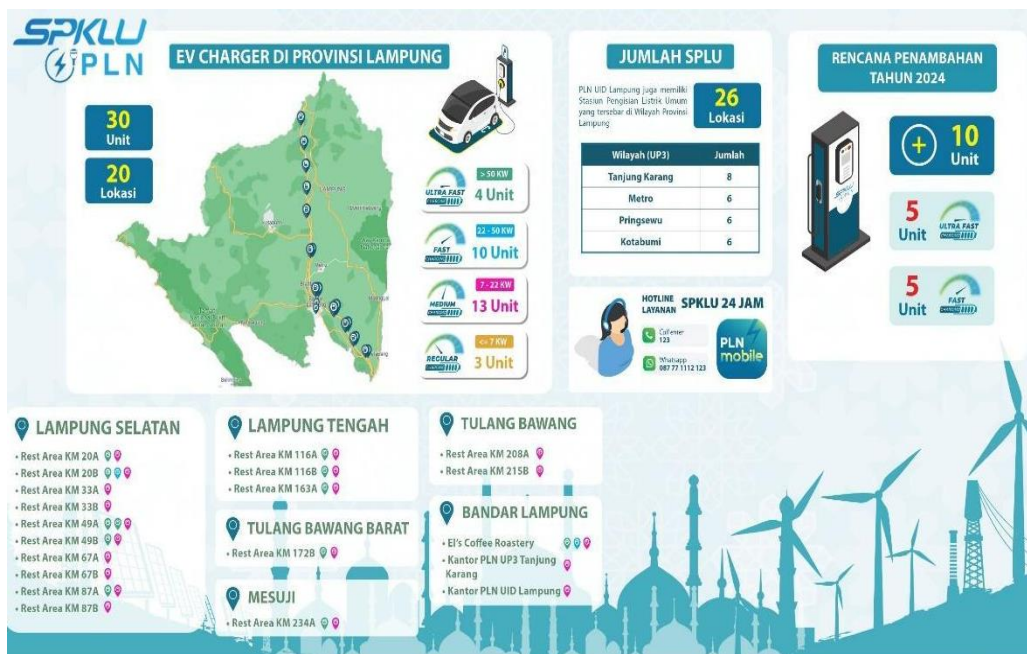
- Pembangunan Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM) :
 - 20 Kv Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat (saat ini dalam perbaikan dan dibackup PLTD)
 - Pulau Rimau dan Pulau Sebuk Kabupaten Lampung Selatan
 - Pulau Tegal
 - Pulau Pahawang dusun Kalayang dilengkapi jaringan tegangan menengah dan Jaringan Tegangan Rendah sepanjang 11,26 serta didukung 4 gardu distribusi kapasitas 100 kVA
- Pulau Sebesi Pembangunan PLTD kapasitas 3 x 100 KV
- Pulau Legundi pembangunan PLTD kapasitas 2 x 50 KV, Pembangunan Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 18 Kilowatt peak (Kwp),

untuk memenuhi kebutuhan energi listrik 66 kepala keluarga (KK) di Siuncal, Desa Pulau Legundi, Kabupaten Pesawaran

Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik

Kendaraan listrik diprediksi akan menjadi salah satu pilihan utama sebagai alat transportasi di Provinsi Lampung. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) telah dibangun di sepanjang ruas Tol Trans Sumatera dari Lampung sampai Sumatera Selatan. PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung saat ini menyiagakan lokasi pengecasan 17 titik lokasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang berada rest area jalan tol JTTS bakauheni-sp Pematang 3 titik lokasi di Kota Bandar Lampung. Juga terdapat 26 Lokasi Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) di 26 Lokasi diantaranya 8 titik di tanjung Karang, 6 titik di Kota Metro, 6 titik di Pringsewu dan 6 titik di Kotabumi Lampung Utara dan pada Tahun 2024 akan menambah 10 Unit SPKLU.

Gambar 2. 103 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik



Daerah Irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, pengelolaan daerah irigasi dibagi menjadi 3 yaitu menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Provinsi Lampung memiliki luas daerah irigasi total seluas 388.631 Ha yang terbagi menjadi 60,1% daerah irigasi kewenangan pemerintah, 6,1% daerah irigasi kewenangan provinsi, dan 33,8% daerah kewenangan irigasi kabupaten.

Tabel 2. 65 Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Di Provinsi Lampung

No.	KEWENANGAN	IRIGASI PERMUKAAN		IRIGASI AIR TANAH		IRIGASI POMPA		IRIGASI RAWA		IRIGASI TAMBAK		TOTAL	
		D.I.	Ha	D.I.	Ha	D.I.	Ha	D.I.	Ha	D.I.	Ha	D.I.	Ha
1	Pemerintah	14	185.333	-	-	-	-	4	48.372	-	-	18	233.705
2	Pemerintah Provinsi	19	21.045	-	-	-	-	1	2.578	-	-	20	23.623
3	Pemerintah Kabupaten/Kota	1.084	126.823	112	2.857	-	-	3	1.623	-	-	1.199	131.303
	JUMLAH	34.084	333.201	112	2.857	-	-	8	52.573	-	-	39.199	388.631

Sumber : Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015

Tabel 2. 66 Persentase Status Kewenangan Daerah Irigasi di Provinsi Lampung

NO.	KEWENANGAN	LUAS (Ha)	PERSENTASE
1	Pemerintah Pusat	233.705	60,1%
2	Pemerintah Provinsi Lampung	23.623	6,1%
3	Pemerintah Kabupaten/Kota	131.303	33,8%
	JUMLAH	388.631	100%

Sumber : Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015

Gambar 2. 104 Peta Pengairan Daerah Irigasi, Rawa (1000-3000 Ha) Dan Lintas Kabupaten Provinsi Lampung



Bendungan

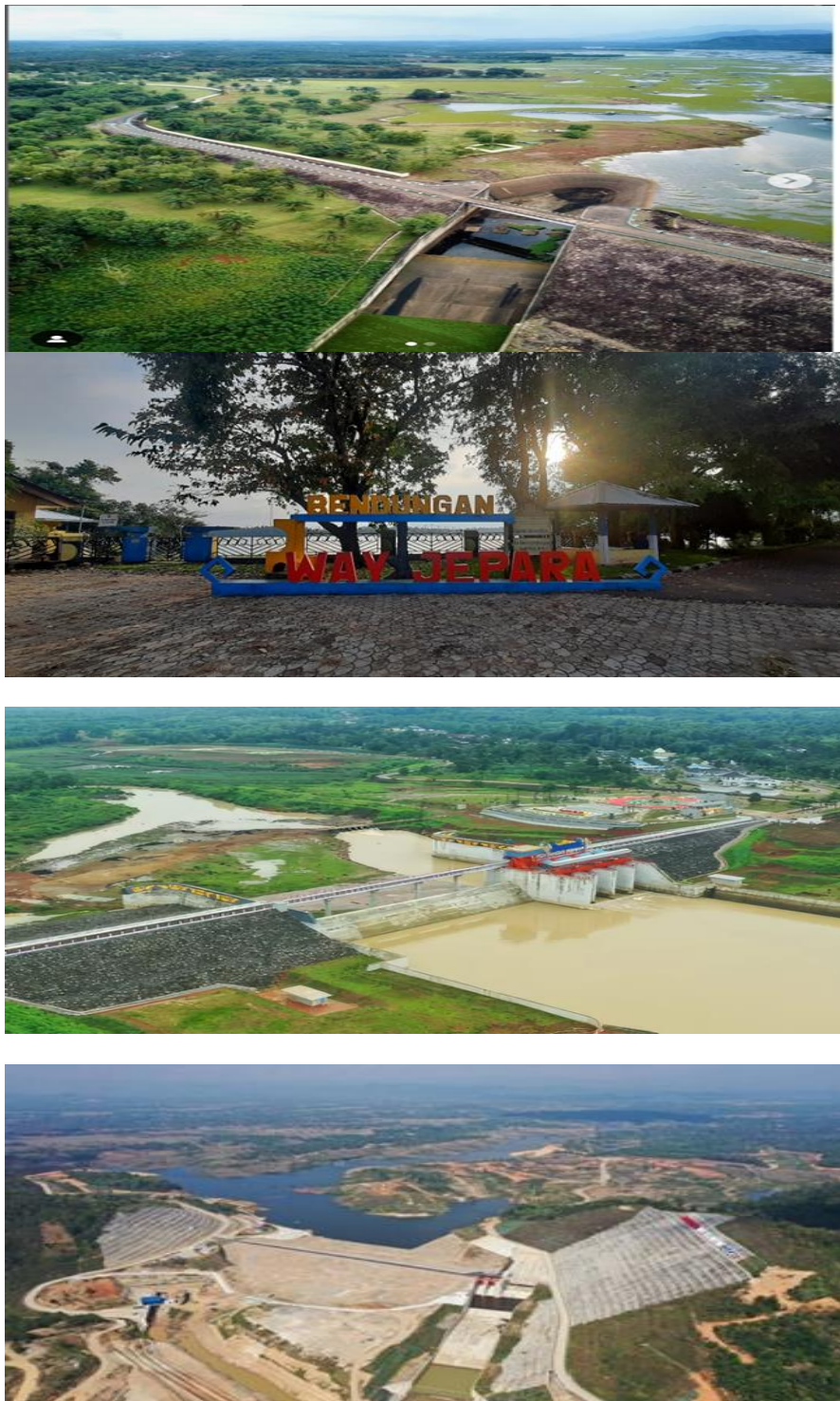
Provinsi Lampung memiliki Infrastruktur sumber daya air yang memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya air, irigasi, pengendalian banjir. Berikut beberapa bendungan/waduk yang ada di Provinsi Lampung:

- **Bendungan Way Rarem,**

Terletak di Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kab. Lampung Utara. Waduk Way Rarem merupakan waduk bagi Bendungan Way Rarem yang mulai dibangun tahun 1980 dan selesai pada tahun 1984. Bendungan ini adalah bendungan batu berinti tanah setinggi 24,0 m. Waduknya berfungsi sebagai waduk irigasi. Luas daerah layanannya pada mulanya adalah 22.972 ha sawah yang terbentang di Kecamatan Abung Timur, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kota Kotabumi. Waduk Way Rarem menggenangi daerah seluas 106,1 ha dan menampung air dari catchment area seluas 385,0 km². Volume tampungan efektif waduk adalah sekitar 56,9 juta m³ dengan kedalaman waduk kira-kira 32m. Konservasi Air, Bendungan Way Rarem di prioritaskan untuk mengairi daerah irigasi Way Rarem seluas 22.000 Ha, di daerah Kecamatan Abung Timur, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik dan Kotabumi. Bendungan Way Rarem mempunyai manfaat sebagai :

- Pengendali Banjir
- Pariwisata
- Selain manfaat diatas bendungan ini digunakan untuk Keramba Jaringan Apung (KJA). Pertumbuhan KJA di Bendungan Way Rarem memang cukup signifikan tetapi mengakibatkan dampak negatif untuk Bendungan.

Gambar 2. 105 Foto Infrastruktur Bendungan di Provinsi Lampung



- **Bendungan Way Jepara**

Merupakan sebuah bendungan yang terletak di Jalan Simpang Danau, Sumberjo, Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Bendungan ini pada awalnya hanya seluas 5 hektar namun pada tahun 1972 diperluas menjadi

200 hektar. Pelaksanaan konstruksi bendungan Way Jepara dimulai pada tahun 1975 dan selesai pada tahun 1978. Bendungan Way Jepara memiliki kedalaman kurang lebih 26 m dengan diameter berkisar 1,9 km. Air Bendungan Way Jepara berasal dari tiga sungai yaitu Way Abar, Way Jejawai, dan Way Jepara, yang berhulu di Register 38 Gunung Balak. Bendungan ini berfungsi untuk melayani keperluan irigasi dalam rangka mendukung produksi pangan di daerah Lampung. Waduk ini direncanakan mampu melayani daerah irigasi seluas 6.651 Ha. Perubahan tata guna lahan mengakibatkan ketersediaan air di waduk Jepara menurun. Rusaknya kawasan Register 38 menjadi penyebab utama terus merosotnya debit air Danau Jepara. Daerah tangkapan air banyak yang diubah menjadi lahan perkebunan, seperti jagung dan kakao. Register 38 Gunung Balak dan Gunung Mas yang menjadi daerah aliran sungai (DAS) Danau Jepara sudah rusak parah. Pada tahun 2008 waduk hanya mampu melayani daerah irigasi seluas 4.126 Ha dengan cara menerapkan pola tanam bergilir. Seiring dengan merosotnya debit air, kini danau ini hanya mampu mengairi 1.800 hektare sawah.

- **Bendungan Batu Tegi**

merupakan salah satu bendungan terbesar se-Asia Tenggara dengan luas 3.560 hektar yang terletak di Pekon Batutegi, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Bendungan yang dibangun sejak tahun 1994, diresmikan pada tahun 2004 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Bendungan Batutegi dibangun dengan memanfaatkan sumber air dari dua sungai yaitu Way Sekampung dan Seputih, yang berjarak kurang lebih sekitar 65 Km dari sebelah hulu bendung Argoguruh atau kurang lebih sekitar 90 Km dari sebelah Barat Daya Kota Bandar Lampung.

Bendungan Batu Tegi didesain memiliki kapasitas tampung air sebesar 690 juta m³ yang saat ini dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi dari 43.585 Ha menjadi 66.573 Ha di Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan dan Kota Metro. Disamping itu, bendungan ini juga dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas terpasang 2 x 14 Megawatt, penyediaan air baku

air bersih untuk Kota Bandar Lampung, Branti (Kec. Natar) dan Kota Metro sebesar 2.250 l/d, pengendalian banjir, perikanan dan wisata.

Bendungan Batuteги merupakan bendungan alternatif bagi pengembangan irigasi Way Sekampung dan memenuhi kebutuhan air irigasi ke Bendung Argoguruh. Elevasi muka air waduk Batuteги sejak mulai beroperasi pada tahun 2004 belum pernah mencapai posisi elevasi normal (+274 m), diduga sebagai akibat semakin menurunnya debit inflow waduk Batuteги pada satu sisi dan di sisi lain terjadi peningkatan debit outflow untuk memenuhi permintaan (demand) air irigasi oleh Bendung Argoguruh. Meningkatnya permintaan air di Bendung Argoguruh akibat menurunnya debit Sungai Sekampung yang berasal dari daerah tangkapan hujan Bendung Argoguruh.

- **Bendungan Way Sekampung**

berlokasi di kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dengan tumpuan kanan Desa Bumi Ratu Kecamatan Pagelaran dan tumpuan kiri Desa Banjarejo Kecamatan Banyumas. Bendungan Way Sekampung merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Provinsi Lampung, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No.03 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.58 tahun 2017. Proses konstruksi Bendungan Way Sekampung dimulai dari tahun 2016 dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 September 2021. Bendungan Way Sekampung memiliki kapasitas tampung 68 juta m³ yang akan dimanfaatkan untuk penyediaan air irigasi seluas 72.707 hektar dengan rincian 55.373 hektare untuk daerah irigasi (DI) Sekampung, dan 17.334 hektar untuk (DI) Rumbia Extension, sehingga meningkatkan intensitas tanam menjadi 270%. Bendungan multifungsi ini juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 2.482 l/det untuk kota Bandar Lampung, Branti dan Kota Metro, PDAM Way Sekampung Pringsewu 487 l/dt, Pembangkit listrik tenaga Mikrohidro (PLTM) dengan daya sebesar 5,4 MW (2 x 2,7 MW), menjadi objek wisata di Kabupaten Pringsewu, serta dengan luas genangan 800 hektar yang juga dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan banjir karena terintegrasi dengan Bendungan Batuteги dan Bendungan Margatiga.

Dengan dibangunnya bendungan Way Sekampung, diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan debit sungai Way Sekampung, meningkatkan fungsi waduk Batutegi serta adanya integrasi dengan bendung Argoguruh, Bendungan Margatiga dan Bendung Gerak Jabung dapat melayani kebutuhan air sampai ke hilir.

- **Bendungan Margatiga**

Bendungan Margatiga membendung aliran Sungai Way Sekampung di daerah hilir untuk dimanfaatkan sebagai pengairan Daerah Irigasi (DI) di Provinsi Lampung seluas 16.588 ha, yaitu DI Jabung kiri seluas 5.638 Ha dan potensi DI Jabung kanan seluas 10.950 Ha. Bendungan Margatiga memiliki kapasitas tampung 42,31 juta m³ dengan luas genangan 2.314 ha dan tinggi bendungan 22,5 m, juga dipersiapkan untuk memasok air baku sebesar 0,8 m³/detik untuk Kabupaten Lampung Timur. Pembangunan Bendungan Margatiga bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan air Sungai Way Sekampung khususnya di bagian hilir, memiliki potensi sebagai konservasi air, penggelontoran air yang mencegah air asin, dan destinasi pariwisata baru di Lampung Timur. Bendungan dengan konstruksi tipe urugan yang memiliki tinggi panjang puncak 321,76 meter, dan lebar puncak 7 meter ini juga diproyeksikan dapat mereduksi banjir sebesar 83,10 m³/detik untuk sebagian wilayah di Bandar Lampung dan Lampung Timur.

- **Bendung Agroguruh**

Bendung ini terletak di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang merupakan pembangunan bendungan hasil dari pelaksanaan kebijakan politik etis Belanda pada bidang irigasi. Bendungan ini dibangun pada 4 Agustus 1935 yang berupa bangunan bendung (*stuwdam*) yang membendung Sungai Way Sekampung. Bangunan utama bendung memiliki panjang 70 m dan tinggi 4 m, dan saluran air induk (primer) yang dibangun pada tahap awal sepanjang 9 km, dan saluran air sekunder sepanjang 75 km (Soerabaijasch_handelsblad, 1937a). Pada awal pembangunan, bendung air Argoguruh mencakup daerah resapan $\pm 2.150 \text{ km}^2$ dan laju alirannya diperkirakan 35 m³/detik, sebagai bangunan bendung yang modern di

masanya, bendung ini memiliki blower dengan lebar 6 m dan dapat dikunci dengan seluncuran roller besi, dilengkapi dengan peredam di bagian atas dengan ketinggian angkat 7 m (De_Indische_courant, 1937; Soerabaijasch_handelsblad, 1937b). Fungsinya untuk menaikkan permukaan air sehingga air mengalir ke saluran irigasi dan petak sawah di Kolonisasi Sukadana, Lampung, yang sekarang mengalir ladang dan persawahan untuk Kota Metro dan Kabupaten di sekitarnya.

- **Embung**

Provinsi Lampung memiliki beberapa embung/danau yang tersebar pada 11 kabupaten di Provinsi Lampung. Kabupaten Way Kanan memiliki jumlah embung terbanyak di Provinsi Lampung yaitu sebanyak 37 embung seluas 3.687.225 m³ dan paling sedikit terdapat pada Kabupaten Pesawaran sebanyak 2 embung dengan luas 223.38 m³. Untuk lebih lengkapnya mengenai persebaran embung/waduk dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 2. 67 Sebaran Lokasi Waduk/Embung di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten	Jumlah Embung/Waduk	Luas (m ³)
1	Lampung Utara	4	659.14
2	Lampung Tengah	12	2.160.064
3	Lampung Timur	3	291.2
4	Lampung Selatan	15	1.928.605,5
5	Pringsewu	11	458.924
6	Tanggamus	3	125.014,25
7	Way Kanan	37	3.687.225
8	Mesuji	7	1.354.794
9	Pesawaran	2	223.38
10	Tulang Bawang	5	678.139
11	Tulang Bawang Barat	18	2.521.837
Total		127	14.088.322,75

Sumber : BBWS Mesuji Sekampung 2024

Gambar 2. 106 Peta Sebaran Lokasi Waduk/Embung di Provinsi Lampung



Sumber : BBWS Mesuji Sekampung 2024

Sanitasi (Air Bersih, Hunian Layak & Kawasan Kumuh). Catatan statistik (sumber : BPS- Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2022) bidang Perumahan, memberi gambaran capaian sebagai berikut:

- Di tahun 2021 sebanyak 91,92% rumah tangga telah memiliki fasilitas MCK secara mandiri; 5,48% menggunakan fasilitas MCK Umum; 0,02% tidak menggunakan MCK; dan masih terdapat 2,57% rumah tangga belum memiliki fasilitas MCK.

- Hingga Tahun 2021, sebanyak 88,14% rumah tangga menggunakan Gas LPG untuk memasak; 11,11% dengan Kayu Bakar; 0,38% dengan listrik; 0,08% dengan minyak tanah; dan 0,28% sisanya dengan alat/media lainnya.
- Disisi kepemilikan rumah, data tahun 2021 menjelaskan bahwa sebanyak 89,40% rumah berstatus milik sendiri; 3,92% mendiami rumah dengan status kontrak/sewa; sisanya 6,68% dengan status kepemilikan lainnya.
- Di tahun 2021 sebanyak 83,89% rumah tangga telah memiliki akses terhadap sanitasi layak. Kondisi tersebut membaik bila dibanding tahun 2017 yang tercatat 52,78%.
- Catatan tahun 2021 juga menunjukkan bahwa sebanyak 80,20% rumah tangga telah memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Kondisi tersebut meningkat signifikan bila dibanding tahun 2017 yang sebesar 35,16%.
- Data Kementerian PUPR (*sumber: Laporan Profil Perumahan di Indonesia, Kemen.PUPR-2021*), data sebaran rumah tangga menurut status kepemilikan rumah tangga di Provinsi Lampung tahun 2019-2021, menunjukkan bahwa s.d. tahun 2021 masih terdapat 227.138 rumah tangga belum memiliki rumah (status “backlog”).

Tabel 2. 68 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2020-2022

Fasilitas Perumahan/ <i>House Facilities</i>	Perkotaan/ <i>Urban</i>			Perdesaan/ <i>Rural</i>			Perkotaan+Perdesaan/ <i>Urban+Rural</i>		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Milik Sendiri/ <i>own</i>	79,28	80,90	83,51	92,14	93,12	93,76	88,39	89,40	90,53
Kontrak, sewa/ <i>Contract, rent</i>	11,61	10,63	7,95	1,09	1,24	1,90	4,16	3,92	3,80
Bebas sewa/ <i>Free use</i>	8,55	8,85	8,41	6,48	5,41	4,09	7,08	6,46	5,45
Dinas/ <i>Official</i>	0,56	0,22	0,14	0,29	0,22	0,26	0,37	0,22	0,22

Sumber : Susenas, 2020-2022

Selanjutnya, data BPS -Statistik Perumahan dan Permukiman Tahun 2019, memberi gambaran bahwa :

- Rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri, sebanyak 45,06% memiliki sertifikat SHM a.n. ART; 19,29% memiliki sertifikat SHM bukan a.n. ART; 1,34% memiliki bersertifikat Non-SHM; dan 26,49% dalam bentuk Surat Bukti Lainnya; serta masih terdapat sekitar 7,28% belum memiliki bukti kepemilikan.
- Dalam rangka memperbaiki kualitas hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang bertempat tinggal di Rumah yang Tidak Layak Huni (RTLH), Pemerintah Provinsi Lampung telah berhasil menangani Rehabilitasi RTLH sejumlah 20.573 Unit dari tahun 2020 hingga tahun 2022, dengan tingkat persentase capaian penanganan RTLH sebesar 97,01%.
- Peningkatan juga terjadi pada pemenuhan akses air minum layak di Provinsi Lampung, bahwa hingga tahun 2022, capaian akses Air Minum Layak sebesar 85,74%
- Hingga tahun 2022 sebesar 84,52% penduduk Provinsi Lampung telah memiliki akses terhadap Sanitasi layak sebesar 84,52%
- Diawal tahun 2020, capaian penanganan Kawasan kumuh Provinsi Lampung sebesar 66,20%, dan di tahun 2022 capaian penanganan Kumuh Provinsi Lampung meningkat sebesar 72,59%, merupakan pencapaian yang sangat baik.

Air Bersih/Air Minum Layak. Di tahun 2022, persentase penduduk Provinsi Lampung yang memiliki akses Air Minum Layak mengalami peningkatan menjadi 71,67% dari 84,55% di Tahun 2015.

Tabel 2. 69 Persentase Capaian Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Provinsi Lampung	Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%
2018	8.405.478	6.024.373	71,67
2019	8.850.763	6.300.230	74,05
2020	8.984,880	7.065.496	79,24
2021	9.096,520	7.077.721	79,47
2022	9.190,082	7.893.260	84,55

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKP-CK) Provinsi Lampung, 2023

Sanitasi Layak. Untuk persentase penduduk yang memiliki akses Sanitasi Layak di Provinsi Lampung dari Tahun 2018 s.d 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada Tahun 2018 hanya 71,67% penduduk Provinsi Lampung memiliki Akses Sanitasi Layak menjadi 82,86% di Tahun 2022.

Tabel 2. 70 Persentase Capaian Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Provinsi Lampung	CAPAIAN AKSES SANITASI	Persentase (%)
2018	8.405.478	6.024.373	71,67
2019	8.850.763	6.300.230	74,05
2020	8.984,880	6.307.313	74,84
2021	9.096,520	6.308.813	74,85
2022	9.190,082	7.722.257	82,86

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, 2023

Kawasan Kumuh. Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di dunia. Berbagai negara miskin, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis. Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia, bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Telaah

tentang permukiman kumuh (*slum*), pada umumnya mencakup tiga segi yaitu, kondisi fisiknya. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. Kedua, kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Ketiga, dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan keseluruhannya.

Kawasan permukiman kumuh dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman. Sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud. Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai. Pada Tahun 2014 seluruh Kota/Kabupaten melakukan kajian mengenai luasan wilayah kumuh di daerah masing-masing yang dilegalkan dengan surat keputusan Bupati/Walikota.

Tabel 2. 71 Luasan Permukiman Kumuh di Provinsi Lampung

NO.	NAMA KABUPATEN/KOTA	NOMOR SK	LUAS SK	CAPAIAN PENANGANAN KUMUH									TOTAL PENANGANAN SK 2014 (Ha)	SISA LUAS KUMUH 2014 (Ha)	TOTAL PENANGANAN SK UPDATE (Ha)	Sisa Luas Kumuh Update SK (Ha)
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
1	WAY KANAN	B.130/III.10-WK/HK/2014	34,36						30,6	1,13		31,70	2,66			
		B.149/V.01-WK/HK/2020	5,38							1,92				1,92	3,46	
		B.236/IV.08-WK/HK/2021	11,44								2,66			2,66	8,78	
2	LAMPUNG BARAT	B/341/KPTS/II.06/2014	39,30						0	0	13,1	13,1	26,20			
		B/70/KPTS/III.03/2022	128,42								0,0			0	128,42	
3	LAMPUNG TENGAH	364.A/KPTS/D.14/2014	44,13					0	13,2	0	0,0	13,2	30,97			
		511/KPTS/D.14/2016	67,77						18,4		0,0			18,4	49,35	
		57/KPTS/B.a.VII.01/2021	49,35								0,0			0,00	49,35	
4	PRINGSEWU	B/280/KPTS/LT.02/2014	46,92			0,0	26,9	7,2	16,8	4,4	-	55,20	0			
		B/545/KPTS/D.03/2020	208,37						16,8	25,9	25,0			67,63	140,74	
		B/361/KPTS/D.03/2022	232,97								25,0			25	207,96	
5	LAMPUNG SELATAN	B.38.A/L.S/HK/2014	55,63						47,4	0,0		47,39	8,24			
		B/335.1/IV.05/HK/2021	70,62											0	70,62	
6	TULANG BAWANG BARAT	B/155/II.09/TBB/2014	79,04					0	26,6	20,2		46,8	32,26			
		B/56/II.04/HK/TUBABA/2021	106,74								20,9			20,9	85,81	
7	METRO	467/KPTS/LD-2/2014	84,94			4,7	77,3	9,0	0	0		90,9	0			
		162/KPTS/B-2/2019	9,00					9,0						9,0	0	
		153/KPTS/B-02/2021	0,00											0	0	
		384/KPTS/D-04/2022	10,05											0	10,05	
8	LAMPUNG UTARA	B/373/25-LU/HK/2014	90,50			2,4	41,9	2,1	26,1	0		72,5	17,99			
		B/386/38-LU/HK/2019	32,77						19,3					19,3	13,43	
		B/33/38-LU/HK/2021	47,73								0,0			0	47,73	
9	LAMPUNG TIMUR	B.190/15/SK/2014	103,68						37,5	3,0		37,491	66,2			
		B.173/07-SK/2021	577,08											0	577	
		B.55/21-SK/2022	710,91											0	711	
10	TANGGAMUS	B.319/19/11/2014	167,75						42,6	0		42,6	125,1			
		B.233/24/08/2021	151,95											0	152,0	
11	TULANG BAWANG	B/316/III.2/HK/TB/2014	244,66				191,0	3,8	0,0	17,9		212,6	32,1			
		B/322/V.I/HK/TB/2020	139,43							3,8	28,0			31,7	107,7	
12	BANDAR LAMPUNG	974/IV.32/HK/2014	266,64			13,5	163	79,3	14,6	0		270,9	0			
		270/IV.01/HK/2019	571,30					79,3	14,6					93,9	477,4	
		165/IV.01/HK/2021	304,67							37				37,5	267,2	
13	PESAWARAN	251.A/IV.01/HK/2014	765,85						531,1	0		531,1	234,8			
		116/IV.12/HK/2021	236,37											0,0	236,4	
14	MESUJI	Tidak Memiliki SK 2014														
		B/217/I.02/HK/MSJ/2019	426,22						12,4	3,62				16,06	410,2	
15	PESISIR BARAT	Tidak Memiliki SK 2014														
		B/138/KPTS/V.01/HK-PSB/2021	110,70											0	110,7	
Total			2023,4									1465,5	576,5			

Keterangan : Data Awal

Sumber : Kompilasi Data, 2023

Luasan kumuh diatas didapatkan dari rekapitulasi SK Kumuh masing-masing Kabupaten dengan total luasan wilayah kumuh sebesar 2.023,4 Hektar. Kota Bandar Lampung menjadi Kota/Kabupaten dengan luasan kumuh paling besar dengan 744,6 hektar dan Kota Metro menjadi Kabupaten/Kota dengan sisa wilayah kumuh paling sedikit yaitu dengan 10,05 hektar.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam membentuk watak serta kepribadian bangsa. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan pemerintah melakukan usaha-usaha pembangunan perumahan dengan melibatkan berbagai pihak baik perorangan maupun badan hukum. Usaha pemerintah tersebut tidak terlepas dari tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Permasalahan yang dihadapi dalam konteks perumahan pada banyak Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung adalah semakin berkembangnya perumahan dan pemukiman yang tidak layak huni. Hal ini disebabkan oleh konsep penataan kota yang umumnya berkembang secara bertahap tetapi tanpa dilandasi perencanaan kota yang menyeluruh dan terpadu. Penataan kota tidak dipersiapkan atau direncanakan untuk menampung pertumbuhan penduduk yang besar dalam waktu yang relatif pendek. Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung menampilkan wajah ganda, di satu sisi terlihat perkembangan pembangunan yang serba mengesankan dalam wujud arsitektur modern di sepanjang tepi jalan utama kota, namun di sisi lain nampak menjamurnya lingkungan tidak layak huni dengan sarana dan prasarana yang sangat tidak memadai untuk mendukung keberlangsungan kehidupan manusia yang hidup di wilayah perkotaan tersebut, sehingga menunjukkan adanya krisis dalam perencanaan perkotaan.

Fenomena pembangunan perkotaan yang tidak terencana dengan baik, pada perkembangan berikutnya berdampak pada munculnya masalah dalam kehidupan masyarakat perkotaan, seperti munculnya kesan bahwa kota menjadi tidak layak huni, mudah terjangkitnya penyakit pada masyarakat di pemukiman tidak layak huni dan munculnya anggapan bahwa pemerintah kota setempat tidak mampu mengelola peningkatan kualitas perumahan yang berkualitas. Terkait dengan permasalahan tersebut, maka Pemerintah melalui instansi terkait memiliki kewenangan strategis dalam membenahi ketimpangan dan tidak tepatnya sasaran perencanaan pembangunan kota, melalui pengaturan dan program-program kegiatan perencanaan kota yang bertujuan untuk menciptakan suasana perkotaan yang berkualitas demi kesejahteraan masyarakat kota.

Tabel 2. 72 Jumlah RTLH Tahun 2023 di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH
1	Lampung Barat	9.547
2	Tanggamus	8.474
3	Lampung Selatan	46
4	Lampung Timur	145

5	Lampung Tengah	109
6	Lampung Utara	16.368
7	Way Kanan	14.682
8	Tulang Bawang	11.704
9	Pesawaran	13.002
10	Pringsewu	1.304
11	Mesuji	2.869
12	Tulang Bawang Barat	3.126
13	Pesisir Barat	577
14	Bandar Lampung	4.080
15	Metro	471
Provinsi Lampung		86.504

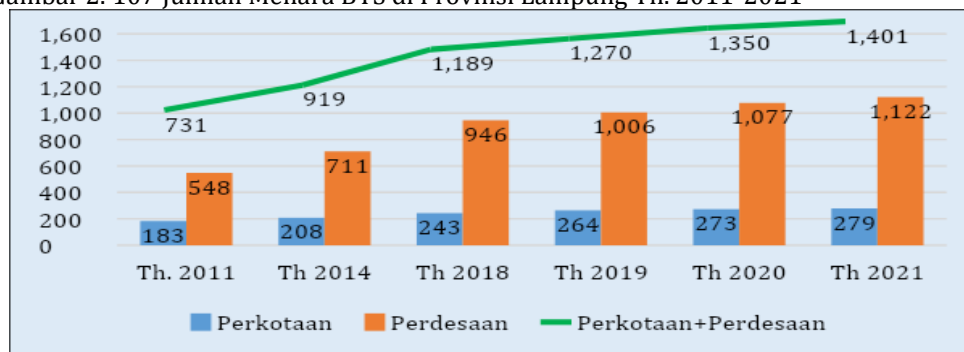
Keterangan : Data Termutakhir

*Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Provinsi Lampung, 2023*

Berdasarkan tabel diatas, jumlah RTLH yang paling besar berada pada Kabupaten Lampung Utara sebesar 16.368 unit, sedangkan jumlah RTLH paling sedikit di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 46 unit.

Cakupan Telekomunikasi. Dokumen RPJPD Prov Lampung Tahun 2005-2025, dijelaskan bahwa fasilitas telekomunikasi yang ada saat awal perencanaan, antara lain : Sambungan Telepon 26 STO; Telepon Selular 3 Operator (Telkomsel, Indosat, dan Neo-N) yang memiliki 144 BTS dengan 282.897 pelanggan; Wartel 2.095 unit; Perusahaan Jasa telepon 43 perusahaan; ORARI 4.994 anggota; KRAP 2.226 Anggota; RSNP 42 Anggota; serta IKR/G 2 penyelenggara.

Gambar 2. 107 Jumlah Menara BTS di Provinsi Lampung Th. 2011-2021



Keterangan : Data Termutakhir

Sumber : BPS Lampung

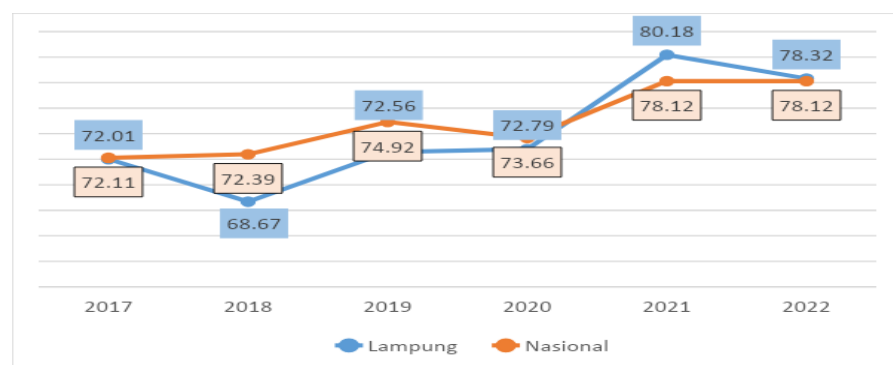
Tahun 2021, (Sumber: www.bps.go.id) jumlah BTS di Lampung berkembang menjadi 1.401 titik. Munculnya BTS tersebut, juga telah memperluas jangkauan sinyal di berbagai pelosok agar masyarakat dapat memanfaatkan akses internet (sumber: www.suara.com/teknologi/2020/11/13/191253). Hal ini memberi gambaran bahwa jumlah pengguna internet di Lampung mencapai 5.269.085 orang atau sekitar 58,48 persen dari penduduk Lampung (berdasar Sensus Penduduk Lampung Tahun 2020, jumlah penduduk Lampung berjumlah 9,01 juta jiwa)

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Kehidupan Demokrasi (IDI). Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung dilihat dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan nasional, capaian IDI Provinsi Lampung lebih baik dari capaian nasional di Tahun 2021. Pada tahun 2021 Provinsi Lampung masuk peringkat 8 besar capaian IDI tertinggi secara Nasional. Capaian indikator Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah 78,32, Dari data yang ada terlihat bahwa capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung tercapai sehingga capaian kinerja telah mencapai 100% dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

Gambar 2. 108 Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2017-2022



Keterangan : Data Awal
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Hal ini terjadi karena masih adanya unjuk rasa dan aksi massa yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, personil Linmas yang terlibat masih kurang dan belum optimalnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung mencatat 301 kasus sengketa tanah selama periode tahun 2015 s.d. 2020. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi konflik tanah antar-masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman. Beberapa tindak kekerasan telah terjadi di Provinsi Lampung. Data menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas yang terjadi di setiap wilayah kabupaten/kota sangat beragam. Menurut data dari Kepolisian Daerah Lampung, jumlah tindak pidana kriminalitas total di Provinsi Lampung selama tahun 2020 sejumlah 8.829 kasus atau rata-rata 735 kasus per bulan.

Kehidupan Beragama (Indeks Kerukunan Beragama) & Kebudayaan (Indeks Kebudayaan).

Masyarakat yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat dilakukan pengukuran pencapaian dengan melihat perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks KUB). Indeks Kerukunan Umat Beragama didapatkan dengan melakukan survey Kerukunan Umat Beragama. Survey ini dilakukan untuk memetakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Tiga dimensi yang digunakan dalam mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama yaitu :

1. Toleransi (sebagai sikap kesediaan menerima dan menghargai)
2. Kesetaraan (pandangan dan sikap hidup terhadap pemeluk agama lain dalam urusan hak dan kewajiban)
3. Kerjasama (bentuk nyata dari hubungan sosial antar pemeluk agama)

Tabel 2. 73 Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama selama 5 (lima) tahun dari tahun 2017-2021

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Lampung	70,00	68,6	73,09	-	72,44
Nasional	72,27	70,90	73,83	67,46	72,39

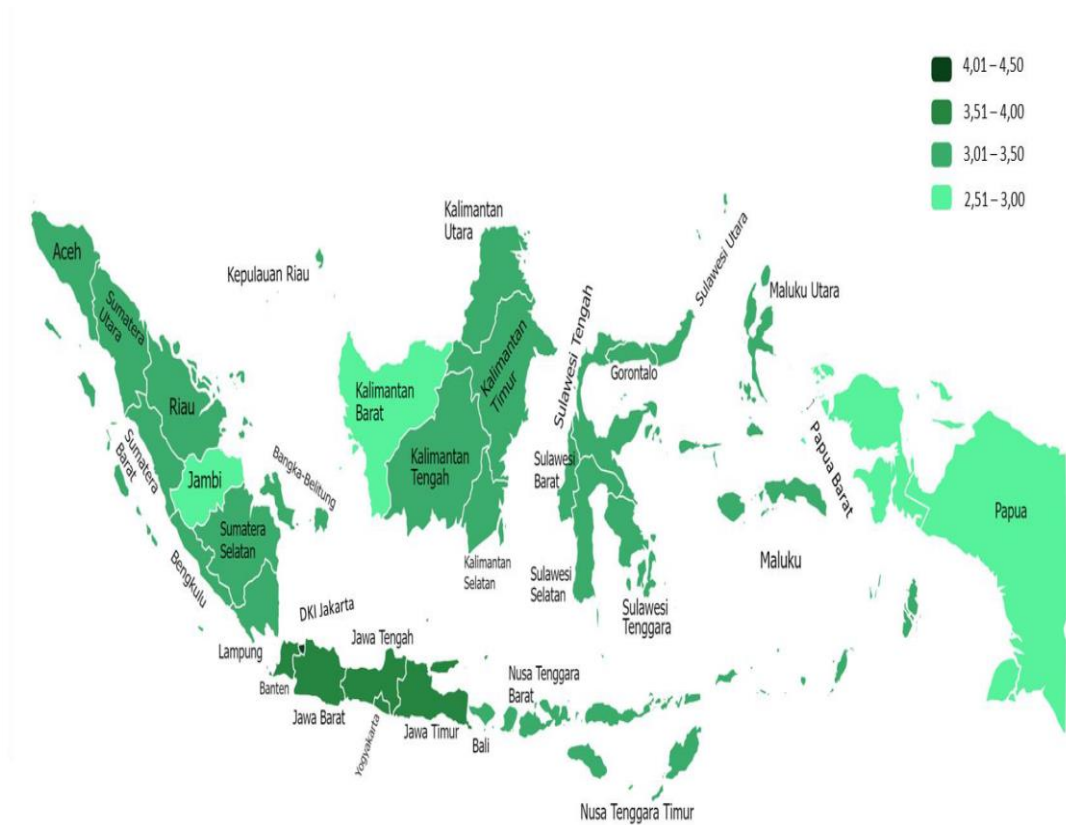
Keterangan : Data Termutakhir

Sumber : Kementerian Agama, 2022

Capaian indeks KUB pada tahun 2015–2019 cukup berfluktuasi, dimana di tahun 2017 indeks KUB sebesar 70,00 dengan indeks KUB nasional lebih tinggi dari Provinsi Lampung yaitu sebesar 72,27. Terdapat penurunan indeks KUB di tahun 2018 menjadi sebesar 68,6. Penurunan indeks KUB juga terjadi di nasional menjadi sebesar 70,90. Penurunan indeks KUB Provinsi Lampung di tahun 2018 dibandingkan dengan indeks KUB di tahun 2017 adalah sebesar 1,4 poin. Indeks KUB Kembali meningkat di tahun 2019 dengan peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 4,49 poin, sehingga indeks KUB menjadi 73,09, namun angka tersebut masih di bawah angka nasional yang sebesar 73,83. Berdasarkan skor kerukunan dalam KUB, indeks KUB dari tahun 2017 sampai 2019 termasuk dalam kategori tinggi.

Indeks Daya Saing Daerah. Indeks daya saing daerah (IDSD) merupakan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Berdasarkan peta sebaran skor IDSD pada gambar xxx, skor IDSD yang lebih dari 3,51 di Tahun 2022 masih terpusat di Pulau Jawa. Sementara hampir semua provinsi di Pulau Sumatera berada pada rentang skor IDSD 3,01 – 3,50.

Gambar 2. 109 Peta Sebaran Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2022



Sumber : Buku Indeks Daya Saing Daerah 2022 oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional

Skor IDSD Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah 3,02, termasuk dalam tiga provinsi dengan skor terendah di Pulau Sumatera. Provinsi Lampung memiliki skor yang cukup tinggi pada pilar institusi, adopsi TIK (determinan kemajuan industri), kesehatan, keterampilan, pasar tenaga kerja, dan dinamisme bisnis. Sementara skor IDSD rendah terdapat pada pilar infrastruktur, pasar produk, sistem keuangan, ukuran pasar dan kapabilitas inovasi. Sementara itu berdasarkan data pada tabel xxx, rata-rata skor IDSD kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih berada di bawah capaian provinsi serta masih terdapat beberapa kabupaten yang belum memiliki skor IDSD.

Tabel 2. 74 Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022

KABUPATEN/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL*	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	1,31	5,00	2,62	3,26
PROVINSI LAMPUNG	4,09	2,34	3,53	3,00	3,83	3,50	2,04	3,08	2,13	1,45	5,00	2,21	3,02
LAMPUNG BARAT	4,18	1,67	3,04	2,30	3,69	2,79	2,65	2,17	2,61	0,33	5,00	0,33	2,56
TANGGAMUS	4,01	1,83	2,93	2,74	3,77	2,71	2,55	1,51	2,56	0,72	5,00	0,07	2,53
LAMPUNG SELATAN	3,79	3,27	3,42	3,08	3,77	2,73	2,19	2,24	2,54	2,00	5,00	1,44	2,96
LAMPUNG TIMUR	3,69	1,48	3,11	2,78	3,92	2,96	1,80	1,82	2,39	1,90	5,00	0,63	2,62
LAMPUNG TENGAH	4,00	1,94	3,24	3,42	3,85	2,82	1,78	2,34	2,96	3,20	5,00	0,62	2,93
LAMPUNG UTARA	-	-	3,02	2,57	3,77	3,06	2,55	2,15	2,43	1,10	5,00	0,84	-
WAY KANAN	4,20	2,39	3,20	2,52	3,77	2,65	2,01	2,45	3,02	0,64	5,00	0,24	2,67
TULANGBAWANG	-	1,60	3,22	2,85	3,85	2,60	1,85	1,93	2,16	1,05	5,00	0,38	-
PESAWARAN	4,02	1,83	3,09	2,40	3,77	3,00	2,16	2,21	1,22	0,75	5,00	0,77	2,52
PRINGSEWU	-	1,59	3,25	2,44	3,85	3,19	3,19	2,81	1,38	0,52	5,00	1,39	-
MESUJI	-	1,63	3,38	2,61	3,69	2,31	1,67	1,67	3,38	0,47	5,00	0,04	-
TULANG BAWANG BARAT	4,05	1,98	3,23	2,60	3,85	2,58	1,83	1,87	1,22	0,52	5,00	0,36	2,42
PESISIR BARAT	-	2,59	2,43	2,21	3,38	2,72	2,27	-	0,87	0,21	5,00	0,52	-
BANDAR LAMPUNG	3,56	2,30	4,64	3,51	3,92	3,85	3,99	3,62	1,69	2,61	5,00	3,75	3,54
METRO	4,53	1,45	3,61	2,22	4,00	4,01	4,66	3,10	2,26	0,29	5,00	3,10	3,19
Keterangan :													
Pilar 1: Institusi				Pilar 5: Kesehatan				Pilar 9: Sistem keuangan					
Pilar 2: Infrastruktur				Pilar 6: Keterampilan				Pilar 10: Ukuran pasar					
Pilar 3: Adopsi TIK				Pilar 7: Pasar produk				Pilar 11: Dinamisme bisnis					
Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro				Pilar 8: Pasar tenaga kerja				Pilar 12: Kapabilitas inovasi					
Sumber : Buku Indeks Daya Saing Daerah 2022 oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional													

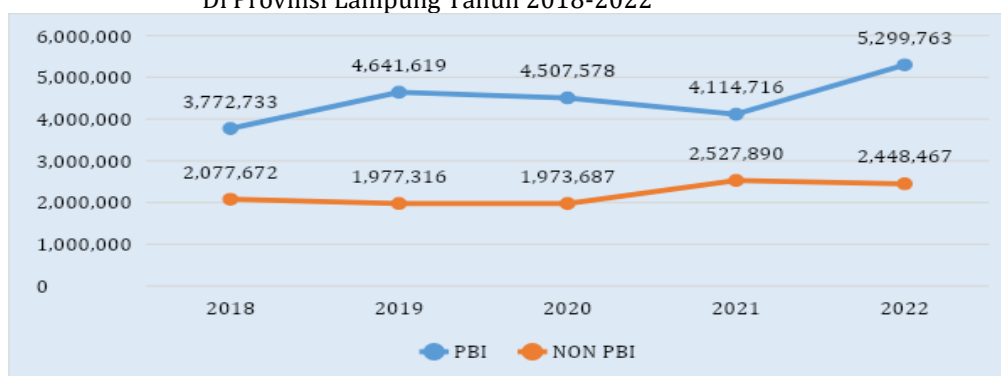
Perlindungan Sosial (Kesehatan & Ketenagakerjaan). Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka Pemerintah secara bertahap mendaftarkan fakir miskin dan orang tidak mampu untuk menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat miskin, Pemerintah memberikan bantuan melalui pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Pemberian bantuan ini didukung oleh peraturan perundang-undangan dan pendanaan serta menggunakan sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Sebelum tahun 2019, selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota juga ikut membiayai jaminan kesehatan penduduk di wilayah masing-masing. Sedangkan sejak tahun 2019 Pemerintah Provinsi Lampung ikut mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi penerimaan pajak rokok sebesar 37,5% dari realisasi yang

diterima oleh masing-masing Provinsi / Kabupaten / Kota. Pembiayaan JKN untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Pemerintah Provinsi Lampung dialokasikan untuk PBI yang berasal dari narapidana, penghuni panti sosial, guru honor murni SMK/SMA serta membantu pembiayaan PBI masyarakat miskin di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Dengan adanya dukungan pembiayaan JKN oleh Pemerintah Provinsi Lampung, maka masyarakat miskin yang menjadi PBI bertambah, sehingga pembiayaan JKN masyarakat miskin di Provinsi Lampung dibiayai melalui APBN (Pemerintah Pusat) dan melalui APBD (Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota). Hal ini mengakibatkan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Provinsi Lampung meningkat hingga mencapai 23,03%, yaitu dari 3.772.733 jiwa pada tahun 2018 menjadi 4.641.619 jiwa pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah PBI, yang disebabkan karena kenaikan premi JKN, sedangkan kuota pajak rokok yang diberikan pada tahun 2020 tidak mengalami kenaikan sehingga Pemerintah Provinsi Lampung menurunkan kuota PBI-nya. Pada tahun 2021 kuota PBI mengalami penurunan hingga 8,72%, hal ini diakibatkan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan penerimaan pajak rokok yang berkurang, sehingga kuota pembiayaan PBI juga berkurang. Akan tetapi seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia, penerimaan pajak rokok kembali mengalami perbaikan, sehingga jumlah kuota PBI di Provinsi Lampung tahun 2022 juga meningkat sejumlah 5.299.763 jiwa. Capaian kuota peserta jaminan kesehatan tahun 2018-2022, baik PBI maupun yang bukan PBI dapat kita lihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2. 110 Trend Jaminan Kesehatan PBI Dan Non PBI Di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

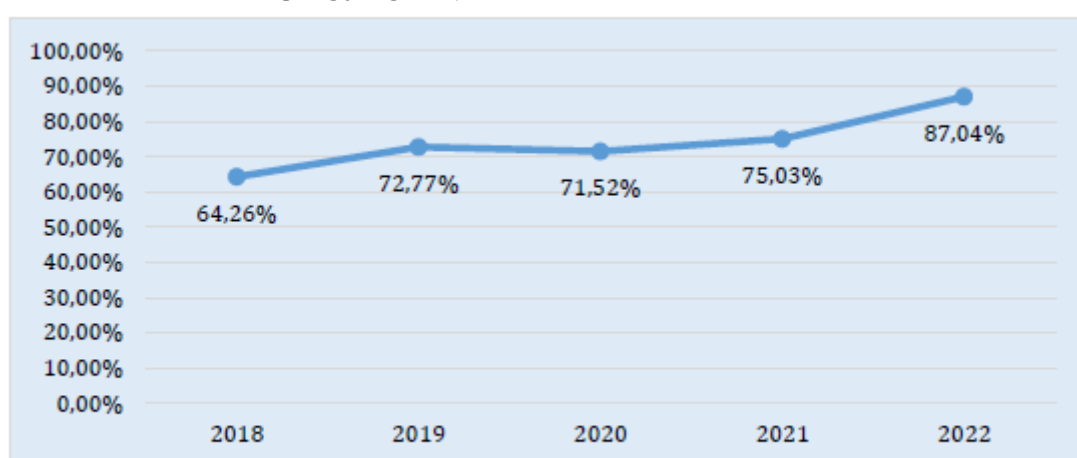


Keterangan : Data Awal

Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, 2022

Dalam rangka mendukung kebijakan jaminan kesehatan sosial secara nasional, capaian Universal Health Coverage (UHC) yang diimplementasikan melalui kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); capaian kuota peserta JKN Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2018 sebanyak 64,26 persen meningkat menjadi 87,04 persen di tahun 2022. Keberhasilan tersebut tidak terlepas partisipasi mandiri dari masyarakat dan dukungan Belanja Pemerintah Daerah kepada masyarakat kurang mampu.

Gambar 2. 111 Trend Persentase Penduduk Provinsi Lampung yang Menjadi Peserta JKN Tahun 2018-2022

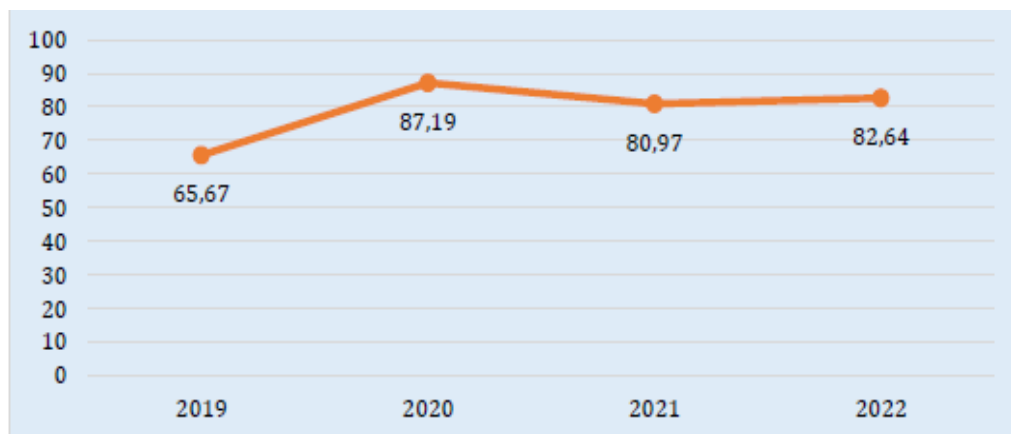


Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, 2022

Keterangan : Data Awal

Capaian indikator persentase tenaga kerja di perusahaan yang mendapat perlindungan ketenagakerjaan pada periode RPJMD tahap IV mencapai angka yang tinggi, yaitu mencapai 82,64% pada tahun 2022. Pada tahun 2019 capaian indikator ini hanya mencapai angka 65%, akan tetapi dengan ditetapkan beberapa regulasi yang mendukung tenaga kerja dalam mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan, maka capaian indikator ini meningkat hingga mencapai angka 87,19 pada tahun 2020. Walaupun terjadi penurunan pada tahun 2021 yaitu hanya mencapai 80,97%, akan tetapi capaian kembali meningkat pada tahun 2022 (82,64%).

Gambar 2. 112 Trend Capaian Tenaga Kerja yang Mendapatkan Perlindungan Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung Tahun 2019-2022



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, 2022

Keterangan : Data Awal

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1 Birokrasi Pemerintahan (Indeks Reformasi Birokrasi).

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik maka pemerintah pusat melaksanakan dan menyusun peta jalan “Reformasi Birokrasi” di seluruh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah; sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang selanjutnya dijabarkan melalui pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2010-14, Tahun 2015-2019, dan Tahun 2020-2024.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap unsur pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan

publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya.

Mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, pemerintah pusat telah menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah pula menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.

Pemerintah Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2015-2020 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Pemberian penilaian Opini WTP diberikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah patuh dan taat terhadap peraturan perundang-Undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2. 75 Nilai Reformasi Birokrasi, Sakip dan Pengelolaan Keuangan Provinsi Lampung Tahun 2016-2022

Tahun	Reformasi Birokrasi	SAKIP	Pengelolaan Keuangan
2016	CC (56,13)*	B (60,33)	WTP
2017	CC (57,63)*	B (61,36)	WTP
2018	CC (58,49)*	B (62,31)	WTP
2019	B (60,05)*	B (63,80)	WTP
2020	CC (52,03)**	B (66,04)	WTP
2021	CC (58,38)**	B (66,88)	WTP
2022	CC (58,92)**	B (67,11)	WTP

Keterangan : Data Awal

2.4.2 Inovasi Daerah (Indeks Inovasi Daerah). Sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Lampung juga melaksanakan inovasi daerah dan melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri. Inovasi daerah tersebut bermuara pada tujuan pemecahan masalah penyelenggaraan pemerintahan secara dengan cara-cara yang solutif, inovatif, efektif dan efisien dengan prinsip kerja cerdas;

guna meningkatkan pelayanan publik. Eskalasi jumlah inovasi daerah secara nasional menunjukkan jumlah yang semakin meningkat dari 576 di tahun 2017 menjadi 25.124 di tahun 2021. Mengutip hasil penilaian Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, tercatat bahwa pada ajang Innovative Government Award (IGA) tahun 2022 Pemerintah Provinsi Lampung telah menyampaikan 149 kegiatan inovatif, dan masuk dalam kategori “Provinsi Sangat Inovatif”. Posisi tersebut memperbaiki hasil pada tahun 2021 dimana Pemerintah Provinsi Lampung berada pada posisi 15 dengan kategori “Provinsi Inovatif” dengan 115 kegiatan inovatif.

2.4.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE merupakan salah satu indikator capaian transformasi tata kelola dalam RPJPN 2025 – 2045. Indikator ini digunakan untuk mewujudkan arah (tujuan) pembangunan yaitu regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif. Untuk wilayah Sumatera, transformasi tata kelola diarahkan melalui kebijakan percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Sesuai Keputusan Menpan RB No. 108 Tahun 2023, Indeks SPBE Provinsi Lampung tahun 2022 yaitu 3,37 dengan predikat Baik. Indeks SPBE Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung berkisar antara nilai 1 hingga 2 dengan predikat kurang hingga cukup yang disajikan pada tabel 1. Provinsi Lampung menduduki posisi ke 3 (tiga) Nasional setelah Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Barat. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mempunyai baseline nilai 2,3 pada tahun 2025 dan sasaran 5,0 pada tahun 2045.

Tabel 2. 76 Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Lampung

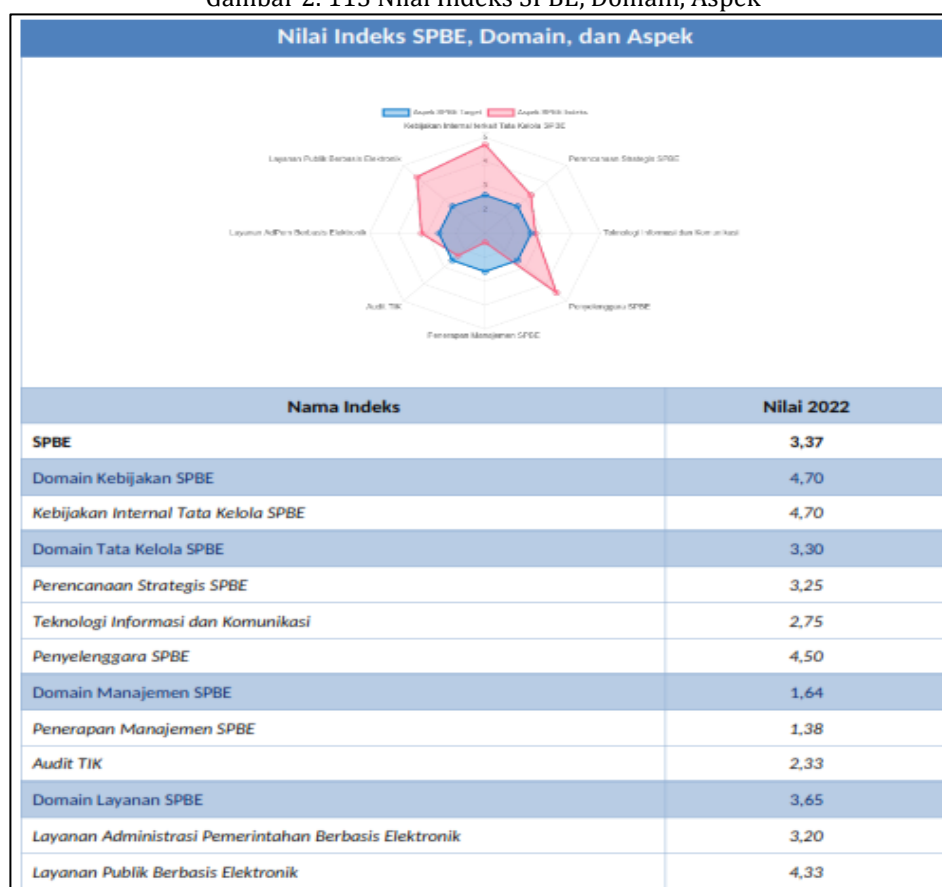
No	Nama Instansi	Indeks 2021*	Predikat	Indeks 2022*	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Lampung	2,76	Baik	3,37	Baik
2.	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	1,67	Kurang	2,10	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Lampung Utara	1,86	Cukup	2,43	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Lampung Barat	1,91	Cukup	2,26	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Tanggamus	1	Kurang	1,60	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Way Kanan	2,10	Cukup	2,24	Cukup
7.	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	1,97	Cukup	2,07	Cukup
8.	Pemerintah Kab. Pringsewu	2,03	Kurang	2,00	Cukup
9.	Pemerintah Kab. Mesuji	1,69	Kurang	2,59	Cukup
10.	Pemerintah Kota Metro	2,14	Cukup	2,49	Cukup
11.	Pemerintah Kota Bandar Lampung	1,2	Kurang	1,50	Kurang
12.	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	-		1,70	Kurang
13.	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	-		2,09	Cukup
14.	Pemerintah Kab. Lampung Timur	-		1,90	Cukup
15.	Pemerintah Kab. Pesawaran	-		1,95	Cukup
16.	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	-		1,94	Cukup

Sumber :

* Keputusan Menpan RB No 1503 Tahun 2021

** Keputusan Menpan RB No. 108 Tahun 2023

Gambar 2. 113 Nilai Indeks SPBE, Domain, Aspek



Sumber : Laporan Kemenpan RB Tahun 2022

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 utamanya melalui transformasi ekonomi memerlukan pengarusutamaan transformasi digital melalui super platform percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital. Arah kebijakan transformasi digital mencakup:

1. **Pengembangan sisi permintaan meliputi percepatan digitalisasi sektor** utamanya melalui dorongan dan dukungan insentif dan subsidi untuk terjadinya digitalisasi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, industri dan *e-commerce*; penguatan pemerintah digital melalui penyiapan infrastruktur pendukung dan SDM SPBE yang dibutuhkan serta pembangunan *smart city* di berbagai kota dan digitalisasi pedesaan (*smart village*) secara bertahap; digitalisasi sistem pembayaran yang inklusif; peningkatan peran UMKM dalam e-commerce domestik dan global; dan percepatan literasi digital masyarakat.
2. **Pengembangan keterpaduan data (*data enablement*)** antara lain melalui pengembangan berbagai pusat data nasional baik pemerintah dan swasta, serta penguatan Satu Data Indonesia (SDI).

Arah kebijakan transformasi digital pemerintahan difokuskan pada transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai, percepatan pembangunan pusat data nasional, percepatan penerapan satu data Indonesia, dan peningkatan keamanan siber.

2.4.4 Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017, bahwa Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, pengaduan serta inovasi. penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya desk evaluation; observasi lapangan; kuesioner; dan/atau wawancara.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah diawasi oleh lembaga negara, yaitu Ombudsman, yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggara pelayanan public yang diselenggarakan negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Hukum Milik Negara (BMHN) serta badan swasta/perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Pada tahun 2023, Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung menyelenggarakan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. 77 Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2023

KAB/KOTA	NILAI	KETERANGAN
Kota Metro	80,85	opini kualitas tinggi
Way Kanan	80,13	opini kualitas tinggi
Lampung Utara	77,97	opini kualitas sedang
Lampung Tengah	77,82	opini kualitas sedang
Tulang Bawang	77,26	opini kualitas sedang
Lampung Selatan	76,63	opini kualitas sedang
Pringsewu	75,71	opini kualitas sedang
Lampung Barat	75,65	opini kualitas sedang
Tanggamus	71,99	opini kualitas sedang
Mesuji	69,83	opini kualitas sedang
Pesawaran	69,45	opini kualitas sedang
Kota Bandar Lampung	68,42	opini kualitas sedang
Lampung Timur	63,78	opini kualitas sedang
Pesisir Barat	61,91	opini kualitas sedang

KAB/KOTA	NILAI	KETERANGAN
Tulang Bawang Barat	59,03	opini kualitas sedang
PROVINSI LAMPUNG	65,58	opini kualitas sedang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Lampung berada pada kualitas sedang dari segi kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk Provinsi Lampung juga. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya:

1. revitalisasi, restrukturisasi dan deregulasi di bidang pelayanan publik;
2. peningkatan profesionalisme pejabat pelayan publik;
3. korporatisasi unit pelayanan publik;
4. pengembangan dan pemanfaatan Elektronik Government (E-Government) bagi instansi pelayanan publik;
5. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; serta
6. pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit penyelenggara pelayanan Masyarakat

2.5 EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025

Dengan segenap kekuatan dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintahnya, pelaksanaan dua dekade pembangunan telah memberikan kemajuan pada beragam aspek. Berbagai strategi dan kebijakan pembangunan yang diimplementasikan dalam empat tahap RPJMD juga telah diarahkan untuk mencapai Visi Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 “LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025”.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan Provinsi Lampung yang diukur melalui capaian indikator makro telah menunjukkan perbaikan dan kemajuan pada aspek sosial dan ekonomi. Meski demikian, bila dibandingkan terhadap rata-rata capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Penduduk pada lingkup regional Pulau Sumatera maupun skala nasional maka capaian pembangunan di Provinsi Lampung masih perlu untuk diakselerasi dan ditingkatkan; sehingga tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan antar waktu dan antar generasi.

Memperhatikan uraian di atas terdapat beberapa pokok-pokok perhatian dalam hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 ; antara lain :

- ❖ Kemajuan aspek perekonomian daerah didukung dengan pertumbuhan positif perekonomian Lampung sepanjang tahun 2005 s.d. 2019 yang menunjukkan bahwa rata-rata LPE Lampung lebih baik dibanding dengan LPE secara Nasional. Namun, situasi perekonomian di tingkat Global dan Nasional di tahun 2020 yang mengalami guncangan akibat bencana Covid-19 juga berdampak terhadap Perekonomian Lampung yang mengalami *shock*, dan menyusut hingga level minus 1,67 persen. Selanjutnya, seiring

dengan upaya pengendalian Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi yang dilaksanakan secara masif oleh pemerintah daerah di sepanjang tahun 2020-2021; perekonomian Lampung di tahun 2021 kembali tumbuh positif menjadi 2,79 persen. Meski demikian, kemampuan pemulihan ekonomi Lampung pasca Covid-19 masih lebih rendah dibanding dengan rata-rata Nasional. Hal tersebut dapat terlihat dari data capaian LPE di tahun 2021-2022, dimana LPE Lampung tercatat sebesar 2,79 persen dan 4,28 persen sementara LPE Nasional tumbuh sebesar 3,69 persen dan 5,31 persen.

- ❖ Tingkat kesejahteraan masyarakat Lampung secara umum telah meningkat dari sekitar Rp. 5 juta di tahun 2005 terus membaik menjadi 45 juta di tahun 2022, atau meningkat sekitar 8 kali lipat dibanding kondisi awal di tahun 2005. Berdasarkan hal tersebut, Pendapatan per kapita penduduk Lampung di tahun 2022 yang sebesar Rp. 45,10 juta (sekitar 3.041 USD) masih berada dalam kelompok *Lower Middle Income*. Kondisi tersebut bukanlah “stempel mutlak”, mengingat bahwa jumlah penduduk Lampung memang banyak. Tantangan terbesar adalah produktivitas dari penduduk. Kesenjangan ekonomi wilayah yang dipresentasikan dengan nilai Indeks Williamson Provinsi Lampung sepanjang periode tahun 2015-2018 cenderung stabil. Nilai indeks pada tahun 2015 sebesar 0,23 meningkat menjadi 0,24 di tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019. Di tahun 2021 cenderung menurun, Nilai indeks pada tahun 2018 sebesar 0,2473 turun menjadi 0,22434 di tahun 2021. Secara teoritis, angka kesenjangan tersebut masih berada pada tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah yang rendah (kurang dari 0,35).
- ❖ Terdapat perhatian terhadap perkembangan struktur Industri Pengolahan yang mencirikan modernisasi atau *industrialized* dalam PDRB Provinsi Lampung. Catatan statistik tahun 2010-2022 telah menunjukkan adanya perubahan dari porsi 17,18 persen di tahun 2010 menjadi 18,55 di tahun 2022. Meskipun terdapat kecenderungan yang meningkat, namun tingkat perubahan tersebut masih dipandang berjalan stagnan dan belum mencirikan kemajuan ekonomi daerah secara modern. Hingga tahun 2022, porsi sektor industri dalam PDRB Provinsi Lampung masih lebih rendah bila dibanding dengan Provinsi Banten (30,47 persen) ataupun Jawa Barat

(42,24 persen) yang merupakan wilayah tetangga dari Provinsi Lampung. Di sisi yang lain; perhatian terhadap LU Pertanian merupakan hal yang penting bagi ekonomi Lampung, mengingat bahwa sektor ini memiliki *share* paling dominan dalam perekonomian Lampung dan menyerap sekitar 40 persen dari total tenaga kerja yang ada di Provinsi Lampung. Hal yang menjadi catatan penting pada sektor ini, adalah bahwa LU pertanian merupakan sektor yang memiliki daya tahan yang cukup tinggi terhadap dampak bencana Covid-19 disaat sektor utama yang lain (LU Industri dan LU Perdagangan) mengalami kontraksi yang cukup dalam di masa Covid-19 pada tahun 2020-2021 yang lalu.

- ❖ Pada aspek sosial, perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode tahun 2005 s.d. 2022 telah memberi gambaran adanya penurunan yang signifikan. Data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2005 persentase penduduk miskin sebesar 21,42 persen. Keadaan tersebut semakin menurun menjadi 11,44 persen di tahun 2022. Demikian pula dari sisi jumlah penduduk miskin, di tahun 2005 jumlah penduduk miskin sekitar 1,572 juta jiwa maka pada tahun 2022 jumlah tersebut bergerak menjadi 995,59 ribu jiwa; atau telah berkurang sekitar 576 ribu jiwa pada kurun waktu 2005 hingga 2022. Celah (gap) antara Persentase Penduduk Miskin dengan tingkat rata-rata Nasional secara umum menunjukkan tren yang semakin menurun; dari 4,73 poin di tahun 2005 menjadi 1,87 poin di tahun 2022.
- ❖ Kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2005 s.d. 2022 yang digambarkan melalui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan bahwa capaian IPM Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan. Predikat IPM Lampung tahun 2005 s.d. 2021 yang semula dalam kategori SEDANG meningkat menjadi kategori IPM yang TINGGI di tahun 2022. Sepanjang tahun 2010 s.d. tahun 2022 juga telah menunjukkan perbaikan. Dari sisi kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2010 yang berada pada level 68,91 tahun meningkat menjadi 70,99 di tahun 2022. Di sisi pendidikan, angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 7,26 tahun (di tahun 2010) menjadi 8,18 tahun pada 2022. Selanjutnya, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) juga semakin membaik

dari 10,88 tahun (di tahun 2010) menjadi 12,74 tahun pada 2022. Demikian juga pada sisi kemampuan ekonomi, rata-rata Pengeluaran Penduduk meningkat dari Rp. 7,964 juta/org/tahun (di tahun 2010) menjadi Rp. 10,336 juta/orang/tahun di tahun 2022. Meskipun telah meningkat dan membaik, tentunya tak cukup membuat Lampung berpuas diri. SDM Lampung harus terus maju untuk mengantisipasi tantangan masa depan, tidak hanya terbatas pada kualitasnya; namun juga bagaimana SDM dapat beraktualisasi dan berkontribusi dalam kegiatan pembangunan, sehingga menjadi produktif.

- ❖ Pembangunan Infrastruktur Daerah telah mengalami kemajuan. Sampai dengan tahun 2022, panjang Jalan Nasional di Provinsi Lampung tercatat sepanjang 1.296,610 km dan 94,81 persen dalam kondisi mantap. Sementara, panjang jalan yang merupakan kewenangan provinsi sepanjang 1.693,273 km dengan 76,850 persen dalam kondisi mantap. Cakupan Listrik telah dapat mengalir 99,9 persen rumah tangga. Kapasitas Daya Listrik juga semakin meningkat dan tercatat surplus. Jumlah BTS yang mendukung koneksi internet dan jalur komunikasi terus bertambah. Fasilitas pelabuhan, bandara dan jalur kereta api yang melayani transportasi barang maupun penumpang juga semakin modern. Bendungan modern juga terus bertambah. Penyelesaian Jalur Tol Trans Sumatera (JTTS) di Lampung terealisasi dengan cepat, ditengah banyak terjadinya hambatan di daerah provinsi yang lain. Ke depan, kualitas infrastruktur dan integrasi antar jaringan infrastruktur konektivitas sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya logistik.
- ❖ Potret capaian pada aspek pemerintahan dan pelayanan publik memberi gambaran bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan bebas KKN. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture set* harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya. Melalui mekanisme penilaian *Monitoring Center Prevention* (MCP) yang

merupakan hasil Kerjasama antara KPK, BPKP dan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa telah terdapat perbaikan pengelolaan pemerintahan pada aspek Perencanaan dan penganggaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Perijinan; Pengawasan APIP; Manajemen ASN; Optimalisasi Pajak dan Manajemen Aset Daerah; telah memberikan gambaran bahwa nilai MCP di tahun 2022 tercatat sebesar 93,53 yang berarti telah melampaui nilai MCP di tahun 2018 yang sebesar 92,00. Selanjutnya, implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menunjukkan hasil yang menuju pada adanya perbaikan dari 56,13 poin di tahun 2016 menjadi 58,92 di tahun 2022 yang masih berada pada predikat CC. Lebih lanjut, kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, hasil publikasi Ombudsman di tahun 2022 memberi gambaran bahwa Provinsi Lampung berada pada kategori C dengan predikat “kualitas Sedang”. Ke depan, percepatan terhadap kemajuan Reformasi Birokrasi kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Provinsi Lampung tentunya masih memerlukan upaya lanjutan yang lebih besar guna melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih sehingga manfaat pembangunan semakin dapat dirasakan oleh masyarakat.

- ❖ Pada aspek lingkungan, Perubahan Iklim merupakan isu yang sedang gencar untuk diperjuangkan bersama di seluruh negara. Perubahan iklim disebabkan oleh pemanasan global/*global warming* yang terjadi karena konsentrasi emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer semakin tinggi. Emisi GRK menyebabkan *global warming* dan mendorong terjadinya perubahan-perubahan iklim sehingga membawa banyak dampak negatif yang ditandai dengan naiknya suhu permukaan bumi. Kondisi ini tentu akan menimbulkan ketidakseimbangan pada alam dan ekosistem. Komitmen penurunan emisi GRK sejalan dengan dengan tujuan SDG's yang juga diadopsi oleh pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung. Melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 A tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi

Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 17,159 jt ton CO₂e atau sebesar 38,59 % dari total *Business As Usual*/BAU Provinsi Lampung Tahun 2020 sebesar 27,9 jt ton CO₂e. Terbaru, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Lampung juga telah melakukan Kaji Ulang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) dan telah menentukan estimasi penurunan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 8,40% berdasarkan *Business As Usual* (BAU) *baseline* tahun 2030. Dengan target penurunan sebesar 8,40% pada tahun 2030, maka besar emisi yang direncanakan dapat diturunkan pada tahun 2030 yakni sebesar 2.320.958,83 ton CO₂e dari skenario BAU *baseline* 27.629.786,24 ton CO₂e. Demikian pula dengan angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung yang tercatat sebesar 69,10 di tahun 2022 dalam kategori “sedang”. Secara komposit, masih membutuhkan perhatian terhadap komponen Kualitas Air dan Kualitas Lahan, sebagai pendukung kebutuhan dasar dan keragaman hayati di daerah.

Secara keseluruhan, dapat diuraikan bahwa keberhasilan pembangunan Provinsi Lampung pada periode tahun 2005 s.d. 2022 yang diukur melalui capaian indikator makro telah menunjukkan perbaikan dan kemajuan pada aspek sosial dan ekonomi. Meski demikian, bila dibandingkan terhadap rata-rata capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Penduduk pada lingkup regional Pulau Sumatera maupun skala Nasional maka capaian pembangunan di Provinsi Lampung masih perlu untuk diakselerasi dan ditingkatkan; sehingga tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mewujudkan pembangunan. Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan antar waktu dan antar generasi.

2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan per Lima Tahun

Jumlah Penduduk Lampung Tahun 2045 diproyeksikan 11,076 juta jiwa. Publikasi BPS dalam buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 menjelaskan bahwa jumlah penduduk Lampung di tahun 2025 menjelaskan bahwa jumlah penduduk Lampung di tahun 2025 diproyeksikan sebanyak 9,52 juta jiwa dan menyentuh angka 10 juta jiwa pada tahun 2030, dan berjumlah 10,42 juta orang pada akhir periode proyeksi tahun 2035, serta bertambah menjadi 11,076 juta jiwa di tahun 2045.

Tabel 2. 78 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Lampung Tahun 2020-2050

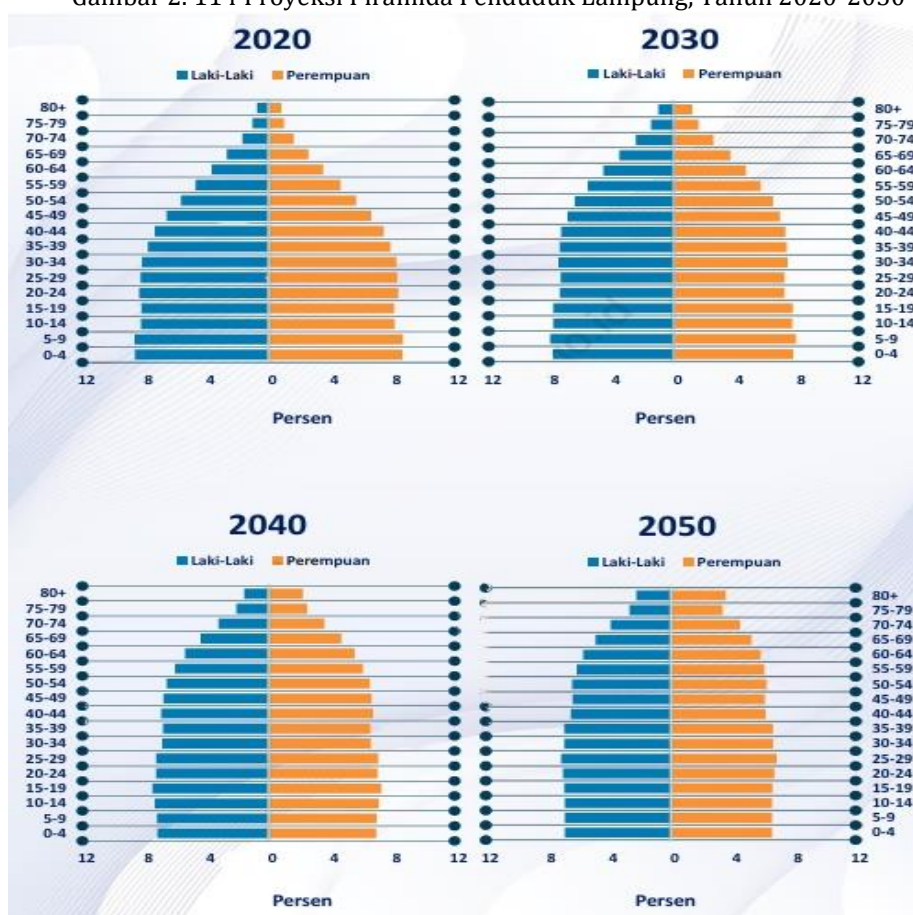
Parameter	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PENDUDUK							
Laki-Laki (000)	4 605,04	4 857,47	5 075,33	5 260,26	5 416,02	5 541,92	5 636,63
Perempuan (000)	4 379,84	4 665,44	4 925,14	5 157,03	5 361,46	5 534,96	5 673,64
Total (000)	8 984,88	9 522,91	10 000,47	10 417,29	10 777,48	11 076,88	11 310,28
Komposisi Umur (%)							
0-14	25,42	24,64	23,46	22,43	21,34	20,60	20,13
15-64	68,56	68,13	67,84	67,24	66,60	65,66	64,74
65+	6,02	7,23	8,70	10,33	12,06	13,74	15,13
Dependency Ratio (%)	45,87	46,77	47,41	48,72	50,16	52,29	54,46
FERTILITAS							
Total Fertility Rate (TFR)	2,28	2,23	2,17	2,13	2,08	2,05	2,01
Crude Birth Rate (CBR)	18,20	16,81	15,59	14,80	14,24	13,90	13,52
Jumlah Kelahiran (000)	163,48	160,13	155,94	154,21	153,43	153,98	152,90
MORTALITAS							
E ₀ Laki-Laki	71,42	71,77	72,03	72,68	73,06	73,24	73,31
E ₀ Perempuan	75,61	76,65	77,35	78,24	78,80	79,10	79,26
E ₀ Laki-Laki + Perempuan	73,46	74,15	74,62	75,39	75,86	76,10	76,21
IMR Laki-Laki	19,18	15,94	13,73	11,45	10,25	9,63	9,35
IMR Perempuan	13,63	11,42	9,91	8,43	7,66	7,26	7,08
IMR Laki-Laki + Perempuan	16,47	13,73	11,86	9,98	8,98	8,48	8,24
Crude Death Rate (CDR)	5,68	6,09	6,72	7,30	8,10	9,03	9,98
Jumlah Kematian (000)	51,01	57,95	67,22	76,01	87,26	100,07	112,90
MIGRASI							
Net Migration Rate	0,00	- 0,01	- 0,01	- 0,02	- 0,02	- 0,03	- 0,03

Besarnya jumlah penduduk Provinsi Lampung menggambarkan bahwa Lampung memiliki potensi yang cukup besar terutama pada jumlah tenaga kerja, sumber daya manusia (SDM) dan potensi pasar domestik bagi

perekonomian. Pada sisi yang lain, besarnya jumlah penduduk juga menjadi tantangan tersendiri terutama pada penciptaan lapangan kerja, produktivitas, pembangunan kualitas SDM penduduk yang lebih sehat, terdidik dan berdaya saing. Hal lainnya terkait juga dengan penyediaan kebutuhan pangan dan energi, penyediaan lahan permukiman, kualitas lingkungan yang sehat dan nyaman, penyediaan fasilitas layanan dasar bagi penduduk, serta pembagian “kue” ekonomi yang bermuara pada pendapatan per kapita penduduk.

Perubahan struktur penduduk pada dasarnya adalah proses alamiah demografi. Setiap wilayah pasti mengalaminya. Perbedaannya hanya pada masalah waktu dan kecepatannya. Indonesia dan beberapa negara lain, seperti Malaysia, Mongolia, Thailand, Vietnam diperkirakan mengalami ageing population mulai tahun 2040. Di Indonesia, bonus demografi diperkirakan berakhir pada tahun 2036. Ketika bonus demografi usai, jumlah penduduk berusia lanjut (lansia) akan bertambah dan Indonesia mengalami fase penuaan penduduk.

Gambar 2. 114 Proyeksi Piramida Penduduk Lampung, Tahun 2020-2050



Tabel 2. 79 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Lampung 2025 - 2045

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (per 1000)																				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Lampung Barat	319,30	322,59	325,77	328,86	331,85	334,74	337,55	340,28	342,94	345,52	348,04	350,96	353,21	355,48	357,76	360,78	362,48	364,18	365,90	367,62	370,80
2	Tanggamus	678,02	685,54	692,88	700,03	707,01	713,82	720,47	726,95	733,29	739,48	745,53	747,52	752,32	757,15	762,01	768,43	772,05	775,69	779,35	783,02	789,78
3	Lampung Selatan	1.133,39	1.147,20	1.160,72	1.173,95	1.186,89	1.199,54	1.211,96	1.224,14	1.236,14	1.247,94	1.259,56	1.252,60	1.260,64	1.268,73	1.276,88	1.287,64	1.293,71	1.299,80	1.305,92	1.312,08	1.323,41
4	Lampung Timur	1.164,70	1.175,37	1.185,74	1.195,82	1.205,62	1.215,12	1.224,36	1.233,37	1.242,11	1.250,58	1.258,78	1.278,81	1.287,02	1.295,28	1.303,60	1.314,58	1.320,78	1.327,00	1.333,25	1.339,53	1.351,10
5	Lampung Tengah	1.541,43	1.557,29	1.572,66	1.587,53	1.601,85	1.615,63	1.628,93	1.641,78	1.654,18	1.666,11	1.677,63	1.694,50	1.705,38	1.716,33	1.727,35	1.741,91	1.750,12	1.758,36	1.766,65	1.774,97	1.790,30
6	Lampung Utara	665,76	671,49	677,04	682,43	687,65	692,71	697,63	702,43	707,11	711,65	716,09	730,22	734,91	739,63	744,38	750,65	754,19	757,74	761,31	764,90	771,50
7	Way Kanan	503,31	509,25	515,06	520,75	526,31	531,76	537,11	542,39	547,59	552,73	557,81	555,92	559,49	563,08	566,70	571,48	574,17	576,87	579,59	582,32	587,35
8	Tulang Bawang	455,40	460,34	465,17	469,88	474,46	478,94	483,31	487,60	491,81	495,93	499,95	501,67	504,89	508,13	511,39	515,70	518,13	520,57	523,03	525,49	530,03
9	Pesawaran	506,26	512,16	518,00	523,75	529,44	535,04	540,60	546,09	551,54	556,95	562,32	560,12	563,71	567,33	570,98	575,79	578,50	581,22	583,96	586,71	591,78
10	Pringsewu	429,74	434,74	439,68	444,51	449,27	453,93	458,50	463,00	467,40	471,73	475,97	474,93	477,98	481,05	484,14	488,22	490,52	492,83	495,15	497,49	501,78
11	Mesuji	245,21	248,75	252,21	255,60	258,91	262,15	265,32	268,41	271,44	274,42	277,34	271,80	273,55	275,30	277,07	279,41	280,72	282,04	283,37	284,71	287,17
12	Tulang Bawang Barat	301,79	304,76	307,62	310,39	313,03	315,60	318,07	320,47	322,81	325,09	327,34	331,30	333,43	335,57	337,72	340,57	342,17	343,78	345,40	347,03	350,03
13	Pesisir Barat	174,86	177,39	179,91	182,40	184,89	187,36	189,81	192,27	194,73	197,19	199,63	194,74	195,99	197,25	198,52	200,19	201,13	202,08	203,03	203,99	205,75
14	Bandar Lampung	1.226,21	1.237,63	1.248,53	1.258,92	1.268,79	1.278,14	1.287,00	1.295,44	1.303,45	1.311,03	1.318,21	1.343,55	1.352,17	1.360,85	1.369,59	1.381,13	1.387,64	1.394,18	1.400,75	1.407,34	1.419,50
15	Metro	177,52	179,31	181,05	182,74	184,39	185,98	187,52	188,99	190,42	191,79	193,09	195,01	196,26	197,52	198,79	200,46	201,41	202,35	203,31	204,27	206,03
Provinsi Lampung		9.522,91	9.623,79	9.722,03	9.817,55	9.910,36	10.000,47	10.088,13	10.173,62	10.256,94	10.338,14	10.417,29	10.484,17	10.551,49	10.619,23	10.687,42	10.777,48	10.828,25	10.879,27	10.930,52	10.982,01	11.076,88

Sumber: Data Diolah 2023

2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana per Lima Tahun

1. Energi

Rencana sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Pentingnya energi listrik untuk menunjang kebutuhan sehari-hari tiap penduduk membuat pentingnya untuk memproyeksikan kebutuhan listrik tiap individu agar dapat tercukupi dalam masa mendatang. Pemerataan pelayanan terhadap kebutuhan listrik tersebut perlu diusahakan semaksimal mungkin mengingat salah satu indikator berkembangnya suatu kota atau wilayah adalah terpenuhinya kebutuhan akan penerangan/listrik. Jenis pembangkit yang disediakan untuk tiap kawasan tidak harus sama, melainkan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, kemungkinan pencapaian hasil yang maksimal dengan biaya yang terjangkau. Hal tersebut dapat dilakukan, mengingat telah terdapat berbagai penelitian mengenai berbagai macam sumber energi yang dapat digunakan untuk mengantisipasi penyediaan listrik.

Adapun rencana sistem jaringan energi di Provinsi Lampung meliputi:

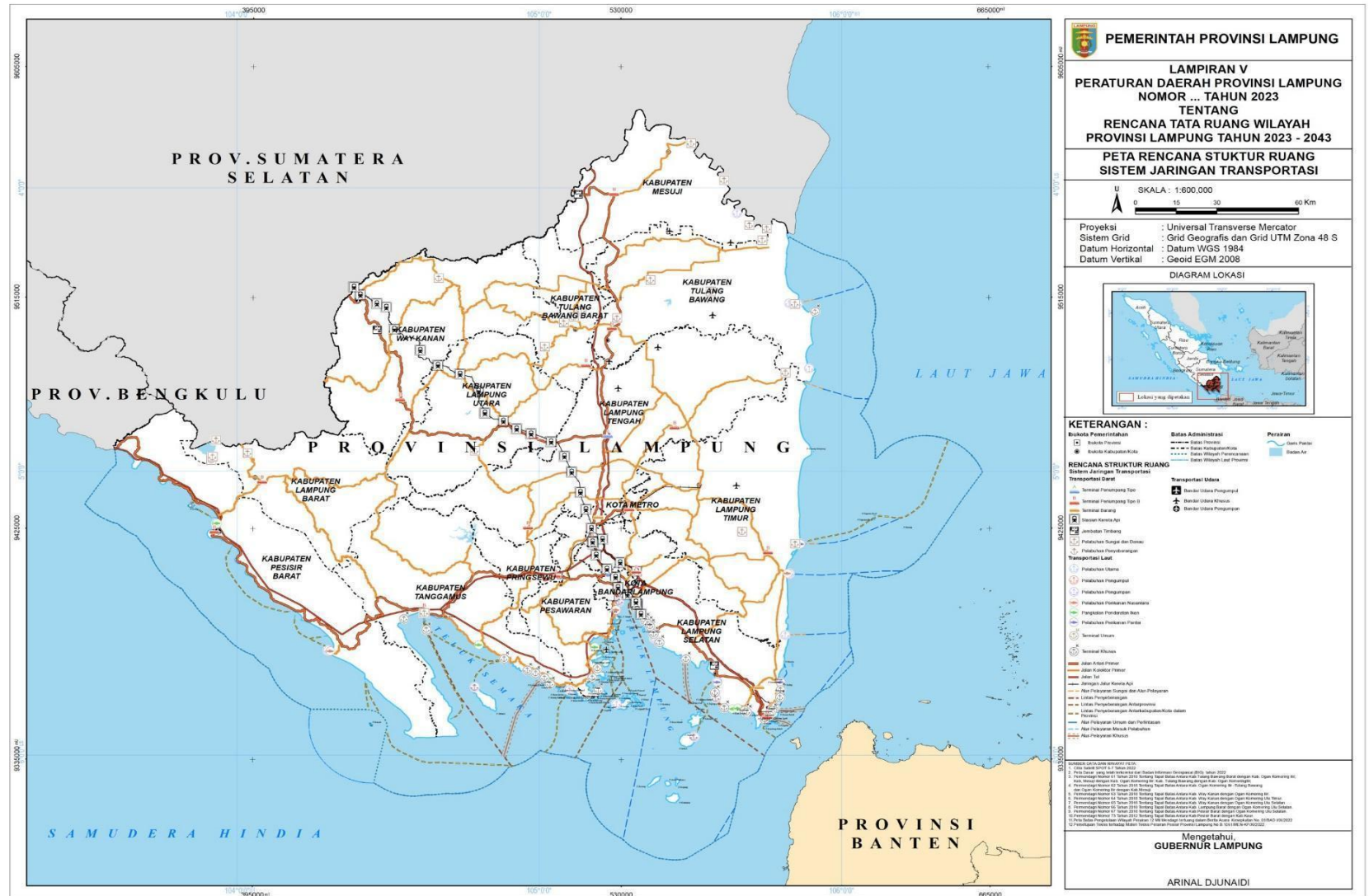
a. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau dibawah permukaan tanah yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung.

Pengembangan jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik meliputi:

- Koridor Labuhan Maringgai - Tanjung Pakis di Lampung Timur;
- Koridor Lampung Barat - Pulau Pisang di Kabupaten Pesisir Barat;
- Koridor Zona Ekonomi Eksklusif - Laut Jawa di Perairan;
- Legundi - Punduh Pidada di Kabupaten Pesawaran;
- Pahawang di Kabupaten Pesawaran; dan
- Pekon Doh Sawang Balak di Perairan.

Gambar 2. 115 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi



b. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:

a) infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meliputi:

1. PLTA Besai Unit 1 di Kabupaten Lampung Barat;
2. PLTA Besai Unit 2 di Kabupaten Lampung Barat;
3. PLTA Batu Tegi Unit 1 di Kabupaten Tanggamus;
4. PLTA Batu Tegi Unit 2 di Kabupaten Tanggamus; dan
5. PLTA Semangka di Kabupaten Tanggamus.

b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:

1. PLTU Tarahan Unit 3 di Kabupaten Lampung Selatan;
2. PLTU Tarahan Unit 4 di Kabupaten Lampung Selatan;
3. PLTU Sebalang Unit 1 di Kabupaten Lampung Selatan;
4. PLTU Sebalang Unit 2 di Kabupaten Lampung Selatan;
5. PLTU Gunung Sugih di Kabupaten Lampung Tengah;
6. PLTU Gunung Agung di Kabupaten Lampung Tengah; dan
7. PLTU Pelabuhan Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan.

c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) meliputi:

1. PLTP Ulu Belu unit 1 di Kabupaten Tanggamus;
2. PLTP Ulu Belu unit 2 di Kabupaten Tanggamus;
3. PLTP Ulu Belu unit 3 di Kabupaten Tanggamus;
4. PLTP Ulu Belu unit 4 di Kabupaten Tanggamus;
5. Rencana PLTP Gunung Rajabasa di Kabupaten Lampung Selatan;
6. Rencana PLTP Suoh Sekincau di Kabupaten Lampung Barat; dan
7. Rencana PLTP Way Ratai di Kabupaten Pesawaran.

d. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) meliputi:

1. PLTD Pulau Legundi unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 di Kabupaten Pesawaran;
 2. Pulau Pahawang di Kabupaten Pesawaran;
 3. PLTD Kota Agung di Kabupaten Tanggamus;
 4. PLTD Pulau Pisang unit 01, unit 02, unit 03, unit 04, unit 05 di Kabupaten Pesisir Barat;
 5. PLTD Pulau Sebesi unit 01, unit 02, unit 03, unit 04, unit 05 di Kabupaten Lampung Selatan;
 6. PLTD Pulau Tabuan unit 01, unit 03, unit 04, unit 05, unit 06, unit 07 di Kabupaten Tanggamus;
 7. PLTD Tarahan unit 5 dan unit 6 di Kabupaten Lampung Selatan;
 8. PLTD Tegineneng unit 1, unit 2 dan unit 3 di Kabupaten Pesawaran;
 9. PLTD Teluk Betung unit 7, unit 8 dan unit 10 di Kota Bandar Lampung; dan
 10. PLTD Natar di Kota Bandar Lampung.
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang ditetapkan meliputi:
1. PLTG MPP Tarahan di Lampung Selatan;
 2. PLTG Tarahan Unit 1 di Lampung Selatan; dan
 3. PLTG Sebalang di Kabupaten Lampung Selatan.
- f. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang ditetapkan meliputi:
1. PLTMG Lampung Peaker (LNG) di Kabupaten Lampung Selatan;
 2. PLTMG New Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan;
 3. PLTMG Sribawono di Kabupaten Lampung Timur;
 4. PLTMG Sutami di Kabupaten Lampung Selatan; dan
 5. PLTMg SW Sutami di Kabupaten Lampung Selatan.
- g. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) yang ditetapkan di PLTBg Gunung Sugih di Kabupaten Lampung Tengah.
- h. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) meliputi:
1. PLTM Batu Brak unit 1, unit 2 di Kabupaten Lampung Barat;

2. PLTM Sumber Jaya di Kabupaten Lampung Barat;
3. PLTM Sukarame di Kabupaten Lampung Barat;
4. PLTM Melesom unit 2 di Kabupaten Pesisir Barat;
5. PLTM Besai Kemu di Kabupaten Way Kanan;
6. PLTM Kukusan di Kabupaten Tanggamus; dan
7. Rencana PLTM Pahiton di Kabupaten Lampung Barat.

i. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang direncanakan meliputi:

1. PLTS Way Tias di Kabupaten Tanggamus;
2. PLTS Way Haru di Kabupaten Tanggamus;
3. PLTS Margomulyo di Kabupaten Tanggamus;
4. PLTS Suka Maju di Kabupaten Mesuji;
5. Rencana PLTS Pulau Legundi di Kabupaten Pesawaran; dan
6. Rencana PLTS Pulau Tabuan di Kabupaten Tanggamus.

j. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) meliputi:

1. PLTBm Lambu Kibang di Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
2. PLTBm Tulang Bawang Tengah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b) jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:

a. Jaringan transmisi tenaga listrik bersumber dari energi non terbarukan yang bertujuan untuk menghubungkan provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.

b. Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem, meliputi:

1. PHI Incomer 150 KV Lampung 1 Metro dan Tegineneng di Kabupaten Pesawaran.
2. PHI Incomer 150 KV Langkapura di Kota Bandar Lampung.
3. SUTT – SKTT 150 KV Tarahan – Garuntang di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.
4. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kekuatan 150 KV

meliputi:

- SUTT 150 KV Baturaja - Bukit Kemuning di Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Utara;
- SUTT 150 KV Bukit Kemuning di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Barat;
- SUTT 150 KV Bukit Kemuning – Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara;
- SUTT 150 KV Kota Agung – Pagelaran di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu;
- SUTT 150 KV Kotabumi – Tegineneng di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Tengah;
- SUTT 150 KV Menggala – Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang;
- SUTT 150 KV Natar – Sutami di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan;
- SUTT 150 KV Natar - Teluk Betung (Bandar Lampung) di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung;
- SUTT 150 KV Pagelaran – Tegineneng di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu;
- SUTT 150 KV Seputih Banyak – Sribawono di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah;
- SUTT 150 KV Sribawono – Tarahan di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan;
- SUTT 150 KV Sutami – Tarahan di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan;
- SUTT 150 KV Tarahan – Sebalang di Kabupaten Lampung Selatan;
- SUTT 150 KV Tarahan - Sebalang – Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan;

- SUTT 150 KV Tegineneng – Metro di Kabupaten Pesawaran dan Kota Metro;
- SUTT 150 KV Tegineneng - Metro – Sribawono di Kabupaten Pesawaran, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah;
- SUTT 150 KV Tegineneng – Natar di Kabupaten Pesawaran dan
- SUTT 150 KV Ulubelu – Pagelaran di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus;
- SUTT 150 KV Menggala – Gumawang di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Way Kanan.
- SUTT 150 KV Dente Teladas – Dipasena di Kabupaten Tulang Bawang;
- SUTT 150 KV Gedong Tataan - Teluk Ratai di Kabupaten Pesawaran;
- SUTT 150 KV Gumawang – Mesuji di Kabupaten Mesuji;
- SUTT 150 KV Kalianda – Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
- SUTT 150 KV Mesuji – Dipasena di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang;
- SUTT 150 KV Pagelaran – Gedong Tataan di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran;
- SUTT 150 KV Seputih Banyak – Dente Teladas di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah;
- SUTT 150 KV Seputih Banyak - Menggala di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah;
- SUTT 150 KV Sukarame – Jatiagung di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung;
- SUTT INC PHI 150 KV Pakuan Ratu Way Kanan di Kabupaten Way Kanan; dan

- rencana SUTT 150 KV Liwa – Bengkuntat Krui di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.
5. Rencana Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 KV Gumawang – Lampung 1 di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 6. Rencana Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 KV Teluk Betung – Garuntang di Kota Bandar Lampung.
- c. Pengembangan pusat-pusat distribusi tegangan berupa gardu-gardu induk, bertahap di seluruh kabupaten dan kota di wilayah provinsi, berupa peningkatan jaringan Gardu Induk (GI) eksisting dan rencana GI, meliputi:
1. Gardu induk Adijaya di Kabupaten Lampung Tengah;
 2. Gardu induk Batu Tegi di Kabupaten Tanggamus;
 3. Gardu induk Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan;
 4. Gardu induk Bukit Kemuning di Kabupaten Lampung Utara;
 5. Gardu induk Dipasena di Kabupaten Tulang Bawang;
 6. Gardu induk Jati Agung di Kabupaten Lampung Selatan;
 7. Gardu induk Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan;
 8. Gardu induk Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
 9. Gardu induk Kota Agung di Kabupaten Tanggamus;
 10. Gardu induk Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara;
 11. Gardu induk Langkapura di Kota Bandar Lampung;
 12. Gardu induk Liwa di Kabupaten Lampung Barat;
 13. Gardu induk Menggala di Kabupaten Tulang Bawang;
 14. Gardu induk Mesuji di Kabupaten Mesuji;
 15. Gardu induk Metro di Kota Metro;
 16. Gardu induk Natar di Kabupaten Lampung Selatan;

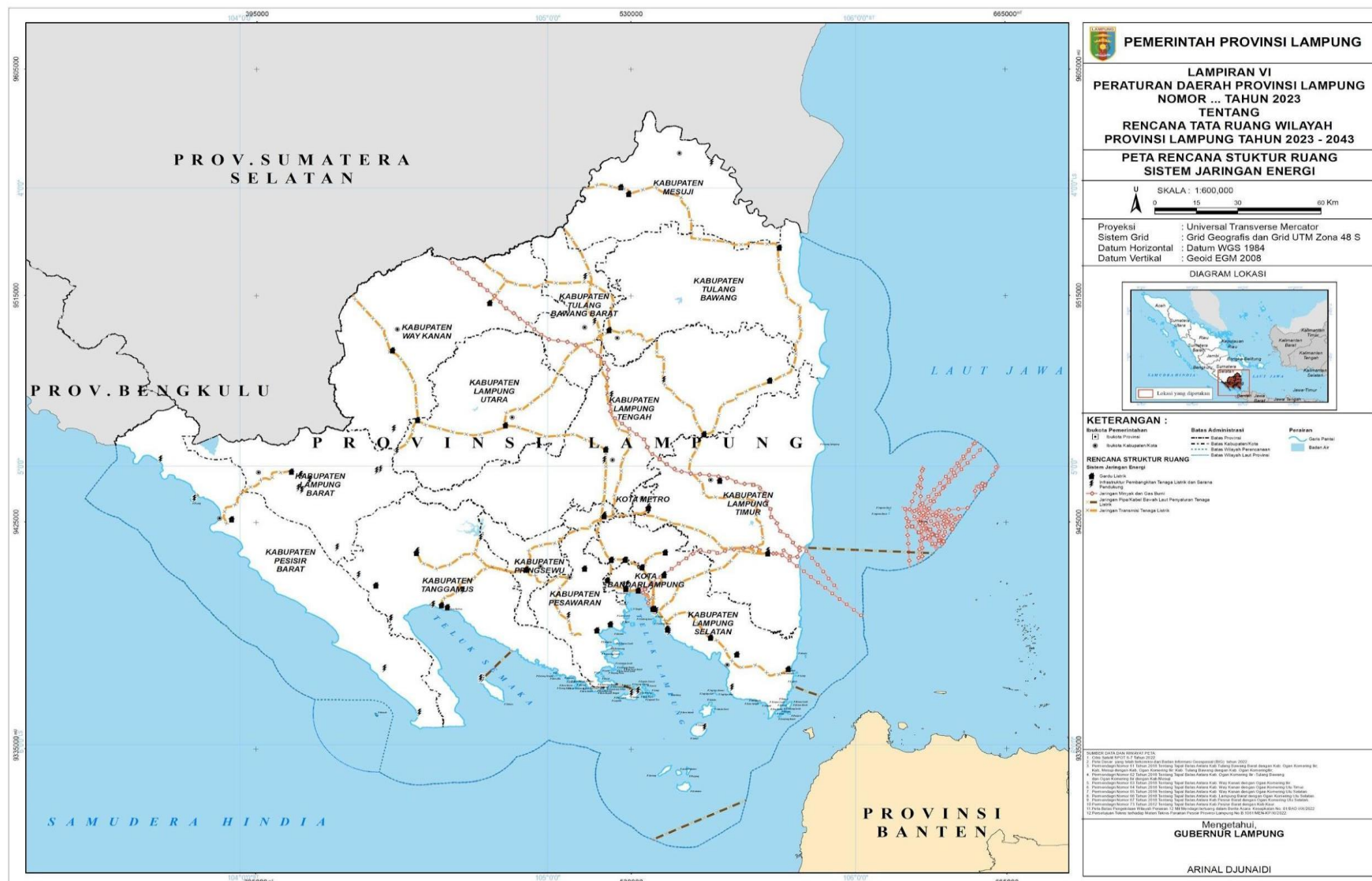
17. Gardu induk New Tarahan di Kota Bandar Lampung;
18. Gardu induk Pagelaran di Kabupaten Pringsewu;
19. Gardu induk Pakuan Ratu di Kabupaten Way Kanan;
20. Gardu induk Seputih Banyak di Kabupaten Lampung Tengah;
21. Gardu induk Sebalang di Kabupaten Lampung Selatan;
22. Gardu induk Sidomulyo di Kabupaten Lampung Selatan;
23. Gardu induk Sribawono di Kabupaten Lampung Timur;
24. Gardu induk Sukarame di Kota Bandar Lampung;
25. Gardu induk Sutami di Kabupaten Lampung Selatan;
26. Gardu induk Tarahan di Kota Bandar Lampung;
27. Gardu induk Tegineneng di Kabupaten Pesawaran;
28. Gardu induk Teluk Betung di Kota Bandar Lampung;
29. Gardu induk Ulu Belu di Kabupaten Tanggamus;
30. Gardu induk Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran;
31. Gardu induk Teluk Pandan di Kabupaten Pesawaran;
32. Rencana gardu induk Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran;
33. Rencana gardu induk Bandar Surabaya di Kabupaten Lampung Tengah;
34. Rencana gardu induk GIS Garuntang di Kota Bandar Lampung;
35. Rencana gardu induk Krui di Kabupaten Pesisir Barat;
36. Rencana gardu induk Rajabasa di Kabupaten Lampung Selatan;
37. Rencana gardu induk Bandar Negeri Semuong di Kabupaten Tanggamus;
38. Rencana gardu induk Simpang Pematang di Kabupaten Mesuji; dan
39. Rencana gardu induk Sukadana di Kabupaten Lampung Timur.

Berikut adalah kondisi kebutuhan daya listrik di Provinsi Lampung Tahun 2023-2045, dengan ketentuan bahwa satu jiwa penduduk dengan kebutuhan pemenuhan daya listriknya adalah 450 VA.

Tabel 2. 80 Kebutuhan Daya Listrik Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

No	Kabupaten/Kota	Total Kebutuhan Daya Listrik (kVA)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Lampung Barat	143,685	150,633	156,618	162,349	166,859
2	Tanggamus	305,109	321,219	335,489	345,795	355,402
3	Lampung Selatan	510,026	539,793	566,802	579,438	595,535
4	Lampung Timur	524,115	546,804	566,451	591,562	607,996
5	Lampung Tengah	693,644	727,034	754,934	783,860	805,635
6	Lampung Utara	299,592	311,720	322,241	337,793	347,177
7	Way Kanan	226,490	239,292	251,015	257,164	264,308
8	Tulang Bawang	204,930	215,523	224,978	232,066	238,513
9	Pesawaran	227,817	240,768	253,044	259,104	266,302
10	Pringsewu	193,383	204,269	214,187	219,699	225,802
11	Mesuji	110,345	117,968	124,803	125,733	129,226
12	Tulang Bawang Barat	135,806	142,020	147,303	153,256	157,513
13	Pesisir Barat	78,687	84,312	89,834	90,086	92,589
14	Bandar Lampung	551,795	575,163	593,195	621,510	638,776
15	Metro	79,884	83,691	86,891	90,208	92,713
PROVINSI LAMPUNG		4.285,310	4.500,212	4.687,781	4.849,866	4.984,596

Gambar 2. 116 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi



2. Fasilitas Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia akan ditopang oleh kualitas pendidikannya. Pendidikan akan terkait dengan dengan fasilitas pendidikan tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Untuk itu, penting merumuskan kebutuhan fasilitas pendidikan dengan mempertimbangkan struktur demografi anak usia sekolah. Secara umum, usia sekolah terbagi menjadi 5 kelompok usia, yaitu PAUD (< 7 tahun), sekolah dasar/ sederajat (7-12 tahun), sekolah menengah pertama/ sederajat (13-15 tahun), sekolah menengah atas/ sederajat (16-18 tahun) dan pendidikan tinggi (>18 tahun).

Dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), maka dilakukan perhitungan proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Provinsi Lampung pada tabel dibawah ini

Tabel 2. 81 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Provinsi Lampung

Jenjang Pendidikan	Usia (Tahun)	Tahun 2023		Tahun 2025 - 2029		Tahun 2030 - 2034		Tahun 2035 - 2039		Tahun 2040 - 2045		TOTAL
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Unit	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Unit	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Unit	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Unit	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Unit	
PAUD/TK	5 – 6	309.316	3.730	316.166	223	308.345	0	304.343	0	302.920	0	3.953
SD/ sederajat	7 – 12	933.688	5.515	940.556	0	944.210	0	922.936	0	912.950	0	5.515
SMP/ sederajat	13 – 15	442.807	2.146	468.955	0	473.875	0	471.228	0	460.417	0	2.146
SMA/ sederajat	16 – 18	434.529	1.344	467.187	15	462.313	15	476.896	0	465.762	0	1.374
Jumlah		2.120.340		2.192.862		2.188.743		2.175.403		2.142.049		

Sumber : data diolah

3. Fasilitas Kesehatan

Pelayanan kesehatan mutlak memerlukan dukungan ketersediaan fasilitas kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Puskesmas sebagai salah satu pelayanan kesehatan yang keberadaannya sangat penting, karena terlibat langsung dengan masyarakat. Puskesmas adalah konsep dasar pelayanan kesehatan primer untuk masyarakat di Indonesia, sesuai dengan definisinya, yakni unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja, puskesmas merupakan penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama. Puskesmas memiliki tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sarana pelayanan kesehatan dasar tersebut didukung oleh sarana puskesmas pembantu dan puskesmas keliling serta jaringannya baik bidan di desa, posyandu dan poskesdes.

Selanjutnya, indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana rumah sakit antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang biasanya diikuti dengan jumlah RS dan tempat tidurnya serta rasionya terhadap jumlah penduduk.

Tabel 2. 82 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung

Uraian	Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan per 5 Tahun				Total
		Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2045	
Jumlah Penduduk (jiwa)	9.313.980	10.000.470	10.417.290	10.777.480	11.076.880	
Puskesmas (unit)	320	180	21	18	15	554
Rumah Sakit (unit)	82	7	4	3	3	99

Sumber : data diolah

4. Persampahan

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Meningkatnya aktivitas penduduk kota dari waktu ke waktu akan berdampak pada meningkatnya timbunan sampah yang dihasilkan. Beberapa isu permasalahan pada sektor persampahan yang sedang berkembang di Provinsi Lampung adalah :

- a. Belum optimalnya pengurangan dan penanganan sampah domestik maupun regional di Provinsi Lampung;
- b. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (dari sumber, TPS, dan TPA) serta dalam hal pengangkutan dari hulu ke hilir;
- c. Pengelolaan persampahan berorientasi 3R yang belum efektif dan terpadu serta Sarana atau prasarana 3R berbasis komunitas (permukiman) masih belum tersedia secara memadai dan terdistribusi merata; dan
- d. Perlunya teknologi tepat guna dalam pengelolaan persampahan.

Sampah yang masuk ke TPA merupakan sampah yang sudah tercampur antara sampah organik dan an organik. Sedangkan 75% sampah Organik berasal dari pasar tradisional dan rumah tangga. Sebagai contoh, di Kota Bandar Lampung jenis sampah yang dominan adalah sampah organik 66%, plastic 14,5%, kertas 9%, logam, kaca dan tekstil dll 10.5%. Upaya dalam pemilahan belum terlaksana dengan baik, sehingga permasalahan sampah perlu mendapat perhatian yang lebih dengan cara pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien.

Pengelolaan sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Jika tidak segera dilakukan penanganan yang baik, maka sampah akan menjadi masalah yang serius dikemudian hari, diproyeksikan untuk tahun 2045 timbunan sampah di Provinsi Lampung ada di kisaran angka 2 juta ton/Tahun.

Konsep penanganan masalah persampahan di Provinsi Lampung dimulai dari paradigma “mengurangi produksi sampah” melalui pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) mulai dari rumah tangga sebagai penyumbang sampah terbesar sampai ke sampah industri. Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah atau pendauran ulang sampah. Konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan.

Dalam sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif. Teknologi yang diusulkan adalah kombinasi tepat guna yang meliputi teknologi pengomposan, teknologi penanganan plastik, teknologi pembuatan kertas daur ulang. “Teknologi Pengolahan Sampah Terpadu menuju *Zero Waste*” yang merupakan teknologi yang ramah lingkungan. Untuk dapat mencapai hal tersebut Pemerintah Provinsi Lampung harus melakukan beberapa usaha, diantaranya :

1. Melakukan perubahan paradigma dari tujuan membuang menjadi memanfaatkan kembali untuk mendapatkan keuntungan;
2. Perbaiki dalam sistem manajemen pengelolaan sampah secara keseluruhan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, perlu didukung oleh faktor-faktor input berupa sarana, prasarana dan kelembagaan produksi, distribusi, pemasaran, pengolahan dan lainnya.

Adapun rencana sistem jaringan persampahan wilayah di Provinsi Lampung berupa rencana tempat pemrosesan akhir regional Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran.

Dilakukan proyeksi timbulan persampahan Provinsi Lampung dengan menggunakan hitungan faktor timbulan sampah yang ditentukan dengan memperhitungkan proyeksi penambahan jumlah penduduk. Dimana pada tahun 2025 sebesar 4.719,02 Ton/Hari, sedangkan pada akhir periode

RPJPD yaitu 2045 5486,827 Ton/Hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 83 Proyeksi Timbulan Sampah Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah (Ton/Hari)					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Lampung Barat	124,97	127,72	133,90	139,22	144,31	148,32
2	Tanggamus	371,02	379,69	399,74	417,50	430,32	442,28
3	Lampung Selatan	552,52	566,69	599,77	629,78	643,82	661,71
4	Lampung Timur	571,29	582,35	607,56	629,39	657,29	675,55
5	Lampung Tengah	693,83	709,06	743,19	771,71	801,28	823,54
6	Lampung Utara	261,54	266,30	277,08	286,43	300,26	308,60
7	Way Kanan	196,44	201,32	212,70	223,12	228,59	234,94
8	Tulang Bawang	222,59	227,72	239,47	249,98	257,85	265,01
9	Pesawaran	197,71	202,50	214,02	224,93	230,31	236,71
10	Pringsewu	167,83	171,90	181,57	190,39	195,29	200,71
11	Mesuji	95,18	98,08	104,86	110,94	111,76	114,87
12	Tulang Bawang Barat	147,74	150,90	157,83	163,67	170,28	175,01
13	Pesisir Barat	67,93	69,94	74,94	79,85	80,07	82,30
14	Bandar Lampung	841,45	858,35	894,70	922,75	966,79	993,65
15	Metro	104,32	106,51	111,59	115,85	120,27	123,62
Provinsi Lampung		4.616,32	4.719,02	4.952,89	5.155,50	5.338,52	5.486,83

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJPD, Data Diolah 2023/2024

Setelah dilakukan timbulan persampahan dihitung juga kebutuhan sarana pengelolaan persampahan Kabupaten/Kota se-Provinsi yang dibagi menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R) Pusat Daur Ulang (PDU) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 84 Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Kebutuhan Sarana Tempat Pengelolaan Sampah														
		2025			2030			2035			2040			2045		
		TPST	TPS3R	PDU	TPST	TPS3R	PDU	TPST	TPS3R	PDU	TPST	TPS3R	PDU	TPST	TPS3R	PDU
1	Lampung Barat	0	4	0	0	10	0	0	16	0	0	22	0	0	30	0
2	Tanggamus	0	4	0	0	10	0	0	16	0	0	22	0	0	30	0
3	Lampung Selatan	1	4	0	1	10	1	1	16	2	1	22	2	1	29	2
4	Lampung Timur	0	4	0	0	10	0	0	16	0	0	22	0	0	30	0
5	Lampung Tengah	1	4	0	1	10	0	1	16	0	1	22	0	1	29	0
6	Lampung Utara	0	4	0	0	10	0	0	16	0	0	22	0	0	30	0
7	Way Kanan	0	4	0	0	10	0	0	16	0	1	22	1	1	29	1
8	Tulang Bawang	0	4	0	0	10	0	0	16	0	0	22	0	1	29	0
9	Pesawaran	0	4	0	0	10	0	0	16	0	0	22	0	0	30	0
10	Pringsewu	0	4	0	0	10	0	0	16	0	0	22	0	0	30	0
11	Mesuji	0	4	0	0	10	0	0	16	0	0	22	0	0	30	0
12	Tulang Bawang Barat	0	4	0	0	10	0	0	16	0	0	22	0	0	30	0
13	Pesisir Barat	0	4	0	0	10	0	0	16	0	0	22	0	0	30	0
14	Bandar Lampung	0	4	0	0	10	1	0	16	2	0	22	2	0	29	3
15	Metro	1	4	1	1	10	1	1	16	1	1	22	1	1	29	1
Provinsi Lampung		3	60	1	3	150	3	3	240	5	4	330	6	5	444	7

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJPD, Data Diolah 2023/2024

3. Air Bersih

Rencana penyediaan sistem air bersih yang layak bagi penduduk Provinsi Lampung harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum.

Kebutuhan air bersih penduduk dengan mempertimbangkan standar pemenuhan kebutuhan air bersih seperti *standard coverage* (90%), *household connection* (HC) untuk kebutuhan per jiwa penduduknya adalah 150 liter/orang/hari, *public connection* (PC) untuk kebutuhan per jiwa penduduknya adalah 30 liter/orang/hari. Secara keseluruhan air bersih untuk domestik adalah penjumlahan kebutuhan air bersih dari *Household Connection* (HC) dan *Public Connection* (PC) dan non domestik (20% dari total kebutuhan air bersih domestik). Berikut adalah hasil perhitungan kebutuhan air bersih di tiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun

2025-2045. Kebutuhan air bersih untuk penduduk di Provinsi Lampung pada tahun 2025 adalah 16.532,830 liter/kab.kota/detik dan pada tahun 2045 sebesar 19.230,69 liter/kab.kota/detik. Hal ini terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 85 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Provinsi Lampung 2025 - 2045

No .	Kabupaten/Kot a	Kebutuhan Air Bersih (Liter/Detik)																				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Lampung Barat	554,340	560,05	565,57	570,94	576,13	581,15	586,02	590,76	595,38	599,86	604,24	609,30	613,21	617,15	621,11	626,35	629,30	632,26	635,24	638,23	643,75
2	Tanggamus	1.177,118	1.190,17	1.202,92	1.215,33	1.227,45	1.239,27	1.250,82	1.262,07	1.273,07	1.283,82	1.294,32	1.297,78	1.306,11	1.314,50	1.322,94	1.334,09	1.340,37	1.346,69	1.353,03	1.359,41	1.371,15
3	Lampung Selatan	1.967,691	1.991,67	2.015,14	2.038,11	2.060,57	2.082,53	2.104,10	2.125,24	2.146,08	2.166,56	2.186,74	2.174,65	2.188,61	2.202,66	2.216,80	2.235,49	2.246,02	2.256,60	2.267,23	2.277,91	2.297,59
4	Lampung Timur	2.022,049	2.040,57	2.058,58	2.076,08	2.093,09	2.109,58	2.125,63	2.141,27	2.156,44	2.171,15	2.185,38	2.220,15	2.234,41	2.248,75	2.263,19	2.282,26	2.293,01	2.303,82	2.314,67	2.325,57	2.345,66
5	Lampung Tengah	2.676,094	2.703,63	2.730,31	2.756,13	2.780,99	2.804,91	2.828,00	2.850,31	2.871,84	2.892,55	2.912,55	2.941,85	2.960,74	2.979,75	2.998,88	3.024,15	3.038,40	3.052,71	3.067,09	3.081,54	3.108,16
6	Lampung Utara	1.155,833	1.165,78	1.175,42	1.184,77	1.193,84	1.202,62	1.211,16	1.219,50	1.227,62	1.235,50	1.243,21	1.267,75	1.275,89	1.284,08	1.292,32	1.303,21	1.309,35	1.315,52	1.321,72	1.327,95	1.339,42
7	Way Kanan	873,802	884,11	894,20	904,08	913,73	923,19	932,48	941,65	950,68	959,60	968,42	965,14	971,34	977,58	983,85	992,15	996,82	1.001,52	1.006,23	1.010,97	1.019,71
8	Tulang Bawang	790,625	799,20	807,59	815,76	823,72	831,49	839,08	846,53	853,84	860,99	867,97	870,95	876,54	882,17	887,83	895,32	899,53	903,77	908,03	912,31	920,19
9	Pesawaran	878,924	889,17	899,31	909,29	919,17	928,89	938,54	948,07	957,53	966,93	976,25	972,43	978,67	984,95	991,28	999,63	1.004,34	1.009,07	1.013,82	1.018,60	1.027,40
10	Pringsewu	746,076	754,76	763,33	771,72	779,98	788,07	796,01	803,82	811,46	818,98	826,34	824,54	829,83	835,16	840,52	847,60	851,60	855,61	859,64	863,69	871,15
11	Mesuji	425,712	431,86	437,86	443,75	449,50	455,12	460,63	465,99	471,25	476,42	481,49	471,88	474,91	477,96	481,03	485,08	487,37	489,66	491,97	494,29	498,56
12	Tulang Bawang Barat	523,941	529,10	534,06	538,87	543,45	547,92	552,20	556,37	560,43	564,39	568,30	575,17	578,87	582,58	586,32	591,26	594,05	596,85	599,66	602,49	607,69
13	Pesisir Barat	303,576	307,97	312,34	316,67	320,99	325,28	329,53	333,80	338,07	342,34	346,58	338,10	340,27	342,45	344,65	347,56	349,19	350,84	352,49	354,15	357,21
14	Bandar Lampung	2.128,837	2.148,66	2.167,59	2.185,63	2.202,76	2.218,99	2.234,38	2.249,03	2.262,93	2.276,09	2.288,56	2.332,55	2.347,52	2.362,60	2.377,76	2.397,80	2.409,10	2.420,45	2.431,85	2.443,31	2.464,41
15	Metro	308,194	311,30	314,32	317,26	320,12	322,88	325,56	328,11	330,59	332,97	335,23	338,55	340,73	342,91	345,11	348,02	349,66	351,31	352,96	354,63	357,69
Provinsi Lampung		16.532,830	16.707,97	16.878,52	17.044,36	17.205,49	17.361,93	17.514,11	17.662,53	17.807,19	17.948,16	18.085,57	18.201,69	18.318,56	18.436,17	18.554,54	18.710,90	18.799,05	18.887,61	18.976,60	19.066,00	19.230,69

Sumber : Data Diolah 2023

4. Sanitasi

Provinsi Lampung memiliki target untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap akses sanitasi yang layak. Berdasarkan data yang didapatkan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Lampung terlihat bahwa pada tahun 2023 dari total seluruh penduduk yang ada baru 81,64% penduduk yang memiliki sanitasi yang layak. Walaupun angka tersebut selalu naik setiap tahunnya tetap perlu ada suatu target tertentu untuk meningkatkan akses sanitasi masyarakat Provinsi Lampung. Berdasarkan data tersebut masih perlu adanya peningkatan akses sanitasi layak di Provinsi Lampung, peningkatan akses sanitasi bisa dilakukan dengan membuat Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Regional dimana nantinya SPAL tersebut akan melayani ke beberapa Kabupaten/Kota.

Target Pemerintah Provinsi Lampung terhadap akses sanitasi adalah sebesar 100 % pada tahun 2045. Oleh karena itu dengan tingkat kenaikan akses sebesar 1-3% pertahun maka didapatkan hasil pada tahun 2025 target akses sanitasi layak sudah mencapai angka 87,92% penduduk Provinsi Lampung dapat memiliki akses sanitasi layak dan pada akhir tahun perencanaan pada tahun 2045 didapatkan hasil bahwa 100% penduduk Provinsi Lampung terlayani sanitasi layak.

Selain itu, dapat dilihat bahwa pada tahun tertentu terdapat kabupaten yang sudah memiliki akses air minum sebesar 100% seperti Kota Metro dan Lampung Selatan pada tahun 2025, Pringsewu pada tahun 2026, Lampung Barat dan Lampung Timur pada tahun 2027 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 86 Proyeksi Akses Sanitasi Layak 2025 - 2045

Kabupaten/Kota	Proyeksi Akses Sanitasi Layak																				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Lampung Barat	82,61	85,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tanggamus	71,25	74,02	76,79	79,56	82,33	85,10	87,87	90,64	93,41	96,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lampung Selatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lampung Timur	89,73	93,22	96,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lampung Tengah	81,97	85,15	88,34	91,52	94,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lampung Utara	78,71	81,77	84,83	87,89	90,95	94,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Way Kanan	82,46	85,66	88,87	92,07	95,28	98,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tulang Bawang	88,66	92,10	95,55	99,00	102,44	105,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pesawaran	87,06	90,45	93,83	97,22	100,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pringsewu	92,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mesuji	82,59	85,80	89,01	92,22	95,43	98,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tulang Bawang Barat	78,71	81,77	84,83	87,89	90,95	94,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pesisir Barat	78,71	81,77	84,83	87,89	90,95	94,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bandar Lampung	81,66	84,84	88,01	91,19	94,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Metro	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Provinsi Lampung	85,13	88,16	91,44	93,76	95,87	98,01	99,19	99,38	99,56	99,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Data Diolah 2023

5. Perumahan

Berdasarkan hasil proyeksi rumah dengan pembagian kategori luasan rumah, terdiri dari luasan Kavling Rumah Mewah seluas 600 m², luasan Kavling Rumah Sedang seluas 400 m², luasan Kavling Rumah Sederhana seluas 200 m², dan luasan Kavling Rumah Sangat Sederhana seluas 70 m² . Dari hasil analisis dapat diketahui Proporsi kebutuhan rumah tahun 2045 = 198.984 Rumah Mewah (RM), 397974 Rumah Sedang (RSd), 795.944 Rumah Sederhana (RS), dan 596957 Rumah Sangat Sederhana (RSS). Jadi total rumah yang dibutuhkan berdasarkan jumlah penduduk di tahun 2045 yaitu 1.989.858 rumah. Untuk lebih jelasnya proyeksi pemenuhan kebutuhan rumah tahun 2025 hingga tahun 2045 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ;

Tabel 2. 87 Jumlah Kebutuhan Rumah Tahun 2025-2045

No	Kabupaten/Kota	2023					2025					2030					2035					2040					2045				
		RSS	RS	RSD	RM	Total	RSS	RS	RSD	RM	Total	RSS	RS	RSD	RM	Total	RSS	RS	RSD	RM	Total	RSS	RS	RSD	RM	Total	RSS	RS	RSD	RM	Total
		0,3	0,4	0,2	0,1		0,3	0,4	0,2	0,1		0,3	0,4	0,2	0,1		0,3	0,4	0,2	0,1		0,3	0,4	0,2	0,1		0,3	0,4	0,2	0,1	
1	Lampung Barat	18746	24994	12497	6249	62486	19158	25544	12772	6386	63860	20084	26779	13390	6695	66948	20882	27843	13922	6961	69608	21647	21647	14431	7216	64940	22248	29664	14832	7416	74160
2	Tulang Bawang	39752	53003	26502	13251	132508	40681	54242	27121	13560	135604	42829	57106	28553	14276	142764	44732	59642	29821	14911	149106	46106	46106	30737	15369	138318	47387	63183	31591	15796	157956
3	Lampung Selatan	66300	88400	44200	22100	221000	68003	90671	45336	22668	226678	71972	95963	47982	23991	239908	75574	100765	50382	25191	251912	77258	77258	51506	25753	231775	79405	105873	52936	26468	264682
4	Lampung Timur	68555	91406	45703	22852	228516	69882	93176	46588	23294	232940	72907	97210	48605	24302	243024	75527	100702	50351	25176	251756	78875	78875	52583	26292	236625	81066	108088	54044	27022	270220
5	Lampung Tengah	90500	120666	60333	30167	301666	92486	123314	61657	30829	308286	96938	129250	64625	32313	323126	100658	134210	67105	33553	335526	104515	104515	69676	34838	313544	107418	143224	71612	35806	358060
6	Lampung Utara	39231	52308	26154	13077	130770	39946	53261	26630	13315	133152	41563	55417	27708	13854	138542	42965	57287	28644	14322	143218	45039	45039	30026	15013	135117	46290	61720	30860	15430	154301
7	Way Kanan	29467	39289	19644	9822	98222	30199	40265	20132	10066	100662	31906	42541	21270	10635	106352	33469	44625	22312	11156	111562	34289	34289	22859	11430	102866	35241	46988	23494	11747	117470
8	Tulang Bawang	26710	35614	17807	8903	89034	27324	36432	18216	9108	91080	28736	38315	19158	9579	95788	29997	39996	19998	9999	99990	30942	30942	20628	10314	92826	31802	42402	21201	10601	106006
9	Pesawaran	29657	39542	19771	9886	98856	30376	40501	20250	10125	101252	32102	42803	21402	10701	107008	33739	44986	22493	11246	112464	34547	34547	23031	11516	103642	35507	47343	23671	11836	118356
10	Pangkalan	25175	33567	16784	8392	83918	25784	34379	17190	8595	85948	27236	36314	18157	9079	90786	28558	38078	19039	9519	95194	29293	29293	19529	9764	87880	30107	40143	20071	10036	100357
11	Mesuji	14276	19035	9518	4759	47588	14713	19617	9808	4904	49042	15729	20972	10486	5243	52430	16640	22187	11094	5547	55468	16764	16764	11176	5588	50293	17230	22973	11487	5743	57434
12	Tulang Bawang Barat	17729	23638	11819	5910	59096	18107	24143	12072	6036	60358	18936	25248	12624	6312	63120	19640	26187	13094	6547	65468	20434	20434	13623	6811	61302	21002	28002	14001	7001	70006
13	Pesisir Barat	10185	13580	6790	3395	33950	10492	13989	6994	3497	34972	11242	14989	7494	3747	37472	11978	15970	7985	3993	39926	12012	12012	8008	4004	36035	12345	16460	8230	4115	41151
14	Bandar Lampung	72124	96166	48083	24041	240414	73573	98097	49048	24524	245242	76688	102251	51126	25563	255628	79093	105457	52728	26364	263642	82868	82868	55245	27623	248604	85170	113560	56780	28390	283900
15	Metro	10432	13910	6955	3477	34774	10651	14202	7101	3550	35504	11159	14878	7439	3720	37196	11585	15447	7724	3862	38618	12028	12028	8018	4009	36083	12362	16482	8241	4121	41206
Provinsi Lampung		558839	745119	372560	186280	1862798	571375	761833	380916	190458	1904582	600028	800038	400019	200009	2000094	625037	833383	416692	208346	2083458	646649	646649	431099	215550	1939946	664613	886150	443075	221538	2215376

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJPD, Data Dialah 2024

Tabel 2. 88 Luasan Lahan Permukiman 2025-2045

No	Kabupaten/Kota	KONDISI SAAT INI 2022		KEBUTUHAN 2025		KEBUTUHAN 2030		KEBUTUHAN 2040		20245	
		Rumah	Lahan (ha)	Rumah	Lahan (ha)	Rumah	Lahan (ha)	Rumah	Lahan (ha)	Rumah	Lahan (ha)
1	Lampung Barat	60550	1459,255	61995,92	1494,102	63441,85	1528,948	64887,77	1563,795	66333,69	1598,642
2	Tanggamus	129162	3112,804	132246,4	3187,137	135330,7	3261,471	138415,1	3335,804	141499,5	3410,137
3	Lampung Selatan	214346	5165,739	219464,5	5289,096	224583,1	5412,452	229701,6	5535,809	234820,2	5659,166
4	Lampung Timur	223624	5389,338	228964,1	5518,035	234304,2	5646,731	239644,3	5775,428	244984,4	5904,124
5	Lampung Tengah	295480	7121,068	302536	7291,118	309592	7461,168	316648	7631,217	323704	7801,267
6	Lampung Utara	126824	3056,458	129852,5	3129,446	132881,1	3202,434	135909,6	3275,421	138938,1	3348,409
7	Way Kanan	95374	2298,513	97651,51	2353,401	99929,03	2408,29	102206,5	2463,178	104484,1	2518,066
8	Tulang Bawang	86126	2075,637	88182,67	2125,202	90239,35	2174,768	92296,02	2224,334	94352,69	2273,9
9	Pesawaran	96342	2321,842	98642,63	2377,287	100943,3	2432,733	103243,9	2488,178	105544,5	2543,623
10	Pringsewu	81364	1960,872	83306,96	2007,698	85249,92	2054,523	87192,87	2101,348	89135,83	2148,174
11	Mesuji	45954	1107,491	47051,37	1133,938	48148,75	1160,385	49246,12	1186,831	50343,49	1213,278
12	Tulang Bawang Barat	57542	1386,762	58916,09	1419,878	60290,19	1452,993	61664,28	1486,109	63038,37	1519,225
13	Pesisir Barat	32728	788,7448	33509,54	807,5799	34291,08	826,415	35072,62	845,2501	35854,15	864,0851
14	Bandar Lampung	236990	5711,459	242649,3	5847,848	248308,6	5984,236	253967,8	6120,625	259627,1	6257,013
15	Metro	33956	818,3396	34766,86	837,8814	35577,73	857,4232	36388,59	876,965	37199,45	896,5068
Provinsi Lampung		1816362	43774,322	1859736,4	44819,6473	1903110,9	45864,97	1946485,07	46910	1989859,57	47955,6

Sumber : Data Diolah 2023

2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

A. Gambaran Umum Provinsi Lampung

a. Potensi

- Dilalui jalan tol Trans Sumatera (Terbanggi Besar-Pematang dan Bakauheni- Terbanggi Besar)
- Provinsi Lampung menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera yang menghubungkan dengan pulau Jawa serta dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1
- Memiliki Pelabuhan Perikanan dalam mendukung sektor perikanan
- Memiliki Pelabuhan Utama Panjang dan Pelabuhan Bakauheni sebagai angkutan laut dan angkutan penyeberangan
- Memiliki jalan arteri primer yaitu lintas barat dan lintas timur
- Memiliki bandara Radin Inten II, Taufiq Kiemas dan Gatot Subroto dalam mendukung pergerakan orang dan barang
- Adanya kerjasama antara Pemprov Lampung dan Prov. Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan pengembangan investasi perdagangan dan pariwisata (Nomor G/556/B.A/HK/2021 dan Nomor 510/20/Bappeda) di Tanah Merah Kabupaten Mesuji
- Memiliki potensi pariwisata bahari dan pariwisata lainnya
- Provinsi Lampung menjadi salah satu Lumbung Pangan Nasional dalam mendukung Ketahanan pangan Nasional
- Sektor unggulan di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- Memiliki 172 Pulau

b. Peluang/Rencana

- Rencana Pembangunan KI Pesawaran/KI Tegineneng, KI Way Pisang, KI Katibung, termasuk jalan akses dan infrastruktur pendukung.
- Adanya PSN berupa kawasan industri Tanggamus dan kawasan terintegrasi Bakauheni Harbour City (BHC).

- Adanya PSN pengembangan sektor kereta berupa kereta api logistik Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Tarahan/Lampung dan Prabumulih – Kertapati/Palembang.
- Adanya PSN pengembangan Bendungan Way Sekampung dan Marga Tiga.
- Adanya PSN sektor air bersih dan sanitasi berupa sistem penyediaan air minum (SPAM) Kota Bandar Lampung
- Provinsi Lampung termasuk kedalam kawasan pengembangan pariwisata nasional (KPPN) dan destinasi pariwisata nasional (DPN), kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), dan kawasan pariwisata lainnya yang berkembang di Provinsi Lampung.
- Penetapan KSN Selat Sunda

c. Permasalahan

- Provinsi Lampung memiliki nilai IPM Rendah (70,45) dibawah nasional (72,29)
- Jaringan jalan yang masih kurang memadai dari segi kondisi jalan
- Alih fungsi kawasan hutan
- Kualitas infrastruktur dan prasarana terminal, stasiun KA, pelabuhan dan bandar udara belum mampu mendukung kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih besar
- Wilayah Barat Provinsi Lampung memiliki daya dukung rendah (limitasi dan kendala 19%)

d. Tantangan

- Berbatasan dengan Pulau Jawa mengakibatkan adanya migrasi penduduk
- Termasuk dalam kawasan rawan bencana resiko tinggi (banjir, tsunami, tanah longsor)
 - i. Resiko Bencana Banjir tinggi : Kec. Balmbangan Umpu (Kabupaten Way Kanan), Kec. Tulang Bawang Tengah (Kab Tubaba)
 - ii. Resiko Rawan Longsor Tinggi : Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten

Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, dan beberapa daerah di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Tengah, serta Kabupaten Pesawaran.

- iii. Resiko Bencana Tsunami Tinggi : Kecamatan Padang Cermin dan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran serta Kecamatan Pesisir Selatan dan Karya Panggawa Kabupaten Pesisir Barat

Didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu:

- Aspek ekonomi untuk menciptakan ruang investasi
- Aspek sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Aspek Lingkungan yaitu mengurangi dampak bencana dan menjaga fungsi lindung

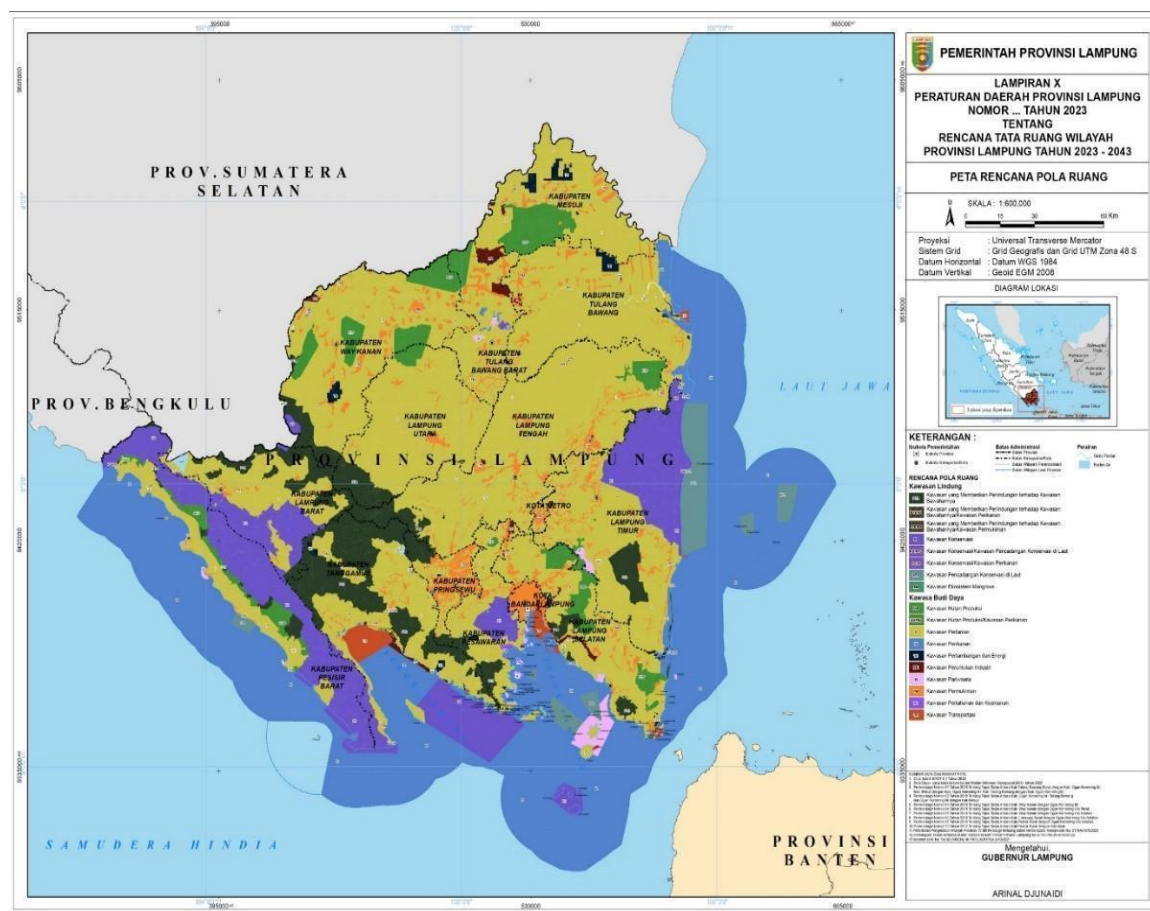
Mengakomodir fungsi dan peran Provinsi Lampung yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional.

Berdasarkan dasar pertimbangan diatas, maka tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Lampung adalah *“Mewujudkan Provinsi Lampung Berjaya berbasis pengembangan ekonomi yang berdaya saing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan”*

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung ditetapkan dan diselenggarakan berdasarkan pada asas:

1. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan;
2. Keseimbangan dan keserasian, yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam wilayah;
3. Kelestarian, yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang;
4. Keterbukaan, persamaan, keadilan, moralitas, religius dan kepastian hukum;

Gambar 2. 118 Peta Rencana Pola Ruang



Sumber : RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023-2043

Beberapa arahan pembangunan terhadap penyediaan pelayanan dasar yang akan dilakukan antara lain :

1. Pengembangan sistem pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat yang diarahkan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah yang dapat meningkatkan pelayanan mobilitas barang dan jasa dalam mendukung pembangunan sektoral dan regional serta pemerataan hasil pembangunan, terutama pembangunan jalur jalan arteri primer tol dan non-tol serta aksesibilitas jalan yang menghubungkan antara wilayah pantai pesisir selatan dan pantai utara. Penambahan jalan alternatif sebagai stimulasi Pembangunan antar Kabupaten/Kota, terutama di bagian barat dan timur Provinsi Lampung. Di samping itu, dalam pembangunan sarana dan prasarana perhubungan juga diarahkan untuk peningkatan kualitas,

kapasitas dan penambahan lintasan kereta api baik untuk barang maupun untuk penumpang yang bersifat massal. Adapun untuk angkutan sungai dan penyeberangan diarahkan untuk optimalisasi pengembangan angkutan penyeberangan yang berada di sekitar kabupaten yang memiliki potensi angkutan Sungai yang merupakan sarana transportasi yang dibutuhkan sebagai sarana penunjang angkutan penumpang dan barang.

2. Pengembangan sistem pembangunan perhubungan laut yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan yang mampu menjadi pintu gerbang utama Sumatera yaitu Pelabuhan Bakauheni-Lampung Selatan dan Pelabuhan Panjang di bagian Kota Bandar Lampung. Di samping itu diarahkan juga untuk peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan di beberapa kota di Bandar Lampung yang mampu menjadi pelabuhan pengumpan bagi pelabuhan utama. Keterbukaan tata kelola terhadap penyeberangan dan pelabuhan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Lampung.
3. Pengembangan sistem pembangunan sarana dan prasarana perhubungan udara yang diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi bandar udara Radin Intan II yang mampu melayani penerbangan domestik dan internasional serta mampu bersaing di tingkat regional maupun internasional. Di samping itu, diarahkan juga untuk peningkatan sarana dan prasarana pada beberapa bandar udara yang berada di beberapa daerah di Lampung agar mampu melayani penerbangan domestik sehingga mampu menunjang pengembangan wilayah sekitarnya.
4. Pengembangan sistem pembangunan sumber daya air yang diarahkan untuk mencapai keandalan ketersediaan air yang diwujudkan dengan kegiatan membangun waduk, waduk lapangan (embung) bendungan, pompa, jaringan drainase, pengendalian mutu air, serta pemanfaatan kembali air drainase; ditunjang oleh keandalan pengelolaan jaringan air yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi; kesemuanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, melalui kegiatan pengembangan sistem irigasi partisipatif guna mendorong

kegiatan intensifikasi, diversifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi pertanian dan modernisasi usaha tani.

5. Pengembangan sistem pembangunan air minum yang diarahkan pada peningkatan akses masyarakat Lampung terhadap air minum perpipaan melalui peningkatan kapasitas pelayanan air minum, peningkatan kinerja pengelola air minum atau BUMD pengelola air minum, serta peningkatan kualitas SDM pengelola air minum melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk pemenuhan air minum diantisipasi tingkat kebocoran baik teknis maupun non teknis hingga mencapai ambang batas normal.
6. Pengembangan sistem pembangunan kelistrikan yang diarahkan pada pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik daerah dan peningkatan kemampuan pelayanannya. Peningkatan kemampuan kebutuhan listrik ini dapat dilakukan dengan mencari sumber-sumber baru di wilayah potensial untuk dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) termasuk penggunaan mikrohidro (pembangkit listrik mini) terutama di wilayah pedesaan. Di samping itu, pembangunan kelistrikan juga diarahkan dengan membangun jaringan distribusi listrik sampai pelosok pedesaan sehingga diharapkan terjadi peningkatan kemampuan jangkauan pelayanan kebutuhan listrik baik untuk kepentingan industri maupun kepentingan rumah tangga dapat terwujud secara lebih merata.
7. Pengembangan sistem pembangunan perumahan yang diarahkan pada peningkatan penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, beserta peningkatan pemenuhan kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat. Dalam mendukung pemenuhan lingkungan perumahan yang sehat diberikan fasilitasi pembiayaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan, terutama pada kawasan kumuh perkotaan. Peningkatan kualitas regulasi dalam mengendalikan pertumbuhan perumahan yang efisien, mandiri dalam penyediaan sarana prasarana dan berkelanjutan.
8. Pengembangan sistem penanganan persampahan dan drainase pada permukiman yang diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap pentingnya peningkatan pengelolaan limbah baik

limbah domestik maupun limbah non domestik. Selain itu perlunya peningkatan pelayanan persampahan dan drainase, serta memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan persampahan, tidak hanya dalam bidang transportasinya, tetapi juga dalam bidang pengelolaan tempat pembuangan akhir TPA.

9. Pengembangan sistem pembangunan penataan ruang yang diarahkan pada pembangunan wilayah yang terpadu, nyaman, efisien dan berkelanjutan dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan seimbang. Rencana tata ruang dijabarkan dan disinkronisasikan ke dalam rencana pembangunan yang konsisten, baik secara fungsi, lokasi dan jangka waktu pembangunannya.
10. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih menekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri, distribusi dan daya saing produk yang dihasilkan.
11. Pengembangan sistem pembangunan kota besar, menengah, dan kecil dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional dengan tetap menjaga keseimbangan pertumbuhannya . Upaya itu diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali, serta untuk mengendalikan arus migrasi masuk langsung dari desa ke kota-kota besar, dengan cara menciptakan kesempatan kerja, termasuk peluang usaha, di kota-kota menengah dan kecil.
12. Peningkatan pemahaman rencana tata ruang yang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah Pantai Barat dengan

wilayah Pantai di daerah Lampung Selatan serta meningkatkan aksesibilitas antar pusat-pusat pertumbuhan pada wilayah tengah dan antara wilayah.

13. Pengembangan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka mengoptimalkan struktur dan pola pemanfaatan ruang melalui peningkatan (a) kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, (b) kualitas rencana tata ruang, dan (c) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kebutuhan infrastruktur wilayah pada kabupaten kota baik secara struktur ruang maupun pola ruang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. 89 Kebutuhan Infrastruktur Wilayah

No.	Kab/kota	Fungsi Ruang	Arahan Pengembangan Pemanfaatan Ruang (Pola Ruang)	Kebutuhan Infrastruktur (Struktur Ruang)
1.	Kota Bandar Lampung	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	● Mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan Kota Bandar Lampung sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dan kawasan hinterlandnya yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan, dengan mendorong terwujudnya aglomerasi Metropolitan Lampung Raya ● Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan ● Bagian dari Kawasan strategis Pariwisata Teluk Lampung ● Kawasan <i>Edu City</i> (LARAIN/UNILA, ITERA, dan UIN)	● Pengembangan Pelabuhan Perikanan Lempasing ● Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera untuk mendukung distribusi logistik di wilayah Barat, terutama pada ruas: - Bandarlampung-Gedongtataan-Pringsewu-Kotaagung-Liwa- Krui; ● Jalan Tol Pelabuhan Panjang – Lematang ● Pengembangan Terminal Tipe A Rajabasa ● Pengembangan multi-infrastruktur backbone & maritime backbone yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan

No.	Kab/kota	Fungsi Ruang	Arahan Pengembangan Pemanfaatan Ruang (Pola Ruang)	Kebutuhan Infrastruktur (Struktur Ruang)
			• Bandar Lampung Kota Pelabuhan (<i>Coastal City</i>) • Pengembangan Pelabuhan Panjang sebagai Hub • Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional (Telukbetung)	konektivitas langsung Sumatra-Jawa (di Selat Sunda) • Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Palembang-Muaraenim-Tarahan (peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA babaranjang, antara lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan sebidang yang memiliki traffic lalu lintas kendaraan jalan raya yang cukup tinggi) • Jalur KA Pelabuhan Panjang – Pidada • Pengembangan jaringan transportasi Perkotaan Bandar Lampung dan sekitarnya • SPAM Regional I Way Sabu • Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkar Bandar Lampung • Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Panjang, • Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional (Telukbetung) • Perlindungan terhadap kawasan ekosistem Mangrove

No.	Kab/kota	Fungsi Ruang	Arahan Pengembangan Pemanfaatan Ruang (Pola Ruang)	Kebutuhan Infrastruktur (Struktur Ruang)
				• Kawasan Industri Bandar Lampung
2.	Kota Metro	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	• PKW Kota Metro diarahkan sebagai pusat Pendidikan dan ekonomi bagi wilayah sekitar • Bagian dari Kawasan strategis metropolitan Bandar Lampung Raya • Kawasan Agropolitan Metro	• Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B Mulyojati • Pembangunan Jalan Tol Ruas Metro-Sukadana
3.	Kab. Lampung Selatan	PKL Perkotaan Bakauheni, PKL Perkotaan Tanjung Bintang, PKL Perkotaan Sidomulyo, PKL Perkotaan Natar-Jati Agung,	• Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah, termasuk pengembangan wilayah metropolitan dan sistem angkutan umum masal perkotaan • Pengembangan Kawasan Kotabaru dan sekitarnya • Bagian dari Kawasan strategis Pariwisata Teluk Lampung • Pengembangan <i>Bakauheni Harbour City</i> (BHC) • Pengembangan Kawasan di sekitar Bandara Radin Intan II • KSPN Krakatau di Lampung Selatan	• Pengembangan Pelabuhan Perikanan • Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B Bakauheni • Pembangunan Terminal Intermoda Itera • Pembangunan Terminal Terpadu Intermoda Stasiun Branti – Radin Intan II • Pengembangan Terminal Barang • Pengembangan Jembatan Timbang UPPKB Way Urang • Rencana Jalur KA Tarahan – Bakauheni • Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional Sebalang • Gardu Induk • SPAM Regional Zona 3 • Pengembangan Panas Bumi Gunung Rajabasa • Pengembangan Jalan Tol SS Natar – Kota Agung – Bengkunt – Bengkulu • Pengembangan aksesibilitas jalan Lematang – Padang Cermin – SP. Kota Agung

No.	Kab/kota	Fungsi Ruang	Arahan Pengembangan Pemanfaatan Ruang (Pola Ruang)	Kebutuhan Infrastruktur (Struktur Ruang)
				● Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional (Sebalang) ● Perlindungan terhadap kawasan ekosistem Mangrove ● Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Palembang Muaraenim-Tarahan (peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA babaranjang, antara lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan sebidang yang memiliki traffic lalu lintas kendaraan jalan raya yang cukup tinggi) ★ Pembangunan Jalur KA Shortcut Tegineneng – Tarahan ★ Pengembangan Jalur KA Logistik Tarahan ● Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas langsung Sumatra-Jawa (di Selat Sunda)

No.	Kab/kota	Fungsi Ruang	Arahan Pengembangan Pemanfaatan Ruang (Pola Ruang)	Kebutuhan Infrastruktur (Struktur Ruang)
				● Kawasan Industri Lampung (KAIL)
4.	Kab.Pesawaran	PKL Perkotaan Gedungtataan	● Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah, termasuk pengembangan wilayah metropolitan dan sistem angkutan umum masal perkotaan ● Bagian dari Kawasan strategis Pariwisata Teluk Lampung ● Kawasan Strategis Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman	● Pengembangan aksesibilitas jalan Pelabuhan Panjang – Padang Cermin – Sp. Kota Agung ● Pengembangan Terminal Tipe B ● Pengembangan Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Pahawang ● SUTET 275 KV Gumawang – Lampung 1 ● Gardu Induk ● SPAM Regional Way Sabu ● Pembangunan Jalur Lintas Kereta Api Tegineneng – Bandar Lampung - Tarahan ● Bagian dari pengembangan Jalan Tol Bandar Lampung (SS Natar) – Kota Agung – BTS. Bengkulu ● Pengembangan Panas Bumi Way Ratai ● Pengembangan Kawasan Wisata Teluk Lampung dan sekitarnya ● Pembangunan SUTET ● Perlindungan terhadap kawasan ekosistem Mangrove ● Kawasan industri Tegineneng ● Pengembangan Ecowisata /Jasa Lingkungan di Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman
5.	Kab. Lampung Tengah	PKL Perkotaan Seputih Banyak, PKL	● Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis	● Pengembangan Terminal Tipe A Betan Subing

No.	Kab/kota	Fungsi Ruang	Arahan Pengembangan Pemanfaatan Ruang (Pola Ruang)	Kebutuhan Infrastruktur (Struktur Ruang)
		Perkotaan Kalirejo, PKL Perkotaan Terbanggi Besar – Bandar Jaya – Gunung Sugih (Terbagus)	karakteristik wilayah, termasuk pengembangan wilayah metropolitan dan sistem angkutan umum masal perkotaan ● Rencana Pusat Kegiatan Wilayah (Terbanggi - Bandar Jaya - Gunung Sugih)	● Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B ● Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal Way Seputih ● Pembangunan SUTET ● Gardu Induk ● Pembangunan Waduk/ Bangunan Sumber Daya Air Guna Mendukung Pertanian di Rumbia Extension ● Pengembangan Pariwisata di Tirta Gangga Kecamatan Seputih Banyak ● Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi ● Pengembangan Infrastruktur Pembangkit Energi Listrik Baru Terbarukan ● Pembangunan konektivitas jalan Lintas Pantai Timur ● Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri ● Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Terbanggi Besar -Kotabumi-Blambangan Umpu ● Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas PalembangMuaraenim-

No.	Kab/kota	Fungsi Ruang	Arahan Pengembangan Pemanfaatan Ruang (Pola Ruang)	Kebutuhan Infrastruktur (Struktur Ruang)
				Tarahan (peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA babaranjang, antara lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan sebidang yang memiliki traffic lalu lintas kendaraan jalan raya yang cukup tinggi)
6.	Kab. Lampung Timur	PKL Perkotaan Way Jepara, PKL Perkotaan Labuhan Maringgai, PKL Perkotaan Sukadana	• Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah, termasuk pengembangan wilayah metropolitan dan sistem angkutan umum masal perkotaan • Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian • Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan dan penyiapan infrastruktur kawasan Minapolitan • Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. • Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata religi,	• Pengembangan Pelabuhan Perikanan • Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B Mataram Baru • Pembangunan Pelabuhan Dermaga Sungai Cabang Way Seputih • Pembangunan Pelabuhan Kuala, Dermaga Danau Jepara • Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional Maringgai • Pengembangan Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Koridor Labuhan Maringgai – Tanjung Pakis • Gardu Induk • SPAM Regional Zona 3 • Pengembangan Migas Lepas Pantai di sekitar Pulau Batang Besar dan Batang Kecil (Wilayah Lampung Timur) • Pusat Pembibitan Tanaman Hortikultura • Pengembangan kawasan sentra hortikultura Pekalongan • Pengembangan sentra pembibitan padi di Purbolinggo

No.	Kab/kota	Fungsi Ruang	Arahan Pengembangan Pemanfaatan Ruang (Pola Ruang)	Kebutuhan Infrastruktur (Struktur Ruang)
			wisata kultural, sport tourism maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif • Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. • Penyiapan pembangunan pelabuhan pengumpan Labuhan Maringgai • Dukungan perwujudan Sistem Prasarana Jaringan Perkeretaapian Pringsewu-Rejosari-Metro-Sukadana • Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya • Dukungan terhadap pos militer/kepolisian dan sarana & prasarana pertahanan keamanan lainnya • Peningkatan ketahanan energi dan air • Pengembangan Kawasan Terintegrasi (Pelabuhan, Makanan, Transportasi, Perikanan, dan Pariwisata) Labuhan Maringgai	• Revitalisasi Tambak perikanan dan udang kawasan Pantai Timur Lampung • Perlindungan terhadap kawasan ekosistem Mangrove • Pengembangan Pemanfaatan Bendungan Marga Tiga • Pengembangan Pemanfaatan Bendung Gerak Jabung • Mendorong Pemulihan ekosistem pada TNWK dan kawasan penyangga
7.	Kab. Lampung Utara	PKL Perkotaan Blambangan Umpu	• Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah, termasuk	• Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B Simpang Propau • Pengembangan Pemanfaatan Waduk Way Rarem • Gardu Induk

No.	Kab/kota	Fungsi Ruang	Arahan Pengembangan Pemanfaatan Ruang (Pola Ruang)	Kebutuhan Infrastruktur (Struktur Ruang)
			pengembangan wilayah metropolitan dan sistem angkutan umum masal perkotaan • Kawasan Perdagangan • Kawasan Pergudangan • Kawasan Agrowisata Kopi Robusta • KPPD Lampung Utara dan Way Kanan • Kawasan Pertambangan dan Energi Lampung Utara	• Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Terbanggi Besar -Kotabumi-Blambangan Umpu
8.	Kab. Way Kanan	PKL Perkotaan Unit II Banjar Agung,	• Mendorong Perwujudan Jaringan Transportasi Udara pengumpan di Bandar Udara Gatot Subroto Way Kanan. • Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air berupa pengembangan prasarana air baku berupa <i>Broncaptering</i> di Kabupaten Way Kanan • Kawasan Suaka Margasatwa Gunung Raya Way Kanan • Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Lampung Utara dan Way Kanan • Pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Way Tuba dan Blambangan Umpu • Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri • Perwujudan Kawasan Pertanian dan Pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan	• Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B Baradatu • Pengembangan Jembatan Timbang UPPKB Blambangan Umpu • Pembangunan Pelabuhan Bahuga • Gardu Induk • Pengembangan Bandar Udara Gatot Subroto • Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Terbanggi Besar -Kotabumi-Blambangan Umpu

No.	Kab/kota	Fungsi Ruang	Arahan Pengembangan Pemanfaatan Ruang (Pola Ruang)	Kebutuhan Infrastruktur (Struktur Ruang)
			• Pengembangan Sistem Jaringan SDA berupa jaringan irigasi dengan memanfaatkan Aliran Air Bendungan Tiga Dihaji	
9.	Kab. Tulang Bawang	PKL Perkotaan Unit II Banjar Agung	• Kawasan Industri Tulang Bawang • Kawasan Pencadangan Konservasi Laut Tulang Bawang • Mendorong Pengembangan Kawasan Pariwisata Daerah (KPPD) tematik: <i>Culture Tourisme</i> • Pengembangan Kawasan Perikanan dan Tambak Udang.	• Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B • Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional Menggala • Pembangunan SUTET dan Gardu Induk • SPAM Regional Kawasan Ekonomi Mesuji-Tulang Bawang • Pelabuhan perikanan pantai Teladas • Pembangunan konektivitas jalan Lintas Pantai Timur • Pengembangan Tambak perikanan dan udang kawasan Pantai Timur Lampung • Perlindungan terhadap kawasan ekosistem Mangrove
10.	Kab. Tulang Bawang Barat	PKL Perkotaan Panaragan	• Pengembangan Kawasan Industri Tulang Bawang Barat • Mendukung Perlindungan Ekosistem Kawasan Pelestarian Alam Rawa Kandis Tulang Bawang Barat • Mendorong Pengembangan Kawasan Pariwisata Daerah (KPPD)	• Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B • Pengembangan pelabuhan dan dermaga sungai • Pembangunan SUTET • SPAM Regional Kawasan Ekonomi Mesuji-Tulang Bawang • Mendorong Pengembangan Infrastruktur Pendidikan Menengah-tinggi

No.	Kab/kota	Fungsi Ruang	Arahan Pengembangan Pemanfaatan Ruang (Pola Ruang)	Kebutuhan Infrastruktur (Struktur Ruang)
			tematik: <i>Culture Tourisme</i> • Pengembangan Kawasan Pendidikan Menengah-tinggi	
11.	Kab. Mesuji	PKL Perkotaan Wiralaga, PKL Perkotaan Simpang Pematang	• Kawasan Industri Mesuji • Mendorong Pengembangan Kawasan Pariwisata Daerah (KPPD) tematik: <i>Culture Tourisme</i>	• Pengembangan Jembatan Timbang UPPKB Mesuji • Pengembangan Pelabuhan perdagangan dan dermaga perikanan Kab. Mesuji • Pembangunan SUTET • Gardu Induk • Pembangunan SPAM Regional • Pengembangan Tambak perikanan dan udang kawasan Pantai Timur Lampung (Rawajitu) • Perlindungan terhadap kawasan ekosistem Mangrove
12.	Kab. Lampung Barat	PKL Perkotaan Fajar Bulan, PKL Perkotaan Lumbok Seminung, PKL Perkotaan Pura Jaya	• Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat Danau Ranau di Kabupaten Lampung Barat • Mendukung Pemulihan Ekosistem kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di 3 Kabupaten WP III dan Suaka margasatwa Gunung Raya Lampung Barat. • Perwujudan Kawasan Pariwisata KSPN Danau Ranau • Kawasan Strategis Geo-Park Suoh • Perwujudan sebagai kawasan konservasi, dan pelestarian sumber daya alam. • Kawasan berfungsi sebagai perlindungan	• Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B • Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung Pariwisata di sekitar Danau Ranau • Pengembangan Panas Bumi • Pengembangan Kawasan Geopark Suoh • Pembangunan Sistem peringatan dini Kegempaan serta pusat pengembangan inovasi di bidang geoteknologi.

No.	Kab/kota	Fungsi Ruang	Arahan Pengembangan Pemanfaatan Ruang (Pola Ruang)	Kebutuhan Infrastruktur (Struktur Ruang)
			terhadap kebencanaan geologis	
13.	Kab. Pesisir Barat	PKL Perkotaan Krui	• Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah 3T (Tertinggal, Terpencil, Terluar) khususnya pada kepulauan Pesisir Barat • Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir di sepanjang Pantai Barat Sumatera • Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Pesisir Barat • Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya di Perairan Pesisir Barat (WPP-572)	• Jalan Tol Bengkuntat – Batas Provinsi Lampung • Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B Krui • Pengembangan Pelabuhan di Pesisir Barat • Pengembangan Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Koridor Lampung Barat – Pulau Pisang • Gardu Induk • Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata di sekitar Kawasan Wisata Pantai Barat • Pembangunan bangunan pengaman pantai di Pesisir Barat • Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pesisir Barat Lampung (Bandara Taufik Kiemas) • Pengembangan sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan Perikanan Tangkap dan Budidaya di Perairan Pesisir Barat (WPP-572)
14.	Kab. Tanggamus	PKL Perkotaan Wonosobo	• Percepatan pengembangan dan operasional kawasan strategis sebagai <i>engine of growth</i> salah satunya Kabupaten Tanggamus, dan kawasan baru lainnya serta mendorong penerapan	• Pengembangan Pelabuhan Perikanan • Sentra industri Pengolahan hasil Laut dan Perikanan • Aksesibilitas Jalan Pelabuhan Panjang – Padang Cermin – Sp. Kota Agung

No.	Kab/kota	Fungsi Ruang	Arahan Pengembangan Pemanfaatan Ruang (Pola Ruang)	Kebutuhan Infrastruktur (Struktur Ruang)
			prinsip <i>Eco-Industry Park</i> • Kawasan Strategis Resapan Air Bendungan Batutegi • Kawasan Konservasi Perairan Teluk Kiluan, Kecamatan Kelumbayan • Pengembangan Pariwisata dikawasan teluk lampung	• Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B Kota Agung • Pembangunan Pelabuhan Kota Agung/Batu Balai • Gardu Induk • Perlindungan terhadap kawasan ekosistem Mangrove
15.	Kab. Pringsewu	PKL Perkotaan Pringsewu	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah, termasuk pengembangan wilayah metropolitan dan sistem angkutan umum masal perkotaan	• Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B Gadingrejo • Gardu Induk • Rencana jalur kereta api ganda (double track) Tanjung Karang – Pringsewu dan Rejosari-Pringsewu • Bagian dari pengembangan Jalan Tol Bandar Lampung (SS Natar) – Kota Agung – BTS. Bengkulu • Pengembangan dan Pemanfaatan Bendungan Way Sekampung

Sumber : Revisi RTRW-Provinsi Lampung, 2023



RANCANGAN AKHIR RPJPD
TAHUN 2025-2045

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1.1 Permasalahan Pembangunan pada Aspek Sosial

Kualitas SDM Lampung (nilai IPM) belum bersaing di tingkat Regional dan Nasional. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan masalah dasar yang dapat menghambat pembangunan dalam era globalisasi. Kualitas SDM dapat dijelaskan melalui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana indeks tersebut menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan taraf hidup.

Secara regional, IPM Provinsi Lampung menempati peringkat terendah di wilayah Sumatera dan berada pada posisi ke-24 secara nasional di tahun 2022. Kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung sudah meningkat namun belum optimal, mengingat pada saat yang bersamaan semua daerah terus berlomba untuk memperkuat kualitas SDM penduduknya.

Kemiskinan Regional dan Kemiskinan Ekstrem masih lebih tinggi dibanding rata-rata Nasional, serta masih terdapat ketimpangan antar kelompok penduduk. Tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode tahun 2005 s.d. 2023 masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pada bulan Maret tahun 2023 tingkat kemiskinan Provinsi Lampung sebesar 11,11% menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Lampung berada pada urutan ke-4 tertinggi di Sumatera, sekaligus menempati posisi ke-13 tingkat kemiskinan tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia. Gambaran kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya untuk mendongkrak “urutan posisi” tingkat kemiskinan Lampung secara regional maupun nasional masih perlu ditingkatkan secara masif dan berkesinambungan. Selanjutnya, kondisi kemiskinan ekstrem Provinsi Lampung tercatat sebesar 1,32 persen pada tahun 2023, masih membutuhkan upaya-upaya lanjutan guna mencapai target 0 persen sebagaimana Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022. Lebih lanjut, tingkat ketimpangan antar kelompok pendapatan yang ditunjukkan oleh Rasio Gini Provinsi Lampung pada tahun 2023 tercatat sebesar

0,324 . Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung.

Selanjutnya, tinjauan kemiskinan Provinsi Lampung dari sisi wilayah pada periode 2005 s.d. 2023 telah menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di kawasan pedesaan masih lebih tinggi dibanding dengan kondisi di perkotaan. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di pedesaan tercatat sebesar 12,65 persen (737,71 ribu jiwa) dan di perkotaan sebesar 8,02 persen (232,96 ribu jiwa). Faktor penyebab ketimpangan antar-wilayah adalah belum meratanya pertumbuhan wilayah sehingga memicu ketimpangan tingkat kesejahteraan. Terdapatnya ketidaksamaan faktor *endowment* antar satu wilayah dengan lainnya. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kecukupan untuk hidup layak yang berbeda antara kota dan desa.

Di sisi kesehatan, indikator yang paling dapat menggambarkan pembangunan di bidang kesehatan adalah **Usia Harapan Hidup (UHH)**. Data tahun 2023 UHH Provinsi Lampung sebesar 71,25 tahun, capaian ini masih di bawah rata-rata UHH secara nasional yang sebesar 72,13 tahun. Indikator lainnya adalah **Angka Kematian Ibu (AKI)** dan **Angka Kematian Bayi (AKB)**. AKI dan AKB menjadi indikator yang penting untuk dikarenakan ibu dan bayi termasuk kelompok penduduk yang rentan terkena berbagai jenis penyakit. Pada tahun 2023 kasus kematian ibu di Provinsi Lampung sebanyak 105 kasus, sedangkan secara nasional terjadi 4.129 kasus kematian ibu. Jumlah kasus kematian bayi di Provinsi Lampung tahun 2023 sebesar 624 kasus, sedangkan secara nasional terjadi 29.945 kasus kematian bayi. Masih tingginya kasus kematian ibu dan bayi ini masih menjadi permasalahan pembangunan di Provinsi Lampung.

Status gizi balita sangat pendek dan pendek (Stunting) merupakan kondisi gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak. Hal tersebut dapat terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Berdasarkan data SKI, pada tahun 2023 prevalensi stunting Provinsi Lampung 14,9 persen dan nasional sebesar 21,5. Sekalipun lebih rendah daripada nasional, capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kasus stunting pada balita yang ada di Provinsi Lampung. Sehingga pada

tingkat berapapun juga, stunting adalah masalah yang harus ditanggulangi. Balita yang berada pada kondisi stunting akan memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas sumber daya manusia kedepan.

Permasalahan kesehatan lainnya adalah **pengendalian penyakit yang terdiri atas pengendalian penyakit menular, tidak menular dan infeksi *emerging***. Penyakit menular utama yang terjadi di Provinsi Lampung antara lain HIV/AIDS, TBC dan malaria. Kasus HIV/AIDS Provinsi Lampung tahun 2013 sejumlah 183 kasus dan meningkat menjadi 730 kasus di tahun 2022. Provinsi Lampung menempati peringkat ke-5 provinsi dengan penambahan kasus AIDS tertinggi di Pulau Sumatera. Selanjutnya, Provinsi Lampung masuk kedalam provinsi yang masih memiliki kasus TBC terbanyak di Indonesia dengan prevalensi sebesar 0,21 persen dari populasi penduduk atau 19,27 ribu jiwa pada tahun 2022. Cakupan penemuan kasus (*Case Detection Rate*) TBC Provinsi Lampung sebesar 53% yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Indikator lainnya adalah keberhasilan pengobatan TBC (*Success Rate*), dimana pada tahun 2023 Provinsi Lampung mencapai *Success Rate* sebesar 96,4%. Sekalipun cukup tinggi, namun *Success Rate* harus terus dipertahankan terlebih jika *Case Detection Rate* semakin meningkat, maka tantangannya adalah bagaimana mempertahankan *Success Rate* tetap berada pada hasil yang tinggi.

Kemudian penyakit malaria masih banyak terjadi khususnya di daerah endemis seperti di Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Pesawaran dan Kota Bandar Lampung ini terjadi akibat terdapatnya daerah dengan genangan air, rawa, tambak dan tepi laut yang menjadi tempat berkembangnya nyamuk. Angka kesakitan malaria terbesar ada di Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung.

Hal lain yang patut diwaspadai adalah **pergeseran pola penyakit degeneratif** (Penyakit Tidak Menular) seperti Kanker, Hipertensi, Diabetes Mellitus dan lain-lain. Penyakit tidak menular ini terjadi akibat pola hidup yang tidak sehat, konsumsi makanan cepat saji, kurang olahraga dan istirahat serta pikiran yang tertekan (stres). Data menunjukkan bahwa kasus penyakit hipertensi yang terjadi

pada penduduk usia >15 tahun di Provinsi Lampung pada tahun 2023 sejumlah sejumlah 2,17 juta jiwa atau sebesar 23,03% dari total penduduk Provinsi Lampung. Adapun prevalensi Hipertensi nasional pada tahun 2023 sebesar 30,8%. Sedangkan untuk penyakit diabetes mellitus pada tahun 2023 terdapat sejumlah 89 ribu kasus di Provinsi Lampung. Prevalensi secara nasional sebesar 10% untuk usia 18-59 tahun dan 24,3% untuk usia >60 tahun.

Akses fasilitas kesehatan. Ketersediaan dan pemerataan fasilitas kesehatan menjadi salah satu kunci keberhasilan di bidang kesehatan. Untuk pelayanan kesehatan primer, rasio puskesmas yang ideal adalah 1 puskesmas untuk 1 kecamatan. Bila dibandingkan dengan konsep wilayah kerja Puskesmas di mana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata 20.000 penduduk, rasio puskesmas per 100.000 penduduk tahun 2022 sebesar 3,46 namun angka ini belum memenuhi standar (5 Puskesmas dalam 100.000 penduduk), rata-rata satu puskesmas melayani 28.857 penduduk.

Standar terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap **pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan** di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Standar WHO adalah 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di Indonesia dari tahun 2015-2020 sekitar 1 per 1.000 penduduk. Pada Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020 tercantum bahwa rasio tempat tidur rumah sakit di Provinsi Lampung sudah tercukupi, yaitu mencapai 1,0 walaupun masih berada di bawah angka nasional (1,4). Sedangkan untuk tahun 2022, terdapat jumlah tempat tidur sebanyak 8.254, sehingga rasio tempat tidur rumah sakit di Provinsi Lampung sebesar 0,91 atau belum memenuhi standar WHO.

Tenaga kesehatan merupakan sumber daya manusia yang peranan dan keberadaannya sangat penting dan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan adalah Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Strategis. Pada tahun 2022 hanya ada 4 kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang memiliki distribusi lengkap 9 Jenis Tenaga Kesehatan

Strategis di Puskesmas yaitu Bandar Lampung, Metro, Pringsewu dan Pesawaran. Rasio dokter menjadi indikator penting yang dapat memberikan gambaran ketersediaan dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tahun 2022, rasio dokter umum terhadap 100.000 penduduk di Provinsi Lampung baru mencapai 23,2. Rasio ini belum mencapai target nasional yang diharapkan yaitu 50 per 100.000. Rasio dokter spesialis pada tahun 2022 adalah 13,6 artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh sekitar 13-14 dokter spesialis. Sedangkan rasio dokter spesialis terhadap RS sebesar 15,21 artinya setiap RS rata-rata memiliki sekitar 15-16 orang dokter spesialis.

Akses dan kualitas terhadap pelayanan kesehatan perlu dilindungi dengan jaminan kesehatan yang memadai. Pola pembiayaan kesehatan harus diganti dari *out of pocket* menjadi sistem jaminan kesehatan sehingga tidak memberatkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Lampung pada tahun 2022 sebesar 58,5. Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 15 persen, Pekerja bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri sebesar 10,8 persen, Bukan Pekerja (BP) sebesar 1,06 persen. Sehingga penduduk Provinsi Lampung yang terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2022 sebesar 85,36 persen, sedangkan capaian nasional sebesar 72,2 persen.

Kementerian Kesehatan menjadikan **kesehatan jiwa sebagai salah satu layanan prioritas** di samping layanan kesehatan untuk penyakit kronis lainnya seperti jantung, kanker, dan lainnya. WHO juga mencanangkan bahwa "*Mental Health is a Human Right*". Kesehatan jiwa adalah *silent killer* yang sering tidak terdeteksi namun memiliki dampak yang luas. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023, prevalensi masalah kesehatan jiwa pada penduduk usia ≥ 15 tahun di Provinsi Lampung adalah sebesar 0,70% dari jumlah penduduk. Dari penduduk yang terduga mengidap depresi tersebut, hanya 14,80% diantaranya yang menjalankan pengobatan. Data lainnya menyebutkan bahwa prevalensi penduduk usia ≥ 15 tahun yang mempunyai pikiran mengakhiri hidup dalam satu bulan terakhir adalah 0,14% dari jumlah penduduk. Data ini menggambarkan bahwa kesehatan jiwa menjadi permasalahan pembangunan dibidang kesehatan.

Di bidang pendidikan, **Angka Rata-Rata Lama Sekolah** (RLS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Pada tahun 2023 angka RLS di Provinsi Lampung sebesar 8,29 tahun. Angka ini **masih cukup rendah dan menempati peringkat ke-2 terbawah se-Sumatera** setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indikator lainnya adalah angka **Harapan Lama Sekolah** (HLS) yaitu lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Pada tahun 2023 angka HLS Provinsi Lampung sebesar 12,77 tahun. Angka ini masih cukup rendah dan menempati peringkat ke-3 terbawah se-Sumatera.

Indikator lainnya adalah **Angka Putus Sekolah** (APTS) yaitu persentase siswa yang pada tahun ajaran sekarang tidak melanjutkan sekolah lagi sebelum lulus jenjang pendidikan tertentu, terhadap siswa yang pada tahun ajaran lalu masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama. APTS pada jenjang SD/ sederajat 0,00 persen, SMP/ sederajat 1,43 persen, SMA/ sederajat 2,59 persen. **Angka Putus Sekolah pada jenjang SMA menempati peringkat ke-2 tertinggi se-Sumatera. Sedangkan pada jenjang SMP menempati peringkat ke-1 se-Sumatera.**

Kondisi pembangunan pendidikan tergambar pula dari program peningkatan mutu tenaga kependidikan, terutama pada tenaga guru. Berdasarkan neraca pendidikan Kemendikbud RI, sebagian besar guru sudah memiliki kualifikasi minimal S1/D4, namun **kompetensi guru di Provinsi Lampung masih rendah**, ini dilihat dari nilai rata-rata hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) Provinsi Lampung baru mencapai 53,38 poin.

Pada urusan sosial, sasaran pelayanan urusan sosial adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat korban bencana. Permasalahan PPKS terbanyak di Provinsi Lampung yaitu fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak-anak terlantar, gelandangan/tuna sosial dan pengemis serta perlindungan dan jaminan sosial bagi pada saat tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. **Penanganan PPKS yang masih belum optimal** salah satu faktornya adalah tata kelola Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),

termasuk perluasan dan pengembangan sistem kepesertaan, sinergi data dasar kependudukan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. **Indikator Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani hanya mencapai angka 5,6 persen pada tahun 2022.**

Pada pembangunan kebudayaan, pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai-nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Capaian pembangunan kebudayaan dapat diukur dengan **Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**. Pada tahun 2022 IPK Provinsi Lampung sebesar 55,71 persen. Dengan **capaian IPK tersebut, Provinsi Lampung berada pada posisi ke-13 secara nasional**. Capaian IPK ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala pada registrasi terhadap warisan budaya benda meliputi bangunan, struktur dan situs cagar budaya, serta warisan budaya tak benda. Permasalahan lainnya adalah kurangnya apresiasi dan pelestarian nilai-nilai budaya ditengah deras nya arus informasi yang membawa budaya dari luar yang tidak sesuai dengan kearifan lokal.

Dalam **penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas)** dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Hal ini terjadi karena masih adanya unjuk rasa dan aksi massa yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, personil Linmas yang terlibat masih kurang dan belum optimalnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung mencatat 301 kasus sengketa tanah selama periode tahun 2015 s.d. 2020. Data tersebut **menunjukkan bahwa terdapat potensi konflik** tanah antar-masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah.

Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa

semakin tidak aman. Menurut publikasi Statistik Kriminal Tahun 2023, **jumlah kasus kriminal di Provinsi Lampung sebanyak 11.022 kasus**. Jumlah ini menempatkan Provinsi Lampung sebagai provinsi **peringkat ke-3 di Sumatera** dengan jumlah kasus kriminal setelah Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kesetaraan Gender.

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) adalah indikator yang menunjukkan perbandingan capaian antara IPM perempuan dan IPM laki-laki. Pada tahun 2017 IPG Provinsi Lampung sebesar 90,49 persen dan turun menjadi 90,37 persen di tahun 2021. Capaian ini **lebih rendah dari IPG nasional** tahun 2021 yang sebesar 91,27 persen.

Indikator yang dapat menggambarkan perlindungan anak adalah Indeks Perlindungan Anak (IPA). Capaian IPA Provinsi Lampung tahun 2022 adalah 61,61 persen. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 65,07 persen, maka terjadi penurunan sebesar 3,46 poin. **IPA Provinsi Lampung tahun 2018 s.d. 2020 masih berada di bawah capaian nasional.**

Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan belum berjalan optimal. Data menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir telah terjadi **peningkatan jumlah kasus korban kekerasan perempuan yang mencapai angka tiga kali lipat** dari yaitu sebanyak 169 korban kekerasan tahun 2017 menjadi 653 korban pada tahun 2021 dan sebanyak 786 korban pada tahun 2023. Menurut data Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan selama 12 tahun terakhir meningkat hampir 8 kali lipat dan di masa pandemi Covid-19 semakin meningkat sebanyak 63 persen. Pelaku tindak kekerasan selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan adalah berjenis kelamin laki-laki, hal ini menjelaskan bahwa profil pelaku pelecehan seksual, baik itu dari latar belakang pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, maupun status sosial ekonomi ternyata mayoritas semua pelaku pelecehan seksual yang ditemui adalah laki-laki.

Selanjutnya, kemajuan teknologi yang ditandai dengan semakin mudahnya akses terhadap internet juga memiliki dampak negatif bagi anak. Penggunaan yang berlebihan menyebabkan berkurangnya aktivitas fisik, interaksi tatap muka dan membuat orang cenderung malas. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada periode tahun 2019 s.d. 2021 Persentase anak usia 7-17 tahun yang mengakses internet paling tinggi sebesar 32.81 persen meningkat menjadi 59.91 persen mengakses media sosial. Untuk konten hiburan meningkat dari 32.23 persen menjadi 50.85 persen. Media sosial menyediakan ruang untuk melakukan interaksi sosial, berdiskusi dan berbagi tentang berbagai informasi. Namun, tanpa adanya pengawasan yang ketat dari orang tua, anak akan cenderung terlena dan berada dalam bahaya predator anak dan rawannya *cyber bullying*.

Isu lainnya adalah **perdagangan orang (*human trafficking*)**. Pada tahun 2017, di Provinsi Lampung terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebanyak **191 kasus dan meningkat menjadi 681 kasus** pada tahun 2021. Korban perdagangan orang seringkali tidak menerima bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk dapat pulih dan berintegrasi kembali ke keluarga dan masyarakat. Hal ini terjadi karena banyak korban perdagangan orang tidak teridentifikasi oleh pemerintah.

Selanjutnya pada **urusan kepemudaan**, terjadi masalah krisis moral yang dialami oleh pemuda yang dapat mengancam masa depan bangsa seperti pengangguran, tindak kekerasan, penyalahgunaan narkoba, pornografi, perilaku seks bebas, prostitusi, HIV/AIDS, perilaku LGBT dan paham radikalisme. Hal-hal tersebut menyebabkan belum optimalnya potensi pemuda dalam mengaktualisasikan dirinya. Disisi lain, banyak juga pemuda yang mampu berprestasi dalam berbagai bidang seperti akademis, seni, budaya, olahraga dan lain-lain. Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan di Provinsi Lampung belum optimal. **Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)** Provinsi Lampung tahun 2020 sebesar 49,53 persen, **masih dibawah rata-rata nasional** yang sebesar 51 persen. Merujuk data Statistik Pemuda Tahun 2022, persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang ada di Provinsi Lampung sebanyak 23,39 persen dari jumlah

penduduk. Dari jumlah tersebut 39,50 persen pemuda di Lampung telah tamat pendidikan SMP, 37,30 persen tamat SMA dan 8,23 persen tamat perguruan tinggi. Sehingga dapat diketahui bahwa potensi pemuda di Provinsi Lampung belum maksimal, yang pada akhirnya menimbulkan fenomena tawuran, *bullying*, balapan liar. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi pemuda adalah melalui kegiatan olahraga. Tingginya animo pemuda terhadap olahraga belum diimbangi fasilitas memadai, seperti *jogging track*, jalur khusus pesepeda, taman olahraga, pusat kebugaran dan lainnya.

Berikutnya, pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat desa memiliki tolok ukur keberhasilan yang dilihat dari kemampuan masyarakat menyangkut kemampuan ekonomi, akses kesejahteraan dan budaya. Berdasarkan **Indeks Desa Membangun (IDM)** Tahun 2023, terdapat sebanyak 2.426 desa/kelurahan yang tersebar di Provinsi Lampung. Dari jumlah tersebut, terdapat desa tertinggal 4 desa (0,16%) , desa berkembang sebanyak 1.233 desa (50,82%), desa maju sebanyak 1.008 desa (41,55%) dan desa mandiri sebanyak 181 desa (7,46%). **Rendahnya jumlah desa mandiri** ini dapat menggambarkan masih rendahnya penguatan kapasitas desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kewenangan pemerintah desa yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh aparatur desa untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa. Faktor penyebab hal tersebut adalah **minimnya pengetahuan dan peningkatan kompetensi aparatur desa** dalam menjalankan pemerintahan desa dan minimnya partisipasi dan kerjasama. Penyelenggaraan **pelayanan publik di desa masih belum optimal** dikarenakan minimnya sarana dan prasarana pelayanan publik yang tersedia. Pemerintah desa dibentuk dan diberikan kewenangan yang cukup luas dengan maksud untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun dengan keterbatasan yang ada, terutama oleh faktor fasilitas perkantoran dan SDM aparatur, menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak optimal.

Terakhir, permasalahan pembangunan pada urusan pemerintahan dan hukum. Pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintah merupakan bagian dari **reformasi birokrasi** dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan (*good governance*). Saat ini kapasitas kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya; transparansi, akuntabilitas dan orientasi pelayanan. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. **Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah 58,92 dengan predikat “CC” dengan kategori Cukup (memadai).** Predikat ini menunjukkan bahwa masih diperlukan banyak perbaikan pada upaya reformasi birokrasi di Provinsi Lampung.

Selain itu, kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur cukup rendah dan masih terdapat pola pikir birokrat yang menempatkan diri sebagai penguasa bukan pelayan masyarakat. Salah satu indikatornya adalah persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat di Provinsi Lampung tahun 2022 sebesar 32,39 persen. Rendahnya persentase tersebut dapat menggambarkan belum meratanya pengembangan kompetensi bagi SDM aparatur, serta belum optimalnya pelaksanaan program peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM aparatur.

Pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan diantaranya kurang responsif, kurang informatif, kurang koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat dan inefisiensi. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap pelayanan terhadap masyarakat, akan tetapi berpengaruh juga terhadap iklim investasi. Sementara dalam kehidupan bermasyarakat, rendahnya pelayanan publik berimplikasi munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Krisis kepercayaan tersebut teraktualisasi dalam bentuk protes dan demonstrasi yang cenderung anarkis dan tidak sehat. Kementerian PANRB menyebutkan bahwa **Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah Daerah masih lebih rendah daripada IPP Nasional.** Pada tahun 2019, IPP Pemerintah Daerah sebesar 3,43 dan Nasional sebesar 3,63.

Permasalahan pembangunan di bidang hukum meliputi rendahnya kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, minimnya kualitas penegakan hukum dan penegakan hukum yang diskriminatif. Beberapa penyebab munculnya permasalahan hukum tersebut antara lain: lemahnya integritas penegakan hukum, tidak ada pengawasan yang efektif, masih melihat hukum dari kontennya, mentalitas praktisi hukum yang lemah, struktur hukum yang *overlapping* kewenangan, sarana dan prasarana hukum kurang memadai.

Permasalahan hukum yang nyata antara lain adalah kelemahan penegakan hukum seperti isu korupsi dan pencucian uang (*money laundry*). Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi Lampung pada tahun 2022 sebesar 45 kasus dan naik kembali di tahun 2023 sebanyak 49 kasus. Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah pada akhirnya merugikan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan ketidakadilan serta pemihakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun penyedia layanan publik. Ketidakadilan dan pemihakan berimbas pada ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik tersebut. Hukum dapat dengan mudah dikalahkan dengan suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh oknum. Sistem tata kerja penyusunan produk hukum dan peningkatan kapasitas SDM bidang penyusunan produk hukum belum optimal.

3.1.2 Permasalahan Pembangunan pada Aspek Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Daerah Belum Dapat Menghapuskan Kemiskinan. Pembangunan Ekonomi yang berkualitas serta mampu mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan daya beli masih belum terlaksana secara optimal, sehingga masih terdapat kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi hampir merata di setiap wilayah Provinsi Lampung. Meskipun data statistik sepanjang periode tahun 2005 s.d. 2019 menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Lampung lebih baik dibanding dengan LPE secara nasional, namun kemampuan pemulihan ekonomi Lampung saat terjadi guncangan masih lebih rendah dibanding dengan rata-rata nasional. Hal tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh performa

struktur perekonomian daerah dan sektor utama penggerak perekonomian yang mendominasinya.

Terdapat 3 (tiga) lapangan usaha sektoral yang berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah Provinsi Lampung, yaitu : sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri dan sektor perdagangan. Tingkat pertumbuhan 3 sektor utama tersebut menggambarkan bahwa :

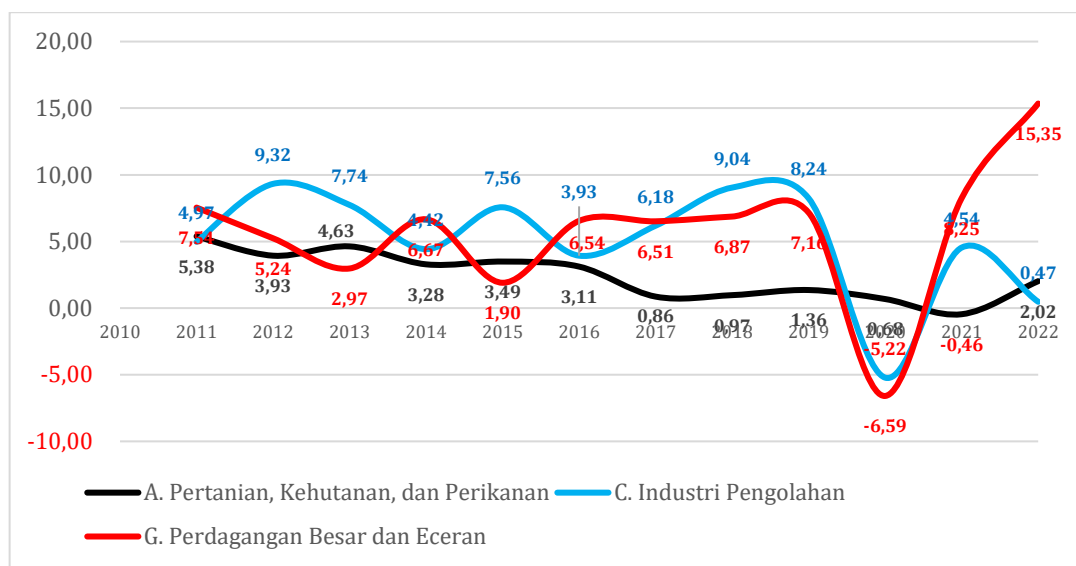
Pertumbuhan pada lapangan usaha pertanian cenderung menurun dari 5,38 persen di tahun 2011 menjadi 2,02 persen di tahun 2022. Perhatian terhadap lapangan usaha pertanian merupakan hal yang penting bagi ekonomi Lampung, mengingat bahwa sektor ini memiliki *share* paling besar dalam perekonomian Lampung dan menyerap sekitar 40 persen dari total tenaga kerja yang ada di Provinsi Lampung. Sektor Pertanian di dominasi oleh sektor tanaman pangan yang memiliki nilai tambah yang kecil mengingat bahwa komoditas tanaman pangan merupakan kebutuhan dasar yang tidak memerlukan proses pengolahan lebih lanjut untuk memenuhi permintaan (*demand*) pasar.

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan yang cukup kuat pada sektor Industri ini terjadi di tahun 2017-2019 yang berada pada kisaran 6-9 persen, dan berkontraksi saat Pandemi Covid-19 di tahun 2020. Pasca pandemi, **pertumbuhan lapangan usaha industri masih belum kembali pada performanya** dan masih pada level 4,54 dan kembali melambat sebesar 0,47 persen di tahun 2022 sehingga masih belum kembali kepada performa terbaiknya. Sektor industri di Provinsi Lampung masih bergantung pada sumber daya alam dan belum menyentuh teknologi menengah-tinggi berbasis riset dan teknologi maupun berbasis sumber daya mineral yang nilai tambahnya tinggi, sehingga sektor industri masih belum mampu meningkatkan kapasitas perekonomian di Provinsi Lampung.

Disisi Perdagangan; pada tahun 2016-2019 tingkat pertumbuhan sektor perdagangan cukup stabil pada rentang 6-7 persen. Dengan membaiknya perekonomian, aktivitas dan permintaan barang-jasa telah mendorong laju pertumbuhan sektor perdagangan menjadi 8,25 persen di tahun 2021, dan pertumbuhan sebesar 15,35 persen di tahun 2022 yang merupakan tingkat

pertumbuhan tertinggi sepanjang catatan statistik periode 2011-2022. Namun demikian, **kontribusi nilai ekspor di Provinsi Lampung juga masih didominasi oleh produk pertanian dan bahan baku** sehingga meskipun secara volume dan aktivitasnya relatif besar tetapi rasio nilai tambahnya kecil.

Gambar 3. 1 Tingkat Pertumbuhan 3 (Tiga) Lapangan Usaha Sektor
Daerah Perekonomian Daerah



Struktur ekonomi Provinsi Lampung masih berbasis pada sektor pertanian dengan nilai tambah rendah bahkan cenderung menurun; dimana sebagian besar tenaga kerja berada pada sektor pertanian juga memiliki produktivitas rendah. Optimalisasi Sumberdaya Laut, Pariwisata, Komoditas Unggulan, Energi, dan Keuangan Inklusif disertai dengan pemanfaatan Teknologi dan digitalisasi juga belum menjadi poros pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung dalam perspektif keberlanjutan. Hal tersebut terkait dengan rendahnya kualitas SDM, riset dan inovasi, serta kapasitas infrastruktur yang terbatas. Hal ini menghambat upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Stagnasi sektor industri di Provinsi Lampung cenderung terlihat dengan menurunnya pertumbuhan sektor industri, hal ini tentunya dipengaruhi oleh proses produksi berbiaya tinggi dikarenakan infrastruktur pendukung yang relatif masih jauh dari ideal dan keterbatasan SDM tenaga kerja terampil, sehingga biaya produksi tidak dapat bersaing. Selanjutnya diperburuk dengan minimnya

implementasi serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seharusnya dapat mengefisienkan serta menghasilkan produk tambahan dari proses produksi produk utamanya.

Meskipun banyak terdapat Potensi sumber daya laut dan pariwisata di wilayah pesisirnya, pengembangan sektor ini di Provinsi Lampung masih kurang berkembang. Secara umum hal ini dikarenakan minimnya SDM yang memiliki keterampilan dan pengetahuan terkait dengan potensi yang dimiliki, kemudian juga masih belum terintegrasinya pengembangan potensi Laut, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam satu ekosistem serta minimnya investasi dan kebijakan untuk mampu bersaing ke pasar global.

Akses keuangan yang memiliki *barrier* (penghalang) dan tidak inklusif juga tidak terkelolanya alternatif pembiayaan, menjadi faktor penghambat dari pengembangan usaha dari potensi unggulan di Provinsi Lampung, sehingga menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi terhadap penduduk yang tidak memiliki akses kepada sektor jasa keuangan dan harus mengambil alternatif dengan kompensasi tinggi atau berjalan dengan keterbatasan modal, sehingga sumber daya yang diolah tidak secara optimal berkembang dan kurang berdampak kepada kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat.

3.1.3 Permasalahan Pembangunan pada Aspek Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur

Provinsi Lampung memiliki keunggulan yang harus bisa dimaksimalkan dalam perencanaan pembangunan. Pembangunan di Provinsi Lampung kedepan dihadapkan sejumlah tantangan yang tidak ringan. Diantaranya **masih cukup tinggi ketimpangan antar wilayah** yang menjadi penyebab tingginya disparitas wilayah di Provinsi Lampung. Beberapa daerah di Provinsi Lampung **mengalami kendala akses transportasi yang terbatas**, terutama di daerah pedesaan. Secara umum, tingkat kemantapan infrastruktur jalan kewenangan pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 baru mencapai 78% dengan rata-rata tingkat kewenangan jalan Kabupaten/Kota sekitar 47% (data tahun 2022) merupakan kondisi yang masih memerlukan peningkatan kualitas untuk mendukung mobilitas dan

aksesibilitas masyarakat dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan antar wilayah Timur dan Barat Provinsi Lampung pada aspek sosial maupun ekonomi.

Sebagaimana diketahui, potensi wilayah di beberapa daerah Provinsi Lampung sangatlah beragam, mulai dari hasil bumi berupa produk pertanian dan perkebunan sampai daerah pariwisata. Ketimpangan ini juga terjadi pada bagian pesisir yang signifikan dalam hal infrastruktur, khususnya daerah pesisir yang masih menghadapi tantangan serius terkait dengan ketersediaan fasilitas dasar seperti jalan, sanitasi dan air bersih, kawasan permukiman, sumber daya air serta energi. Diperlukan upaya yang terarah dan terkoordinasi dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang inklusif, berkelanjutan, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat dari berbagai lapisan.

➤ **Kualitas Infrastruktur Konektivitas**

Provinsi Lampung menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan wilayah dan infrastruktur, yang berdampak signifikan pada efisiensi logistik dan konektivitas antar pulau. Berikut adalah beberapa permasalahan Infrastruktur dan Konektivitas :

Transportasi darat

- Kualitas infrastruktur jalan yang menjadi tumpuan dalam distribusi barang maupun angkutan penumpang masih perlu ditingkatkan. Kondisi kemantapan jalan nasional mencapai 93-95%, Jalan Provinsi mencapai kisaran 77-79% sedangkan Kabupaten 44-46%. Kemantapan jalan sangat penting untuk memperlancar arus logistik dan mengurangi biaya distribusi pada skala regional dan nasional.
- Konektivitas ke pusat-pusat produk unggulan Lampung menuju Jalan Nasional maupun Jalan Tol Trans Sumatera (*backbone*) belum optimal. Hal ini tentunya akan menghambat efisiensi logistik, mengingat Jalan Nasional dan Jalan Tol Trans Sumatera merupakan jalur utama yang menghubungkan berbagai wilayah di Sumatera dan meningkatkan aksesibilitas ke Pulau Jawa melalui pelabuhan logistik Panjang maupun penyeberangan Merak-Bakauheni.

- Permasalahan pada sektor transportasi darat terkait dengan *over dimension overloaded* (ODOL) menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan, kerusakan jalan, dan kecelakaan.
- belum optimal pemanfaatan beberapa terminal yang menjadi konektivitas pelayanan antar moda di dalam provinsi. Optimalisasi terminal ini diperlukan untuk mendukung kelancaran distribusi penumpang maupun logistik dan menghubungkan berbagai moda transportasi secara efisien.

Transportasi Laut

- Provinsi Lampung memiliki Pelabuhan Utama (Panjang) yang merupakan pelabuhan logistik ekspor impor, namun belum terintegrasi dengan jalur kereta api sehingga belum beroperasi secara optimal. Integrasi ini penting untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mengurangi waktu serta biaya transportasi barang.
- Di wilayah barat Lampung, terdapat Pelabuhan Batu Balai yang disiapkan untuk mendukung kawasan Industri Tanggamus, namun saat ini belum terdapat pelayanan kepelabuhanan karena kawasan industri tersebut belum beroperasi. Pengoperasian pelabuhan ini akan mendukung distribusi logistik dan sebagai outlet wilayah pantai barat Lampung.
- Beberapa pelabuhan pengumpan regional juga belum terkelola secara maksimal. Pengelolaan yang lebih baik akan memperkuat jaringan logistik regional maupun nasional dan mendukung keterhubungan antar pulau.

Transportasi Udara

- Tingkat pelayanan transportasi udara belum maksimal dalam mendukung pengembangan ekonomi secara signifikan. Bandara Radin Inten II serta dua bandara perintis, yaitu M. Taufik Kiemas (Pesisir Barat) dan Gatot Subroto (Way Kanan) masih perlu dikembangkan. Peningkatan kapasitas bandara ini akan memperkuat jaringan logistik udara dan mendukung konektivitas antar kawasan.

Transportasi Kereta Api

- Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi pada sektor perkeretaapian di Provinsi Lampung masih minim. Peran moda kereta api lebih banyak digunakan untuk angkutan batu bara, sementara infrastruktur rel belum optimal dalam mendukung angkutan barang dan penumpang yang lebih luas. Pengembangan ini penting untuk memperkuat jaringan logistik nasional dan menghubungkan Sumatera dengan Jawa melalui Pelabuhan Panjang maupun pelabuhan Merak-Bakauheni.

Transportasi Perkotaan

- Berkembangnya wilayah perkotaan Bandar Lampung sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) belum diiringi dengan sistem *aglomerasi* perkotaan yang maksimal. Minimnya konektivitas antar moda dan rendahnya kualitas angkutan umum di wilayah-wilayah *hinterlandnya* menyulitkan terwujudnya Metropolitan Bandar Lampung. Perbaikan ini akan mendukung jaringan logistik regional dan nasional. Sistem angkutan massal seperti bus, BRT (Bus Rapid Transit), dan angkutan rel perkotaan (MRT-LRT) belum berkembang dengan baik cenderung mengalami degradasi, selain itu kondisi pelayanan AKAP/AKDP mengalami penurunan yang memerlukan penanganan dalam peningkatan layanan.

Integrasi Moda Transportasi

- Integrasi antara berbagai moda transportasi di Lampung masih terbatas, kurang terpadu dan integrasinya simpul transportasi menyebabkan waktu tempuh yang lama dan biaya transportasi yang tinggi.

➤ Sanitasi dan Air Minum

Pada sektor sanitasi dan air minum terdapat beberapa masalah dan tantangan. Pada tahun 2022 akses Air Minum Layak mencapai 85,74% namun akses air minum yang aman hanya sekitar 3,96% dan akses sanitasi layak sebesar 83,88%. Beberapa kendala diantaranya belum tersebarnya

sarana prasarana pengelolaan sanitasi maupun air minum di daerah pedalaman, belum adanya skema kerjasama antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang efektif dalam memastikan operasi pengelolaan sanitasi dan air minum, rendahnya perilaku masyarakat terhadap air minum layak dan membuang sampah sembarangan, belum adanya kesadaran dalam mengurangi dan memilah sampah.

➤ **Kawasan Permukiman Kumuh**

Permasalahan kawasan permukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, jelek kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Kawasan permukiman kumuh (sebagaimana tercantum dalam tabel di Bab 2) merupakan tantangan pengembangan wilayah perkotaan yang harus diatasi. Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan masih perlu ditingkatkan peran pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai.

Permasalahan Kesenjangan Antar Wilayah di Provinsi Lampung dalam Aspek Sosial, Ekonomi, dan Infrastruktur Dasar



- **Kesenjangan antar wilayah** Kesenjangan antar wilayah merupakan isu yang menjadi tantangan yang harus diatasi dalam dua puluh tahun mendatang. Penyebab utama kesenjangan ini adalah terpusatnya sumber daya penggerak ekonomi, seperti persebaran penduduk, tenaga kerja terdidik dan terampil,

investasi, dan kredit perbankan. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana, serta konektivitas yang belum optimal, yang terlihat dari rendahnya kualitas jalan di tingkat kabupaten maupun provinsi, semakin menambah kompleksitas masalah ini. Disisi lain Kinerja sarana dan prasarana seperti rendahnya integrasi multimoda sektor transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, perumahan dan permukiman, dan sumber daya air maupun terbatasnya pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, kualitas lingkungan hidup, serta produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan antarwilayah juga dapat tergambar dari **Pertumbuhan ekonomi** di Provinsi Lampung menunjukkan variasi yang signifikan antar kabupaten/kota, pada tahun 2023, Kota Bandar Lampung mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 4,99%, sementara Kabupaten Pesisir Barat mencatat pertumbuhan terendah sebesar 3,42%. Kabupaten dengan infrastruktur yang lebih baik seperti Kota Bandar Lampung dan Kota Metro cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang lebih terbelakang. Misalnya, Kota Bandar Lampung dengan akses yang lebih baik terhadap transportasi dan fasilitas umum memiliki potensi investasi yang lebih besar, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sebaliknya, kabupaten-kabupaten seperti Mesuji, Pesisir Barat, Lampung Timur menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat karena keterbatasan akses dan infrastruktur yang memadai. Pertumbuhan yang tidak merata ini mencerminkan ketimpangan dalam distribusi investasi dan pembangunan infrastruktur ekonomi. Kabupaten dan Kota dengan potensi ekonomi besar seperti Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB provinsi, tetapi daerah-daerah dengan potensi yang kurang tereksplorasi mengalami pertumbuhan yang lambat. **Pendapatan per kapita** juga memperlihatkan ketimpangan yang mencolok. Kota Bandar Lampung dan Metro, sebagai pusat ekonomi dan administrasi, memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain seperti Kabupaten Lampung Timur dan Way Kanan. Ketimpangan ini dipicu oleh konsentrasi kegiatan ekonomi di daerah perkotaan, sementara daerah pedesaan masih bergantung pada sektor pertanian yang cenderung memiliki nilai tambah

yang lebih rendah. **Tingkat Kemiskinan** di Provinsi Lampung juga bervariasi secara signifikan antar wilayah. Kabupaten-kabupaten seperti Tanggamus, Lampung Barat, dan Mesuji mencatat tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Faktor penyebabnya antara lain adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang layak. Sebaliknya, daerah perkotaan seperti Kota Metro dan Kota Bandar Lampung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah karena lebih banyaknya peluang ekonomi dan akses yang lebih baik terhadap aktivitas ekonomi dan layanan dasar. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** di Lampung menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup besar. Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, dengan akses yang lebih baik ke layanan pendidikan dan kesehatan, memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah seperti Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Utara. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. **Gini Rasio**, sebagai indikator ketimpangan pendapatan, Gini Rasio perkotaan dan perdesaan Tahun 2023 tercatat sebesar 0,324 menunjukkan bahwa Provinsi Lampung memiliki tingkat ketimpangan yang cukup tinggi antara kota dan desa yang memerlukan perhatian untuk pengentasan ketidakmerataan. Kesenjangan pendapatan antar wilayah harus diatasi melalui kebijakan redistribusi yang adil, peningkatan akses ke peluang ekonomi. **Infrastruktur dasar**, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi provinsi, memiliki infrastruktur dasar yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah lain, pasokan listrik yang stabil, akses air bersih yang memadai, dan layanan telekomunikasi yang memadai, penyediaan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan yang sangat berbeda dengan daerah lain misalnya Kabupaten Pesisir Barat, Mesuji atau wilayah lainnya yang menghadapi kendala dalam hal aksesibilitas, kesulitan dalam akses transportasi yang memadai, akses listrik dan air bersih maupun layanan telekomunikasi seperti internet yang kurang tersedia dengan kualitas yang memadai. **Resiko Bencana**, juga mempengaruhi ketimpangan wilayah. Beberapa wilayah di Provinsi Lampung juga rentan terhadap berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, Tsunami, banjir, puting beliung dan tanah longsor. Risiko bencana ini dapat mempengaruhi pembangunan infrastruktur

dan kesejahteraan masyarakat. Ketika suatu wilayah sering terkena bencana, pembangunan bisa terhambat, dan sumber daya yang ada akan lebih banyak digunakan untuk tanggap darurat dan pemulihan daripada untuk pembangunan.

- **Persebaran penduduk dan tenaga kerja terdidik dan terampil terpusat di wilayah Perkotaan**

Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan, Wilayah yang lebih maju seperti Kota Bandar Lampung dan Kota Metro ataupun Kabupaten Lampung Tengah memiliki akses yang lebih baik terhadap akses pendidikan, baik pendidikan menengah atau pendidikan tinggi dan pelatihan kerja. Menjadikan penduduknya memperoleh akses pendidikan dan keterampilan yang lebih baik dan berkualitas dalam persaingan dunia kerja. Selain itu juga memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dan berkualitas, termasuk rumah sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan. Ini membuat konsentrasi tenaga pendidikan dan kesehatan cenderung terpusat di wilayah perkotaan seperti Kota Metro, Kota Bandar Lampung maupun Kabupaten Lampung Tengah karena mereka dapat menemukan pekerjaan yang lebih menjanjikan dan fasilitas yang lebih baik untuk praktik medis mereka. Hal ini juga sangat berpengaruh pada kecenderungan pada distribusi penduduk. Dengan demikian, pemenuhan sarana prasarana dasar dan utilitas yang merata dapat mempengaruhi distribusi penduduk dengan cara menciptakan ketertarikan atau daya tarik bagi penduduk untuk tinggal di suatu wilayah tertentu, yang mempengaruhi pertumbuhan perkotaan dan perkembangan pedesaan.

Terkait dengan puncak bonus demografi Provinsi Lampung yang diproyeksikan akan terjadi di Tahun 2035, yang mengindikasikan pada dekade terakhir sampai Tahun 2045 akan terdapat banyaknya penduduk usia tua. Mengantisipasi periode setelah puncak bonus demografi yakni pada Tahap ke-3 dan tahap ke-4 Periode RPJPD, di mana proporsi penduduk usia tua meningkat, memerlukan kebijakan yang komprehensif untuk memastikan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan ekonomi penduduk usia tua. Dibutuhkan peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan, kebijakan kesejahteraan sosial dan dukungan infrastruktur dan lingkungan seperti halnya bangunan dan perumahan ramah lansia, penyediaan transportasi dan mobilitas ramah lansia.

Untuk menanggulangi kesenjangan tersebut, pada setiap wilayah diterapkan tiga transformasi, yaitu transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola yang didukung dengan dua landasan transformasi, yaitu supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi serta ketahanan sosial budaya dan ekologi selanjutnya, transformasi tersebut dilengkapi dengan kerangka implementasi transformasi.

3.1.4 Permasalahan Pembangunan pada Aspek Lingkungan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH Provinsi Lampung tahun 2023 berada pada status “sedang” yaitu 69,91 masih perlu upaya kerja keras pada semua pemangku kepentingan karena komponen IKLH pada indikator Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) masih di bawah target. **IKA Provinsi Lampung memiliki angka 55,36 (kategori sedang)** dan tidak mencapai target SE Menteri LHK yaitu 58,54. Capaian IKA berada dibawah target diduga karena banyak limbah domestik (rumah tangga & UMKM) dan industri, limbah pertanian yang masuk dalam badan sungai serta terdapat lahan terbuka (kritis) yang berpotensi erosi dimana partikel padatan yang masuk ke dalam badan sungai berdampak pada jumlah padatan terlarut di air. **Sedangkan IKL Provinsi Lampung masih sangat rendah yaitu hanya 38,42 dan masuk kategori kurang.**

Berdasarkan capaian indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Lampung Tahun 2023 terdapat 8 kabupaten/kota yang belum mencapai target yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Utara; Pesisir Barat, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya, penurunan Strategis kualitas lingkungan terutama yang berkaitan persampahan. Permasalah lingkungan akan terjadi dimana prasarana pengelolaan persampahan belum memadai. Seiring bertambahnya jumlah penduduk membawa dampak terhadap tingginya timbulan sampah, belum tersedianya TPA Regional berikut pengolah sampah yang menggunakan teknologi tepat guna hal ini terlihat dimana kondisi eksisting **Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah sudah mengalami *over capacity***, ditambah dengan proses

pengurangan sampah dengan metode 3R masih juga belum maksimal dipenuhi, minimnya lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) juga belum tercukupi dalam hal kuantitas maupun kualitas. Belum adanya Kelembagaan Pemerintah dalam pengelolaan sampah juga belum maksimal dimana saat ini kelembagaan masyarakat pengelola layanan yang aktif 70% atau lebih (kurang dari 100%).

Lebih lanjut, terbentuknya lahan kritis merupakan salah satu indikator dari rusaknya ekologi dan lingkungan. Lahan yang telah mengalami kerusakan secara otomatis akan berkurang pula fungsi dan peranannya akibat pola pemanfaatan lahan yang kurang atau tidak memperhatikan teknik konservasi tanah. Parameter yang digunakan dalam menentukan luas kritis berdasarkan penutupan lahan, kelerengan, erosi, dan kawasan hutan.

Berdasarkan *updating* lahan kritis tahun 2020 (Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RURHL-DAS) Tahun 2023 - 2032 Wilayah Kerja BPDAS Way Seputih Way Sekampung, 2022), luas lahan kritis di wilayah kerja BPDAS Way Seputih Way Sekampung adalah 410.078 Ha, yang terdiri dari lahan kritis seluas 387.142 Ha dan sangat kritis seluas 22.936 Ha. Sedangkan lahan tidak kritis seluas 3.3980 Ha. **Hingga tahun 2022 tercatat luas lahan kritis Provinsi Lampung seluas 377.407 Ha dan lahan sangat kritis seluas 780 Ha** (BPDASHL Way Seputih - Way Sekampung, 2022).

Lampiran Perda tentang RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045

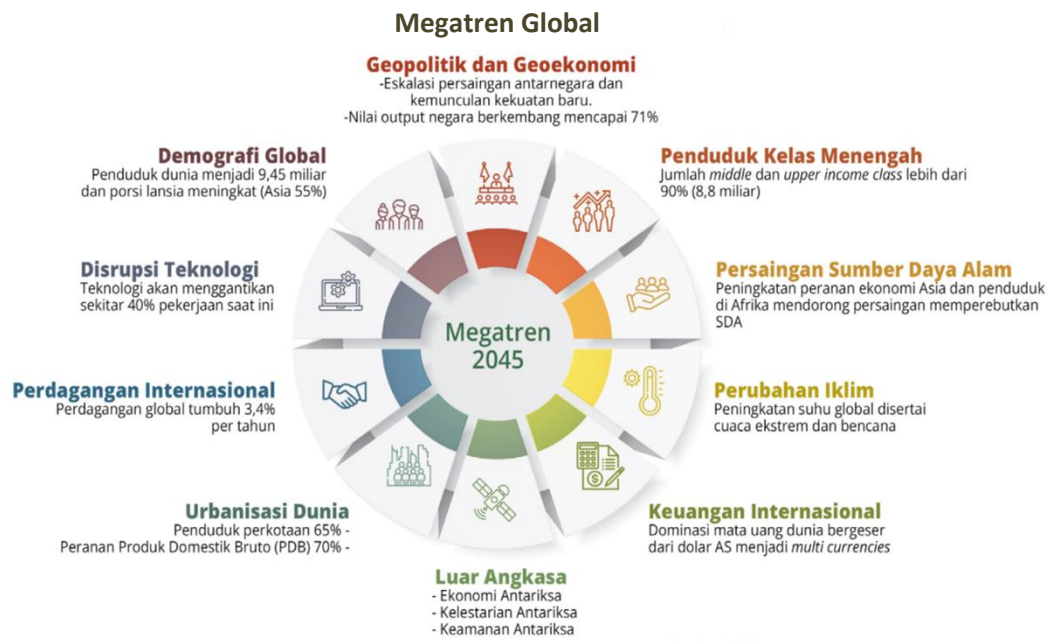
3.2 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1 MEGATREND GLOBAL

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global.

Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi.

Gambar 3. 3 Megatren Global



Demografi Global. Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (*life-span*) yang semakin panjang. Terkait dengan isu demografi tersebut, proyeksi penduduk Indonesia di tahun 2045 yang mencapai 324 juta jiwa juga merupakan akumulasi dari pertambahan penduduk di Provinsi Lampung yang diproyeksikan sebesar 11 juta jiwa di tahun 2045; juga memiliki kemiripan dalam merespon tantangan tantangan ke depan.

Gambar 3. 4 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak ahun 2025 dan 2045



Sumber: 1. *World Population Prospect 2022*, UN DESA; 2. Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050

Geopolitik dan Geoekonomi. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Perang antara Rusia dan Ukraina serta genosida Israel terhadap Palestina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Kerugian akibat perang tidak hanya dirasakan oleh negara yang berperang namun dampaknya juga dirasakan negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan, yang selanjutnya akan memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas (*borderless*) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional. Demikian pula halnya dengan Provinsi Lampung sebagai bagian dari negara Indonesia yang menganut sistem perekonomian terbuka, dimana terjadinya krisis global juga berdampak terhadap perekonomian nasional hingga ke daerah.

Merujuk narasi pada RPJPN tahun 2025-2045, terungkap bahwa pada tahun 2015 negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai output dunia, meningkat dari 34 persen pada tahun 1980. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai output yang menurun dari 32 persen pada tahun 2015 menjadi 20 persen pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita

negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015. Perekonomian global pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun 2015. Pada tahun 2050, nilai perekonomian dunia diperkirakan meningkat sebanyak 3 kali lipat dengan kontribusi dari 5 negara terbesar (Tiongkok, India, AS, Jepang & Indonesia) mencapai kurang lebih 55 persen dari nilai output dunia. Secara umum, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Ke depan, kondisi tersebut tentunya pula perlu terus dipantau perkembangannya, sehingga kemajuan perekonomian global yang diharapkan dapat menjadi peluang bagi peningkatan perekonomian nasional yang tentunya memerlukan kontribusi dari kemajuan ekonomi di daerah.

Disrupsi Teknologi. Disrupsi teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik.

Tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang. Disrupsi teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri. Disrupsi teknologi menyebabkan sebagian besar pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia. Selain itu, disrupsi teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi serta memukul sektor yang selama ini bertumpu pada pola kerja konvensional, seperti properti perkantoran dan *real estate*. Disrupsi teknologi juga berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis

pelayanan publik dan mengubah pola interaksi di antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.



Belajar dari bencana global Covid-19, disrupsi teknologi utamanya pemanfaatan teknologi digital pada banyak aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat maupun pemerintahan; tentunya memerlukan kesiapan dengan segera dari pemerintah pusat dan daerah untuk terus memperkuat masyarakat dan generasi mendatang dalam penguasaan dan pengembangan teknologi, baik pada aspek sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung.

Urbanisasi Dunia. Menurut UN DESA (Departemen PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial), dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia sendiri, dalam 4 dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Namun kondisi yang terlihat pada banyak kota di Asia dan Afrika, sekitar 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Kondisi ini berimplikasi pada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan barang/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (*compact*) melalui efisiensi layanan.

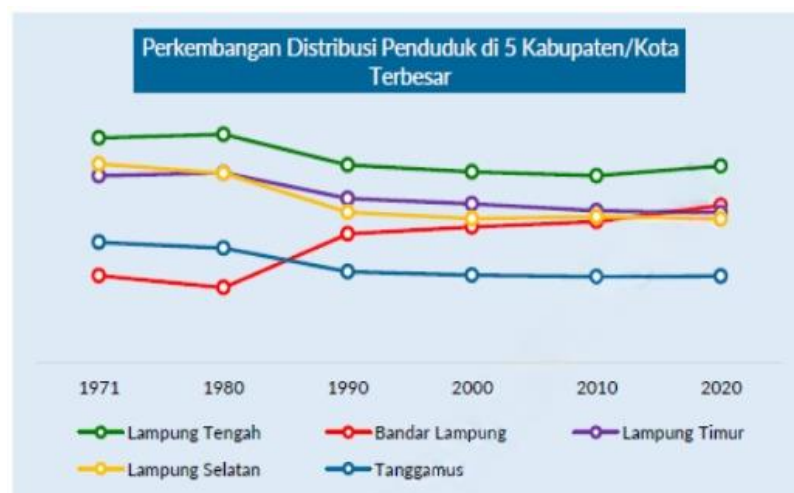
Fenomena urbanisasi di Provinsi Lampung juga didukung dengan beberapa data penduduk Ibukota Provinsi Lampung diantaranya yaitu persentase 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang memiliki sebaran penduduk terbesar berdasarkan SP.2020 yang mana secara umum, masih didominasi oleh Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Tanggamus

Gambar 3. 5 Lima Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk terbanyak dan kontribusinya (persen) 2020



Distribusi penduduk Kabupaten Lampung Tengah untuk periode 1971–2020 berubah dari 18,50 persen menjadi 16,21 persen (menurun sebesar 2,29 persen). Pada periode yang sama, Kabupaten Lampung Timur berubah dari 15,37 persen menjadi 12,33 persen (menurun sebesar 3,05 persen). Kabupaten Lampung Selatan berubah dari 16,37 persen menjadi 11,82 persen (menurun sebesar 4,55 persen), dan Kabupaten Tanggamus berubah dari 9,88 persen menjadi 7,11 persen (menurun 2,78 persen). Sementara untuk Kota Bandar Lampung berubah dari 7,15 persen menjadi 12,94 persen (meningkat 5,80 persen).

Gambar 3. 6 Perkembangan Distribusi penduduk di 5 kabupaten/kota Terbesar Hasil SP 2020 (persen) 1971-2020

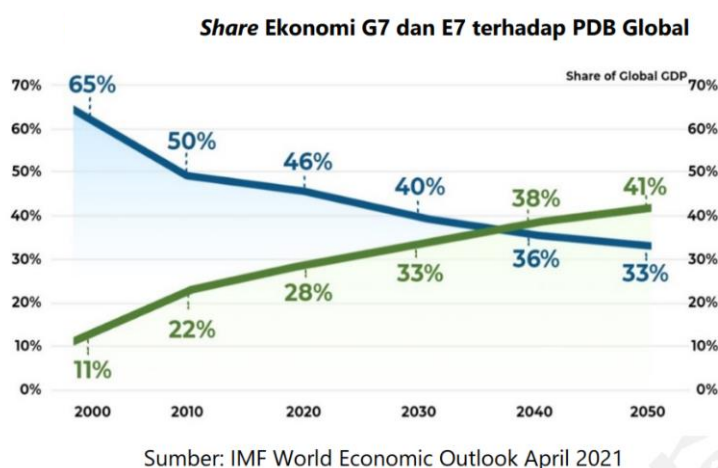


Dari kelima kabupaten/kota di atas, terdapat 4 kabupaten cenderung memiliki pola penurunan distribusi. Hanya Kota Bandar Lampung yang polanya menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung masih menjadi wilayah daya tarik pergeseran penduduk di Provinsi

Lampung. Artinya, tantangan pembangunan Kota Bandar Lampung juga semakin bertambah. Jumlah penduduk yang akan membutuhkan fasilitas layanan perkotaan juga semakin diperluas dan berkualitas.

Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis mahadata ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan. Di sisi lain, dampak pandemi COVID-19, disamping menimbulkan kerugian, juga menjadi pemicu perkembangan dan implementasi teknologi yang memudahkan proses kolaborasi lintas ruang dan waktu.

Perdagangan Internasional.



Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional yang berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia

menggantikan dominasi negara maju yang tergabung dalam G7.

Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN.

Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi digital, dan keberlanjutannya yang terus berkembang. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks

dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global.

Kerja sama Kawasan seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan Indo-Pasifik.

Kuangan Internasional. Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupti dalam industri jasa keuangan. Kedepannya puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang tapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (*skill*) yang baru pula. Sementara itu, munculnya perusahaan berbasis teknologi finansial (*finance tech*) seperti bank digital dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi ke-ekonomian dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan.

Kelas Menengah. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat,

bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat berpotensi menciptakan peluang ekonomi sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam serta kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*).

Persaingan Sumber Daya Alam. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi menyebabkan peningkatan kebutuhan Sumber Daya Alam (SDA) utamanya air, pangan, dan energi, serta mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, diantaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi. Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses SDA (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat drastis di masa mendatang.

Perubahan Iklim. Tiga Krisis Global (*Triple Planetary Crisis*) yakni Perubahan Iklim, Kerusakan Lingkungan dan Polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat Tiga Krisis Global diperkirakan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple Planetary Crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) akan menjadi sumber energi utama di dunia. Teknologi energi terbarukan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya.

Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi IV yang dinamakan *Innovative Designs* termasuk skala yang lebih kecil atau *Small Modular Reactor* (SMR). Teknologi *fuel cell* menunjukkan perkembangan yang positif, terutama aplikasinya untuk transportasi berat dan transportasi udara sebagai pengganti avtur, serta elektrolisis *Green Hydrogen* (GH2) dan pemanfaatannya sebagai *feedstock* industri petrokimia dan *green ammonia* untuk pupuk.

Pemanfaatan Luar Angkasa. Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of humankind*). Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi.

Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Ekonomi antariksa diperkirakan mencapai US\$469,0 miliar pada tahun 2021 dan diprediksi akan terus meningkat mencapai US\$1,0 triliun hingga tahun 2040. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, tetapi tantangan yang dihadapi adalah tingkat produktivitas yang masih rendah di tengah persaingan global semakin meningkat. Rata-rata produktivitas yang tercermin dari Total Factor Productivity (TFP) Indonesia selama tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66. Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,61 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode tahun 1971-1995 dan juga Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun waktu 2005-2019. Kondisi produktivitas yang rendah tersebut di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan

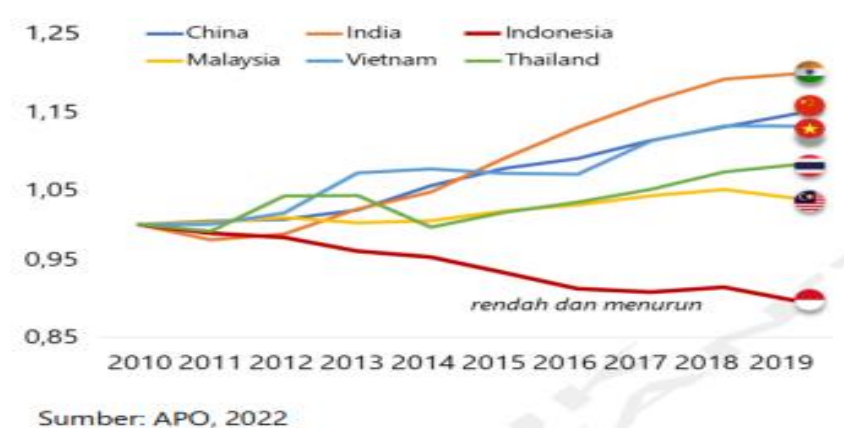
kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

Gambar 3. 7 Rata-Rata Total Factor Productivity Index



Produktivitas yang rendah juga kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Berikutnya, kapasitas ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi semakin tertekan, tercermin dari pertumbuhan yang hanya mencapai rata-rata 4,0 persen selama tahun 2015-2022. Rendahnya pertumbuhan tersebut juga disebabkan terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

Gambar 3. 8 Total Factor Productivity Index 2010 -2019 (2010 = 1,0)



Untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, dibutuhkan peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (iptekin) untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa dengan meningkatkan efisiensi dan menciptakan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Namun, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi masih menghadapi tantangan di antaranya masih lemahnya komitmen pemerintah terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28 persen dari PDB, jauh tertinggal dibandingkan Korea Selatan (4,81), Thailand (1,31), dan Malaysia (1,04) pada tahun 2020.

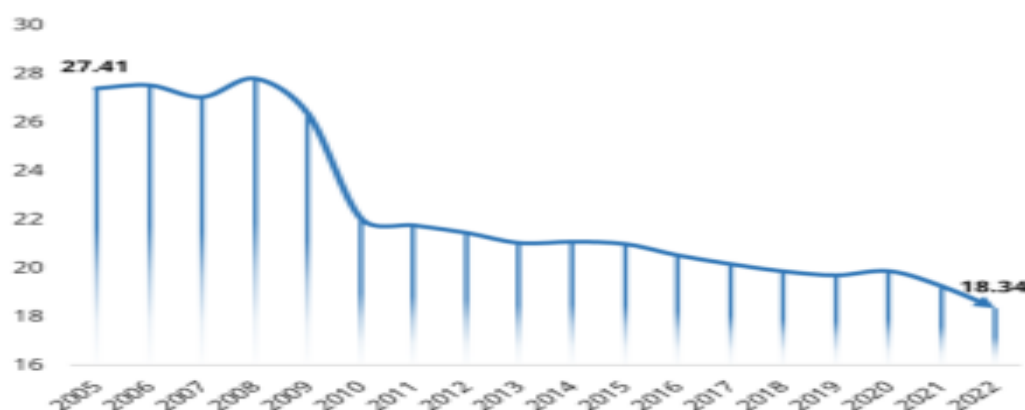
Selanjutnya, kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai. Tercermin dari jumlah peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk yang hanya mencapai 388, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand (1790), Singapura (7287), dan Korea Selatan (8408) pada tahun 2019. Berikutnya, ekosistem riset dan inovasi masih lemah, hasil riset tidak aplikatif karena masih lemahnya kerja sama lembaga riset dan industri, serta masih terbatasnya kerja sama lembaga riset domestik dan internasional. Kondisi ini juga terlihat dari jumlah paten yang diajukan Indonesia hanya sebanyak 1445, jauh tertinggal dari Malaysia (1863), Singapura (9766), dan Korea Selatan (267,527) pada tahun 2021. Sementara dari sisi H-Indeks, Indonesia baru mencapai 284, relatif tertinggal dibandingkan Malaysia (415), Singapura (697), dan Korea Selatan (810). Selain itu, beberapa persoalan lain juga masih harus diatasi Indonesia seperti belum berkembangnya kesadaran ilmiah (scientific temper).

Korelasi antara tingkat produktivitas yang masih rendah dan tingkat pertumbuhan ekonomi sangat perlu untuk dicermati oleh Pemerintah Provinsi Lampung, mengingat bahwa perekonomian Lampung sepanjang tahun 2005 s.d. 2019 yang menunjukkan bahwa rata-rata LPE Lampung secara umum lebih baik dibanding dengan LPE secara Nasional. Namun, kemampuan pemulihan ekonomi Lampung pasca Covid-19 masih lebih rendah dibanding dengan rata-rata Nasional. Hal tersebut dapat terlihat dari data capaian LPE di tahun 2021-2023, dimana LPE Lampung berturut-turut tercatat sebesar 2,79%; 4,28% dan 4,55% persen ; sementara LPE Nasional tumbuh sebesar 3,69%; 5,31% dan 5,05%. Hal lain yang juga menjadi tantangan di Provinsi Lampung adalah kualitas sumber

daya manusia (IPM) dan kondisi kesejahteraan masyarakat Lampung (tingkat kemiskinan) yang secara statistik juga masih lebih rendah dibanding rata-rata capaian nasional.

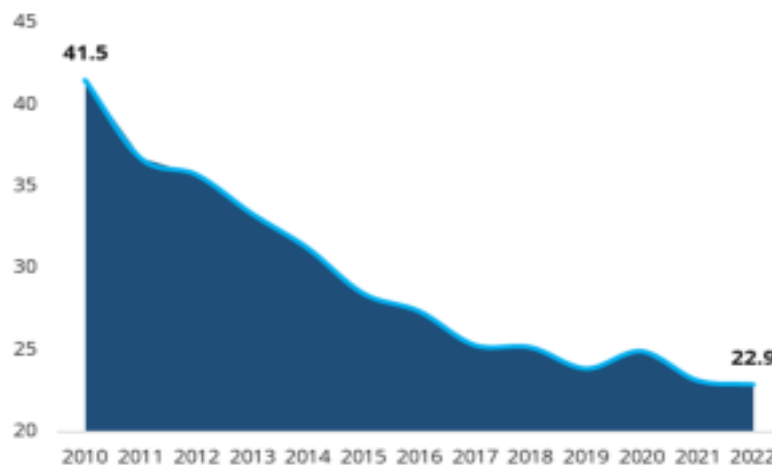
Dari sisi produksi, upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dihadapkan pada tantangan deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah. Beberapa penyebab kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun di antaranya akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem Industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga.

Gambar 3. 9 Kontribusi Manufaktur terhadap PDB (%PDB)



Di sisi lain, produktivitas sektor pertanian secara nasional yang rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian. Berbagai faktor tersebut kemudian menyebabkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB nasional terus mengalami penurunan dari semula mencapai 27,41 persen pada tahun 2005 menjadi hanya 18,34 persen pada tahun 2022. Sementara itu, produktivitas sektor pertanian terus melambat dari Rp41,5 juta per pekerja pada tahun 2010 menjadi hanya Rp22,9 juta per pekerja pada tahun 2022.

Gambar 3. 10 Produktivitas Pertanian (Juta Rupiah/Pekerja)



Kinerja sektor pertanian dan industri ditingkat nasional juga akan menjadi perhatian dalam perencanaan Provinsi Lampung ke depan, mengingat bahwa sektor pertanian dan industri merupakan pendorong utama perekonomian Lampung. Hal tersebut juga didukung dengan data statistik beberapa tahun terakhir di tingkat Provinsi Lampung (akan diuraikan pada isu strategis daerah di bagian selanjutnya), dimana produktivitas komoditas utama pertanian dan porsi industri dalam perekonomian Lampung juga cenderung mengalami stagnasi.

Selanjutnya, dalam tinjauan isu startegis RPJPN 2025-2045, kinerja pariwisata meningkat tetapi masih di bawah potensi yang dimilikinya, sedangkan pemanfaatan potensi ekonomi kreatif yang besar masih perlu dikembangkan. Adapun kinerja pariwisata masih berada di bawah potensinya disebabkan pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata. Selanjutnya, inovasi dan pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasinya belum terbentuk, dan akses ke pasar internasional juga masih terbatas.

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan. Optimalisasi ekonomi biru masih dihadapkan pada masih

rendahnya pemanfaatan ALKI dan SLoC. Pemanfaatan sumber daya laut tidak optimal dan berkelanjutan, tercermin dari ekspor perikanan yang mencapai US\$6,24 miliar pada tahun 2022 dibandingkan potensi ekonomi kelautan sebesar US\$1.334 miliar. Terbatasnya pengembangan budidaya perikanan. Masih lemahnya rantai nilai tambah kekayaan laut. Terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan. Rendahnya penanganan sampah plastik yang ditunjukkan dari data kebocoran sampah plastik ke laut sebesar 440.160,7 ton (land base and sea base) pada tahun 2021. Kegiatan illegal, unreported, dan unregulated fishing (IUU) yang masih tinggi, yaitu ditangkapnya 97 kapal ikan, yang terdiri dari 79 kapal ikan Indonesia, 18 kapal asing, dan 45 kasus TPKP. Belum berkembangnya industri pengolahan dan emerging sector lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut belum optimal karena hanya lima provinsi (Papua Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Banten, Bali) yang sudah melakukan pengintegrasian RZWP3K dengan RTRW.

UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah. Proporsi UMKM mencapai 99,99 persen dari total pelaku usaha dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 96,92 persen pada tahun 2019. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,51 persen pada tahun 2019, sementara proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB sebesar 1,07 persen pada tahun 2019. Beberapa tantangan yang harus dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya adalah sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (lowskilled workers) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah; rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.

Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal, Produktivitas tenaga kerja sebesar US\$7.274,9 per pekerja, di bawah rata-rata kawasan ASEAN sebesar US\$8.449,0 per pekerja. Tantangan untuk meningkatkan produktivitas di antaranya rendahnya kualitas

SDM (56,3 persen tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah), ketidaksesuaian keahlian (*missmatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

Ekonomi hijau penting diterapkan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tercapai sekaligus menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Untuk menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh, Indonesia harus mengatasi beberapa hambatan seperti penggunaan energi fosil yang masih tinggi tercermin dari porsi untuk produksi listrik sebesar 87,1 persen (2021) dan emisi GRK 1.317 GtCO₂eq (2021) berasal dari pembangkit listrik dan transportasi.

Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi. Porsi EBT dalam bauran energi nasional terus meningkat dari 4,24 persen tahun 2005 menjadi 12,30 persen tahun 2022. Namun, ini menunjukkan masih tingginya pemanfaatan energi berbasis bahan bakar fosil. Di samping itu, tingkat elektrifikasi di pedesaan Indonesia pada akhir 2020 mencapai sekitar 98,67 persen. Akan tetapi, secara umum kualitas akses listrik tersebut masih harus ditingkatkan. Selanjutnya, masih terdapat beberapa wilayah yang belum tersentuh listrik serta memerlukan kebijakan afirmasi untuk mendapatkan akses listrik.

Selain itu, pengelolaan limbah industri cenderung masih lemah. Tercermin dari limbah B3 yang mencapai 60 juta ton sepanjang tahun 2022. Regulasi serta sistem insentif dan disinsentif untuk ekonomi hijau juga masih lemah. Tantangan lainnya adalah pemanfaatan sumber daya alam cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan eksploitatif, meningkatnya penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang meningkatkan degradasi hutan dan deforestasi,

serta masih tingginya pencemaran air permukaan dan meningkatnya kelangkaan air.

Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, Indonesia dihadapi oleh tantangan infrastruktur digital yang belum optimal, rendahnya literasi digital, serta belum tersedianya talenta digital yang memadai sehingga pemanfaatan digital untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat belum terlaksana secara optimal. Tantangan pembangunan digital yang masih harus dihadapi adalah diantaranya jumlah pengguna internet hanya 62,1 persen dari total populasi (2021) yang relatif tertinggal dibanding negara sebanding (Malaysia 96,8 persen dan Thailand 85,3 persen), masih rendah dan belum meratanya literasi digital dan talenta digital, masih belum sepenuhnya masyarakat terjangkau jaringan 4G (96,97 persen) yang berkualitas dan juga kecepatan internet yang relatif masih terbatas, rentannya keamanan siber yang masih harus ditingkatkan, ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dan produk luar negeri, serta sulitnya kondisi geografis di beberapa daerah.

Integrasi ekonomi domestik berperan penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Saat ini, ekonomi domestik Indonesia belum terintegrasi secara optimal, dengan keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas. Hal ini disebabkan antara lain karena pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa, yang berkontribusi sebesar 57,8 persen terhadap PDB (2022), infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya sehingga menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa. Jumlah dan peranan perkotaan di masa depan sebagai pusat pertumbuhan akan terus meningkat dan menuntut perencanaan yang baik untuk menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan.

Tantangan yang masih harus dihadapi antara lain adalah rendahnya peran perkotaan di Indonesia peran perkotaan di Indonesia yang ditunjukkan kontribusi PDB perkotaan per kapita terhadap pertumbuhan penduduk

perkotaan yang hanya mencapai 1,4 persen per 1 persen penduduk (sedangkan Tiongkok mencapai 3,00 persen per 1 persen penduduk), serta tingkat urbanisasi dalam 10 tahun terakhir mencapai 0,67 persen per tahun (sementara Tiongkok 1,21, persen), terbatasnya keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya, ketimpangan pembangunan yang masih tinggi di kawasan maupun antar kawasan perkotaan dan perdesaan, kapasitas pengelolaan perkotaan yang masih terbatas, serta kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun. Pada bidang sosial, untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat. Hal ini meningkatkan beban penyakit menular dan tidak menular, termasuk permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Akses pangan yang tidak terjangkau dan pola konsumsi yang tidak sehat menyebabkan kekurangan gizi mikro dan gizi makro, serta kelebihan gizi. Sistem kesehatan harus mampu merespons berbagai perubahan, kemajuan teknologi, guncangan kesehatan dan risiko terjadinya pandemi, dan serta mampu menjawab ketimpangan akses terhadap pangan, lingkungan sehat, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, serta meningkatkan kapasitas pembiayaan kesehatan dengan mobilisasi dan inovasi pembiayaan kesehatan.

Di sektor pendidikan, pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Untuk mencapai pembangunan yang optimal di sektor pendidikan, Indonesia harus mampu mengatasi beberapa tantangan, di antaranya layanan pendidikan belum merata karena disparitas partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi masih tinggi. Selain itu, tidak tersedianya SMP/MTs di 302 kecamatan dan tidak tersedianya SMA/SMK/MA di 727 kecamatan.

Kualitas pendidikan yang masih rendah sebagaimana terlihat dari capaian rata-rata nilai PISA siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) 382,00, yang jauh tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara OECD 488,33. Kualitas pendidikan yang masih rendah antara lain disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, jumlah guru profesional dengan kompetensi tinggi masih terbatas dan belum terdistribusi ke seluruh daerah dan satuan pendidikan. Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas yang ditunjukkan kurang dari 50 persen guru memiliki sertifikat pendidik pada semua jenjang pendidikan, serta pendidikan nonformal yang berkualitas belum memadai di mana 42 persen lembaga pendidikan nonformal terakreditasi C atau belum terakreditasi.

Gambar 3. 11 Nilai PISA Indonesia dan Rata-Rata OECD



Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global saat ini juga masih rendah. Tercatat baru lima perguruan tinggi yang berhasil masuk dalam peringkat top 500 dunia. Tantangan cukup besar terdapat pada aspek produktivitas riset dan inovasi perguruan tinggi. Meskipun kinerja publikasi mengalami kenaikan cukup besar selama periode 2011-2021, kuantitas publikasi belum diimbangi dengan kualitas. Hal ini ditunjukkan oleh rasio sitasi per publikasi yang masih rendah (0,39) pada tahun 2021.

Kualifikasi pendidikan penduduk masih rendah, berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja. Dalam hal komposisi penduduk usia

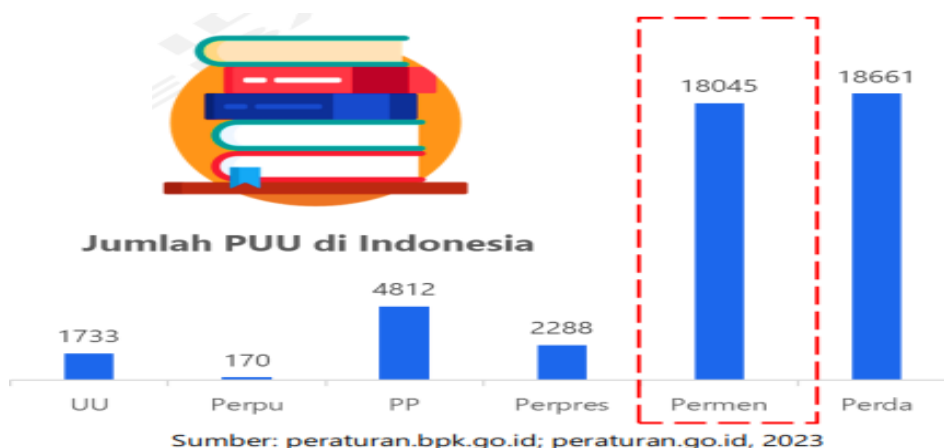
15 tahun ke atas berdasarkan kualifikasi pendidikan, mayoritas hanya lulusan SMP/MTs/Sederajat ke bawah (59,88 persen), sedangkan penduduk berpendidikan menengah sebesar 29,97 persen dan berpendidikan tinggi 10,15 persen. Kualifikasi pendidikan penduduk yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 40,49 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Dalam hal perlindungan sosial, perubahan struktur dan peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan peningkatan penduduk lansia menuntut cakupan sistem perlindungan sosial yang lebih menyeluruh di sepanjang siklus kehidupan.

Adapun tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah. Sementara itu, tantangan penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi meliputi pelaksanaan bantuan sosial terfragmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Hal ini antara lain disebabkan penggunaan data masih terfragmentasi dan belum termutakhirkan secara sistematis sehingga kesalahan sasaran masih cukup tinggi. Selanjutnya, pelaksanaan bantuan sosial belum adaptif dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam dan non alam, serta perubahan iklim. Daya ungkit bantuan sosial juga masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Tata kelola diperlukan dalam rangka memampukan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Selama ini, tata kelola menjadi kendala utama di dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. sektoral, masih tersebarunya kewenangan pengelolaan regulasi, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi, belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM di bidang regulasi, serta belum optimalnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan regulasi.

Regulasi yang berlebih (*hyperregulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan banyaknya pengujian materiil, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum. Kondisi tersebut disebabkan karena masih kuatnya ego.

Gambar 3. 12 Kondisi Hiper Regulasi



Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif. Fragmentasi birokrasi menyebabkan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada berbagai bidang serta melanggengkan ego sektoral. Fragmentasi kelembagaan juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam kerangka hubungan pemerintah pusat-daerah

Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif. Kementerian/lembaga memiliki tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing yang diatur dalam peraturan perundangan. Namun demikian, dalam pelaksanaan program-program pembangunan masih terjadi tumpang tindih yang berpotensi menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi.

Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D. Hal ini menjadikan suksesi pengisian jabatan strategis di instansi pemerintah menjadi terhambat, tidak terpetakannya talenta terbaik, rendahnya kinerja dan kompetensi ASN, kuatnya mentalitas silo, serta rendahnya budaya dan etos kerja. Sistem penghargaan ASN berbasis kinerja belum terwujud, yang ditandai dengan disparitas atau kesenjangan penghasilan ASN antar instansi yang menyebabkan sulitnya mempertahankan talenta ASN terbaik

ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah.

Hal ini disebabkan posisi kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian yang berwenang melakukan pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, dan pemberhentian ASN. Selama periode 2020-2022 terdapat 1.703 pengaduan tentang pelanggaran netralitas ASN. Selain itu, terkait kasus korupsi, ASN dan pejabat dari lingkungan eksekutif terlibat dalam 371 kasus korupsi atau sekitar 38,1 persen dari total 1.165 kasus korupsi sepanjang tahun 2003-2022.

Belum meratanya kualitas pelayanan publik. Standar pelayanan belum diterapkan secara merata sehingga masih ditemukan kerumitan prosedur pelayanan, ketidakpastian waktu pelayanan, serta masih adanya praktik pungutan liar. Selain itu, terhambatnya proses digitalisasi pelayanan publik disebabkan karena belum meratanya pembangunan infrastruktur digital, keterbatasan kapasitas SDM, serta belum terbangunnya interoperabilitas data dan layanan.

Selain itu, kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini ditandai dengan terlihat dari masih adanya persoalan-persoalan tata kelola, seperti di antaranya isu kelembagaan, proses bisnis, dan regulasi di berbagai bidang strategis.

Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar antara lain disparitas dukungan infrastruktur telekomunikasi dan informasi antardaerah, terutama kesenjangan antar kota-desa yang cukup tinggi dan rendahnya literasi digital. Tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara instansi pusat dan pemerintah daerah masih belum merata. Digitalisasi pemerintahan juga menghadapi tantangan terkait dengan tata kelola, keamanan siber, keterpaduan data dan informasi, serta rendahnya literasi digital.

Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik, Seperti masih banyak kader yang mengalami permasalahan hukum, melanggar

standar etik, serta sulitnya mencari calon pemimpin dan calon anggota legislatif. Selanjutnya, pengelolaan keuangan partai politik belum transparan dan belum akuntabel serta pendanaan dari negara belum memadai, sehingga berdampak pada maraknya praktik politik uang, perilaku koruptif, dan ketidakmandirian partai politik.

Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal. Hal ini disebabkan oleh antara lain adanya kesenjangan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah, kemampuan keuangan yang kurang, serta lingkungan yang kurang kondusif bagi masyarakat sipil.

Selain itu, prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan. Ketiadaan mekanisme ko-kreasi antara aktor pemerintah dan masyarakat menyebabkan belum optimalnya partisipasi masyarakat, terutama dalam tahap pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, untuk melakukan perubahan secara menyeluruh baik di tataran nasional maupun daerah diperlukan landasan kokoh meliputi penciptaan supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, serta diplomasi tangguh sebagai faktor pemampu. Masih banyak tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan landasan yang kokoh tersebut. Pada sektor hukum, sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan, pemulihan aset tindak pidana yang belum optimal, potensi pelanggaran HAM masih tinggi, dan pengawasan institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal masih lemah. Selain itu, budaya hukum masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum masih rendah.

Dari aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah Demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan. Hal ini berakibat pada terjadinya politik uang, kurangnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, kurangnya transparansi penggunaan dana publik, belum optimalnya sistem pemilu dan kemerdekaan pers, serta kurangnya kebebasan sipil, meningkatnya perilaku diskriminatif dan

intoleransi. Sementara itu, kepercayaan dan partisipasi masyarakat masih perlu terus ditingkatkan.

Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan. Sementara itu, kekuatan daya gentar pertahanan di kawasan belum terbangun dan ketergantungan terhadap alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) luar negeri masih sangat tinggi. Tantangan lainnya adalah tata kelola dan kelembagaan keamanan nasional masih perlu diperkuat, meningkatnya jenis kejahatan baru dengan menggunakan teknologi tinggi, masih lemahnya keamanan siber, serta masih tingginya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut dan wilayah perbatasan.

Stabilitas makro yang mencakup aspek fiskal dan moneter masih menghadapi beberapa tantangan, utamanya ketidakpastian ekonomi global dan keberlanjutan fiskal. Terkait keberlanjutan fiskal tantangan yang dihadapi di antaranya rendahnya penerimaan negara, terutama perpajakan yang tercermin dari rasio pajak yang hanya 10,4 persen dari PDB pada tahun 2022, sementara rata-rata dunia yang mencapai 15,7 persen dan rata-rata negara maju mencapai 20,9 persen pada tahun 2021. Selain itu, kualitas dan rasio belanja negara terhadap PDB masih rendah, yaitu sebesar 15,8 persen (2022), jauh tertinggal dibandingkan Thailand (18,3 persen, 2022) dan Filipina (21,9 persen, 2022). Selanjutnya, stabilitas harga menghadapi tantangan volatilitas harga komoditas, terutama pangan dan energi serta risiko ketidakpastian ekonomi dan politik global yang berdampak pada tekanan inflasi dan nilai tukar. Terkait dengan diplomasi, untuk menghadapi tantangan perubahan geopolitik dan geoekonomi ke depan serta untuk memperkuat peranan dan posisi Indonesia di tingkat global, Indonesia memerlukan diplomasi total yang tangguh dan dapat mengadvokasi kepentingan nasional. Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan belum optimalnya partisipasi dalam forum internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan belum menjadi agenda-setter di tingkat regional dan global. Hal tersebut disebabkan oleh masih lemahnya infrastruktur dan kelembagaan diplomasi, belum sinerginya antara modalitas diplomasi, pelaku

diplomasi, dan kebijakan masing-masing bidang diplomasi. Selanjutnya, ancaman kejahatan Trans-National mengalami peningkatan. Ketahanan sosial budaya dan ekologi sangat penting untuk menghadapi berbagai perubahan yang akan memengaruhi cara hidup dan budaya masyarakat setiap individu dapat berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan agar terus terjaga secara berkelanjutan.

Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya dan ekologi, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat, Indeks Pembangunan Kebudayaan 51,90 pada tahun 2021. Sementara itu, peran dan fungsi keluarga belum optimal ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga yang baru mencapai 58,49 di tahun 2022, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal. Berikutnya, terkait keagamaan, kebebasan beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan, serta penghormatan terhadap keragaman agama dan kebudayaan masih lemah, terlihat dari Indeks Kerukunan Umat Beragama baru sebesar 73,09 (2022). Selain itu, ketimpangan gender masih tinggi, dengan Indeks Ketimpangan Gender mencapai 0,458 pada tahun 2022.

Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan Masih tingginya tingkat bencana yang ditunjukkan pada tahun 2022 tercatat 95 persen dari 3.207 bencana merupakan bencana hidrometeorologi, serta mitigasi bencana, sistem peringatan dini dan penanganan pasca bencana masih kurang efektif. Selanjutnya, pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum optimal dan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan, energi, dan air terjadi di berbagai wilayah.

Meskipun pembangunan kewilayahan sejak desentralisasi dilaksanakan pada tahun 1999 telah mencapai hasil yang cukup signifikan, ketimpangan antar wilayah walau menurun namun masih cukup tinggi. Pada tahun 2022, kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) telah meningkat menjadi 20,6 persen dari 18,8 persen pada tahun 2000. Jumlah daerah tertinggal pada tahun 2020 adalah 62 kabupaten jauh menurun dibandingkan jumlah daerah tertinggal pada tahun 2015 yaitu 122 kabupaten. Pembangunan selama ini lebih terpusat di Pulau Jawa (Java centris), dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap nasional pada tahun 2022 adalah 57,8 persen. Masih tingginya ketimpangan antarwilayah terutama disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal khususnya di bagian timur Indonesia, serta masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. Kondisi tersebut telah menyebabkan rendahnya minat investasi di luar Pulau Jawa terutama di KTI. Tantangan lainnya adalah masih tingginya permasalahan pertanahan dan sangat terbatasnya RDTR kabupaten/kota yang tersedia, rendahnya produktivitas perkotaan akibat desain kota yang tidak optimal, serta tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan. Selanjutnya, pembangunan pedesaan dan daerah afirmasi belum optimal akibat kebijakan yang belum asimetris dan afirmatif. Demikian pula desentralisasi dan otonomi daerah belum memberikan hasil yang diharapkan ditunjukkan oleh tata kelola yang lemah.

Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya. Pembangunan infrastruktur terus didorong untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memenuhi kebutuhan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, pemenuhan pelayanan dasar, serta memperkuat integrasi nasional. Beberapa proyek besar infrastruktur yang sedang atau telah diselesaikan di berbagai wilayah meliputi antara lain pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, rel kereta api, pembangkit listrik dan jaringannya, waduk, irigasi pertanian, serta infrastruktur dasar dan perumahan. Pemerintah juga telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia. Meskipun telah terjadi peningkatan dalam

pembangunan infrastruktur masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antarlembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun, dan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada sehingga tidak memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam kesenjangan pembangunan sarana prasarana dasar antara Jawa dan luar Jawa, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Terkait pemenuhan kebutuhan air, terdapat tantangan keterbatasan prasarana untuk memanfaatkan potensi air sehingga keberlanjutan pasokan air baku menjadi tidak pasti dan produktivitas air dari sisi ekonomi masih merupakan salah satu yang terendah di Asia. Selanjutnya, pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.

Dalam integrasi konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal. Konektivitas hinterland (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. Tantangan lainnya berupa masih terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, masih rendahnya jangkauan jaringan serat optik sebagai tulang punggung layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler, terutama di pedesaan dan Kawasan Timur Indonesia. Kesenambungan pembangunan penting dalam menjaga konsistensi dalam satu masa dan antar periode pemerintahan, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang memerlukan perkuatan implementasi dan pembiayaan pembangunan.

Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang. Instrumen pengaman (*safe guarding*) untuk pelaksanaan dan pengendalian pembangunan juga belum efektif, penerapan manajemen risiko pembangunan nasional belum optimal, serta komunikasi publik untuk membangun kepemilikan dan partisipasi pemangku kepentingan belum terjalin dengan baik.

Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas. Dalam hal pembiayaan pembangunan, terdapat sejumlah tantangan utama yang dihadapi antara lain belum berkembangnya inovasi pembiayaan pembangunan, *cost of fund* yang masih tinggi dibandingkan negara lain, masih rendahnya kedalaman sektor keuangan dan intermediasi sektor keuangan di mana rasio uang beredar Indonesia terhadap PDB hanya 43,52 persen (2022), serta belum optimalnya inklusi keuangan termasuk keuangan syariah, di mana angka inklusi keuangan baru mencapai 85,10 persen (2022).

Pembangunan kewilayahan sejak desentralisasi dilaksanakan pada tahun 1999 telah mencapai hasil yang cukup signifikan, tetapi ketimpangan antarwilayah meskipun menurun masih cukup tinggi. Pada tahun 2022, kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) telah meningkat menjadi 20,6 persen dari 18,8 persen pada tahun 2000. Jumlah daerah tertinggal pada tahun 2020 adalah 62 kabupaten jauh menurun dibandingkan jumlah daerah tertinggal pada tahun 2015, yaitu 122 kabupaten. Pembangunan selama ini lebih terpusat di Pulau Jawa (Java Centris), dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap nasional pada tahun 2022 adalah 57,8 persen. Masih tingginya ketimpangan antarwilayah terutama disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal khususnya di bagian timur Indonesia, serta masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. Kondisi

tersebut telah menyebabkan rendahnya minat investasi di luar Pulau Jawa terutama di KTI.

Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya. Pembangunan infrastruktur terus didorong untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memenuhi kebutuhan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, pemenuhan pelayanan dasar, serta memperkuat integrasi nasional. Beberapa proyek besar infrastruktur yang sedang atau telah diselesaikan di berbagai wilayah meliputi antara lain pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, rel kereta api, pembangkit listrik, dan jaringannya, waduk, irigasi pertanian, serta infrastruktur dasar dan perumahan. Pemerintah juga telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia. Meskipun telah terjadi peningkatan dalam pembangunan infrastruktur, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun, dan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada sehingga tidak memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat.

3.2.3 Isu Strategis Provinsi

Dengan memperhatikan tinjauan isu strategis ditingkat global dan nasional sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat beberapa isu strategis daerah yang juga memiliki korelasi, menjadi tantangan dan sekaligus peluang pembangunan Provinsi Lampung 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Proyeksi jumlah penduduk di Provinsi Lampung untuk 20 tahun ke depan memiliki kemiripan dengan kondisi global dan nasional. **Jumlah Penduduk Lampung Tahun 2045 diproyeksikan 11,076 juta jiwa atau bertambah sekitar 2 juta jiwa dibanding kondisi saat ini.** Publikasi BPS dalam buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 menjelaskan bahwa jumlah penduduk Lampung di tahun 2025 diproyeksikan sebanyak 9,52 juta jiwa dan menyentuh angka 10 juta jiwa pada tahun 2030, dan berjumlah 10,42 juta orang pada akhir

periode proyeksi tahun 2035, serta bertambah menjadi 11,076 juta jiwa di tahun 2045.

Tabel 3. 1 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Lampung Tahun 2020-2050

Parameter	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PENDUDUK							
Laki-Laki (000)	4 605,04	4 857,47	5 075,33	5 260,26	5 416,02	5 541,92	5 636,63
Perempuan (000)	4 379,84	4 665,44	4 925,14	5 157,03	5 361,46	5 534,96	5 673,64
Total (000)	8 984,88	9 522,91	10 000,47	10 417,29	10 777,48	11 076,88	11 310,28
Komposisi Umur (%)							
0-14	25,42	24,64	23,46	22,43	21,34	20,60	20,13
15-64	68,56	68,13	67,84	67,24	66,60	65,66	64,74
65+	6,02	7,23	8,70	10,33	12,06	13,74	15,13
Dependency Ratio (%)	45,87	46,77	47,41	48,72	50,16	52,29	54,46
FERTILITAS							
Total Fertility Rate (TFR)	2,28	2,23	2,17	2,13	2,08	2,05	2,01
Crude Birth Rate (CBR)	18,20	16,81	15,59	14,80	14,24	13,90	13,52
Jumlah Kelahiran (000)	163,48	160,13	155,94	154,21	153,43	153,98	152,90
MORTALITAS							
E ₀ Laki-Laki	71,42	71,77	72,03	72,68	73,06	73,24	73,31
E ₀ Perempuan	75,61	76,65	77,35	78,24	78,80	79,10	79,26
E ₀ Laki-Laki + Perempuan	73,46	74,15	74,62	75,39	75,86	76,10	76,21
IMR Laki-Laki	19,18	15,94	13,73	11,45	10,25	9,63	9,35
IMR Perempuan	13,63	11,42	9,91	8,43	7,66	7,26	7,08
IMR Laki-Laki + Perempuan	16,47	13,73	11,86	9,98	8,98	8,48	8,24
Crude Death Rate (CDR)	5,68	6,09	6,72	7,30	8,10	9,03	9,98
Jumlah Kematian (000)	51,01	57,95	67,22	76,01	87,26	100,07	112,90
MIGRASI							
Net Migration Rate	0,00	- 0,01	- 0,01	- 0,02	- 0,02	- 0,03	- 0,03

Besarnya jumlah penduduk Provinsi Lampung menggambarkan bahwa Lampung memiliki potensi yang cukup besar terutama pada jumlah tenaga kerja, sumber daya manusia (SDM) dan potensi pasar domestik bagi perekonomian. Pada sisi yang lain, besarnya jumlah penduduk juga menjadi tantangan tersendiri terutama pada penciptaan lapangan kerja, produktivitas, pembangunan kualitas SDM penduduk yang lebih sehat, terdidik dan berdaya saing. Hal lainnya terkait juga dengan penyediaan kebutuhan pangan dan energi, penyediaan lahan permukiman, kualitas lingkungan yang sehat dan nyaman, penyediaan fasilitas layanan dasar bagi penduduk, serta pembagian “kue” ekonomi yang bermuara pada pendapatan per kapita penduduk.

Perubahan struktur penduduk pada dasarnya adalah proses alamiah demografi. Setiap wilayah pasti mengalaminya. Perbedaannya hanya pada masalah waktu dan kecepatannya. Indonesia dan beberapa negara lain, seperti Malaysia, Mongolia, Thailand, Vietnam diperkirakan mengalami *ageing population* mulai tahun 2040. Di Indonesia, bonus demografi diperkirakan berakhir pada tahun

2036. Ketika bonus demografi usai, jumlah penduduk berusia lanjut (lansia) akan bertambah dan Indonesia mengalami fase penuaan penduduk.

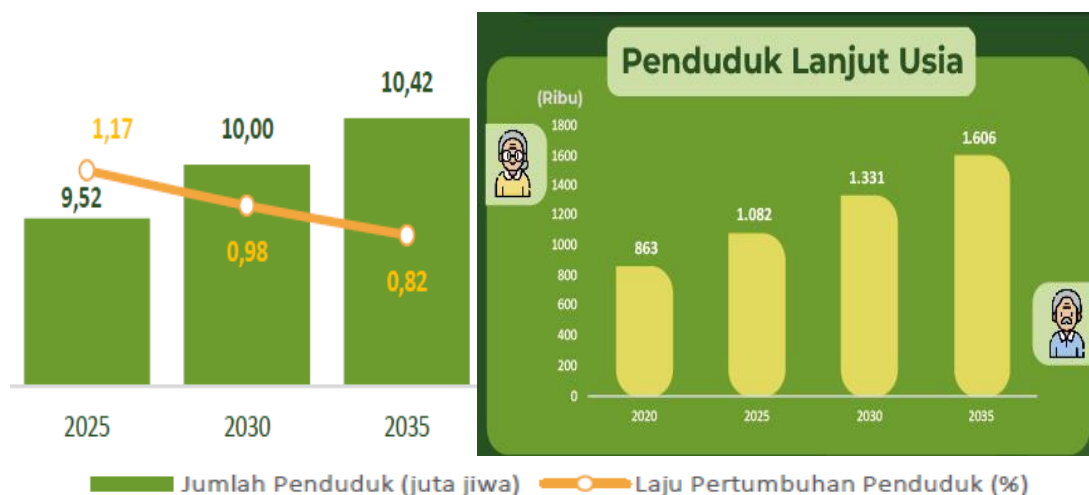
Gambar 3. 13 Proyeksi Piramida Penduduk Lampung, Tahun 2020-2050



Bonus Demografi. Struktur penduduk Lampung di tahun 2035 diproyeksikan mengalami perubahan, dimana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak di tahun 2035. Pada saat yang sama, angka ketergantungan (*dependency ratio*) mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua juga meningkat. **Penduduk Lanjut Usia (Lansia)** umur 60 tahun ke atas pada 2020 sebesar 9,60 persen (862,95 ribu penduduk). Proyeksi proporsi penduduk umur 60 tahun ke atas menjadi 15,42 persen (1,606 juta penduduk) pada tahun 2035. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Lampung sudah memasuki fase struktur umur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas di Lampung yang sudah melebihi 10 persen dari total penduduk Lampung. Kondisi ini harus diantisipasi mengingat perubahan struktur usia penduduk memiliki implikasi besar bagi perekonomian lokal, regional dan nasional. Pada fase ini, masalah kependudukan akan muncul apabila pemerintah tidak mempersiapkan strategi dari sekarang. Strategi menjelang *ageing population* antara lain penataan sistem pensiun, perbaikan layanan kesehatan dan fasilitas publik ketika penduduk memasuki usia

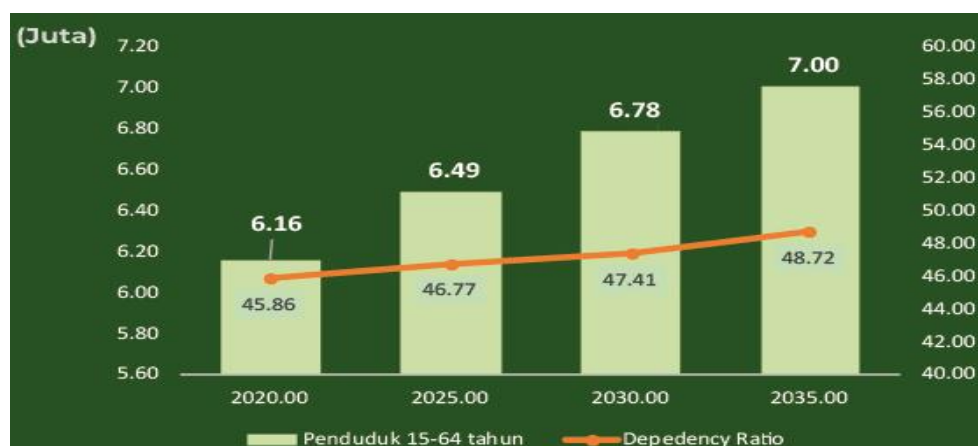
lansia. Jika tidak ada sistem jaminan sosial yang disiapkan maka akan banyak kemiskinan terjadi di usia tua dan akhirnya pemerintah harus terbebani dengan mengeluarkan anggaran belanja yang lebih besar.

Gambar 3. 14 Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Lampung, serta Jumlah Penduduk Lansia Tahun 2025-2035



Selanjutnya, pada tahun 2035 ketergantungan penduduk Lampung diproyeksikan meningkat menjadi 48,72 persen dari sebesar 45,86 persen pada 2020. Hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) menanggung sekitar 49 penduduk usia nonproduktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas). Rasio ketergantungan sebesar 48,72 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 33,36 persen dan rasio ketergantungan penduduk lanjut usia sebesar 15,36 persen. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif.

Gambar 3. 15 Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Lampung Tahun 2020-2035



Lebih lanjut, tinjauan demografi skala mikro, dinamika sosial dalam keluarga bergeser dibanding masa lalu. Perkembangan teknologi digital, serta

penetrasi globalisasi
 arus informasi
 mempengaruhi kualitas
 keluarga. Mobilitas
 penduduk dan
 pergeseran ideologi
 beresiko memunculkan
 struktur dan bentuk
 keluarga yang berbeda.



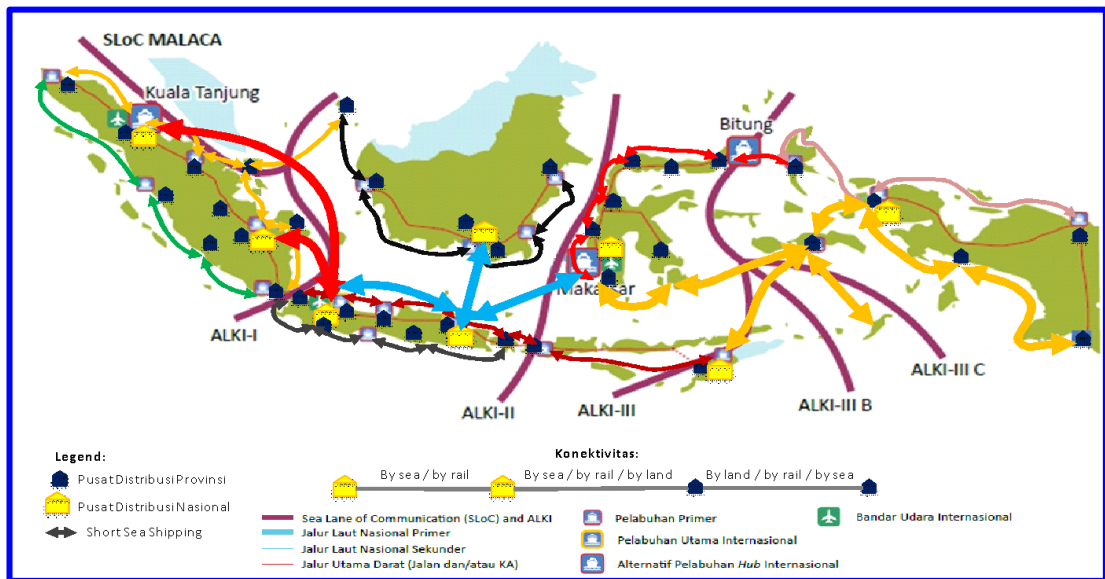
Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran. Sementara itu, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali beresiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku beresiko anggota keluarga. Hal-hal tersebut menjadi tantangan bagi keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal.

Isu Urbanisasi dan Migrasi dilingkup global dan nasional juga terjadi di Provinsi Lampung. Perpindahan penduduk berupa urbanisasi dan migrasi berdampak pada sebaran penduduk di Provinsi Lampung tidak merata. Pemicunya tentu kondisi *geographical space* dan kemajuan wilayah yang mampu mendorong dan menarik penduduk untuk berdifusi keluar-masuk. Berdasarkan hasil SP2020, Kabupaten Lampung Tengah adalah kabupaten dengan distribusi penduduk tertinggi, yaitu sebesar 16,21 persen, disusul Kota Bandar Lampung sebesar 12,94 persen, Kabupaten Lampung Timur sebesar 12,33 persen, dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 11,82 persen. Sementara tiga Kabupaten dengan distribusi terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat sebesar 1,81 persen, Kota Metro sebesar 1,87 persen, dan Kabupaten Mesuji sebesar 2,53 persen.

Adanya sebaran penduduk yang tidak merata mengindikasikan pusat-pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Lampung belum merata. Individu secara alamiah akan mendekatkan diri dengan wilayah yang memiliki intensitas dan kegiatan ekonomi yang tinggi. Tujuannya satu, yaitu memudahkan akses untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Ada gula maka ada semut. Meski demikian, kondisi geografis wilayah juga perlu menjadi pelengkap analisis mengapa sebaran penduduk tidak merata.

Urbanisasi dan migrasi menuntut ketersediaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan pada saat yang sama berpotensi memunculkan konflik sosial, pengangguran dan kriminalitas. Tingginya kepadatan penduduk juga berpotensi meningkatkan polusi dan penyebaran berbagai penyakit menular. Oleh karena itu, kebijakan sumber daya manusia, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, infrastruktur dan sumber daya alam serta politik hukum dan keamanan harus diarahkan dengan tepat untuk mengoptimalkan bonus demografi.

Demikian pula dengan Letak Geografis Lampung yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera dan merupakan perlintasan utama dari dan ke Pulau Jawa. Dengan posisi yang strategis tersebut, maka pembangunan di wilayah Lampung mempunyai potensi dan peluang yang besar untuk pengembangan wilayah dan kehandalan konektivitas antarpulau pada lintas darat, laut maupun udara, transfer teknologi, serta kegiatan ekonomi regional, nasional maupun internasional; sekaligus membawa tantangan dan potensi berbagai kerawanan sosial yang kompleks.



Sejalan dengan isu global dan nasional, perhatian terhadap arah pembangunan yang lebih ramah lingkungan juga menjadi peluang sekaligus tantangan untuk melaksanakan pembangunan secara ramah lingkungan guna menjamin keberlanjutan sumber daya pembangunan kepada generasi mendatang. Paradigma pembangunan **Ekonomi Biru untuk Pengembangan Potensi Sumber Daya Laut dan Pesisir** sangat relevan dengan kondisi geografis **Provinsi Lampung**. Provinsi Lampung memiliki potensi kelautan dan sumberdaya pesisir (termasuk pulau-pulau kecil) yang tinggi dan diperkaya dengan keanekaragaman hayati yang cukup besar, dimana kondisi umumnya masih belum optimal. Padahal, wilayah pesisir Provinsi Lampung mencakup 8 (delapan) kabupaten/kota yang juga memiliki potensi besar untuk berkembang dalam kerangka pembangunan pesisir dan laut terpadu dan berkelanjutan. Provinsi Lampung yang memiliki garis pantai sepanjang 1.105 km merupakan jalur terpanjang kedua di Pulau Sumatera (setelah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), juga mempunyai potensi Sumber Daya Alam yang luar biasa, antara lain: perikanan, ekosistem pesisir dan laut (mangrove, lamun, terumbu karang dan rumput laut), pulau-pulau kecil dan pariwisata, serta potensi kelautan lainnya. Sebuah Jurnal Ekonomika tahun 2021 mempublikasikan studi tentang potensi sub sektor perikanan pada provinsi se-Indonesia dengan data PDRB Sub Sektor Perikanan tahun 2015-2019 dengan menggunakan metode analisis SLQ dan DLQ yang digabungkan dalam Tipologi Klassen; menyimpulkan bahwa sub sektor perikanan di Provinsi Lampung masuk pada kategori “Sektor Potensial”.

Merujuk publikasi BPS tahun 2022 juga menunjukkan bahwa s.d. tahun 2021 terdapat 238 desa (8,97 persen dari total jumlah desa) di Provinsi Lampung berada pada posisi geografis di tepi laut. Dari total desa tepi laut, terdapat 185 desa yang aktivitas penduduknya melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap. Jumlah Rumah Tangga Perikanan/ Perusahaan Perikanan (Th. 2020) tercatat sebanyak 15.886 unit usaha. Jumlah produksi perikanan tangkap Udang di laut (Th. 2020) sebanyak 1.884 ton, atau 1,6 persen dari akumulasi nasional. Produksi perikanan budidaya laut meningkat dari 3.699 ton di tahun 2016 menjadi 7.667 ton di tahun 2020 (atau 0,09 persen dari total produksi nasional). Produksi perikanan budidaya tambak meningkat dari 62.605 ton di tahun 2016 menjadi 73.088 ton pada tahun 2020 (atau 2,47 persen dari total produksi nasional) dan produksi budidaya rumput laut 2.246 ton di tahun 2018.

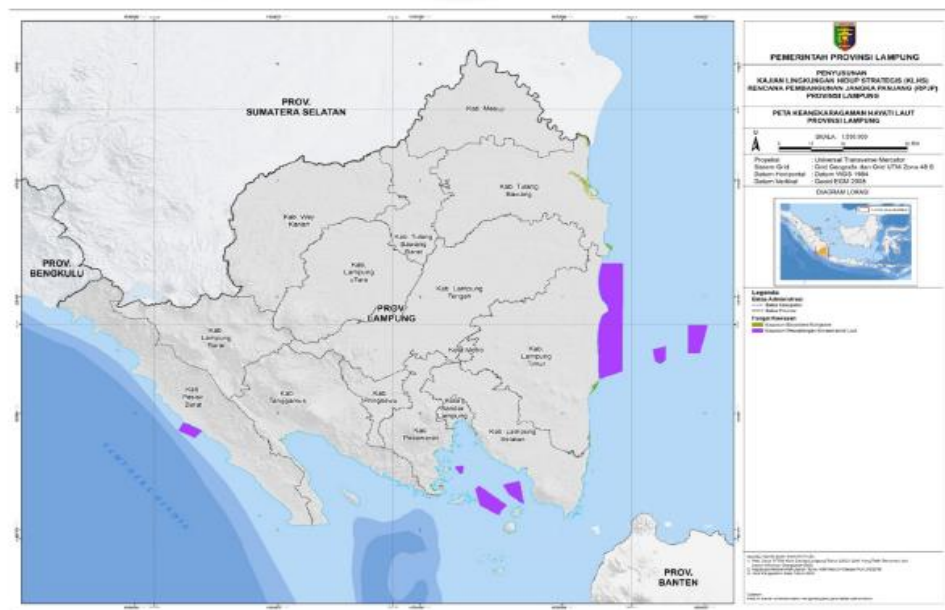
Catatan perdagangan global, juga menunjukkan bahwa volume ekspor hasil perikanan Lampung menunjukkan peningkatan dari 25.195 ton di tahun 2017 menjadi 31.162 ton pada tahun 2021. Hal tersebut menggambarkan bahwa terdapat peningkatan permintaan dan semakin bersaingnya produk perikanan di Lampung di pasar global. Nilai ekspor perikanan yang juga meningkat dari 237,602 Juta USD di tahun 2017 menjadi 297,086 Juta USD di tahun 2021. Namun, kontribusi perikanan dalam PDRB Provinsi Lampung tahun 2017-2021 belum banyak berubah dan masih berada pada kisaran 5,48 s.d. 5,96 persen sepanjang periode pengamatan. Rata-rata konsumsi kalori dari ikan per kapita/hari penduduk Lampung berkisar 45 Kkal (tahun 2020-2022); yang berarti konsumsi sumber kalori ikan dari penduduk masih cukup rendah, tentunya menjadi tantangan bagi produsen lokal untuk terus mengkampanyekan gerakan konsumsi ikan serta pengembangan produk ikan olahan.

Tidak dapat dipungkiri, sektor ini masih menghadapi beberapa pekerjaan rumah yang perlu terus dibenahi, seperti menurunnya kualitas lingkungan perikanan budidaya, hutan mangrove dan penyakit ikan maupun udang. Dari total desa tepi laut, terdapat 79 desa memiliki keberadaan mangrove dengan luas sekitar 21.635 Ha dimana 17,80 persen dalam kondisi rusak (Th. 2021). Luas terumbu karang 1.870,87 Ha dimana 15,98 persen dalam kondisi rusak (Th. 2020). Lingkungan

desa tepi laut juga terdampak pencemaran yang bersumber dari aktivitas rumah tangga, pabrik dan sumber pencemar lainnya (38 desa terdampak pencemaran air, 2 desa terdampak pencemaran tanah, dan 11 desa tercemar udaranya). Disisi sarana, jumlah perahu/kapal penangkap ikan di perairan laut (Th. 2020) tercatat bahwa penggunaan Kapal Motor Tempel sebanyak 9.216 unit (jauh dibanding Aceh, Sumut, Sumbar dan Babel yang berjumlah belasan ribu) dan Kapal Motor sebanyak 5.543 unit (jauh dibanding Sumut, Riau dan Babel yang berjumlah puluhan ribu). Selanjutnya, sektor perikanan juga masih dipandang kurang *bankable* sehingga masih terdapat pelaku usahanya mengalami kesulitan untuk memperoleh kredit permodalan. Revitalisasi kawasan Bumi Dipasena yang diharapkan dapat menjadi andalan pengembangan potensi daerah masih berjalan lambat akibat belum jelasnya pengalihan aset-aset perusahaan. Pengembangan pelabuhan perikanan juga masih terpusat pada Pelabuhan Perikanan Pantai yang merupakan UPTD Pemerintah Provinsi Lampung, yang notabene juga menghadapi keterbatasan anggaran daerah disamping kendala proses pengalihan aset pusat-daerah yang belum terealisasi.

Kondisi lingkungan wilayah pesisir Provinsi Lampung masih kurang memadai, diantaranya pemenuhan infrastruktur dasar yang masih minim. Dari 238 desa tepi laut, terdapat 25 desa (sekitar 10 persen) merupakan permukiman kumuh, masih terdapat sekitar 40 desa (sekitar 16,8 persen) belum memiliki fasilitas pembuangan limbah/tinja dengan jamban, dan 56 desa (sekitar 23,5 persen) berada pada area dengan tangkapan sinyal seluler yang lemah, serta masih terdapat 1,4 persen desa tepi laut belum terjangkau jaringan listrik. Kegiatan perekonomian masyarakat yang belum berkembang, tercermin dari jumlah lembaga perbankan yang masih terbatas di wilayah desa pesisir (tahun 2022, sekitar 134 desa pesisir tidak memiliki lembaga perbankan).

Gambar 3. 16 Peta Kawasan Keanekaragaman Hayati Laut



Sebagai salah satu lokomotif pembangunan ekonomi, pembangunan wilayah pesisir Lampung tentunya harus terus diberdayakan sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari wilayah lain, baik dari sisi infrastruktur, kehidupan sosial maupun berkembangnya perekonomian masyarakatnya. Sebagai sumberdaya yang cukup strategis dalam pembangunan ekonomi baik nasional maupun daerah, proses pembangunan kelautan dan perikanan belum mampu meraih peran signifikan dan berdaya guna untuk kemajuan daerah pada umumnya, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi sumberdaya pesisir dan laut yang cukup tinggi di Provinsi Lampung seharusnya dapat menjadi keunggulan komparatif yang tinggi pula. Potensi keunggulan komparatif yang tinggi ini dapat dikembangkan sebagai keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan oleh desa-desa di wilayah pesisir sehingga mampu meningkatkan kemajuan wilayahnya, meningkatkan derajat ekonomi masyarakat, dan tingkat kesejahteraan daerah. Sejalan dengan konsep ekonomi biru Indonesia sebagaimana menjadi arahan dalam RPJPN 2025-2045, pengembangan potensi laut juga perlu diimbangi dengan pelestarian sumber daya laut. Eksploitasi dan pelestarian sumber daya kelautan yang berimbang, akan berdampak pada ketersediaan cadangan sumber pangan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, **arah kebijakan pembangunan nasional untuk mewujudkan kemandirian energi merupakan peluang bagi Provinsi Lampung untuk**

bangkit dan berkontribusi terhadap kemajuan penyediaan energi secara berkelanjutan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasional dan daerah, Lampung memiliki Potensi Sumber Daya Alam berupa energi panas bumi (*geothermal*) pada 13 lokasi yang tersebar di beberapa wilayah.

Gambar 3. 17 Peta Sebaran Potensi Panas Bumi (GeoThermal)



Sumber : Dinas ESDM Provinsi Lampung

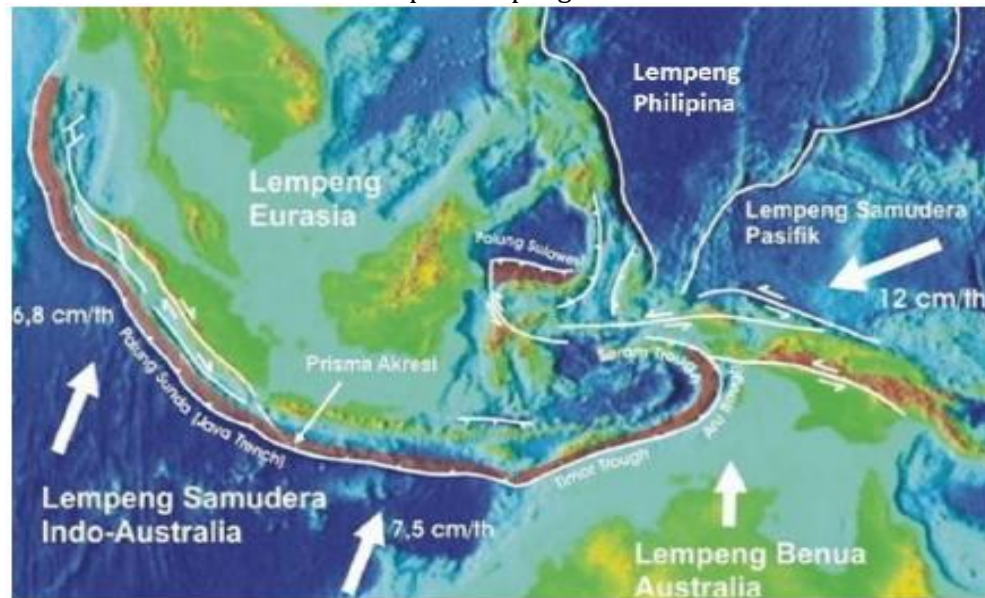
Energi panas bumi menjadi potensi sumber energi terbarukan. Meskipun potensi besar energi baru terbarukan telah diakui secara luas sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengatasi perubahan iklim, penerapannya masih belum optimal dalam banyak kasus. Kendala-kendala seperti biaya investasi awal yang tinggi, kurangnya infrastruktur pendukung, serta tantangan teknis dan regulasi masih menjadi hambatan dalam pengembangan dan peningkatan penggunaan energi baru terbarukan. Potensi energi geothermal Lampung terletak di daerah Ulubelu, geothermal Ulubelu terletak di desa Pagar alam dan Muaradua, sekitar 45 km dari distrik Talangpadang atau sekitar 125 km dari kota Bandar Lampung. Pembangkit listrik mulai beroperasi pada tahun 2012, dan dioperasikan oleh dua perusahaan PLN dan PGE. Saat ini total listrik yang dihasilkan adalah 165 MW oleh PLN sementara uap diproduksi oleh PGE. Suhu uap yang dihasilkan rata-rata 265° C dengan entalpi rata-rata 1160 kJ / kg. Pembangkit listrik tenaga panas bumi Ulubelu terdiri

dari tiga unit, Ulubelu unit 1, unit 2 dan unit 3. Pada 2017, unit 4 Ulubelu beroperasi dengan 55 MW.

Provinsi Lampung terdapat 13 daerah prospek panas bumi yang tersebar di enam kabupaten, yaitu Waykanan, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Barat, Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung. Total sumber daya panas bumi di Provinsi Lampung adalah 1758 MWe, terdiri dari sumber daya spekulatif sebesar 375 MWe, hipotetis sebesar 40 MWe, cadangan mungkin sebesar 898 MWe, cadangan terduga sebesar 225 MWe, dan cadangan terbukti sebesar 225 MWe, serta kapasitas terpasang sebesar 220 MWe (Daerah Panas Bumi Ulubelu). Lima wilayah prospek panas bumi di provinsi ini, yaitu Danau Ranau, Suoh Sekincau, Way Panas (Ulubelu), Way Ratai, dan Gunung Rajabasa sudah termasuk dalam Wilayah Kerja Panas Bumi (WK Panas Bumi).

Disisi satu sisi, **Lampung Wilayah Rawan Gempa, Tsunami dan Gunung Berapi**. Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa – Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (*Arnold, 1986*).

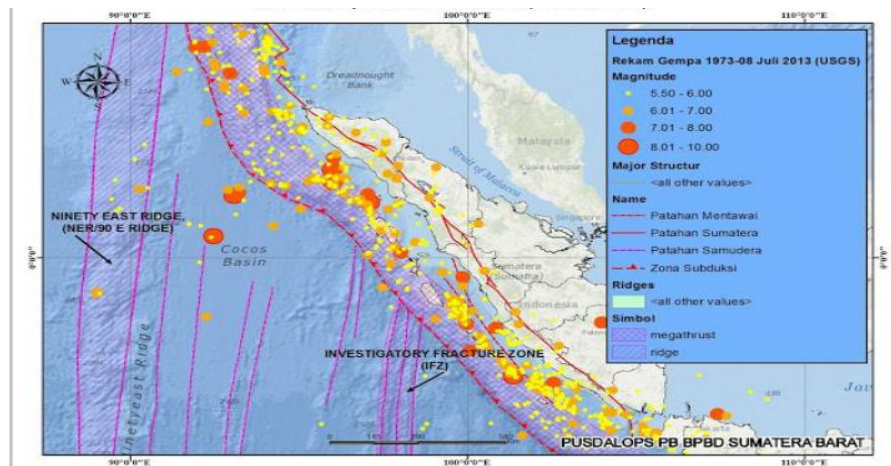
Gambar 3. 18 Peta GeoTeknik Indonesia Tempat Pertemuan Empat Lempeng Aktif Dunia



Sebagai negara yang berada di daerah Cincin Api Pasifik (*ring of fire*), Indonesia tidak akan lepas dari ancaman gempa bumi. Gempa yang berpusat di laut terkadang juga akan mendatangkan bencana lainnya seperti tsunami. Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan wilayah di Indonesia yang rawan gerakan tanah, gempa dan tsunami diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jatim, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulut, Sulteng, Sulsel, Maluku Utara, Maluku Selatan, Biak, Yapen dan Fak-Fak di Papua serta Balikpapan.

Letak geografis Provinsi Lampung yang diapit dua lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo Australia, menjadi salah satu penyebab wilayah Lampung rawan terjadinya gempa bumi. Sesar/patahan Sumatera membentang sepanjang 1.900 km (dari Banda Aceh hingga Teluk Semangko di Selatan Lampung), membentang paralel dengan palung/zona subduksi sebagai pengaruh dari konvergensi Lempeng Eurasia dengan Lempeng Indo-Australia.

Gambar 3. 19 Tataan Tektonik wilayah Pulau Sumatera - Samudera Hindia



Provinsi Lampung semakin memiliki potensi resiko terjadinya gempa bumi yang tinggi, karena selain diapit dua lempeng dunia, letak geografis Provinsi Lampung juga dilalui patahan Sumatera, dan tiga segmen aktif. **Segmen Sunda** (6.75 LS – 5.9 LS), merupakan segmen sesar Sumatera yang berada paling selatan. Keberadaannya ditandai dengan adanya graben bawah laut di bawah perairan Selat Sunda. Kedalaman graben mencapai 1.800 meter dibawah lantai dasar laut sepanjang sekitar 150 km. **Segmen Semangko** (5.9 LS – 5.25 LS), memanjang dari Teluk Semangko sepanjang 6 km ke arah barat laut yang mengakibatkan terbentuknya Lembah Suoh di Lampung Barat. Histori kegempaan yang terjadi pada segmen itu diantaranya terjadi pada 26 Maret 1908. Terakhir, **Segmen Kumering** (5.3 LS - 4.35 LS) memiliki panjang 150 km. Segmen itu melewati Danau Ranau yang berada di perbatasan antara Lampung dan Sumatera Selatan. Histori kegempaan yang terjadi adalah gempa Liwa pada 24 Maret 1933 berkekuatan 7,5 Ms. Selain itu gempa Liwa pada 16 Februari 1994 berkekuatan 6,8. Selain tiga sesar tersebut, di daerah Lampung juga **masih terdapat Sesar Tarahan**, yang berada di sepanjang pantai bagian timur Teluk Lampung. Sesar ini menerus ke daratan Sumatra melalui daerah Tarahan, Panjang dan lereng timur Gunung Rajabasa. Bahkan diperkirakan menerus ke perairan Selat Sunda. Struktur sesar diduga sebagai jenis sesar mendatar yang bergerak relatif dipengaruhi adanya gerak vertikal.

Dari pemetaan Stasiun Geofisika Kotabumi, terdapat beberapa daerah di Provinsi Lampung yang memiliki tingkat kerawanan gempa lebih tinggi dibanding daerah

lainnya, yaitu wilayah Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus dan Sebagian daerah di wilayah Pesisir Kabupaten Lampung Selatan. Keempat wilayah Kabupaten di Lampung tersebut, secara geografis terletak di atas tiga patahan Sumatera dan dilalui dua lempeng dunia.

Selain ancaman gempa dan tsunami, wilayah **Provinsi Lampung juga merupakan wilayah yang rawan akan terjadinya erupsi dan abu vulkanis yang berasal dari gunung berapi aktif** yang berada di perairan Selat Sunda, antara Pulau Jawa dan Sumatera. Rilis lembaga



Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan bahwa Gunung Anak Krakatau berada di kawasan Selat Sunda, Provinsi Lampung, secara geografis terletak pada posisi 06°06'05" LS dan 105° 25' 22,3" BT. Sejak kelahiran G. Anak Krakatau pada Juni 1927 hingga saat ini, erupsi berulang kali terjadi sehingga G. Anak Krakatau tumbuh semakin besar dan tinggi. Pasca erupsi yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2018 yang kemudian kolapsnya tubuh bagian barat daya dari Gunung Anak Krakatau, tinggi Gunung Anak Krakatau saat itu sekitar 150 mdpl.

Disisi yang lain, **pentingnya mitigasi dan edukasi terkait bencana** salah satunya gempa bumi harus diperkuat mulai dari dini. Masyarakat seharusnya sudah mulai membudayakan perilaku sadar bencana. Tahun 2022, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan konsep **Resiliensi Berkelanjutan** sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik menghadapi semua bentuk bencana sekaligus mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan. Konsep resiliensi berkelanjutan yaitu: pertama penguatan budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif; kedua berinvestasi dalam sains, teknologi, dan inovasi; ketiga pembangunan infrastruktur yang tangguh untuk bencana dan perubahan iklim; lalu ke empat,

mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan global di tingkat nasional sampai lokal.

Berkenaan dengan komoditas unggulan daerah, telah lama diketahui bahwa Lampung merupakan kawasan penghasil dan pemasok pangan strategis nasional, dan menyandang status “lumbung pangan nasional”. Pada tahun 2022 tingkat produksi beberapa komoditas unggulan Lampung yang mendominasi, antara lain : padi, jagung, ubi kayu, tebu, nanas, pisang, kopi, dan beberapa komoditas lainnya.

Gambar 3. 20 Komoditas Unggulan Provinsi Lampung



Namun, **produktivitas komoditas unggulan relatif belum berkembang**. Pengamatan data produktivitas komoditas unggulan daerah pada satu dekade terakhir memberi gambaran bahwa : tanaman pangan jenis kacang hijau belum banyak berubah; produktivitas tanaman padi, kedelai dan kacang tanah telah meningkat namun kurang signifikan; sementara itu produktivitas tanaman jagung, ubi jalar, dan ubi kayu cukup melonjak. Disisi hasil perkebunan, produktivitas tanaman lada, kakao dan kopi robusta cenderung menurun; produktivitas tanaman kelapa dalam dan kelapa sawit relatif stagnan; produktivitas tanaman tebu cukup dinamis pada level simpangan yang relatif stabil; sementara produktivitas tanaman karet meningkat secara signifikan.

Tabel 3. 2 Kinerja Produktivitas Tanaman Pangan dan Komoditi Perkebunan Rakyat

Kinerja Produktivitas Tanaman Pangan 2013 - 2017 (kuintal/Ha)

No.	Komoditas	Tahun									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kacang Hijau	8,99	9,01	8,99	8,96	9,51	9,42	9,42	7,06	9,17	9,69
2	Kacang Tanah	12,85	13,01	13,19	13,28	13,55	14,56	13,67	14,98	13,19	14,11
3	Kedelai	12,35	12,13	11,67	12,17	13,50	13,07	13,20	15,91	14,60	16,27
4	Padi	50,26	51,18	51,49	50,46	50,60	47,53	46,63	48,62	50,77	51,87
5	Jagung	50,83	50,74	51,20	50,56	52,19	53,98	55,61	62,10	66,13	64,50
6	Ubi Jalar	97,50	97,47	96,33	96,71	107,92	142,75	187,34	162,85	197,73	190,85
7	Ubikayu	261,84	263,87	264,45	261,80	261,25	238,75	247,21	263,72	274,75	286,59

Sumber : Dinas KPTPH Provinsi Lampung 2023

PRODUKTIVITAS 7 KOMODITI PERKEBUNAN RAKYAT (PR)

NO	KOMODITAS	Tahun									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Lada (kg/ha)	519	481	494	499	449	464	467	479	476	474
2	Kakao (kg/ha)	906	961	890	862	871	891	903	897	894	793
3	Karet (kg/ha)	852	1.125	1.101	1.031	1.084	1.133	1.376	1.361	1.369	1.367
4	Kopi Robusta (kg/ha)	886	693	790	824	773	797	843	838	834	817
5	Kelapa Dalam (kg/ha)	1.090	1.106	1.088	1.118	1.161	1.135	1.101	1.081	1.076	1.055
6	Kelapa Sawit (kg/ha)	2.804	2.362	2.247	2.254	2.295	2.251	2.254	2.200	2.218	2.286
7	Tebu (kg/ha)	6.277	5.845	5.897	5.732	5.506	6.601	6.288	5.901	6.569	6.302

*) Angka Sementara

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

Ke depan, upaya intensifikasi faktor-faktor produksi tentunya akan menjadi pilihan yang cenderung lebih dominan, mengingat bahwa perluasan areal/lahan pertanian semakin mengalami desakan terhadap kebutuhan lahan untuk permukiman dan kegiatan perdagangan serta industri. Disaat yang bersamaan, intensifikasi juga menghadapi tantangan pada kondisi semakin menurunnya kualitas tanah lahan pertanian dan isu pencemaran lingkungan. Perhatian terhadap produktivitas tanaman juga menjadi penting, mengingat bahwa hal tersebut akan berdampak terhadap kemampuan daerah untuk mewujudkan kemandirian pangan guna memenuhi kebutuhan wilayahnya; termasuk pula stabilitas harga pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Guna meningkatkan produktivitas TPH, petani memerlukan akses yang lebih baik terhadap sarana dan prasarana produksi pertanian antara lain meningkatkan penggunaan bibit unggul, memperbaiki teknik budidaya, meningkatkan akses petani ke pupuk, permodalan serta menangani serangan hama dan organisme pengganggu tanaman. Selain itu, investasi pemerintah perlu difokuskan pada

eterangan : Produktivitas tanaman padi berfluktuatif, dimana pada tahun 2018 angka provitas menurun. Penurunan ini dikareakan perbedaan cara perhitungan yang digunakan BPS. Pada tahun 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan metode pengukuran Kerangka Sampel Area (KSA). Penggunaan metode KSA menggantikan metode sebelumnya yang menggunakan pengukuran mata (eye estimate) yang bersifat subjektif untuk mengukur luas panen. KSA memberikan data produktivitas pertanian yang sangat akurat dengan pengambilan data sesuai dengan titik koordinat langsung, data-data yang diperoleh dari citra satelit, data dari pemetaan radar kemudian dilakukan ground check ke lapangan sehingga kita mengetahui data koordinat yang ada di lokasi tersebut dan langsung difoto kemudian dimasukan ke dalam sistem Android yang mengunci koordinat lahan sawah, sehingga lebih akurat lagi. Tujuan penggunaan KSA adalah untuk memperoleh data luas panen padi yang lebih objektif, akurat, cepat, dan modern. Namun setelah tahun 2019, angka provitas menunjukkan trend positif secara signifikan.

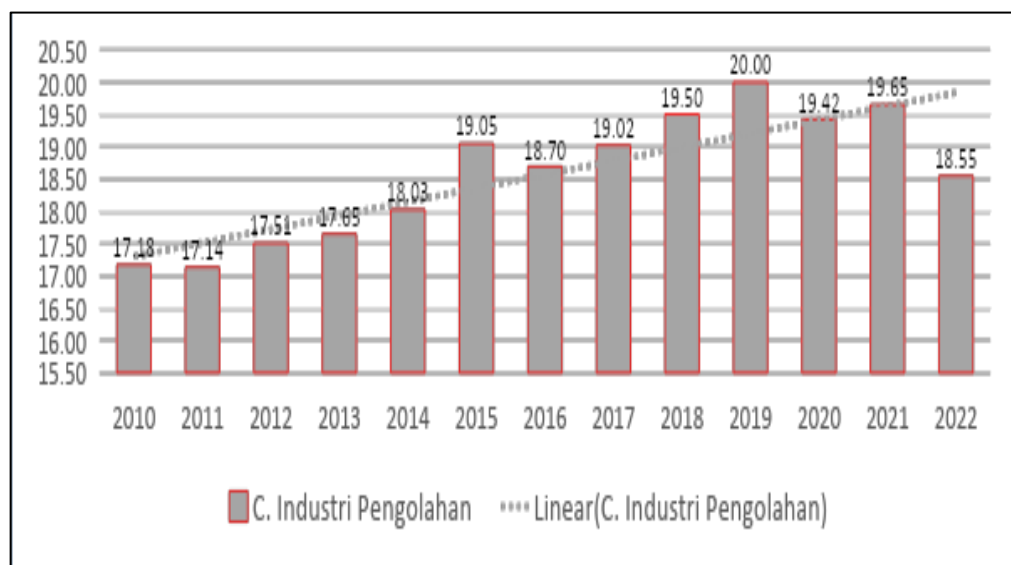
pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jalan, listrik, saluran irigasi, dan akses ke pelabuhan yang mempermudah petani.

Demikian pula dengan **peran industri dalam perekonomian daerah.**

Perkembangan struktur Industri Pengolahan dalam PDRB tahun 2010-2022 telah menunjukkan adanya

perubahan dari porsi 17,18 persen di tahun 2010 menjadi 18,55 di tahun 2022. Meskipun terdapat kecenderungan yang meningkat, namun tingkat perubahan tersebut masih dipandang berjalan lambat dan belum mencirikan kemajuan ekonomi daerah secara modern. Hingga tahun 2022, porsi sektor industri dalam PDRB Provinsi Lampung masih lebih rendah bila dibanding dengan Provinsi Banten (30,47 persen) ataupun Jawa Barat (42,24 persen) yang merupakan wilayah tetangga dari Provinsi Lampung.

Gambar 3. 21 Porsi Lapangan Usaha Industri Pengolahan dalam PDRB Lampung tahun 2010-2022



Jumlah Industri perlu diakselerasi, data statistik tahun 2017-2022 menunjukkan bahwa kontribusi Lapangan Usaha Industri pada lima tahun terakhir berada pada kisaran 18-20 persen dan merupakan kontributor terbesar ke-2 dalam perekonomian Lampung. Selanjutnya, pada periode pengamatan yang sama juga menunjukkan bahwa perkembangan jumlah usaha industri besar-sedang (IBS) tahun 2016 sebanyak 346 perusahaan meningkat menjadi 381 perusahaan, atau bertambah 35 industri sepanjang 5 tahun terakhir. Jumlah IBS di Lampung tersebut masih jauh tertinggal bila dibanding dengan Provinsi Banten yang tercatat 3.316 perusahaan (tahun 2020), ataupun Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 1.185 perusahaan (tahun 2020).

Jenis industri di Lampung pada lima tahun terakhir juga belum banyak berubah, dan masih didominasi oleh kegiatan industri makanan, yang notabene jumlahnya berkurang dari 277 perusahaan (IBS kategori makanan) di tahun 2016 menjadi 230 perusahaan di tahun 2021. Hingga tahun 2021, dari total 381 perusahaan industri besar-sedang di Lampung, sebanyak 60,37 persen merupakan jenis industri pengolahan makanan; 5,77 persen industri pengolahan karet, barang dari karet dan plastik; 4,99 persen industri barang galian bukan logam; 4,72 persen industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia.

Di sisi yang lain, perkembangan jumlah usaha Industri Kecil-Mikro (IKM) yang diharapkan dapat menopang perekonomian masyarakat justru menyusut. Data BPS mencatat bahwa di tahun 2017 jumlah Industri Kecil-Mikro (IKM) sebanyak 99.271 unit usaha, menurun menjadi 84.024 unit usaha di tahun 2021. Demikian pula dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan IKM; dari 231.989 orang di tahun 2017 menurun menjadi 178.626 orang di tahun 2021.

Ke depan, Provinsi Lampung perlu menangkap peluang dan berpotensi menjadi magnet untuk berkembangnya sektor industri, mengingat bahwa posisi geografis Lampung yang strategis berdekatan dengan Pulau Jawa dan memiliki ketersediaan sumber daya manusia yang cukup berlimpah, didukung pula dengan sarana pelabuhan penyeberangan barang dan orang (Pelabuhan Bakauheni) maupun pelabuhan ekspor di kawasan Teluk Lampung (Pelabuhan Internasional-Panjang), jalan lintas Sumatera maupun Jalan Tol Trans Sumatera yang berada di

Provinsi Lampung serta Stasiun Kereta Api yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Sumatera Selatan. Sayangnya, Kawasan Industri (KI) Way Pisang dan Katibung (Kab. Lampung Selatan), KI Pesawaran (Kab. Pesawaran), dan KI Maritim di Tanggamus (Kab. Tanggamus) yang telah dipersiapkan sejak lama oleh Pemerintah Provinsi Lampung belum berkembang.

Lebih lanjut, kemajuan sektor industri tentunya tidak hanya dapat diukur dan terbatas pada tinjauan mengenai jumlah dan jenis industry saja. Masih terdapat beberapa aspek lain yang mempengaruhi kinerja sektor ini, yang tentunya memerlukan kerjasama secara lintas sektor secara holistik. Perhatian terhadap sektor industri menjadi penting, mengingat bahwa salah satu sasaran dari Visi Indonesia Tahun 2045 adalah meningkatkan peran sektor industri sebagai tulang punggung perekonomian nasional, yang tentunya perlu didukung oleh pemerintah daerah.

Guna memperkuat kapasitas perekonomian daerah, hilirisasi komoditas unggulan Lampung perlu terus ditingkatkan . Provinsi Lampung memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan. Komoditas unggulan seperti kopi robusta, kelapa sawit, karet, dan cokelat memiliki peran sentral dalam perekonomian provinsi ini. Salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi ini adalah melalui hilirisasi produk unggulan. Hilirisasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Dalam konteks Provinsi Lampung, hilirisasi komoditas unggulan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, menciptakan lapangan kerja.

Komoditas unggulan di Provinsi Lampung bersumber dari sektor pertanian yang berkontribusi sekitar 28% terhadap PDRB daerah dan menyerap sekitar 40% tenaga kerja. Provinsi Lampung menjadi daerah lumbung pangan yang memiliki surplus produksi padi/beras. Komoditas lain yang juga memiliki potensi pengolahan, antara lain :

1. Kopi Robusta: Provinsi Lampung merupakan salah satu produsen kopi robusta terbesar di Indonesia. Hilirisasi kopi dapat dilakukan melalui pembuatan kopi

bubuk, kopi instan, atau produk kopi olahan lainnya. Penyusunan merek (=branding) kopi khas Lampung juga dapat meningkatkan daya saing.

2. Kelapa Sawit: Industri kelapa sawit Lampung dapat mengembangkan produk turunan seperti minyak kelapa sawit yang diolah, margarin, sabun, atau bahan bakar biodiesel. Pemanfaatan limbah kelapa sawit juga dapat diintensifkan.
3. Karet: Selain karet alam, produksi karet sintetis juga bisa menjadi fokus. Pengembangan produk karet seperti sarung tangan medis, ban, atau produk karet berdaya tahan tinggi lainnya akan mendukung hilirisasi.
4. Cokelat: Hilirisasi coklat dapat dilakukan dengan pembuatan coklat olahan seperti coklat batangan, coklat cair, atau produk coklat dengan rasa khas Lampung.

Upaya-upaya untuk Hilirisasi komoditas unggulan daerah masih menghadapi tantangan, diantaranya : dukungan infrastruktur dan investasi; kualitas tenaga kerja; pemasaran dan promosi; kemitraan dan kerjasama antar pihak; dan keberlanjutan pada aspek lingkungan.

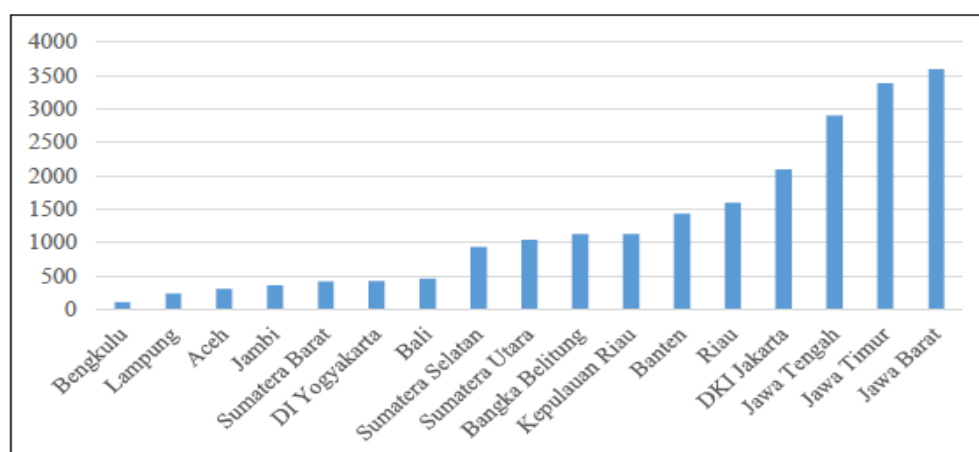
Hilirisasi juga perlu diikuti dengan Produktivitas Sektor Industri (Nilai TFP). Hasil publikasi penelitian Agustien Wahyuningsih dan Budyanra (Variabel-variabel yang Mempengaruhi *Total Factor Productivity* Industri Pengolahan di Kawasan Barat Indonesia Tahun 2011-2019); memberi gambaran bahwa Provinsi-provinsi yang memiliki nilai TFP “tinggi” adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Riau ditandai dengan warna hijau tua hingga hijau muda. Sementara itu, provinsi dengan nilai TFP “sedang” dimiliki oleh provinsi Banten, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Dilihat dari pengelompokan warna, nilai TFP didominasi dengan nilai TFP yang “rendah”. Dapat dilihat pada tabel di bawah bahwa warna merah lebih mendominasi daripada warna hijau. **Provinsi dengan nilai TFP “rendah” berada pada wilayah** Provinsi Bali, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Jambi, Aceh, **Lampung**, dan Bengkulu.

Tabel 3. 3 Gambaran Umum TFP Industri Pengolahan di Kawasan Barat Indonesia tahun 2011-2019

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jawa Barat	3920.12	3785.58	3941.34	3206.51	2998.37	3229.30	3674.05	3768.38	3837.00
Jawa Timur	3249.91	3519.57	3224.20	2837.73	3188.64	3340.83	3690.28	3635.33	3748.76
Jawa Tengah	2947.83	2832.95	2856.88	2843.66	2581.91	2749.00	3169.75	3156.60	2956.80
DKI Jakarta	1031.65	2221.65	2016.69	2300.63	2340.02	2254.84	2517.66	1955.31	2145.90
Riau	1608.41	1666.36	1489.47	1124.57	1823.12	1731.16	1698.42	1384.26	1815.29
Banten	1263.22	1327.73	1597.06	1589.25	1424.49	1463.68	1523.59	1554.04	1161.32
Kep. Riau	763.86	1315.16	1244.57	942.70	1008.08	1148.04	1372.41	1266.85	1056.00
B. Belitung	615.48	661.66	1150.15	1072.88	1082.72	1181.90	1396.05	1567.96	1376.68
Sumut	1075.11	1156.54	1211.26	1008.93	1074.88	949.72	862.03	965.83	1054.81
Sumsel	968.67	1027.57	1002.66	607.12	1009.41	898.91	848.85	1028.32	965.66
Bali	336.72	461.33	494.99	536.22	451.54	475.63	490.87	426.89	448.62
Yogyakarta	459.79	439.05	497.52	366.78	450.12	305.75	286.82	456.78	517.78
Sumbar	448.68	429.48	443.89	472.72	404.99	418.10	422.45	349.61	327.31
Jambi	346.30	358.02	402.50	367.48	302.30	326.88	414.51	368.51	358.12
Aceh	233.76	454.78	463.88	271.23	302.19	258.78	235.73	303.04	252.22
Lampung	236.86	304.88	212.82	206.32	204.41	208.69	229.66	273.32	265.52
Bengkulu	102.21	107.38	67.32	109.17	121.50	109.27	103.03	111.84	121.35

Produktivitas industri pengolahan digambarkan dengan rata-rata TFP level provinsi Kawasan Barat Indonesia selama tahun 2011 hingga 2019. Rata-rata TFP industri pengolahan provinsi di KBI bervariasi. Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah memiliki rata-rata TFP tertinggi ; sedangkan **rata-rata terendah dimiliki** oleh Provinsi Bengkulu, **Lampung** dan Aceh. Nilai TFP yang relatif rendah menandakan bahwa peningkatan output masih sangat bergantung pada peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kerja, modal, dan bahan baku yang tersedia daripada peningkatan TFP atau kemajuan teknologi.

Gambar 3. 22 Rata-rata TFP, 2011-2019



Hasil penelitian tersebut mengungkap bahwa : **TFP di Kawasan Barat Indonesia tahun 2011-2019 relatif belum merata** dan cenderung masih dibawah rata-rata. Provinsi Jawa Barat memiliki rata-rata TFP tertinggi sedangkan rata-rata terendah dimiliki oleh Provinsi Bengkulu, Lampung dan Aceh. **Artinya, mayoritas**

daerah yang berada di Kawasan Barat Indonesia masih **belum memanfaatkan kualitas faktor input atau kemajuan teknologi. Variabel-variabel yang mempengaruhi Total Factor Productivity** industri pengolahan Kawasan Barat Indonesia adalah penggunaan listrik yang belum beralih pada teknologi hemat energy dan tenaga kerja terdidik. Hasil menunjukkan bahwa **tenaga kerja terdidik** positif signifikan mempengaruhi TFP.

Tantangan perekonomian daerah juga tidak ringan. Kapasitas dan kualitas **UMKM perlu terus ditingkatkan, literasi Ekonomi Digital dan Ekonomi Syariah dan pengembangan Pariwisata sebagai Pendorong Ekonomi Daerah masih perlu terus dilanjutkan.** Meskipun Lampung telah mengalami perbaikan kondisi sosial ekonomi (data 2005-2022 : PDRB per kapita yang meningkat, IPM membaik, kemiskinan dan pengangguran yang semakin menurun, dan ketimpangan yang rendah), disaat yang bersamaan kondisi tersebut masih dipandang masih kurang bersaing dibanding dengan raihan lingkup regional antar provinsi di Pulau Sumatera ataupun capaian rata-rata nasional.

Tantangan UMKM Lampung

- Minimnya pengetahuan Usaha Mikro dan Kecil tentang manajemen bisnis yang baik seperti literasi keuangan, literasi digital masyarakat yang cenderung masih rendah sehingga pemanfaatan teknologi masih sebatas sosial media maupun hiburan saja, perlu diedukasi tentang pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan peralatan digital (terutama *smartphone*), untuk membantu mereka menganalisa pasar, memasarkan hasil produksi serta memanfaatkan data sebagai rencana mengembangkan bisnisnya;
- Sisi produksi masih belum optimal dan seringkali masih bergantung pada pekerja yang belum profesional di bidangnya serta desain produk belum berbasis inovasi, pemanfaatan bahan baku yang belum sesuai standar untuk menghasilkan produk yang berkualitas;
- Jumlah produk UMKM yang masih minim menembus pasar global dan seringkali mengalami pemasaran di pasar domestik serta belum optimal mendukung jalannya kepariwisataan daerah;
- Minimnya modal usaha UMKM yang belum optimal mengakses kredit Lembaga Keuangan Formal seperti Perbankan;

- Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang belum memiliki legalitas usaha dan berbadan hukum/informal.

Ekonomi Digital. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada perubahan di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta berdampak pada perubahan gaya hidup, termasuk pola konsumsi serta cara berjualan dan berbelanja masyarakat. Era baru globalisasi telah mendorong semakin meningkatnya kontribusi aspek digital terhadap ekonomi. Dengan didukung teknologi dan infrastruktur yang semakin canggih, kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan dalam ekonomi berbasis digital telah mempermudah, mempercepat dan merubah pola *supply* dan *demand* para pelaku ekonomi dari berbagai sisi, seperti pemasaran, pembelian, pendistribusian produk, sistem pembayaran, dan sebagainya.

Di masa kini, masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membeli dan/atau menjual barang dan/atau jasa melalui internet. Fenomena ini dikenal dengan perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Fenomena *e-commerce* menyediakan pilihan cara berbelanja bagi masyarakat dengan tidak perlu datang langsung ke toko. Kini, transaksi jual-beli produk dapat dilakukan dalam genggaman jari memanfaatkan jaringan elektronik.

Survey yang dilaksanakan oleh BPS menunjukkan bahwa jenis usaha *e-commerce* di Provinsi Lampung meningkat dari 18,48 persen di tahun 2019 menjadi 31,86 persen di tahun 2022, dengan estimasi sekitar 58.792 pelaku usaha. Berdasarkan kategori lapangan usaha (LU), tercatat bahwa pengguna usaha *e-commerce* juga tersebar pada berbagai lapangan usaha dalam PDRB Lampung, antara lain : 3,47 persen pada LU pertanian; 15,89 persen pada LU industri pengolahan; 42,57 persen pada LU perdagangan; 2,94 persen pada LU transportasi; 17,85 persen pada LU Akomodasi & Makan Minum. Selanjutnya, kegiatan *e-commerce* juga mendorong transaksi non tunai sebesar 11,55 persen dari seluruh jenis transaksi yang terjadi dalam aktivitas *e-commerce*. Catatan yang juga menarik perhatian, bahwa kegiatan pelaku *e-commerce* Lampung juga mendorong akses pelaku usaha ke pasar global, dimana terdapat 1,42 persen usaha *e-commerce* melakukan

transaksi penjualan *online* ke luar negeri (ekspor) dan 0,67 persen usaha *e-commerce* yang melakukan transaksi pembelian online dari luar negeri (impor).

Merujuk uraian tersebut, *aktivitas e-commerce* memberi peluang untuk mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat secara efisien dan terkoneksi pada cakupan



nasional hingga global. Selain menciptakan pasar ekspor-impor dan memberi andil dalam merubah pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat, *E-Commerce* juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi individu-individu untuk menjadi *entrepreneur* yang kedepannya diharapkan dapat memperluas lapangan pekerjaan. Disaat yang bersamaan, *e-commerce* ini dapat mendorong kreasi, inovasi, dan invensi kegiatan ekonomi baru di berbagai kalangan usia, khususnya generasi muda.

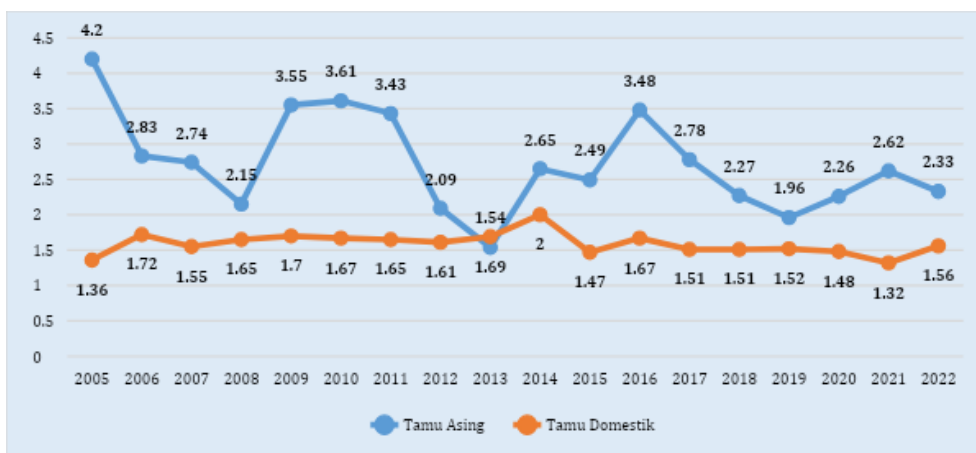
Perekonomian Syariah Inklusif, Pemerataan Pembangunan Ekonomi untuk Kemiskinan dan Ketimpangan. Dalam upaya mengurangi kemiskinan, pemerintah Indonesia menetapkan APBN untuk pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan dengan porsi yang besar dari total anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya. Terdapat layanan kesehatan gratis dan layanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin. Ada juga anggaran sosial yang dialokasikan untuk masyarakat miskin dengan memberikan program bantuan tunai bersyarat, dan bantuan pangan.

Peran perekonomian syariah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan juga dapat mendukung terwujudnya pemerataan pembangunan dan mendorong kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Di lain pihak pengelolaan keuangan syariah dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, terutama bagi mereka yang kurang terlayani oleh sektor keuangan konvensional.

Lebih lanjut, pusat kajian strategis Badan Nasional Zakat (2022) menyatakan potensi pembayar zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun per tahun. Potensi zakat akan menjadi salah satu pilihan solusi untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem ditengah keterbatasan anggaran pemerintah.

Pariwisata sebagai Pendorong Ekonomi Daerah. Berdasarkan rata-rata lama tamu menginap pada hotel berbintang Provinsi Lampung diketahui bahwa pada tahun 2011-2022 rata-rata lama tamu asing menginap pada hotel berbintang adalah 2-3 hari dan mengalami penurunan dibanding dengan rata-rata lama tamu asing menginap pada periode 2005-2010 yang sebesar 2-4 hari. Penurunan tersebut diduga sangat berkaitan dengan semakin membaiknya sarana infrastruktur konektivitas dan perbaikan kualitas kemudahan akses moda transportasi darat, laut maupun udara yang berpengaruh terhadap efisiensi waktu tempuh menuju destinasi. Lebih lanjut, rata-rata lama tamu domestik yang menginap pada hotel berbintang sepanjang tahun 2005-2022 belum berubah signifikan, yaitu berada pada kisaran 1-2 hari.

Gambar 3. 23 Rata-rata Lama Tamu Menginap pada Hotel Berbintang Tahun 2005-2022 (hari)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara geografis, Provinsi Lampung memiliki posisi strategis. Posisi daerah ini dapat menjadi kekuatan untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata daerah. Rencana pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung, antara lain, diarahkan pada: (1) Pengembangan Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City (BHC); (2) Pengembangan wisata Pantai Barat Lampung yang terintegrasi dengan Kawasan Teluk Lampung dan Danau Ranau; serta (3)

Pengembangan Kawasan TNWK Lampung Safari Way Kambas Park and Conservation Center. Potensi pengembangan industri pariwisata di daerah ini secara menyeluruh cukup tinggi. Kontribusi sektor ini potensial ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Profil pariwisata Provinsi Lampung dapat dilihat dari tiga komponen utama, yaitu: *Pertama*, daya tarik. Isu strategis terkait daya tarik pariwisata ini antara lain: belum optimalnya pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata; keterbatasan SDM pariwisata; serta kesiapan dan peran serta masyarakat di sekitar destinasi wisata yang masih rendah (RPJMD Provinsi Lampung 2019-2031). Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung 2012-2031 disebutkan bahwa strategi arahan pengembangan pariwisata Provinsi Lampung berprinsip kepada integrasi aktivitas pariwisata, pengembangan berbasis masyarakat, pola pembangunan regional, keterhubungan, pendanaan kolaboratif dan pemasaran yang terencana dan terintegrasi.

Kedua, aksesibilitas dan infrastruktur. Dalam penyusunan dokumen rewiu Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2019- 2024, disebutkan bahwa aksesibilitas dan infrastruktur menuju destinasi kurang mendukung, terutama di kawasan strategis pariwisata Lampung yang telah ditetapkan. Aksesibilitas dan infrastruktur dasar serta jalan menuju destinasi wisata memegang peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan sektor pariwisata dan sektor lainnya di suatu daerah. *Ketiga*, amenitas. Ketersediaan amenitas destinasi wisata akan semakin meningkatkan minat kunjungan wisatawan. Bukan saja dari segi kuantitas, namun dari segi kualitas amenitas pariwisata akan mempengaruhi jumlah wisatawan dan length of stay (lama tinggal) wisatawan ke Provinsi Lampung. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung mendukung misi kelima RPJMD 2019–2024, yaitu membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan, di mana tujuan pertama adalah meningkatnya pertumbuhan pariwisata, dengan sasaran meningkatnya daya saing pariwisata dan meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah.

Selanjutnya, **penerapan Ekonomi Sirkular masih menjadi tantangan sekaligus peluang**. Keterbatasan sumber daya sudah menjadi keniscayaan,

sedangkan keinginan manusia sifatnya tidak terbatas Untuk itu pemanfaatan sumber daya sudah seharusnya lebih efisien sehingga residu dari proses produksi dapat diminimalisir bahkan dikatakan nihil. Proses pengolahan sumber daya atau input untuk memiliki utilitas tinggi di Provinsi Lampung tentunya akan tergambar dari produk-produk unggulan yang menjadi ikon perekonomian daerah, yaitu dari sektor agrikultur.

Konsep ekonomi sirkular bukan hanya mendesain model industri dengan prinsip *zero waste*, tetapi fokus terhadap faktor sosial dan penyediaan sumber daya maupun energi yang berkelanjutan. Penerapan konsep ekonomi sirkular dinilai berpotensi dalam mendorong substitusi terhadap impor di sektor industri. Langkah strategis ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan daya saing Provinsi Lampung pada tataran manufaktur nasional dan global. Konsep ekonomi sirkular dalam sektor industri dapat diaplikasikan dengan menggunakan pendekatan 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, and Repair*).

Aktivitas pelaku ekonomi sirkular secara umum dilakukan karena faktor pemahaman terhadap manfaat aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan terhadap keberlangsungan usahanya, hal ini juga dipengaruhi oleh tuntutan dunia terhadap globalisasi produknya yang mensyaratkan pemenuhan kriteria ramah lingkungan. Untuk itu, konsep ekonomi sirkular di Provinsi Lampung selayaknya dilakukan oleh seluruh perusahaan sehingga membuka peluang dan meningkatkan daya saing produk unggulan Lampung di pasar global sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu produsen produk pertanian yaitu nanas dan tebu (komoditas unggulan daerah) di Provinsi Lampung yang masuk dalam pasar global telah menjalankan konsep ekonomi sirkular, tentunya dapat menjadi *benchmark* dalam menerapkan konsep *Food Estate* melalui *integrated farming system*. Ekosistem ini berawal dari tanaman perkebunan, kemudian dipanen dan diolah sehingga bisa menghasilkan produk utama maupun produk derivatifnya yang selanjutnya didistribusikan tidak hanya ke luar negeri namun juga ke dalam negeri. Dalam proses pengolahan produknya dihasilkan limbah organik (kulit nanas) yang bisa diolah menjadi

bahan campuran pakan peternakan sapi, yang limbah ternaknya juga dimanfaatkan sebagai bahan pupuk untuk perkebunan ataupun campuran bahan pembangkit energy (biomass) pada unit proses di pabrik pengolahan.

Pada tingkat yang lebih mikro, aktivitas ekonomi sirkular pada rumah tangga maupun usaha rumah *Food Estate*

tangga (*households industry*) melalui aktivitas produksi juga perlu berfokus pada pengurangan, pemanfaatan, dan daur ulang (*reduce, reuse, recycle*). Aktivitas

ekonomi sirkular pada rumah tangga memiliki potensi ekonomi yang signifikan untuk dikembangkan di Provinsi Lampung. Dalam konteks rumah tangga, aktivitas ekonomi sirkular yang telah dilakukan di daerah ini mencakup pemberdayaan komunitas melalui kerja sama dengan komunitas lain, dengan membentuk kelompok yang berfokus pada ekonomi sirkular dalam berbagi sumber daya, keterampilan, atau fasilitas untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.



Dengan menerapkan konsep ekonomi sirkular dalam aktivitas rumah tangga, selain dapat mengurangi limbah, sekaligus menciptakan peluang bisnis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini juga memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Data pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung bahwa terdapat 151 Bank Sampah yang terdiri dari 145 Bank Sampah Unit dan 6 Bank Sampah Induk tersebar di Provinsi Lampung menggambarkan bahwa sisa produksi masih dapat dimanfaatkan sehingga dapat memiliki nilai ekonomis. Data menunjukkan sampah yang terkumpul melalui bank sampah masih belum bisa terolah secara optimal, peran pemerintah sangat penting sebagai komponen yang dapat menstimulasi praktek ekonomi sirkular skala mikro oleh masyarakat.

Tabel 3. 4 Data Volume Sampah yang dikelola oleh Bank Sampah tahun 2022

Sistem Informasi Ditjen PSLB3 KLHK				
No	Jenis Sampah	Sampah Dikumpulkan (Kg)	Sampah Dikelola (Kg)	Sampah Sisa (Kg)
1	KERTAS	83.538,30	10.357,30	73.181,00
2	PLASTIK	73.330,90	20.351,10	52.979,80
3	LOGAM	19.234,60	7,300	19.161,60
4	SAMPAH LAINNYA YANG MUDAH TERURAI OLEH PROSES ALAM	4.591,00	8,980	4.501,20
5	SISA MAKANAN	4.129,00	2.539,00	1.590,00
6	SERASAH (DAUN KERING)	2.991,00	89,100	2.100,00
7	BEKAS KEMASAN PRODUK YANG MENGANDUNG B3 DAN/ATAU LIMBAH B	24,100	23,700	400
8	KACA	12,500	9,500	3,000
9	TEKSTIL	11,000	11,000	0

Praktek-praktek baik dari ekonomi sirkular tentunya perlu terus didorong secara massif pada berbagai skala produksi maupun lingkup rumah tangga, guna meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing, dan penerapan karakter produksi yang ramah lingkungan, bagi baik produsen pada lingkup bisnis maupun masyarakat secara luas.

Pembangunan ekonomi perlu terus didukung dengan peran IPTEK dan Inovasi. Investasi pemerintah di sektor pendidikan dan penerapan teknologi mutakhir menjadi modal penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan melalui SDM berkualitas. Pembangunan dari perspektif pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat dari fungsi dari kapital atau modal disertai dengan fungsi keberadaan pekerja atau manusia (model Solow), yang dengan meningkatnya pendidikan, modal pekerja (*labor*) dapat bergeser dan berfungsi menjadi fungsi modal atau *Human Capital*. Berkaitan dengan hal tersebut, potensi ekonomi Provinsi Lampung walaupun dalam kondisi berpendapatan menengah-rendah (*lower-middle income*), masih sangat mungkin untuk dikembangkan. Potensi tersebut akan terdorong secara signifikan dengan perkembangan teknologi. Hal utama yang membuat sebuah negara berhenti bertransformasi pada level *middle-income* salah satunya adalah terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tidak terkelola. Karenanya, penting sekali untuk menginvestasikan dan terus meningkatkan kualitas SDM. Pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari kondisi meningkatnya produktivitas SDM yang terlatih dibanding dengan yang memiliki pendidikan yang rendah.

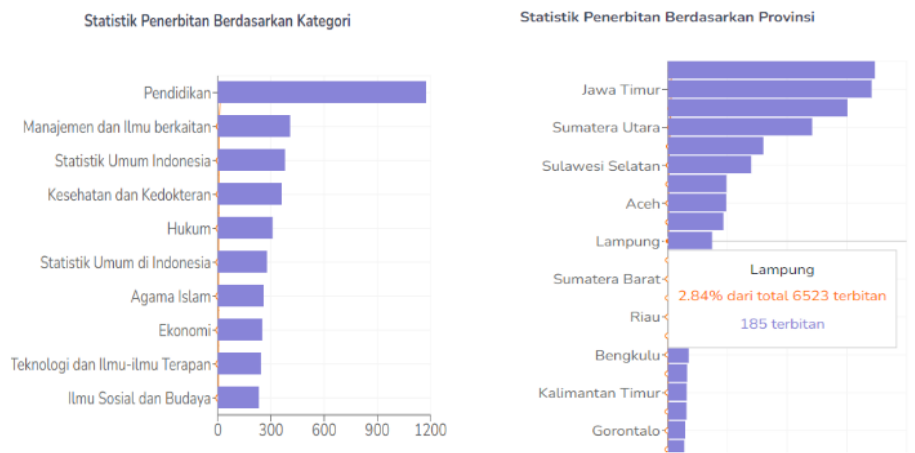
Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan sinergi dengan pihak perguruan tinggi, adaptasi yang dinamis antar stakeholder dengan perkembangan dunia

internasional, diikuti dengan pendanaan yang secara optimal mendukung transformasi ekonomi di Provinsi Lampung yang mampu menjadi *driven factor* menjawab tantangan perubahan dalam momentum bonus demografi sehingga mampu menembus *middle-income trap*.

Dalam perkembangan global, terindikasi bahwa teknologi akan menyebabkan sejumlah besar jenis pekerjaan akan hilang atau tergantikan dengan otomasi dari *Artificial Intelligence* maupun *teknologi Internet of Things (IoT)*, hal ini menjadi isu yang besar ke depan dan harus segera diantisipasi dengan investasi pendidikan dan riset. Perguruan tinggi (PT) memegang peran yang paling sentral dan strategis dalam membangun SDM unggul dengan kapasitas inovasi melalui riset. Untuk itu, PT harus terus meningkatkan kapasitasnya (menjadi *World Class University*) untuk menghasilkan tiga output utamanya atau Tri Dharma (PT) yaitu: (1) lulusan SDM unggul, (2) invensi (penemuan melalui riset) dan inovasi, dan (3) pengabdian kepada masyarakat yang menyejahterakan. Kedepan PT dapat menjadi poros dalam membangun SDM Indonesia dengan karakter produktif, inovatif, kolaboratif, ber-Imtaq, beretos kerja unggul (kerja keras, disiplin, dan menyumbangkan kemampuan terbaiknya), dan berakhlak mulia (jujur, amanah, fathonah, sabar, ikhlas, dan berorientasi akhirat), karena yang tidak bisa digantikan oleh robot adalah *critical thinking*.

Statistik Masyarakat yang mendaftarkan ISSN (International Standard of Serial Number) di Badan Riset dan Inovasi Nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 6.523 terbitan ISSN dari berbagai kategori. Dari seluruh ISSN yang diterbitkan secara nasional, sebanyak 2,84 % kontribusinya berasal dari Provinsi Lampung. Posisi tersebut masih di bawah Jawa Barat (13,31%), Jawa Timur (13,1%), Sumatera Utara (9,28%), DKI Jakarta (6,13%), Sulawesi Selatan (5,35%), dan Aceh (3,74%). Meski demikian, kontribusi Lampung di tahun 2022 masih lebih baik dibanding tahun 2015 yang tercatat berkontribusi sebesar 1,17% dari 3.248 terbitan ISSN.

Gambar 3. 24 Statistik Masyarakat yang mendaftarkan ISSN di BRIN Tahun 2022



Universitas disebut sebagai roda penggerak inovasi dan pengembangan teknologi dengan pendekatan *Triple Helix* dalam hilirisasi riset, yaitu sinergi antara pemerintah, swasta dan perguruan tinggi. Pergeseran tren dunia dari sektor manufaktur ke sektor jasa yang membutuhkan tenaga kerja jenis *middle-higher skilled*, bukan lagi *low-skilled labour*.

Dengan berkaca pada kondisi eksisting maka hal yang menjadi faktor utama adalah menentukan sektor yang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang masih berpeluang besar untuk dikembangkan input SDM dan Teknologinya, yang mendukung hilirisasi & Diversifikasi Produk melalui industri dalam konteks *circular economy & Green Economy*.

Peranan Inovasi dalam Pembangunan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial. Inovasi adalah salah satu pendorong utama dalam pembangunan ekonomi dan perubahan sosial di seluruh dunia. Kata “inovasi” mengacu pada proses menciptakan, mengadopsi, dan mengintegrasikan ide, produk, layanan, atau praktik baru yang menghasilkan nilai tambah. Inovasi dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk teknologi, bisnis, pendidikan, kesehatan, dan banyak lagi. Dalam konteks pembangunan ekonomi, inovasi memiliki peran yang sangat penting, dan dalam artikel ini, kita akan membahas peranannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial yang positif.

Tantangan dalam Mengadopsi Inovasi. Meskipun inovasi memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial yang

positif, ada beberapa tantangan yang terkait dengan mengadopsi inovasi. Beberapa di antaranya termasuk:

1. Keterbatasan Akses:

Beberapa komunitas dan negara mungkin menghadapi keterbatasan akses ke inovasi, terutama dalam konteks teknologi. Ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

2. Ketidakpastian dan Risiko:

Inovasi seringkali melibatkan ketidakpastian dan risiko. Banyak proyek inovasi gagal, dan ini dapat menjadi tantangan bagi perusahaan dan pemangku kepentingan.

3. Biaya Implementasi:

Mengadopsi inovasi seringkali memerlukan investasi yang signifikan dalam hal sumber daya, waktu, dan uang. Itu bisa menjadi hambatan bagi beberapa pemangku kepentingan.

4. Perlawanan Terhadap Perubahan:

Beberapa orang dan organisasi mungkin resisten terhadap perubahan. Mereka mungkin merasa nyaman dengan status quo dan enggan mengadopsi inovasi.

5. Kebijakan dan Hukum:

Beberapa kebijakan dan hukum mungkin tidak mendukung inovasi. Peraturan yang berlebihan atau tidak fleksibel dan secara implementatif tidak mengikuti perkembangan situasi dapat menghambat kemajuan inovatif.

Penting untuk mempromosikan inovasi yang berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan pendekatan yang benar, inovasi dapat menarik peran serta segenap elemen masyarakat berpartisipasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan perubahan positif.

Kemajuan ekonomi perlu disokong dengan stabilitas trantibumlinmas yang kondusif ditengah kemajemukan sosial. Kondisi sosial dan kultural masyarakat yang majemuk berpotensi menimbulkan kesenjangan dan konflik Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA). Selama bertahun-tahun penduduk Lampung hidup berdampingan dalam suasana yang harmonis pada bingkai NKRI yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Berbagai catatan peristiwa konflik sosial

yang pernah memberi kejutan terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat Lampung tidak melunturkan komitmen untuk saling menghargai dan memelihara semangat “Bhinneka Tunggal Ika”.

Menyadari bahwa penduduk Lampung yang sangat heterogen dengan beraneka ragam sistem sosial dan budaya; memiliki kerentanan untuk mengalami konflik antar suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) secara vertikal maupun horizontal. Konflik demikian tidak jarang menimbulkan kerugian serius yang jika tidak dikelola dengan baik akan dapat mengganggu integrasi bangsa. Di sisi lain, dampak negatif globalisasi mendorong kelompok-kelompok suku bangsa, agama, pandangan politik, etnik, maupun kehidupan sosial di wilayah lokal dapat bangkit secara inkonstitusional dan radikal yang mengancam kehidupan damai masyarakat bahkan mengancam persatuan bangsa. Perkembangan demikian, jika tidak diantisipasi dengan baik dapat melunturkan komitmen berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat. Ancaman stabilitas politik, hukum dan keamanan pada masyarakat khususnya kehidupan berdemokrasi yang ditandai adanya kebebasan berpendapat dan berkelompok masih kerap disalahgunakan oleh peserta kontestasi pemilu maupun masyarakat pemilih. Selain itu juga status kepemilikan lahan merupakan salah satu isu agraria yang menonjol dan kompleks. Berbagai faktor, mulai dari sejarah penguasaan lahan, kebijakan pemerintah, hingga intervensi perusahaan besar, mempengaruhi dinamika konflik yang memerlukan pendekatan multifaset dan keberpihakan pada keadilan sosial. Penyelesaian konflik ini tidak hanya memerlukan kebijakan yang tegas dan adil, tetapi juga partisipasi aktif dari semua pihak terkait untuk menciptakan harmoni dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Lampung.

Pelestarian Nilai Religi, Budaya dan Nasionalisme merupakan Modal Sosial Pembangunan. Nilai religius yang dipedomani pada seluruh lingkup kehidupan masyarakat akan tercermin dari budaya dan kehidupan bermasyarakat, hal ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan karena itu merupakan modal sosial yang sangat mendasar dan berharga bagi pembangunan. Untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan beberapa variabel yaitu toleransi, kesetaraan dan

kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati dan menghargai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Sedangkan kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.

Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Harmonisasi peraturan ditingkat daerah agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat. Selain itu, penguatan nilai nasionalisme diperlukan untuk menangkal paham radikalisme yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

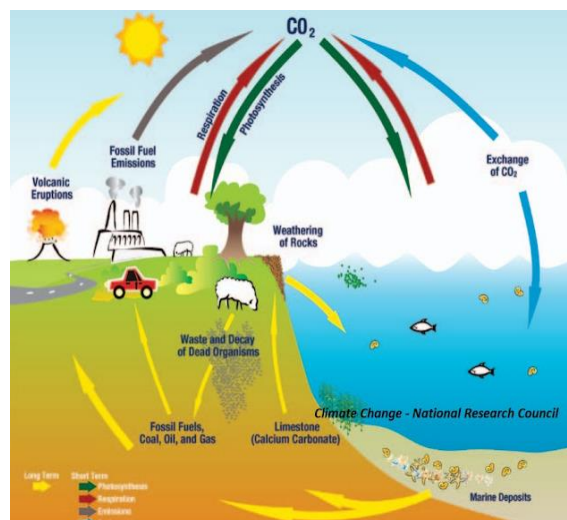
Membangun pondasi akhlak bagi generasi anak dan remaja perlu ditangani secara berkelanjutan. Minimnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudahkan solidaritas dan gotong-royong, serta meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. Negara abai dalam menghormati dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap “yang berbeda”. Kegagalan pengelolaan keragaman itu terkait dengan masalah ketidakadilan dalam alokasi dan distribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan “dunia tanpa batas” (*borderless-state*) yang pada gilirannya membawa dampak negatif berupa kejut budaya (*culture shock*) dan ketunggalan identitas global di kalangan generasi muda Indonesia. Hal ini mendorong pencarian kembali basis-basis identitas primordial sebagai representasi simbolik yang menjadi pembeda dengan lainnya. Konsekuensinya, bangsa ini berada di tengah pertarungan antara dua arus kebudayaan. Di satu sisi, manusia Indonesia

dihadapkan pada arus kebudayaan yang didorong oleh kekuatan pasar yang menempatkan manusia sebagai komoditas semata. Di sisi lain, muncul arus kebudayaan yang menekankan penguatan identitas primordial di tengah derasnya arus globalisasi. Akumulasi dari kegagalan mengelola dampak persilangan dua arus kebudayaan tersebut menjadi ancaman bagi pembangunan karakter bangsa.

Ditengah aktifitas sosial ekonomi yang semakin dinamis, perhatian terhadap isu perubahan iklim tak luput untuk tersu diantisipasi. Emisi gas rumah kaca (GRK) atau pelepasan gas karbon dioksida (CO₂), methana (CH₄), nitrogen dioksida (NO₂), belerang dioksida (SO₂), dan klorofluorokarbon (CFC), terperangkap di atmosfer bumi dalam jumlah yang sesuai sangat berguna bagi kehidupan di bumi, namun sangat berbahaya bagi kehidupan apabila konsentrasinya semakin meningkat karena dapat menyebabkan perubahan pada iklim yang ekstrem. Perubahan iklim ini dapat menimbulkan berbagai dampak lingkungan seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya kejadian banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, wabah penyakit yang semakin meningkat, kegagalan panen dan lainnya.

Komitmen penurunan emisi GRK sejalan dengan dengan tujuan SDG's yang juga diadopsi oleh pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung. Melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 A tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 17,159 jt t CO₂e atau sebesar 38,59 % dari total *Business As Usual*/BAU Provinsi Lampung Tahun 2020 sebesar 27,9 jt ton CO₂e. Terbaru, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku *National Focal Point* UNFCCC pada tanggal 23 September 2022 telah menyampaikan peningkatan ambisi penurunan emisi GRK melalui dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC). Target penurunan emisi GRK dengan kemampuan sendiri pada *updated* NDC yang sebesar 29% meningkat menjadi 31,89% pada ENDC, sedangkan target penurunan emisi GRK dengan bantuan internasional pada UNDC yang sebesar 41% meningkat menjadi 43,20% pada ENDC. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Lampung juga telah melakukan Kaji Ulang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca

(RAD GRK) dan telah menentukan estimasi penurunan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 8,40% berdasarkan *Business As Usual* (BAU) *baseline* tahun 2030. Dengan target penurunan sebesar 8,40% pada tahun 2030, maka besar emisi yang direncanakan dapat diturunkan pada tahun 2030 yakni sebesar 2.320.958,83 ton CO₂e dari skenario BAU *baseline* 27.629.786,24 ton CO₂e.



Tabel 3. 5 Nilai Baseline dan Perkiraan Penurunan Emisi Tahun 2030

Bidang Mitigasi	BAU Baseline (tonCO ₂ e)	Estimasi Penurunan Emisi GRK	
		tonCO ₂ e	%
Pertanian	7.908.650,65	12.367	0,156%
Kehutanan	721.435,59	359,74	0,050%
Energi & Transportasi	17.870.000	2.160.000	12,087%
Pengelolaan Limbah	1.129.700,00	148.232,09	13,121%
Total	27.629.786,24	2.320.958,83	8,40%

Sumber: Pengolahan data oleh Pokja RAD GRK

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional membuka peluang semua pihak, termasuk pelaku usaha dan kelompok masyarakat untuk melakukan perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja.

Nilai ekonomi karbon merupakan salah satu instrumen guna mewujudkan kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme :

- Perdagangan Karbon;
- Pembayaran Berbasis Kinerja;
- Pungutan Atas Karbon; dan/atau
- mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan oleh Menteri.

Salah satu mekanisme pengurangan emisi gas rumah kaca adalah melalui program *Result Based Payment* atau pembayaran berbasis kinerja REDD+ (*Reducing Emission From Deforestation And Forest Degradation*).

Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.1398/MenLHK/Setjen/Kum.1/2023, tentang Alokasi Pemanfaatan Dana RBP REDD+ *for Result Period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2* untuk Kategori Pemanfaatan II “*Result based payment for verified emission reduction*” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023, Pemerintah Provinsi Lampung sebagai penerima manfaat mendapatkan alokasi dana sebesar USD 205.488 atau sekitar Rp. 3.233.435.875,- (*Tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pada bulan September 2023, Presiden Republik Indonesia meluncurkan secara resmi Bursa Karbon Indonesia yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bursa Karbon Indonesia merupakan kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis akibat perubahan iklim karena hasil perdagangan karbon akan direinvestasikan pada upaya menjaga lingkungan khususnya pengurangan emisi karbon. Saat ini Pemerintah Pusat sedang menyiapkan mekanisme Perdagangan Karbon.

Sebagai Provinsi yang terletak di ujung pulau Sumatera, Provinsi Lampung memiliki sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi serta populasi penduduk yang besar, namun disisi lain Provinsi Lampung juga sangat rentan terhadap dampak dari perubahan iklim itu sendiri mengingat wilayah geografisnya yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan Laut Jawa. Meskipun begitu, dengan besarnya potensi yang dimiliki Provinsi Lampung tersebut memiliki potensi yang besar untuk turut andil dalam penanganan pengendalian perubahan iklim.

Ke depan, seiring dengan harapan kemajuan pembangunan ekonomi Lampung 20 tahun ke depan; Pemerintah Provinsi Lampung perlu menyiapkan berbagai regulasi untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam di daerah

yang sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru tahun 2045; termasuk adanya peluang Perdagangan karbon yang dapat menjadi instrumen ekonomi dan lingkungan dalam sekaligus upaya mitigasi terhadap perubahan iklim.

Disisi pemerintahan, **tata kelola** diperlukan dalam rangka memampukan pemerintah untuk bekerja dengan regulasi dan kebijakan yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Selama ini, tata kelola menjadi kendala utama di dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi. Hal ini menyebabkan banyaknya pengujian materiil, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum. Kondisi tersebut disebabkan karena masih kuatnya ego sektoral, masih tersebarnya kewenangan pengelolaan regulasi, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi, belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM di bidang regulasi, serta belum optimalnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan regulasi

Tata kelola regulasi dan kebijakan yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Dengan memperkuat proses perumusan, implementasi, dan pengawasan kebijakan serta regulasi, organisasi dan pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya relevan dan efektif tetapi juga dapat diterima dan didukung oleh semua pemangku kepentingan.

Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif. Fragmentasi birokrasi menyebabkan tumpang-tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada berbagai bidang serta melanggengkan ego sektoral. Fragmentasi kelembagaan juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam kerangka hubungan antar instansi pemerintah. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam rangka penguatan kelembagaan instansi publik yang kredibel dan adaptif.

Tata kelola sumber daya manusia aparatur dalam perekrutan aparatur pegawai negeri meliputi rekrutmen dan seleksi juga perlu didukung dengan proses yang transparan dan adil. Kemajuan organisasi berhubungan dengan kebutuhan akan dukungan kapasitas SDM sehingga perlu proses yang perencanaan melalui rangkaian analisa yang berpatokan pada regulasi sebagai pedoman dan rujukan dalam pengelolaan SDM. Usaha peningkatan kualitas SDM ditempuh melalui upaya yang sinergis antara berbagai pihak dan juga pengembangan kapasitas, pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur negara. Selain itu kinerja dan manajemen SDM aparatur perlu mendapat pembenahan secara komprehensif yang berbasis pada kompetensi.

Dalam rangka menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas dengan menempatkannya pada jabatan-jabatan yang sesuai kompetensinya, pemberian kompensasi yang adil dan layak, mengembangkan kemampuan ASN melalui Pendidikan dan pelatihan, dan melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip meritokrasi. Penerapan sistem merit pada aspek pengembangan karir yang masih rendah menjadi perhatian utama dalam rencana aksi penerapan sistem merit di Pemerintahan. Oleh karena itu manajemen talenta ASN harus segera diimplementasikan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, kualitas pembinaan dan pengembangan karier meningkat, tersedia PNS yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh instansi. Hal ini menjadikan suksesi pengisian jabatan strategis di instansi pemerintah menjadi terhambat, tidak terpetakannya talenta terbaik, rendahnya kinerja dan kompetensi ASN, kuatnya mentalitas silo, serta rendahnya budaya dan etos kerja. Sistem penghargaan ASN berbasis kinerja belum terwujud, yang ditandai dengan disparitas atau kesenjangan penghasilan ASN antar instansi yang menyebabkan sulitnya mempertahankan talenta ASN terbaik. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah. Hal ini disebabkan posisi kepala daerah sebagai pejabat pembina

kepegawaian yang berwenang melakukan pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, dan pemberhentian ASN.

Selanjutnya, penetapan standar kualitas layanan publik yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah adalah proses penting dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik. Standar pelayanan ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi ekspektasi masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Belum meratanya kualitas pelayanan publik. Standar pelayanan belum diterapkan secara merata sehingga masih ditemukan kerumitan prosedur pelayanan, ketidakpastian waktu pelayanan, serta masih adanya praktik pungutan liar. Selain itu, terhambatnya proses digitalisasi pelayanan publik disebabkan karena belum meratanya pembangunan infrastruktur digital, keterbatasan kapasitas SDM, serta belum terbangunnya interoperabilitas data dan layanan.

Penguatan reformasi birokrasi untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit dan menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum

Tata Kelola Satu Data dan Satu Peta juga merupakan bagian penting dalam pengelolaan pemerintahan dan layanan kepada masyarakat. Data merupakan “komoditas” yang saat ini dianggap penting dan sangat berharga sama seperti sumber energi seperti minyak atau gas bumi. Dimanapun, siapapun atau instansi apapun yang menguasai data akan menjadi pihak yang memiliki keunggulan kompetitif. Diperkirakan di tahun 2030 data akan menjadi komoditas utama bagi pemberi layanan jasa. Data yang terintegrasi bermanfaat untuk mendorong kepercayaan publik, meningkatkan nilai sosial dan ekonomi, mendorong adanya pemerintah yang partisipatif, dan meningkatkan efisiensi biaya (*kutipan Pidato Kenegaraan Presiden RI 16 Agustus 2019*).

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, maka diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Adapun data yang dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan di suatu daerah dapat terdiri dari data statistic, dan keuangan, yang didukung dengan data dan informasi geospasial. Satu Data Indonesia adalah inisiatif untuk mendorong sistem pengambilan kebijakan yang berbasis data dan riset (*evidence-based policy*). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan *interoperable*.

Pelaksanaan reformasi tata kelola pemerintahan menjadi bagian untuk meningkatkan kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi Global Megatrends 2045. Untuk mewujudkan reformasi tata kelola



pemerintahan, dibutuhkan birokrasi yang andal dan modern dengan daya dukung capaian infrastruktur birokrasi yang solid dan kokoh serta pemerintahan secara terbuka dan kolaboratif. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mewujudkan satu sumber data “*one single source of truth*” dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Perpres Nomor 39 tahun 2019 telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Provinsi Lampung. Namun, implementasi Satu Data saat ini masih menghadapi kendala, mulai dari aspek regulasi, kelembagaan, pembiayaan, koordinasi, penyelenggaraan, pengelolaan dan pemanfaatan, teknologi hingga kendala sumber daya manusia. Untuk itu capaian tata kelola data dan keterpaduan dengan data nasional harus dapat diintegrasikan oleh pemerintah daerah sebagai bagian penting untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan.



**RANCANGAN AKHIR RPJPD
TAHUN 2025-2045**

BAB IV

VISI DAN MISI



BAB IV

VISI DAN MISI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 - 2045

Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara tegas juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4.1 TINJAUAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2025-2045

4.1.1 Visi Pembangunan Nasional 2025-2045

Visi Indonesia Emas 2045 adalah “**Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**”. Negara Kesatuan Republik Indonesia artinya negara Republik Indonesia yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. *Berdaulat* yang dicapai melalui ketahanan, kesatuan, mandiri, dan aman. *Maju* tercermin dari berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. *Berkelanjutan* melalui pembangunan yang lestari dan seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Gambar 4. 1 Visi Indonesia Emas 2045



Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dicerminkan oleh lompatan besar meliputi 5 (lima) sasaran visi yaitu (i) Pendapatan per Kapita setara negara maju (GNI per kapita sebesar USD 30.300, kontribusi PDB Maritim mencapai 17,5 persen, serta PDB Industri 28 persen); (ii) Kemiskinan menuju Nol Persen (tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5 - 0,8 persen) dan ketimpangan berkurang (Rasio Gini 0,290 - 0,320 dan peningkatan Kontribusi PDRB KTI menjadi 26 persen); (iii) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang meningkat (*Global Power Index* masuk 15 besar dunia); (iv) Daya Saing Sumber Daya Manusia juga terus meningkat (skor HCI menjadi 0,73); dan (v) Intensitas Emisi GRK menurun menuju Emisi Nol Netto (*net zero emission*) dengan tingkat penurunan mencapai 93,5 persen.

Gambar 4. 2 Lima Sasaran dari tujuan pada Visi “INDONESIA EMAS 2045”



4.1.2 Misi dan Arah Pembangunan Nasional 2025-2045

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan **8 (delapan) Misi (agenda) Pembangunan**. Delapan agenda ini pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu **(i) Transformasi Indonesia**, dengan 3 (tiga) Agenda yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola; **(ii) Landasan Transformasi** terdiri dari 2 (dua) Agenda yaitu Agenda Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi serta Agenda Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; dan **(iii)**

Kerangka Implementasi dengan 3 (tiga) Agenda yaitu Agenda Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas; Agenda Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta Agenda Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui **17 (tujuh belas) Arah Kebijakan** menuju Indonesia Emas 2045.

Gambar 4. 3 Transformasi dan Agenda Pembangunan Indonesia Emas 2045



Delapan Misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui Tujuh Belas Arah (tujuan) Pembangunan :

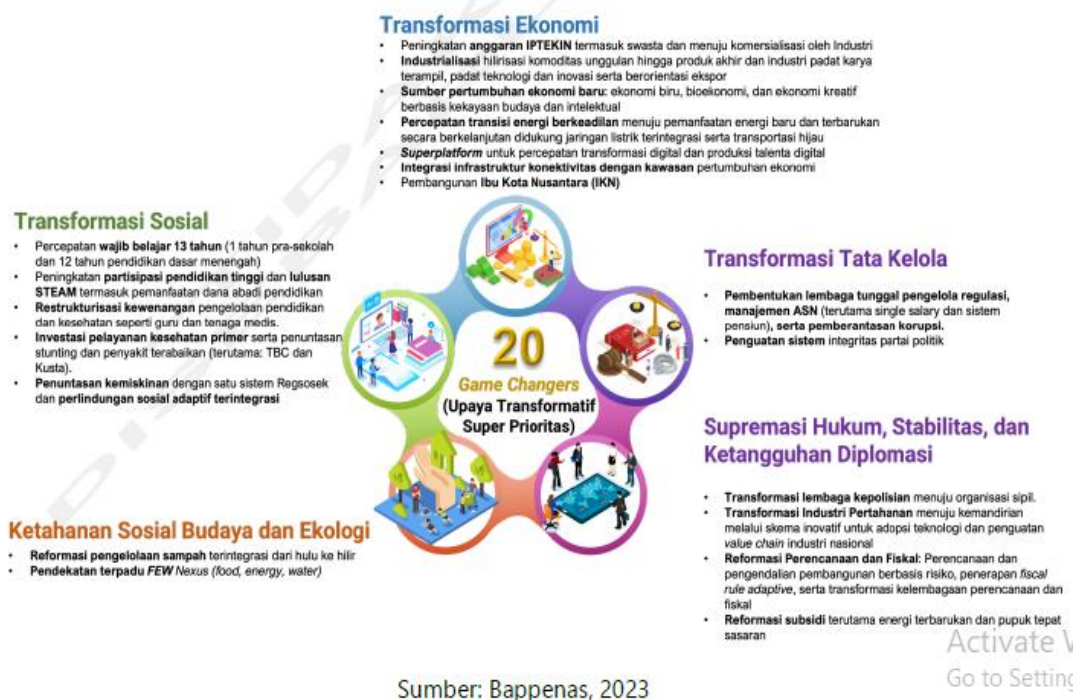
Gambar 4. 4 Tujuh Belas Arah Pembangunan Indonesia Emas 2045



4.1.3 Upaya Transformatif Super Prioritas Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 menjadi pedoman yang memuat seluruh aspek pembangunan. Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat **14 Upaya Super Prioritas** untuk **Transformasi Indonesia**, dan **6 Upaya Super Prioritas** untuk **Landasan Transformasi**, yaitu :

Gambar 4. 5 Kerangka Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers)



Terdapat 14 (empat belas) Upaya Super Prioritas untuk Transformasi Indonesia, terdiri dari : **Transformasi Sosial** : (1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar menengah); (2) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan; (3) Rekonstruksi kewenangan pengelolaan pendidikan dan kesehatan seperti guru dan tenaga medis; (4) Investasi pelayanan kesehatan primer serta penuntasan stunting dan penyakit terabaikan (terutama: TBC dan Kusta); (5) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi. **Transformasi Ekonomi** : (6) Peningkatan anggaran IPTEKIN termasuk swasta dan menuju komersialisasi oleh

Industri; (7) Industrialisasi: hilirisasi komoditas unggulan hingga produk akhir dan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor; (8) Sumber pertumbuhan ekonomi baru: ekonomi biru, bioekonomi, dan ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual; (9) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi, serta transportasi hijau; (10) *Super Platform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital; (11) Integrasi konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi; (12) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). **Transformasi Tata Kelola:** (13) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, manajemen ASN (terutama *single salary system* dan pensiun ASN), serta pemberantasan korupsi; (14) Pembenahan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).

Serta, 6 (enam) Upaya Super Prioritas untuk Landasan Transformasi, yaitu : Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi; (15) Transformasi lembaga kepolisian menuju organisasi sipil; (16) Transformasi Industri Pertahanan: menuju kemandirian melalui skema inovatif dan penguatan *value chain* industri nasional; (17) Reformasi Perencanaan dan Fiskal: Perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis resiko, penerapan *fiscal rule adaptive*, serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal; (18) Reformasi Subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran; serta **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;** (19) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; dan (20) Pendekatan terpadu FEW Nexus (*Food, Energy, Water*).

4.2 VISI PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG 2045

Kerangka Berfikir Visi

Penyusunan RPJPD Lampung Tahun 2020-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi yang dicanangkan harus memiliki kekuatan, menjadi spirit, mencerminkan sikap dan merupakan cita-cita seluruh komponen masyarakat Lampung untuk meningkatkan kualitas hidup dan eksistensi Provinsi Lampung di kancah regional, nasional hingga global dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Sejarah telah membuktikan bahwa Provinsi Lampung sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengisi kemerdekaan dengan berbagai aspek pembangunan secara menyeluruh sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan rakyat Lampung tidak menyurutkan semangat untuk terus bekerja untuk mewujudkan tujuan bernegara. Beragam dinamika selama mengisi kemerdekaan tersebut telah menjadi pelajaran berharga untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Membangun Lampung 2045 juga dikonstruksikan untuk mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” dan cita-cita luhur perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 menjadi negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Gambar 4. 6 Kerangka Berfikir Visi dan Misi Lampung 2045



Lampung sebagai bagian dari NKRI memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa: “perencanaan pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”. Sesuai amanat Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045 telah diatur bahwa RPJP Nasional Tahun 2025-2045 bersifat **imperatif, wajib menjadi pedoman, dan diikuti serta dicapai** dengan target indikator yang ditetapkan dalam penyusunan RPJP Daerah Provinsi dan RPJP Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, dengan memperhatikan **faktor internal** : Lampung memiliki modal dasar pada aspek geografis dan demografi; Daya dukung dan Daya tampung lingkungan, Capaian pembangunan sebelumnya, yang dikombinasikan dengan perhatian terhadap Isu Strategis dan Permasalahan pembangunan lingkup daerah ; serta memperhatikan **faktor eksternal** : yang berkenaan dengan Tantangan dan Isu strategis pembangunan pada lingkup global, Arah kebijakan pembangunan nasional, dan lingkup kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; maka rumusan Visi pembangunan jangka Panjang Provinsi Lampung untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :

VISI LAMPUNG 2025-2045 “SEJAHTERA, MAJU, MERATA, DAN BERKELANJUTAN ”

SEJAHTERA. Di tahun 2045, Lampung yang SEJAHTERA diarahkan pada kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan fisik dan spiritual. Masyarakat lebih sejahtera secara ekonomi ditandai dengan terpenuhinya ketersediaan bahan pangan dan sandang masyarakat serta akses terhadap perumahan aman dan layak dengan biaya terjangkau. Penduduk terkendali kuantitasnya dan meningkat kualitasnya. Derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan

dasar yang layak. Masyarakat memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Masyarakat sejahtera umumnya berkehidupan tertib, religius dan bermoral, rukun, harmonis, mengembangkan ekspresi budaya, kesenian, dan olahraga menjadi prestasi. Kehidupan masyarakat yang kondusif, ditandai dengan tindak kriminal, penyalahgunaan NAPZA, dan kejahatan perdagangan anak dalam kondisi minim. Lembaga demokrasi dan masyarakat politik mantap, kuat, dan mandiri. Kehidupan masyarakat didukung dengan tata kelola pemerintahan berlandaskan hukum dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, berlandaskan hukum secara adil dan tidak diskriminatif.

MAJU (mandiri, dan berdaya saing). Perubahan positif pada berbagai aspek pembangunan secara inklusif, mampu bersaing, unggul; baik secara individu, masyarakat, maupun kapasitas kewilayahan. Pada tahun 2045, tingkat pendapatan penduduk Lampung telah masuk dalam level “High Income” dengan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah pada kisaran 7 persen yang didorong dengan peran industri yang semakin meningkat menjadi 28 persen dan kualitas SDM yang unggul dan produktif.

Maju pada Aspek Sosial dan Budaya; Kualitas SDM yang kompetitif; Kemiskinan rendah; Pengangguran sedikit; Keluarga memiliki penghidupan yang layak dan jaminan sosial yang cukup; ketimpangan antar kelompok tidak menonjol (tidak begitu tampak). **Maju pada Aspek Ekonomi;** Tingkat kesejahteraan penduduk berada pada level pendapatan menengah atas hingga pendapatan tinggi; Pertanian modern terintegrasi dengan industri; Industri hulu-hilir yang meningkat; Lampung menjadi magnet investasi yang humanis dan ; Masyarakat menguasai teknologi, kreatif, dan inovatif; Karakter masyarakat yang produktif dan bermental wirausaha; Kesenjangan ekonomi antarwilayah yang rendah; Produktivitas penduduk (pekerja) yang semakin meningkat; Pemanfaatan sumber daya secara berkeadilan. **Maju pada Aspek Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Kehidupan Demokrasi;** Pemerintahan yang kolaboratif, transparan, modern, efektif dan efisien; Pelayanan publik yang merata dan

berkualitas; ASN berintegritas; Penegakan hukum secara adil; Kehidupan masyarakat yang demokratis (kebebasan bertanggungjawab). **Maju pada Aspek Infrastruktur dan Kewilayahan;** Ketimpangan pembangunan antar wilayah semakin berkurang; Infrastruktur dasar penduduk yang merata dan berkualitas; Infrastruktur dasar kewilayahan yang handal dan ramah lingkungan; Konektivitas antar wilayah yang handal dan terintegrasi. **Aspek Lingkungan;** Lingkungan hidup yang aman, sehat, dan nyaman; Sampah/Limbah bernilai ekonomis dan humanis.

Kemajuan daerah juga mencirikan karakter pelaku pembangunan yang berketuhanan, taat hukum, humanis, nasionalis, dan peduli lingkungan. Individu dan masyarakat yang religius dan berakhlak mulia; Keluarga yang sehat, bahagia, tidak terintimidasi; Masyarakat yang Plural menjadi modal sosial yang kuat; Masyarakat yang terbuka terhadap perubahan positif; Lingkungan yang aman, Tindak Kriminal yang minim; Nasionalisme tidak luntur, patriotic; Keragaman Budaya menjadi kekuatan dan kekayaan daerah; Pemerintah yang melindungi rakyat; Masyarakat taat hukum, paham tugas dan kewajiban sebagai warganegara.

MERATA. Pembangunan yang merata ditujukan untuk memastikan bahwa keterlibatan dalam menyusun rencana pembangunan, kesempatan dan manfaat serta hasil pembangunan didistribusikan secara adil dan merata kepada semua elemen masyarakat, tanpa memandang perbedaan latar belakang, jenis kelamin, atau faktor lainnya, yang melibatkan peningkatan akses terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan bagi semua orang.

Perekonomian daerah diarahkan pada pertumbuhan ekonomi inklusif sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Penguasaan aset produktif tanah oleh masyarakat Lampung dengan orientasi pemanfaatan yang tinggi dan mengutamakan kepentingan nasional dan masyarakat. Sumber daya yang

merupakan hajat hidup rakyat banyak harus digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Upaya pengurangan ketimpangan pendapatan antar penduduk, ketimpangan ekonomi antar wilayah dan ketimpangan infrastruktur dasar antar wilayah diarahkan pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dan pengarusutamaan kesetaraan gender serta menyentuh layanan publik bagi kelompok rentan (anak, lansia, disabilitas).

BERKELANJUTAN (menjamin ketersediaan sumber daya antarwaktu dan antargenerasi dan konsistensi dan keselarasan pusat-daerah). Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan harus digunakan dengan bijaksana, untuk diwariskan dengan baik dan tidak meninggalkan beban kepada generasi penerus di masa mendatang, dengan menjaga kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keseimbangan pembangunan sosial dan ekonomi dengan lingkungan diimplementasikan dengan kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi biru; yang diperkuat dengan sistem pengelolaan ketahanan bencana dan mitigasi perubahan iklim yang handal. Selanjutnya, keberlanjutan pembangunan juga perlu didukung mengembangkan sumber pendanaan pembangunan yang lebih mengedepankan peran antar pihak secara lebih terintegrasi, inovatif dan tepat sasaran.

Pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap membutuhkan estafet kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen terhadap kesinambungan pembangunan antarwaktu, antarperiode, antar jenjang pemerintahan dan antargenerasi.

Untuk lebih mempertegas bagaimana ukuran keberhasilan dari Visi Lampung 2045, maka visi tersebut juga tercermin pada 5 (lima) Sasaran Visi, yaitu :

- 1) **Pendapatan per Kapita** penduduk Provinsi Lampung masuk pada level *High Income*, pada kisaran Rp. 328-384 juta, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6 - 7 persen, kontribusi sektor Industri dalam PDRB sebesar 26-28 persen; dan pembangunan ekonomi biru dengan nilai indeks mencapai 65

- 2) **Pengentasan Kemiskinan** akan terus ditekan pada kisaran 0,50 - 1,00 persen; dan tingkat **Ketimpangan yang rendah** pada angka Indeks Gini di level 0,256-0,266 dan kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional mencapai 2,50 persen ;
- 3) **Daya Saing Daerah** di level nasional mencapai 4,0 ; Indeks Inovasi Daerah mencapai 66-68
- 4) **Kualitas Sumber Daya Manusia yang meningkat**, tercermin dari nilai Indeks Modal Manusia (IMM) pada level 0,69 dan IPM berkisar 79,00-80,00 ;
- 5) **Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)** sebesar 93,17 persen dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 75,22.

Tabel 4. 1 Sasaran Visi RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

Visi Tahun 2025-2045 : Lampung 2045 “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan”					
No	Sasaran Visi	Indikator	Capaian Th. 2023	Baseline Th. 2025	Target 2045
1.	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	PDRB per kapita (Rp Juta)	48,2	52,14 - 52,46	328,03 - 384,39
		Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,55	4,90-5,30	5,52-6,97
		Kontribusi PDRB Industri (%)	18,01	18,50 - 19,40	26,47-28,00
		Indeks Ekonomi Biru	N/A	23,43	65,16
	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Tingkat Kemiskinan (%)	11,11	9,50-10,00	0,50-1,00
		Rasio Gini (Indeks)	0,324	0,318-0,321	0,256 - 0,266
		Kontribusi PDRB Provinsi terhadap Nasional (%)	2,15	2,17	2,50

Visi Tahun 2025-2045 : Lampung 2045 “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan”					
No	Sasaran Visi	Indikator	Capaian Th. 2023	Baseline Th. 2025	Target 2045
	Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,02 (Th. 2022)	3,02	3,76 - 4,00
		Indeks Inovasi Daerah	58,70* (sesuai SK Mendagri No. 400.10.11-6287 Tahun 2023)	59	66-68
	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,48	73,00	79,00 – 80,00
		- IMM (Indeks)	0,52	0,54	0,69
	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (persen)	58,24	62,79	93,17
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,91	70,99	75,22

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kebijakan pembangunan Provinsi Lampung tentunya pula merupakan bagian integral dari sistem perencanaan nasional. Dengan memperhatikan hal tersebut, hasil penyelarasan sasaran pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung tahun 2025-2045 dengan sasaran pembangunan jangka panjang kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2025-2045 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

No	Visi RPJPD Kabupaten/Kota	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target 2045
1.	"Pringsewu Berdaya Saing, Maju Dan Berkelanjutan"	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	PDRB per kapita (Rp Juta)	33,28	36,26	225-264
			Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,78	4,90-5,30	6,9-7
			Kontribusi PDRB Industri (Persen)	13,95	14,00	20,00
			Indeks ekonomi biru	N/A	23,43	65,16
		Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Tingkat Kemiskinan (persen)	9,14	8,32	2,0-1,5
			Rasio Gini (Indeks)	0,306	0,300	0,260
			Persentase Desa Mandiri (persen) (Indeks Desa Bappenas)	N/A	N/A	12,698-13,492
		Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,15	3,16	3,2
			Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (persen)	3,10	3,15	5,00
		Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,11	73,15-74	80-82
			Indeks Modal Manusia	0,52	0,54	0,68 - 0,70
		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e)	N/A	34393,58	630053,53
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,34	66,91	71,96

No	Visi RPJPD Kabupaten/Kota	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target 2045
2.	"Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera, dan berkelanjutan"	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	PDRB per kapita (Rp Juta)	48,70	55,23	328,03 - 384,39
			Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,53	4,93	8,5
			Kontribusi PDRB Industri (persen)	27,21	27,89	33-35
			Indeks ekonomi biru	N/A	23,43	65,16
		Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Tingkat Kemiskinan (persen)	7.25	6,6	2,00-1,50
			Rasio Gini (Indeks)	0,274	0,271	0,25
			Persentase Desa Mandiri (persen) (Indeks Desa Bappenas)	11	20	40
		Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,42 (2022)	2,6	4,25
			Kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional (persen)	2,15	2,17	2,50
		Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,38	69,71	79,00
			Indeks Modal Manusia	0,52	0,54	0,68 - 0,70
		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e)	N/A	40657,30	214948,89
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,31	66,80	71,85

No	Visi RPJPD Kabupaten/Kota	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target 2045
3.	“Pesawaran Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Unggul”	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	PDRB per kapita (Rp Juta)	40,90	43,54 - 47,80	234,98 - 292,06
			Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,49	4,73 - 5,03	5,24 - 6,61
			Kontribusi PDRB Industri (persen)	13,34	13,90 - 14,58	21,58 - 24,00
			Indeks Ekonomi Biru	N/A	23,43	65,16
		Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Tingkat Kemiskinan (persen)	12,89	11,36	1,5-1,3
			Rasio Gini (Indeks)	0,287	0,284-0,281	0,265-0,250
			Persentase Desa Mandiri (persen) (Indeks Desa Bappenas)	7,432 (Data IDM)	7,432	23,649
		Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,52 (2022)	2,71	3,68 - 4,00
			Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (persen)	4,50	4,53	4,73 - 4,80
		Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	Indeks Modal Manusia	0,52	0,54	0,68 - 0,70
4.	Lampung Timur Sejahtera: “Lampung Timur semakin Religius, Maju,	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	PDRB per kapita (Rp Juta)	46,3	47,1	270,1
			Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	3,51	4,24	5,5

No	Visi RPJPD Kabupaten/Kota	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target 2045
	Mandiri dan Berkelanjutan		Kontribusi PDRB Industri (persen)	8,19	8,25	22,46
			Indeks Ekonomi Biru	N/A	23,43	65,16
		Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Tingkat Kemiskinan (persen)	13,8	12,97	1,50
			Rasio Gini (Indeks)	0,28	0,28	0,25
			Persentase Desa Mandiri (persen) (Indeks Desa Bappenas)	4,92	3,03	18,56
		Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,62	3,10	4,00
			Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (persen)	11,71	11,72	12
		Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,44	73,6	80,00
			Indeks Modal Manusia	0,52	0,53	0,68
		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e)	N/A	128.832,38	762.632,00
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,73	68,81	73,86
5.	"Mesuji sebagai Daerah Agribisnis yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan"	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	PDRB per kapita (Rp Juta)	54,42	56,88-57,8	345,2-386,40
			Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,06	4,90-5,30	5,96-6,97
			Kontribusi PDRB Industri (persen)	18,01	18,5-19,7	32,5-36,2

No	Visi RPJPD Kabupaten/Kota	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target 2045
			Indeks Ekonomi Biru	N/A	23,43	65,16
		Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,73	6,73-6,23	1,00-0,50
			Rasio Gini (Indeks)	0,29	0,280-0,267	0,197-0,174
			Persentase Desa Mandiri (persen) (Indeks Desa Bappenas)	8,6	0,952	14,286
		Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,06	3,19	4,5
			Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (persen)	2,87	2,87-2,89	4-6
		Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,79	68,4	79,00 - 80,00
			Indeks Modal Manusia	0,52	0,54	0,68 - 0,70
		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e)	N/A	236.649,63	901.622,59
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,13	67,56	72,61
6.	“Lampung Barat Yang Sejahtera, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	PDRB per kapita (Rp Juta)	28,86	42,45 - 51,41	225 - 250
			Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,69	4,2 - 5,2	5.22 - 6.67
			Kontribusi PDRB Industri (persen)	4.94	5.49	15.49
			Indeks Ekonomi Biru (persen)	N/A	23,43	65,16

No	Visi RPJPD Kabupaten/Kota	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target 2045
			Pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan budidaya (persen)	5	1,5	3,5
		Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Tingkat Kemiskinan (persen)	11,17	9,5 - 10,0	0,8-1,0
			Rasio Gini (Indeks)	0,274	0,264	0,154
			Persentase Desa Mandiri (persen) (Indeks Desa Bappenas)	38,93	0,76	13,74
		Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,56	2,58	2,78
			Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (persen)	2,01	2,04	2,36
		Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.72	72,00-72,75	79,00 – 80,00
			Indeks Modal Manusia	0,52	0,54	0,68 – 0,70
		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e)	N/A	106.461,11	292.959,08
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65.36	74.63	78.87
7.	"Way Kanan Maju dan Berkelanjutan"	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	PDRB per kapita (Rp Juta)	35,68	40,62	98,69-110,50
			Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,63	4,9	7
			Kontribusi PDRB Industri (persen)	20,54	22,26-23,18	29,15-29,87

No	Visi RPJPD Kabupaten/Kota	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target 2045
			Indeks Ekonomi Biru	N/A	23,43	65,16
		Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Tingkat Kemiskinan (persen)	11,02	9,92	0,8-1,00
			Rasio Gini (Indeks)	0,281	0,267	0,204-0,200
			Persentase Desa Mandiri (persen) (Indeks Desa Bappenas)	0,095	2,262	21,267
		Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	N/A	3,05-3,07	3,85-4,00
			Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (persen)	3,89	3,89	3,93
		Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,51	71,61	79,00 – 80,00
			Indeks Modal Manusia	0,52	0,54	0,68
		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e)	N/A	232.154,08	534.741,82
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,51	70,93	75,17
8.	“Lampung Tengah Maju, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berkelanjutan”	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	PDRB per kapita (Rp Juta)	59,72	64-75	330-394
			Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,7	5,00-5,40	6,0-6,5
			Kontribusi PDRB Industri (persen)	21,65	22,77	26,7-27,7
			Indeks Ekonomi Biru	N/A	23,43	65,16

No	Visi RPJPD Kabupaten/Kota	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target 2045
			Kontribusi PDB Pertanian (persen)	33,36	32,2	31,9-31,8
		Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Tingkat Kemiskinan (persen)	10,65	9,95	1,3-1,5
			Rasio Gini (Indeks)	0,285	0,257	0,200-0,180
			Persentase Desa Mandiri (persen) (Indeks Desa Bappenas)	10 (data IDM)	1,329	12,625
		Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,12	3,15-3,18	3,35-3,45
			Kontribusi PMTB terhadap PDRB (persen)	33,52	34	37-38
			Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (persen)	19,95	20	23-25
		Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,39	74	80-81
			Indeks Modal Manusia	0,52	0,54	0,68
		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e)	N/A	163.542,26	999.893,10
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,971	65,65	70,70
9.	"Lampung Utara Mandiri, Maju, Dan Berkelanjutan"	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	PDRB per kapita (Rp Juta)	42,5	52,6-54,6	297,5-325,9
			Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,22	4,9-5,3	5,9-6,4

No	Visi RPJPD Kabupaten/Kota	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target 2045
			Kontribusi PDRB Industri (persen)	13,18	13,3-14,3	25,8-26
			Indeks Ekonomi Biru	N/A	23,43	65,16
		Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Tingkat Kemiskinan (persen)	18,41	16,41-14,20	5,65-2,42
			Rasio Gini (Indeks)	0,300	0,282-0,293	0,244-0,230
			Persentase Desa Mandiri (persen) (Indeks Desa Bappenas)	N/A	0,431	9,025
		Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	N/A	0,1-1,9	2,51-3,0
			Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (persen)	6,69	6,70-7,00	7,76-8,00
		Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,78	70,9-73,0	78,91-80
			Indeks Modal Manusia	0,52	0,54	0,68 - 0,70
		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e)	N/A	86,393.74	276.736,62-415.976,10
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	41,73	68,68	73,73
10.	"Tanggamus Sejahtera, Maju daan Berkelanjutan"	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	PDRB per kapita (Rp Juta)	29,6	34,41-34,42	192,6-250
			Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,70	4,88-5,20	5,4-6,8

No	Visi RPJPD Kabupaten/Kota	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target 2045
			Kontribusi PDRB Industri (persen)	6,30	6,6	19,9
			Indeks Ekonomi Biru	N/A	23,43	65,16
		Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Tingkat Kemiskinan (persen)	18,41	9,28	0,50-1,00
			Rasio Gini (Indeks)	0,256	0,231	0,109-0,084
			Persentase Desa Mandiri (persen) (Indeks Desa Bappenas)	3,6 (IDM 2024, 11 pekon Mandiri dari 299 pekon)	4,0-8,0	30,0-33,0
		Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,90	3,02	3,76 - 4,00
			Kontribusi PDRB Lampung terhadap Nasional (persen)	2,15	2,17	2,50
		Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,93	71,47	79,00 – 80,00
			Indeks Modal Manusia	0,52	0,54	0,68 - 0,70
		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e)	N/A	331,795.42	761,810.92
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,75	69,14	74,19
11.	"Lampung Selatan Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan"	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	PDRB per kapita (Rp Juta)	50,46	55,63	374,47 – 385,70
			Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,82	5-5,5	5,5 – 6

No	Visi RPJPD Kabupaten/Kota	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target 2045
			Kontribusi PDRB Industri (persen)	23,41	23,86	29,75 – 30,00
			Indeks Ekonomi Biru	N/A	29,03	64,80 – 65,16
		Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Tingkat Kemiskinan (persen)	12,79	12,0	2,20-2,00
			Rasio Gini (Indeks)	0,257	0,261	0,266
			Persentase Desa Mandiri (persen) (Indeks Desa Bappenas)	0,78	4,69	21,69 – 21,88
		Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,16	3,26	4,32 – 4,38
			Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (persen)	12,35	12,47	15,07 – 15,22
		Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,55	71,96	78,36-80,62
			Indeks Modal Manusia	0,52	0,55	0,66-0,70
		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e)	14,92	69,79	93,17
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,55	61,40	71,48 – 71,73
12.	“Tulang Bawang Berkarakter, Maju dan Berkelanjutan”	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	PDRB per kapita (Rp Juta)	63,34	68,09-73,20	257,5-388,99
			Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,27	6,06-6,09	6,48-6,97

No	Visi RPJPD Kabupaten/Kota	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target 2045
			Kontribusi PDRB Industri (persen)	24,41	24,65-24,90	28,90-30,37
			Indeks Ekonomi Biru	N/A	23,43	65,16
		Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Tingkat Kemiskinan (persen)	8,04	7,54-7,07	0,50-1,00
			Rasio Gini (Indeks)	0,284	0,278-0,272	0,195-0,174
			Persentase Desa Mandiri (persen) (Indeks Desa Bappenas)	2,72 (data IDM)	2,72 (data IDM 2023)	6,122-13,605
		Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,02	3,05-3,08	3,58-3,76
			Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (persen)	6,24	6,26-6,28	6,57-6,67
		Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,56	71,99	75,29-76,43
			Indeks Modal Manusia	0,52	0,54	0,68 - 0,70
		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e)	N/A	104.609	479.606-700.109
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,5	65,61	70,66
13.	"Pesisir Barat Maju, Mandiri dan Berkelanjutan"	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	PDRB per kapita (Rp Juta)	32,36	33,82 - 34,20	212,95 - 258,38
			Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	3,42	3,58 -3,88	6

No	Visi RPJPD Kabupaten/Kota	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target 2045
			Kontribusi PDRB Industri (persen)	3,76	3,92	12,0 - 12,8
			Indeks Ekonomi Biru	N/A	23,43	65,16
		Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Tingkat Kemiskinan (persen)	13,49	12,18 - 12,43	5,0 - 4,6
			Rasio Gini (Indeks)	0,315	0,310 - 0,312	0,220 - 0,260
			Persentase Desa Mandiri (persen) (Indeks Desa Bappenas)	2,59 (data IDM)	N/A	9,483
		Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	N/A	2,42 - 2,52	3,20 - 3,54
			Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (persen)	1,28	1,28 - 1,30	1,88 - 1,90
		Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,40	71,2	77,2 - 78,0
			Indeks Modal Manusia	0,52	0,54	0,68 - 0,70
		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e)	N/A	105,990.58	220,592.01
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,17	76,45	81,50
14.	"Bandar Lampung Humanis, Maju dan Berkelanjutan"	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	PDRB per kapita (Rp Juta)	61,6	65-70	250,00-384,50
			Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,99	5,0-5,5	5,7 - 7,0
			Kontribusi PDRB Industri (persen)	18,71	19,00	21,40 - 23,00

No	Visi RPJPD Kabupaten/Kota	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target 2045
			Indeks Ekonomi Biru	N/A	23,43	65,16
		Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Tingkat Kemiskinan (persen)	7,77	7,30-7,20	1,5-1,0
			Rasio Gini (Indeks)	0,381	0,371-0,361	0,269-0,250
		Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,54	3,57-3,60	3,90- 4,00
			Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (persen)	16,51	16,52-16,60	17,30-17,5
		Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkatkan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,86	79,90-80,0	83,00 - 83,99
			Indeks Modal Manusia	N/A	N/A	0,69 - 0,71
		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e)	N/A	13373,63	1033689,66
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,38	63,01	68,06
15.	"Terwujudnya Kota Metro Sejahtera, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan"	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	PDRB per kapita (Rp Juta)	45,2	52,6	204,1 - 328
			Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,86	4,90-5,30	5,52 - 7,0
			Kontribusi PDRB Industri (persen)	15,0	15,73	15,54
			Indeks Ekonomi Biru	N/A	23,43	65,16*

No	Visi RPJPD Kabupaten/Kota	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target 2045
		Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Tingkat Kemiskinan (persen)	7,28	6,38	0,50-1,00
			Rasio Gini (Indeks)	0,289	0,282	0,197
		Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,96	4,05	4,94
			Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (persen)	2	2,16	2,5
		Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,85	79,95	83,51
			Indeks Modal Manusia	0,52 (2023)	0,54	0,68 -0,70
		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO ₂ e)	N/A	3,709.28	168,806.06
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,15	65,55	70,60

4.3 MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2045

Di Tahun 2045 mendatang, penduduk Lampung diproyeksikan akan berjumlah 11,076 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk Provinsi Lampung menggambarkan bahwa Lampung memiliki potensi sekaligus juga menjadi tantangan tersendiri terutama pada penciptaan lapangan kerja, produktivitas, pembangunan kualitas SDM penduduk yang lebih sehat, terdidik dan berdaya saing, penyediaan kebutuhan pangan dan energi, penyediaan lahan permukiman, kualitas lingkungan yang sehat, aman dan nyaman, penyediaan fasilitas layanan dasar bagi penduduk, serta pembagian “kue” ekonomi yang bermuara pada pendapatan per kapita dari penduduk. Letak geografis Lampung yang strategis, maka pembangunan di wilayah Lampung mempunyai potensi dan peluang yang besar

untuk pengembangan wilayah dan kehandalan konektivitas antar pulau pada di lintas darat, laut maupun udara, transfer modal dan teknologi untuk mendorong kegiatan ekonomi regional, nasional maupun internasional; sekaligus membawa tantangan dan potensi berbagai kerawanan sosial yang kompleks. Kekayaan sumber daya alam daratan dan lautan di wilayah Lampung juga berpotensi menjadikan Lampung sebagai wilayah yang mandiri pangan, air dan energi, bahkan menyokong kebutuhan penduduk di luar wilayah Lampung.

Dengan segenap kekuatan dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintahnya, Provinsi Lampung juga telah mencatat berbagai kemajuan dari tahapan pembangunan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Meski demikian, pembangunan Lampung ke depan masih menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari luar maupun dalam daerah. Sebagai bagian dari ekosistem, dinamika pembangunan Provinsi Lampung juga tidak terlepas dari dinamika yang terjadi pada tataran nasional maupun global.

Kondisi awal saat penyusunan rencana pembangunan 20 tahun ke depan, dilatarbelakangi dengan terjadinya bencana pandemic Covid-19 di tahun 2020 yang melanda secara global, dan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina di tahun 2021-2023 yang mengusung resiko krisis pangan dan energy secara global. Beberapa negara di belahan dunia bahkan mengalami krisis ekonomi dan kejatuhan kekuasaan sebagai dampak dari terjadinya *hyperinflation*.

Awal pijakan perekonomian daerah pada jangka panjang masih dibayangi dengan kondisi “perekonomian dunia yang hingga saat ini tidak berada dalam kondisi yang baik-baik saja”. Hingga pertengahan tahun 2023, belum meredanya ketegangan Rusia-Ukraina dan terjadinya konflik bersenjata di kawasan Israel-Palestina, terus meningkatkan kewaspadaan pemerintah untuk melakukan stabilisasi ekonomi secara internal, ditengah resiko bayangan perekonomian global yang melambat sebagai dampak dari persaingan ekonomi Tiongkok dan Amerika, sehingga menimbulkan risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Tantangan perekonomian daerah juga tidak ringan.

Lampung masih menghadapi tantangan pembangunan yang senantiasa menjadi perhatian kita bersama. Disisi internal, pemerintah daerah masih terus berjuang untuk menghadapi tantangan pembangunan yang berwujud kemiskinan, kualitas sumber daya manusia yang kurang bersaing, ketimpangan antar wilayah, degradasi lingkungan, kerawanan sosial, serta belum optimalnya sarana prasarana dasar wilayah; termasuk pula peningkatan kinerja pemerintahan menjadi lebih adaptif, antisipatif dan responsif dan akuntabel. Ditengah keinginan masyarakat untuk memperbaiki kehidupan ekonomi, sebagian masyarakat kita menghadapi ancaman berupa: bahaya penyalahgunaan narkoba, pembelokan informasi (*hoax*) yang mengancam persatuan dan kebhinekaan, perilaku menyimpang, terorisme dan radikalisme, tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga kenakalan remaja. Semua tantangan tersebut, perlu tetap menjadi perhatian daerah dan perlu ditangani secara serius melalui kebijakan pembangunan sosial-ekonomi yang berimbang dan berkelanjutan. Pengelolaan modal sosial akan sangat berpengaruh terhadap cita-cita pembangunan ekonomi yang diharapkan. Stabilitas trantibmas yang aman dan kondusif merupakan landasan dari proses pembangunan yang akan dijalankan.

Pembangunan Lampung ke depan perlu mengubah pendekatan dengan menggunakan paradigma baru. Langkah reformasi saja tidak cukup. Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, Lampung juga harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mendorong kemajuan. Untuk mewujudkan Visi Lampung 2045 “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan” akan dituangkan dalam **3 (tiga) pilar transformasi daerah** dan ditempuh melalui **8 (delapan) Misi Pembangunan**, yaitu : 1)Transformasi Sosial; 2)Transformasi Ekonomi; 3)Transformasi Tata Kelola; 4) Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah; 5)Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; 6)Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; 7)Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta 8)Kestinambungan Pembangunan.

TRANSFORMASI DAERAH :

4.3.1 Misi ke-1 : Transformasi Sosial : Mewujudkan SDM yang Unggul, Adaptif, dan Produktif

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu, setiap penduduk di Provinsi Lampung harus hidup lebih sehat, mendapatkan pendidikan inklusif dan adaptif serta mendapatkan perluasan nilai manfaat perlindungan sosial. Kondisi tersebut akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia adalah subyek sekaligus obyek pembangunan yang paling utama. Kualitas sumber daya manusia tidak hanya terlihat pada aspek ilmu pengetahuan dan teknologi semata, akan tetapi dibutuhkan juga peningkatan kualitas pada aspek kesehatan dan taraf hidup. Dengan adanya tingkat pendidikan yang baik, sehat secara fisik dan memiliki taraf hidup yang baik, maka akan terwujud sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan produktif sehingga mampu berkontribusi secara nyata bagi pembangunan.

Perkembangan dunia yang semakin pesat terutama era disrupsi teknologi akan mengakibatkan perubahan mendasar pada struktur, institusi dan nilai dan perilaku masyarakat, termasuk perubahan iklim dan pergolakan geopolitik. Isu perubahan iklim yang semakin menjadi perhatian banyak pihak termasuk pergolakan geopolitik yang terjadi di berbagai tempat juga akan berimbas kepada perubahan tatanan kehidupan yang ada. Transformasi sosial akan menjadi kunci penting dalam menangani perubahan-perubahan tersebut sehingga masyarakat dapat menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.

Tercapainya transformasi sosial bertumpu pada upaya pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan modal manusia dan modal sosial budaya. Untuk itu transformasi sosial diarahkan pada upaya pencapaian kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas dan merata serta

perlindungan sosial yang adaptif. Ketiga upaya pembangunan tersebut harus berjalan secara simultan karena tantangan pembangunan semakin hari semakin cepat dan menimbulkan perubahan yang signifikan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

4.3.2 Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi : Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi Lampung dengan meningkatkan produktivitas, daya saing, serta digitalisasi pasar, dan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru yang merata, inklusif dan berkelanjutan. Disamping itu, potensi dan keunggulan yang dimiliki terus dikembangkan dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru di sektor riil (dalam bentuk PMA dan PMDN) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja.

Pembangunan ekonomi Provinsi Lampung selama dua puluh tahun ke depan akan menghadapi perubahan besar sehingga menuntut adanya transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi Provinsi Lampung dari yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah, menjadi berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Transformasi ekonomi juga menjadi kunci dalam mewujudkan Provinsi Lampung keluar dari daerah berpendapatan rendah (*lower-middle income*) menjadi daerah berpendapatan tinggi (*high income*) dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun 6 – 7 persen. Perekonomian juga akan lebih diarahkan untuk berorientasi perdagangan dengan nilai tambah tinggi. Pelaksanaan transformasi ekonomi akan membuat masyarakat beradaptasi dengan perubahan dengan cara mengubah model ekonomi yang ada menjadi lebih efisien dan produktif, sehingga memperkuat sektor-sektor ekonomi yang potensial untuk tumbuh dan berkembang. Namun, transformasi ekonomi

tidak bisa terjadi dengan cepat dan mudah, sehingga diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta, masyarakat, dan lembaga pendukung lainnya untuk menjamin pertumbuhan yang tinggi dan inklusif. Di sisi pemerintah, perlu adanya komitmen dan kebijakan yang tepat untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berlandaskan berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan ekonomi, secara singkat kerangka pikir untuk merumuskan transformasi ekonomi Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Untuk mencapai pertumbuhan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan, transformasi ekonomi difokuskan pada peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif prioritas. Perekonomian akan beralih dari berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif, dari kegiatan ekonomi ekstraksi menuju kepada kegiatan ekonomi bernilai tambah (*value creation*), serta mengubah ekonomi berbasis buruh murah dan keterampilan rendah (*perspiration*) menjadi mengandalkan pengetahuan, inovasi, dan keterampilan tinggi (*aspiration*). Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan penguatan industrialisasi, modernisasi, dan digitalisasi pertanian dan jasa, peningkatan produktivitas UMKM dan Koperasi, serta tenaga kerja agar lebih kompetitif dan mampu berkontribusi secara optimal dalam perekonomian Lampung dan Nasional. Selain itu, ekonomi biru dan bioekonomi akan menjadi penguat perekonomian masa depan, seiring dengan peranannya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan penciptaan nilai tambah ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi sangat penting dalam menciptakan teknologi dan metode baru yang efisien, terutama bagi penciptaan produk-produk baru dan peningkatan produktivitas perekonomian.

Untuk memastikan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang tinggi lintas generasi, diterapkan konsep ekonomi hijau. Penerapan ekonomi hijau akan menjamin ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Lampung dalam jangka panjang. Proses dekarbonisasi juga berfungsi ganda sebagai penjaga kelestarian lingkungan sekaligus sebagai sumber pertumbuhan investasi serta kesempatan kerja hijau yang layak.

Sementara itu, transformasi digital harus dipercepat di seluruh wilayah Provinsi Lampung secara merata yang disertai dengan penguatan talenta digital. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan akses terhadap layanan digital berkualitas, memperluas pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengatasi dampak negatif disrupsi teknologi digital seperti kesenjangan digital (*digital divide*) dan peningkatan pengangguran akibat hilangnya sejumlah pekerjaan

Pembangunan ekonomi Provinsi Lampung harus terintegrasi secara domestik dan terhubung secara nasional. Hal tersebut dicapai melalui penyebaran pembangunan ekonomi dengan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai wilayah yang didukung oleh peningkatan kualitas SDM serta pengembangan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi. Selain itu, dukungan infrastruktur konektivitas yang baik akan mewujudkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan kerjasama antar daerah, memperkuat akses ke pasar regional dan global, serta mengurangi biaya logistik.

Terakhir, pembangunan kawasan metropolitan Bandar Lampung harus menjadi sumber pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan kehidupan yang layak dan maju. Kawasan metropolitan Bandar Lampung diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan kabupaten atau daerah lainnya di wilayah Provinsi Lampung.

4.3.3 Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola : Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas dan Merata

Misi ini bertujuan mewujudkan kelembagaan pemerintah yang menerapkan tata kelola pemerintahan (*good governance*) efektif dan akuntabel serta pemantapan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan merata.

Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Sektor publik erat kaitannya dengan masyarakat secara luas, termasuk juga pelaku usaha, masyarakat adat dan berbagai kelompok yang ada.

Dalam konteks pemerintahan, tata kelola menjadi hal yang mutlak dilaksanakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan sektor publik. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel. Untuk itu diperlukan keberadaan SDM aparatur yang berkualitas dan berintegritas dalam melaksanakan pengelolaan sektor publik.

Tata kelola pemerintahan merupakan konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Proses yang terjadi mengacu kepada pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Transformasi tata kelola diarahkan kepada tata kelola regulasi dan kelembagaan, SDM aparatur serta pelayanan publik. Dalam upaya melaksanakan transformasi tata kelola regulasi dan kelembagaan, perlu dilakukan penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah serta peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan. Selain itu, perlu penguatan peran pemerintah daerah dan integritas partai politik dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.

LANDASAN TRANSFORMASI DAERAH :

4.3.4 Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Misi ini bertujuan untuk mengokohkan landasan transformasi pembangunan daerah melalui peningkatan keamanan, ketertiban umum dan penegakan kehidupan yang demokratis yang akan mendukung stabilitas ekonomi makro daerah. Dengan landasan yang kokoh tersebut, diharapkan dapat terwujud Provinsi Lampung yang aman, demokratis dan stabil.

Transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola merupakan inti dari transformasi pembangunan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Agar pelaksanaan tiga transformasi tersebut berjalan dengan baik, diperlukan landasan yang kokoh berupa stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi stabilitas harus dilihat dari berbagai aspek utamanya stabilitas keamanan, ketertiban, kehidupan demokratis dan kesejahteraan. Berbagai aspek tersebut akan menjadikan transformasi pembangunan akan berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

4.3.5 Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Misi ini bertujuan untuk menyiapkan landasan transformasi pembangunan daerah melalui perwujudan ketangguhan dan keseimbangan antara kehidupan sosial-budaya dengan terpeliharanya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan lintas generasi. Ciri budaya bangsa yang tangguh terlihat dari nilai-nilai religius, kearifan lokal dan nilai budaya, serta kehidupan masyarakat yang beradab mulia, sehingga mampu

menetralisasi infiltrasi budaya negatif. Dimulai dari pembangunan karakter bangsa dari unit terkecil melalui pembangunan kualitas keluarga pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan perlindungan sosial berdasarkan literasi keagamaan yang inklusif serta berorientasi kemaslahatan. Karakter masyarakat yang terbentuk juga mendukung optimalisasi pengendalian kerusakan lingkungan hidup serta dapat menyeimbangkan antara kebutuhan dan pasokan pangan, energi, dan air.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi menjadi landasan sangat penting untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Ciri masyarakat tangguh adalah mampu menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai perubahan dan guncangan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan dan setiap individu dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan dengan mengurangi akibat eksploitasi karena daya pulih alam tidak secepat kerusakan yang diakibatkan.

Penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan, melalui: (i) penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat; (ii) pengembangan dana sosial keagamaan dan filantropi, pemberdayaan umat beragama, dan peningkatan produktivitas; (iii) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter, mempertegas jati diri bangsa, yang beradab, dengan arah kebijakan (i) pembinaan ideologi Pancasila, penguatan identitas bangsa dan karakter untuk mempersatukan dan mendorong transformasi; (ii) perlindungan dan pengembangan keragaman nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan; (iii) pengembangan dan penguatan diplomasi kebudayaan, serta pengembangan bahasa Indonesia dan sastra; (iv) peningkatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi; (v) jaminan pemenuhan hak berkebudayaan dan kebebasan ekspresi, serta pemberdayaan masyarakat hukum adat; (vi) pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal dan

warisan budaya untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan rakyat.

KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI DAERAH :

4.3.6 Misi ke-6 : Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Misi ini bertujuan menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah, mengurangi ketimpangan Ekonom dengan meningkatkan Akses terhadap layanan dasar wilayah dengan memperkuat infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat sehingga menciptakan peluang kerja dan sumber penghidupan yang lebih merata di seluruh wilayah dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di berbagai wilayah berjalan seimbang dengan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

4.3.7 Misi ke-7 : Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi ini bertujuan pada pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan ketahanan ekologi dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana. Dengan populasi global yang terus meningkat dan dampak perubahan iklim yang semakin terasa, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana dan berkelanjutan menjadi semakin penting. Misi ini menekankan pada pengelolaan sumber daya alam, konservasi energi, pengelolaan limbah, perlindungan lingkungan, dan perlindungan biodiversitas serta pengelolaan sumber daya air. Misi ini melibatkan implementasi kebijakan yang berkelanjutan serta mengupayakan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Menjamin bahwa proyek infrastruktur dan lingkungan tidak hanya berkelanjutan dari perspektif lingkungan, tetapi juga secara ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang baik melalui teknologi yang inovatif dan ramah lingkungan

untuk meningkatkan infrastruktur dan memastikan pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan dari sumber daya alam.

4.3.8 Misi ke-8 : Kestinambungan Pembangunan

Misi ini bertujuan untuk menjamin konsistensi, keselarasan dan kestinambungan perencanaan pembangunan secara antarwaktu, antar periode dan antar jenjang pemerintahan; dan terbentuknya ekosistem pendanaan pembangunan daerah yang mencirikan kemandirian.

4.4 UPAYA SUPER PRIORITAS (*GAME CHANGER*) PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2045

Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat upaya transformatif super prioritas (*Game Changer*) Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 yang diselaraskan dengan RPJPN, antara lain:

Tabel 4. 3 Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changer*)

No.	TRANSFORMASI DAERAH	UPAYA SUPER PRIORITAS (<i>GAME CHANGER</i>) DAERAH	
A.	Transformasi Ekonomi	1.	Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA Komoditas unggulan, industri padat karya terampil didorong oleh riset dan inovasi, serta berorientasi ekspor
		2.	Percepatan transformasi digital dan talenta digital
		3.	Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (<i>food, energy, water</i>)
B.	Transformasi Sosial	4.	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)
		5.	Pemenuhan pelayanan kesehatan primer berstandar, penuntasan <i>stunting</i> , pengendalian penyakit menular , tidak menular dan <i>new emerging disease</i>
		6.	Penanggulangan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi

No.	TRANSFORMASI DAERAH	UPAYA SUPER PRIORITAS (GAME CHANGER) DAERAH	
C.	Transformasi Tata Kelola	7.	Digitalisasi Pelayanan Publik berbasis satu data
		8.	Penerapan sistem merit pada birokrasi pemerintahan
D.	Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Berkelanjutan	9.	Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau
		10.	Integrasi infrastruktur konektivitas dengan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi dalam wilayah dan antar pulau
		11.	Percepatan aktivitas ekonomi pada Kawasan industri
		12.	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir



RANCANGAN AKHIR RPJPD
TAHUN 2025-2045

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Dalam rangka perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah sampai dengan tahun 2045, diperlukan pentahapan dan prioritas yang akan dijadikan agenda dalam perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan, yang didasarkan pada urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan pada setiap tahapan, oleh karenanya tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dirancang secara berkelanjutan dari tahap awal sampai dengan tahap akhir periode RPJPD.

Sejalan dengan hal tersebut, tahapan pembangunan lima tahun dalam RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 juga diselaraskan dengan tahap pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam RPJPN Tahun 2025-2045.

Gambar 5. 1 Tahapan Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD



Selanjutnya, pelaksanaan 4 (empat) tahapan pembangunan lima tahunan dalam RPJPD juga akan dijabarkan pada masing-masing Misi dari RPJPD, dengan skenario yang dirancang sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Sasaran Visi RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

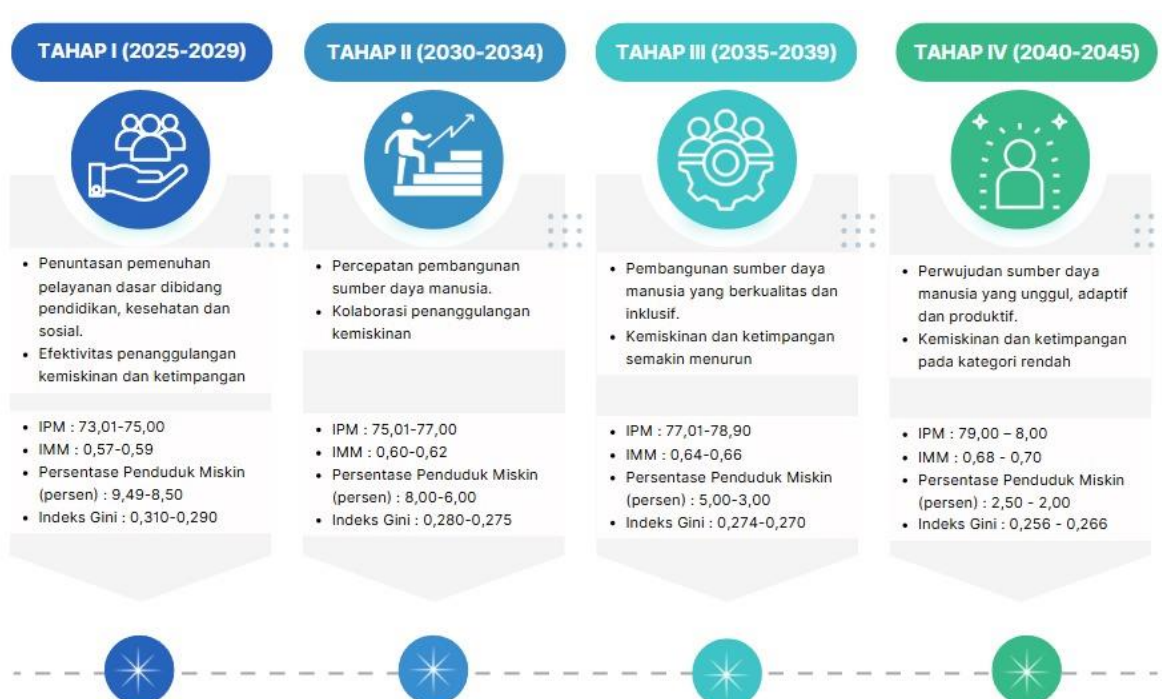
Visi Tahun 2025-2045 : Lampung 2045 “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan”								
No.	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target			
					Th. 2025-2029	Th. 2030-2034	Th. 2035-2039	Th.2040-2045
1.	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah)	48,2	52,14 - 52,46	76,82-95,94	158,77-176,23	267,5-296,9	328,03 - 384,39
		Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,55	4,90-5,30	5,31-6,00	5,90-7,00	6,22-8,00	5,52-6,97
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (persen)	18,01	18,50 - 19,40	20,54-21,1	22,36-23,4	24,18-25,70	26,47-28,00
		Indeks ekonomi biru (Indeks)	N/A	23,43	33,86	44,26	54,69	65,16*
2.	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Tingkat Kemiskinan (persen)	11,11	9,50-10,00	7,50 -8,50	4,00-5,00	1,50-2,00	0,50-1,00
		Indeks Gini (Indeks)	0,324	0,318-0,321	0,290-0,310	0,275-0,280	270-0,274	0,256-0,266
		Kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional (persen)	2,15	2,17	2,25	2,33	2,42	2,50
3.	Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,02 (2022)	3,02	3,1-3,25	3,26-3,30	3,30-3,75	3,76 - 4,00
		Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	58,70* (sesuai SK Mendagri No. 400.10.11-6287 Tahun 2023)	59	59-61	61-62	63-65	66-68
4.	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkatkan	Kualitas Sumber Daya Manusia						
		- IPM (Indeks)	72,48	73,00	73,01-75,00	75,01-77,00	77,01-78,90	79,00 - 80,00
		- IMM (Indeks)	0,52 (2023)	0,54	0,57-0,59	0,60-0,62	0,64-0,66	0,67-0,69
5.	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (persen)	58,24	62,79	69,79	77,79	85,57	93,17
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,91	70,99	71,84	72,90	73,95	75,22

5.1 ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAN LANDASAN TRANSFORMASI :

5.1.1 Misi ke- 1 : Transformasi Sosial Mewujudkan SDM yang Unggul, Adaptif dan Produktif

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu, setiap penduduk di Provinsi Lampung harus hidup lebih sehat, mendapatkan pendidikan inklusif dan adaptif serta mendapatkan perluasan nilai manfaat perlindungan sosial. Sumber daya manusia unggul, adaptif dan produktif diperlukan dalam menghadapi tantangan pembangunan kedepan.

Gambar 5. 2 Tahapan Transformasi Sosial



Kebijakan transformasi kesehatan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat sehat dan produktif melalui transformasi pada pelayanan kesehatan primer, rujukan, sistem ketahanan, sistem pembiayaan, tenaga kesehatan dan teknologi kesehatan. Upaya kesehatan dilakukan dengan mengacu kepada siklus hidup manusia (*life cycle*) dengan perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. Penanggulangan kasus gizi buruk dan *stunting* serta upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi harus terus dilakukan melalui peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada

tingkat individu, keluarga dan masyarakat. Disisi lain, upaya pemberantasan penyakit menular juga terus diperkuat dengan tetap mewaspadaai pergeseran pola penyakit kearah penyakit degeneratif akibat gaya hidup serta mitigasi terjadinya penyakit infeksi *emerging* seperti SARS, Coronavirus dan lain-lain.

Data menunjukkan bahwa angka harapan hidup penduduk Lampung semakin panjang dan proporsi penduduk > 60 tahun sudah melebihi 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung sudah memasuki fase struktur umur penduduk menua (*ageing population*). Kondisi ini memiliki implikasi terhadap kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih adaptif bagi kelompok lansia. Selain itu, riset kesehatan perlu dibangun dan diperkuat sebagai pondasi yang kokoh dalam penyusunan kebijakan di bidang kesehatan. Sehingga diperlukan kolaborasi terutama dengan akademisi dan praktisi kesehatan untuk membangun ekosistem riset kesehatan. Bentuk transformasi lainnya adalah perlunya dikembangkan wisata kesehatan (*health tourism*) yaitu pengembangan layanan kesehatan yang dipadukan dengan destinasi wisata pilihan yang ada di Provinsi Lampung. Wisata kesehatan tidak hanya berdampak secara kesehatan, namun juga memiliki nilai tambah secara perekonomian di Provinsi Lampung.

Selanjutnya, transformasi pendidikan diarahkan pada pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya pendidikan seperti guru dan tenaga kependidikan, peserta didik, kurikulum, sarana dan prasarana, bantuan pembiayaan dan lingkungan yang inklusif. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah). Pendidikan harus adaptif menjaga relevansinya dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang waktu-sepanjang hayat (*lifelong learning*). Pengalaman Pandemi Covid-19 telah mengubah metode pembelajaran melalui pelaksanaan *blended learning*, yakni menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran *online*. Hal tersebut telah memberikan kesempatan untuk peserta didik bisa belajar secara mandiri dan *realtime*. Di sisi yang lain, pendidik dan tenaga kependidikan harus mampu

menciptakan lingkungan belajar yang efektif, kreatif, inspiratif dan berdaya saing dengan tidak meninggalkan pembangunan karakter (*character building*).

Untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks diperlukan juga pengembangan sistem pendidikan modern berbasis *soft skill* dan *entrepreneur*. Aktivitas pembelajaran tidak hanya diarahkan pada *transfer of knowledge* semata, akan tetapi juga peningkatan aspek *soft skill* dan *entrepreneur* yang akan membuat peserta didik memiliki bekal keilmuan, keterampilan, kemampuan berpikir kritis, riset, manajemen risiko, analisis, dan kemampuan pengambilan keputusan. Semua itu jika dipadukan dengan aspek kewirausahaan (*entrepreneur*) akan mampu menghasilkan generasi masa depan dengan tingkat produktivitas tinggi. Selain itu, perlu juga dikembangkan sekolah bertaraf internasional dengan penerapan ekosistem pendidikan terintegrasi yang melibatkan perguruan tinggi dan dunia usaha. Keberadaan sekolah bertaraf internasional akan berdampak kepada peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung.

Disisi lain, masyarakat perlu dilindungi dengan sistem perlindungan sosial yang diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial. Sistem jaminan sosial nasional yang telah ada harus terus diperkuat dan diperluas nilai kemanfaatannya. Sistem perlindungan sosial harus bersifat adaptif sehingga mampu menjawab tantangan perubahan yang semakin dinamis. Sistem perlindungan sosial terus ditingkatkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, layanan sosial, serta perlindungan dan pemberdayaan bagi semua individu di sepanjang siklus kehidupan.

Selanjutnya, dengan memperhatikan struktur demografi Provinsi Lampung yang menuju kepada populasi menua (*aging population*), perlu dilakukan penataan sistem pensiun, perbaikan layanan kesehatan dan fasilitas publik ketika penduduk memasuki usia lansia. Jika tidak ada sistem jaminan sosial yang disiapkan maka akan banyak kemiskinan terjadi di usia tua dan akhirnya

pemerintah harus terbebani dengan mengeluarkan anggaran belanja yang lebih besar.

Tabel 5. 2 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-1

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI : TRANSFORMASI SOSIAL	Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Efektivitas penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan	Percepatan pembangunan sumber daya manusia. Kolaborasi penanggulangan kemiskinan	Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif. Kemiskinan dan ketimpangan semakin menurun	Perwujudan sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan produktif. Kemiskinan dan ketimpangan pada kategori rendah
IE1. Kesehatan untuk Semua	• Pemerataan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan universal • Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan • Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya • Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan •	• Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan • Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung) • Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan	• Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan • Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung)	• Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting • Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	• Upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan, dan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga • Penguatan akses layanan dan sarana Kesehatan Jiwa dan Rehabilitasi Korban NAPZA yang Berkualitas	• Upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui Perluasan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan • Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga • Peningkatan akses layanan dan sarana Kesehatan Jiwa dan Rehabilitasi Korban NAPZA yang Berkualitas	• Upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui Pemantapan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan • Penguatan Jejaring bagi Pencegahan dan Intervensi Dini bagi Resiko Gangguan Jiwa	• Perwujudan budaya hidup sehat dengan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan • Perwujudan layanan dan sarana Kesehatan Jiwa dan Rehabilitasi Korban NAPZA yang Berkualitas
IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	• Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. • Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)	• Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) • Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	• Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik • Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung)	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	• Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). • Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/ insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung) • Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung)	• Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah • Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan • Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan • Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan • Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung) • Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>)	• Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah dan bertaraf global yang dikolaborasikan bersama pemerintah daerah	
IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	• Percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan terutama	• Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi	• Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif,	• Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung) • Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan	(unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung) • Pengembangan/peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung) melalui bertambahnya demand • Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan	terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling	seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung) • Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung).		
	• Percepatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung) • Penyediaan bantuan sosial tempat tinggal	• Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung) • Peningkatan penyediaan	• Pemantapan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung) • Perluasan bantuan sosial	• Akses infrastruktur pelayanan dasar yang handal (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung)

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	yang layak, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung) • Percepatan Upaya pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi • Percepatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah • Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan	bantuan sosial penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung) • Peningkatan Upaya pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi • Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah • Percepatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal	penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung) • Pemantapan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi • Perluasan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah • Perluasan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal	• Perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung) dengan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, • Ketersediaan layanan Air Minum dan Sanitasi yang handal dan Memadai • Perwujudan dalam peningkatan kualitas hidup melalui akses yg memadai dan terjangkau pada rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah • Perwujudan dalam peningkatan kualitas hidup dan keberlanjutan

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.	perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.	perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.	dengan pemenuhan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.

Tabel 5. 3 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-1

Misi ke-1 : Transformasi Sosial						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE.1	Kesehatan untuk semua					
1)	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,32	75,20-75,80	77,20-77,80	79,20-79,80	80,00-82,00
2)	Kesehatan Ibu dan Anak:					
a.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	138	100-105	70-75	40-45	10-15
b.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,20	9,00-10,50	7,50-8,90	5,00-6,00	3,00 - 4,00
3)	a. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (<i>case detection rate</i>) (%)	71,00	72,00-80,00	81,00-86,00	87,00-92,00	93,00 - 95,00
	b. Angka keberhasilan pengobatan	96,91*	97,18	97,45	97,72	98,00*

Misi ke-1 : Transformasi Sosial						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
	Tuberkulosis (treatment success rate) (%)					
4)	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	97,10	97,70	98,35	98,95	99,5
IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata						
5)	Hasil pembelajaran					
a.	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :					
	(i) Literasi Membaca	6,67 - 13,33*	30,00-40,00	41,00-50,00	51,00-60,00	66,67 - 73,33*
	(ii) Numerasi	0,00 - 6,67*	20,00-30,00	31,00-40,00	41,00-50,00	60,00 - 66,67*
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :					
	(i) Literasi Membaca	30,75 - 32,75*	35,00-45,00	46,00-56,00	56,00-65,00	68,61 - 70,61
	(ii) Numerasi	20,35 - 22,35*	30,00-45,00	46,00-50,00	51,00-55,00	58,49 - 60,49
b.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,97 - 8,98	8,51-9,00	9,01-10,00	10,01-11,00	11,38 - 11,44
c.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,00	13,01-13,40	13,41-13,99	14,00-14,30	14,39 - 14,43
6)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	7,43	7,63	7,83	8,00	8,36
7)	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	72,42	75,00	77,00	79,00	80,00
IE.3 Perlindungan Sosial yang Adaptif						
8)	Tingkat Kemiskinan (%)	9,50 - 10,00	7,50-8,50	4,00-5,00	1,50-2,00	0,50-1,00
9)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	26,69	30,00-40,00	41,00-55,00	56,00-70,00	76,00-80,00

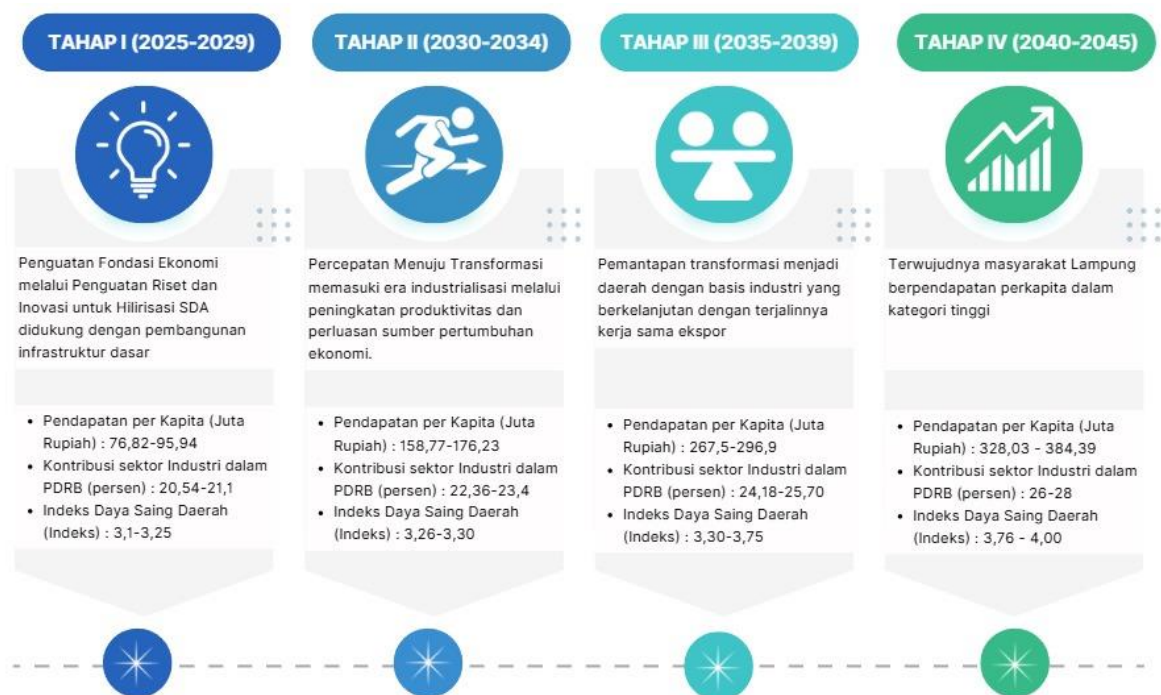
Misi ke-1 : Transformasi Sosial						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
	Provinsi (%)					
10)	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	22,00	30,00-35,00	36,00-46,00	47,00-52,00	53,00-55,00

Ket : * 2023 ** 2022

5.1.2 Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung di tahun 2045 diperlukan upaya pembangunan ekonomi yang terstruktur dan sistematis melalui transformasi ekonomi untuk mengantisipasi perubahan-perubahan besar di masa depan yaitu; Pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, kondisi lingkungan hidup, dan kemajuan teknologi.

Gambar 5. 3 Tahapan Transformasi Ekonomi



Transformasi ekonomi adalah misi utama untuk mewujudkan mayoritas masyarakat Provinsi Lampung berpindah dari *lower income* menuju *high*

income. Dengan mengoptimalkan pembangunan potensi ekonomi daerah melalui industrialisasi yang didukung riset, inovasi, dan penerapan transformasi hijau dan biru, serta dengan implementasi kebijakan pemerintah yang ramah investasi dan meningkatkan kapasitas pelayanan publik melalui pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan pembiayaan masyarakat, maka harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, secara bertahap akan terpenuhi.

Peningkatan produktivitas komoditas pertanian Provinsi Lampung sebagai fondasi untuk peningkatan nilai tambah dari industrialisasi serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Selain untuk pemenuhan ketahanan pangan di masa depan, sektor pertanian adalah rantai dasar dari proses hilirisasi baik melalui industrialisasi dan jasa produk pemasaran. Peningkatan produktivitas dimaksud dibarengi dengan peningkatan daya saing produk yang wajib memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, untuk itu arah kebijakan jangka panjang untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian diarahkan melalui: (i) modernisasi dan digitalisasi pertanian, kehutanan, dan perikanan, terutama modernisasi perbenihan/perbibitan varietas baru bernilai tambah tinggi dan adaptif, sistem perbenihan berbasis masyarakat, dan pengelolaan kemurnian benih/bibit; (ii) peremajaan perkebunan rakyat secara intensif, progresif, dan berkelanjutan; (iii) pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*food cluster*) sebagai salah satu sumber ekonomi baru dari kawasan/wilayah; (iv) adopsi pertanian presisi, digitasi pertanian, dan teknologi pertanian regeneratif; (v) penerapan standar dan ketelusuran terhadap proses dan produk pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan; serta (vi) efisiensi dan integrasi antara infrastruktur *on-farm* dengan distribusi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Peningkatan kesejahteraan petani/nelayan dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Kebijakan jangka panjang peningkatan

kesejahteraan petani/nelayan diarahkan melalui: (i) perluasan kelembagaan ekonomi petani/nelayan yang berbadan hukum dan sinergis dengan lembaga pembiayaan dan badan usaha lainnya; (ii) regenerasi petani/nelayan dan penguatan vokasi pertanian; serta (iii) perluasan akses dan literasi keuangan inklusif dan produktif bagi petani/nelayan.

Pembangunan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru sebagai penopang keberlanjutan aktivitas perekonomian daerah dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Beberapa arah kebijakan antara lain, (i) penguatan ekosistem pendukung termasuk sinkronisasi kebijakan hulu dan hilir, tata kelola dan kelembagaan, regulasi pengelolaan sumber daya kelautan, serta pembiayaan biru (*blue financing*) yang berkelanjutan sebagai instrumen pendanaan inovatif; (ii) peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor existing/tradisional (perikanan, industri, perdagangan, pariwisata), dan mendorong pengembangan pada sektor-sektor baru (energi terbarukan, bioteknologi dan bioekonomi, penelitian dan pendidikan, manajemen lingkungan dan SDA); (iii) penguatan riset, inovasi, dan SDM terampil untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi biru; (iv) peningkatan kesehatan, ketahanan, dan produktivitas sumber daya kemaritiman, termasuk dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; (v) peningkatan dan pemerataan penghidupan dan kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi biru; dan (vi) optimalisasi pemanfaatan ALKI I sebagai jalur logistik, transportasi, dan perdagangan global.

Percepatan implementasi ekonomi sirkular bertujuan untuk mengurangi penggunaan materi input produksi (*resource efficiency*) yang berasal dari sumber daya alam sekaligus mewujudkan *zero waste zero emission* melalui penerapan 9R (*Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle, Recover*). Pengembangan ekosistem ekonomi sirkular akan difokuskan pada 5 (lima) industri prioritas: (i) makanan dan minuman; (ii) elektronik, (iii) tekstil, (iv) konstruksi dan bahan bangunan, dan (v) *packaging* termasuk plastik. Prinsip menuju *zero waste zero emission*

diterapkan dengan pelaksanaan metode pilah-kumpul-olah-manfaatkan pada sistem pengelolaan sampah/limbah domestik dan industri, disertai dengan upaya revitalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah domestik menuju Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST), dan penyediaan fasilitas pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pengelolaan hutan produksi dan pertanian secara berkelanjutan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung hilirisasi produk-produk hutan dan pertanian (pangan, ternak, dan perkebunan). Pendekatan *agroforestri* melibatkan masyarakat lokal menjadi prioritas sehingga terjadi pengelolaan bentang alam (*landscape*) secara terpadu dan terintegrasi antara kawasan hutan dan lahan pertanian. Melalui arah kebijakan ini, perbaikan unsur hara tanah dapat ditingkatkan, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dapat dikurangi, nilai tambah ekonomi dapat ditingkatkan.

Pembangunan Destinasi Pariwisata Unggulan yang mendunia serta berkelanjutan dan bernilai tambah yang tinggi. Capaian ini didukung dengan pelaksanaan kebijakan: (i) konektivitas moda transportasi yang terintegrasi; (ii) peningkatan inovasi dan skala pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan prestasi olahraga dalam diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata yang disesuaikan dengan preferensi wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara; (iii) penguatan integrasi dan daya saing *trade, tourism and investment*; (iv) peningkatan SDM dan UMKM pariwisata berdaya saing global; (v) penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan dukungan penerapan *blue, green, and circular economy*, digitalisasi, dan kemajuan teknologi; (vi) mendorong kontribusi industri pariwisata melalui *platform MICE (Meeting, Incentive, Conventions, Exhibition)* yang berskala nasional dan internasional.

Ekonomi Kreatif, UMKM dan koperasi Indonesia akan menjadi penopang ekonomi produktivitas tinggi, berdaya saing global, inklusif, dan berkelanjutan serta sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan mengangkat nilai-nilai unggul budaya, seni dan kearifan masyarakat.

Kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif, UMKM dan koperasi diarahkan melalui: (i) perluasan jaringan pasar domestik dan global serta penguatan kontribusi pada rantai nilai industri domestik dan global termasuk melalui kemitraan dan pengawasannya; (ii) akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi antara lain melalui peningkatan literasi digital serta dukungan terhadap akses internet dan teknologi yang memadai dan terjangkau; (iii) peningkatan kapasitas tenaga kerja dan penciptaan wirausaha berorientasi pertumbuhan yang inklusif; (iv) penguatan resiliensi dan kemampuan adaptasi usaha; (v) perluasan akses dan pengembangan inovasi dalam pembiayaan usaha, seperti penggunaan teknologi digital, pengembangan produk pembiayaan inovatif, serta alternatif penilaian dan penjaminan kredit; (vi) formalisasi usaha untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja layak melalui pemberian insentif dan perluasan akses pasar, antara lain bagi usaha informal diberikan kemudahan untuk melakukan perizinan, sertifikasi, dan akses jaminan sosial bagi pekerjanya disertai dengan dukungan akses ke layanan keuangan dan pengembangan bisnis;

Penguatan ekonomi melalui akses keuangan inklusif dan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dengan pemanfaatan potensi filantropi di daerah maupun nasional, diarahkan pengembangan ekonomi dapat ditunjang dengan pengelolaan dana *charity* yang bersifat *compulsory* pelaksanaannya, dengan demikian dapat diarahkan sebagaimana Zakat masyarakat yang dikelola oleh pemerintah. Zakat dapat memperluas aksesibilitas masyarakat yang tidak memiliki syarat penerima layanan keuangan konvensional dan secara potensi jumlahnya signifikan di Provinsi Lampung dan dapat terus berkembang.

Tabel 5. 4 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-2

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI : TRANSFORMASI EKONOMI	Penguatan Fondasi Ekonomi melalui Penguatan Riset dan Inovasi untuk Hilirisasi SDA didukung dengan pembangunan infrastruktur dasar.	Percepatan Menuju Transformasi memasuki era industrialisasi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi.	Pemantapan transformasi menjadi daerah dengan basis industri yang berkelanjutan dengan terjalannya kerja sama ekspor	Terwujudnya masyarakat Lampung berpendapatan perkapita dalam kategori tinggi
IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	● Penguatan produk unggulan pertanian, kelautan, dan Jasa Pariwisata ● Penguatan aspek keselamatan bagi wisatawan dan area sekitar kawasan wisata ● Penguatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Lampung ● Penguatan penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian	● Peningkatan produktivitas produk unggulan dengan peningkatan kualitas serta nilai tambah produk pertanian, kelautan, dan jasa pariwisata yang berstandar ● Peningkatan kualitas aspek keselamatan bagi wisatawan dan area sekitar kawasan wisata ● Peningkatan produksi pertanian yang berdaya saing dan penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pembangunan kawasan strategis pertanian di wilayah Lampung ● Peningkatan Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi dengan	● Percepatan produktivitas unggulan secara masif dengan peningkatan kualitas serta nilai tambah produk pertanian, kelautan, dan jasa pariwisata yang berstandar ● Terbentuknya ekosistem keselamatan yang berkualitas bagi wisatawan ● Percepatan kualitas produksi dan daya saing produk pertanian dan penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity serta pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Lampung secara massif ● Percepatan Penyediaan bibit dan varietas unggul yang merata dan masif untuk komoditas	● Perwujudan produk unggulan daerah yang berdaya saing nasional dan global ● Perwujudan Ekosistem keselamatan wisatawan yang berstandar ● Perwujudan Ketahanan pangan dan kualitas produk pertanian yang tinggi dari bibit dan varietas unggul secara merata, dan bernilai tinggi dengan menciptakan permintaan pasar global. ● Perwujudan Penyediaan bibit dan varietas unggul yang merata dan masif untuk komoditas

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. • Penguatan Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. • Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. • Penguatan Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. • Penguatan Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian • Penguatan Pengembangan ekonomi biru	potensi masuk pasar ekspor/global. • Peningkatan Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. • Peningkatan kualitas akses pembiayaan kredit usaha pertanian. • Peningkatan Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. • Peningkatan Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian • Peningkatan implementasi ekonomi biru	pertanian unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi masuk pasar ekspor/global. • Percepatan Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. • Percepatan kualitas akses pembiayaan dan jasa usaha pertanian. • Percepatan Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. • Percepatan Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian • Percepatan ekonomi biru wilayah dengan	pertanian unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi masuk pasar ekspor/global • Perwujudan Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. • Perwujudan kualitas akses pembiayaan dan jasa usaha pertanian. • Perwujudan Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. • Perwujudan Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian • Perwujudan ekonomi biru wilayah dengan

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	berbasis keunggulan wilayah • Penguatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak termasuk pelestarian ikan endemik lokal. • Penguatan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. • Penguatan pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. • Penguatan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas	berbasis keunggulan wilayah • Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak termasuk pelestarian ikan endemik lokal. • Peningkatan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. • Peningkatan pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. • Peningkatan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas	peningkatan peran pada pasar global. • Percepatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak termasuk pelestarian ikan endemik lokal. • Percepatan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. • Percepatan pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. • Percepatan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan	peningkatan peran pada pasar global. • Perwujudan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak termasuk pelestarian ikan endemik lokal. • Perwujudan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. • Perwujudan pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. • Perwujudan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	perikanan dan daya saing produk perikanan. • Penguatan penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. • Penguatan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk • Penguatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya) • Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui	perikanan dan daya saing produk perikanan. • Peningkatan penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. • Peningkatan produktivitas sektor unggulan dengan percepatan pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk • Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). • Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknol	produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan • Percepatan penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. • Percepatan produktivitas sektor unggulan yang sangat inovatif dan diversifikatif • Percepatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). • Percepatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui	perikanan dan daya saing produk perikanan. • Perwujudan penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. • Perwujudan produktivitas sektor unggulan yang sangat inovatif dan diversifikatif • Perwujudan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). • Perwujudan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. • Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan,	ogi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. • Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk	ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. • Percepatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan,	ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. • Perwujudan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan,

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/ platform. • Penguatan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif • Penguatan modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/ platform. • Peningkatan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. • Peningkatan modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/ platform. • Percepatan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. • Percepatan modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/ platform. • Perwujudan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. • Perwujudan modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau	• Penerapan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis.	• Peningkatan partisipasi pelaku kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis.	• Pemantapan implementasi tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis secara merata di daerah	• Perwujudan pelaksanaan prinsip ekonomi hijau dengan nilai ekonomis tinggi

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	• Penguatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i>; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. • Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada metropolitan Bandar Lampung • Penguatan dalam pengembangan sistem dan kawasan pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu	• Peningkatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i>; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. • Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada metropolitan Bandar Lampung. • Peningkatan dalam pengembangan sistem dan kawasan pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju	• Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i>; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. • Percepatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada metropolitan Bandar Lampung • Percepatan dalam pengembangan sistem dan kawasan pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu	• Perwujudan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, dengan layanan Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i>; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja • Perwujudan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada metropolitan Bandar Lampung. • Perwujudan sistem dan kawasan pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan dan zero <i>solid waste city</i> yang

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.	<i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.	perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.	mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.
IE 6. Transformasi Digital	• Penguatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat • Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan termasuk pemanfaatan <i>Artificial Intelligence; Internet of Things</i>, • Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya	• Peningkatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat • Peningkatan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan termasuk <i>Artificial Intelligence; Internet of Things</i> • Perluasan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu	• Percepatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat • Pemantapan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan termasuk pemanfaatan <i>Artificial Intelligence; Internet of Things</i> • Pemantapan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya	• Perwujudan kualitas akses layanan digital dan mendukung peningkatan Masyarakat • Perwujudan teknologi terapan dengan akses informasi yang meningkatkan produktivitas • Perwujudan transformasi digital yaitu: (i) infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas dan digitalisasi di sektor strategis (iii) masyarakat dengan literasi digital tinggi, dengan kemampuan SDM digital atau digital skill tinggi.

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) perluasan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya perluasan literasi digital bagi masyarakat, meningkatkan keamanan informasi dan siber serta peningkatan SDM digital berkualitas atau digital skill (antara lain melalui perluasan pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	
IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	• Penguatan pengembangan ekosistem bisnis pelaku industri local • Penguatan pengembangan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global. • Penguatan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui	• Peningkatan ekosistem bisnis pelaku industri local • Peningkatan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global. • Peningkatan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan	• Percepatan ekosistem bisnis pelaku industri local • Percepatan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan akses pasar ekspor/global. • Percepatan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan	• Perwujudan Produk unggulan daerah sebagai pemasok utama kebutuhan produk akhir pasar domestik dan global • Perwujudan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan akses pasar ekspor/global. • Perwujudan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah • Penguatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/<i>stockyard</i> yang modern terintegrasi)	kerjasama antar daerah • Peningkatan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/<i>stockyard</i> yang modern terintegrasi)	kerjasama antar daerah • Percepatan dukungan tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan dengan infrastruktur transportasi (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/<i>stockyard</i> yang modern terintegrasi)	kerjasama antar daerah • Perwujudan pertumbuhan sektor industri manufaktur dan pengolahan dengan dukungan infrastruktur transportasi (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/<i>stockyard</i> yang modern terintegrasi)
IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	• Penguatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi, akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan • Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan dan kawasan Industri melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas	• Peningkatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi, akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan • Peningkatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan dan kawasan industri, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik	• Percepatan penguatan kapasitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi, akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan • Percepatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan dan kawasan industri melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas	• Perwujudan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, akses keuangan inklusif dan kesempatan kerja yang luas dengan prinsip keberlanjutan lingkungan • Perwujudan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan dan kawasan industri melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). • Penguatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. • Penguatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan. • Penguatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan. • Penguatan pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal	dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). • Peningkatan akses infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. • Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan. • Peningkatan kualitas <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan. • Peningkatan pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel	wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). • Percepatan akses infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. • Percepatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan. • Percepatan kualitas <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan. • Percepatan pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal	pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). • Perwujudan akses infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan yang merata dan handal • Perwujudan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan. • Perwujudan kualitas <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan yang berkualitas. • Perwujudan pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandar Lampung. • Penguatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandar Lampung. • Mendorong penguatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. • Penguatan kebijakan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip <i>comparative advantage</i>, <i>competitive advantage</i> dan <i>coopetition collaboration</i> • Penguatan <i>city beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota,	dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandar Lampung. • Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandar Lampung. • Mendorong peningkatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. • Peningkatan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip <i>comparative advantage</i>, <i>competitive advantage</i> dan <i>coopetition collaboration</i> • Peningkatan <i>city beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus	rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandar Lampung. • Percepatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandar Lampung. • Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. • Percepatan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip <i>comparative advantage</i>, <i>competitive advantage</i> dan <i>coopetition collaboration</i> • Percepatan <i>city beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota,	berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandar Lampung. • Perwujudan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandar Lampung. • Mendorong perwujudan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan • Perwujudan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip <i>comparative advantage</i>, <i>competitive advantage</i> dan <i>coopetition collaboration</i> • Perwujudan <i>city beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota,

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	sekali­gus menin­gkatkan daya tarik pa­ri­wisata urban tourism, teru­tu­ma pada ka­wasan perko­taan. • Penataan dan Penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipasi • Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/ asosiasi usaha. • Penguatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. • Penguatan pengembangan multi-infrastruktur backbone & maritime backbone yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas langsung Sumatra-Jawa (di Selat Sunda). (Trans Sumatera Railways Jembatan Selat Sunda dll) • Penguatan pengelolaan jalan	menin­gkatkan daya tarik pa­ri­wisata urban tourism, teru­tu­ma pada ka­wasan perko­taan. • Peningkatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipasi • Peningkatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/ asosiasi usaha. • Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. • Peningkatan pengembangan multi-infrastruktur backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas langsung Sumatra-Jawa (di Selat Sunda). (Trans Sumatera Railways; Jembatan Selat Sunda dll) • Peningkatan pengelolaan jalan	sekali­gus menin­gkatkan daya tarik pa­ri­wisata urban tourism, teru­tu­ma pada ka­wasan perko­taan • Percepatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipasi • Percepatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/ asosiasi usaha. • Percepatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. • Percepatan pengembangan multi-infrastruktur backbone & maritime backbone yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas langsung Sumatra-Jawa (di Selat Sunda). (Trans Sumatera Railways Jembatan Selat Sunda dll) • Percepatan pengelolaan jalan	sekali­gus menin­gkatkan daya tarik pa­ri­wisata urban tourism, teru­tu­ma pada ka­wasan perko­taan. • Perwujudan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipasi • Perwujudan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/ asosiasi usaha. • Perwujudan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. • Perwujudan pengembangan multi-infrastruktur backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas langsung Sumatra-Jawa (di Selat Sunda). (Trans Sumatera Railways; Jembatan Selat Sunda dll) • Perwujudan pengelolaan jalan

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	daerah dan koordinasi jalan de • Mendorong Penguatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik terutama pada ruas:Bandarlampung-Gedongtataan-Pringsewu-Kotaagung-Liwa-Krui; Terbanggi Besar-Kotabumi-Blambangan Umpu; dan Metro - Sukadana ; Pelabuhan Panjang Lematang; Simpang Susun (SS) Natar – Kota Agung – Bengkuntat – Bengkulu; Lematang – Padang Cermin – SP. Kota Agung • Mendorong Penguatan pembangunan jalan tol intra regional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkaran Bandar Lampung. • Mendorong penguatan pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port	daerah dan koordinasi jalan desa. • Mendorong Peningkatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas:Bandarlampung-Gedongtataan-Pringsewu-Kotaagung-Liwa-Krui;Terbanggi Besar-Kotabumi-Blambangan Umpu; dan Metro-Sukadana ; Pelabuhan Panjang – Lematang; Simpang Susun (SS) Natar – Kota Agung – Bengkuntat – Bengkulu; Lematang – Padang Cermin – SP. Kota Agung • Mendorong Peningkatan pembangunan jalan tol intra regional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkaran Bandar Lampung. • Mendorong peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama	daerah dan koordinasi jalan desa. • Mendorong Percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas:Bandarlampung-Gedongtataan-Pringsewu-Kotaagung-Liwa-Krui; Terbanggi Besar-Kotabumi-Blambangan Umpu; dan Metro-Sukadana ; Pelabuhan Panjang – Lematang; Simpang Susun (SS) Natar – Kota Agung – Bengkuntat – Bengkulu; Lematang – Padang Cermin – SP. Kota Agung • Mendorong Percepatan pembangunan jalan tol intra regional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkaran Bandar Lampung. • Mendorong percepatan pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/pen	daerah yang handal dan koordinasi jalan desa • Perwujudan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: Bandarlampung-Gedongtataan-Pringsewu-Kotaagung-Liwa-Krui; Terbanggi Besar-Kotabumi-Blambangan Umpu; dan Metro-Sukadana. ; Pelabuhan Panjang Lematang; Simpang Susun (SS) Natar – Kota Agung – Bengkuntat – Bengkulu; Lematang – Padang Cermin – SP. Kota Agung • Perwujudan pembangunan jalan tol intra regional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkaran Bandar Lampung. • Perwujudan pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik),

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	untuk KA logistik), terutama pada ruas Palembang-Muaraenim-Tarahan (peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA babaranjang, antara lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan sebidang yang memiliki traffic lalu lintas kendaraan jalan raya yang cukup tinggi) • Penguatan Pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Panjang. • Penguatan pembangunan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pesisir Barat Lampung. • Mendorong Penguatan penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, terutama dari Pesisir Barat Lampung.	pada ruas Palembang-Muaraenim-Tarahan (peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA babaranjang, antara lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan sebidang yang memiliki traffic lalu lintas kendaraan jalan raya yang cukup tinggi) • Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Panjang. • Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pesisir Barat Lampung. • Mendorong Peningkatan penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, terutama dari Pesisir Barat Lampung.	ingkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Palembang-Muaraenim-Tarahan (peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA babaranjang, antara lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan sebidang yang memiliki traffic lalu lintas kendaraan jalan raya yang cukup tinggi) • Percepatan pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Panjang. • Percepatan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pesisir Barat Lampung. • Mendorong Percepatan penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, terutama dari Pesisir Barat Lampung.	terutama pada ruas Palembang-Muaraenim-Tarahan (peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA babaranjang, antara lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan sebidang yang memiliki traffic lalu lintas kendaraan jalan raya yang cukup tinggi) • Perwujudan pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Panjang. • Perwujudan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pesisir Barat Lampung. • Perwujudan penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, terutama dari Pesisir Barat Lampung.

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	• Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global • Penguatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. • Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. • Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. • Penguatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. • Penguatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.	• Peningkatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global • Peningkatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. • Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. • Peningkatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. • Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. • Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.	• Percepatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global • Percepatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. • Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. • Percepatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. • Percepatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. • Percepatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.	• Perwujudan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global • Perwujudan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. • Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. • Perwujudan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. • Perwujudan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. • Perwujudan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	• Penguatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle) maupun kerja sama internasional lainnya. • Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. • Penguatan produktivitas BUMD. • Mendorong Penguatan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan	• Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle) maupun kerja sama internasional lainnya. • Peningkatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. • Peningkatan produktivitas BUMD. • Mendorong Peningkatan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan	• Percepatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle) maupun kerja sama internasional lainnya. • Percepatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. • Percepatan produktivitas BUMD. • Mendorong Percepatan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan	• Perwujudan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle) maupun kerja sama internasional lainnya. • Perwujudan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. • Perwujudan produktivitas BUMD. • Perwujudan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan • Mendorong penguatan Integrasi alur pelayaran dengan jaringan transportasi	listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan • Mendorong peningkatan Integrasi alur pelayaran dengan jaringan transportasi multimoda serta	listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan • Mendorong percepatan Integrasi alur pelayaran dengan jaringan transportasi	meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan • Perwujudan Integrasi alur pelayaran dengan jaringan transportasi

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	multimoda serta kebijakan normalisasi, penataan, dan pengamanan alur pelayaran pada sungai, danau, dan laut dengan memperhatikan Perlindungan Ekosistem • Penguatan infrastruktur jalan yang berkelanjutan dan tangguh dengan menerapkan teknologi pemantauan dan pemeliharaan prediktif, serta mengintegrasikan sistem transportasi multimoda untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi transportasi • Penguatan koordinasi dan kerangka regulasi serta instrumen pendukung baik dari perencanaan, persiapan teknis dan kerjasama antar wilayah, antar jenjang pemerintahan, maupun pihak lain dalam pengembangan kawasan Kotabaru	kebijakan normalisasi, penataan, dan pengamanan alur pelayaran pada sungai, danau, dan laut dengan memperhatikan Perlindungan Ekosistem • Peningkatan infrastruktur jalan yang berkelanjutan dan tangguh dengan menerapkan teknologi pemantauan dan pemeliharaan prediktif, serta mengintegrasikan sistem transportasi multimoda untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi transportasi • Percepatan koordinasi dan implementasi untuk penyediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur kewilayahan serta fasilitas pendukung lainnya untuk pengembangan wilayah kawasan Kotabaru yang diintegrasikan dengan pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung menuju Metropolitan Lampung Raya	multimoda serta kebijakan normalisasi, penataan, dan pengamanan alur pelayaran pada sungai, danau, dan laut dengan memperhatikan Perlindungan Ekosistem • Mengembangkan infrastruktur jalan yang berkelanjutan dan tangguh dengan menerapkan teknologi pemantauan dan pemeliharaan prediktif, serta mengintegrasikan sistem transportasi multimoda untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi transportasi • Pengembangan kawasan Kotabaru yang terintegrasi dengan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung dan Metropolitan Lampung Raya untuk menginisiasi terbentuknya simpul aktifitas pemerintahan, ekonomi serta sosial budaya masyarakat yang berwawasan lingkungan	multimoda yang berkelanjutan • Perwujudan infrastruktur jalan yang berkelanjutan dan tangguh dengan menerapkan teknologi pemantauan dan pemeliharaan prediktif, serta mengintegrasikan sistem transportasi multimoda untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi transportasi • Perwujudan kawasan Kotabaru yang terintegrasi dengan Kawasan Metropolitan Lampung Raya sebagai simpul aktifitas pemerintahan, ekonomi serta sosial budaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

Tabel 5. 5 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-2

Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi						
Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	
IE.4.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi					
11)	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,50 - 19,40	20,66 – 19,58	22,60 – 22,36	24,53 – 25,14	26,47 – 28,00
12)	Pengembangan Pariwisata					
a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,63	1,91	2,2	2,49	2,77
b.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	3,90	5,36	6,82	8,29	9,75
13)	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,82	1,91-2,30	2,20-2,60	2,49-2,80	2,77-3,10
14)	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
a.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada Level Provinsi (%)	9,70	9,84	10,40	11,01	11,61
b.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	1,85	2,18	2,60	3,06	3,48
c.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,62	3,22	3,83	4,43	5,03
d.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,84	1,32	2,02	2,83	3,42
e.	Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	1,91	2,72	3,54	4,35	5,16
15)	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,86-4,00	2,83 -3,60	2,39-3,20	2,40-2,80	1,36-2,38
	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	30*	36	42	48	55*

Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
16)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53,82*	57,58	61,35	66,13	69,9
17)	Tingkat penguasaan IPTEK					
a.	Indeks Inovasi Daerah	59	59-61	61-62	63-65	66-68
IE.5. Penerapan Ekonomi Hijau						
18)	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
a.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	59,19	63,06	66,92	70,79	74,65
b.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	36,00	37,80	40,40	42,80	44,20
IE.6. Transformasi Digital						
19)	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	5,8	6,18	6,55	6,93	7,3
IE.7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global						
20)	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	5,15	4,82	4,5	4,16	3,83
21)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,51	32,50-33,75	33,75-34,00	34,00-35,25	35,25-36,5
22)	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	21,00-23,00	23,00-24,50	24,50-26,00	26,50-28,00	28,5-30,0
IE.8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi						
23)	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan					
a.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	68,95	75,16	82,922	90,685	100
b.	Persentase Desa Mandiri (%) (Indeks Desa Bappenas)	1,51	4,0 - 5,0	6,0 - 8,0	10,0 - 12,0	13,0 -15,13

5.1.3 Misi ke-3 Transformasi Tata Kelola Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas dan Merata

Misi ini bertujuan mewujudkan kelembagaan pemerintah yang menerapkan tata kelola pemerintahan (*good governance*) efektif dan akuntabel serta pemantapan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan merata.

Gambar 5. 4 Tahapan Transformasi Tata Kelola



Tata kelola pemerintahan merupakan konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Proses yang terjadi mengacu kepada pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Transformasi tata kelola diarahkan kepada tata kelola regulasi dan kelembagaan, SDM aparatur serta pelayanan publik. Dalam upaya melaksanakan transformasi tata kelola regulasi dan kelembagaan, perlu dilakukan penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah serta peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Selain itu, perlu penguatan peran pemerintah daerah dan integritas partai politik dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.

Selanjutnya, keberadaan SDM aparatur merupakan faktor esensial dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM aparatur yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, pengembangan karir SDM aparatur berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward* dan *punishment*, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan SDM aparatur berdasarkan capaian kinerja. Penerapan sistem meritokrasi tidak terbatas hanya posisi tertentu, tetapi bisa diterapkan dalam konteks seluruh posisi pada suatu pekerjaan atau pelayanan publik.

Pembangunan zona integritas merupakan bagian dari program dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparatur sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang berintegritas tinggi dan juga merupakan bagian dari pencapaian transformasi birokrasi. Selain itu, pembangunan zona integritas juga berkaitan erat dengan perubahan budaya kerja dan peningkatan layanan publik dalam aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Birokrasi pemerintah dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga, untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat, diperlukan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Hasil akhir dari transformasi tata kelola adalah mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan merata. Hal ini dapat dicapai melalui digitalisasi pelayanan publik yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan ekosistem digital. Seluruh elemen pemerintahan baik di pusat maupun daerah saling berkolaborasi membangun sistem pemerintahan yang terpadu secara nasional. Tujuannya adalah untuk mewujudkan layanan pemerintahan yang dapat dengan mudah diakses serta digunakan oleh masyarakat. Transformasi tata kelola pemerintahan menuju era digital melalui perancangan dan pengelolaan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tepat dengan menekankan prinsip *data-driven government*.

Tabel 5. 6 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-3

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-3			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI : TRANSFORMASI TATA KELOLA	Penguatan fondasi kelembagaan pemerintah, penerapan manajemen risiko pemerintahan dan penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit.	Percepatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan peningkatan kualitas SDM aparatur yang berintegritas.	Perwujudan kelembagaan pemerintah yang kolaboratif.	Perwujudan pelayanan publik yang berkualitas dan merata
IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	• Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah • Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	• Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat • Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. • Penguatan integritas partai politik	• Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah • Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi • Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	• Perwujudan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan

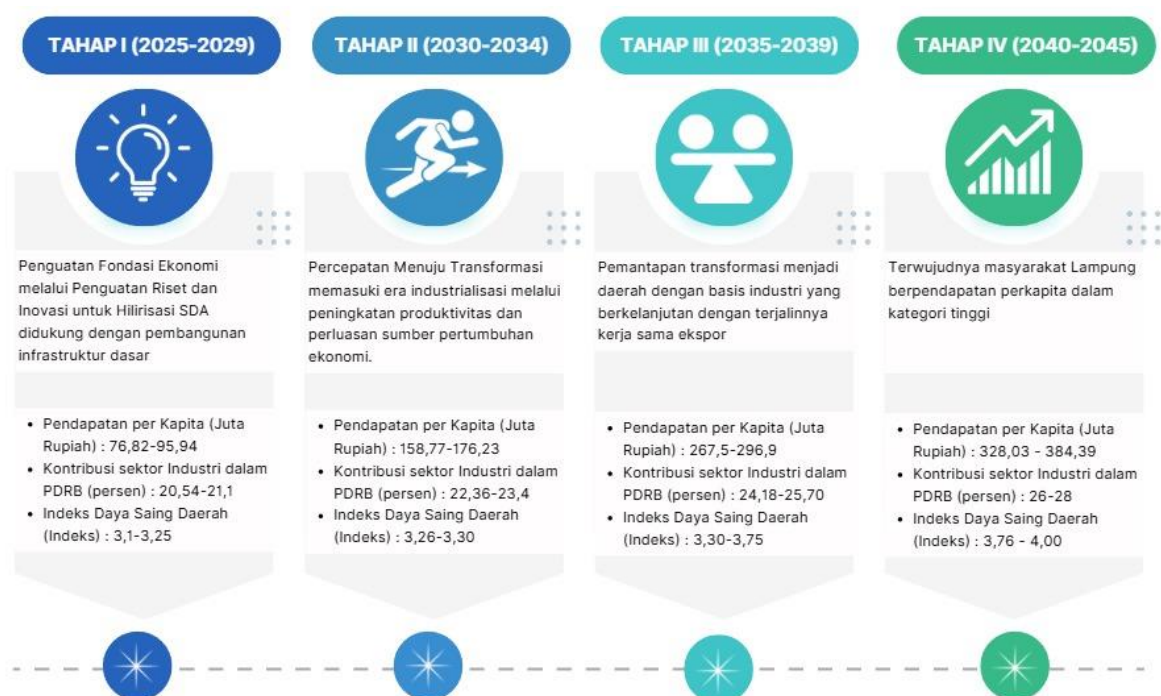
Tabel 5. 7 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-3

Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE.9.	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif					
24)	Indeks Reformasi Hukum	70,00	71-80	81-90	91-95	100*
25)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,10	4,30	4,50	4,80	5,00
26)	Indeks Pelayanan Publik	4,40	4,60	4,70	4,80	5,00
27)	Anti Korupsi					
a.	Indeks integritas nasional (hasil survei penilaian integritas oleh KPK)	75,56	78,56	81,56	85,56	86,56

5.1.4 Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Misi ini bertujuan untuk mengokohkan landasan transformasi pembangunan daerah melalui peningkatan keamanan, ketertiban umum dan penegakan kehidupan yang demokratis yang akan mendukung stabilitas ekonomi makro daerah. Dengan landasan yang kokoh tersebut, diharapkan dapat terwujud Provinsi Lampung yang aman, demokratis dan stabil.

Gambar 5. 5 Tahapan Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah



Transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola merupakan inti dari transformasi pembangunan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Agar pelaksanaan tiga transformasi tersebut berjalan dengan baik, diperlukan landasan yang kokoh berupa stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aspek pertama dari stabilitas tersebut adalah keamanan daerah yang tangguh. Di tengah-tengah kondisi masyarakat yang majemuk dan heterogen, diperlukan jaminan keamanan dan ketertiban agar kehidupan bermasyarakat berjalan dengan aman, rukun dan harmonis. Tanpa adanya keamanan yang tangguh, akan menyebabkan munculnya potensi gangguan keamanan yang mengganggu sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Untuk itu, dukungan terhadap peningkatan profesionalisme aparat pertahanan dan keamanan perlu terus dilakukan.

Berikutnya, perkembangan kualitas demokrasi sejak reformasi tahun 1998 menunjukkan kemajuan secara signifikan. Beberapa indikatornya seperti pelaksanaan pemilihan umum yang semakin demokratis, partisipasi masyarakat dalam proses politik dan demokratisasi institusi publik, serta kebebasan pers dan ekspresi berpendapat yang semakin terbuka. Namun harus dipahami bahwa kualitas demokrasi tidak hanya berkaitan dengan proses prosedural seperti pelaksanaan pemilihan umum semata, namun juga harus menyentuh aspek substansinya yaitu ketika pemerintahan melaksanakan dan mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Peningkatan proses demokrasi dan penegakan hukum yang adil perlu terus diperkuat agar Provinsi Lampung dapat terus bergerak maju dan berkeadilan.

Terakhir, diperlukan landasan stabilitas ekonomi makro daerah untuk dapat menghadirkan kesejahteraan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan investasi daerah dan perluasan kesempatan kerja menjadi beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan stabilitas ekonomi makro daerah ini. Untuk itu, peran pemerintah perlu terus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan serta penganggaran program-program pembangunan dengan pemerintah pusat.

Tabel 5. 8 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-4

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-4			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Penguatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah	Percepatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah	Pemantapan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah	Perwujudan Provinsi Lampung yang aman, demokratis dan stabil
IE 10. Hukum Berkeadilan, Demokrasi	● Peningkatan keamanan dan	● Penguatan keamanan dan	● Pemantapan keamanan dan	● Perwujudan keamanan dan

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-4			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
Substansial dan Stabilitas Trantibum Linmas Daerah	ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas • Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.	ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas • Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.	ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas • Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.	ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas • Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.
IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	• Penguatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan • Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah,	• Peningkatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan • Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja	• Percepatan kapasitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan • Percepatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja	• Perwujudan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan kesempatan kerja yang luas dengan prinsip keberlanjutan lingkungan • Perwujudan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-4			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. ● Penguatan pengendalian inflasi daerah.	daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. ● Peningkatan pengendalian inflasi daerah.	daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. ● Percepatan pengendalian inflasi daerah.	pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. ● Perwujudan pengendalian inflasi daerah.
IE 12. Daya Saing Daerah	● Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal ● Pembangunan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. ● Pengembangan dan diversifikasi produk sektor unggulan melalui insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi ● Dukungan terhadap	● Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal ● Penguatan kapasitas kelembagaan pada pasar tenaga kerja sektor unggulan dan penerapan standarisasi kualitas pekerja sektor unggulan ● Penguatan diversifikasi produk sektor unggulan dengan insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi	● Pemerataan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal ● Pemantapan kualitas dan kapasitas tenaga kerja sektor unggulan dengan penerapan dukungan capaian standarisasi kualitas pekerja sektor unggulan ● Pemantapan diversifikasi produk sektor unggulan dengan insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi	● Perwujudan aksesibilitas barang dan jasa serta pemasaran produk produk unggulan daerah ● Perwujudan kapasitas tenaga kerja sesuai standar pasar tenaga kerja ● Perwujudan ketersediaan dan distribusi produk unggulan daerah yang bernilai tinggi dan ekonomis dalam pasar barang dan jasa

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-4			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung).			

Tabel 5. 9 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-4

Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE.10.	Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibum Linmas Daerah					
28)	Tingkat Kriminalitas (Rasio)	122 *	115	105	98	85
	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	78	85	93	100
	b) Persentase Capaian pelaksanaan Aksi HAM	60	65	70	75	80
29)	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	71,70	75,7	80,7	85,7	89,08
30)	Indeks Demokrasi Indonesia	79,36-81,00 (sedang)	82,00-83,00 (tinggi)	84,00-85,00 (tinggi)	86,00-87,00 (tinggi)	87,01 – 90,00 (tinggi)
IE.11.	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah					
31)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,10-1,3	1,45	1,6	1,75	1,9
32)	Tingkat Inflasi (%)	1,5-3,5	2,4 – 3,5	1,95 – 3,35	1,48 – 3,18	1,0 – 3,0
33)	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan					
a.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	13,78	23,48	33,21	42,94	52,70
b.	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,04	0,27	0,50	0,74	0,97
c.	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Juta Rupiah)	1,7	4,315	6,975	9,60	12,16

Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
d.	Total Kredit/PDRB (%)	15,0	24,0	33,0	42,0	51,0
34)	Inklusi Keuangan (%)	85,5	88,43	91,35	94,28	97,2
IE.12.	Daya Saing Daerah					
35)	Indeks Daya Saing Daerah	3,02	3,1-3,25	3,26-3,30	3,30-3,75	3,76 - 4,00
36)	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	20	60	80	90	100

5.1.5 Misi ke-5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Misi ini bertujuan untuk menyiapkan landasan transformasi pembangunan daerah untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola melalui perwujudan ketangguhan dan keseimbangan antara kehidupan sosial-budaya dengan terpeliharanya kualitas lingkungan hidup secara terus-menerus.

Gambar 5. 6 Tahapan Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi



Ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai perubahan dan guncangan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan dan setiap individu dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan.

Hubungan timbal balik antara sistem sosial budaya dan ekologi selalu mencari keseimbangan dan membentuk ketahanan sosial budaya dan ekologi. Manusia dan lingkungan pada hakikatnya hidup di dalam suatu ekosistem agar saling menguntungkan dan menjaga keberlangsungan bersama. Jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat mengakibatkan eksploitasi dan kerusakan lingkungan terus terjadi, sedangkan daya pulih alam

tidak secepat peningkatan kebutuhan tersebut. Perubahan iklim dan bencana juga berdampak nyata, membawa kerugian tidak hanya ekonomi, tetapi juga penghidupan, tempat tinggal, bahkan nyawa. Di sisi lain, akibat globalisasi terjadi pelemahan nilai-nilai positif pada sebagian kelompok masyarakat seperti kejujuran, empati, kesukarelawanan, dan toleransi, serta perubahan pola interaksi yang semakin individualis. Hal ini mengakibatkan timbulnya degradasi moral, konflik, rasa tidak aman, kerentanan yang mengancam harmoni dan keberfungsian sosial dalam keluarga juga masyarakat, serta kerusakan lingkungan dan alam sekitar.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi bertumpu pada keseimbangan antara kemampuan sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini diperlukan untuk beradaptasi, pulih, dan terus berfungsi dalam menyediakan jasa lingkungan, membangun kemampuan manusia, masyarakat yang beretika, bermoral, dan berbudaya, dan keluarga yang berkualitas, dalam mengelola sumber daya dan lingkungannya. Hal tersebut juga diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik sosial dan kerusakan alam sehingga generasi mendatang dapat menikmati hasil pembangunan dan merasakan kualitas hidup yang baik.

Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal akan modal dasar untuk mewujudkan pranata sosial-budaya yang tangguh. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, tidak dipungkiri akan memberikan pengaruh terhadap tergerusnya nilai-nilai religiusitas dan budaya. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. Aspek pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.

Selain itu, dengan semakin besarnya struktur populasi generasi muda, **diperlukan juga suatu paradigma untuk menempatkan pemuda sebagai salah satu faktor keberhasilan pembangunan kedepan.** Sosok pemuda yang diharapkan adalah pemuda yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan zaman dan mampu meningkatkan produktivitasnya di berbagai sektor kehidupan. Pemuda dapat menunjukkan perannya sebagai *agent of change* pelayanan publik dengan berbagai cara, misalnya mengedukasi hak dan kewajiban masyarakat sebagai pengguna layanan publik, memberi masukan melalui sarana pengaduan internal yang disediakan penyelenggara layanan. Untuk itu keterlibatan pemuda sangat diperlukan dalam proses penyusunan kebijakan publik agar terjadinya keberhasilan pembangunan nasional.

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem, tradisi, kesepakatan dan hukum tertentu yang mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku individu di dalamnya. Masyarakat di Provinsi Lampung terdiri atas puluhan etnis, budaya, suku dan agama. Kemajemukan masyarakat beresiko memunculkan potensi konflik, terutama dipicu oleh pihak-pihak yang menginginkan kekacauan di masyarakat. Sehingga dibutuhkan toleransi, kesetaraan dan kerjasama yang memungkinkan terwujudnya masyarakat yang damai dan rukun.

Keberagaman budaya di Provinsi Lampung merupakan modal dasar yang kuat dalam pembangunan. Pembangunan kebudayaan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia di Indonesia. Kegiatan budaya dan penumbuhan ajang kreativitas budaya harus diperbanyak dengan melibatkan para pelaku budaya. Penguatan nilai kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan bermasyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila perlu dikuatkan ditengah derasnya arus budaya asing yang tidak sesuai dengan norma agama dan budaya lokal. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan ketangguhan sosial budaya yang menjadi landasan transformasi pembangunan.

Untuk mewujudkan ketangguhan dan keseimbangan antara kehidupan sosial-budaya dan ekologi, diperlukan ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan. Untuk memastikan kemandirian pangan didukung dengan ketahanan energi dan air dilakukan pendekatan terpadu FEW Nexus (*Food, Energy, Water*).

Ketahanan energi dilakukan dengan mendorong perluasan pemanfaatan tenaga listrik (elektrifikasi) dan meningkatkan ketahanan pasokan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pengembangan sistem kelistrikan diarahkan pada kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik daerah dan peningkatan kemampuan pelayanannya. Dalam upaya pemerataan maka perlu untuk didorong pembangunan jaringan distribusi listrik sampai pelosok pedesaan sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan kemampuan jangkauan pelayanan listrik baik untuk kepentingan industri maupun untuk kepentingan rumah tangga yang dapat terwujud secara lebih merata. Peningkatan penyediaan kebutuhan listrik ini dapat dilakukan dengan mencari sumber-sumber energi terbarukan di wilayah potensial untuk dibangun Pembangkit Listrik, baik pemanfaatan panas bumi, tenaga air termasuk penggunaan *mikrohidro* (pembangkit listrik mini).

Sedangkan dalam Efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumber daya air diperlukan penerapan ketahanan air melalui prinsip simpan air, jaga air, dan hemat air. Konservasi sumber daya air dilaksanakan dalam rangka menjaga ketersediaan air secara kontinu. Menjaga ketersediaan air pada setiap wilayah sungai, akan mendukung kinerja layanan sumber daya air dalam pengembangan komoditas unggulan pertanian dan upaya pencapaian kemandirian pangan. Selain itu ketahanan air akan mendukung pasokan air baku secara berkesinambungan untuk berbagai kegiatan ekonomi produktif juga termasuk pasokan bagi penyediaan air minum.

Efektivitas pendayagunaan sumber daya air juga diarahkan pada peningkatan kinerja layanan irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan pertanian dan upaya pencapaian kemandirian pangan melalui Pembangunan

bendungan dan infrastruktur penampung air untuk memperluas Daerah Irigasi (DI). Mendukung peningkatan area pertanian sawah tadah hujan dan lahan rawa yang sesuai dengan karakteristik hidrologi, topografi, dan ekologi, terutama yang terhubung dengan pasar lokal dan regional, Rehabilitasi dan modernisasi sistem irigasi juga dibutuhkan guna meningkatkan efisiensi penggunaan air dan produktivitas pertanian. Pengembangan sistem irigasi hemat air untuk mendukung realokasi penggunaan air untuk kebutuhan perkotaan dan industri. Implementasi intervensi finansial, kelembagaan, teknologi, dan infrastruktur yang holistik untuk menjamin keberlanjutan layanan irigasi yang handal di Provinsi Lampung.

Dalam menjaga ketahanan ekologi juga dilakukan upaya perlindungan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dari potensi risiko bencana daya rusak air melalui peningkatan ketahanan air di kawasan risiko bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Selain itu untuk menjaga keberlanjutan dibutuhkan penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air. juga perlunya implementasi pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. Beberapa upaya yang perlu dilakukan melalui peningkatan pelestarian hutan, kawasan lindung dan ekosistem alami dengan pemberdayaan masyarakat di dalam dan diluar kawasan hutan serta pengelolaan sanitasi aman di seluruh wilayah dan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir. Pengembangan sistem penanganan persampahan dan drainase pada permukiman diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap pentingnya peningkatan pengelolaan limbah baik limbah domestik maupun limbah non domestik. Selain itu juga perlunya peningkatan pelayanan persampahan dan drainase, serta memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan persampahan, tetapi juga dalam hal pengelolaan sampah hulu sampai hilir. dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi sirkular.

Provinsi Lampung memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi akibat kondisi geografis, geologis dan demografis karena ulah manusia. Sehingga

pengelolaan risiko bencana perlu dilakukan dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi.

Gambar 5. 7 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-5

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Percepatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan	Pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang setara dan inklusif	Perwujudan Provinsi Lampung yang tangguh dan adaptif
IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	• Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila • Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	• Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila • Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	• Pemantapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila • Pemantapan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	• Perwujudan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila • Perwujudan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	• Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	• Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan • Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi	• Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal • Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang • Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan	• Perwujudan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal • Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		sosial dalam pembangunan	kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	
IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	● Penguatan upaya Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ● Penguatan upaya pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan alam serta pengendalian pencemaran lingkungan ● Penguatan upaya efektivitas tata kelola kawasan konservasi darat dan laut dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati Provinsi Lampung ● Penguatan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan ● Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis	● Peningkatan upaya Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ● peningkatan upaya pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan ● Peningkatan upaya efektivitas tata kelola kawasan konservasi darat dan laut dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati Provinsi Lampung ● Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan ● Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis	● Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ● Pemantapan infrastruktur yang tangguh terhadap kerusakan alam dan pencemaran lingkungan ● Pemantapan tata kelola kawasan konservasi darat dan laut yang efektif dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati Provinsi Lampung ● Pemantapan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan ● Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis	● Perwujudan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ● Perwujudan infrastruktur yang tangguh terhadap kerusakan alam dan pencemaran lingkungan ● Perwujudan tata kelola kawasan konservasi darat dan laut yang efektif dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati Provinsi Lampung ● Perwujudan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan ● Perwujudan tata ruang berbasis

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	wilayah kesatuan lanskap ekologis. • Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami serta pemberdayaan masyarakat di dalam dan diluar kawasan hutan • Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi • Peningkatan Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>.	wilayah kesatuan lanskap ekologis • Pengembangan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami serta pemberdayaan masyarakat di dalam dan diluar kawasan hutan • Pengembangan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi • Pengembangan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>	wilayah kesatuan lanskap ekologis. • Pemantapan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami serta pemberdayaan masyarakat di dalam dan diluar kawasan hutan • Pemantapan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi • Pemantapan Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>	wilayah kesatuan lanskap ekologis. • Perwujudan pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami dan Kesejahteraan Masyarakat • Perwujudan hutan lestari melalui rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi • Perwujudan Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>
IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	• Mendorong penguatan konsumsi listrik per Kapita • Mendorong Penguatan intensitas energi/primer • Penurunan ketidakcukupan konsumsi pangan • Penguatan kapasitas air baku • Penguatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	• Mendorong Peningkatan Penuntasan dalam pemenuhan konsumsi listrik per Kapita • Mendorong Peningkatan pemenuhan intensitas energi/Primer • Percepatan dalam meminimalisasi ketidakcukupan konsumsi pangan • Peningkatan pemenuhan kapasitas air baku • Peningkatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	• Mendorong Percepatan Konsumsi Listrik per Kapita • Mendorong Percepatan intensitas energi/primer • Pemantapan dalam meminimalisasi ketidakcukupan konsumsi pangan • Percepatan kapasitas air baku • Percepatan skema dan tata kelola serta pemerataan akses rumah tangga perkotaan terhadap	• Perwujudan Konsumsi Listrik yang handal • Intensitas energi/primer yang handal • Konsumsi Pangan yang handal • Kapasitas air baku yang handal • Perwujudan Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	● Penguatan Kebutuhan pangan secara sehat, aman dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal ● Penguatan diversifikasi pangan Penguatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Selatan - Lampung ● Penguatan Kebutuhan pangan secara sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal ● Penguatan dalam penyediaan pasokan air baku berkesinambungan untuk berbagai kegiatan ekonomi produktif ● Penguatan kinerja layanan irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan pertanian dan pencapaian kemandirian pangan provinsi Lampung	● Peningkatan kemandirian pangan yang sehat, aman dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal ● Peningkatan diversifikasi pangan ● Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Selatan - Lampung ● Peningkatan kemandirian pangan yang sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal ● Peningkatan dalam penyediaan pasokan air baku berkesinambungan untuk berbagai kegiatan ekonomi produktif ● Peningkatan kinerja layanan irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan pertanian dan pencapaian kemandirian pangan provinsi Lampung	air siap minum perpipaan ● Percepatan kemandirian pangan yang sehat, aman dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal ● Percepatan diversifikasi pangan ● Percepatan Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Selatan - Lampung. ● Percepatan kemandirian pangan yang sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal ● Pengembangan dalam penyediaan pasokan air baku berkesinambungan untuk berbagai kegiatan ekonomi produktif ● Pemantapan kinerja layanan irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan pertanian dan pencapaian kemandirian pangan provinsi Lampung	perpipaan yang handal ● Perwujudan kemandirian pangan yang sehat tangguh, aman dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal ● Perwujudan diversifikasi pangan ● Perwujudan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Selatan - Lampung. ● Perwujudan kemandirian pangan yang sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal ● Perwujudan pasokan air baku berkesinambungan dan handal untuk berbagai kegiatan ekonomi produktif ● Perwujudan kinerja layanan irigasi yang handal untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan pertanian dan pencapaian

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
				kemandirian pangan provinsi Lampung
IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	● Penguatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana dalam Penanganan Bencana ● Penguatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim; ● Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal; ● Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi.	● Peningkatan kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam ● Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana ● Peningkatan Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal; ● Peningkatan Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural	● Pemantapan kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam ● Pemantapan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana ● Pemantapan Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal; ● Pemantapan Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi.	● Terwujudnya kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam ● Perwujudan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana ● Perwujudan bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal; ● Ketangguhan terhadap risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi.

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	• Penguatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air • Penguatan dalam Perlindungan Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dari potensi Risiko Bencana daya Rusak Air	dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi. • Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air • Peningkatan dalam Perlindungan Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dari potensi Risiko Bencana daya Rusak Air	• Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air • Pengembangan dalam Perlindungan Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dari potensi Risiko Bencana daya Rusak Air	• Ketangguhan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air • Perwujudan Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang tangguh terhadap Risiko Bencana daya Rusak Air

Tabel 5. 10 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-5

Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE.13.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju					
37)	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	59,10 - 59,12	59,50-62,00	63,00-65,00	66,00-68,00	68,96 - 69,11
38)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,07 - 74,13	76,07-77,95	78,07-79,95	80,07-81,00	81,24 - 81,94
IE.14.	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif					
39)	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,21	73,21-73,99	74,21-74,99	75,21-76,00	76,33 - 76,38
a.	Indeks Perlindungan Anak	64,64	74,64-76,76	77,64-79,76	80,64-82,76	83 - 85
b.	Indeks Pembangunan Pemuda	49,53	60,53-65,00	65,53-70,00	70,53-75,00	75 - 78
40)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,415 - 0,414	0,40-0,35	0,34-0,28	0,27-0,22	0,195 - 0,186
IE.15.	Lingkungan Hidup Berkualitas					
41)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,537	0,576	0,625	0,682	0,720
42)	Kualitas Lingkungan Hidup					
a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	70,99	71,84	72,90	73,95	75,22

Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)*	19,03	24,11	30,37	36,81	43,90
c.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)*	3,4	7,5	15	22,5	30
d.	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	12,64	17,64	22,64	27,64	32,64
IE.16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan						
43)	Ketahanan energi, air, dan pangan					
a.	Ketahanan Energi					
	(i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	680	750	1.223	1.696	2.170
	(ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	161	161	153	145	137
b.	Ketahanan Pangan					
	(i) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	8,5	4,75	3,30	1,80	0,42
c.	Ketahanan Air					
	(i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,44	3,41	6,38	9,35	12,32
	(ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) *	6	16	26	36	46
IE.17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim						
44)	Indeks Risiko Bencana (IRB)	129,97	126,11-122,80	121,29-113,84	116,47-104,88	110,68-94,13
45)	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)					
a.	Kumulatif	9,52	9,52	16,57	23,62	30,69
b.	Tahunan	15,32	15,32	33,94	51,96	71,18
*) telah dibahas dan disepakati bersama antara Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PKPCK, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung						

5.2 Arah Kebijakan Dalam Kerangka Implementasi Transformasi Daerah

Lampung 2045 tercermin dalam peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Provinsi Lampung, dengan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan kelompok pendapatan, yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan. Hal ini dihasilkan dari pelaksanaan agenda transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola, yang didukung oleh landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.

Dalam mewujudkan pembangunan wilayah, unsur pendorong yang penting adalah unsur sarana dan prasarana baik berupa konektivitas, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi, maupun sarana dan prasarana dasar. Seiring dengan desentralisasi dan otonomi daerah, tata kelola dan kapasitas fiskal Pemerintah Daerah memegang peranan utama dalam pembangunan wilayah.

Dalam menerapkan kebijakan dan pembangunan wilayah harus memperhatikan karakteristik wilayah yang tidak *one size fits for all* serta memberikan pemihakan kepada daerah-daerah yang membutuhkan prioritas pembangunan yang lebih besar. Oleh karena itu, pembangunan ke depan perlu memperhatikan karakteristik wilayah dan didukung oleh konektivitas dan logistik yang andal, yang menjadikan Provinsi Lampung sebagai bagian penting dalam pembangunan regional maupun nasional.

Lampung kaya akan sumber daya alam, termasuk hasil bumi dan perikanan yang melimpah, serta warisan budaya yang kaya dan beragam. Pengembangan infrastruktur logistik yang terintegrasi dengan potensi alam dan budaya ini akan mendorong peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Lampung. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur logistik dan transportasi yang baik di Lampung tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mengukuhkan posisi Lampung sebagai provinsi yang berperan penting dalam perekonomian nasional Indonesia.

Lampung juga memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor maritim. Sebagai provinsi yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, Lampung

memiliki lokasi strategis yang menjadi gerbang utama Pulau Sumatera dan memiliki posisi yang strategis dalam alur laut kepulauan Indonesia (ALKI I) serta SLoC (*Sea Line of Communication*) menjadikan Lampung wilayah strategis dalam konteks jalur pelayaran internasional yang menghubungkan antara wilayah timur dan barat dunia. Dengan pelabuhan utama seperti Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan penyeberangan Bakauheni, selain itu juga memiliki lima pelabuhan pengumpan regional di beberapa wilayah. Pemanfaatan laut dan pengembangan sektor maritim di Lampung menjadi penting dalam mendukung logistik dan transportasi yang efisien.

Jalur distribusi logistik dan transportasi menjadi tulang punggung pembangunan yang efektif dan efisien, memungkinkan pengiriman barang dan jasa serta mobilitas penduduk secara cepat dan tepat waktu ke berbagai daerah di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur logistik dan transportasi yang andal, efisien, dan terintegrasi menjadi kunci bagi Lampung untuk memaksimalkan potensinya sebagai bagian dari negara Nusantara. Dengan begitu, Lampung dapat meningkatkan perekonomian daerah dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Untuk mencapai pembangunan wilayah yang merata, Provinsi Lampung perlu fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta sarana dan prasarana. Yang juga mencakup penyediaan pelayanan dasar yang memadai untuk seluruh masyarakat. Dalam 20 tahun ke depan, penting bagi Provinsi Lampung untuk menerapkan kebijakan pembangunan wilayah yang memperhatikan karakteristik dan potensi spesifik setiap wilayah. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Selanjutnya Pembangunan Kewilayahan dijabarkan dalam misi dan arah Kebijakan Kerangka Implementasi Transformasi Daerah, sebagai berikut :

5.2.1 Misi ke-6 Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

Dalam rangka mendukung pembangunan Provinsi Lampung secara holistik, pembangunan infrastruktur menjadi pilar penting **untuk mewujudkan agenda transformasi sosial dan transformasi ekonomi Serta landasan transformasi.** Pembangunan infrastruktur dalam tataran transformasi sosial difokuskan untuk menyediakan akses yang merata terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Sebagai upaya mewujudkan transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur dititikberatkan untuk memastikan optimalisasi rantai nilai (*Value Chain*) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata yang dimiliki setiap wilayah serta penataan dan pengembangan berbasis logistik. Program pembangunan infrastruktur ke depannya menganut konsep *green and sustainable infrastructure* serta mengimplementasikan prinsip ekonomi sirkuler yang mengintegrasikan keseimbangan dalam dampak terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan didukung oleh kapasitas tata kelola yang andal.

Arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi Sosial mencakup:

1. Akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas *intraregion & interregion* pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung)
2. Penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan sebagai upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
3. Penyediaan bantuan sosial tempat tinggal yang layak, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung)
4. Percepatan Upaya pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi

5. Percepatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
6. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami *urban decay* dalam suatu kawasan perkotaan.

Arah Kebijakan ini terakomodir dalam Misi 1 : Transformasi Sosial pada indikator Sasaran Pokok IE1. Kesehatan untuk Semua dan IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif.

Arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi ekonomi mencakup:

1. Penyediaan infrastruktur terintegrasi esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian
2. Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama *green/low-carbon electricity*; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
3. Infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada metropolitan Bandar Lampung
4. Sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan
5. Penguatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
6. Pembangunan ekosistem digital dengan memperluas jaringan *broadband*
7. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan

kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).

8. Penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
9. Ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (*green & grey infrastructure*) pada kawasan perkotaan.
10. Penguatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage* di kawasan perkotaan.
11. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandar Lampung.
12. Penguatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandar Lampung.
13. Mendorong penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
14. Upaya *city beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan
15. konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
16. Penguatan pengembangan *multi-infrastructure backbone & maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas langsung Sumatra-Jawa (di Selat Sunda).
17. Pengelolaan jalan daerah dan koordinasi jalan desa
18. Mendorong Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas:

- Pelabuhan Panjang - Lematang
- Bandarlampung-Gedongtataan-Pringsewu-Kotaagung-Liwa-Krui;
- Terbanggi Besar-Kotabumi-Blambangan Umpu;
- Metro -Sukadana.
- Simpang Susun (SS) Natar – Kota Agung – Bengkunt – Bengkulu
- Lematang – Padang Cermin – SP. Kota Agung

19. Mendorong Upaya Penguatan pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkaran Bandar Lampung.
20. Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan *dry port* untuk KA logistik), terutama pada ruas Palembang- Muaraenim-Tarahan (peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA babaranjang, antara lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan sebidang yang memiliki traffic lalu lintas kendaraan jalan raya yang cukup tinggi)
21. Mendorong Pembangunan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pesisir Barat Lampung.
22. Mendorong penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, terutama dari Pesisir Barat Lampung.
23. Mendorong pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Panjang dan pelabuhan pengumpan regional
24. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya
25. Mendorong Pembangunan ketenagalistrikan yang diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii)

pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.

26. Pengembangan Kawasan Kotabaru beserta fasilitas pendukung lainnya yang terintegrasi dengan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung dan Metropolitan Lampung Raya

Arah Kebijakan ini telah masuk dalam Misi 2 : Transformasi Ekonomi pada indikator Sasaran Pokok IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau, dan IE 6. Transformasi Digital, IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

Arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

1. Penyediaan pasokan air baku berkesinambungan untuk berbagai kegiatan ekonomi produktif
2. Peningkatan kinerja layanan irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan pertanian dan pencapaian kemandirian pangan provinsi Lampung
3. Perlindungan Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dari potensi Risiko Bencana daya Rusak Air

Arah Kebijakan ini telah masuk dalam agenda Landasan Transformasi Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi pada indikator Sasaran Pokok IE 16

Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan dan IE 17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Arah kebijakan dalam Implementasi Kerangka Transformasi Pada Misi 6 :

Implementasi transformasi merujuk pada strategi dan langkah yang diambil dalam mencapai transformasi sosial dan ekonomi serta landasan Transformasi. Adapun arah kebijakan sarana prasarana melekat pada Transformasi Sosial dan Transformasi Ekonomi maupun Landasan Transformasi, sedangkan kerangka implementasi transformasi diarahkan pada regulasi yang mendukung pelaksanaannya, sebagaimana berikut ini :

Arah kebijakan tata ruang untuk menyelesaikan isu penataan ruang antara lain penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Standar Pelayanan Minimal.

Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah. Penataan ruang diarahkan pada pembangunan wilayah yang terpadu, nyaman, efisien dan mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan.

Penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Rencana tata ruang dijabarkan dan disinkronisasikan ke dalam rencana pembangunan yang konsisten, baik secara fungsi, lokasi, maupun jangka waktu pembangunannya.

Strategi pengembangan wilayah dengan cara mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis serta cepat tumbuh adalah strategi penting dalam pengembangan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya,

termasuk pulau-pulau kecil sehingga dapat terjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.

Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah bukan hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga memperkuat integrasi nasional. Pengembangan wilayah juga perlu mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim. Dengan demikian dapat tercapai wilayah yang terpadu, nyaman, dan efisien serta berkelanjutan.

Tabel 5. 11 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-6

ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-6				
MISI	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI ke-6 : Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan yang merata termasuk pulau-pulau kecil	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan yang merata dan berkelanjutan termasuk pulau-pulau kecil	Pemantapan dan peningkatan kualitas Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan termasuk pulau-pulau kecil	Perwujudan Infrastruktur Dasar Kewilayahan yang Tangguh, terintegrasi dan berkelanjutan
	● Penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.	● Pemantapan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.	● Perluasan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.	● Terwujudnya kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.
	● Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail	● Terbitnya panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah	● Rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sesuai	● Rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sesuai Panduan (Juknis

ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-6				
MISI	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	Tata Ruang (RDTR), Standar Pelayanan Minimal, dsb).	(RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Standar Pelayanan Minimal, dsb).	Panduan (Juknis Provinsi Lampung), , Standar Pelayanan Minimal, dsb).	Provinsi Lampung), , Standar Pelayanan Minimal, dsb).
	● Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, <i>trust</i>, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	● Peningkatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan n rasa keadilan, <i>trust</i>, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	● Perluasan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, <i>trust</i>, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	● Perwujudan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, <i>trust</i>, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas

ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-6				
MISI	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	• Mendorong Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.	• Implementasi reforma agraria pada lokasi-lokasi prioritas dan strategis nasional yang terkait pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan	• Implementasi reforma agraria juga difokuskan pada wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, terdepan, dan terluar	• Terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah dan kesejahteraan tidak hanya bagi masyarakat
	• Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi. • Sosialisasi RPJPD dan RTRW Provinsi Lampung • Penguatan Sistem Informasi Tata Ruang • Mendorong penyelesaian RDTR OSS di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	• Pengendalian pembangunan wilayah berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) • Evaluasi RPJPD dan RTRW Provinsi Lampung • Fasilitasi dan monitoring integrasi RDTR OSS terhadap sistem perijinan satu pintu di seluruh Kabupaten/ Kota	• Pemantapan Pembangunan wilayah berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) • Monitoring dan evaluasi implementasi integrasi RDTR OSS terhadap sistem perijinan satu pintu di seluruh Kabupaten/Kota	• Terwujudnya kesesuaian pembangunan terhadap kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
	• Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas	• Percepatan riset sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan	• Peningkatan riset sektor-sektor ekonomi produktif, melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas	• Terwujudnya kemajuan sektor-sektor ekonomi produktif berbasis riset secara berkelanjutan

ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-6				
MISI	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri	n kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, peningkatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri	researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta hilirisasi hasil-riset pada sektor ekonomi produktif	
	• Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah yang diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat.	• Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggara	• Peningkatan penyelenggara n otonomi daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.	• Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah yang berkeadilan, merata, dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-6				
MISI	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		an pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan; sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.		

5.2.2 Misi ke-7 Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung Dalam Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Optimal Dengan Tetap Menjaga Kelestarian Fungsinya Dalam Menopang Kehidupan.

Beberapa arah pembangunan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup antara lain :

Pengembangan sistem pembangunan sesuai dengan keseimbangan ekosistem yang tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan.

Pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan daya dukungnya dan memperhatikan daya regenerasinya khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*). Peningkatan wawasan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang merupakan modal pembangunan daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Dalam menjaga pembangunan wilayah yang berkualitas ramah lingkungan, diperlukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang diikuti penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

Pengembangan sistem pembangunan kehutanan juga yang diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan, kawasan lindung dan ekosistem alami dengan pemberdayaan masyarakat di dalam dan diluar kawasan hutan, dan peningkatan daya dukung sumber daya hutan dalam pembangunan berkelanjutan. Menjaga daerah resapan air dalam rangka konservasi Air Bawah Tanah (ABT) dengan peningkatan rehabilitasi peran dan fungsi hutan melalui upaya konservasi.

Selain itu arah kebijakan perlu berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal. dilakukan dengan komitmen untuk memberikan berbagai bentuk kemudahan dan dukungan bagi sektor-sektor ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Pentingnya penyederhanaan regulasi dan prosedur perizinan untuk investasi di sektor-sektor ekonomi produktif seperti pertanian, perikanan, industri, ekonomi biru, ekonomi hijau, serta energi baru dan terbarukan yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk meningkatkan daya saing sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan, maka perlu didorong kebijakan yang memberikan berbagai insentif fiskal, pada investasi dengan teknologi hijau dan berkelanjutan yang dapat mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi energi. Serta mendukung inisiatif yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dengan menjaga kelestarian lingkungan. **Penerapan Standar Keandalan Bangunan** yang mampu menahan berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan badai. Standar ini juga mencakup ketahanan terhadap perubahan iklim, seperti peningkatan suhu dan curah hujan yang ekstrem yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan iklim lokal di Provinsi Lampung dengan memperhitungkan risiko bencana spesifik.

Untuk itu diperlukan tata ruang wilayah yang mantap disertai penegakan hukum sebagai pedoman pemanfaatan SDA yang optimal dan lestari. Pentingnya tata ruang yang mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung,

daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim. Dan hal yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan serta partisipasi masyarakat maupun dunia usaha dan industri dalam memelihara lingkungan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup, terutama pada generasi muda.

Arah kebijakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mendukung Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

diarahkan dengan mensinergikan pembangunan sarana prasarana dengan penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon, sebagaimana termuat dalam Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan.

Tabel 5. 12 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-7

ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-7				
MISI	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI ke-7: Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Penguatan pembangunan sarana prasarana dasar dan pengendalian lingkungan	Peningkatan Kualitas pengelolaan sarana prasarana untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan	Pemantapan kelembagaan Pengelolaan Sarana Prasarana Terbangun, lingkungan nyaman dan Berkelanjutan	Perwujudan sarana prasarana infrastruktur wilayah yang tangguh dalam menghadapi perubahan
	● Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim sesuai standar dan ketentuan ● Penguatan Perencanaan tata ruang dengan mempertimban	● Peningkatan Keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim sesuai Standar dan Ketentuan ● Peningkatan Perencanaan tata ruang dengan mempertimban gkan risiko bencana, daya	● Pemantapan Keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim sesuai Standar dan Ketentuan ● Pemantapan Perencanaan tata ruang dengan mempertimban gkan risiko bencana, daya	● Perwujudan Keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim sesuai Standar dan Ketentuan ● Perwujudan tata ruang yang mempertimbang kan risiko bencana, daya dukung, daya tampung

ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-7				
MISI	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	gkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir • Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan Energi Baru dan Terbarukan. • Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup,	dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir • Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan Energi Baru dan Terbarukan. • Perencanaan dan evaluasi tata ruang yang mengcover risiko bencana, daya dukung, daya tampung	dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir • Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan Energi Baru dan Terbarukan. • Perencanaan dan evaluasi tata ruang yang mengcover risiko bencana, daya dukung, daya tampung	lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir • Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan Energi Baru dan Terbarukan. • Perencanaan dan evaluasi tata ruang yang mengcover risiko bencana, daya dukung, daya tampung

ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-7				
MISI	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir yang sesuai karakteristik daerah	lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir yang sesuai karakteristik daerah	lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir yang sesuai karakteristik daerah	lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir yang sesuai karakteristik daerah

5.3 Arah Pengembangan Wilayah Berdasarkan Koridor Ekonomi Wilayah

Pembentukan koridor atau klaster wilayah merupakan upaya yang perlu dilakukan pada Kabupaten-Kota di Provinsi Lampung, karena Provinsi Lampung memiliki potensi Sumber Daya Alam yang beragam, termasuk pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Dengan mengembangkan koridor wilayah di berbagai sektor ini, Kabupaten-Kota di Lampung dapat meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan daya saing produk lokal, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian daerah secara keseluruhan. Selain itu, kerja sama antar pemangku kepentingan di tingkat lokal dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman, mendorong inovasi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Mengklasterkan wilayah-wilayah berdasarkan potensi dan ketersediaan infrastruktur akan membentuk arah kebijakan yang berorientasi Pembangunan Ekonomi Regional, pendekatan tradisional terhadap pembangunan ekonomi yang dianggap tidak berhasil, sehingga dengan membentuk klaster kewilayahan dimana terdapat wilayah dengan pertumbuhannya lebih tinggi akan menjadi faktor pendorong bagi wilayah lain yang pertumbuhannya lebih rendah yang berada dalam satu klaster yang sama. Konsep pengembangan wilayah melalui klasterisasi ini merupakan konsep yang juga dapat menerapkan konsep teori *trickle down effect* yang akan memiliki pengaruh baik dalam meningkatkan koefisien gini atau gini rasio yang berpengaruh terhadap pengurangan dan kesenjangan antar wilayah.

Kehadiran klaster yang kuat dengan didukung luasnya gugus industri di masing-masing wilayah serta kehadiran kluster disuatu wilayah dan wilayah tetangga dapat berdampak pada pertumbuhan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pembentukan bisnis baru yang lebih besar, pertumbuhan ekonomi, perlindungan ekosistem, dan ketahanan dalam krisis. Dengan mendukung pembentukan koridor wilayah akan membuka peluang untuk perkembangan Provinsi Lampung, karena diversifikasi ekonomi biasanya terjadi di dalam klaster dan antar klaster yang saling terkait.

Klaster dapat berperan sebagai alat kebijakan Ekonomi :

1. Keberadaan klaster dapat memanfaatkan kekuatan dampak dan keterkaitan untuk mendorong perkembangan dan pemerataan ekonomi antar wilayah melalui peningkatan daya saing produk.
2. Menjadi instrumen dalam penyusunan kebijakan sektoral, pengembangan potensi untuk mendorong investasi daerah.
3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kolaborasi kebijakan ekonomi terkait penelitian dan pengembangan, promosi, ekspor, daya tarik dan penanaman modal asing di daerah.
4. Klaster dapat menjadi sebuah forum untuk kolaborasi antara sektor swasta, asosiasi perdagangan, lembaga pemerintah, pendidikan, dan penelitian melalui mekanisme dialog bisnis-pemerintah yang konstruktif.
5. Menyatukan perusahaan dari berbagai skala usaha dan ukuran, termasuk UKM.
6. Pengembangan wilayah dalam satu klaster dapat mendorong persaingan yang lebih kompetitif untuk menekan efek distorsi pasar.

A. Penerapan Klaster pada wilayah di Provinsi Lampung

Penerapan klaster berdasarkan Potensi Alam, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Potensi infrastruktur menjadi dasar konsep klaster pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Konsep ini mengarahkan kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonominya yang lebih tinggi diharapkan dapat menjalar pada kabupaten atau kota dimana pertumbuhannya lebih rendah yang berada di dalam klaster yang sama.

1. Klaster I diarahkan sebagai **Koridor Wilayah 1**,
Wilayah Pengembangan (WP) : Bandar Lampung- Metro-Pesawaran-
Lampung Tengah-Lampung Timur-Lampung Selatan.
Arahan Pembangunan : Hub Ekonomi Kreatif, Ketahanan Pangan, Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi.
2. Klaster II diarahkan sebagai **Koridor Wilayah 2**,

Wilayah Pengembangan (WP) : Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji.

Arahan Pembangunan : *Super Hub* Agro Industri dan *Culture Tourism*

3. Klaster II diarahkan sebagai **Koridor Wilayah 3**

Wilayah Pengembangan (WP) : Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat.

Arahan Pembangunan : *Hub* Ekonomi Biru, *Branding* Pariwisata Pesisir, Industri Berbasis Sumber Daya Alam (SDA)

B. Kedudukan Koridor Wilayah I, Koridor Wilayah II, Koridor Wilayah III berdasarkan hirarki wilayah pada Rencana Tata Ruang Wilayah

Berikut kedudukan masing-masing klaster berdasarkan hirarki wilayah pada RTRW Provinsi Lampung.

Tabel 5. 13 Pembagian wilayah Pengembangan berdasarkan Hirarki Wilayah

No.	Kab. / Kota	Hirarki WP pada RTRWP
Koridor Ekonomi Wilayah I : <i>Hub</i> Ekonomi Kreatif, Ketahanan Pangan, Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi.		
1.	Metro – Lampung Tengah – Lampung Timur	PKW Perkotaan Kota Metro
2.	Bandar Lampung – Pesawaran – Lampung Selatan	PKN Bandar Lampung PKW Perkotaan Kalianda Lampung Selatan PKL Pesawaran
Koridor Ekonomi Wilayah II : <i>Super Hub</i> Agro Industri dan <i>Culture Tourism</i>		
1.	Lampung Utara - Way Kanan	PKW Perkotaan Kotabumi Lampung Utara
2.	Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat – Mesuji	PKW Perkotaan Menggala Tulang Bawang
Koridor Ekonomi Wilayah III : <i>Hub</i> Ekonomi Biru, <i>Branding</i> Pariwisata Pesisir, Industri Berbasis Sumber Daya Alam		
1.	Pringsewu- Tanggamus	PKW Perkotaan Kota Agung Tanggamus
2.	Pesisir Barat	Kawasan Pariwisata Pesisir Barat
3.	Lampung Barat	PKW Perkotaan Liwa Lampung Barat

Sumber : RTRW Provinsi & RTRW Kab/Kota

C. Tinjauan Potensi Infrastruktur, Potensi Alam pada masing-masing wilayah pengembangan Koridor I, II, dan III

Pengalokasian wilayah pengembangan ditinjau berdasarkan potensi Infrastruktur dan Potensi Alam,

Tabel 5. 14 Tinjauan Klaster I,II dan III berdasarkan Potensi Infrastruktur dan Potensi Alam

No.	Kabupaten/Kota	Potensi Alam	Potensi Infrastruktur
Koridor Ekonomi Wilayah I : Hub Ekonomi Kreatif, Ketahanan Pangan, Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi.			
1.	Metro – Lampung Tengah – Lampung Timur	KSPN Way Kambas Lampung Timur - Kawasan Pembibitan dan Agrobisnis - Kawasan perikanan Lampung timur - Pengembangan potensi agrowisata Pekalongan	Kawasan Pendidikan Terpadu Kota Metro - Kawasan Agropolitan Metro - WPPI Kawasan Industri Lampung Tengah - Terminal Tipe A Betan Subing Lampung Tengah - WPPI Lampung Timur - Jalan akses KSPN - Dukungan perwujudan Sistem Prasarana Jaringan Perkeretaapian Pringsewu-Rejosari-Metro-Sukadana - Pembangunan jalan penghubung/lingkar - Kawasan Metropolitan Lampung Raya
2.	Bandar Lampung Pesawaran	Kawasan Teluk Lampung - Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Pesawaran - Kawasan Pencadangan Konservasi Laut Pesawaran - Kawasan KEK Padang Cermin	Rencana Jaringan KA Tanjung Karang – Pringsewu - Kawasan Industri Tegineneng - Kawasan Pangkalan Utama TNI AL Pesawaran - Terminal Barang Tegineneng - Pembangunan Jalur Lintas Kereta Api Tegineneng – Bandar Lampung - Tarahan
3.	Bandar Lampung Pesawaran – Lampung Selatan	KSPN Krakatau Lampung Selatan - KPPD Kawasan Teluk Lampung	Kawasan Waterfront City - Kawasan Pendidikan UNILA-ITERA-UIN RIL - Kawasan Industri Tegineneng

No.	Kabupaten/Kota	Potensi Alam	Potensi Infrastruktur
		- Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Pesawaran – Bandar Lampung - Kawasan Pertambangan dan Energi Lampung Selatan - Kawasan Pencadangan Konservasi Laut Lampung Selatan	- Kawasan sekitar bandara Radin Inten II - Kawasan Kota Baru Jatiagung - Kawasan Industri Lampung - Pengembangan Jalan Tol Lematang – Padang Cermin – SP. Kota Agung - Pembangunan Stasiun Relung Helok, Karangsari, Sabah Balau, dan Stasiun Bandara
Koridor Ekonomi Wilayah II :			
<i>Super Hub Agro Industri dan Culture Tourism</i>			
1.	Lampung Utara – Way Kanan	- KPPD Lampung Utara dan Way Kanan - Kawasan Pertambangan dan Energi Lampung Utara - Kawasan Suaka Margasatwa Gunung Raya Way Kanan - Kawasan Agrowisata Kopi Robusta - Way Tebabeng Eco Park (Eco Tourism dan Pariwisata)	- Rencana pelabuhan Dermaga Waduk Way Rarem di Kabupaten Lampung Utara; - Bendung Way Besai dan Bendungan Way Bumi Agung di Kabupaten Lampung Utara - Pengembangan Bandar Udara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan - Pengembangan Panas Bumi Way Umpu
2.	Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat – Mesuji	- KPPD Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji - Kawasan Pencadangan Konservasi Laut Tulang Bawang - Kawasan Pelestarian Alam Rawa Kandis Tulang Bawang Barat - Kawasan Pencadangan Konservasi Laut Tulang Bawang - Kawasan Pelestarian Alam Rawa Kandis Tulang Bawang Bara	- Kawasan industri Tulang Bawang - Kawasan industri Tulang Bawang Barat - Kawasan industri Mesuji - Dermaga Gunung Terang di Kabupaten Tulang Bawang Barat - Pelabuhan Pengumpan regional Pelabuhan Menggala di Kabupaten Tulang Bawang; - Pelabuhan perikanan pantai Teladas di Kabupaten Tulang Bawang; - Pengembangan Dermaga Gunung Terang - Pengembangan Pariwisata Terintegrasi Megow Pak

No.	Kabupaten/Kota	Potensi Alam	Potensi Infrastruktur
			yang melintasi sungai Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat – Mesuji
Koridor Ekonomi Wilayah III : Hub Ekonomi Biru, Branding Pariwisata Pesisir, Industri Berbasis Sumber Daya Alam			
1.	Tanggamus	- Kawasan Resapan Air Bendungan Batutegi - Kawasan Teluk Lampung - KPPD Pesisir Kota Agung - Kawasan konservasi kiluan - Destinasi Pariwisata Daerah Pantai Gigi Hiu, Kecamatan Kelumbayan	- Kawasan Industri Maritim - Kawasan geothermal ulu belu - Pelabuhan Perikanan - Sentra industri kelautan - Sentra industri pengolahan ikan - Jalan Tol Pelabuhan Panjang – Padang Cermin – Sp. Kota Agung - Pembangunan Dermaga di Pematang Sawa - Pembangunan Pelabuhan di Pekon Martanda dan Pekon Tampang Tua - Pengembangan Pelabuhan Laut Batu Balai, Kecamatan Kota Agung Timur
2.	Pringsewu		- Rencana jalur kereta api ganda (double track) Tanjung Karang – Pringsewu dan Rejosari-Pringsewu - Bagian dari pengembangan Jalan Tol Bandar Lampung (SS Natar) – Kota Agung – BTS. Bengkulu
3.	Pesisir Barat	- Kawasan Pariwisata Pesisir Barat	- Bandar Udara Muhamad Taufik Kiemas di Kabupaten Pesisir Barat - Sistem jaringan air bersih terdapat di Kabupaten Pesisir Barat. - Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Pisang - Pengembangan Kawasan Industri - Jalan Tol Bengkunt – Batas Provinsi Lampung - Pembangunan Jalan Lingkar Exit Tol Wilayah Barat

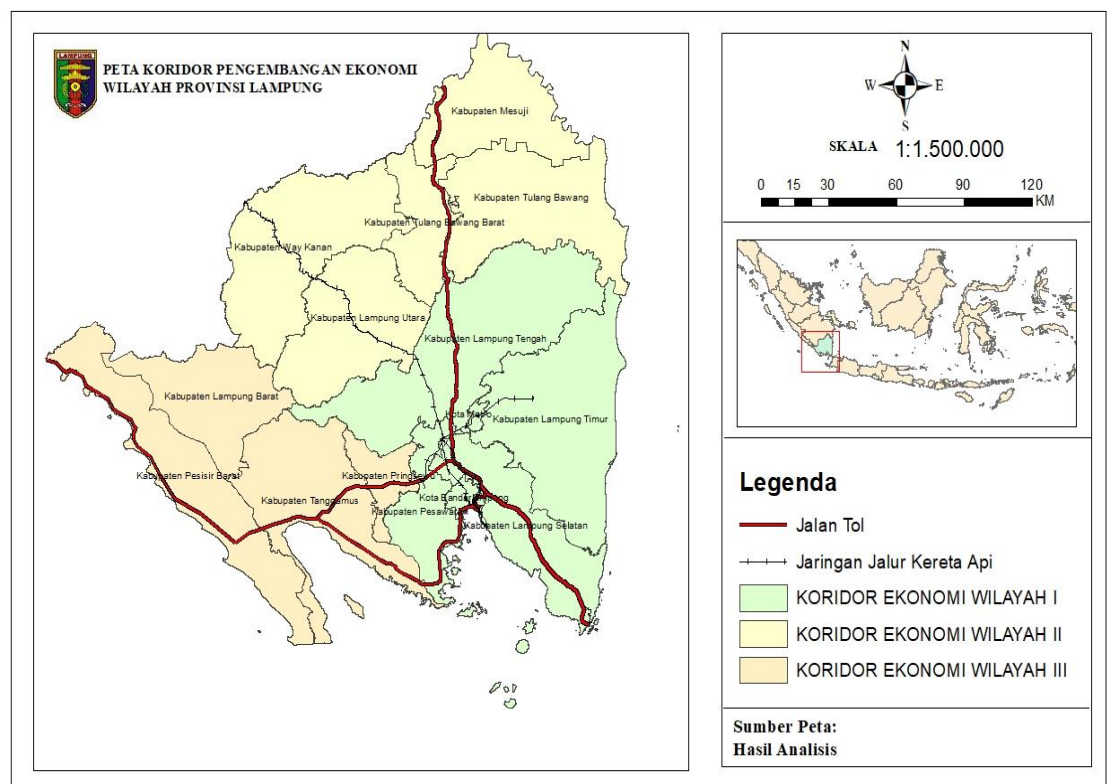
No.	Kabupaten/Kota	Potensi Alam	Potensi Infrastruktur
4.	Lampung Barat	- Kawasan Pariwisata Pesisir Barat pada KSPN Danau Ranau - Kawasan Geopark Suoh - Kawasan konservasi, dan pelestarian sumber daya alam	- Pelabuhan Dermaga Danau Ranau Lampung di Kabupaten Lampung Barat; - Rencana pelabuhan Heni Arong di Kabupaten Lampung Barat - Penyediaan Infrastruktur Hijau seperti Kebun Raya Liwa - Pengembangan Akses menuju Geopark - Revitalisasi dan Pengembangan Pelabuhan Dermaga Lumbok, sebagai pelabuhan pengumpan pada perairan Danau Ranau, yang melayani antar Propinsi dan Kabupaten maupun lokal - Penataan kawasan permukiman tradisional, guna meningkatkan nilai tambah KSPN Danau Ranau - Restorasi ekosistem taman TNBBS

Sumber : RTRW Provinsi & RTRW Kab/Kota

D. Arahkan Pembangunan Kebijakan Wilayah Per-Koridor

Pengembangan koridor wilayah merupakan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip menjalankan pertumbuhan suatu wilayah melalui pertumbuhan wilayah terdekat yang lebih maju sebagai pusat distribusi. Dapat dilihat pada RPJPN pertumbuhan wilayah berdasarkan koridor pulau dengan masing-masing potensinya. Selanjutnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dilakukan melalui pendekatan dengan menkoridorkan beberapa wilayah dengan karakteristik wilayah dan potensi wilayah terdekatnya.

Gambar 5. 7 Peta Koridor Pertumbuhan Ekonomi Kewilayahan



Sumber : Hasil Analisis

KORIDOR EKONOMI WILAYAH 1 :

Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Lampung Tengah

Hub Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Ketahanan Pangan, Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi

KORIDOR EKONOMI WILAYAH 2 :

Kabupaten Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji.

Super Hub Agro Industri dan *Culture Tourism*

KORIDOR EKONOMI WILAYAH 3 :

Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat.

Hub Ekonomi Biru, *Branding* Pariwisata Pesisir, Industri Berbasis SDA

Arahan Pembangunan Koridor Ekonomi Wilayah I

Fokus pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah Perkotaan Bandar Lampung :

1. Pendorong pertumbuhan wilayah Metropolitan Lampung Raya dimana Kota Bandar Lampung sebagai PKN dan wilayah-wilayah *interland* nya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
2. Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan infrastruktur yang terbangun antara lain Jalan Tol Sumatera.
3. Mendorong Pengembangan *multi-infrastructure backbone & maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas langsung Sumatra-Jawa (di Selat Sunda). (Trans Sumatra Railways; Jembatan Selat Sunda(JSS) sebagai interkoneksi antar Pulau dll)
4. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandar Lampung
5. Mendorong Pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik antara lain pengembangan simpul utama di Sumatra di Provinsi Lampung simpul domestik (Dumai Riau-Panjang Lampung).

6. Pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia, dan pembangunan sarana prasarana lainnya.
7. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi
8. Mendorong Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik.
9. Mendorong Peningkatan pembangunan jalan tol intra regional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan.
10. Mendorong Pengembangan jaringan kereta api barang ke pelabuhan serta pembangunan kereta api antar kota secara bertahap.
11. Mendorong Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Palembang- Muaraenim-Tarahan (peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA babaranjang, antara lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan sebidang yang memiliki traffic lalu lintas kendaraan jalan raya yang cukup tinggi)
12. Mendorong Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan termasuk pembangunan PLTN dan pengembangan sistem ketenagalistrikan cerdas (*smart grid*) sejalan dengan upaya transisi dari energi fosil menjadi energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan
13. Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah, termasuk pengembangan wilayah metropolitan dan sistem angkutan umum massal perkotaan Pringsewu-Pesawaran-Bandar Lampung- Lampung Tengah-Lampung Timur-Lampung Selatan.

Berdasarkan RTRW Provinsi Lampung jika dilihat dari arahan pola ruangnya WP I yang ditetapkan berdasarkan kajian kawasan metropolitan berdasarkan pusat kegiatan memberikan arahan pembangunan berupa :

1. Mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan Kota Bandar Lampung sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dan kawasan hinterlandnya yaitu

Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan, dengan mendorong terwujudnya aglomerasi Metropolitan Lampung Raya, Pengendalian ruang melalui penerapan RDTR OSS di seluruh Kabupaten-Kota se-Provinsi Lampung.

2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya berupa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Bandar Lampung mencakup Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.
3. Memantapkan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung di kawasan Kotabaru Lampung, dan mendorong kawasan tersebut menjadi pusat pertumbuhan baru.
4. Perwujudan Bandar Lampung sebagai *Coastal City*, dengan Pelabuhan Panjang sebagai *multi-infrastructure & maritim backbone*.
5. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan.
6. Rehabilitasi Pengamanan, Rehabilitasi wilayah sungai yang dalam kondisi tertekan (*stress*) WS Seputih Sekampung.
7. Optimalisasi pemanfaatan bendungan Marga Tiga (air baku, energi, irigasi, pengendalian banjir)
8. Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air : Bendung Gerak Jabung
9. Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) bersifat Regional dengan Teknologi pengolahan sampah yang Maju dan ramah lingkungan

Gambar 5. 8 Peta : Arahannya Pembangunan Koridor Ekonomi Wilayah I



Sumber : RTRW Provinsi Lampung & masukan Kabupaten-Kota

Arahannya Pembangunan Koridor Ekonomi Wilayah II

Fokus pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan simpul, memberikan arahan pembangunan berupa :

1. Mendorong Perwujudan Jaringan Transportasi Udara pengumpan di Bandar Udara Gatot Subroto Way Kanan. Perwujudan pengembangan Bandar Udara khusus prasarana militer TNI AU di Kabupaten Tulang Bawang, Bandar Udara khusus aktivitas perkebunan di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang
2. Mendorong Pengembangan *multi-infrastruktur backbone & maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas langsung Sumatra-Jawa (di Selat Sunda)
3. Mendorong penguatan pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Palembang- Muaraenim-Tarahan

(peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA babaranjang, antara lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan sebidang yang memiliki traffic lalu lintas kendaraan jalan raya yang cukup tinggi)

4. Pelabuhan perdagangan di Kabupaten Mesuji
5. Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air berupa pengembangan prasarana air baku berupa *Broncaptering* di Kabupaten Way Kanan
6. Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir di Bendungan Way Rarem Kabupaten Lampung Utara
7. Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kawasan Ekonomi Mesuji-Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat – Mesuji,
8. Pengembangan jaringan irigasi yang memanfaatkan bendungan Tiga Dihaji – Sumatera Selatan

Gambar 5. 9 Peta : Arahan Pembangunan Koridor Ekonomi Wilayah II



Sumber : RTRW Provinsi Lampung & masukan Kabupaten-Kota

Arahan Pembangunan Koridor Ekonomi Wilayah III

Arahan Pembangunan Koridor Ekonomi Wilayah III ini berdasarkan isu strategis yang ada pada bagian Barat Provinsi Lampung dimana Sebagai Kawasan Pariwisata dengan isu strategis kawasan konservasi. Sehingga pada Koridor III sebagai berikut.

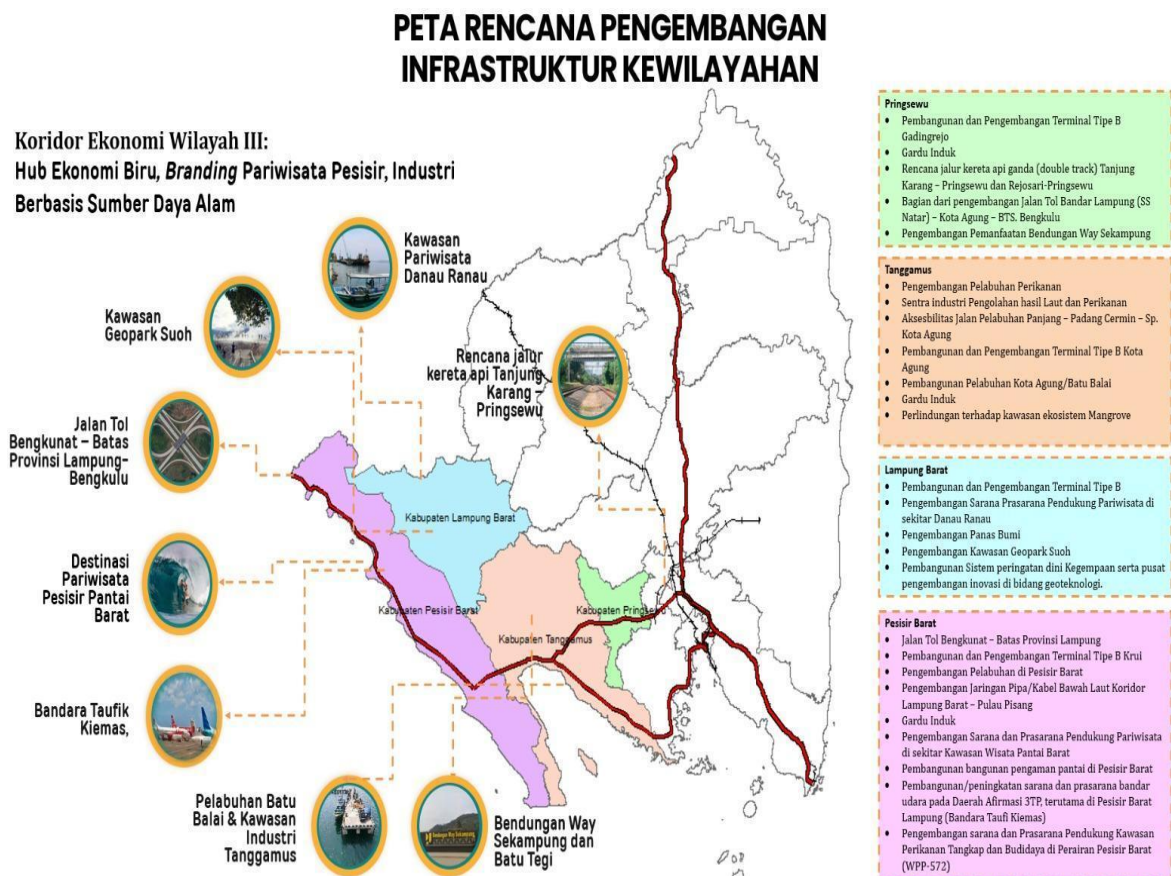
1. Kabupaten Pringsewu sebagai Mandatory Pangan Nasional
2. Kabupaten Tanggamus dengan kawasan konservasi utama yaitu Kawasan Resapan Air Bendungan Batutegi.
3. Kabupaten Pesisir Barat yaitu Kawasan Pariwisata Pesisir Barat dan menjadi salah satu simpul strategis yaitu Bandar Udara Muhammad Taufik Kiemas di Kabupaten Pesisir Barat.
4. Pada Klaster 3 yaitu Kabupaten Lampung Barat dengan kawasan Konservasi utama yaitu Kawasan Geopark Suoh dan KSPN Danau Ranau.

Fokus pembangunan Koridor Ekonomi Wilayah III yang ditetapkan berdasarkan kajian isu strategis berupa pariwisata dan konservasi memberikan arahan pembangunan berupa:

1. Percepatan pengembangan dan operasionalisasi kawasan strategis sebagai *engine of growth* salah satunya Kabupaten Tanggamus, dan kawasan baru lainnya serta mendorong penerapan prinsip Eco-Industry Park.
2. Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah 3T (Tertinggal, Terpencil, Terluar) khususnya pada kepulauan Pesisir Barat
3. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir di sepanjang pantai barat sumatera
4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pesisir Pantai, melalui penerapan RDTR OSS di wilayah-wilayah cepat tumbuh.
5. Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat Danau Ranau di Kabupaten Lampung Barat
6. Perwujudan kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di 3 Kabupaten WP III dan Suaka Margasatwa Gunung Raya Lampung Barat.

7. Perwujudan Taman Wisata Alam Laut Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat.
8. Perwujudan Kawasan Cagar Alam Laut Barisan Selatan di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus
9. Perwujudan Kawasan Pariwisata KSPN Danau Ranau, DPD Teluk Lampung bagian Tanggamus, DPD Pesisir Pantai Barat Lampung
10. Perwujudan Sistem Transportasi Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus.
11. Perwujudan Sistem Jaringan Air Bersih di Kabupaten Pesisir Barat
12. Optimalisasi pemanfaatan Bendungan Way Sekampung (air baku, energi, irigasi, pengendalian banjir)
13. Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air : Way Umpu, Way Giham, Air Ringkih

Gambar 5. 10 Peta : Arahkan Pembangunan Koridor Ekonomi Wilayah III



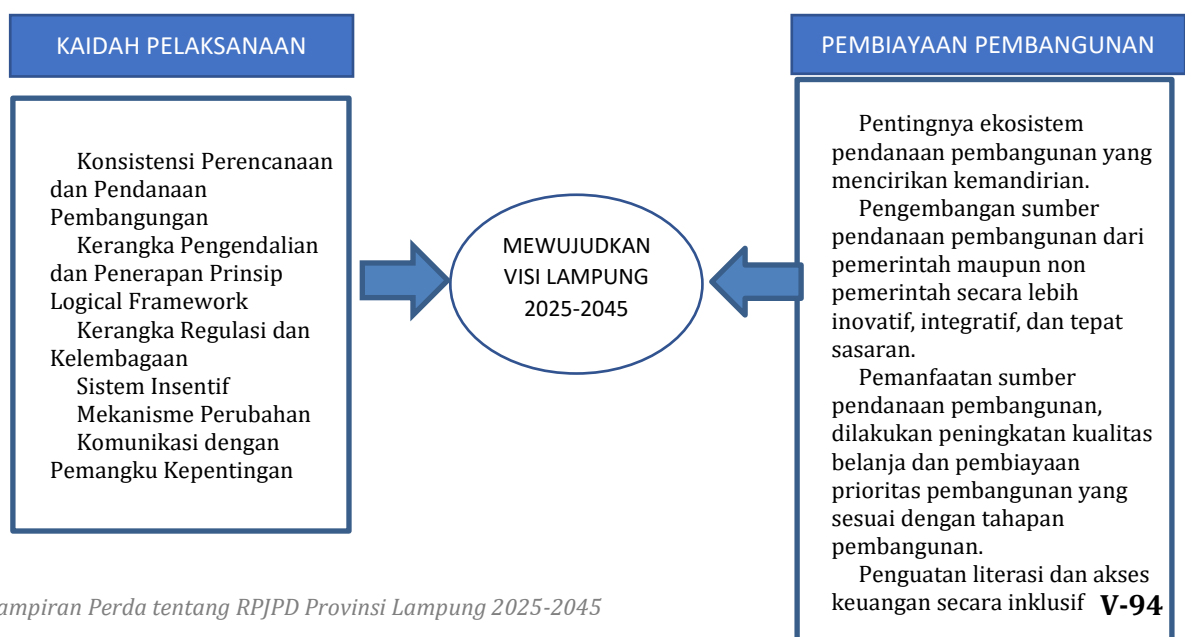
Sumber : RTRW Provinsi Lampung & masukan Kabupaten-Kota

5.4 KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN

Misi ke- 8 : Kestinambungan Pembangunan

Kestinambungan pembangunan penting dalam menjaga konsistensi antar waktu dan antar periode pemerintahan, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang memerlukan penguatan implementasi dan pembiayaan pembangunan. Guna mewujudkan kestinambungan pembangunan, disiapkan **kaidah pelaksanaan yang memastikan kolaborasi semua pemangku kepentingan pembangunan, disertai manajemen pembangunan berbasis risiko.** Dengan pemangku kepentingan yang beragam, diperlukan pendekatan proses dan pendekatan substansi perencanaan yang tepat. Selanjutnya, **dukungan pembiayaan yang memadai dan inovatif serta sektor keuangan yang maju, sangat penting untuk keberhasilan pembangunan.** Hal tersebut memungkinkan investasi produktif di berbagai sektor, antara lain infrastruktur, pendidikan, riset dan inovasi sebagai motor pertumbuhan. Pembiayaan inovatif mengatasi hambatan ketersediaan sumber dana, sementara investasi, khususnya investasi swasta yang juga mentransfer penguasaan teknologi dan pengetahuan yang lebih maju. Selain itu, sektor keuangan yang kuat mendukung akses masyarakat dan usaha kecil menengah terhadap layanan keuangan, mendorong pertumbuhan inklusif dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Gambar 5. 11 Kestinambungan Pembangunan



A. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan mencakup : 1) konsistensi perencanaan dan pendanaan, 2) kerangka pengendalian, 3) kerangka regulasi dan kelembagaan, 4) sistem insentif, dan 5) mekanisme perubahan, serta 6) komunikasi dan koordinasi antar pelaku pembangunan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 sehingga berkontribusi terhadap RPJP Nasional 2025-2045. Penerapan kaidah pelaksanaan akan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang terpadu dan handal.

1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan

Diperlukan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta kesediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku non pemerintah.

Pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJPD, RPJM, dan RKPD, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan, perlu dilakukan penguatan pendanaan pembangunan dengan mengoptimalkan pemanfaatan berbagai alternatif pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif,

integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas dalam belanja daerah, pemerintah juga dapat memanfaatkan beberapa skema pendanaan pembangunan yang dapat berupa dari pinjaman daerah, hibah, ataupun obligasi daerah untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan perkuatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan nasional sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Perkuatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

2. Kerangka Pengendalian dan penerapan prinsip Kerangka Kerja Logis (*Logical Framework*)

Dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Nasional melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah yang merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, diperlukan keselarasan RPJPD antara RPJPD Pemerintah Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Lampung dan RPJPN Tahun 2025-2045. Dengan memperhatikan Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024; maka untuk memastikan pencapaian Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045 sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (selanjutnya disebut RPJPN Tahun 2025-2045), Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Lampung dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Adapun penyelarasan tersebut bertujuan untuk :

1. Menciptakan integrasi, keselarasan, konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang di Tingkat Pusat dan Daerah.
2. Mewujudkan RPJPD Kabupaten/Kota yang harmonis dan selaras dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN Tahun 2025-2045, terutama pada aspek periodisasi, muatan materi dan sistematika penulisan dokumen perencanaan.
3. Menjamin sinkronisasi kebijakan di dalam RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN Tahun 2025-2045.
4. Menjamin terciptanya dukungan perencanaan daerah Kabupaten/Kota terhadap pencapaian visi, misi, arah kebijakan pembangunan dan indikator utama pembangunan provinsi dan nasional.
5. Memastikan ruang yang memadai bagi pemerintah Kabupaten/Kota dan provinsi untuk merencanakan dan menjalankan pembangunan sesuai prioritas pembangunan dan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, **penerapan prinsip Kerangka Kerja Logis (*Logical Framework*)** dalam perencanaan pembangunan. Penyusunan RPJPD Lampung dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan memiliki korelasi dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung akan menjadi alat bantu dalam penilaian hasil pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan. Kerangka Kerja Logis akan menggambarkan hubungan antara *input-process-output-outcome-impact*. Sasaran utama pembangunan dalam RPJPD yang bersifat *impact-outcome*, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya,

Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan nasional. Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan nasional ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan. Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan nasional terkait dalam aspek lokasi dan karakteristik wilayah.

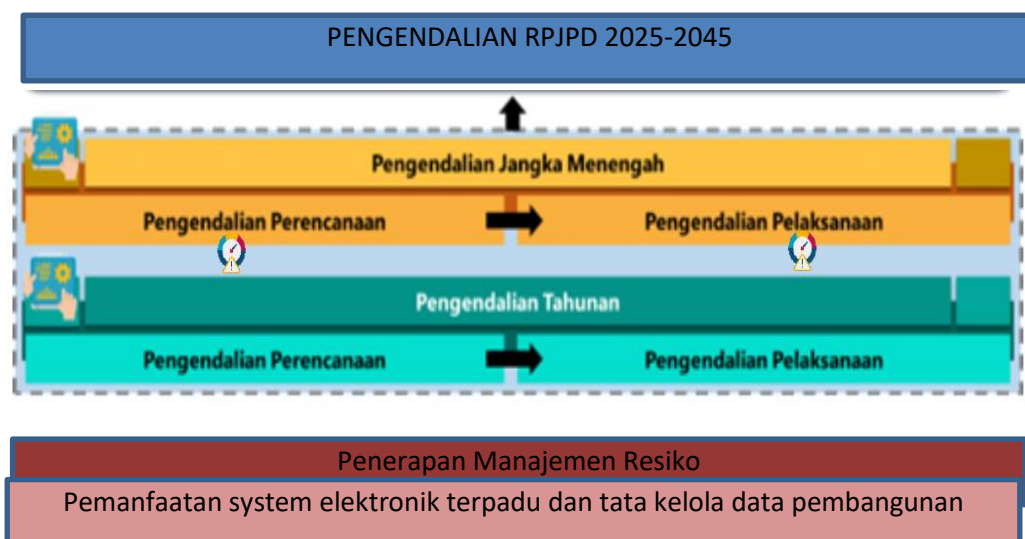
Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant*, dan *Time-Bound* (SMART), sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Guna memastikan kesinambungan dan keselarasan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; secara *imperative* indikator dalam RPJP Nasional menjadi acuan dan bagian dari RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk selanjutnya, sasaran yang akan ditetapkan dalam RPJMD, selain menerjemahkan tujuan dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan (Pasal 168 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Penerapan **prinsip KKL akan diaktualisasikan dalam wujud dokumen penyusunan rencana pembangunan daerah jangka menengah dan tahunan hingga ke level perangkat daerah** selaku pengampu teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk didalamnya penyusunan rencana peta jalan (atau istilah lainnya), hingga desain proyek dari

program, kegiatan dan proyek prioritas; secara lintas sektor maupun antar jenjang pemerintahan, sesuai dengan karakteristik kewilayahan masing-masing daerah

Lebih lanjut, **dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah dan nasional, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.** Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Kerangka pengendalian RPJPD Tahun 2025-2045 disajikan sebagaimana gambar berikut :

Gambar 5. 12 Kerangka Pengendalian RPJPD Tahun 2025-2045



Pengendalian RPJPD dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Gubernur dan pemerintah pusat. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan nasional terbagi menjadi 2 (dua) bagian :

- a. **Pengendalian perencanaan.** Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD, keselarasan dokumen RPJMD Kabupaten/Kota dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN, dan RPJMD ke dokumen rencana strategis Perangkat Daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan nasional termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD, keselarasan dokumen RKPD Kabupaten/Kota dengan dokumen RKPD Provinsi dan RKP nasional, serta dokumen RKPD ke dokumen Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

- b. **Pengendalian pelaksanaan.** Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek Prioritas Pembangunan Daerah dan Nasional; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah dan kontribusi terhadap nasional; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Daerah dan Nasional.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja pemerintah daerah dan perangkat terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. **Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.** Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengkoordinasikan pengendalian lintas dan internal.

3. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan tegas meletakkan peran penting pada RPJPN sebagai acuan dalam penyusunan daftar rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional. Selanjutnya, Pasal 18 Undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa peraturan perundang-undangan menjadi bagian yang akan menentukan keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan yang direncanakan.

Berbagai dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan negara sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan dalam pembentukan regulasi. Demikian pula adanya beberapa hambatan Regulasi/peraturan perundang-undangan yang multi tafsir; berpotensi konflik; tumpang tindih; tidak harmonis/tidak sinkron; tidak adanya aturan pelaksanaannya; tidak konsisten ; dan menimbulkan beban yang tidak perlu, baik terhadap kelompok sasaran maupun kelompok yang terkena dampak; memerlukan evaluasi dan rekonstruksi. Oleh karena itu, dinamika tersebut perlu diwadahi dalam suatu sistem perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan dapat mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak dan berbagai bidang pembangunan, khususnya dari sisi regulasi. Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan kerangka regulasi guna memastikan pembangunan terjadi secara berkelanjutan.

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang disusun dalam sistem perencanaan nasional, dimana perencanaan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan tersebut. Regulasi akan menjadi sarana untuk mengoperasionalkan kebijakan pemerintah, atau bentuk formal suatu kebijakan agar mempunyai kekuatan untuk dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan ; yang dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Kerangka Regulasi **dimaksudkan** untuk memberi arahan dan landasan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara dan pembangunan, dengan muatan indikasi atau arahan kebijakan mengenai rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan dalam kurun waktu tertentu. Dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran serta berbagai dampak lain yang sangat signifikan bagi masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan, maka proses penanganan kerangka regulasi harus dilakukan dengan baik sejak proses perencanaan. Di samping itu, pengelolaan kerangka regulasi sejak proses perencanaan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan sehingga memungkinkan setiap tindakan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.

Selanjutnya, sesuai Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa “RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”. Ke depan, dalam rangka mengimplementasikan visi jangka panjang RPJPN Tahun 2025-2045 dan dan Visi RPJPD Tahun 2025-2045, maka pembentukan instrumen hukum dalam pembangunan daerah **perlu dituangkan pada tahapan pembangunan jangka menengah daerah**, dengan mengadopsi strategi yang bersifat

harmonisasi dan transformatif serta sejalan dengan koridor penyelenggaraan otonomi daerah, pelaksanaan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maupun materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat luasnya ruang lingkup pembangunan yang direncanakan di dalam RPJPD Tahun 2025-2045, perlu memilah sektor-sektor tertentu yang akan dikaji dan proyeksi kebutuhan regulasinya. Pemilahan sektor dilakukan dengan mengidentifikasi **sektor prioritas** yang selaras dengan visi yang ditetapkan di dalam RPJPN dan RPJPD serta RPJMN dan RPJMD.

Demikian pula dengan **peran kelembagaan dalam proses pembangunan**. Kelembagaan yang baik yang juga menjadi kunci sukses dalam kelancaran dan berjalannya pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suatu kelembagaan harus dapat membaca dan memantau segala aktivitas pembangunan baik secara global, nasional maupun regional yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pembentukan suatu kelembagaan harus sangat diperhatikan. Kelengkapan dan kesiapan suatu kelompok masyarakat harus dibangun secara matang, antisipatif dan adaptif agar tidak menjadi penghambat dan menimbulkan gesekan kepentingan pada saat menjalankan tugas suatu lembaga atau organisasi dalam proses pembangunan. Sejalan dengan RPJPN dan RPJPD Tahun 2025-2045, pembentukan kelembagaan perlu diarahkan pada pencapaian visi pembangunan, yang diikuti dengan penataan proses bisnis yang efektif dan efisien; yang sejalan dengan prinsip-prinsip : (i) mengacu pada desentralisasi dan otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan, (ii) adanya keterkaitan, kontribusi dan peran dalam mencapai tujuan, (iii) mengutamakan tugas dan fungsi sesuai proses bisnis, (iv) transparan, (v) mendukung perwujudan rencana kerja yang diamanatkan dalam dokumen perencanaan, (vi) didasarkan pada hasil evaluasi kelembagaan. Lebih lanjut, peran kelembagaan perlu dikolaborasikan dengan tetap bertanggung jawab sesuai struktur organisasi dan kewenangan yang jelas, sesuai dengan regulasi. Kelembagaan yang efektif dan efisien akan sangat mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

4. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja aparatur terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan penganggaran, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat-daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

5. Mekanisme Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Provinsi Lampung (RTRW) Tahun 2023-2043. Selanjutnya, Visi, Misi Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok dalam RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 tentunya menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten akan dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah.

Oleh karenanya, Pengendalian dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 akan menjadi instrumen yang penting dan menjadi kunci dalam proses **mitigasi risiko**,

sehingga dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi acuan pembangunan tetap adaptif.

Dalam hal terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) seperti bencana alam, guncangan geopolitik dan geoekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, dan atau pemekaran daerah, perubahan regulasi dan kebijakan nasional; maka RPJPD dapat dilakukan perubahannya, atau target RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Perubahan dan pemutakhiran tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Langkah-langkah pemutakhiran sebagaimana dimaksud tentunya ditempuh dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan.

6. Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan dalam proses perencanaan

Komunikasi dengan pemangku kepentingan sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan; baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Komunikasi dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan melalui pendekatan proses perencanaan, yaitu: teknokratik, partisipatif, politik dan pendekatan atas-bawah (*top-down*) serta bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang terdiri dari komponen pemerintah dan non pemerintah. Keterlibatan pemerintah pusat, perangkat daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar dapat memberikan masukan terhadap arah kebijakan

pembangunan. Komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Pendekatan **pendekatan politis** dilaksanakan dengan melibatkan lembaga DPRD dalam proses perencanaan pembangunan, melalui tahap perencanaan awal, pembahasan dan kesepakatan bersama hingga penetapan rencana pembangunan menjadi peraturan perundangan. **Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*)** proses perencanaan yang dilaksanakan untuk memperkuat keselarasan rencana pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang di tingkat pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam forum-forum musyawarah dan koordinasi pembangunan.

B. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Upaya untuk mewujudkan Visi Lampung 2045 dan Indonesia Emas 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan perlu didukung dengan kebijakan pendanaan pembangunan yang searah. Untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta kesediaan pendanaan pembangunan dan pemanfaatannya secara optimal, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang inovatif,

hingga optimalisasi peran sektor keuangan pemerintah maupun non pemerintah.

Selain melakukan efisiensi dan peningkatan kualitas belanja daerah, pendanaan pembangunan juga dapat ditempuh oleh pemerintah dengan memanfaatkan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pemerintah lainnya dan peran swasta. Untuk mewujudkan pembiayaan yang memadai beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain: peningkatan inovasi sumber pendanaan pembangunan seperti penguatan dan perluasan KPBU; pemanfaatan hibah dengan terarah; kerjasama antar daerah maupun kerjasama bilateral; peningkatan produktivitas asset, penerbitan obligasi daerah; kesertaan daerah dalam investasi strategis, atau pemanfaatan utang pemerintah yang lebih produktif dan berhati-hati; yang ditujukan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

Selanjutnya optimalisasi peran sektor keuangan secara inklusif juga perlu dilanjutkan yang diarahkan pada: (i) penguatan peran pemerintah daerah dalam intermediasi sektor keuangan utamanya peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran kredit/pembiayaan ke berbagai wilayah dan sektor prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk kepada UMKM dan pendampingannya, peningkatan distribusi dan pengelolaan penghimpunan dana masyarakat di luar perbankan; (ii) peningkatan inklusi keuangan yang meliputi: peningkatan edukasi dan sosialisasi keuangan, pengembangan infrastruktur, serta penguatan inovasi dan pemanfaatan teknologi keuangan untuk lebih menjangkau masyarakat, serta peningkatan akses keuangan, terutama pada wilayah dan kelompok masyarakat yang belum terlayani jasa keuangan formal, termasuk peningkatan peran pemerintah daerah dalam mendukung inklusi keuangan; (iii) penguatan, inovasi, dan pemanfaatan digitalisasi keuangan; serta (iv) perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan.

Tabel 5. 15 Arah Kebijakan Misi ke-8

ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-8 : Kesyambungan Pembangunan			
Tahap I (2025 - 2029)	Tahap II (2030 - 2034)	Tahap III (2035 - 2039)	Tahap IV (2040 - 2045)
• Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah termasuk Provinsi dan Kab/Kota • Penguatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional • Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko • Penyempurnaan instrumen kebijakan dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber pendanaan pembangunan non pemerintah (non APBD dan Non APBN) yang lebih adaptif • Inovasi dan penetapan project investasi strategis jangka menengah dan jangka panjang • Promosi pemerintah daerah kepada publik dan Eksplorasi mitra pendanaan pembangunan • Percepatan pembangunan sistem Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah yang terintegrasi dengan penganggaran Keselarasan pembangunan pusat-daerah secara konsisten • Upaya lanjutan percepatan peran pemerintah daerah	• Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance • Percepatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional • Percepatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko • Terbentuknya ekosistem sumber pendanaan pembangunan alternatif dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, transparan, aman dan terpercaya. • Implementasi kesertaan masyarakat dan swasta dalam investasi project strategis skala daerah dan nasional secara prudent dan saling menguntungkan. • Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah menjadi instrumen untuk mitigasi perencanaan pembangunan	• Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional • Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan • Sistem pengelolaan sumber pendanaan pembangunan alternative semakin handal untuk mendukung kemandirian fiskal • Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah menjadi instrumen untuk mitigasi perencanaan pembangunan • Keselarasan pembangunan pusat-daerah secara konsisten • Akses sektor Keuangan yang inklusif	• Akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional dengan predikat kinerja tinggi • Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko yang handal dan berkelanjutan • Terwujudnya kemandirian fiskal daerah yang tinggi • Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah menjadi instrumen untuk perencanaan pembangunan selanjutnya • Keselarasan pembangunan pusat-daerah secara konsisten • Peran sektor Keuangan semakin mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-8 : Kestinambungan Pembangunan			
Tahap I (2025 - 2029)	Tahap II (2030 - 2034)	Tahap III (2035 - 2039)	Tahap IV (2040 - 2045)
dalam intermediasi sektor keuangan pada sektor prioritas	• Keselarasan pembangunan pusat-daerah secara konsisten • Literasi masyarakat pada sektor keuangan semakin optimal		



RANCANGAN AKHIR RPJPD
TAHUN 2025-2045

BAB VI

PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2045 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan nasional merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

RPJPD ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan menjadi pedoman bagi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan Visi “***Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan***” perlu didukung oleh : (1) Stabilitas trantibmas yang terus dijaga; (2) Keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan dan kepemimpinan daerah secara estafet ; (3) Pemerataan pembangunan dan peningkatan kapasitas ekonomi daerah; serta pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (fisik, skill, karakter produktif dan disiplin serta penguasaan iptek); (4) Peran aktif dari masyarakat dan seluruh komponen pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, perencanaan yang baik tetap membutuhkan kemampuan eksekusi yang baik (*smart execution and smart leadership*) dari kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*).

Manajemen Risiko

Pentingnya Manajemen Risiko dalam paradigma pembangunan tidak bisa diabaikan. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Manajemen Risiko adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Manajemen Risiko diperlukan untuk mengawal dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai rencana, jadwal, dan tujuannya agar tercapai target (*outcome*) yang telah ditentukan tanpa ada kendala yang berarti.

Dengan langkah-langkah seperti identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, serta pemantauan risiko, maka akan meminimalisir deviasi dan mengoptimalkan manfaat lainnya seperti risiko finansial maupun risiko lingkungan hidup dan emisi karbon agar pembangunan tidak merusak ekosistem. Dalam tinjauan pembangunan jangka panjang, Manajemen Risiko ini menjadi penting untuk : 1) memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana dan tujuannya, 2) meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan 3) menghasilkan kualitas dan kuantitas Pembangunan Daerah yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 serta Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, yang dimaksud Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan Entitas MRPN (Kementrian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha, dan lainnya) sehubungan adanya Risiko Pembangunan Nasional. Risiko Pembangunan Nasional adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran Pembangunan Nasional. Penerapan Manajemen Risiko dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional, sekaligus menjamin terkendalinya Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Sebagaimana MRPN, perencanaan atas pelaksanaan Pembangunan di daerah juga harus didukung penerapan Manajemen Risiko Pembangunan guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Daerah dalam setiap periode Perencanaan Pembangunan, yang dilaksanakan secara kolaboratif konstruktif, lintas sektoral dan berkesinambungan oleh Entitas MRPN yang berada di daerah. Manajemen Risiko Pembangunan Daerah diselenggarakan dengan tujuan :

- Meningkatkan pencapaian sasaran Pembangunan Daerah;
- Mengurangi deviasi terhadap perwujudan Visi, serta pencapaian Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan di daerah;
- Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan berkembangnya inovasi pelayanan publik.

Sebagai upaya memperkuat substansi dan penerapan Manajemen Risiko Pembangunan di Daerah maka RPJPD Provinsi Lampung tahun 2025-2045 perlu juga diperkuat dengan kerangka regulasi dan kebijakan daerah yang mengacu pada MRPN. Hal ini dilakukan guna menjamin perwujudan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan di Provinsi Lampung yang telah ditetapkan untuk periode 20 tahun mendatang, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian RPJPN. Berkenaan hal tersebut, Manajemen Risiko untuk Pembangunan Daerah Provinsi Lampung akan ditindaklanjuti melalui penerapan Manajemen Risiko pada setiap tahapan perencanaan baik pada periode jangka menengah maupun tahunan.